



Pemerintah
Kabupaten Luwu

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Berakuntabel Kompeten
Harmonisoyal daptifkolaboratif

**LUWU
CEMERLANG
2045**

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2027





BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, berkesinambungan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah, diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2027;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, dinamika perkembangan kondisi strategis, aspirasi masyarakat, serta untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2027 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2027, Rencana Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
18. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk berpedoman pada visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan Daerah untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini:
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
 - b. secara normatif, menjadi dasar KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2027.

BAB III
PELAKSANAAN RKPD
Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2027 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab iii : kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab v : rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. bab vi : kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. bab vii : penutup.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
 - b. pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS Daerah tahun anggaran 2027; dan
 - c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2027.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi.

- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Bappelitbangda menyampaikan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah.
- (5) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan Daerah yang meliputi Renja Perangkat Daerah tahun 2027 dan RKPD tahun 2027.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah dan RKPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan pengendalian dan evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

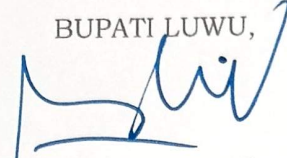
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Juni 2026

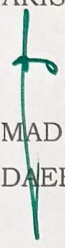
BUPATI LUWU,



PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU



MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR ..8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah hendaknya bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan). Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Seiring dengan berkembangnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif.

Berangkat dari hal tersebut, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk rencana pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk rencana pembangunan 5 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun RKPD Tahun 2027 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun. Disamping itu penyusunan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi terhadap target dan

capaian pembangunan tahun sebelumnya serta dinamika dampak sosial dan ekonomi.

Capaian indikator ekonomi makro Kabupaten Luwu tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut Pada tahun 2025 ekonomi Kabupaten Luwu tumbuh sebesar 7,43 persen lebih tinggi dari tahun 2024 yang hanya sebesar 4,36 persen dan termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah sekitar yang setara, hal ini secara umum didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi pada sejumlah lapangan usaha utama, peningkatan aktivitas konsumsi dan mobilitas Masyarakat serta stabilitas harga yang relatif terjaga.

Inflasi yang merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, inflasi Kabupaten Luwu dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Palopo dimana pada tahun 2025 adalah sebesar 1,55.

Indeks gini Kabupaten Luwu pada tahun 2025 sebesar 0,331 meningkat sebesar 0,012 dari tahun 2024 yang sebesar 0,319 atau termasuk dalam distribusi pengeluaran masyarakat kategori sedang, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang pada tahun 2025 sebesar 0,363, dan apabila dibandingkan dengan kawasan Palopo dan sekitarnya indeks gini Kabupaten Luwu berada di posisi ketiga terendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Luwu semakin merata.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2025 capaian nilai IPM Kabupaten Luwu telah mengalami kenaikan sebesar 0,80 poin yaitu sebesar 74,66 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya sebesar 73,86 persen.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 sebesar 10,97 persen mengalami penurunan sebesar 0,73 persen jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 11,70 persen, namun capaian tersebut masih berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 7,60 persen dan capaian Nasional sebesar 8,47 persen dan apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dengan wilayah sekitar pada tahun 2025 Kabupaten Luwu berada pada posisi pertama.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu pada tahun 2025 sebesar 3,71 persen, capaian tersebut menurun sebesar 0,43 persen dibandingkan dengan Tahun 2024, penurunan didorong oleh beberapa faktor antara lain peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang berkontribusi positif

dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi yang membantu menciptakan lapangan kerja baru di kabupaten Luwu, serta peningkatan kinerja pemerintah daerah termasuk efektivitas program ketenagakerjaan yang berdampak pada penurunan angka pengangguran.

Angka PDRB perkapita Kabupaten Luwu atas harga berlaku pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 63,45 Juta, meskipun PDRB per kapita kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir terus meningkat, namun capaian tersebut masih di bawah provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, pada tahun 2025 PDRB per kapita ADHB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 78,74 juta rupiah per kapita per tahun dan Nasional sebesar 83,74 juta rupiah per kapita per tahun.

Dokumen RKPD disusun untuk menjamin keselarasan antara prioritas serta sasaran pembangunan dan program/ kegiatan tahunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga RKPD disusun dengan mengacu pada rencana kerja dan program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bagi kabupaten/kota.

Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027 merupakan penjabaran Tahun ke-3 (tiga) dalam pelaksanaan RPJMD Kab. Luwu, sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 telah mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah.

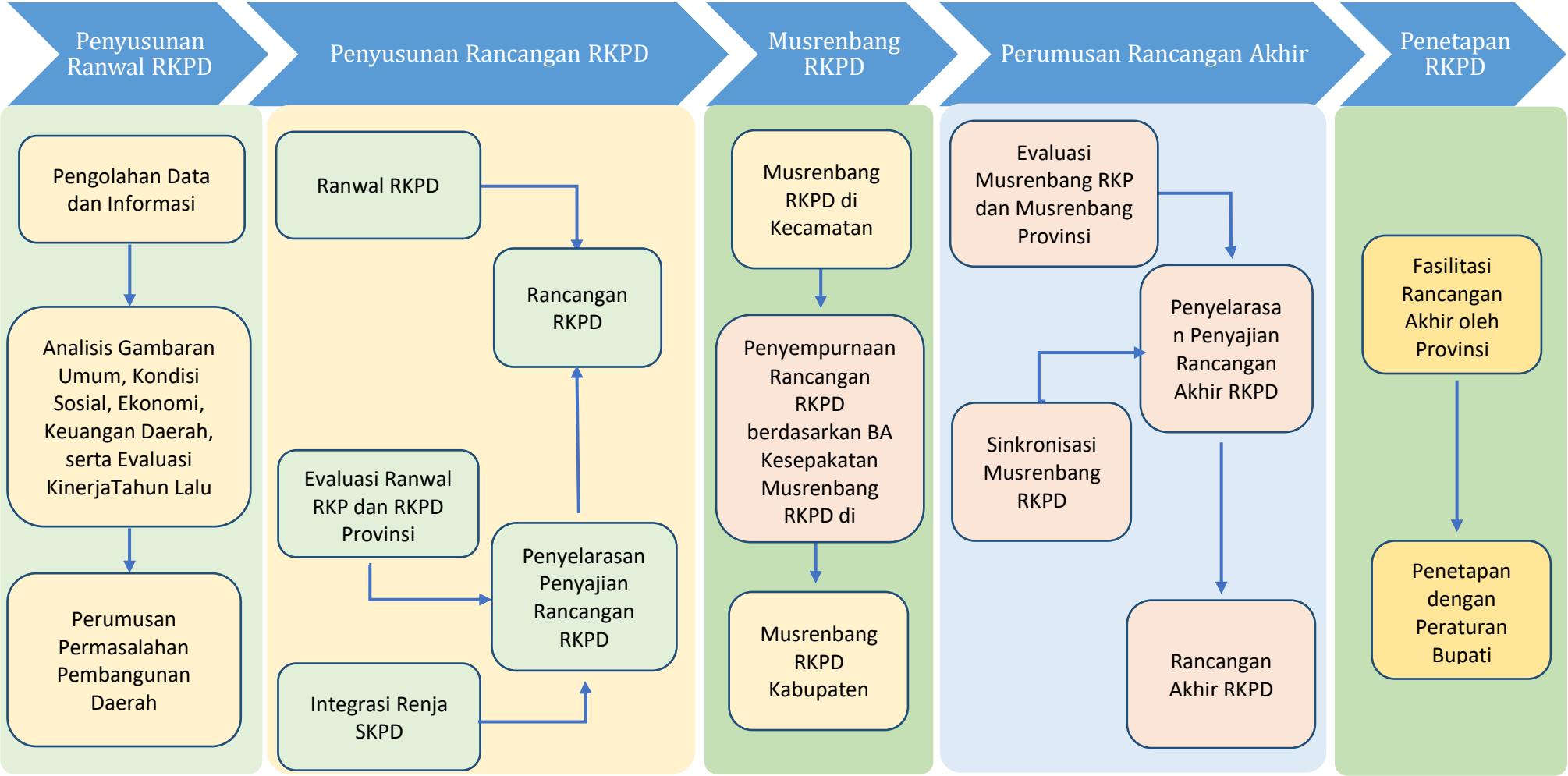
RKPD Kabupaten Luwu telah mempedomani RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/Program Strategis Nasional. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah teknokratik, partisipatif, politik, serta *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan tersebut diimplementasikan melalui: (1) penelaahan terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Luwu, kebijakan pemerintah pusat pada RKP, kebijakan pemerintah provinsi pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Luwu; (2) melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan; (3) menyelaraskan hasil perencanaan dalam musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional; (4) menajamkan program prioritas pembangunan daerah; (5) mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, serta (6) mempertimbangkan dimensi tata ruang daerah.

Sesuai dengan peraturan perundangan, penyusunan RKPD tahun 2027 dilakukan dengan tahapan penyusunan rancangan awal, penyusunan

rancangan, musrenbang RKPD (baik tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan), penyusunan rancangan akhir, fasilitasi oleh Provinsi Sulawesi Selatan, penetapan RKPD dan klarifikasi peraturan bupati tentang RKPD. Selengkapnya, bagan alur tahapan penyusunan RKPD adalah sebagaimana pada bagan berikut ini.

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Gambar 1.1.
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah.

Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui proses *E-Planning* dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Dalam upaya memastikan pencapaian target pembangunan daerah dilakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara berkala.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 Tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024

- Rencana Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu tahun 2011 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 Nomor 1).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027 merupakan hasil penajaman program prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu yang dipetakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 untuk dijadikan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyempurnaan renja perangkat daerah. RKPD juga menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS merupakan bahan dalam pembahasan antara pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu untuk disepakati sebagai rancangan APBD Kabupaten Luwu.

RKPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas dan program kerja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Perlunya Penajaman program prioritas daerah yang dimuat dalam RKPD.

Dokumen RKPD disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang bertujuan untuk :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027 yang selaras dengan target RPJMD;
2. Menjabarkan program, kegiatan, dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan prioritas pembangunan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mewujudkan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
5. Menjadi dasar pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Pembangunan daerah Tahun 2027.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027 disajikan sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menguraikan kondisi daerah dan gambaran pembangunan daerah dari berbagai aspek, meliputi Kondisi Umum Daerah, Evaluasi capaian kinerja daerah berupa IKU dan IKD, Evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan; Evaluasi capaian SPM; Rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 dan Inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027, yang telah diselaraskan dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi, dan kebijakan nasional/ daerah lainnya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengemukakan kerangka pendanaan tahun 2027 serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

Kabupaten Luwu adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang ber Ibukota di Belopa dan diresmikan sejak 13 Februari 2016. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten terluas yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu merupakan kabupaten ke- 4 terluas berdasarkan data BPS tahun 2023. Dengan potensi wilayah yang luas ini, Kabupaten Luwu telah menjadi salah satu penyanggah pangan dan energi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi sekitarnya sekaligus menjadi salah satu kabupaten penghasil mineral bumi untuk suplai kebutuhan nasional dan global.

Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah 3.000,25 km². Kecamatan Latimojong menjadi kecamatan dengan wilayah terluas yakni 467,75 km² atau 15,59 persen dari total luas wilayah sedangkan Kecamatan Belopa Utara merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni hanya seluas 34,73 km² atau 1,16 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Luwu.

Kabupaten Luwu diapit oleh enam Kabupaten, satu Kota dan Teluk. Letak geografis wilayah Kabupaten Luwu menghampar antara 2°3'45" - 3°37'30" Lintang Selatan dan 119°15" - 121°43'11" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Luwu secara geografis dikelilingi oleh struktur morfologi wilayah yang lengkap mulai dari dataran tinggi dan pegunungan seluas 63,99% dari total wilayah, dataran rendah sampai

ke pesisir mencakup 36.01 % dari total wilayah dan garis pantai yang cukup panjang di Teluk Bone yakni +/-135 km. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Luwu dideskripsikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten Wajo Dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Selain itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Keberadaan infrastruktur tersebut diperkuat dengan adanya pengembangan pelabuhan di Taddette, Ulo-Ulo, dan Balambang. Selain itu, Bandara Bua di Kabupaten Luwu terus mengalami pengembangan kapasitasnya dari tahun ke tahun. Semua ini memberikan kontribusi signifikan terhadap aksesibilitas dan konektivitas Kabupaten Luwu dengan wilayah-wilayah sekitarnya.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Luwu



Sumber : GTIG Kabupaten Luwu 2025.

Merujuk perspektif pendekatan pembangunan kewilayahan, Kabupaten Luwu berada pada posisi yang strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029. Dalam RPJMN 2025-2029 terdapat delapan Prioritas Nasional yang mana salah satunya terintegrasi dengan rencana pembangunan Kabupaten Luwu yang mengusung peningkatan perekonomian berbasis sumber daya alam yakni mengembangkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Kebutuhan pangan secara nasional terus mengalami peningkatan. Target Indeks ketahanan pangan nasional tahun 2025 ke tahun 2029 yaitu 73,2 ke 82,0. Kabupaten Luwu dalam dalam Peraturan Bupati Nomor 832 Tahun 2023 menetapkan lahan sawah seluas 34.238,7 Ha untuk memastikan jumlah produksi pangan kabupaten Luwu dapat terus meningkat. Peningkatan produksi ini diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Luwu sebagai salah satu penyanggah pangan nasional ke depannya.

Ketersediaan infrastruktur penunjang untuk mengoptimalkan posisi strategis kabupaten Luwu sebagai wilayah yang mendukung kawasan disekitarnya cukup memadai. Kabupaten Luwu dilintasi oleh jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Tengah. Keberadaan infrastruktur tersebut diperkuat dengan adanya pengembangan pelabuhan di Taddette, Ulo-Ulo, dan Balambang. Selain itu, Bandara Bua di Kabupaten Luwu terus mengalami pengembangan kapasitasnya dari tahun ke tahun. Seluruh infrastruktur tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap aksesibilitas dan konektivitas Kabupaten Luwu dengan wilayah-wilayah sekitarnya.

a. Kondisi Topografi

Secara umum wilayah Kabupaten Luwu memiliki ketinggian wilayah diatas 1000 mdpl dengan luas wilayah sekitar 59.249,94 Ha atau 19,55% dari luas wilayah Kabupaten Luwu, Hal tersebut memberikan gambaran bahwa morfologi Kabupaten Luwu memiliki

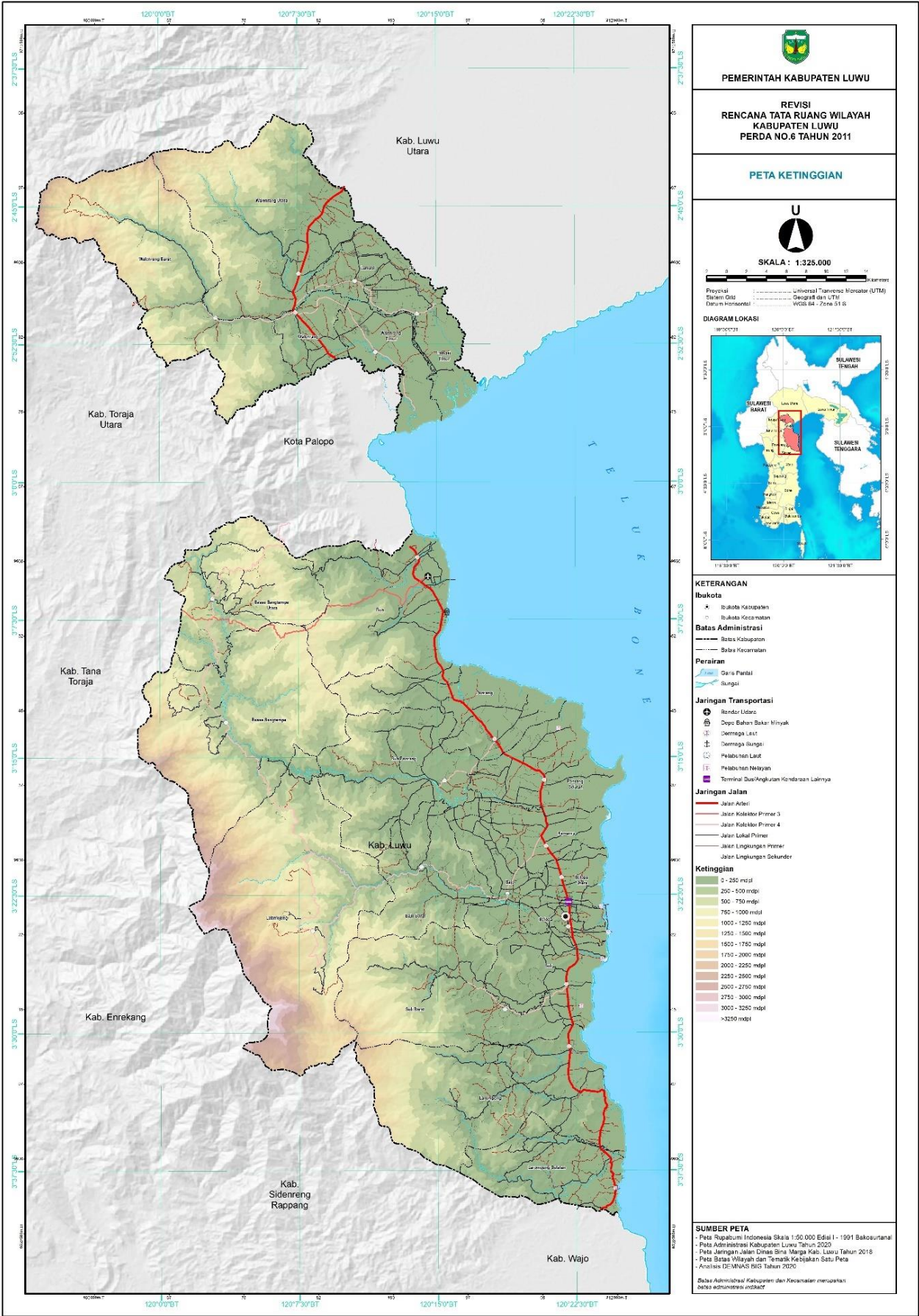
kondisi beragam, mulai dari morofologi data, berombak/bergelombang lemah, bergelombang kuat, bergelombang sedang, berbukit, bergunung-gunung hingga memiliki sungai. Disisi lain terdapat wilayah dengan ketinggian dibawah 1000 mdpl dengan luas 243.763,55 Ha atau 80,45% dari total luas wilayah Kabupaten Luwu. Secara rinci terkait ketinggian wilayah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Topografi di Kabupaten Luwu ditinjau dari Ketinggiannya

No	Kecamatan	Elevasi							Total (Ha)
		0-300	300-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500	>2500	
1	Bajo	4.805,21	260,43	67,83					5.133,47
2	BajoBarat	6.401,18	2.111,05	1.819,84	216,74				10.548,80
3	BasseSangtempe	1.720,52	5.105,40	11.406,14	4.416,11	2.559,25	1.040,02		26.247,44
4	BasseSangtempeUtara	273,85	4.514,74	15.197,61	2.443,43	10,54			22.440,17
5	Belopa	3.228,90							3.228,90
6	BelopaUtara	3.058,47							3.058,47
7	Bua	9.787,45	2.503,33	4.012,56	882,91				17.186,24
8	BuaPonrang	10.048,22	2.098,91	2.182,73	14,00				14.343,85
9	Kamanre	5.721,62							5.721,62
10	Lamasi	4.393,87							4.393,87
11	LamasiTimur	6.404,05							6.404,05
12	Larompong	13.063,74	4.843,01	3.307,23	2.166,12	888,58	113,04		24.381,73
13	LarompongSelatan	10.076,28	802,25	34,65					10.913,19
14	Latimojong	1.224,35	3.190,82	8.997,46	6.788,68	6.481,73	5.117,47	4.085,08	35.885,60
15	Ponrang	8.818,98	667,36	1.365,68	287,11				11.139,13
16	PonrangSelatan	8.984,25							8.984,25
17	Suli	8.123,68	548,74	27,99					8.700,42
18	SuliBarat	6.715,34	2.602,68	5.210,00	2.735,10	938,14	45,73		18.246,98
19	Walenrang	4.656,37	950,62	1.396,61	644,17				7.647,77
20	WalenrangBarat	1.510,01	3.171,55	9.322,74	6.439,18	5.069,16	2.247,10		27.759,75
21	WalenrangTimur	6.314,39	8,90						6.323,30
22	WalenrangUtara	9.115,26	4.175,06	7.413,63	2.696,48	792,76	131,31		24.324,50
TOTAL		134.446,00	37.554,86	71.762,68	29.730,04	16.740,15	8.694,67	4.085,08	303.013,48

Sumber : KLHS Revisi RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2023-2042.

Gambar 2.1.
Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Luwu



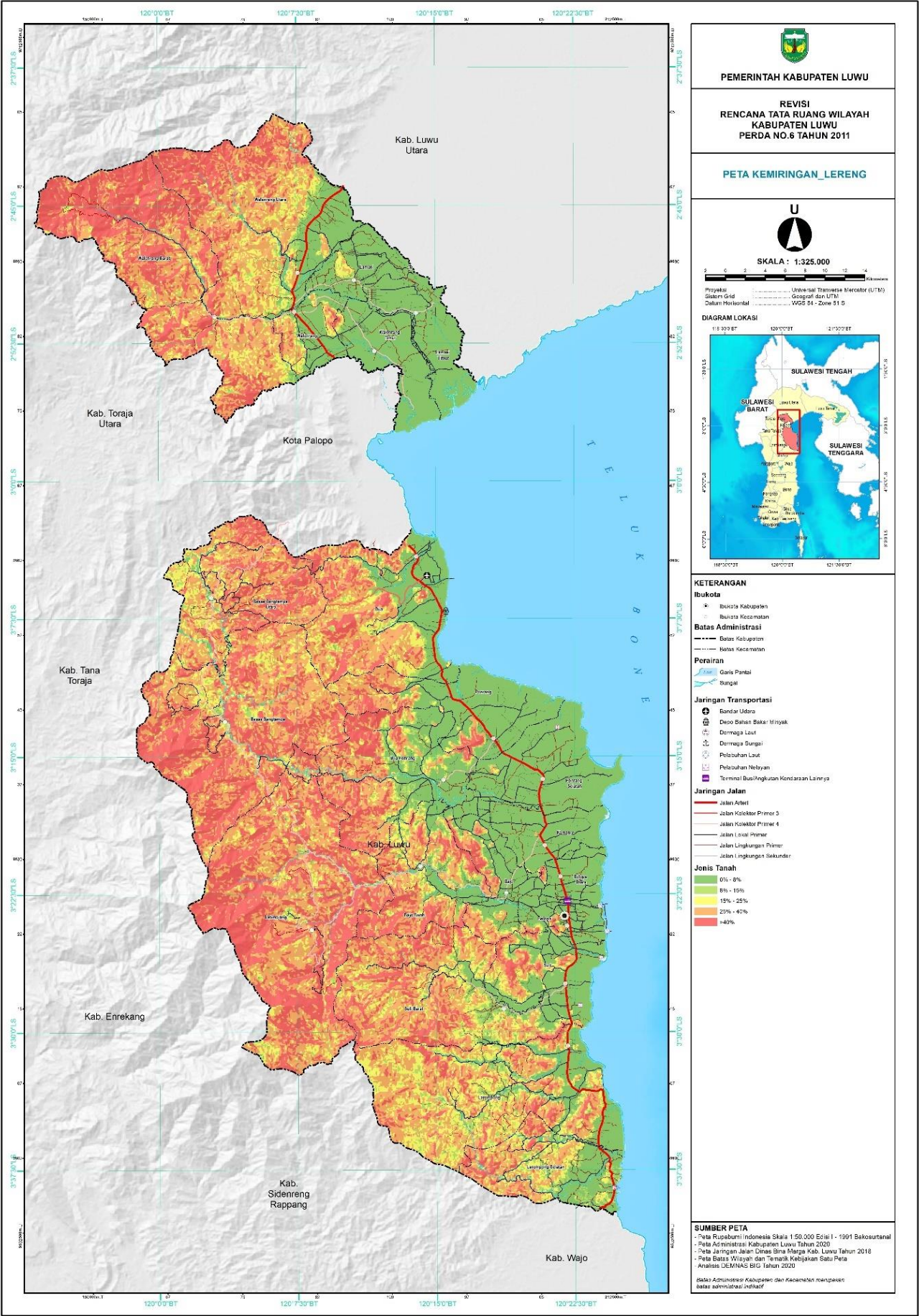
Wilayah Kabupaten Luwu memiliki tingkat kemiringan diatas 40% dengan luas wilayah sekitar 40.098,28 Ha atau 13.23% dari total luas wilayah Kabupaten Luwu, sedangkan wilayah dengan kemiringan dibawah 40% dengan luas 262.915,21 Ha atau 86,76% dari total Luas Wilayah Kabupaten Luwu. Hal tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.2.
Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Kemiringannya

No	Kecamatan	Kelerengan						Total(Ha)
		(0-2) %	(2-5) %	(5-15) %	(15-30) %	(30-40) %	(>40) %	
1	Bajo	2.413,27	777,70	611,41	921,74	180,03	229,33	5.133,47
2	Bajo Barat	539,67	627,49	2.706,90	3.931,92	1.505,26	1.237,55	10.548,80
3	Basse Sangtempe			1.771,09	11.651,97	6.188,59	6.635,79	26.247,44
4	Basse Sangtempe Utara		84,93	4.583,52	12.325,16	3.913,45	1.533,10	22.440,17
5	Belopa	2.692,95	150,34	138,77	246,84			3.228,90
6	Belopa Utara	2.938,01	36,99	83,47				3.058,47
7	Bua	3.785,40	1.489,23	2.131,82	6.423,27	2.170,73	1.185,79	17.186,24
8	Bua Ponrang	3.172,35	2.156,67	2.864,46	3.871,73	1.081,80	1.196,85	14.343,85
9	Kamanre	5.673,30	46,70	1,62				5.721,62
10	Lamasi	4.118,80	69,77	130,17	75,13			4.393,87
11	Lamasi Timur	6.404,05						6.404,05
12	Larompong	1.582,24	830,11	6.297,50	13.313,39	1.718,08	640,40	24.381,73
13	Larompong Selatan	3.670,78	784,61	3.615,89	2.604,44	237,26	0,22	10.913,19
14	Latimojong			1.119,12	11.582,08	9.878,78	13.305,62	35.885,60
15	Ponrang	6.777,03	475,42	736,15	1.924,69	684,60	541,24	11.139,13
16	Ponrang Selatan	8.887,63		96,61				8.984,25
17	Suli	4.893,96	334,11	848,58	2.198,09	376,42	49,26	8.700,42
18	Suli Barat	733,43	482,17	3.184,08	9.509,13	2.700,52	1.637,64	18.246,98
19	Walenrang	2.244,09	460,72	944,56	2.964,74	783,65	250,02	7.647,77
20	Walenrang Barat	6,13		922,21	12.610,38	5.513,63	8.707,41	27.759,75
21	Walenrang Timur	6.193,91		0,25	97,37	31,78		6.323,30
22	Walenrang Utara	3.470,08	502,03	3.089,32	11.093,37	3.221,64	2.948,07	24.324,50
Total (Ha)		70.197,07	9.308,99	35.877,50	107.345,44	40.186,21	40.098,28	303.013,48

Sumber: KLHS Revisi RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2023-2042.

Gambar 2.2.
Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Luwu



b. Kondisi Geologi

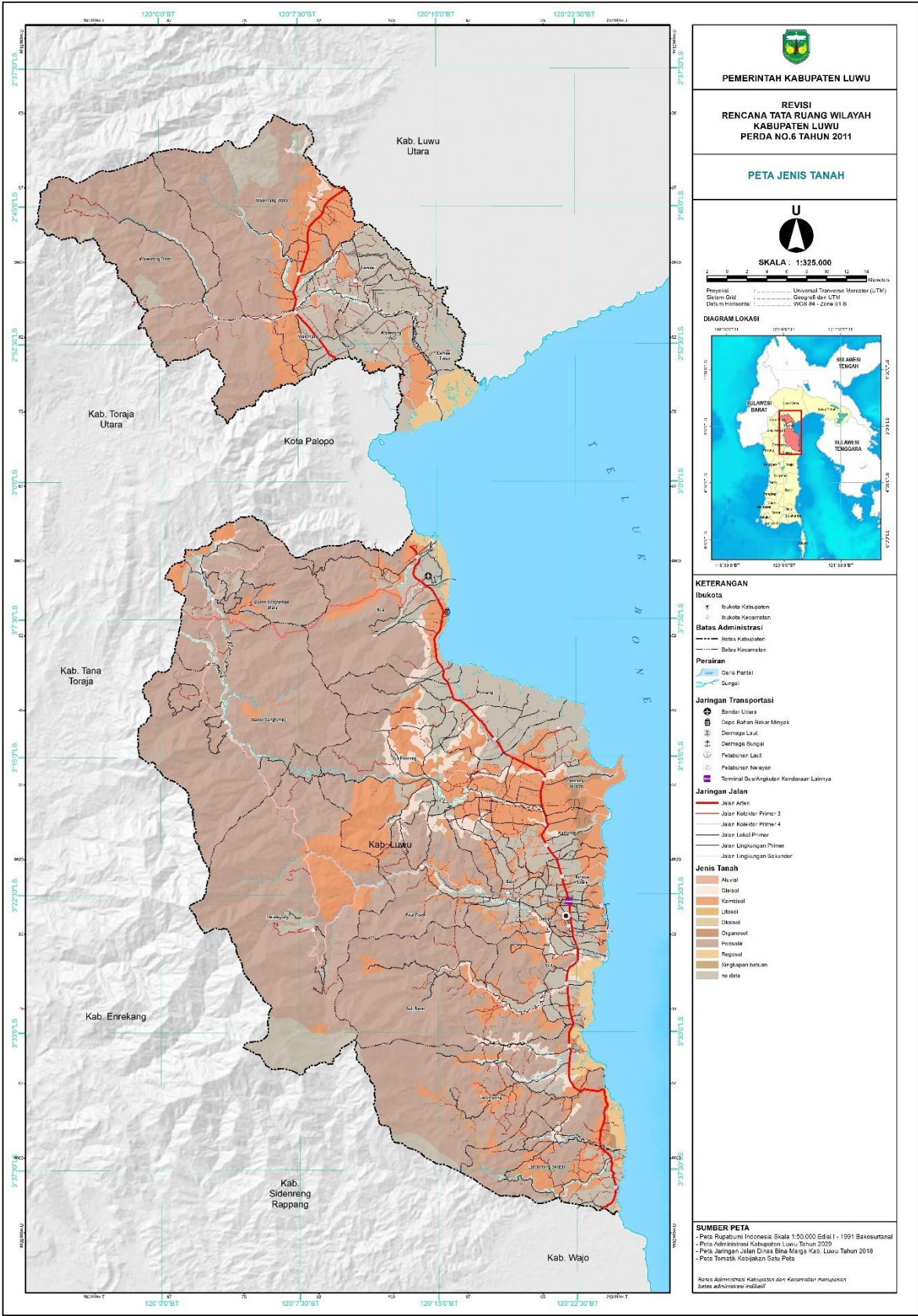
Sumber daya tanah wilayah Kabupaten Luwu bervariasi di tiap kecamatan baik yang tersebar di daerah pegunungan ataupun di daerah pesisir. Lingkup daerah pesisir cenderung memiliki bentuk tanah datar dengan jenis tanah aluvial coklat kekelabuan di Kecamatan Larompong. Kecamatan Larompong juga terdapat daerah perbukitan dengan jenis tanah gromusol kelabu dan mediteran coklat kekelabuan dengan struktur bahan induk batu gamping & serpih. Daerah sepanjang pesisir memiliki jenis tanah yang hampir sama dari selatan Larompong hingga utara Kecamatan Bua dari garis pantai dan bagian daratan utama banyak endapan lumpur dan menjadi daerah pemanfaatan pertambakan. Permukaan tanah yang berbukit berada diketinggian di atas 60 meter di Kecamatan Bajo Barat dengan jenis tanah gromusol kelabu dengan batuan induk batu gamping dan serpih merupakan daerah pemanfaatan perkebunan untuk komoditas unggulan Luwu yaitu Kakao. Kondisi yang sama juga terdapat di Kecamatan Latimojong dan Kecamatan Besseng Tempe yang berada diketinggian diatas 100 meter memiliki jenis tanah mediteran coklat kekelabuan, grumusol kelabu, aluvial hidromorf (daerah basah), aluvial hidromorf (daerah basah), podsolik merah kekuningan. Berikut ini data potensi jenis tanah di wilayah Kabupaten Luwu.

2.1.2.
Formasi Jenis Tanah dan Luas Penyebarannya
Di Kabupaten Luwu

NO.	JENIS TANAH	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1	Aluvial	0,61	0,00
2	Gleisol	14.333,55	4,93
3	Kambisol	49.301,50	16,95
4	Litosol	32,27	0,01
5	Oksisol	3,97	0,00
6	Organosol	1.228,05	0,42
7	Podsolik	167.182,71	57,47
8	Regosol	4.760,48	1,64
9	Singkapan Batuan	1,39	0,00
10	No Data	54.064,24	18,58
TOTAL		290.908,78	100,00

Sumber: Perda Revisi RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2022-2042.

Gambar 2.3.
Peta Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Luwu



Selain tanah juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali. Untuk jenis galian terdapat potensi tambang emas di Kecamatan Latimojong, Walenrang Utara, Batu Gamping di Kecamatan Latimojong, Walenrang, Lamasi, Granodiorit di Kecamatan Bajo, Rijang (Chert) di Kecamatan Latimojong, Kuarsa di Kecamatan Walenrang, Batu Sabak di Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Andesit di Kecamatan Bajo, Basalt di Kecamatan Latimojong, Bajo, Gabro di Kecamatan Latimojong, Diorit di Kecamatan Latimojong, Monzonit di Kecamatan Latimojong, Larompong, Besi di Kecamatan Bajo di Kecamatan Larompong Suli, Lempung di Kecamatan Bajo.

Kabupaten Luwu mempunyai 2 (dua) potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu GALENA dengan potensi cadangan diperkirakan 1.800.000 ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Walenrang Barat, BESI dengan potensi cadangan belum diketahui persis, terdapat di Kecamatan Bajo Barat dan Walenrang, Hematit dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai jutaan ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Bajo Barat, TEMBAGA yang terdapat di Kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan Latimojong, BESIMANGANIS dengan potensi masih bersifat indikasi dan masih perlu dilokalisir, terdapat di Kecamatan Suli, dan EMAS yaitu:

- Potensi cadangan sebesar 1.45-18.84 g/Ton (hasil analisa laboratorium) terdapat di Kecamatan Latimojong.
- Potensi cadangan sebesar 35-37 ppb terdapat di Kecamatan Walenrang Timur.
- Potensi cadangan sebesar 13 ppm terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.
- Potensi cadangan sebesar 122.08-29.08 ppm terdapat di Kecamatan Suli Barat.

Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

c. Kondisi Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu tergolong baik dimana terdapat 11 sungai yang cukup besar dan

panjang, yang mengalir dari arah barat kearah timur atau ke wilayah Teluk Bone.

Kesebelas sungai tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Kecamatan Lamasi, Sungai Makawa melintasi Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Bua melintasi Kecamatan Bua, Sungai Pareman (Noling) melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan Kecamatan Kamanre, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Tembo'e melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Rantebelu melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Kandoa (Balambang) melintasi Kecamatan Bua. Dari 11 sungai tersebut yang terpanjang adalah sungai Pareman (Noling) dengan panjang tercatat sekitar 73 km. Sepuluh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 12 – 69 km. Dengan potensi sungai tersebut di atas sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber air baku, pengairan persawahan, perkebunan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sarana transportasi.

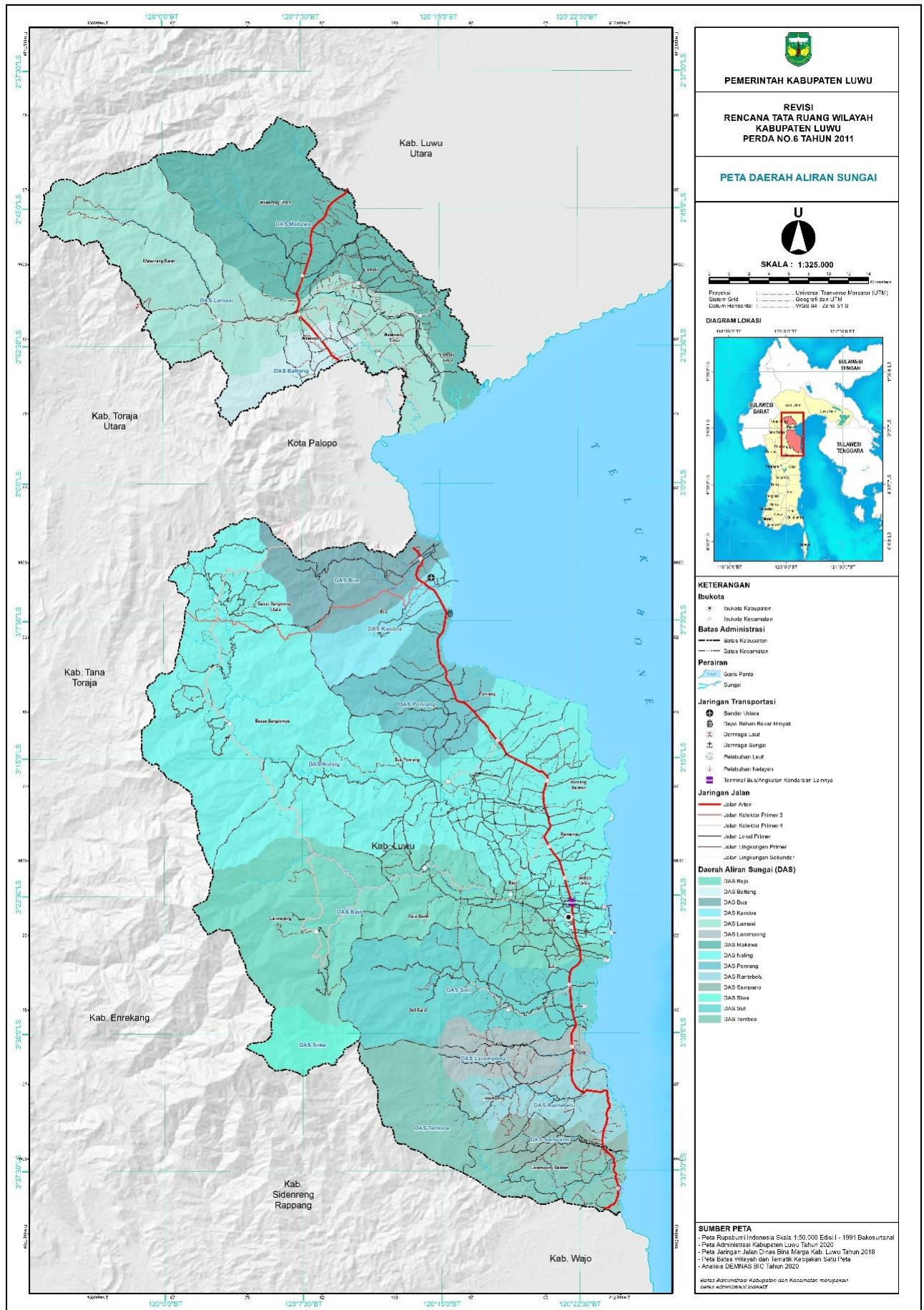
Tabel 2.3.
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Luwu

NO.	DAS	SWS	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1	DAS Bajo	WS Pongpengan-Larona 05-14	37.668,24	12,95
2	DAS Battang	WS Pongpengan-Larona 05-15	5.721,21	1,97
3	DAS Bua	WS Pongpengan-Larona 05-16	11.166,15	3,84
4	DAS Kandoa	WS Pongpengan-Larona 05-17	6.812,21	2,34
5	DAS Lamasi	WS Pongpengan-Larona 05-18	36.334,37	12,49
6	DAS Larompong	WS Pongpengan-Larona 05-19	7.312,70	2,51
7	DAS Makawa	WS Pongpengan-Larona 05-20	29.374,21	10,10
8	DAS Noling	WS Pongpengan-Larona 05-21	88.503,07	30,42
9	DAS Ponrang	WS Pongpengan-Larona 05-22	12.744,54	4,38
10	DAS Rantebelu	WS Pongpengan-Larona 05-23	7.404,30	2,55
11	DAS Sampano	WS Pongpengan-Larona 05-24	4.284,10	1,47
12	DAS Siwa	WS Pongpengan-Larona 05-25	4.521,74	1,55
13	DAS Suli	WS Pongpengan-Larona 05-26	22.001,66	7,56
14	DAS Temboe	WS Pongpengan-Larona 05-27	17.060,28	5,86
TOTAL			290.908,78	100,00

Sumber: Perda Revisi RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2022-2042.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Gambar 2.4.
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kabupaten Luwu



d. Kondisi Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropis basah dan terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang. Curah hujan berkisar antara 41,1 mm per tahun hingga 982,10 mm per tahun.

Wilayah bagian utara (WAL-MAS) musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai bulan Maret, sedangkan wilayah bagian selatan (dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan Larompong Selatan) musim hujan jatuh pada bulan April sampai dengan bulan September. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Luwu kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang.

Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropik dengan temperatur udara pada tahun 2023 berkisar dari 20,60°C sampai dengan 30,60°C. Pada Daerah pegunungan yakni Kecamatan Latimojong, Basesangtempe, Basesangtempe Utara, Walenrang Barat pada umumnya suhu lebih rendah yakni berkisar 20°C sampai dengan 30°C sehingga di daerah tersebut berpotensi untuk dijadikan kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata.

Kecepatan angin di Kabupaten Luwu berkisar antara 1,7 knot sampai 18 knot. Kecepatan angin terkadang tinggi pada musim peralihan dengan arah angin barat yang mempengaruhi masyarakat pesisir dengan pekerjaan nelayan yang batal melaut dan masyarakat pegunungan yang memiliki pertanian perkebunan pada daerah dataran tinggi dimana sering terjadinya tanaman produksi yang tumbang khususnya tanaman cengkeh serta masyarakat dataran yang memiliki persawahan yang terkadang tanaman padi mereka rebah sehingga kualitas dan kuantitas hasil produksinya menurun. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4.

Keadaan Iklim di Kabupaten Luwu, Tahun 2025

No	Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Curah Hujan (mm/tahun)	Hari Hujan (hari)
		Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max		
1	Januari	22,80	27,24	34,60	55	83,71	99	0,00	1,73	10,00	441,70	26
2	Februari	22,90	27,37	34,20	55	81,61	99	0,00	1,79	13,00	330,30	19
3	Maret	23,40	27,46	34,00	52	82,53	99	0,00	2,35	11,00	426,90	24
4	April	23,20	27,20	33,50	56	83,74	99	0,00	2,16	13,00	445,50	24
5	Mei	22,40	27,53	33,90	53	82,37	99	0,00	2,52	10,00	416,80	23
6	Juni	22,80	26,59	33,10	55	83,90	99	0,00	2,34	9,00	443,00	25
7	Juli	21,00	26,88	33,50	52	81,20	99	0,00	2,44	9,00	203,00	15
8	Agustus	21,70	26,66	33,00	53	80,80	99	0,00	2,56	9,00	353,80	19
9	September	22,30	27,46	34,50	39	77,62	99	0,00	2,66	8,00	255,20	19
10	Oktober	23,10	27,96	34,40	45	77,13	99	0,00	2,84	10,00	382,80	19
11	November	21,90	27,55	34,60	49	80,90	98	1,00	2,87	9,00	338,90	22
12	Desember	22,60	27,25	33,80	56	82,94	98	0,00	2,87	11,00	451,90	25

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, 2026.

2.1.1.2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Kabupaten Luwu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam ini harus dilakukan dengan bijaksana dan berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, guna memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Ada beberapa sektor sumber daya alam yang potensial dan telah menjadi sumber PDRB di kabupaten Luwu yakni sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan Pertambangan.

- **Sektor Pertanian dan perkebunan.** Kabupaten Luwu memiliki lahan subur yang cocok untuk berbagai komoditas pertanian, perkebunan serta tanaman hortikultura, seperti padi, jagung, kakao, cengkeh, kopi, durian dan lainnya. Peningkatan produktivitas pertanian dapat dicapai dengan menerapkan praktik berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik serta teknik irigasi yang lebih efisien. Pengembangan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan akses pasar, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2.1.

Produksi Perkebunan Kabupaten Luwu 2021-2025

No	Uraian	Produksi Tanaman Perkebunan (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kelapa Dalam	700	1.001	1.000,19	999,95	1.000,17
2	Kelapa Hibrida	158	188	187,35	187,36	187,56
3	Kopi Robusta	489	513	510,08	510,08	511,49
4	Kopi Arabika	1.965	894	866,37	852,74	784,87
5	Cengkeh	9.261	9.41	9.547,34	9.525,79	9.534,95
6	Kakao	22.000	13.69	13.137,47	13.139,17	13.155,12
7	Pala	46	49,4	51,06	51,06	52,20
8	Lada	409	411	413,38	410,78	411,19
9	Kapuk	1	1	1,29	1,22	1,20
10	Kemiri	62,94	64	64,21	64,22	64,26
11	Jambu Mente	205	247	207,92	207,77	207,77
12	Kelapa Sawit	428	58	298,8	299,8	299,90
13	Sagu	663	701	675,01	675,01	674,81
14	Aren	158	178	179,38	179,57	179,88
15	Pinang	7	7	6,88	6,88	6,88
16	Tembakau	10	7,15	5,86	87,83	5,20

Sumber : Data Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu 2026.

Potensi sektor pertanian kabupaten Luwu ini diarahkan agar dapat menjadi penyanggah utama pangan yang ada di Sulawesi Selatan. Tanah yang subur, sumber air sungai yang melimpah serta lahan yang luas membuat sektor pertanian menjadi sumber pendapatan utama dari masyarakat kabupaten Luwu. Luas lahan sawah dikabupaten Luwu adalah 34.238,70 Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 22.117,92 Ha dan Lahan Cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.935,44 Ha. Dengan luas area tersebut, Kabupaten Luwu mampu memproduksi padi dengan hasil yang relatif meningkat setiap tahun. Berikut data produksi pertanian pangan dan palawija di kabupaten Luwu tahun 2021-2025.

Tabel 2.2.

Produksi Pertanian Pangan dan Palawija Tahun 2021-2025

No	Uraian	Jumlah Produksi (Ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi	443.642,36	463.890,52	453.643,82	443.417,52	461.206,11
2	Jagung	50.640,54	33.288,60	26.940,99	28.076,71	23.321,29
3	Ubi Kayu	514,4	466,2	547,4	446,6	48,50
4	Ubi Jalar	651,5	713,07	759,2	412,11	41,04
5	Kacang Tanah	31,6	28,2	35,6	23,7	0,81
6	Kacang Kedelai	1,5	120,6	16,5	0	0
7	Kacang Hijau	14,5	1,5	10,5	7	0,08

Sumber : Data Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu 2026.

Data di atas menunjukan adanya fluktuasi jumlah produksi pada komoditas padi, jagung, ubi, dan kacang di Kabupaten Luwu terutama dua tahun pencatatan terakhir. Hal tersebut terkjadi akibat adanya fenomena iklim global seperti *La Nina* dan *El Nino*, adanya serangan hama, bencana alam, ketersediaan dan pemerataan distribusi pupuk yang belum maksimal, ketersediaan bibit unggul, kondisi infrastruktur pertanian yang belum maksimal serta ketersediaan alat dan mesin pertanian belum merata ke petani. Namun dengan volume produksi yang belum maksimal tersebut, wilayah kabupaten Luwu masih surplus dan masih mampu memenuhi kebutuhan domestik serta kebutuhan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melihat potensi pertanian yang ada sekarang, kabupaten Luwu masih berada pada kondusi produktivitas yang masih belum maksimal. Oleh karena itu, Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang akan menjadi isu strategis yang perlu di ditingkatkan kinerjanya pada periode Rencana Jangka Menengah ini. Sehingga sumber daya alam yang melimpah dalam wilayah kabupaten Luwu dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

- **Sektor Perikanan.** Potensi perikanan di Kabupaten Luwu sangat menjanjikan, terutama di wilayah pesisir. Pengembangan budidaya perikanan dapat dilakukan dengan menerapkan metode yang berkelanjutan, seperti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengelolaan stok ikan yang baik. Hal ini akan

memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Posisi kabupaten Luwu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 masuk dalam wilayah Afirmasi Teluk Bone. Sehingga, pada periode ini kabupaten Luwu diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan-dukungan yang bersumber dari pusat. Kinerja pemerintah pusat diarahkan untuk langsung mengintervensi masyarakat kabupaten Luwu yang ingin mengelolah sektor perikanan.

Merespon kebutuhan daerah dan rencana Pembangunan nasional, kabupaten Luwu menyiapkan rancana di bidang perikanan melalui dukungan kebijakan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Penyediaan alat tangkap, bibit, pakan, gudang dan prasarana lainnya menjadi agenda pemerintah. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan untuk mendorong industri sektor ini juga merupakan satu kesatuan rangkaian yang menjadi agenda pengelolaan yang berkelanjutan bagi pemerintah kabupaten Luwu pada periode lima tahun kedepan.

Grafik 2.1.
Produksi dan Komsumsi Ikan Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Produksi Perikanan					
	Produksi perikanan (ton)	645.919,16	666.829,06	666.787,25	671.054,41	685.288,95
	Target Daerah (Ton)	659.972,12	679.923,92	703.536,37	729.274,81	678.436,01
	Persentase	97,87	98,07	94,78	92,02	101,15
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap (Kg/Orang)	141.23	119.93	147.87	150.22	3.354,88
3.	Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton/Ha)	7,30	7,80	7,86	8,04	10,02
4.	Konsumsi Ikan					
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	54,21	54,84	55,89	56,26	57,5
	Target Daerah (Kg)	54,65	55,96	56,96	57,26	57,4

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
	Persentase	99,19	97,99	98,12	98,25	100,17

Sumber : Data Perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu 2026.

Data Produksi ikan di kabupaten Luwu menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik. Pada tahun 2025 produksi ikan meningkat 9,13% dari tahun sebelumnya. Disisi lain, konsumsi ikan kabupaten Luwu juga mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian ini menunjuka bahwa kabupaten Luwu merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang perikanan. Data peningkatan produksi perikanan serta peningkatan konsumsi ikan menjadi indikator positif adanya potensi besar pada sektor ini sehingga pemerintah kabupaten Luwu menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor yang harus terus dikembangkan secara berkelanjutan. Kedepan sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di kabupaten Luwu secara khusus dan masyarakat provinsi Sulawesi Selatan secara umum.

- **Sektor Pariwisata.** Kabupaten Luwu adalah wilayah yang memiliki keindahan alam yang melimpah. Fitur-fitur alam yang dimiliki oleh kabupaten Luwu seperti pegunungan, sungai, dan pantai dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik. Destinasi wisata yang ada dalam wilayah kabupayten Luwu digolongkan menjadi beberapa objek wisata diantaranya objek wisata Pantai, objek wisata Alam, objek wisata Sejarah, objek wisata Budaya, objek wisata seni, objek wisata Agrowisata, serta objek wisata buatan. Dengan banyaknya opsi objek wisata yang ada di kabupaten Luwu, maka sektor ini memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan daerah lainnya yang perlu dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yang memperhatikan dampak lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata

juga akan menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Grafik 2.2.
Capaian Sektor Pariwisata Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
PAD sektor pariwisata (Rupiah)	28.000.000	5.920.000	3.869.000	5.920.000	0,00
Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	1.800	800	308	55.354	132.183
Jumlah Objek Wisata	66	66	66	66	98
Jumlah Objek Wisata yang dikelola	4	4	4	4	6

Sumber : Data Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu 2026.

Data capaian sektor pariwisata terkait jumlah kunjungan wisata dengan penerimaan sektor wisata kabupaten Luwu Tahun 2021-2025 di atas menunjukkan adanya peningkatan yang besar terutama pada tahun 2025. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2025 sebesar 132.183 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang yaitu sebesar 55.354 orang. Namun, pada tahun 2025 penerimaan sektor pariwisata tidak ada. Sebab sektor pariwisata sudah tidak ditargetkan PAD di tahun 2025.

Pengelolaan pariwisata kabupaten Luwu belum memperoleh perhatian yang maksimal. Berdasarkan data capaian sektor pariwisata, jumlah objek wisata di kabupaten Luwu tercatat 98 objek pada tahun 2025. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 66 objek wisata. Namun jika dilihat jumlah wisata yang dikelola pemerintah dan swasta hanya enam lokasi. Satu lokasi dikelola oleh pemerintah dan lima dikelola oleh swasta. Capaian ini menunjukkan bahwa masih banyak objek wisata yang belum mendapat pengelolaan sehingga potensi yang ada belum diberdayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- **Sektor Industri dan Pertambangan.** Kabupaten Luwu memiliki potensi pengembangan yang sangat baik pada sektor industri dan pertambangan. Potensi sumber daya alam yang ada di wilayah ini harus digerakkan menuju ke arah industrialisasi untuk memaksimalkan potensi tersebut. Hasil alam dari sektor perkebunan dan pertanian, kelautan dan perikanan serta

kandungan mineral-mineral yang bernilai tinggi harus mendapat pengelolaan lebih jauh lagi. Namun, pengelolaan sektor industri dan pertambangan harus dilakukan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan penerapan konstruksi sistem yang baik, demi meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya.

Untuk menjawab tantangan kegiatan Industri serta eksplorasi mineral bumi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu telah menyediakan wilayah yang cukup dan memang memiliki potensi. Kecamatan Bua, Latimojong dan beberapa kecamatan lainnya telah diatur pola ruangnya agar kedepan tidak terjadi tumpang tindih zonasi wilayah sebagai wujud dari penataan ruang yang baik.

Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, Kabupaten Luwu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam membangun daerah yang lebih baik. Dengan demikian, Kabupaten Luwu tidak hanya akan menjadi daerah yang maju secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang

2.1.1.3. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kondisi kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan hidup dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu terkait daya dukung Lingkungan yang ada di wilayah kabupaten

Luwu bahwa ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Luwu tahun 2027 yakni :

1. Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB Kabupaten Luwu hanya melaksanakan 15 tujuan yang terbagi dalam 212 indikator, yaitu:
 - a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu: pilar sosial 53,13% (51 dari 96 indikator), pilar ekonomi sebesar 48,21% (27 dari 56 indikator), pilar hukum sebesar 52,38% (11 dari 21), dan pilar lingkungan sebesar 27,03% (10 dari 37).
 - b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 33 (34,38%), pilar ekonomi 15 (26,79%), pilar lingkungan 9 (24,32%) dan pilar hukum dan tata kelola 5 (23,81%).
 - c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Luwu sehingga belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 11 (11,46%), pilar ekonomi 10 (17,86%), pilar lingkungan 11 (29,73%), dan pilar hukum dan tata kelola adalah 4 (19,05%).
 - d. Indikator TPB yang yang tidak tersedia datanya di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 1 (1,04%), pilar ekonomi 4 (7,14%), pilar lingkungan 7 (18,92%), pilar hukum dan tata kelola adalah 1 (4,76%).
2. Hasil pemeringkatan isu strategis dan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan ditetapkan 11 (sebelas) isu TPB prioritas sebagai berikut:
 - TPB 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
 - TPB 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
 - TPB 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

- TPB 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
 - TPB 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
 - TPB 16 - Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
 - TPB 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
 - TPB 17 - Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
 - TPB 5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
 - TPB 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarwilayah
 - TPB 4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
3. OPD yang sudah melaksanakan TPB berdasarkan Kategori pencapaian TPB sebagai berikut :
- a. OPD yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 28 OPD dengan total 101 indikator.
 - b. OPD yang sudah melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 18 OPD dengan total 62 indikator
 - c. OPD yang belum melaksanakan sehingga belum mencapai target sebanyak 14 OPD dengan total 36 indikator.
 - d. OPD yang datanya belum tersedia sebanyak 7 OPD dengan total 13 indikator.
4. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut :
- a. Tidak perlu upaya tambahan, meliputi:
 - Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 9 indikator strategis

- Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 3 indikator strategis
- b. Perlu upaya tambahan, meliputi :
 - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 8 indikator strategis
 - Belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 7 indikator strategis
 - Belum/tidak ada data sebanyak 3 indikator strategis prioritas
- 5. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang tidak terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut :
 - a. Tidak perlu upaya tambahan, meliputi:
 - Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 90 isu strategis
 - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target 8 indikator strategis
 - b. Perlu upaya tambahan, meliputi
 - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 43 indikator strategis
 - Belum dilaksanakan dan belum mencapai target 29 indikator strategis
 - Belum/tidak ada data sebanyak 10 indikator strategis
- 6. Indikator TPB yang telah mencapai target dengan rekomendasi "diperhatikan" sebanyak 9 indikator dan rekomendasi "dipertahankan" sebanyak 101 indikator.
- 7. Indikator TPB yang belum mencapai target dengan rekomendasi "ditingkatkan" sebanyak 87 indikator dan rekomendasi "ditambahkan" sebanyak 13 indikator.

2.1.1.4. BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Kebutuhan terhadap energi, Air, dan Pangan yang berkelanjutan merupakan suatu hal yang mutlak bagi setiap masyarakat. Pemenuhan atas energi, air dan pangan masyarakat merupakan isu krusial yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap ke tiga hal tersebut harus

memenuhi kriteria yang andal dan terjangkau oleh masyarakat. Energi, air dan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat dan industri.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur penunjang, pengaturan harga, dan pengembangan sumber daya terbarukan. Kebijakan yang tepat dan dukungan investasi yang memadai sangat krusial untuk mendorong ketersediaannya dan memastikan akses energi, air dan pangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kabupaten Luwu merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan energi, air dan pangan masyarakatnya. Kabupaten Luwu memiliki delapan sungai besar, lahan sawah dan perkebunan yang luas, serta daerah pesisir dan garis pantai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atas energi, air dan pangan. Namun demikian, pemanfaatan terhadap potensi tersebut harus terus ditingkatkan secara bersama-sama oleh seluruh *stake holder* yang ada.

Indikator-indikator capaian Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum merupakan barometer kinerja pemerintah selama lima tahun terakhir dalam menunjang kebutuhan energi, Air dan Pangan Masyarakat. Upaya kabupaten Luwu dalam pemenuhan akses masyarakat terhadap energi, air dan Pangan lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut.

a. Ketahanan Energi

Ketersediaan energi merupakan isu global yang terus diupayakan oleh pemerintah. Dalam upaya penyediaan kebutuhan energi, pemerintah melalui rancangan tata ruang di Sulawesi khususnya di kabupaten Luwu terus melakukan pembangunan guna menyediakan sumber energi yang baru. Dalam rencana struktur ruang (RTR) Sulawesi terdapat rencana sistem jaringan pembangkit tenaga Listrik berupa PLTG dan PLTM di Batusitanduk, PLTM Palangka 1 dan PLTM Rante Balla. Upaya tersebut dalam rangka pemenuhan konsumsi

listrik masyarakat yang ada di kabupaten Luwu. Berikut Konsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024.

Tabel 2.3.

Konsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Jenis/Item	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelanggan/ <i>Costumer</i>	53.331	56.598	59.093	61.761	61.761
Jumlah Penduduk	365.608	367.454	369.820	380.679	385.361
Listrik Terjual/ <i>Electricity Sold (Kwh)</i>	83.914.080	n.a	93.291.310	9.489.818.157	9.489.818.157
Daya Terpasang / <i>Installed Electricity Power (KW)</i>	29.915.150	n.a	67.601	74.482.502	74.482.502
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita)	229,52	n.a	252,26	24.928,66	24.625,78

Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2025.

Ketahanan energi mengacu pada kemampuan daerah untuk bertahan dan pulih dari gangguan pasokan energi sambil memastikan penyediaan energi yang handal dan terjangkau secara terus-menerus. Berdasarkan pencatatan data elektrifikasi kabupaten Luwu, jumlah pelanggan Kabupaten Luwu tahun 2024 sebesar 61.761 dengan konsumsi listrik per kapita sebesar 24.625,78 Kwh. Adanya peningkatan drastis konsumsi listrik per kapita pada tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya listrik terjual akibat pemakaian besar-besaran dari perusahaan besar. Data pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelanggan dan konsumsi listrik kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sehingga tantangan kedepan adalah bagaimana pemerintah dapat menyediakan energi melihat jumlah kebutuhan energi yang terus bertambah.

Disisi lain, pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut telah melakukan upaya-upaya konkret di lapangan agar pasokan listrik untuk masyarakat dapat terus tersedia. Di tahun 2024 sejumlah proyek penyediaan energi listrik di kabupaten Luwu sedang dilakasakan. Dengan memanfaatkan sumber daya air dari sungai yang ada di Kabupaten Luwu, pasokan energi sangat mungkin untuk di sediakan.

b. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Kecukupan atas pangan merupakan salah satu isu yang harus terus kita capai agar manusia dapat hidup secara berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Luwu terus melakukan upaya dalam rangka penyediaan pangan. Upaya tersebut berupa penyediaan infrastruktur penunjang ketersediaan pangan, pengembangan pangan berkualitas, dan memastikan tersedianya akses yang luas dan terjangkau terhadap pemenuhan pangan seluruh masyarakat.

Grafik 2.3.
Indeks Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2021-2025



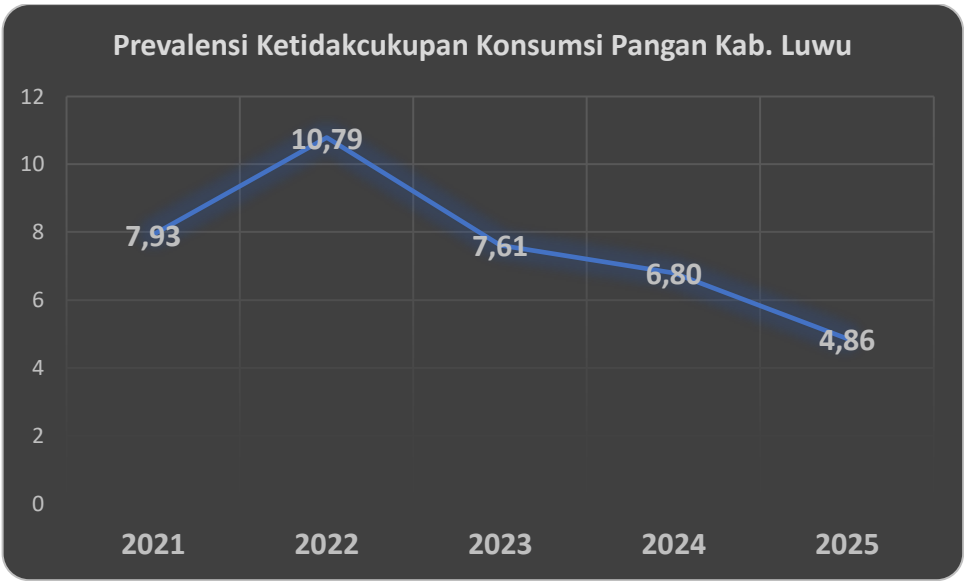
Sumber : Data Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu 2026.

Indeks ketahanan pangan di Kabupaten Luwu dalam kurun lima tahun menunjukan kinerja yang fluktuatif. Capaian tertinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2024 dimana nilai capaiannya perada pada angka 82,23. Sementara pada tahun 2025 menurun menjadi 71,45 hal ini disebabkan oleh meningkatnya daerah rawan pangan ditahun tersebut menjadi 64 desa dari sebelumnya sebanyak 45 desa. Capaian tersebut mengindikasikan perlu adanya penguatan program untuk menunjang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Luwu kedepannya.

Masalah kerawanan pangan merupakan masalah yang holistik dan multisektor. Perlu adanya kolompok kerja yang bertugas secara terintegrasi agar langkah-langkah yang telah direncanakan dapat berjalan lebih efektif. Komitmen dalam pengurangan wilayah rawan

pangan merupakan isu yang terus diupayakan untuk mencapai masyarakat Kabupaten Luwu yang unggul.

Grafik 2.4.
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kab. Luwu Tahun 2021-2025



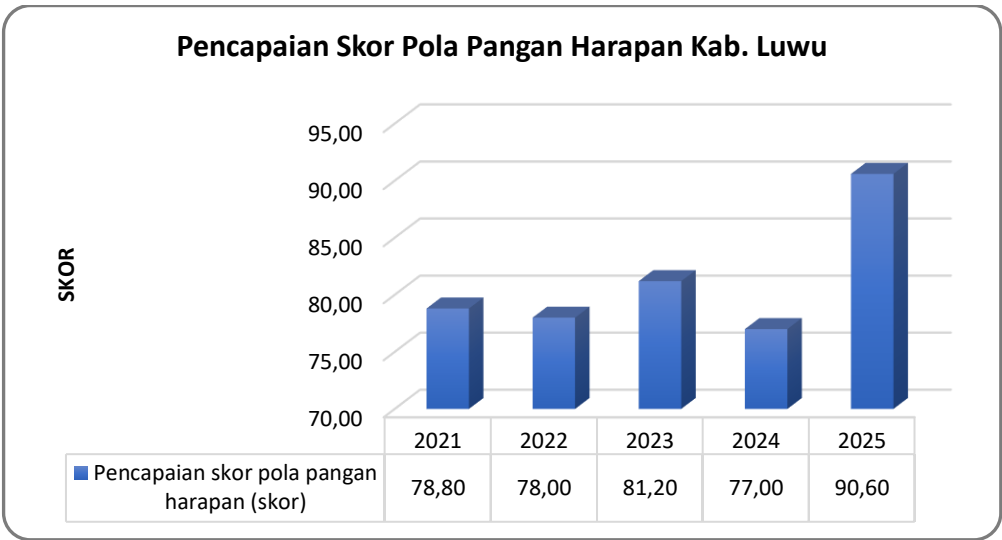
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu 2026.

Masalah ketidacukupan konsumsi pangan merupakan isu global yang teruang dalam SGD's yang berkaitan dengan target *Zero Hungry* (Nol Kelaparan) pada tahun 2030. Data dari lima tahun terakhir terkait capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan menunjukkan adanya fluktuasi nilai yang cenderung menurun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 dimana capaiannya sebesar 10,79 sedangkan angka terendah terjadi di tahun 2025 sebesar 4,86. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian serius secara nasioanal dan kabupaten dalam upaya menurunkan angka stunting di masyarakat. Sehingga, rencana program dalam periode ini juga diarahkan untuk menangani masalah ketidacukupan konsumsi pangan.

Menurut *Food Agricultural Organisation-Regional Office for Asia and Pacific* (FAO-RAPA), Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat lainnya. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi

pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Berikut Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025.

Grafik 2.5.
Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kab. Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu 2026.

Data skor pola pangan harapan menunjukkan adanya fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pencapaian skor ini didasarkan atas aspek keberagaman pangan, proporsi konsumsi dan kecukupan gizi. Hasil pencapaian skor pola pangan harapan dalam lima tahun terakhir mengindikasikan kondisi yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan terutama dalam hal kecukupan gizi yang sangat erat kaitannya dengan kondisi stunting khususnya bagi balita dan ibu hamil. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2025 dengan skor 90,60, meningkat dari tahun sebelumnya dengan skor sebesar 77,00.

c. Ketahanan Air

Dalam rangka tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang prima, dukungan ketersediaan air merupakan faktor yang sangat penting. Upaya penyediaan air baku di kabupaten Luwu terus dilakukan melalui penguatan infrastruktur penyedia air melalui perluasan jaringan pipa, penyediaan sambungan rumah penambahan jumlah unit layanan serta peningkatan kapasitas pengolahan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan agar semua masyarakat kabupaten Luwu dapat memperoleh akses terhadap air yang layak.

Selain itu, untuk memastikan tercapainya tujuan ini pemerintah terus melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan monitoring serta evlauasi serta pelaporan capaian secara berkala. Pemantauan terkait kapasitas air baku yang telah ada serta persentase akses rumah tangga terhadap air siap minum perpiaan merupakan hal yang minimal dilakukan oleh pemerintah.

- Kapasitas air baku
Upaya Peningkatan dan pemantauan kapasitas air baku merupakan langkah yang harus terus dilakukan guna memastikan ketersediaan air untuk masyarakat kabupaten Luwu dapat terus terpenuhi baik kapasitas maupun kualitasnya. Meskipun, kabupaten Luwu merupakan daerah yang memiliki sumber air yang melimpah namun penurunan kapasitas dan kualitas air merupakan tantangan global yang harus terus diperhatikan. Penuruan kualitas lingkungan merupakan salah satu tantangan dalam penediaan air baku sehingga perlu untuk memformulasikan langka-langkah yang tepat dan berkelanjutan terkait aspek penyediaan air baku ini. Berikut tabel data kapasitas air baku kabupaten Luwu.

Tabel 2.4.
Kapasitas Air Baku Kabupaten Luwu

NO	NAMA	AIR BAKU INDUK	JENIS	KAPASITAS (L/DET)	KAPASITAS TERPAKAI (L/DET)
1	SUNGAI SALU BUA	-	Sungai	20	20
2	SUNGAI SUSO	-	Sungai	100	40
3	SUNGAI BALLUTAN	-	Sungai	250	50
4	SUNGAI KOMPI	-	Sungai	100	20
5	SUNGAI TAMPA	-	Sungai	250	20
6	SUNGAI LAROMPONG	-	Sungai	100	50
7	SUNGAI PAKALOLO	-	Sungai	1	30
8	SUNGAI LIMBONG	-	Sungai	250	60
9	SUNGAI BINTURU	-	Sungai	40	20

Sumber : Aplikasi SIMPSPAM.

Potensi sumber daya air kabupaten Luwu masih dapat ditingkatkan lagi. Berdasarkan tabel di atas, tercatat ada sembilan sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku di

kabupaten Luwu. Masih ada sejumlah sungai yang belum dijadikan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air di kabupaten Luwu. Setidaknya tercatat ada sebelas sungai yang cukup besar yang berada di kabupaten Luwu. Sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan air, wilayah ini masih dapat ditingkatkan lebih jauh lagi.

Tabel 2.5.

Jumlah Unit SPAM, Alokasi Air baku Serta Kapasitas Air baku
Kabupaten Luwu

*dalam L/detik

Kab.	Jumlah Unit SPAM	Alokasi Air Baku*	Kap. Terpasang *	Kap Produksi *	Kap Distribusi *	Kap Air Terjual *	Idel Cap. Terpasang *	Idel Cap. Terpasang *
Luwu	95	448.51	350.01	311.01	287.27	249.44	90	47

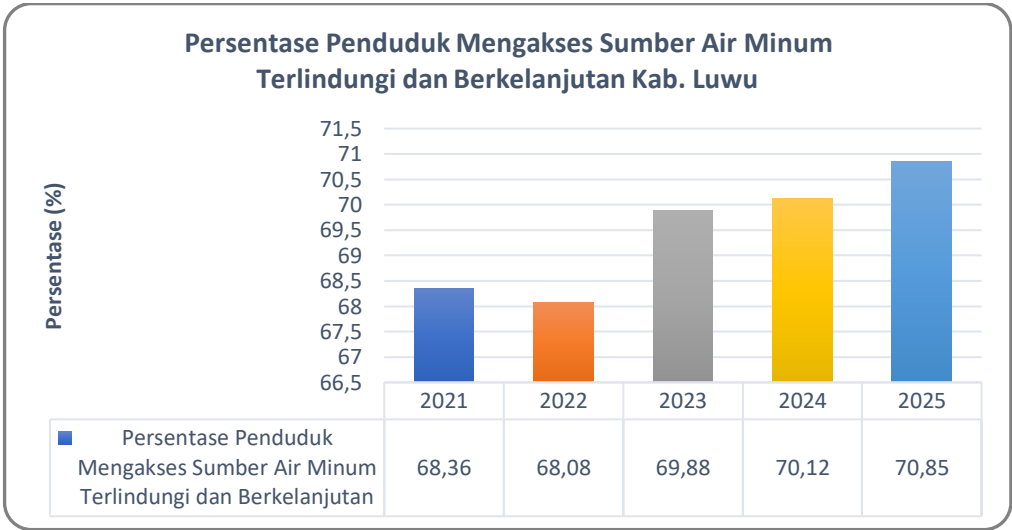
Sumber : Aplikasi SIMPSPAM.

- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Perkotaan merupakan wilayah yang sangat bersinggungan dengan ketersediaan air. Aktivitas di perkotaan yang konsumtif serta intensitas dalam penggunaan air menyebabkan ketersediaan air harus terus kontinu. Berikut data persentase penduduk yang mengakses sumber air minum terlindungi dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu tahun 2021-2025.

Grafik 2.6.

Persentase Penduduk Mengakses Sumber Air Minum Terlindungi dan Berkelanjutan Kab. Luwu Tahun 2021-2025

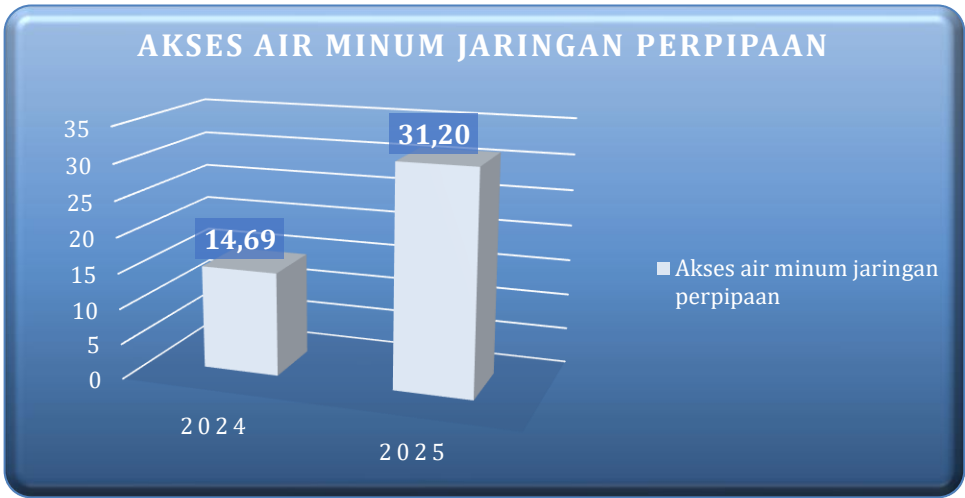


Sumber : Data Perencanaan PUTR Kabupaten Luwu 2026.

Akses masyarakat terhadap sumber air minum yang terlindungi di kabupaten Luwu mengalami peningkatan dalam kurun waktu

empat tahun terakhir. Berdasarkan data capaian di tahun 2025 penduduk yang telah mengakses sumber air minum terlindungi di kabupaten Luwu sebanyak 70,85 persen. Meskipun terjadi peningkatan, namun masih ada 29,15 persen penduduk kabupaten Luwu belum memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi. Angka tersebut masih sangat tinggi mengingat kebutuhan akan air minum yang berkualitas merupakan kebutuhan dasar manusia.

Tabel 2.6.
Akses Air Minum Jaringan Perpipaan
Kabupaten Luwu



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Luwu, 2026.

Untuk menyediakan layanan air minum yang aman bagi masyarakat, salah satu langkah yang mudah ditempuh adalah dengan menyediakan air yang terdistribusi melalui perpipaan. Jaringan pipa merupakan upaya untuk melindungi kualitas air untuk sampai ke masyarakat tidak bercampur dengan kontaminan yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan data SIMSPAM Kementerian PUTR bahwa capaian jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Perpipaan yaitu sebesar 19.346 sambungan rumah atau dengan persentase sebesar 31,20 persen.

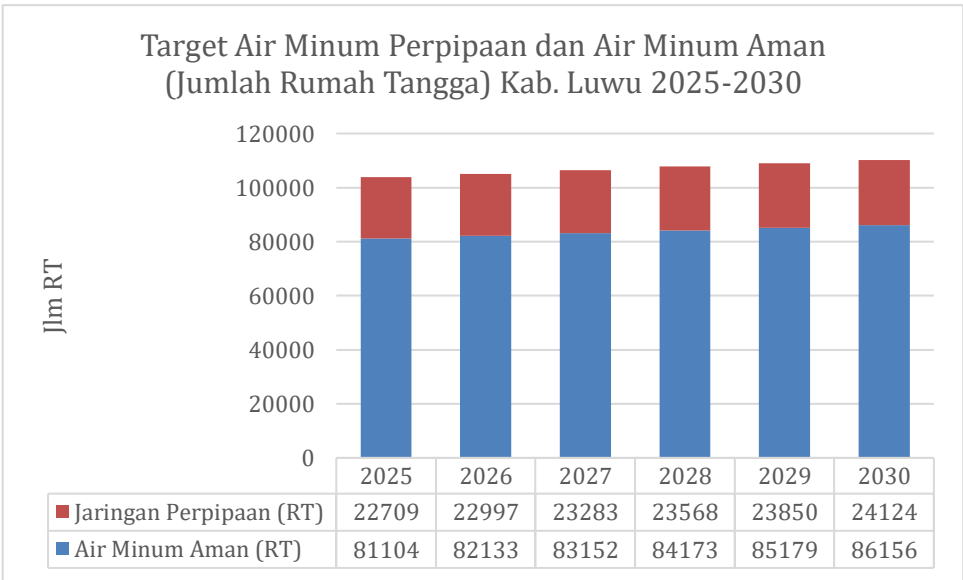
Tabel 2.7.
Jumlah Sambungan Rumah Perkotaan dan Pedesaan
Kabupaten Luwu

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH UNIT SPAM	ALOKASI AIR BAKU (Liter/Detik)	KAPASITAS TERPASANG (Liter/Detik)	KAPASITAS PRODUKSI (Liter/Detik)	KAPASITAS DISTRIBUSI (Liter/Detik)	KAPASITAS AIR TERJUAL (Liter/Detik)	IDLE CAP TERPASANG (Liter/Detik)	IDLE CAP PRODUKSI (Liter/Detik)	NRW (%)	JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH (SR)			
											PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	
1	KEP SELAYAR	83	244,04	203,84	148,14	137,48	119,36	40,20	55,7	13,8	3.967	8.285	12.252	
2	BULUKUMBA	129	492,68	350,68	226,73	162,74	126,65	142,00	123,95	22,8	7.281	12.410	19.691	
3	BANTANG	54	473,81	472,13	351,80	277,20	149,62	1,68	120,33	46,02	14.470	11.466	25.936	
4	JENEPONTO	82	263,76	263,76	245,76	221,87	204,68	-	18,00	7,75	9.596	15.372	24.968	
5	TAKALAR	57	264,47	241,97	193,04	182,64	145,23	2,50	48,93	20,48	11.089	14.378	25.467	
6	GOWA	101	807,55	787,05	495,98	530,32	364,34	20,50	91,07	31,30	41.394	9.877	51.271	
7	SINJAI	70	340,82	320,82	278,82	272,68	271,72	20,00	42,00	0,35	14.224	10.837	25.061	
8	MAROS	41	498,93	378,03	348,82	341,09	238,02	120,90	29,21	30,22	19.861	7.205	27.066	
9	PANGKEP	53	277,57	227,57	161,20	145,94	108,61	50,00	66,37	25,98	4.548	11.771	15.719	
10	BARRU	40	312,29	310,71	188,51	167,79	106,03	158	122,20	28,24	9.535	5.924	15.459	
11	BONE	124	1.015,53	392,53	285,03	235,03	187,16	623,00	107,50	20,37	14.773	8.027	22.800	
12	SOPPENG	39	455,61	445,06	393,02	373,05	220,37	210,55	52,04	40,93	8.202	6.980	15.182	
13	WAJO	124	448,35	445,23	399,31	347,70	273,68	3,12	45,92	21,29	18.060	12.667	30.727	
14	SIDRAP	87	780,65	260,65	217,65	184,46	145,94	520,00	43,00	20,88	6.056	10.471	16.527	
15	PINRANG	84	263,40	281,90	149,40	124,68	120,10	-	18,50	132,50	3,67	5,61	10.773	
16	ENREKANG	87	427,66	402,66	334,66	311,21	288,79	24,00	48,00	7,70	4.603	19.105	23.708	
17	LUWU	95	448,01	358,01	311,01	287,27	249,44	90,00	47,00	13,17	8.447	10.899	19.346	
18	TANA TORAJA	145	338,00	334,00	489,70	338,45	248,07	2,00	44,30	27,30	5.138	23.164	28.302	
19	LUWU UTARA	103	363,59	375,13	337,82	317,12	231,83	-	1154	37,31	26,90	5.750	13.924	19.674
20	LUWU TIMUR	46	588,77	268,77	222,00	179,64	129,14	320,00	46,77	28,11	11.289	13.635	24.924	
21	TORAJA UTARA	93	251,55	250,05	229,52	186,61	133,93	0,50	21,53	28,23	3.752	17.048	20.800	
22	MAKASSAR	71	3.482,60	3.466,80	3.397,80	2.967,61	1.633,70	15,80	69,00	44,95	174.585	140	174.725	
23	PAREPARE	1	342,00	342,00	232,00	230,00	147,21	-	110,00	36,00	27.202	62	27.264	
24	PALOLO	21	1.477,40	579,34	522,34	511,84	332,50	898,06	57,00	35,04	38.481	3.682	4.2163	
SULAWESI SELATAN		1.850	15.037,04	11.959,69	10.360,06	9.014,42	6.174,12	3.077,35	1.599,63	31,51	464.664	259.912	724.576	

Sumber : SIMSPAM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Penyediaan layanan air minum perpipaan dalam rencana Pembangunan Kabupaten Luwu harus terus ditingkatkan. Melihat capaian kinerja penyediaan layanan air minum perpipaan di atas, perlu adanya langkah penetapan target rumah tangga lima tahun ke depan. Target ini merupakan upaya untuk mengukur sejauh mana kinerja dalam upaya penyediaan air bersih yang aman kepada masyarakat di kabupaten Luwu selama lima tahun mendatang.

Grafik 2.7.
Target Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum
Tahun 2025-2030



Sumber: Dinas PUTR Kab. Luwu, Tahun 2025.

Akses terhadap sumber air minum terlindungi merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Target ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap

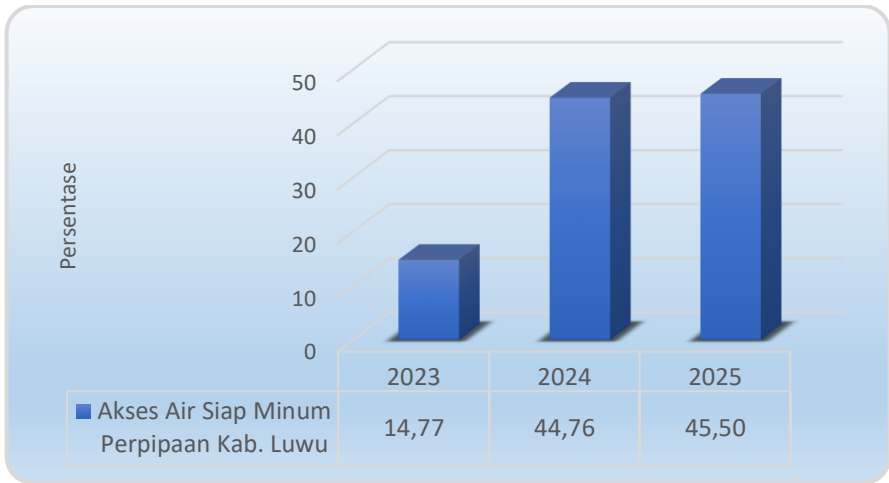
target capaian nasional dan provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menyediakan layanan air minum yang berkualitas, pemerintah dapat menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Luwu.

Ketersediaan air minum yang berkualitas memerlukan pemantauan yang intensif guna menyediakan hasil data pantau yang lebih akurat. Pemantauan berkala ini bertujuan untuk memvalidasi sekaligus melakukan kontrol terhadap kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat di lapangan.

Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) memiliki urgensi kritis sebagai sistem peringatan dini terhadap ancaman kesehatan masyarakat akibat konsumsi air tercemar. Data dari survei ini menjadi fondasi ilmiah untuk mengidentifikasi daerah-daerah dengan krisis air bersih, terutama di wilayah rentan seperti kawasan industri, daerah pesisir, atau lokasi dengan sanitasi buruk. Dengan mendeteksi kontaminan berbahaya seperti bakteri E.coli, logam berat, atau zat kimia beracun, pemerintah dapat segera melakukan intervensi tepat sasaran - mulai dari distribusi filter air darurat hingga pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih. Tanpa survei berkala ini, ribuan rumah tangga berisiko terpapar penyakit bawaan air seperti diare kronis, gangguan ginjal, bahkan keracunan logam berat yang berdampak jangka panjang pada generasi penerus.

SKAMRT memegang peran strategis dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dan pencapaian target SDGs. Survei ini tidak hanya menyelamatkan nyawa dari ancaman langsung penyakit akibat air, tetapi juga menjadi basis data untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, alokasi anggaran prioritas, dan penguatan sistem surveilans kesehatan lingkungan. Di tengah tantangan perubahan iklim yang memperparah krisis air bersih, data SKAMRT menjadi penentu kebijakan adaptasi di tingkat komunitas hingga nasional. Urgensinya semakin jelas mengingat air minum yang terkontaminasi seringkali tidak menunjukkan tanda fisik yang kasat mata, sehingga hanya melalui survei ilmiah inilah ancaman kesehatan tersembunyi dapat terungkap dan ditangani sebelum berkembang menjadi wabah yang lebih luas.

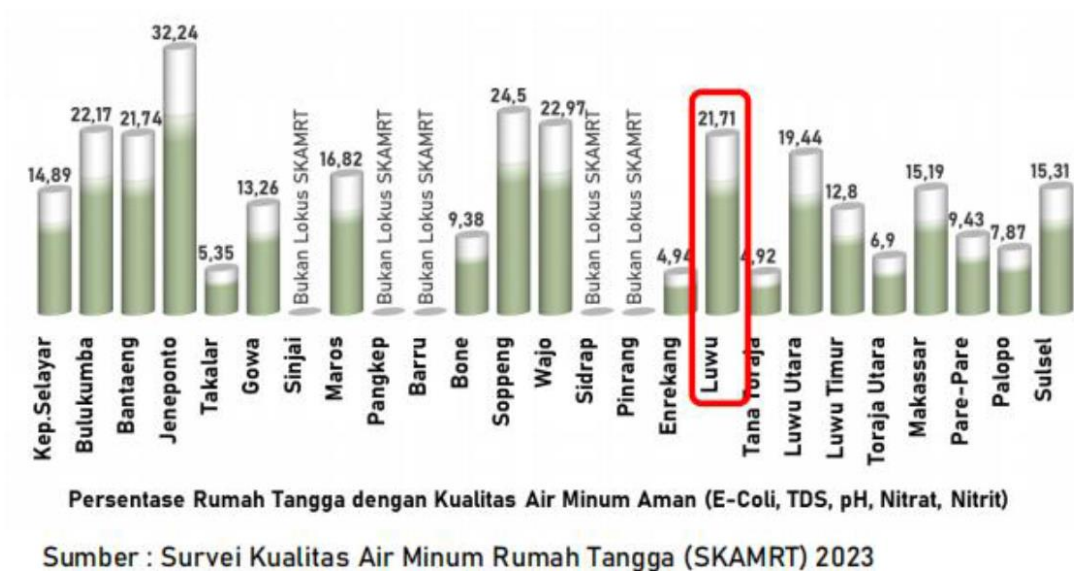
Grafik 2.8.
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum
Perpipaan Kabupaten Luwu
Tahun 2023-2025



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

Pada tahun 2025, Kabupaten Luwu telah mencapai capaian sambungan air siap minum perpipaan sebesar 45,50 persen dengan total 19.346 Sambungan Rumah (SR), namun angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari separuh rumah tangga di wilayah tersebut belum memiliki akses terhadap air minum perpipaan yang aman. Perlunya percepatan penyediaan sambungan air minum menjadi prioritas utama guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses air bersih yang layak, mengingat air minum yang aman merupakan kebutuhan dasar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan melalui beberapa strategi, seperti peningkatan investasi infrastruktur, optimalisasi program pemerintah, kolaborasi dengan pihak swasta, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses air bersih. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kabupaten Luwu dapat mempercepat perluasan jaringan perpipaan sehingga target universal akses air minum yang aman bagi seluruh rumah tangga dapat tercapai dalam waktu yang lebih efisien.

Grafik 2.9.
Akses Air Minum Aman Rumah Tangga Hasil Survey SKAMRT



Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) di Kabupaten Luwu menunjukkan capaian yang memprihatinkan, dimana hanya 21,71% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang memenuhi standar keamanan. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional dan mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penyediaan air bersih di wilayah tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, mengingat air minum yang tidak memenuhi standar dapat menjadi media penularan penyakit seperti diare, disentri, bahkan keracunan logam berat jangka panjang.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi segera dan terpadu dari berbagai pemangku kepentingan. Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi: (1) percepatan pembangunan infrastruktur air minum perpipaan, (2) penyediaan unit pengolahan air sederhana bagi daerah terpencil, (3) peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air minum rumah tangga, serta (4) penguatan sistem pemantauan kualitas air secara berkala. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan akses air minum aman, sekaligus mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan ke-6 tentang air bersih dan sanitasi layak bagi semua.

2.1.1.5. LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan pendekatan sistemik dan terintegrasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas. Untuk melaksanakan agenda tersebut, pemerintah Kabupaten Luwu sebelumnya telah melakukan beberapa langkah-langkah mulai dari pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), pemantauan dan evaluasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan. Pemerintah secara aktif mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan penguatan program pengolahan limbah yang efisien untuk meminimalisir dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Strategi ini juga meliputi penguatan sistem informasi dan data lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis ilmiah.

Dalam rangka mengoptimalkan penanganan kerusakan serta pelestarian lingkungan hidup, pemerintah juga berupaya untuk menarik partisipasi aktif masyarakat menjaga lingkungan hidup melalui program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup merupakan kunci keberhasilan dalam upaya menciptakan lingkungan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

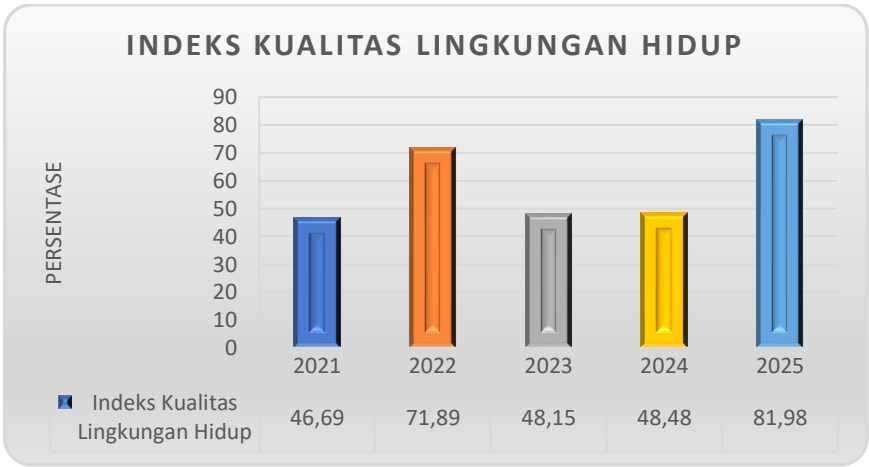
Dalam upaya pelaksanaan program bidang lingkungan hidup, pemerintah perlu menetapkan indikator agar dapat senantiasa melakukan pemantauan, evaluasi serta inovasi. Indikator yang dipilih harus dapat menggambarkan kinerja yang relevan serta besaran yang realistis. Untuk mencapai kondisi lingkungan hidup yang berkualitas, Kabupaten Luwu dalam periode lima tahun ke depan melakukan paralelisasi program untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah seperti capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas

Pengolahan Sampah, dan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah. Sebagai gambaran awal, berikut sajian capaian indikator yang diperoleh kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir.

a. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Kabupaten Luwu telah menunjukkan dinamis dalam capaian kualitas lingkungan hidup selama lima tahun terakhir, dengan pola perkembangan yang fluktuatif. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2025 dengan skor 81.98, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan yang signifikan, namun diikuti dengan fluktuasi di tahun-tahun berikutnya.

Grafik 2.10.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Luwu 2026.

Fluktuasi capaian IKLH ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu. Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian khusus meliputi: (1) konsistensi dalam penerapan kebijakan lingkungan, (2) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan, (3) penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, serta (4) peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terukur, Kabupaten Luwu untuk meningkatkan capaian IKLH jauh lebih baik lagi di masa mendatang, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan secara nasional.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Luwu dari tahun 2021 sampai tahun 2025 menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2021 sampai tahun 2022 belum dilakukan pengukuran sehingga capaian masih 0. Barulah pada tahun 2023 kabupaten Luwu mulai melakukan pengukuran terkait persentasi rumah tangga dengan akses sanitasi aman yang mana terlihat adanya kenaikan nilai capaian. Meskipun kenaikan capaian indikator ini relatif kecil yaitu 0,44 persen dari tahun 2024 ke 2025, namun penguatan program sanitasi aman di Kabupaten Luwu terus diupayakan. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.11.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kab. Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Data Perencanaan PUTR Kabupaten Luwu 2026.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman serta tertata dengan baik. Masalah sanitasi pada kawasan perumahan merupakan maslah yang kompleks. Hal ini terjadi karena lingkungan perumahan yang baik harus menyediakan fasilitas untuk pengelolaan lingkungannya. SPAL Domestik Terpusat atau SPAL Domestik-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumbernya secara kolektif ke sub sistem pengolahan untuk diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Fasilitas ini bertujuan untuk mengolah hasil limbah rumah tangga yang dialirkan ke suatu wadah pengolahan terpusat. Infrastruktur ini disediakan agar limbah rumah tangga tidak mencemari lingkungan sekitar perumahan.

Sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu (SPALD-T) di kabupaten Luwu telah dilaksanakan. Namun kinerja pelayanan dari kegiatan ini baru dilakukan pencatatan di tahun 2024 sehingga data capaian SPALD-T belum dapat dimuat untuk tahun 2021 sampai 2023. Berikut hasil capaian layanan SPALD-T pada tahun 2021 ke 2025.

Tabel 2.8.
Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani SPALD-T kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

Rumah dengan SPALD-T	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Rumah Tangga	na	na	na	41.319	79.950
Jumlah Rumah Tangga yang Sudah Dilayani	na	na	na	440	540
Persentase	na	na	na	1,06	0,68

Sumber: Dinas PUTR Kab. Luwu, 2026.

Berdasarkan data layanan sistem penglolahan air limbah domestik terpadu di kabupaten Luwu, perlu adanya peningkatan layanan tersebut. Persentase layanan pada tahun 2025 hanya 0,68 persen menurun dari tahun sebelumnya yaitu 1,06. Hal ini disebabkan karena jumlah rumah tangga meningkat meski demikian, jumlah rumah tangga yang sudah dilayani meningkat sebanyak 100 rumah tangga dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pada program kegiatan ini dengan melakukan penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan tata kelola agar masyarakat kabupaten Luwu dapat terlindung dari pencemaran limbah khususnya limbah domestik. Dengan layanan tersebut, lingkungan perumahan dapat terhindar dari kumuh sehingga masyarakat yang menghuni kawasan perumahan dapat lebih sehat. Disamping itu, pencatatan kinerja pelayanan ini harus dilakukan guna menyediakan data capaian dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan secara khusus pada organisasi pemerintahan yang membidangi sektor tersebut.

c. Persampahan

Masalah persampahan merupakan tantangan yang besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk serta intensitas kegiatan manusia serta alam itu sendiri. Permasalahan sampah perkotaan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Solusi tidak dapat lagi

hanya bertumpu pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai lokasi pembuangan akhir, melainkan harus dimulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan industri. Strategi pengelolaan sampah yang efektif melibatkan kombinasi upaya pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*), yang dikenal sebagai konsep 3R.

Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penting untuk mengoptimalkan peran Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) dan menggalakkan program bank sampah. Ini akan membantu memilah sampah sejak awal, mengubahnya menjadi nilai ekonomi, dan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sarana dan prasarana pengangkutan sampah, meningkatkan kapasitas pengolahan, serta memanfaatkan teknologi inovatif seperti pengomposan, biogasifikasi, atau bahkan konversi sampah menjadi energi (*waste-to-energy*) yang berwawasan lingkungan, tentunya dengan memperhatikan dampak lingkungannya.

Partisipasi aktif dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Sosialisasi masif mengenai pentingnya pemilahan sampah, edukasi tentang dampak negatif sampah, serta pelatihan pengolahan sampah mandiri harus terus digencarkan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi, diharapkan masalah persampahan dapat ditangani secara sistematis, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Grafik 2.12.
Persentase Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu 2026.

Kinerja Kabupaten Luwu terhadap pengelolaan sampah masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Luwu pada tahun 2025 baru sebesar 37,81 persen. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di kabupaten Luwu meningkat dari 3,12 persen pada tahun 2024 menjadi 13,80 persen pada tahun 2025. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya, namun capaian tersebut masih rendah. Oleh karena itu, terkait masalah sampah pemerintah kabupaten Luwu berupaya untuk terus meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang lebih andal. Disamping itu penguatan kapasitas organisasi melalui penerbitan perda persampahan dan penguatan pendanaan juga merupakan agenda yang krusial untuk segera dilaksanakan.

Grafik 2.13.
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2026.

Upaya-upaya yang perlu dilaksanakan meliputi penguatan fasilitas pemilahan sampah di sumbernya (rumah tangga dan komersial), peningkatan kapasitas daur ulang dan pengomposan, serta pengembangan infrastruktur pengolahan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam praktik 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menjadi kunci vital untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Luwu.

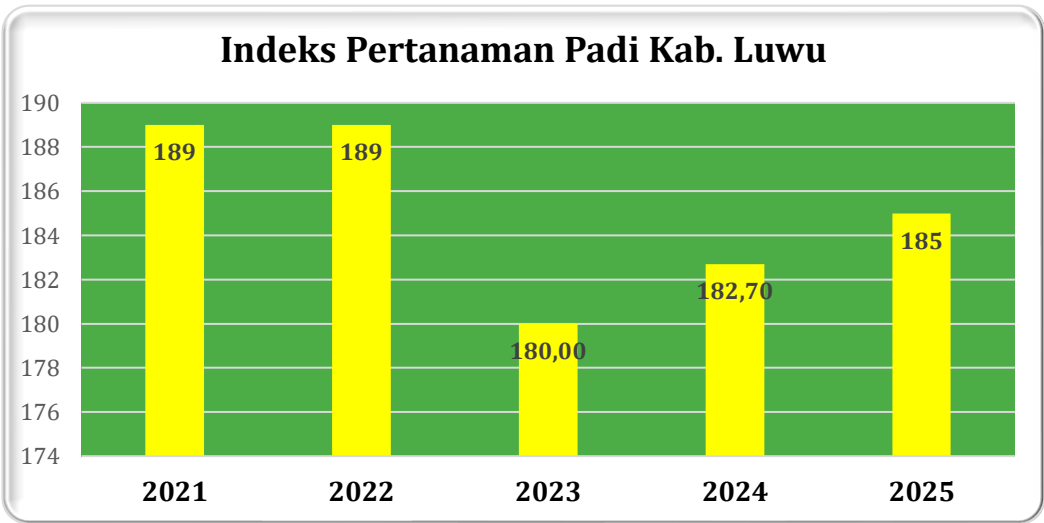
d. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia

Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia di Kabupaten Luwu masih sangat rendah, Meskipun pupuk organik memiliki banyak manfaat bagi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, perbaikan struktur tanah, dan keberlanjutan lingkungan namun penggunaannya oleh masyarakat masih tergolong rendah dibandingkan dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Berdasarkan data penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu tahun 2024 proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia hanya sebesar 0,37%.

e. Indeks Pertanaman Padi

Indeks Pertanaman pada padi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur intensitas atau frekuensi penanaman padi dalam satu tahun pada suatu lahan sawah. Berikut ini data IP pada padi di Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2025.

Grafik 2.14.
Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2026.

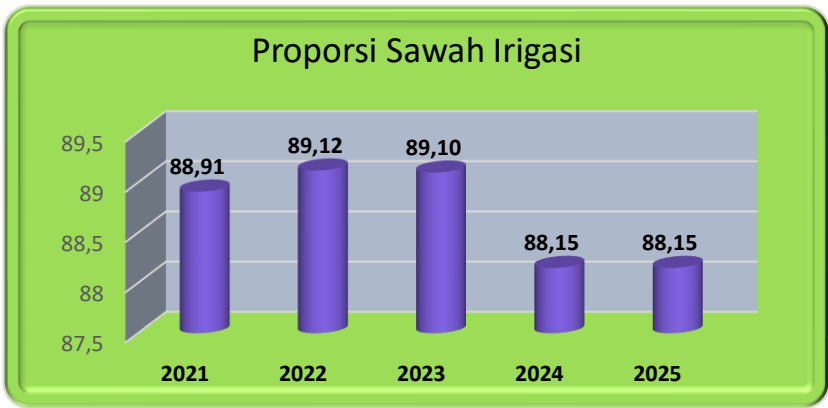
Berdasarkan grafik di atas, IP Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir (2021-2025) mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 189 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap hektar lahan sawah di Kabupaten Luwu ditanami padi sebanyak 1,89 kali dalam setahun.

Kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 1,80 kali tanam dalam setahun, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 1,85 kali pertahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, kondisi geografis, dan cuaca.

f. Proporsi Sawah Irigasi

Proporsi sawah irigasi adalah perbandingan luas lahan sawah yang diairi secara teratur dengan sistem irigasi terhadap total luas lahan sawah. Dengan kata lain, ini menunjukkan seberapa besar bagian dari lahan sawah yang mendapatkan pasokan air secara terkendali untuk mendukung pertumbuhan padi. Namun masih ada lahan sawah yang belum beririgasi atau tadah hujan. Berikut ini data proporsi sawah irigasi di Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2025.

Grafik 2.15.
Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa proporsi sawah irigasi di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir (2021-2025) berfluktuasi. Pada tahun 2021 capaiannya sebesar 88,91 persen dan meningkat tahun 2022 menjadi 89,12 persen, Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 88,15 persen.

g. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Kabupaten Luwu memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya baik perikanan air Laut maupun air tawar seperti Ikan Bandeng, Udang, Rumput

Laut, Ikan Nila, Ikan Mas dan Ikan Lele. Pengembangan Perikanan Budidaya dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.16.
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



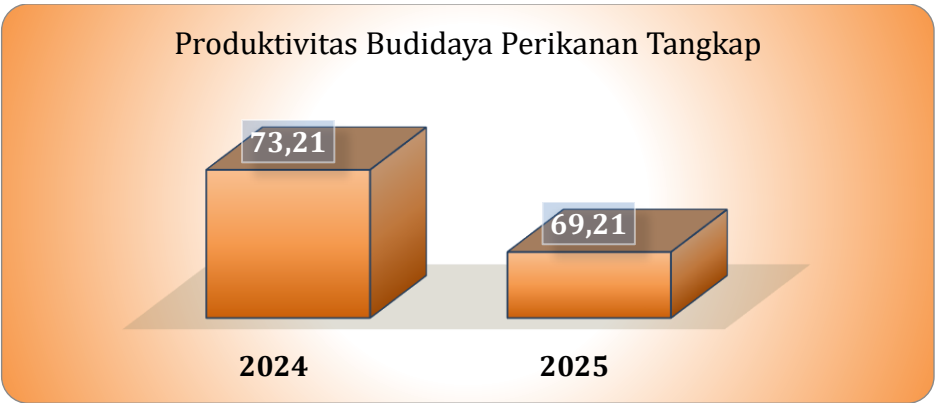
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2026.

Grafik diatas menunjukkan jumlah produksi perikanan budidaya Kabupaten Luwu lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2021 mencapai 627.586,86 ton, meningkat di tahun 2025 menjadi 666.126,25 ton.

h. Produktivitas Budidaya Perikanan Tangkap

Produktivitas budidaya perikanan tangkap adalah indikator yang mengukur kontribusi nelayan dan pembudidaya terhadap PDRB sektor perikanan. Capaian produktivitas budidaya perikanan tangkap Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 73,21 persen dengan total PDRB sektor perikanan di tahun tersebut sebesar Rp. 4.653,29 miliar. Kemudian pada tahun 2025 menurun menjadi 69,21 persen yang disebabkan oleh menurunnya PDRB sektor perikanan menjadi Rp. 4.399,13 miliar. Berikut grafik yang menunjukkan capaian produktivitas budidaya perikanan tangkap di Kabupaten Luwu tahun 2024-2025.

Grafik 2.17.
Produktivitas Budidaya Perikanan Tangkap Kabupaten Luwu
Tahun 2024-2025

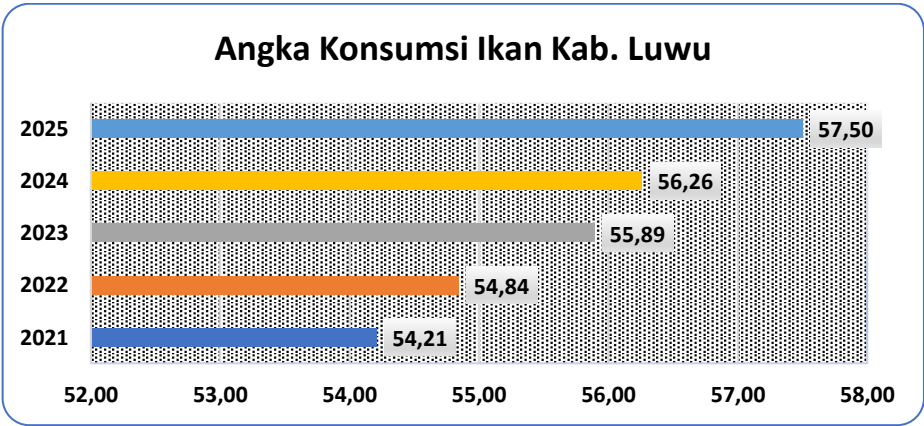


Sumber : BPS Kab. Luwu dan Dinas Perikanan Kab. Luwu, 2026.

i. Angka Komsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan (AKI) adalah salah satu parameter penting untuk mengetahui tingkat konsumsi makan ikan masyarakat pada suatu wilayah. Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Berikut ini Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat di Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2025.

Grafik 2.18.
Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa AKI di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan yaitu dari 54,21 Kg/Kapita/Tahun menjadi 57,50 Kg/Kapita/Tahun. konsumsi atau pola konsumsi pangan seperti ikan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya ekonomi tetapi juga

budaya, ketersediaan, *aksesibilitas*, pendidikan, gaya hidup dan sebagainya.

2.1.1.6. RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Ketahanan suatu wilayah terhadap dampak perubahan iklim global dan bencana alam merupakan hasil interaksi kompleks antara kemampuan masyarakat, daya tahan infrastruktur, dan kesehatan ekosistem. Masyarakat yang tangguh terhadap bencana ditandai dengan pengetahuan mengenai cara merespon dengan cepat saat sebelum sampai dengan pasca bencana. Jaringan sosial yang kuat, kepemimpinan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam membangun kesiapsiagaan dan meringankan dampak bencana. Daya tahan infrastruktur yang andal ditandai tersedianya fasilitas yang kokoh dan tepat untuk memberikan perlindungan serta peringatan dini sebelum dan setelah terjadi bencana. Selain itu, sistem peringatan dini yang handal dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai merupakan faktor penentu dalam meminimalisir dampak negatif dan mempercepat pemulihan.

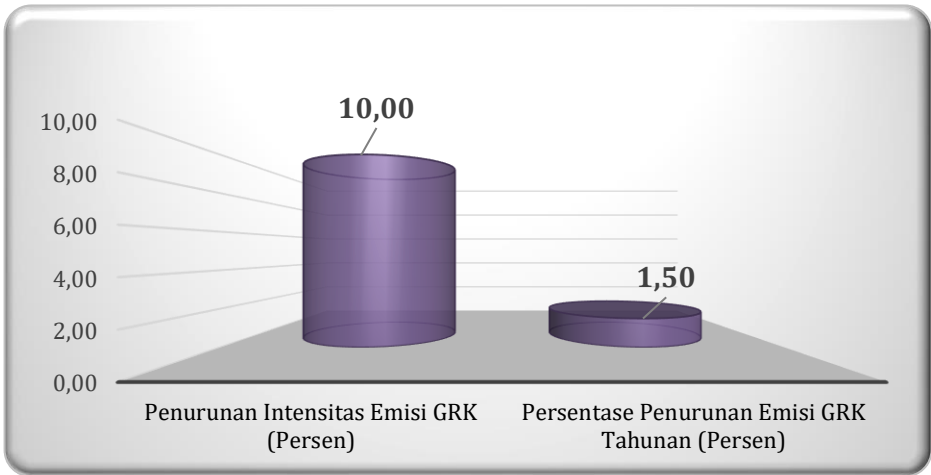
Infrastruktur yang tahan bencana merupakan pilar penting dalam menghadapi perubahan iklim. Ini mencakup bangunan tahan gempa dan banjir, sistem drainase yang efisien, jaringan transportasi yang andal, dan sistem energi yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur hijau, seperti taman kota, hutan kota, dan sistem pengolahan air hujan, tidak hanya meningkatkan ketahanan ekosistem tetapi juga mengurangi risiko bencana. Penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam proses pembangunan. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang handal juga krusial untuk koordinasi tanggap darurat dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Ekosistem yang sehat dan lestari berperan sebagai penyangga utama dalam menghadapi dampak iklim ekstrem. Keanekaragaman hayati yang tinggi meningkatkan kemampuan ekosistem untuk menyerap guncangan, seperti banjir dan kekeringan. Hutan, bakau,

dan lahan basah berfungsi sebagai pelindung alami terhadap bencana dan menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat. Upaya konservasi dan restorasi ekosistem sangat penting untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pencegahan deforestasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati merupakan langkah-langkah krusial dalam membangun ekosistem yang tangguh.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Luwu berupaya untuk memberikan pendekatan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan resiliensi terhadap bencana. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Indeks Risiko Bencana merupakan barometer pokok dalam mengukur kinerja pemerintah terkait kebencanaan. Sebagai gambaran awal, berikut capaian perolehan indikator tersebut.

Grafik 2.19.
Penurunan Intensitas Emisi GRK Kab. Luwu
Tahun 2024



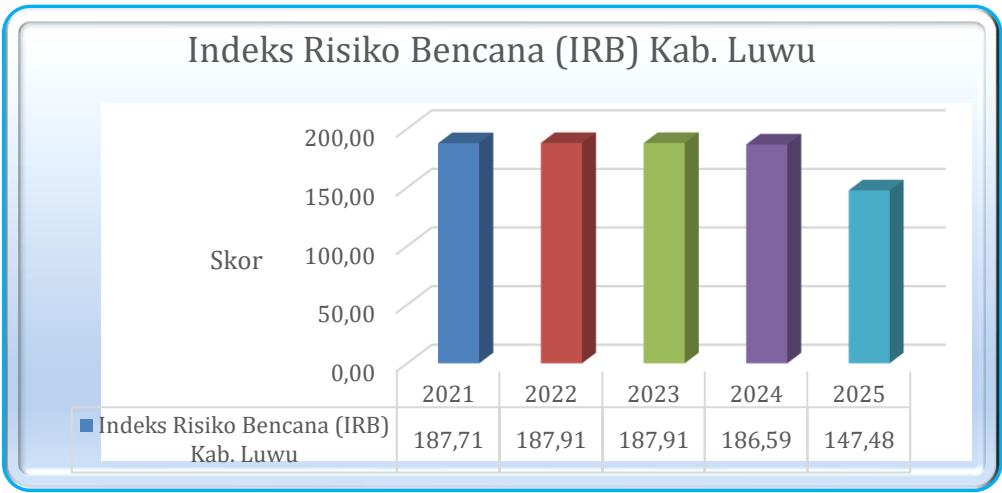
Sumber : Data Perencanaan DLH Kabupaten Luwu 2025.

Pengukuran Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pemerintah daerah didorong untuk menyiapkan rencana aksi mandiri dalam rangka mengatasi efek global dari Emisi Gas Rumah Kaca. Pengendalian lingkungan khususnya pelesatarian tanaman untuk pengendalian produksi karbon sebagian besar dilaksanakan di daerah yang memiliki tutupan lahan hutan. Peran pemerintah daerah sangat krusial dimana intervensi program langsung dilaksanakan di daerah masing-masing. Program-program pengendalian efek rumah

kaca sangat dekat dengan masyarakat khususnya di pedesaan yang pemukimannya berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Berdasarkan data capaian di atas, terlihat bahwa penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 10,00 persen, sementara persentase penurunan Emisi GRK tahunan sebesar 1,50 persen. Capaian tersebut termasuk dalam kategori baik yang menggambarkan adanya perbaikan kondisi lingkungan yang berkaitan jumlah emisi karbon dari aktivitas manusia, peningkatan ekosistem pengurai karbon, serta penurunan penggunaan bahan-bahan pemicu Efek Rumah Kaca. Ada enam kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penurunan GRK di kabupaten Luwu diantaranya, pengadaan bibit pertanian dan Perkebunan yang termasuk dalam aktivitas pengurangan karbon terutama dari sektor lahan pertanian, perkebunan dan reboisasi hutan untuk percepatan implementasi strategi mitigasi berbasis pertanian dan perkebunan rendah karbon yang inklusif. Terkait Emisi Gas Ruma Kaca (GRK) di kabupaten Luwu, pemerintah dan masyarakat terus berupaya untuk melakukan kegiatan penghijauan terutama di daerah hulu DAS dengan melakukan peningkatan program penanaman pohon buah-buahan unggulan daerah seperti pohon alpukat, mangga dan durian.

Grafik 2.20.
Indeks Resiko Bencana Kab. Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : BPBD Kabupaten Luwu, 2026.

Di sisi lain, indeks resiko bencana kabupaten Luwu mengalami tren penurunan nilai dari tahun 2021 sebesar 187,71 menjadi 147,48 pada tahun 2025. Meskipun perolehan nilai dalam kurun lima tahun

terakhir mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan indeks resiko bencana kabupaten Luwu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai langkah mitigasi yang dipadukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak swasta, antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan Penguatan kapasitas kawasan berbasis masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), yang dilaksanakan oleh BPBD, pihak swasta dan akademisi yaitu PT Masmino bekerja sama dengan Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) dan BPBD membentuk Desa Tangguh Bencana dan melaksanakan edukasi mitigasi bencana;
2. Pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System) banjir oleh PT Masmino;
3. Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah yang melibatkan stakeholder;
4. Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana yang bekerja sama dengan Unhas;
5. Pemasangan Tsunami gauge (deteksi tsunami) dan WRS INATEWS (deteksi gempa bumi).

Adapun jumlah kejadian bencana di Kabupaten Luwu pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9.

Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian		
		Tanah Longsor	Banjir	Puting Beliung
1	Larompong	1	6	1
2	Larompong Selatan	0	2	2
3	Suli	0	6	1
4	Suli Barat	0	4	0
5	Belopa	0	0	0
6	Kamanre	0	1	0
7	Belopa Utara	0	0	0
8	Bajo	1	0	0
9	Bajo Barat	1	0	0
10	Bassesangtempe	1	0	0
11	Latimojong	4	0	1
12	Bassesangtempe Utara	2	0	0
13	Bupon	0	3	0
14	Ponrang	0	1	1
15	Ponrang Selatan	0	1	0
16	Bua	0	4	1
17	Walentrang	0		0

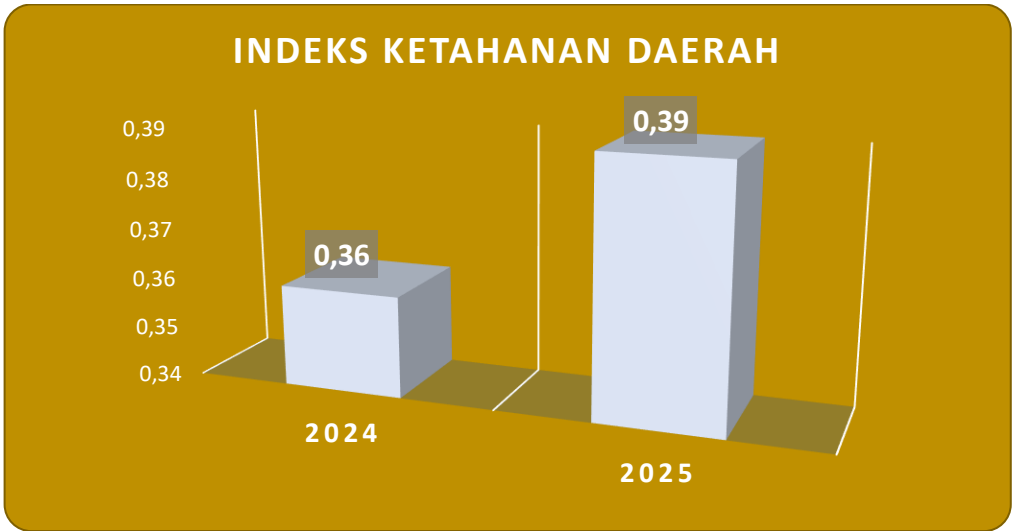
No	Kecamatan	Jumlah Kejadian		
		Tanah Longsor	Banjir	Puting Beliung
18	Walenrang Timur	0	3	0
19	Lamasi	0	1	1
20	Walenrang Utara	0	1	0
21	Walerang Barat	0	0	0
22	Lamasi Timur	0	3	2
Jumlah		10	34	10

Sumber : BPBD Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa banjir merupakan bencana yang paling banyak terjadi di tahun 2025 dengan jumlah kejadian sebanyak 34 kali, diikuti bencana tanah longsor dan puting beliung sebanyak 10 kali kejadian.

Sementara itu, indeks ketahanan daerah kabupaten Luwu tahun 2024 sebesar 0,36 kemudian meningkat menjadi 0,39 pada tahun 2025. Meskipun terjadi peningkatan namun, capaian tersebut masih dalam kategori rendah dan mengindikasikan bahwa resiliensi daerah dalam memitigasi risiko bencana seperti pencegahan, kesiapsiagaan, atau pemulihan belum optimal.

Grafik 2.21.
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2024-2025



Sumber : BPBD Kabupaten Luwu, 2026.

2.1.1.7. DEMOGRAFI

Aspek demografi wilayah mencakup berbagai elemen penting yang menggambarkan karakteristik populasi di suatu daerah. Aspek demografi suatu wilayah mencakup jumlah penduduk, komposisi penduduk serta keberagaman sosial masyarakat. Kabupaten Luwu memiliki karakteristik demografi yang unik dan dinamis. Data

kependudukan menunjukkan bahwa wilayah kabupaten Luwu dihuni oleh beragam kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda. Distribusi penduduk tidak merata, dengan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di daerah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi seperti Belopa, Padang Sappa, Suli, Larompong, Sakti, Lamasi dan pusat kegiatan di kecamatan lainnya. Proporsi penduduk usia produktif cukup besar, yang menunjukkan potensi ekonomi yang tinggi. Faktor-faktor seperti migrasi, kelahiran, dan kematian juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika kependudukan di Kabupaten Luwu. Dengan demikian, perencanaan yang baik harus memperhatikan dinamika pertumbuhan penduduk dalam wilayahnya. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2025 sebanyak 391.114 jiwa. Proyeksi Penduduk kabupaten Luwu dari tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu 2026-2030

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2026	394.240
2027	399.130
2028	404.030
2029	408.860
2030	413.550

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Luwu 2025-2045.

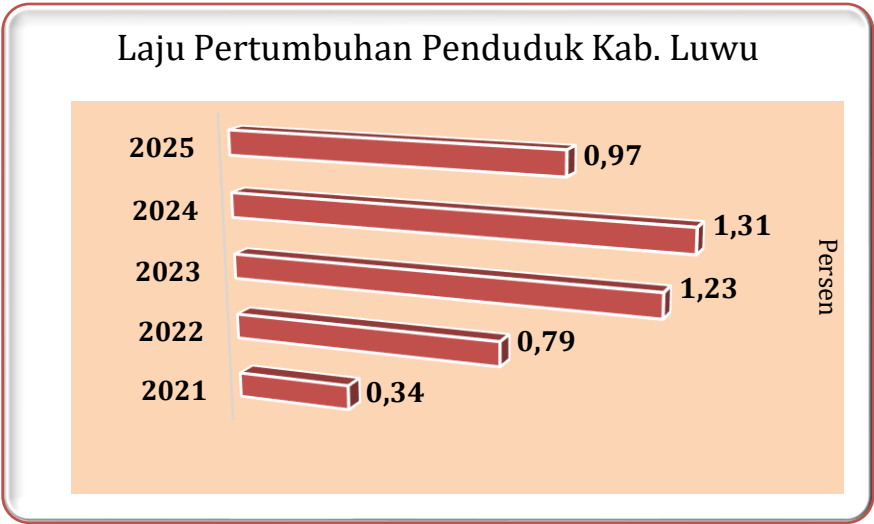
Proyeksi jumlah penduduk tahun 2026 sampai tahun 2030 menunjukkan ada peningkatan jumlah penduduk sebesar 4,67 persen atau terjadi prediksi pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat sebesar 19.310 jiwa selama lima tahun ke depan. Dinamika pertumbuhan penduduk ini akan mempengaruhi kebutuhan infastruktur, peningkatan kebutuhan masyarakat akan sumberdaya alam, perekonomian masyarakat serta kondisi sosial budaya. Sehingga, perhatian pemerintah terkait data demografi penduduk diharapkan terus dibenahi. Sinergitas antara organisasi pemerintah daerah menjadi kunci dalam validitas pencatatan demografi penduduk. Jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi diupayakan agar

terkelola sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Perlu adanya peningkatan kapasitas dalam hal pencatatan kondisi demografi agar diperoleh data yang lebih presisi guna tercapainya perencanaan yang lebih berkualitas.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perubahan persentase dalam jumlah penduduk suatu wilayah dari tahun ke tahun. Berikut adalah data laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu.

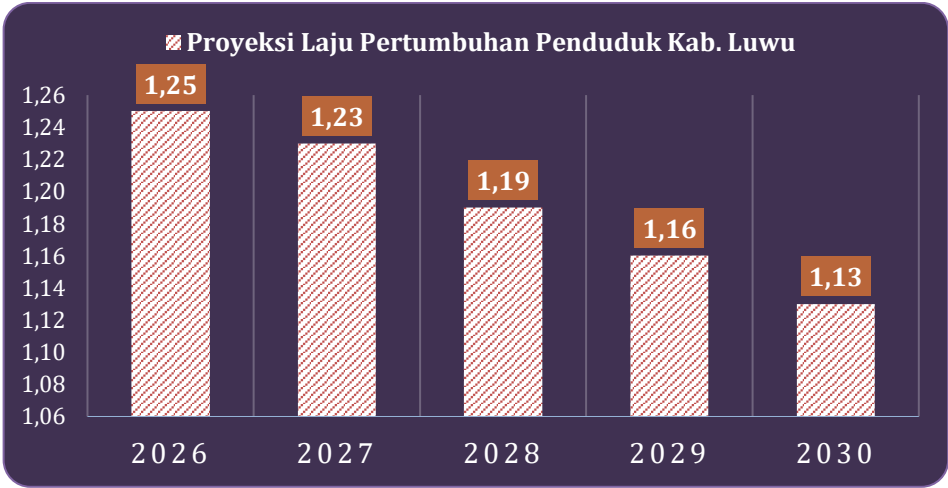
Grafik 2.22.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2026.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu fluktuatif berdasarkan data lima tahun terakhir. Nilai laju pertumbuhan terendah dalam kurun lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 yakni 0,34 persen sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2024 yakni di angka 1,31 persen. Kemudian, pada tahun 2025 pertumbuhan penduduk menurun menjadi 0,97 persen. Adapun proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu dari tahun 2026-2030 sebagai berikut.

Grafik 2.23.
Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu
Tahun 2026-2030



Sumber : Data Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Sulsel diolah.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun ke depan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu terus mengalami penurunan, yakni dari 1,25% pada tahun 2026 menjadi 1,13% di tahun 2030. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti angka kelahiran yang menurun karena penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan sehingga angka perkawinan menurun, peningkatan angka kematian dan migrasi keluar yang lebih tinggi daripada migrasi masuk.

2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan gambaran struktur populasi berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Komposisi usia, misalnya, menunjukkan proporsi penduduk di berbagai kelompok umur, seperti anak-anak, usia produktif, dan lansia. Ini memberikan informasi penting tentang potensi ekonomi, beban sosial, dan kebutuhan layanan publik. Rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan, menunjukkan kesetaraan gender dan dinamika sosial. Tingkat pendidikan dan status pekerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan potensi ekonomi suatu wilayah. Memahami komposisi penduduk secara menyeluruh sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan,

guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Berikut Komposisi Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Grafik 2.24.
Komposisi Penduduk Kab. Luwu Tahun 2025



Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2026.

Grafik 2.25.
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Luwu Tahun 2026-2030



Sumber : Data BPS diolah.

Data tahun 2025 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia 15-19 tahun (35.952 jiwa), diikuti kelompok usia 5-9 tahun (35.616 jiwa), dan 15-19 tahun (35.393 jiwa). Konsentrasi penduduk usia produktif

(15-64 tahun) pada tahun 2025 masih termasuk dalam bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif melebihi penduduk usia non-produktif. Potensi ini dapat menjadi modal utama pembangunan Kabupaten Luwu yakni dengan cara mengelola bonus demografi dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, dilain sisi berdasarkan data BPS bahwa dalam kurun tahun 2026-2030 rasio ketergantungan di Kabupaten Luwu semakin meningkat yakni dari 45,26% pada tahun 2026 menjadi 46,72% di tahun 2030. Hal ini berarti bahwa dalam lima tahun kedepan penduduk non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) yang menjadi tanggungan bagi penduduk usia produktif semakin bertambah.

3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Jika rasio jenis kelamin lebih dari 100, maka jumlah penduduk laki-laki pada daerah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Berikut data rasio jenis kelamin penduduk kabupaten Luwu tahun 2021-2025.

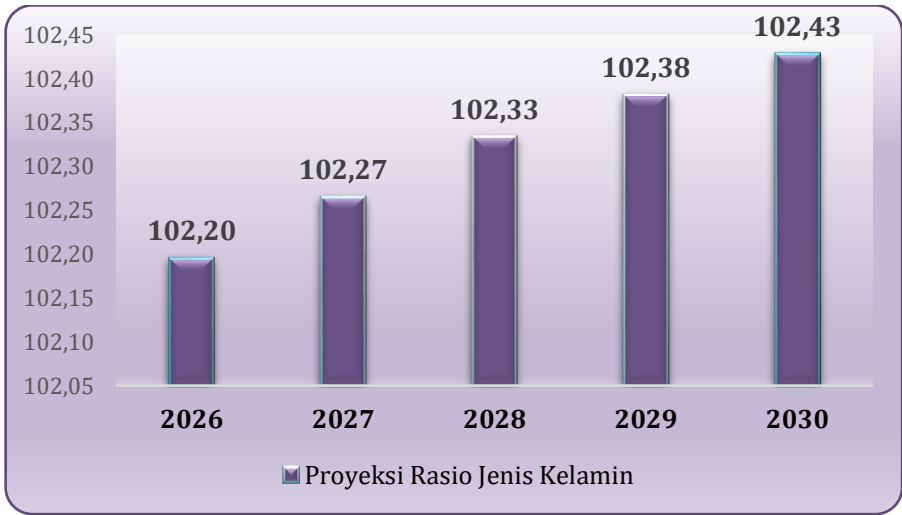
Grafik 2.26.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai angka lebih dari 100. Sementara itu, rasio jenis kelamin di Kabupaten Luwu dari tahun 2026-2030 diproyeksikan terus meningkat sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 2.27.
Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu
Tahun 2026-2030



Sumber : Data BPS diolah, 2026.

Dari data pada grafik di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2026-2030 rasio jenis kelamin semakin meningkat, hal ini berarti bahwa ke depannya jumlah penduduk laki-laki akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Banyaknya penduduk laki-laki terutama pada usia produktif dapat meningkatkan pasokan tenaga kerja. Namun, disisi lain dapat meningkatkan persaingan tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, dampak lainnya adalah meningkatnya ketimpangan gender, penurunan angka perkawinan dan angka kelahiran.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut,

biasanya diukur dalam satuan per kilometer persegi. Berikut adalah data grafik kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.28.
Kepadatan Penduduk Kab. Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2026.

Grafik 2.29.
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2026-2030



Sumber : Data BPS diolah, 2026.

Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data BPS kabupaten Luwu, kepadatan penduduk meningkat relatif pesat pada tahun 2025 yakni berada pada angka 130,36 dan diproyeksikan terus meningkat hingga tahun 2030. Peningkatan kepadatan penduduk secara langsung akan menyebabkan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan publik mencanangkan beberapa program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima agar tercapai dearajat kesejahteraan yang lebih baik. Penyediaan akses terhadap pangan

yang sehat dan terjangkau, akses layanan kesehatan prima, akses terhadap infrastruktur penunjang perekonomian merupakan agenda yang akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun kedepan.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kesejahteraan ekonomi, Kesehatan untuk semua, perlindungan social yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, serta kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif. Gambarkan kondisi dari aspek kesejahteraan masyarkat ini dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. KESEJAHTERAAN EKONOMI

Kesejahteraan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki pendapatan yang berkelanjutan, di Kabupaten Luwu gambaran kesejahteraan ekonomi dicerminkan antara lain melalui kondisi Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menggambarkan persentase perubahan dalam ukuran ekonomi suatu negara atau wilayah dari tahun ke tahun, adapun Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain. Adapun Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengn pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimana Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pemerataan dan menurunnya tingkat kemiskinan. Berikut adalah data perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Luwu :

Tabel 2.11.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

NO	WILAYAH	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	NASIONAL	3,70	5,31	5,05	5,03	5,11

NO	WILAYAH	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
2.	SULSEL	4,64	5,10	4,51	5,02	5,43
3.	LUWU	6,03	5,69	5,64	4,36	7,43

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

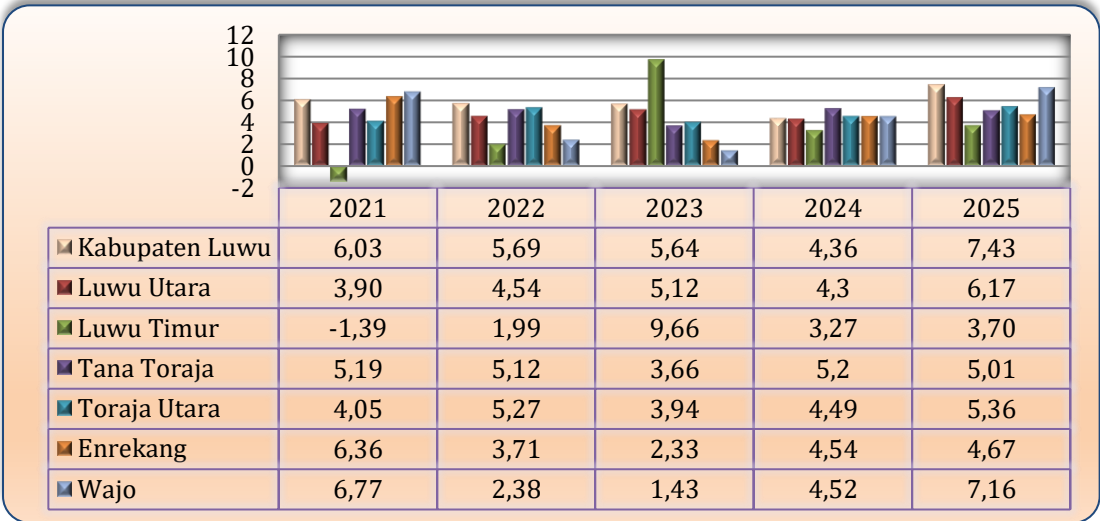
Tabel 2.12.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.014.205,84	5.265.649,50	5.386.399,90	5.480.000,12	5.884.130
B.Pertambangan dan Penggalian	240.566,13	250.950,10	275.432,20	290.000,27	302.750
C. Industri Pengolahan	459.377,52	480.108,50	501.005,20	577.000,80	764.930
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13.272,90	13.882,50	15.712,30	17.000,48	15.660
E. Pengadaan Air	1.696,04	1.856,40	1.917,20	1.000,92	2.070
F. Konstruksi	854.231,98	934.478,80	1.081.242,00	1.115.000,35	1.175.580
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.279.600,92	1.391.380,10	1.531.722,30	1.655.000,38	1.737.890
H. Transportasi dan Pergudangan	79.510,61	92.690,00	100.820,60	107.000,99	112.720
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76.846,54	90.356,00	101.229,60	108.000,19	118.070
J. Informasi dan Komunikasi	377.130,94	398.979,70	433.679,40	467.000,47	486.120
K. Jasa Keuangan	157.130,94	158.321,10	153.556,40	159.000,81	169.400
L. Real Estate	642.735,77	673.486,80	711.015,20	753.000,90	766.720
M,N. Jasa Perusahaan	2.553,04	2.887,60	3.165,80	3.000,40	3.630
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	473.055,33	471.699,00	489.235,80	488.000,54	536.660
P. Jasa Pendidikan	399.928,80	416.222,80	450.795,10	479.000,30	501.060
Q. Jasa Kesehatan	346.238,87	367.715,20	393.955,20	426.000,46	456.980
R,S,T,U. Jasa Lainnya	31.270,49	34.006,70	37.256,30	43.091,09	47.360
PDRB ADHK	10.449.750,24	11.044.670,90	11.668.140,40	12.176.488,90	13.081.730

Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Grafik 2.30.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

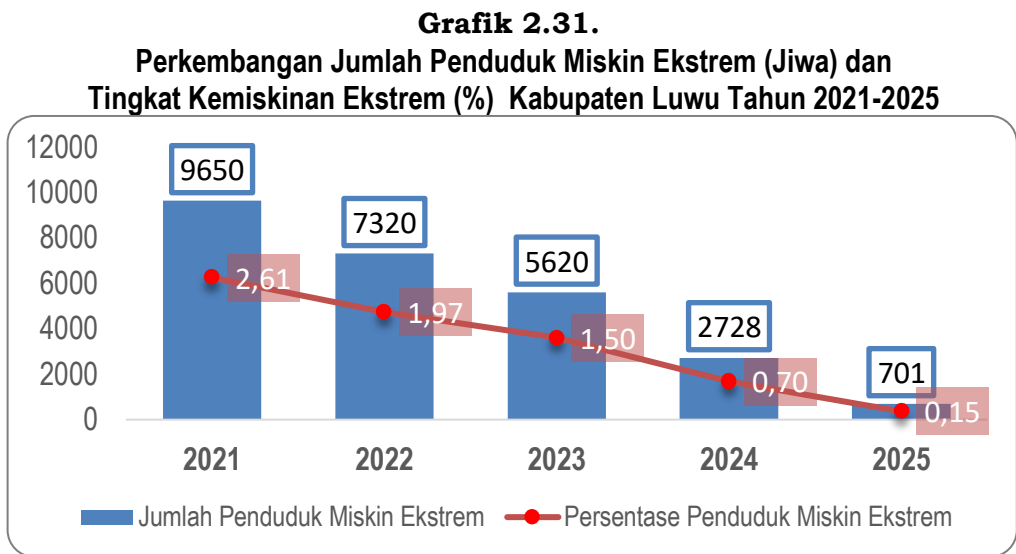
Selama periode 2021–2025, perekonomian Kabupaten Luwu menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi namun tetap positif. Pada tahun 2025, ekonomi Kabupaten Luwu tumbuh sebesar 7,43 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,36 persen. Capaian tersebut di atas provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi setelah mengalami perlambatan pada tahun sebelumnya. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025 terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 32,39 persen. Selain itu, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 9,90 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,85 persen. Beberapa lapangan usaha lain yang juga mencatat pertumbuhan relatif tinggi antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,13 persen, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,16 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 7,37 persen, menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2025 didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi pada sejumlah lapangan usaha utama serta didukung oleh peningkatan aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat. Stabilitas harga yang relatif terjaga dan peningkatan aktivitas investasi juga turut memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian daerah. Jika

dibandingkan dengan wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu di tahun 2025 tertinggi diantara daerah lainnya.

b. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996). Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,90 PPP (*Purchasing Power Parity*). Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12 /orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS,2021). Secara sederhana apabila dalam 1 (satu) keluarga terdiri dari 4 (empat) orang (ayah, ibu, dan dua anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.432.934 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori Miskin Ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan capaian penanggulangan kemiskinan ekstrem Kabupaten Luwu periode 2021-2024 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Luwu sebanyak 9.650 Jiwa atau sebesar 2,61 persen, mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 2.728 jiwa atau sebesar 0,70 persen. Pada tahun 2025 kemiskinan ekstrem tidak lagi dihitung oleh BPS, namun dihitung berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berikut data kemiskinan ekstrem di kabupaten Luwu tahun 2021-2025.



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, dan DTSEN diolah, Tahun 2026.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, dimana nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021-2025 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB perkapita tercatat sebesar 48,30 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2025 mencapai 63,45 juta rupiah. Begitupun dengan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga terus meningkat. Pada tahun 2021 nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar 28,29 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2025 menjadi sebesar 33,61 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.

Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	10.449.750,24	11.044.670,90	11.668.140,40	12.176.000,49	13.081.730
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	17.839.990,46	19.980.972,20	21.755.643,50	22.952.200,00	24.699.390
Jumlah Penduduk (Jiwa)	367.454	369.820	380.679	385.361	391.114
PDRB ADHK Perkapita (juta rupiah)	28,29	29,51	30,76	31,69	33,61
PDRB ADHB Perkapita (juta rupiah)	48,30	53,38	57,36	59,73	63,45

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2026.

Meskipun PDRB per kapita kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir terus meningkat, namun capaian tersebut masih di bawah provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Di tahun 2025 PDRB per kapita ADHB Sulawesi Selatan sebesar 78,74 juta rupiah per kapita per tahun dan Nasional sebesar 83,74 juta rupiah per kapita per tahun.

Tabel 2.14.

Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025

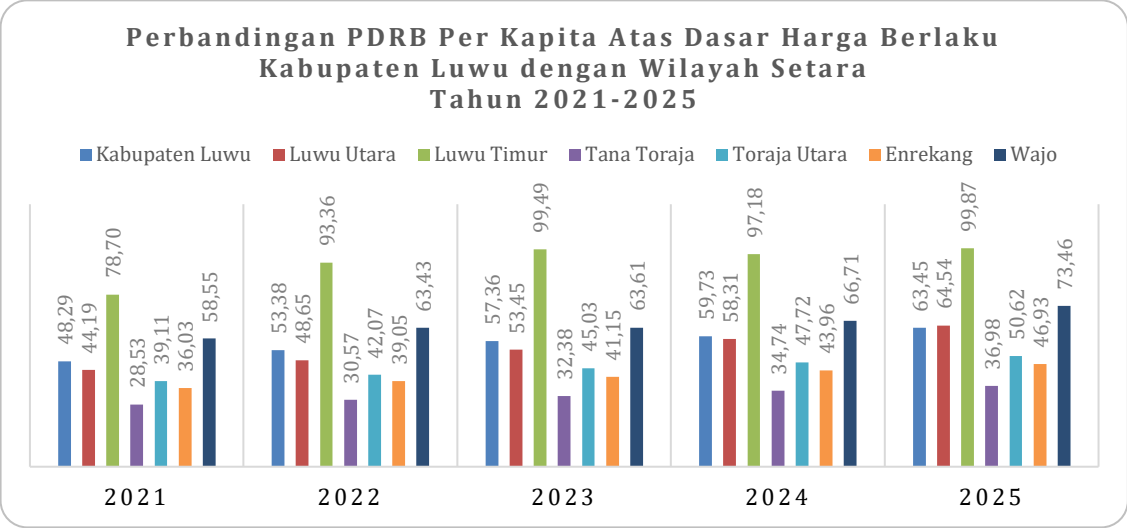
Tahun	Kabupaten Luwu		Provinsi Sulawesi Selatan		Nasional	
	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	PDB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	PDB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)
2021	48,29	28,29	59,50	37,50	62,26	40,78
2022	53,38	29,51	65,35	38,98	71,04	42,47
2023	57,36	30,76	69,71	40,29	74,96	44,14
2024	59,73	31,68	73,57	41,86	78,62	45,88
2025	63,45	33,61	78,74**	43,67**	83,74**	47,74**

** angka sangat sementara

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2026.

Jika dibandingkan dengan wilayah setara, PDRB per kapita ADHB kabupaten Luwu pada tahun 2025 berada di urutan keempat tertinggi di bawah kabupaten Luwu Timur, kabupaten Wajo, dan kabupaten Luwu Utara. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.32.
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu dengan Wilayah Setara Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Bahkan pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai poin utama dari pembangunan daerah. IPM didefinisikan sebagai kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Nasional Bruto Perkapita. IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian yang direpresentasikan oleh 3 komponen meliputi: Indeks Kesehatan panjang umur dalam menjalani hidup sehat, diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Indeks (RLS), dan Indeks paritas daya beli/Purchasing Power Party (PPP).

IPM Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, adapun peningkatan tersebut sejalan dengan perkembangan capaian pada masing-masing komponen perhitungan seperti AHH, HLS, dan Pengeluaran Perkapita yang merupakan pendorong utama capaian IPM.

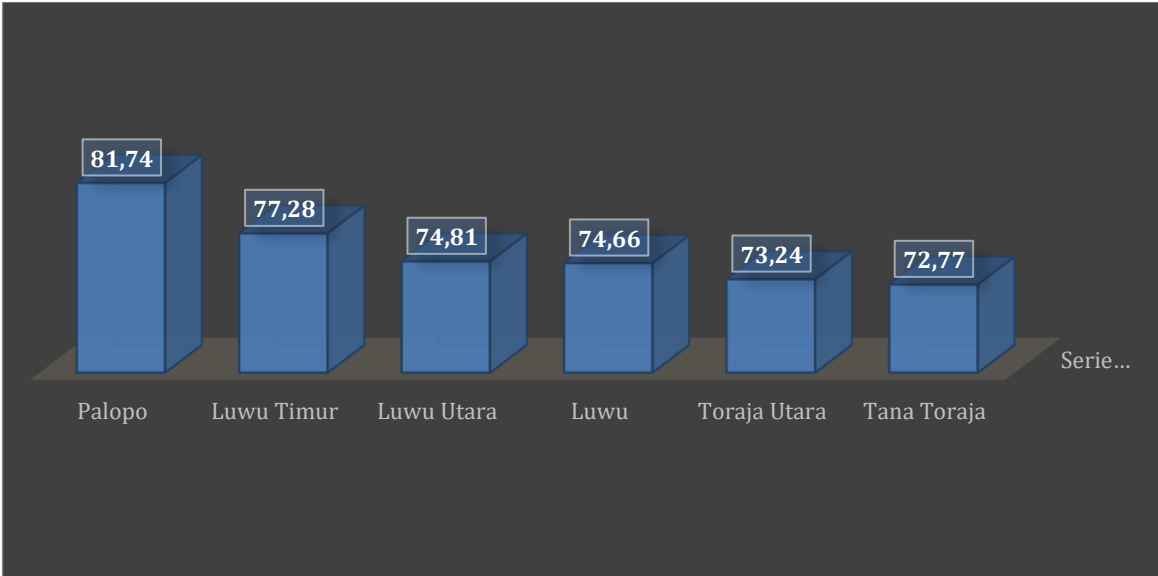
Tabel 2.15.
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

KOMPONEN IPM	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,76	73,06	73,30	73,52	73,85

KOMPONEN IPM	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,39	13,40	13,41	13,43	13,44
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,35	8,48	8,73	8,81	8,96
Indeks Paritas Daya Beli (PPP)	Rupiah	Rp10.116,00	Rp10.308,00	Rp10.691,00	Rp11.121,00	Rp.11.634
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	71,92	72,42	73,23	73,86	74.66
Ranking Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan	Angka	13	14	14	15	13

Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Tabel 2.16.
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan
Tahun 2025



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

Pada tahun 2025 capaian nilai IPM Kabupaten Luwu telah mengalami kenaikan sebesar 0,80 poin atau menjadi sebesar 74,66 persen, dimana pada tahun 2024 sebesar 73,86 persen.

2.1.3. ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA

2.1.3.1 KESEHATAN UNTUK SEMUA

Kesehatan didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan pribadi atau keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif, di Kabupaten Luwu gambaran kesehatan untuk semua dicerminkan melalui indicator pada table bawah ini :

Tabel 2.17.
Perkembangan Capaian Indiator Bidang Kesehatan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

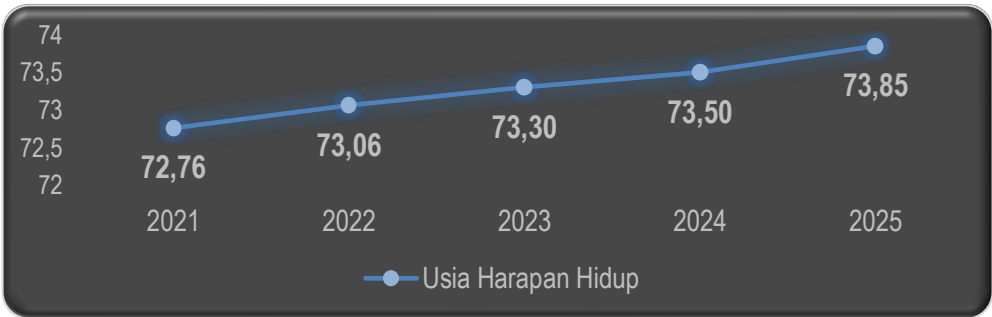
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,76	73,06	73,30	73,52	73,85
2.	Usia Harapan Hidup Laki-Laki	Tahun	70,79	71,04	71,20	71,34	71,56
3.	Usia Harapan Hidup Perempuan	Tahun	74,82	75,17	75,50	75,80	76,25
4.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	N.a	N.a	N.a	N.a	0,59
5.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	233,75	181,70	129,39	166,29	86,00
6.	Prevalensi Stunting	Persen	22,80	26,70	32,10	23,60	23,60
7.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Persen	43,98	54,91	45,18	54,00	43,46
8.	Anga Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Succes Rate</i>)	Persen	87,00	87,69	85,28	89,00	89,00
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	Persen	84,26	88,71	85,38	88,42	95,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Luwu, Tahun 2026.

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai perkiraan jumlah tahun atau seberapa lama seseorang diharapkan dapat hidup. Semakin tinggi rata-rata usia harapan hidup, maka perkiraan lama hidup seseorang akan semakin panjang. Berikut perkembangan usia harapan hidup kabupaten Luwu tahun 2021-2025 dan data perbandingan wilayah kabupaten/kota sekitar.

Grafik 2.33.
Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



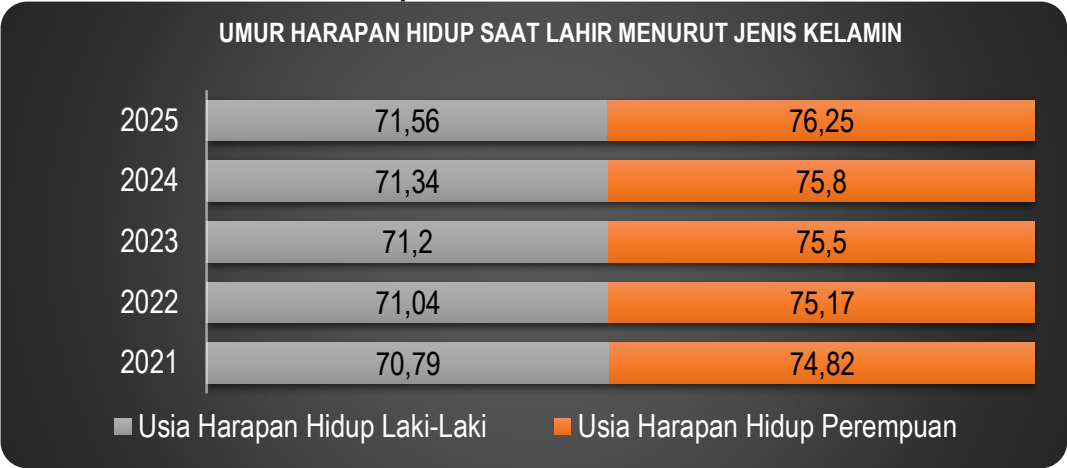
Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

Pada tahun 2025, nilai UHH Kabupaten Luwu berdasarkan hasil LF2020 telah mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin atau mengalami peningkatan menjadi sebesar 73,85 Tahun, dimana pada tahun sebelumnya hanya sebesar 73,50 Tahun. Meningkatnya capaian UHH kabupaten Luwu antara lain dipengaruhi oleh persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan selama sebulan terakhir, dimana capaiannya cukup membaik, sebagaimana dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2020 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan sebesar 26,35 persen, angka tersebut kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 24,04 persen pada tahun 2024 dan adapun faktor lain dalam meningkatkan dan menjaga kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Luwu yakni antara lain melalui peningkatan jumlah keluarga yang memiliki akses sarana air bersih dan sanitasi layak, untuk tahun 2025, persentase penduduk yang berakses air minum layak sebesar 81,08 persen atau sebanyak 312.448 jiwa meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 80,41 persen atau sebanyak 308.112 jiwa, sedangkan yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 75,99 persen atau sebanyak 60.402 rumah tangga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 60.752 rumah tangga.

Kemudian untuk Usia Harapan Hidup perjenis kelamin di Kabupaten Luwu dalam kurun waktu tahun 2021-2025 masih di dominasi oleh jenis kelamin perempuan, dimana pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 74,82 tahun dan jenis kelamin laki-laki sebesar 70,79 tahun, kemudian pada tahun 2025 usia harapan hidup perempuan kembali menempati angka capaian yang lebih tinggi dari jenis kelamin Laki-laki yang menandakan bahwa usia harapan hidup jenis kelamin perempuan hidup lebih lama dibanding Laki-laki, dimana pada tahun 2025 UHH perempuan mencapai 76,25 tahun, sedangkan usia harapan hidup Laki-laki sebesar 71,56 tahun. Oleh karena itu kesenjangan harapan hidup antara perempuan dan laki-laki perlu menjadi perhatian agar kedepan arah kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sehingga dapat

berdampak pada peningkatan Usia Harapan Hidup dan menekan kesenjangan usia harapan hidup antara Laki-Laki dan perempuan.

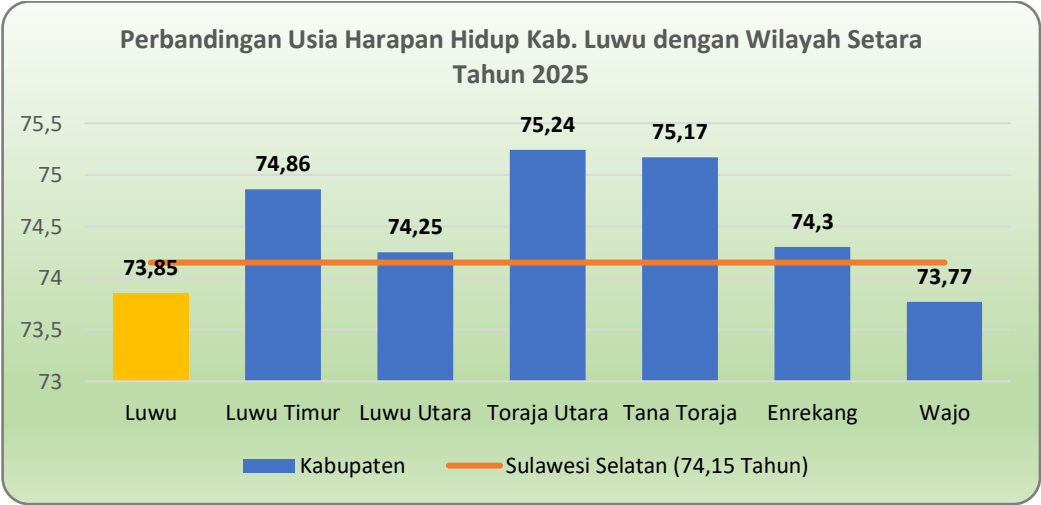
Grafik 2.34.
Perkembangan Usia Harapan Hidup (Tahun) Per Jenis Kelamin
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber Data Badan Pusat Statistik Tahun 2026.

Selanjutnya untuk perbandingan antar Kabupaten Kota sekitar, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 capaian Kabupaten Luwu masih berada dibawah Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan berada posisi kedua terbawah diantara 6 kabupaten yang setara.

Grafik 2.35.
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Luwu dengan Wilayah Sekitar Tahun 2025



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah tolok ukur status kesehatan keluarga yang dihitung dari 12 indikator utama yang mencakup

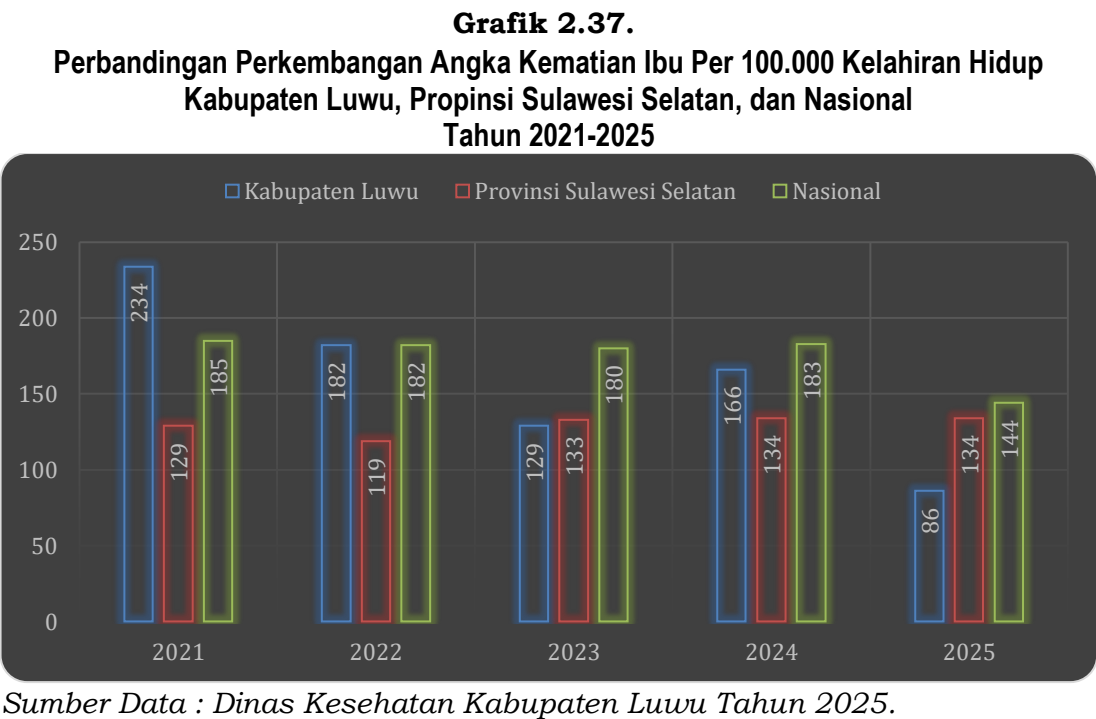
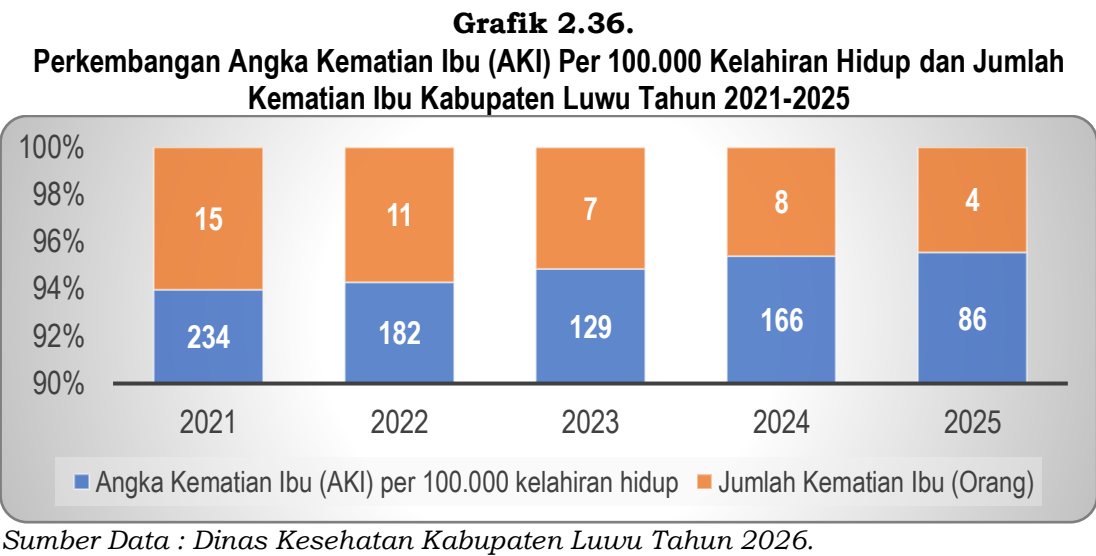
berbagai aspek, mulai dari KB, kesehatan ibu dan anak (persalinan, imunisasi, ASI), pemantauan balita, pengobatan penyakit kronis (TB, hipertensi, gangguan jiwa), perilaku tidak merokok, hingga akses JKN, air bersih, dan jamban sehat. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan suatu keluarga atau masyarakat di suatu wilayah. Nilai IKS diperoleh dengan membandingkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria dengan total anggota keluarga di dalam satu rumah tangga. Status kesehatan keluarga dikategorikan ke dalam tiga tingkatan berikut:

- **Sehat:** $IKS > 0.8$
- **Pra-Sehat:** $0.5 \leq IKS \leq 0.8$
- **Tidak Sehat:** $IKS < 0.5$

Capaian indeks keluarga sehat di Kabupaten Luwu tahun 2025 sebesar 0,59 atau masuk dalam kategori Pra Sehat. Hal ini disebabkan oleh masih banyak keluarga yang belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, pemberian ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan setiap bulan melalui posyandu, anggota keluarga tidak merokok, keluarga memiliki akses sarana air bersih, dan keluarga menggunakan jamban sehat.

c. **Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Ibu atau (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global dan merupakan indikator yang digunakan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan kesehatan ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 86 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 166 per 100.000 kelahiran hidup. Di bawah ini disajikan perkembangan capaian Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tahun 2021-2025.



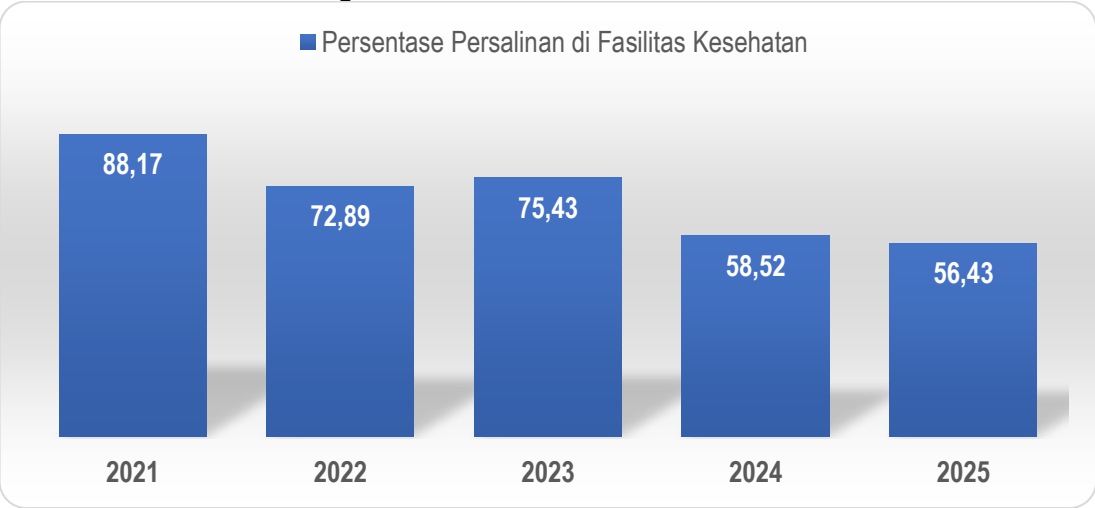
Berdasarkan grafik perkembangan dan perbandingan capaian tersebut di atas, nampak bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Luwu pada tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 234 per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 15 kematian ibu, namun jika dilihat dari jumlah kunjungan ibu hamil K4 pada tahun yang sama, nampak bahwa cakupan kunjungan ibu hamil K4 tergolong tinggi yakni dengan nilai sebesar 84,11 persen dengan jumlah ibu hamil yang memperoleh layanan antenatal K4 sebanyak 6.315 ibu hamil, kemudian Angka Kematian Ibu tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 86 per 100.000 kelahiran hidup atau dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 4 kasus pada tahun 2025 dengan

cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 sebesar 52,68 persen dari total sasaran ibu hamil sebanyak 8.645 orang. Penurunan angka kematian ibu dalam kurun waktu tahun 2021-2025 tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kualitas layanan kesehatan pada ibu hamil dan melahirkan. Kemudian jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun 2025, dimana capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 134 per 100.000 kelahiran hidup dan Nasional sebesar 144 per 100.000 kelahiran hidup.

d. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan adalah merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup umur kehamilannya dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan ibu sendiri, adapun tempat yang paling ideal untuk persalinan adalah fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga yang siap menolong sewaktu-waktu terjadi komplikasi persalinan, sebagaimana diketahui bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan segala sarana dan prasarana alat atau tempat yang dapat menunjang kesehatan atau dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Di Kabupaten Luwu berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta pemerataan pelayanan kesehatan kehamilan dan persalinan yang ada di masyarakat dalam rangka menekan Angka Kematian Ibu. Berdasarkan data dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dalam kurun waktu 2021-2025 persentase ibu hamil yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan cukup fluktuatif dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 88,17 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2025 yakni sebesar 56,43 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.38.
Persentase Persalinan Di Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

e. Prevalensi Stunting

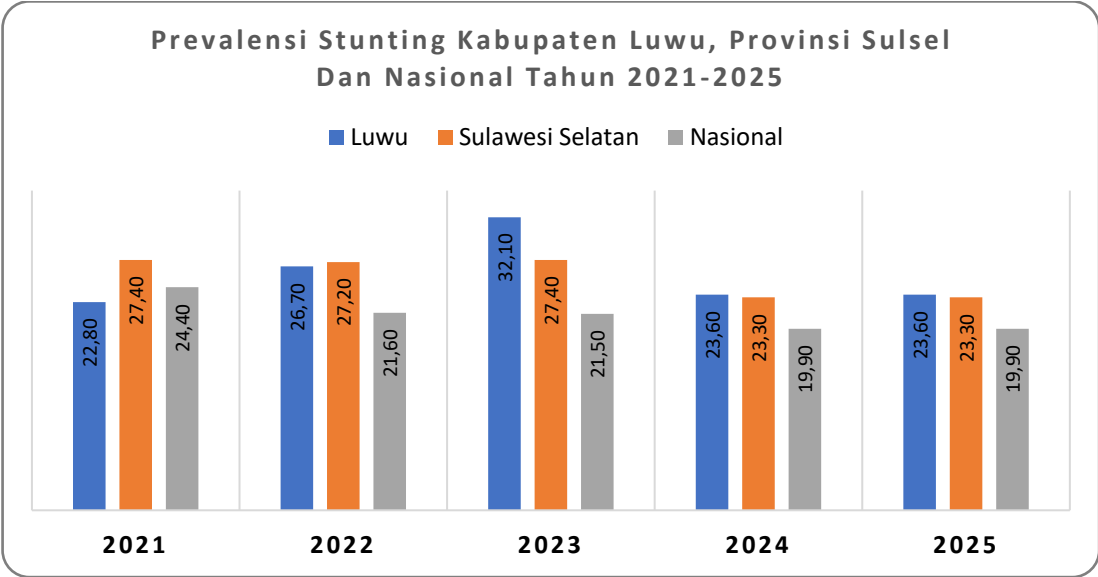
Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Upaya dalam menangani masalah *stunting* pada balita secara nasional telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 2, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Keseriusan Pemerintah dalam percepatan penanganan masalah stunting dituangkan dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Salah satu tujuan dalam Stranas tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah lima tahun, Berikut ini disajikan data perbandingan capaian prevalensi stunting Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

Grafik 2.39.
Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Grafik 2.40.
Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2021-2025



Sumber Data : Survei Status Gizi Indonesia, 2026.

Berdasarkan grafik di atas, prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Luwu selama tahun 2021 hingga tahun 2025 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) telah mengalami peningkatan yaitu dari 22,80 persen pada tahun 2021 menjadi 23,60 persen di tahun 2025. Kemudian jika dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, nampak bahwa Capaian prevalensi stunting Kabupaten Luwu masih lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tingkat Nasional dimana realisasi pada tahun 2024 sebesar 23,30 persen dan untuk tingkat Nasional sebesar 19,80 persen, adapun beberapa faktor penghambat laju penurunan stunting di Kabupaten Luwu diantaranya dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain yakni cakupan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Kurang belum maksimal, cakupan layanan penduduk berakses air minum bersih serta adanya perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif akan pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil termasuk pencegahan penyakit, sebagaimana diketahui bahwa cakupan Pemberian makanan tambahan gizi masih dengan nilai sebesar 59,60 persen, kemudian cakupan layanan penduduk yang berakses air minum bersih dengan nilai sebesar 81,08 persen, selanjutnya untuk wasting (gizi buruk dan gizi kurang) yang berpotensi melahirkan stunting baru juga masih tergolong cukup tinggi dengan nilai sebesar 2,3 persen. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Luwu kedepan akan lebih meningkatkan koordinasi dalam hal perencanaan dan penganggaran program untuk pencegahan stunting secara konvergen di tingkat kabupaten hingga desa, sehingga diharapkan dapat berdampak pada sasaran intervensi bisa tepat sasaran, serta meningkatkan penyebaran tenaga gizi agar sebarannya merata pada masing-masing wilayah.

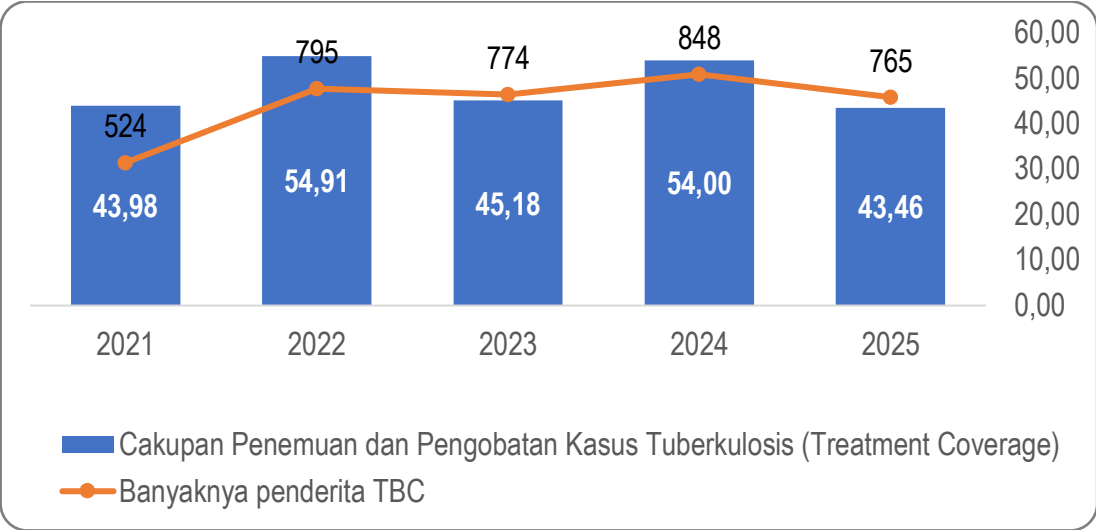
f. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit yang memengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru dan disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Penyakit TBC masih merupakan masalah Kesehatan di Indonesia yang hingga sekarang belum terselesaikan. Oleh karena itu, berbagai terobosan telah dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya percepatan menuju eliminasi Tuberkulosis, salah satunya adalah penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis secara aktif, masif dan intensif.

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) adalah jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan di antara perkiraan kasus tuberkulosis. *Treatment Coverage* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program Pengendalian Tuberkulosis. Berikut data perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus

Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

Grafik 2.41.
Perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2026.

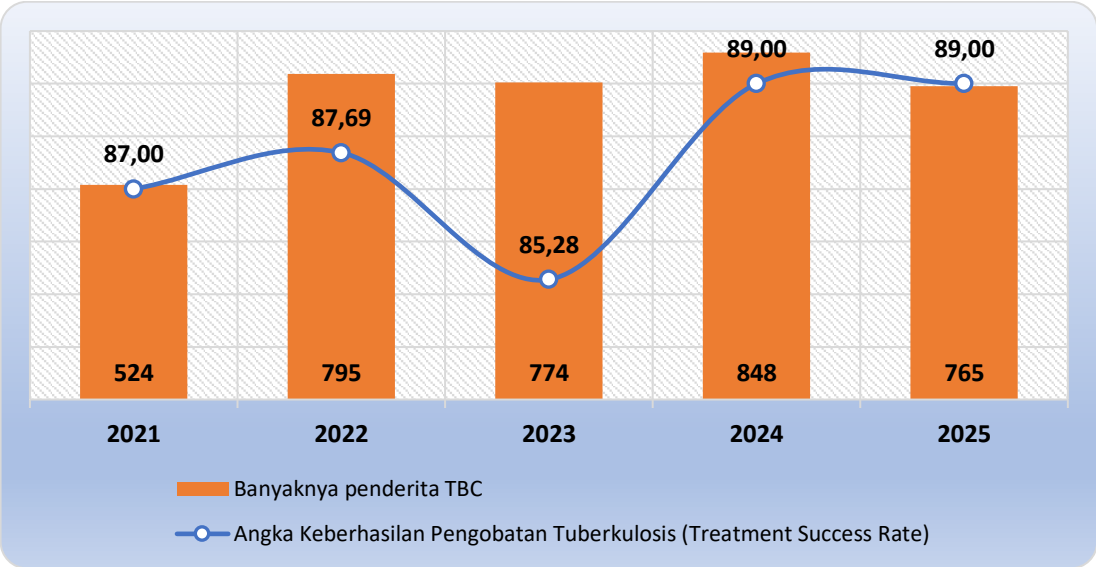
Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) mengalami fluktuasi. cakupan penemuan kasus tuberkulosis tertinggi berada pada tahun 2022 yakni sebesar 54,91 persen, capaian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10,93 persen dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 sebesar 43,98 persen atau meningkat dengan jumlah kasus sebanyak 795 kasus, kemudian pada tahun 2025 cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB mengalami penurunan menjadi sebesar 43,46 persen dengan jumlah kasus pasien penderita TB sebanyak 765 kasus.

g. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan, dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus

tuberkulosis minimal 90%. Berikut data perkembangan *treatment success rate* tuberculosis di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 - 2025.

Grafik 2.42.
Perkembangan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



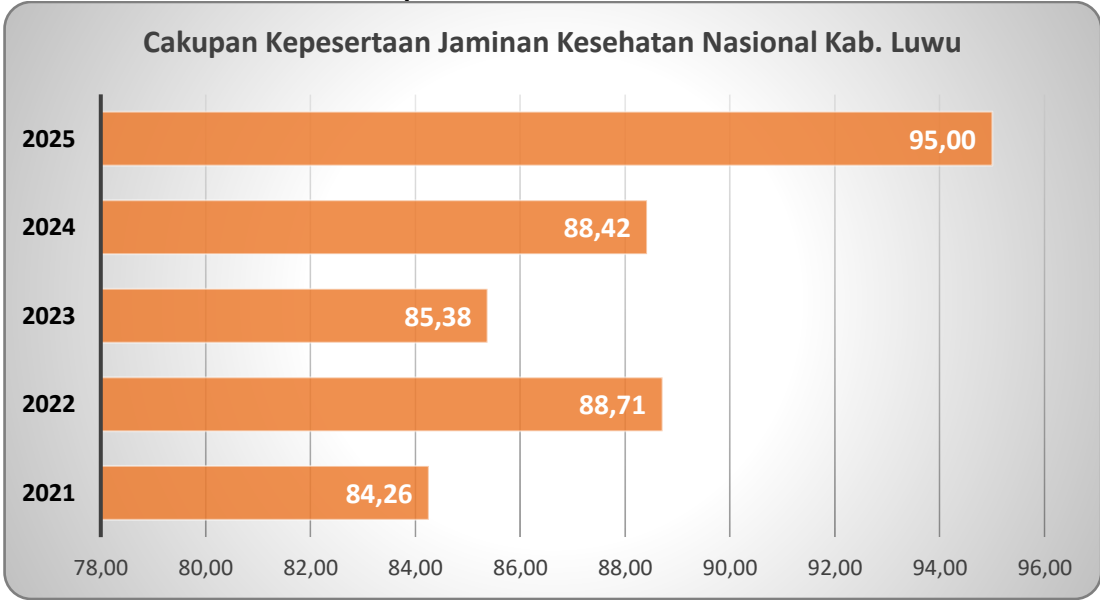
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, angka keberhasilan pengobatan TBC tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2025 yaitu sebesar 89,00 persen atau sebanyak 765 pasien TBC yang berhasil pulih setelah menjalani pengobatan lengkap. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupten Luwu belum mencapai target minimal keberhasilan pengobatan untuk semua kasus tuberkulosis.

h. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis maupun non medis, yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dan seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran peserta. Berikut data perkembangan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

Grafik 2.43.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Berdasarkan grafik diatas, cakupan kepesertaan JKN selama tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi sebesar 95,00 persen pada tahun 2025 dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 84,26 persen. Pemerintah kabupaten Luwu terus berupaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN kedepannya demi penyediaan layanan kesehatan yang menyeluruh ke masyarakat.

2.1.3.2 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

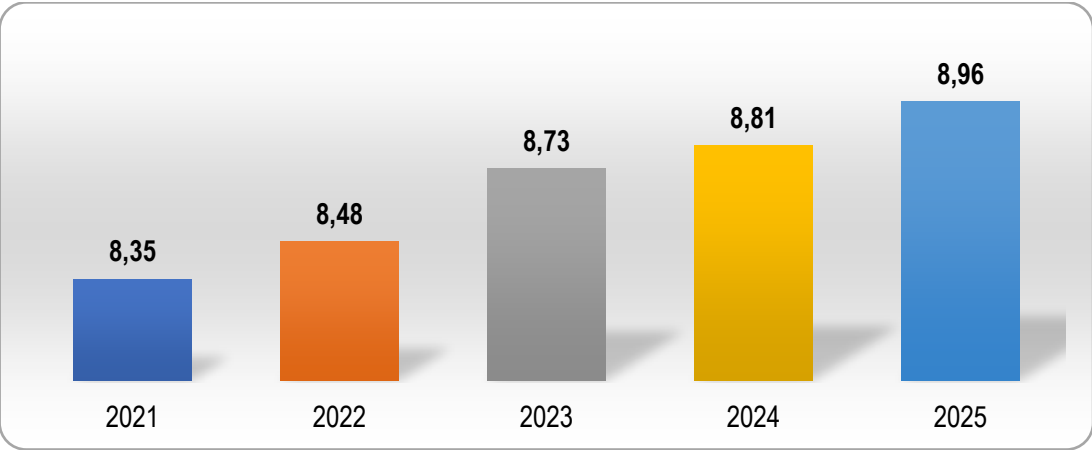
Pendidikan berkualitas yang merata didefinisikan sebagai setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, di Kabupaten Luwu gambaran pendidikan berkualitas yang merata dicerminkan antara lain melalui Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke atas

Angka RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal,

meningkatkan rata-rata lama sekolah merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Di Kabupaten Luwu capaian angka RLS penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2024 sebesar 8,81 tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin atau menjadi sebesar 8,96 tahun pada tahun 2025, hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaen Luwu adalah setara kelas dua SMP/Sederajat. Dari capaian RLS ini masih menunjukkan bahwa secara umum, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Luwu belum sepenuhnya tuntas pendidikan dasar sembilan tahun, oleh karena itu kedepan Pemerintah Kabupaten Luwu akan terus berupaya meningkatkan capaian RLS karena semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun polanya tindakannya. Di bawah ini disajikan perkembangan RLS Kabupaten Luwu tahun 2021-2025 :

Grafik 2.44.
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



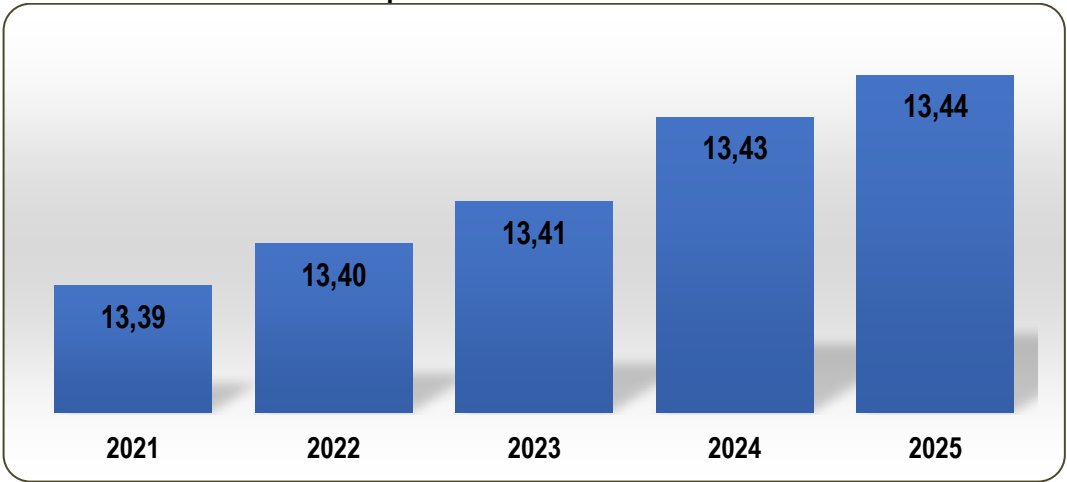
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tahun 2026.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun

ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan dalam bentuk grafik terkait capaian angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu selama periode tahun 2021-2025.

Grafik 2.45.
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tahun 2026.

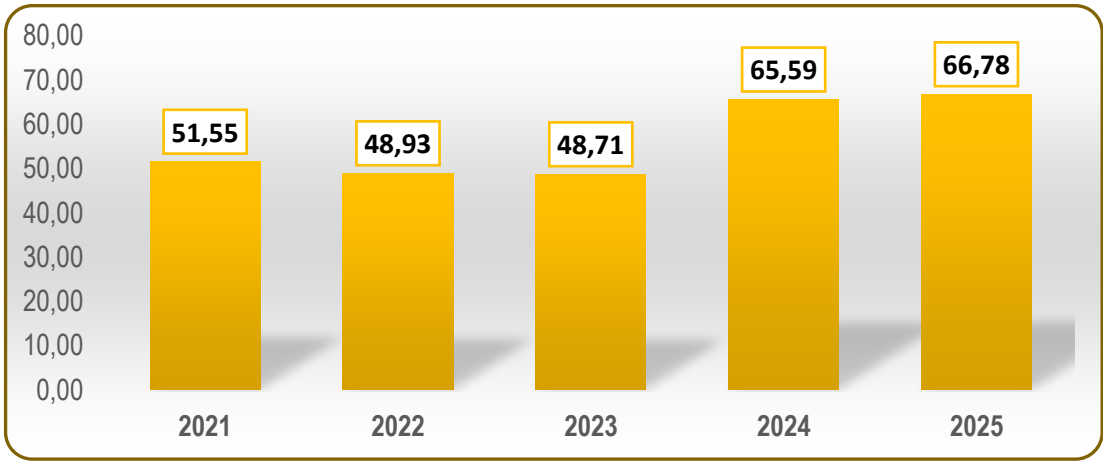
Dari perkembangan grafik tersebut di atas, diketahui bahwa capaian HLS Kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan, Dimana pada tahun 2021 sebesar 13,39 tahun kemudian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2025 menjadi sebesar 13,44 tahun.

c. Angka Literasi

Literasi menurut *International Literacy Association* (ILA) adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan symbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Definisi ini menegaskan bahwa konsep literasi perlu mengakomodasi dua komponen penting, yaitu *teks dan kecakapan berpikir*. Adapun Angka Literasi yakni ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat melek huruf dalam suatu wilayah atau negara. Angka ini mengindikasikan persentase penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik dalam bahasa tertentu. Penting diketahui bahwa Angka Literasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pendidikan, akses terhadap pendidikan,

dan kualitas pendidikan. Di bawah ini disajikan data perkembangan angka literasi kabupaten Luwu tahun 2021-2025.

Grafik 2.46.
Perkembangan Angka Literasi Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, 2026.

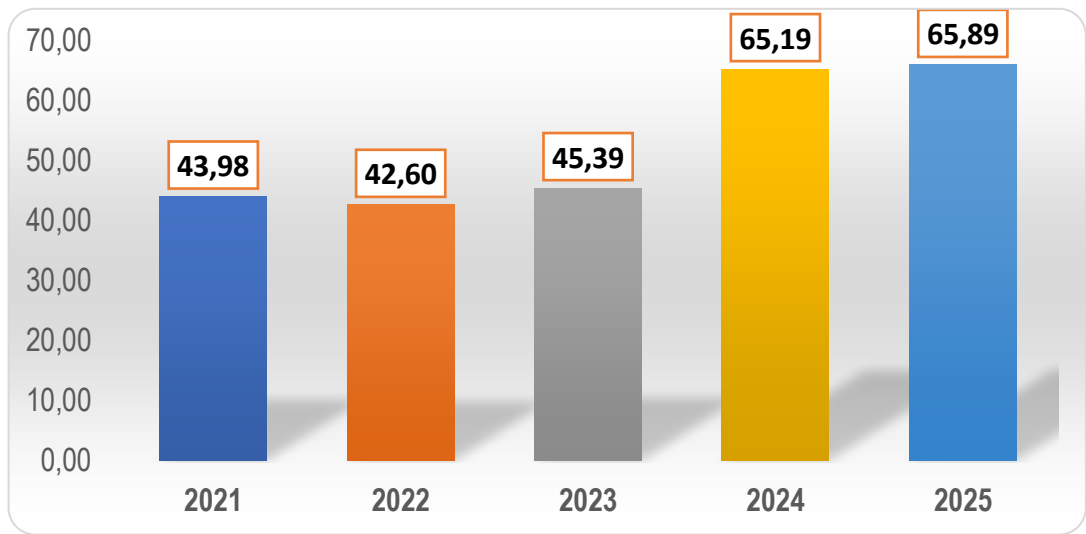
Berdasarkan grafik di atas nampak bahwa kemampuan literasi Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 65,59 persen, peningkatan tersebut disebabkan antara lain makin meningkatnya kualitas tenaga pendidik, dan banyaknya anak-anak yang mahir dalam memahami teks bacaan.

d. Angka Numerasi

Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mengasah dan menguatkan pengetahuan serta keterampilan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan serta dapat memprediksi dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang logis. Perlu diketahui bahwa numerasi tidak sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki numerasi. Numerasi mencakup mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi riil sehari-hari, yang seringkali

permasalahannya tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor non matematis. Adapun angka numerasi yakni ukuran yang mengindikasikan persentase penduduk yang memiliki kemampuan matematika atau numerasi yang baik, seperti pemahaman terhadap konsep-konsep matematika dasar. Penting untuk diketahui bahwa Angka Numerasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem pendidikan, akses terhadap pendidikan matematika, dan kualitas pendidikan. Berikut perkembangan capaian angka numerasi Kabupaten Luwu periode tahun 2021-2025.

Grafik 2.47.
Perkembangan Angka Numerasi Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Berdasarkan data grafik tersebut di atas, nampak bahwa kemampuan numerasi pada Kabupaten Luwu periode tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2025 capaiannya sebesar 65,89 persen, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni sebesar 65,19 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dibidang Pendidikan.

e. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah atau biasa disebut APS adalah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dengan memperhitungkan adanya perubahan

penduduk terutama pada usia muda. APS adalah perbandingan penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD), 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Tabel 2.18.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
PAUD	%	93,66	90,12	40,98	54,09	39,12
SD/MI	%	94,14	94,35	98,48	79,48	100,00
SMP/MTs	%	96,08	95,06	79,76	75,70	85,18

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2021 capaian APS PAUD di Kabupaten Luwu sebesar 93,66 persen menurun menjadi 39,12 persen pada tahun 2025. Kemudian untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 94,14 persen pada tahun 2021, mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi sebesar 100 persen. selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 96,08 persen pada tahun 2021 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 85,18 persen pada tahun 2025.

Selanjutnya jika dilihat dari angka kelulusan, nampak bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat. Tahun 2021 angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Luwu adalah sebesar 95,58 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 99,97 persen pada tahun 2025. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami fluktuasi. Angka kelulusan paling tinggi terjadi pada tahun 2025 yang mencapai 100 persen.

Tabel 2.19.

Angka Kelulusan
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

Uraian	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI	%	95,58	96,58	93,73	99,33	99,97
SMP/MTs	%	97,46	97,04	80,98	97,81	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Sementara untuk Angka Melanjutkan (AM), sebagaimana diketahui bahwa angka ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2025 yaitu sebesar dari 100. Berikut data perkembangan capaian Angka Melanjutkan Kabupaten Luwu periode tahun 2021-2025.

Tabel 2.20.

Perkembangan Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI ke SMP/MTs	%	101,15	100,96	69,85	99,33	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Selanjutnya mengenai pencapaian masing-masing jenjang pendidikan dalam rangka percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Luwu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Anak Tidak Sekolah atau disebut ATS adalah merupakan Anak usia sekolah yang tidak pernah/belum sekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, dan lulus tidak melanjutkan atau berpartisipasi dalam pendidikan melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Pada tahun 2025 jumlah anak usia 7 sampai 12 tahun tidak tamat SD/Sederajat sebanyak 263 orang. Sementara jumlah anak usia 13 sampai 15 tahun yang tidak tamat SMP/Sederajat sebanyak 821 orang. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan data perkembangan jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Luwu tahun 2021-2025:

Tabel 2.21.

Perkembangan Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024

Tahun	Satuan	Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun
		Tidak Tamat SD/Sederajat	Tidak Tamat SMP/Sederajat
2021	Orang	48	111
2022	Orang	55	35

Tahun	Satuan	Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun
		Tidak Tamat SD/Sederajat	Tidak Tamat SMP/Sederajat
2023	Orang	59	76
2024	Orang	46	42
2025	Orang	263	821

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

f. **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar atau APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk yang mengenyam pendidikan. APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A mengalami peningkatan dari 79,47 persen pada tahun 2024 menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2025. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B juga mnegalami peningkatan dari 75,70 persen pada tahun 2024 menjadi sebesar 88,91 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.22.

**Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2021	2021	2023	2024	2025
SD/MI/ Paket A	%	94,14	94,14	98,48	79,47	100
SMP/MTs/ Paket B	%	96,08	96,08	79,76	75,70	88,91

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

g. **Angka Partisipasi Murni (APM)**

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 capaian nilai APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di

Kabupaten Luwu adalah sebesar 94,14 persen kemudian mengalami peningkatan menjadi 100 persen di tahun 2025. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 96,56 persen pada tahun 2021 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi sebesar 88,91 persen.

Tabel 2.23.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

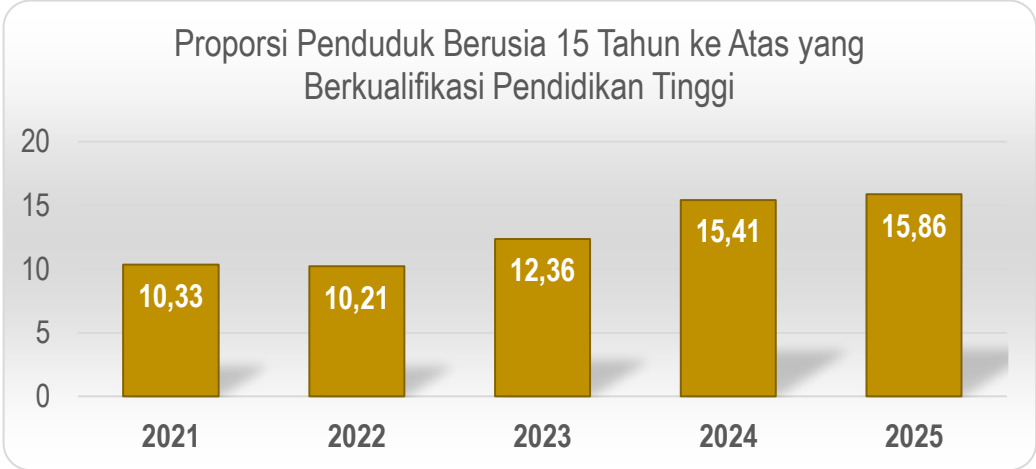
Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI/ Paket A	%	94,14	93,63	98,48	79,57	100
SMP/MTs/ Paket B	%	96,56	94,49	79,76	76,53	88,91

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

h. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pengukuran indikator proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV; S1; S2; S2 Terapan; dan S3. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% yang artinya seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Berikut perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.48.
Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Kabupaten Luwu dalam Angka, 2021-2026.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi selama tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi namun, memiliki tren yang meningkat. Dimana pada tahun 2021 dengan nilai mencapai 10,33 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 15,86 persen persen pada tahun 2025, hal tersebut menandakan bahwa hanya terdapat 15,86 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi dari total jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 294.813 jiwa. Rendahnya penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi ini menggambarkan kualitas penduduk di Kabupaten Luwu dari segi pendidikan masih rendah.

i. **Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas pendidikan di wilayah Kabupaten Luwu sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah dapat diketahui kondisi ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI pada tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu dari 92,18 persen menjadi sebesar 23,06 persen. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 sebesar 95,61 persen menurun menjadi sebesar 62,31 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.24.

**Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik	Unit	441	453	2.356	2.240	485
Jumlah seluruh ruang kelas	Unit	2.683	2.743	4.043	2.430	2103
Persentase	%	16,44	16,51	58,27	92,18	23,06
SMP/MTs						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik	Unit	413	407	472	1.001	281

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah seluruh ruang kelas	Unit	1.137	1.132	1.003	1.047	451
Persentase	%	36,32	35,95	47,05	95,61	62,31

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

j. Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat

Persentase ruang kelas dalam kondisi rusak sedang untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu dari 8,57% dari 34,52%. Sedangkan persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat pada jenjang SD/MI juga mengalami peningkatan yaitu dari 0,34% pada tahun 2024 menjadi 17,74% pada tahun 2025.

Sementara itu, persentase ruang kelas dalam kondisi rusak sedang untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 8,57% pada tahun 2024 menjadi 21,29% pada tahun 2024. Sedangkan persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat mengalami peningkatan, namun capaiannya cukup rendah yaitu sebesar 3,77% di tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.

Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak sedang	Ruang	996	46	784	202	726
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	2.332	2.476	2.047	2356	2103
Persentase	%	42,71	1,86	38,30	8,57	34,52
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak berat	Ruang	295	28	288	8	373
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	2.332	2.476	2.047	2.356	2103
Persentase	%	14,06	12,65	14,06	0,34	17,74
SMP/MTs						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak sedang	Ruang	461	28	296	107	96

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	983	1040	844	1.919	451
Persentase	%	46,90	2,69	35,07	5,58	21,29
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak berat	Ruang	61	25	76	8	17
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	983	1040	844	1.919	451
Persentase	%	6,20	2,40	9,00	0,42	3,77

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

k. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Secara umum, jika melihat perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Luwu antara tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 84,28 persen, namun menurun di tahun 2025 menjadi sebesar 73,29 persen.

Tabel 2.26.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	62,85	76,52	72,11	84,28	73,29

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

1. Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta didik non formal mengalami fluktuasi dari tahun 2021-2025 dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2025 yakni sebanyak 3.044 orang yang terdiri dari 263 orang dijenjang Paket A, 821 orang Paket B dan terbanyak di Paket C sebanyak 1960 orang. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebanyak 513 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27.
Pendidikan Non Formal
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

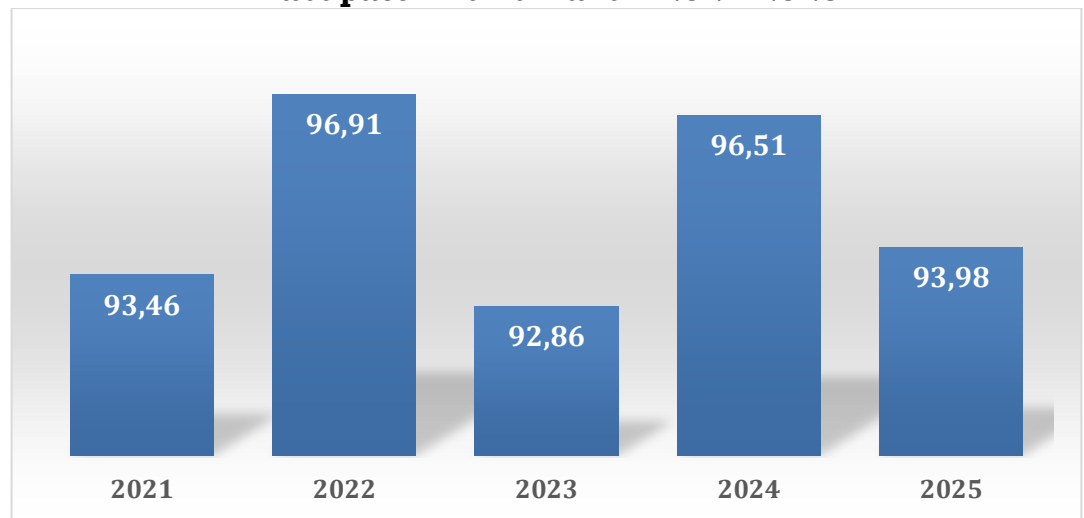
Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Paket A	Orang	307	101	126	44	263
Paket B	Orang	604	420	200	183	821
Paket C	Orang	1.843	1.145	711	286	1960
Jumlah	Orang	2.754	1.666	1.037	513	3.044

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2026.

m. Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah merupakan jenjang pendidikan tertinggi seseorang atau anggota masyarakat yang telah diselesaikan dengan memperoleh surat tanda tamat dari jenjang pendidikan yang ditempuhnya, sebagaimana diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil, terutama pada sektor formal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu pada tahun 2021-2025, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tinggi (*program diploma, program sarjana, dst*) yang ditamatkan setiap tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2025 capaian tersebut sebesar 24.616 jiwa atau sebesar 93,98 persen. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan perkembangan capaiannya dalam bentuk grafik.

Grafik 2.49.
Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi Yang ditamatkan Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

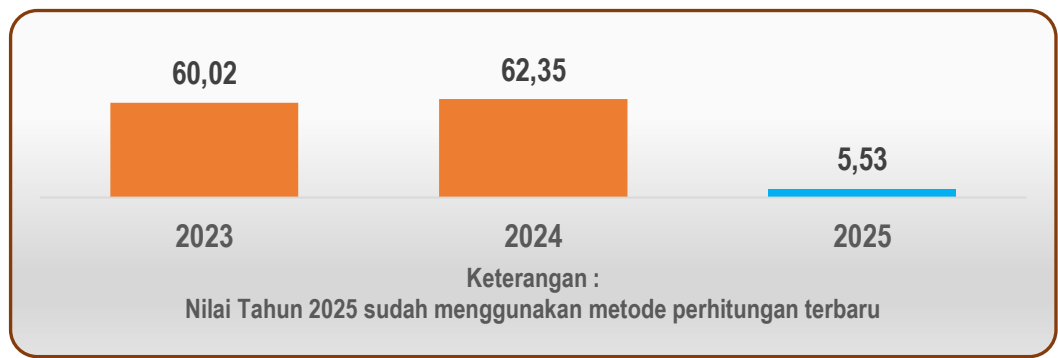


Sumber Data : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2026.

n. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

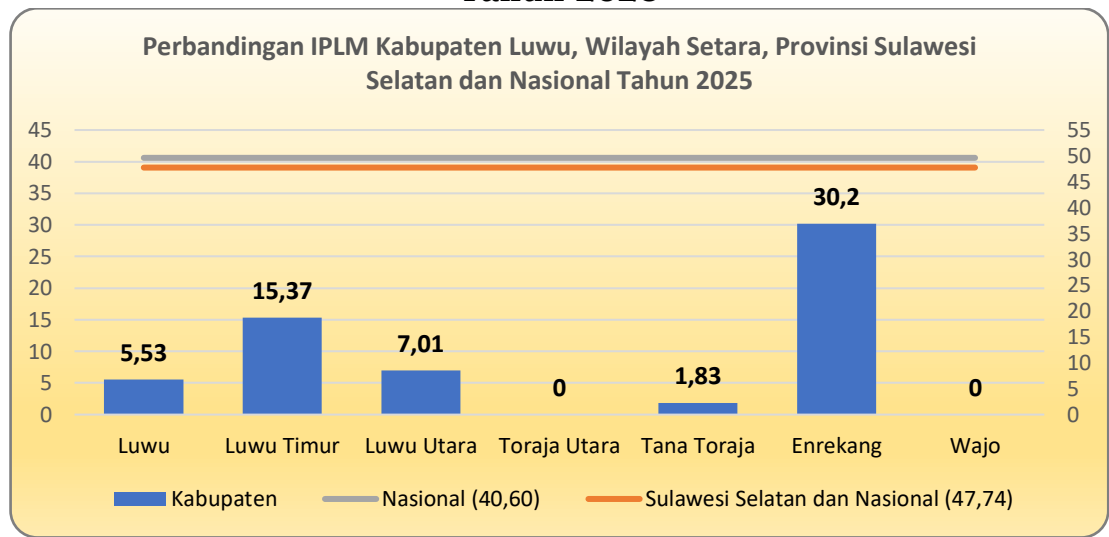
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau disebut IPLM digunakan sebagai alat ukur terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan Pengukuran IPLM agar dapat diketahui kondisi mengenai jenis perpustakaan, baik pada aspek koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, gedung, hingga pelayanan pemustaka itu sendiri. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun pengukuran IPLM dihitung melalui skor indeks (skala level 100), *untuk tingkat 0-30 kategori skor rendah, 30-50 kategori rendah, 50-80 kategori sedang, 80-90 kategori tinggi, dan 90-100 kategori sangat tinggi.* Di bawah ini disajikan pencapaian IPLM Kabupaten Luwu periode Tahun 2023-2025.

Grafik 2.50.
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Luwu Tahun 2023-2025



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

Grafik 2.51.
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten/Kota,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2025



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

Berdasarkan grafik tersebut di atas, nampak bahwa capaian IPLM Kabupaten Luwu termasuk dalam kategori rendah, dimana pada tahun 2023-2024 mengalami peningkatan sebesar 2,33 poin menjadi sebesar 65,35 poin, sementara pada tahun 2025 terjadi perubahan metode pengukuran IPLM sehingga capaian kabupaten Luwu menjadi 5,53 poin. Namun, jika dibandingkan dengan pencapaian IPLM wilayah setara, capaian Kabupaten Luwu masih tergolong sangat rendah. Capaian tersebut juga menempatkan Kabupaten Luwu berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 47,74 poin dan Nasional dengan nilai sebesar 40,60 poin serta berada di atas capaian Kabupaten Wajo, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025.

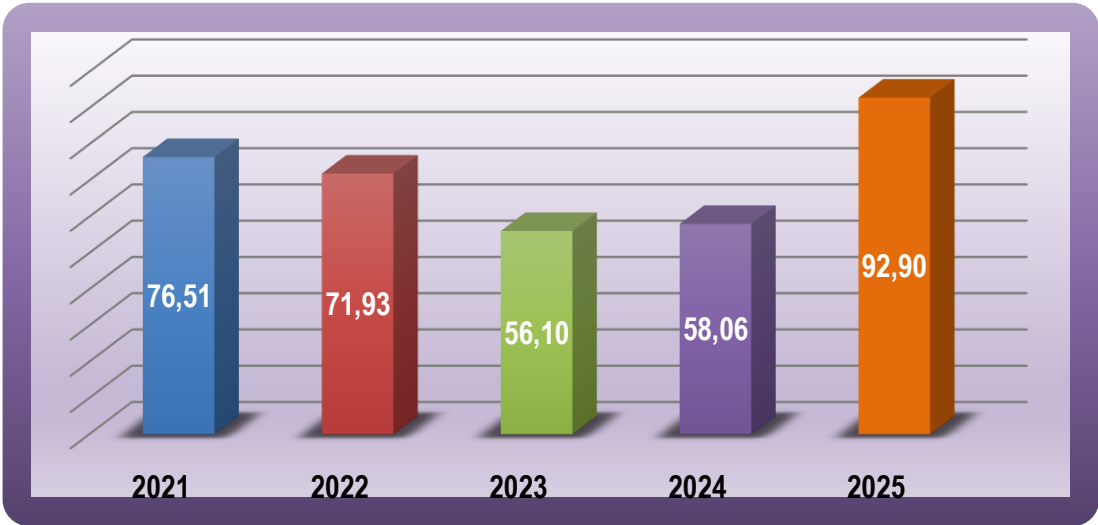
2.1.3.3 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

Perlindungan Sosial Yang Adaptif didefinisikan sebagai kondisi dimana masyarakat diharapkan memiliki ketahanan dan kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai resiko dan krisis serta memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih baik dalam rangka mempertahankan kehidupan yang layak. Di Kabupaten Luwu gambaran perlindungan sosial yang adaptif dicerminkan antara lain melalui indikator cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Angka Ketergantungan, PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial, dan Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pemerintah terus mengupayakan pembangunan pada sektor ketenagakerjaan sebagai bagian pembangunan sumberdaya manusia serta perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Oleh karena itu Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan hari tua, pensiun, dan pemutusan hubungan kerja yaitu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan adanya jaminan sosial, keluarga dari pekerja juga memiliki jaminan penghidupan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, para pekerja harus dipastikan tercakup dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berikut data cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

Grafik 2.52.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber Data : Disnakertrans Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2021 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 76,51 persen kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 56,10 persen. Selanjutnya untuk tahun 2024-2025 mengalami peningkatan menjadi sebesar 92,90 persen. Hal tersebut terjadi disebabkan meningkatnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja serta adanya kesadaran pekerja akan pentingnya kepesertaan jaminan sosial sebagai perlindungan dasar terhadap kemungkinan terjadinya risiko sosial ekonomi yang akan muncul dikemudian hari.

b. Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal

Istilah "disabilitas" digunakan secara umum untuk menggambarkan kondisi yang mengalami keterbatasan fungsi tubuh maupun keterbatasan struktur tubuh, keterbatasan dan juga hambatan dalam melakukan aktivitas (WHO, 2007). Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. di Kabupaten Luwu pemberdayaan penyandang disabilitas telah

dilakukan melalui pelibatan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah seperti penciptaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, informasi dan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, hal tersebut dilakukan guna memberikan peluang untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan potensi yang mereka miliki.

Di Kabupaten Luwu perkembangan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal pada tahun 2025 sebanyak 1 orang dari total jumlah penyandang disabilitas yang terdata ditahun tersebut sebanyak 282 orang.

Tabel 2.28.

**Perkembangan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang bekerja di Sektor Formal	Orang	N.a	N.a	1	1	1
2	Jumlah Penyandang Disabilitas	Orang	N.a	N.a	103	103	282
	Persentase Penyandang Disabilitas Yang bekerja di Sektor Formal	Persen	N.a	N.a	0,90	0,90	0,004

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2026.

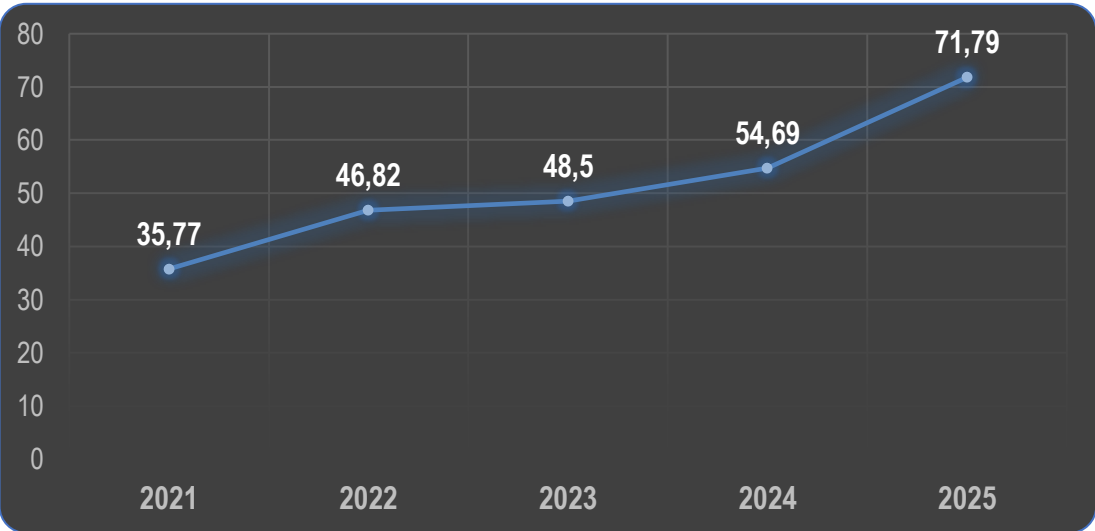
Dari Grafik tersebut di atas, nampak bahwa Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal belum maksimal. Hal itu disebabkan karena setiap individu penyandang disabilitas awalnya memang memiliki keterbatasan masing-masing untuk masuk ke pasar kerja. Selain itu dari permintaan tenaga kerja tidak banyak yang bisa menerima tenaga kerja yang memiliki keterbatasan seperti Penyandang Disabilitas. Mengingat adanya keterbatasan dari Penyandang Disabilitas untuk bekerja sesuai kompetensinya, baik itu pekerjaan secara umum atau yang formal, oleh karena itu. Pemerintah Kabupaten Luwu atau pun pihak terkait lainnya kedepan akan berupaya memberi perhatian khusus untuk membantu para penyandang disabilitas mempersiapkan diri dalam penguatan kemampuan agar memiliki kesiapan dan kemampuan untuk

berkontribusi pada sektor formal sesuai kompetensi yang dipersyaratkan.

c. PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan perseorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya sosialnya secara wajar. Di Kabupaten Luwu perkembangan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan mengalami peningkatan selama periode tahun 2020-2024, untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan dalam bentuk grafik.

Grafik 2.53.
Perkembangan Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2021-2025



Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2026.

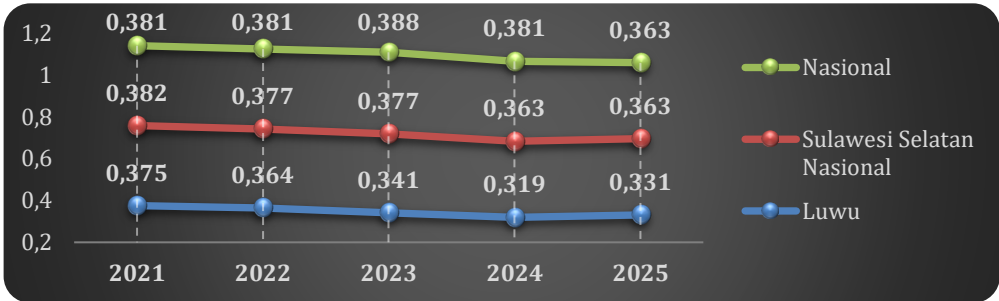
Dari grafik perkembangan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun tersebut di atas, dapat diketahui bahwa persentase PMKS penerima bantuan tertinggi berada pada tahun 2025 dengan nilai capaian sebesar 71,79 persen dengan jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 54.862 orang dari jumlah total PMKS sebanyak 76.416 orang.

d. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran suatu masyarakat. Nilai indeks

gini berkisar antara **0** (atau nol persen) dan **1** (atau 100 persen). Nilai indeks gini yang semakin mendekati **1** mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Berikut perkembangan indeks gini di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

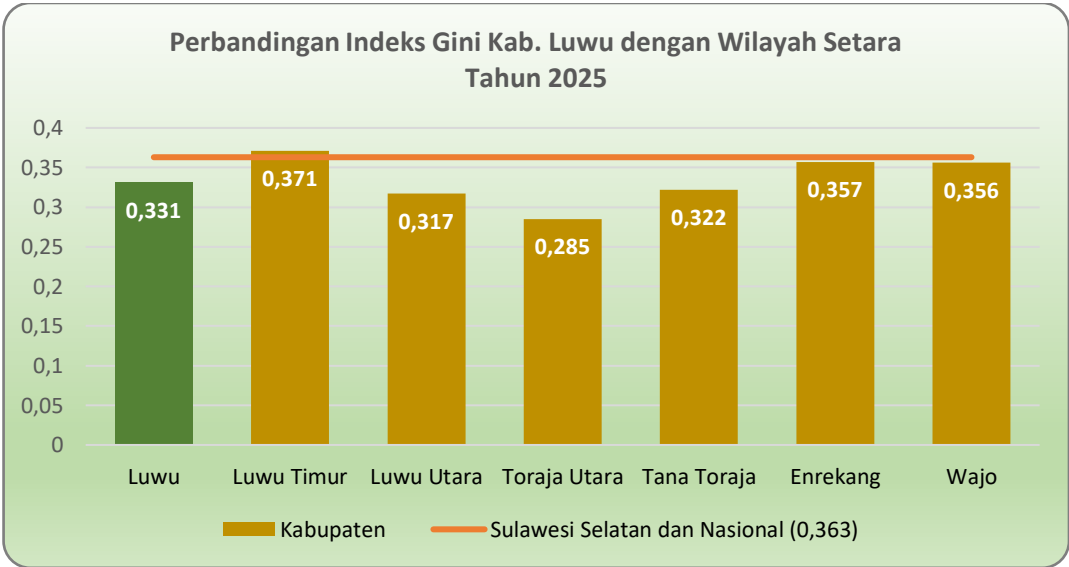
Grafik 2.54.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

Berdasarkan grafik diatas, indeks gini di Kabupaten Luwu pada tahun 2025 sebesar 0,331 meningkat sebesar 0,012 dari tahun 2024 (0,319) atau distribusi pengeluaran masyarakat kategori sedang. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dengan realisasi pada tahun 2025 masing-masing sebesar 0,363.

Grafik 2.55.
Indeks Gini Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2025



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

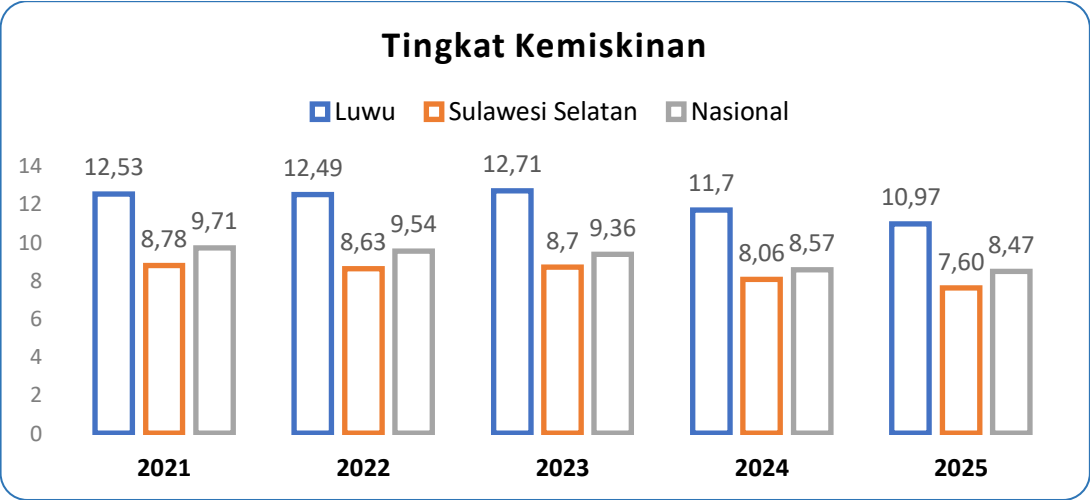
Jika dibandingkan dengan wilayah setara pada kawasan Palopo dan sekitarnya, nampak bahwa indeks gini kabupaten Luwu pada tahun 2025 berada di posisi ketiga terendah setelah kabupaten Toraja Utara

dan kabupaten Luwu Utara dengan nilai sebesar 0,331. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Luwu semakin merata.

e. **Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sedangkan persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk pada suatu wilayah. Berikut data perkembangan kemiskinan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

Grafik 2.56.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

Dari grafik di atas, nampak bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,73 persen atau menjadi sebesar 10,97 persen, dimana pada tahun sebelumnya sebesar 11,70 persen. Meskipun menurun, namun capaian tersebut masih berada di atas capaian Provinsi Sulawesi

Selatan yakni sebesar 7,60 persen dan capaian Nasional yakni sebesar 8,47 persen.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dengan wilayah setara pada tahun 2025, Kabupaten Luwu berada pada posisi pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 10,97 persen diikuti oleh Kabupaten Luwu Utara sebesar 10,74 persen dan Kabupaten Enrekang sebesar 10,73 persen.

Grafik 2.57.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Perhitungan garis kemiskinan diperoleh dengan menjumlahkan antara garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan dari Rp. 359.925 per kapita per bulan pada tahun 2021 menjadi Rp. 447.602 per kapita per bulan pada tahun

2025 dengan persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 89,03%, yang menunjukkan meningkatnya standar hidup minimum masyarakat kabupaten Luwu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.

Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Persentase Penduduk diatas Garis kemiskinan (%)
2021	359.925	87,41
2022	381.015	87,51
2023	414.118	87,29
2024	433.898	88,30
2025	447.602	89,03

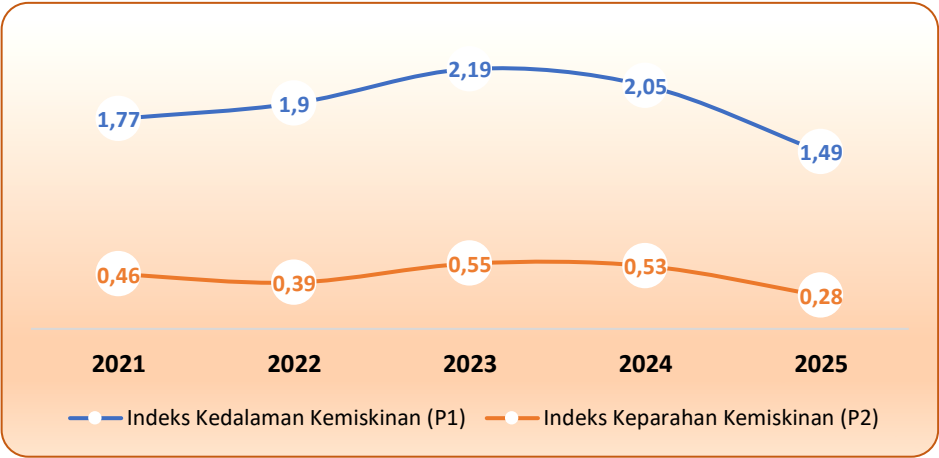
Sumber : BPS Kab. Luwu, 2026.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Indeks/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks/P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih berada di angka 1,49 pada 2025, sedikit membaik dibandingkan 2,05 pada 2024, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti 2021 (1,77) dan 2022 (1,90). Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga mengalami sedikit perbaikan dari 0,53 pada 2024 menjadi 0,28 pada 2025, yang berarti distribusi pendapatan di kalangan masyarakat miskin sedikit lebih merata dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, masih terdapat tantangan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan penduduk miskin, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Grafik 2.58.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

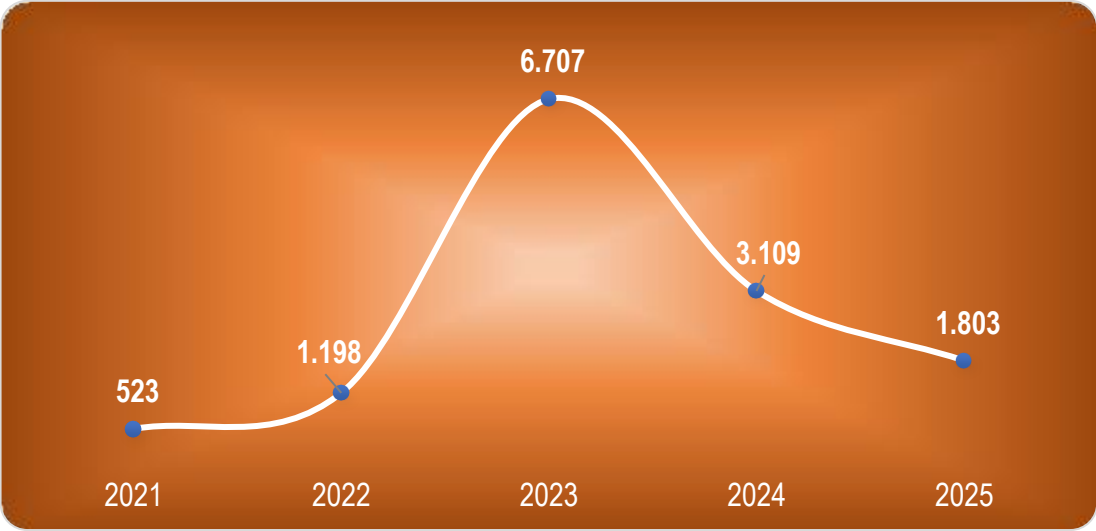


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2026.

f. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yng dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Di Kabupaten Luwu perkembangan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mengalami perubahan setiap tahunnya, dimana jumlah korban penerima bantuan sosial kejadian bencana tertinggi berada pada tahun 2023 yaitu sebanyak 6.707 orang. Berikut ini disajikan data perkembangan jumlah korban bencan yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2021-2025.

Grafik 2.59.
Perkembangan Korban Bencana penerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber Data : Dinas Sosil Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Luwu, jumlah korban bencana penerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2025 sebanyak 1.803 orang dengan jumlah kejadian bencana sebanyak 51 kasus. Dari jumlah tersebut, semua korban bencana telah mendapatkan bantuan sosial.

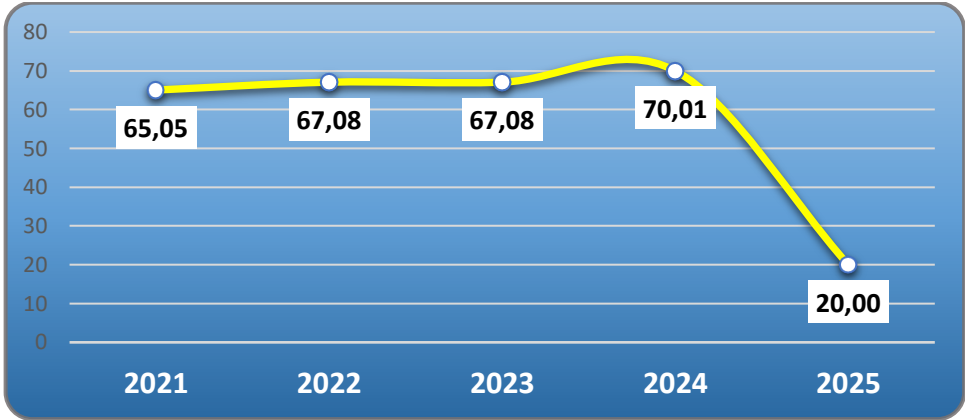
2.1.3.4 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

Gambaran beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju di Kabupaten Luwu dicerminkan dari persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dan indeks kerukunan umat beragama, sebagai berikut:

a. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan jumlah cagar budaya yang telah dilindungi atau dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya. Berikut data persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Kabupaten Luwu tahun 2021 hingga tahun 2025.

Grafik 2.60.
**Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang
Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi di Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025**



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2026.

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2021-2024 persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2021 realisasinya sebesar 65,05 persen kemudian meningkat menjadi 70,01% pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 20 persen.

b. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Survei ini dilakukan secara berkala oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program kerukunan. IKUB mengukur kerukunan berdasarkan tiga dimensi utama: toleransi antar umat beragama, kesetaraan antar umat beragama, dan kerja sama antar umat beragama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain. Berikut data Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 hingga 2025.

Grafik 2.61.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Kemenag Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan data diatas, nilai IKUB Kabupaten Luwu dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 74,31 menjadi 79,04. Sedangkan pada tahun 2025, capaiannya sedikit menurun menjadi sebesar 75,00. Angka ini menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di kabupaten Luwu masuk dalam kategori Tinggi. Salah satu factor yang mempengaruhi tingginya nilai IKUB di kabupaten Luwu yaitu adanya sikap toleransi yang tinggi dan saling menghormati antar sesama umat beragama.

Pemerintah Kabupaten Luwu mekalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memfasilitasi berbagai Kegiatan keagamaan untuk mendukung kehidupan beragama masyarakat. Berikut data persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah pada tahun 2021-2025.

Tabel 2.30.
Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan / Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah

No.	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	Capaian Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi pemda	10	11	10	11	11
2	Jumlah kegiatan keagamaan dalam 1 tahun	10	11	10	11	11
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Luwu, 2026.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi pemda di kabupaten Luwu selama tahun 2021-2025 sebesar 100 persen. Artinya seluruh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahunnya telah difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu.

c. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah instrumen pengukur kinerja pengelolaan zakat di Indonesia yang mencakup dimensi makro dan mikro yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sejak 2016. Dimensi makro yang merefleksikan dukungan unsur-unsur eksternal lembaga pengelola zakat terhadap kinerja pengelolaan zakat dicerminkan oleh empat indikator, di antaranya: (1) Regulasi; (2) Dukungan APBN/APBD; (3) Database Lembaga Zakat; (4) Jaringan; dan (5) Literasi dan Dakwah Zakat. Indikator Regulasi diturunkan ke dalam 2 variabel, Dukungan APBN/APBD tersusun oleh 3 variabel, Database Lembaga Zakat terdiri dari 3 variabel, Jaringan terdiri atas 2 variabel, serta Literasi dan Dakwah Zakat yang terdiri atas 2 variabel.

Dimensi mikro memberikan gambaran atas kinerja pengelolaan zakat berdasarkan unsur-unsur internal seperti manajemen tata kelola kelembagaan serta bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan memberikan dampak terhadap penerima manfaat program zakat. Dua indikator dimensi mikro diantaranya: (1) Tata Kelola; dan (2) Dampak Zakat. Indikator tata kelola dikembangkan menjadi 8 variabel: (1) perencanaan dan pengembangan, (2) pengendalian dan ketaatan hukum (3 Aman), (3) pengumpulan, (4) operasi, (5) pendistribusian dan pendayagunaan, (6) kesehatan lembaga zakat, (7) pelaporan, dan (8) teknologi. Sementara itu indikator dampak zakat terdiri dari 4 variabel di antaranya Indeks Kesejahteraan CIBEST, Mustahik Dientaskan dari Kemiskinan, Mustahik menjadi Muzaki dan Kemandirian.

Berdasarkan data yang dirilis Bappenas pada Juni 2026, Indeks Zakat Nasional Kabupaten Luwu pada tahun 2024-2025 stabil di angka 0,62 atau dalam kategori *Growth* (Bertumbuh). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Luwu dalam pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat sudah berjalan efektif dan memenuhi standar kualitas yang baik.

2.1.3.5 KELUARGA BERKUALITAS, KESETERAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

Gambaran pembangunan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di kabupaten Luwu dicerminkan dari kondisi indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks perlindungan anak, indeks pembangunan pemuda, dan indeks ketimpangan gender yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

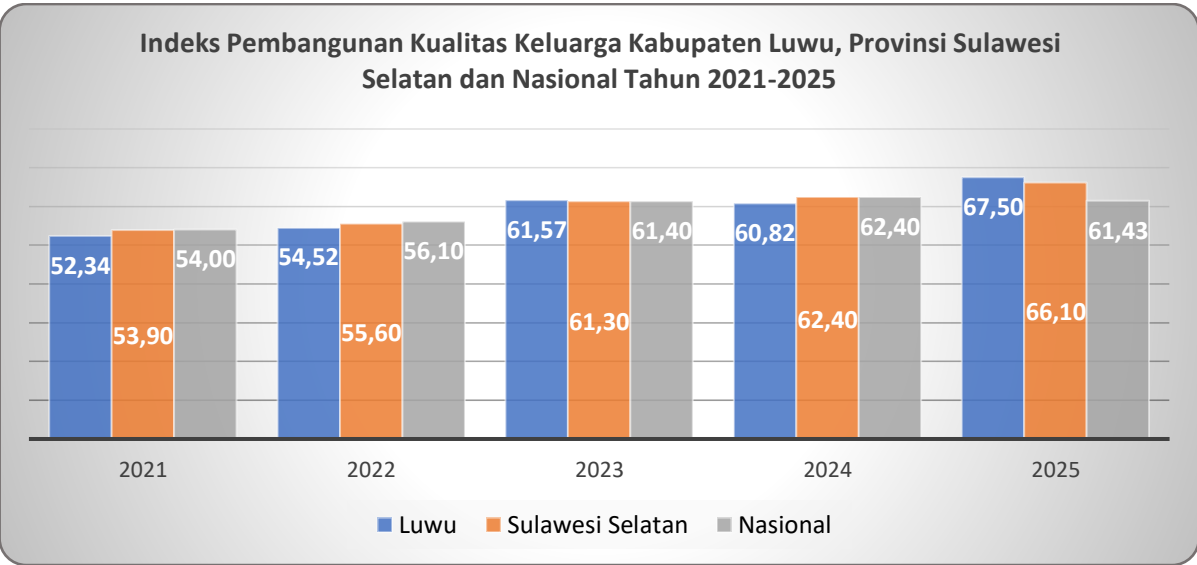
Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai IPKK berkisar antara 0 – 100 dengan kategori sebagai berikut :

- IPKK yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- IPKK yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70.
- IPKK yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Berikut data IPK di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2021-2025.

Grafik 2.62.
Perbandingan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten
Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021-2025



Sumber : SiPerindu, 2026.

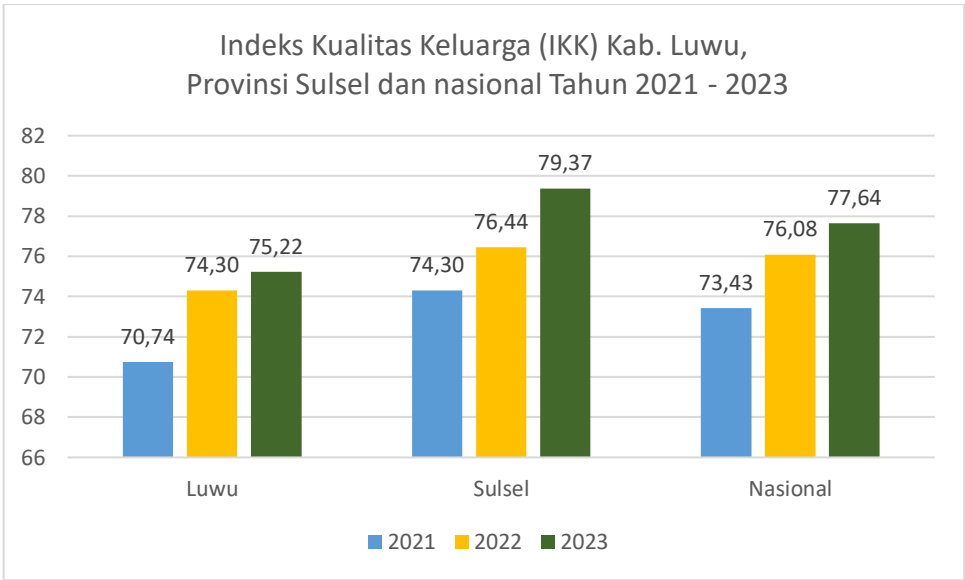
Pada tahun 2021 nilai IPK Kabupaten Luwu berada dibawah nilai provinsi dan nasional yaitu 52,34, namu pada tahun 2023 meningkat mencapai 61,57 di atas nilai provinsi (61,30) dan nasional (61,40). Sementara itu, capaian IPK kabupaten Luwu tahun 2025 berada diatas capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yaitu sebesar 67,50.

Faktor pendukung naiknya nilai Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten Luwu meliputi peningkatan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Hal ini dapat dicapai melalui beragam upaya, seperti peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas hidup dan dukungan pemerintah serta stakeholder terkait terhadap pembangunan keluarga.

b. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) terdiri dari 5 dimensi utama yaitu : 1) Kualitas legalitas dan struktur; 2) Kualitas ketahanan fisik; 3) Kualitas ketahanan ekonomi; 4) Kualitas Ketahanan sosial psikologi; 5) Kualitas ketahanan sosial budaya. Berikut data Indeks Kualitas keluarga di Kabupaten Luwu, provinsi Sulawesi Selatan dan nasional tahun 2020 sampai 2023.

Grafik 2.63.
Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Luwu,
Sulsel dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Luwu, 2025

Di kabupaten Luwu, Indeks Kualitas Keluarga mengalami peningkatan sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 dan berada dibawah IKK Sulsel dan Nasional, dimana tahun 2023 nilai IKK Kabupaten Luwu sebesar 75,22 namun masih berada dibawah IKK Sulsel (79,37) dan Nasional (77,64).

c. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang digunakan untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA merupakan salah satu indikator dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. Berikut data Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu tahun 2021 hingga tahun 2025.

Grafik 2.64.
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Luwu, 2026.

Nilai IPA kabupaten Luwu kurun waktu 2021 – 2025 mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 57,03 dan capaian terendah pada tahun 2025 yakni sebesar 54,47. Salah satu penyebab menurunnya Indeks Perlindungan Anak (IPA) di kabupaten Luwu yaitu masih adanya kasus kekerasan terhadap anak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks perlindungan anak, salah satunya memberikan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP merupakan komposit yang menggambarkan tiga domain pembangunan pemuda, yaitu: Pembangunan individu, Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ketiga lapisan ini mencerminkan komponen yang diperlukan dalam rangka mengefektifkan konsep pembangunan manusia seutuhnya, yaitu kebebasan untuk memilih, kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihannya serta keluasan untuk meningkatkan kemampuannya. IPP disusun berdasarkan 15 indikator yang dikelompokkan ke dalam 5 domain: Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, Lapangan dan kesempatan kerja, Partisipasi dan

kepemimpinan, Gender dan diskriminasi. Pengukuran indeks pembangunan pemuda hanya dilakukan sampai Tingkat provinsi sehingga data IPP kabupaten Luwu mengacu pada capaian provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2025 capaian IPP kabupaten Luwu tahun 2025 sebesar 61,35 masuk dalam kategori sedang.

Sementara itu, berdasarkan dat dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Luwu, jumlah organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan pada tahun 2022 hingga tahun 2025 sebanyak 51 organisasi.

Grafik 2.65.
Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2026.

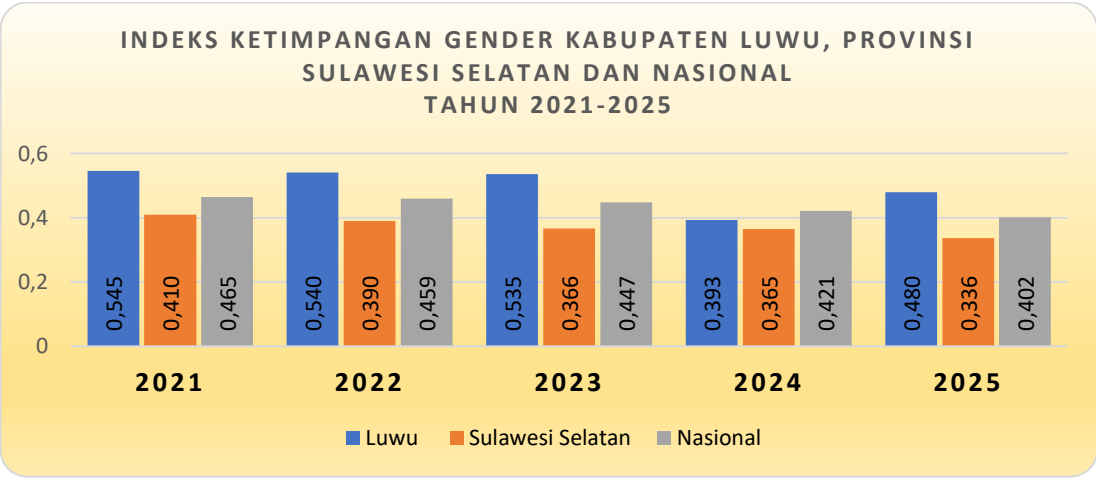
e. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu (1) dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi Perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), (2) dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta (3) dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPak perempuan.

IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin

rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Berikut data IKG di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

Grafik 2.66.
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021-2025



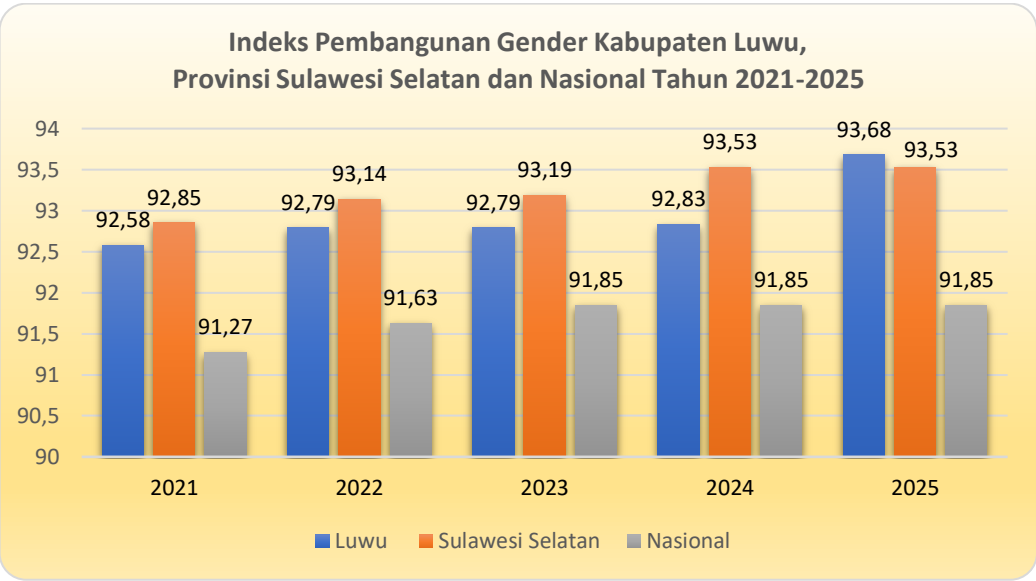
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, nilai IKG di Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2024 terus mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2025 terjadi sedikit peningkatan menjadi 0,480. Jika dibandingkan dengan capaian nilai IKG Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, Kabupaten Luwu masih cukup tinggi.

f. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.67.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2021 - 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026.

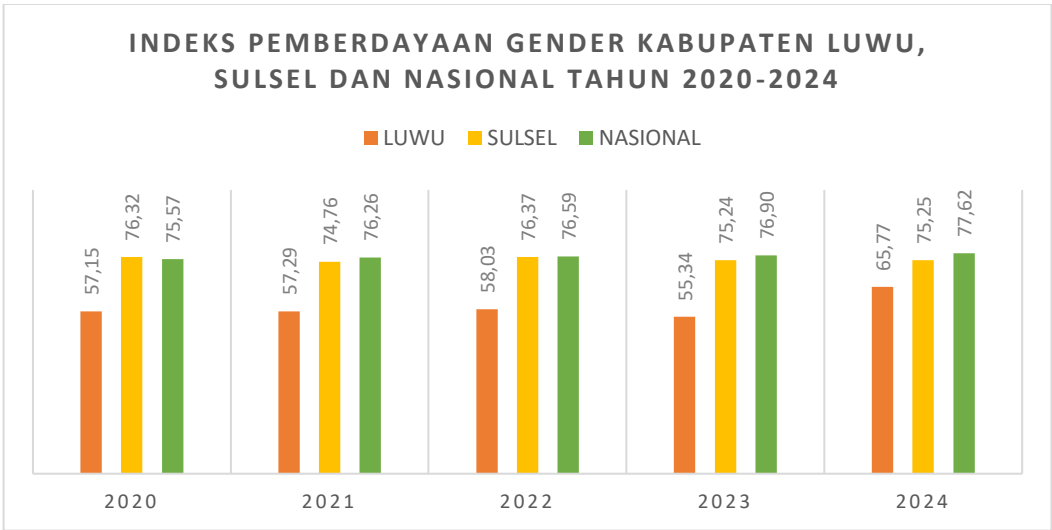
Berdasarkan grafik di atas terlihat data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu tahun 2021-2025 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 tercatat sebesar 92,58 dan tahun 2025 mencapai nilai 93,86. Jika dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional Indeks Pembangunan Gender kabupaten Luwu berada di atas capaian provinsi dan nasional. Salah satu faktor meningkatnya nilai IPG di Kabupaten Luwu yaitu peningkatan partisipasi Angkatan kerja perempuan.

g. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam kegiatan ekonomi dan politik, dengan fokus pada kesetaraan gender dalam peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mengukur kesetaraan gender dalam hal partisipasi di berbagai bidang, seperti partisipasi di parlemen, kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga, dan peran perempuan sebagai tenaga profesional.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di kabupaten Luwu pada tahun 2020 sampai 2024 fluktuatif cenderung meningkat walaupun di tahun 2023 mengalami penurunan namun kembali naik di tahun 2024, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, parlemen dan swasta menjadi faktor meningkatnya nilai IDG di kabupaten Luwu. Adapun nilai ini juga masih rendah dibandingkan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tingkat Provinsi Sulsel dan nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.68.
IPG Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Gambaran daya saing daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain Daya Saing Sumber Daya Manusia; Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru; Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; dan Stabilitas Ekonomi Makro yang akan dijelaskan sebagai berikut:

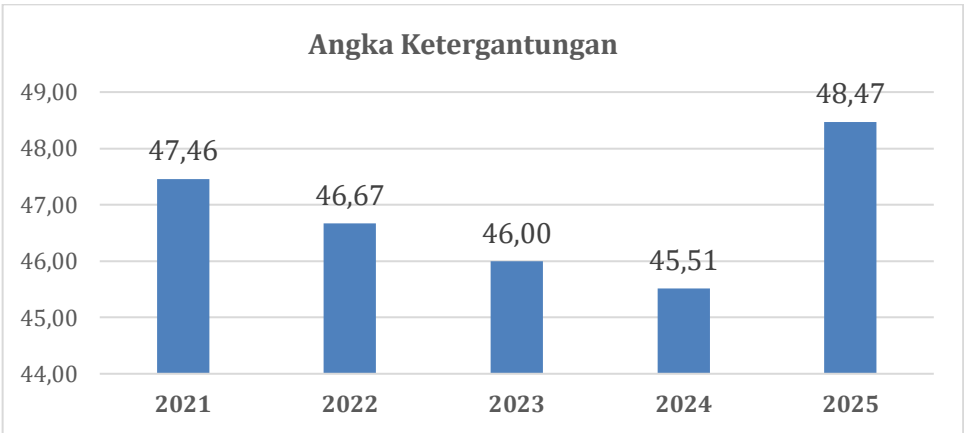
2.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah karena Sumber Daya Manusia berperan dalam mengolah dan mengelola faktor produksi lainnya. Daya Saing Sumber Daya Manusia daerah di Kabupaten Luwu sendiri dicerminkan dari berbagai kondisi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. **Angka Ketergantungan**

Angka Ketergantungan mengacu pada perbandingan antara jumlah individu yang tidak aktif secara ekonomi (seperti anak-anak dan pensiunan) dengan jumlah individu yang aktif secara ekonomi (anggota angkatan kerja). Ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat beban yang diberikan oleh populasi yang tidak aktif secara ekonomi terhadap populasi yang aktif dalam menghasilkan pendapatan. Berikut adalah grafik angka ketergantungan di Kabupaten Luwu :

Grafik 2.69.
Angka Ketergantungan Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

Berdasarkan data penduduk di Kabupaten Luwu menunjukkan Angka Ketergantungan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami penurunan secara terus menerus namun ditahun 2025 meningkat menjadi 48.47 kondisi ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 48-49 penduduk. Berdasarkan data Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, bonus demografi di Kabupaten Luwu di proyeksi masih berlangsung hingga tahun 2030. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.31.
Proyeksi *Dependency Ratio* Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2030

Uraian	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (ribu)	Orang	121,31	122,82	124,72	126,92	129,28	131,69
Jumlah Penduduk Usia Produktif (ribu)	Orang	267,98	271,38	274,41	277,10	279,55	281,89

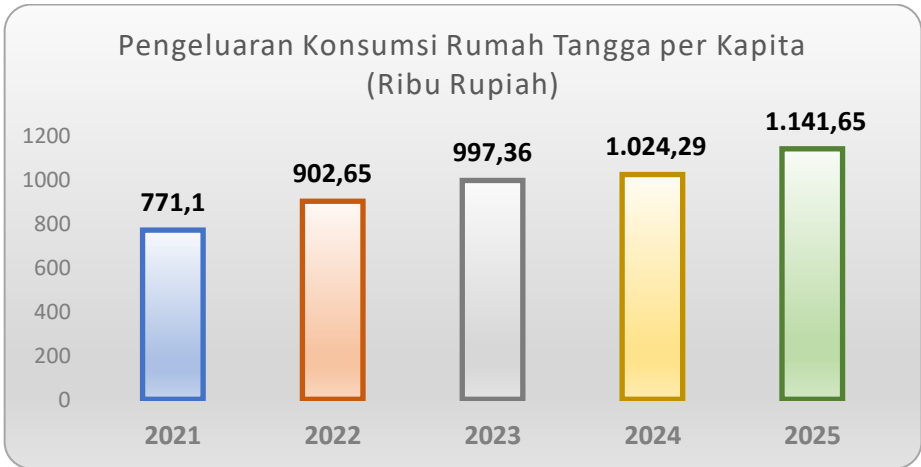
Uraian	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dependency Ratio	Persen	45,27	45,26	45,45	45,80	46,25	46,72

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2026.

b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pola konsumsi rumah tangga menggambarkan daya saing sumber daya manusia. Manusia yang sehat memiliki kesempatan lebih baik untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraannya, disisi lain mereka yang tidak sehat cenderung memiliki produktivitas yang rendah sehingga cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang juga rendah. Pengeluaran konsumsi perkapita juga menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk suatu wilayah. Konsumsi masyarakat yang tinggi menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut data pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.70.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, dimana pada tahun 2021 sebesar Rp. 771.100 per kapita menjadi Rp. 1.141.650 per kapita di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir.

c. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun di tahun 2025 mengalami

peningkatan yaitu dari Rp. 60.930,42 per Angkatan kerja pada tahun 2021 menjadi Rp. 65.502,64 per Angkatan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai PDRB ADHK. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32.
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

Uarian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Angkatan Kerja	Jiwa	171.503	183.067	195.683	198.230	199.713
PDRB ADHK	Miliar Rupiah	10.449,75	11.044,67	11.668,14	12.176,49	13.081,73
Produktivitas Total Daerah	Rp/ Angkatan Kerja	60.930,42	60.331,30	59.627,76	61.426,07	65.502,64

Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2026.

d. Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah desa berstatus swasembada terhadap total desa pada suatu wilayah. Berikut data persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa di Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2025.

Tabel 2.33.
Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa Tahun 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	89,41	89,41	93,94	n.a	n.a

Sumber : DPMD Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa mengalami peningkatan yaitu dari 89.41% di tahun 2021 dan 2022 menjadi 93,94% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar desa di Kabupaten Luwu telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional untuk tahun 2024-2025

e. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB

Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB atau indikator keterbukaan ekonomi menggambarkan semakin hilangnya hambatan

dalam melakukan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif dan semakin lancarnya mobilitas modal antar negara. Keterbukaan ekonomi memberi keuntungan bagi semua negara yang terlibat di dalamnya. Keuntungan dari keterbukaan ekonomi melalui perdagangan diantaranya berupa pembukaan akses pasar yang lebih luas, pencapaian tingkat efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi, serta peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Tabel 2.34.
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB Tahun 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB	%	0,79	0,83	0,83	-0,15	1,68

BPS Kabupaten Luwu, 2026.

Nilai rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kabupaten Luwu selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya ekspor dan impor perdagangan di Kabupaten Luwu selama periode tersebut. Namun pada tahun 2024 capaian rasio ekspor dan impor terhadap PDRB bernilai negatif yaitu -0,15%. Hal ini disebabkan karena nilai impor yang lebih besar terhadap nilai ekspor pada tahun tersebut. Namun Tahun 2025 kembali mengalami peningkatan nilai menjadi 1,68.

f. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka Kriminalitas yang tertangani menunjukkan jumlah kejadian kriminal yang dilaporkan pada intansi yang berwenang, dan mendapat penanganan dan dapat teratasi. Rilis data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Luwu memperlihatkan adanya peningkatan signifikan terhadap angka kriminalitas yang tertangani, yang sebelumnya sebesar 67,30% pada tahun 2022 menjadi 92,72 % di tahun 2023 namun kembali menurun menjadi 87,84% di tahun 2024 dan 85,29 di tahun 2025. Hal ini memperlihatkan jika pada dasarnya kinerja dari intansi terkait sudah cukup baik. Namun perlu konsistensi dalam upaya penanganan tindak kriminal agar tidak terjadi penurunan.

Keberhasilan penanganan kasus tindak kriminal sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan sumber

daya, sarana prasarana baik itu dalam hal jumlah personil kepolisian maupun ketersediaan peralatan investigasi dan peralatan pendukung lainnya, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan memberikan informasi terkait kasus yang ditangani.

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, persentase tindak kriminal yang diatasi cenderung meningkat. Penurunan hanya terjadi di tahun 2024 dan 2025. Adapun data Angka Kriminalitas yang tertangani tahun 2021 -2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35.
Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Angka kriminalitas yang tertangani	%	66,33	67,30	92,72	87,84	85,29

Sumber : Kepolisian Resor Luwu Tahun 2026.

2.3.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI TINGGI

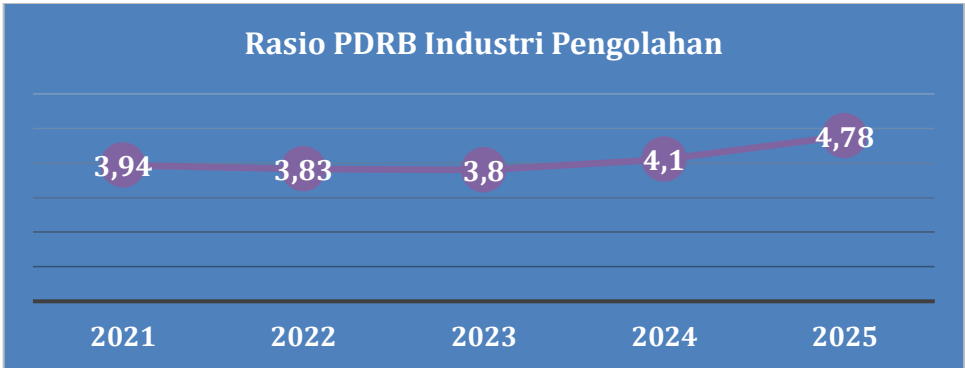
Iptek dan Inovasi memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan, peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, dan meningkatkan kualitas produk dan jasa. Potensi ekonomi suatu daerah akan turut membentuk kompleksitas daya saing suatu daerah. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Perkembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi di Kabupaten Luwu dicerminkan dari berbagai kondisi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih

tinggi nilainya. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu dari tahun 2021 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan akibat masih kurangnya penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi. Pada tahun 2021 Rasio PDRB sektor industri pengolahan sebesar 3,94 turun menjadi 3,8 pada tahun 2023, pada tahun 2025 meningkat menjadi persen 4.78 %. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.71.
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

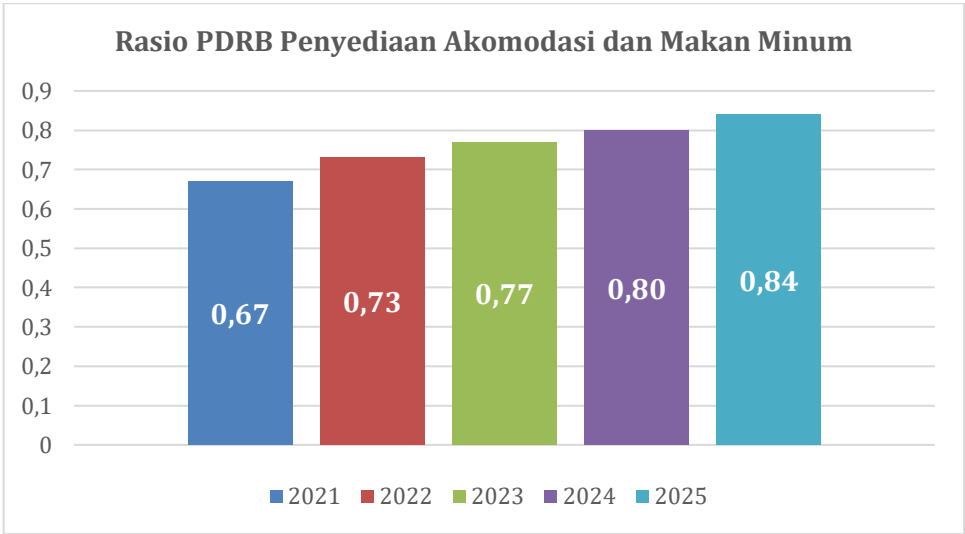


Sumber data BPS Kabupaten Luwu tahun 2026.

b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 hingga 2025 masih sangat rendah dibanding sektor lainnya, Walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 sebesar 0,67 naik menjadi 0,84 pada tahun 2025. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.72.
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber data BPS Kabupaten Luwu Tahun 2026.

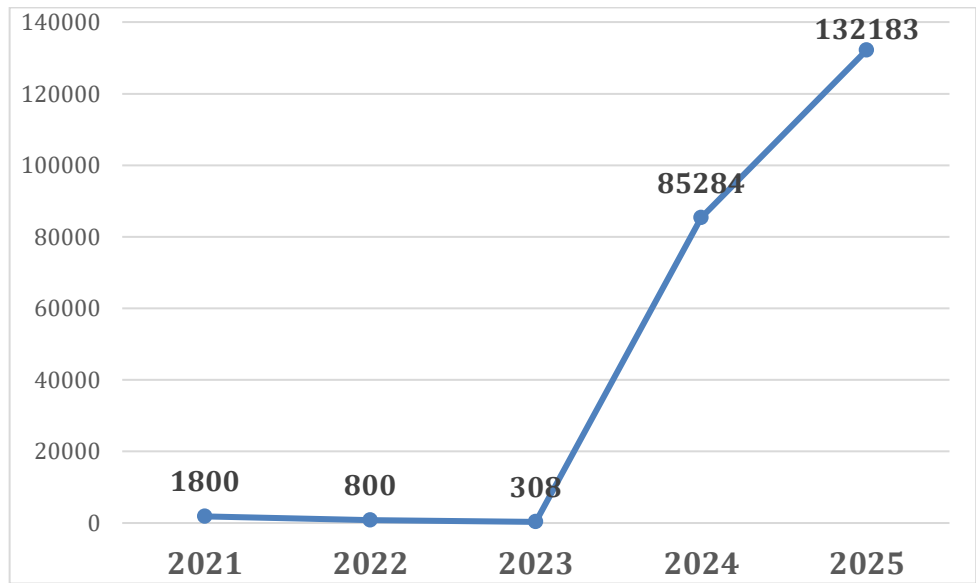
Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih sangat rendah akibat dari beberapa faktor diantaranya kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Luwu.

c. Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Pada sektor pariwisata Kabupaten Luwu mempunyai cukup banyak potensi untuk dikembangkan seperti wisata alam, wisata pantai dan wisata budaya. Berdasarkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara Kabupaten Luwu selama kurung waktu 2021-2023 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 1.800, turun menjadi 308 pada tahun 2023. Namun terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2025 sebanyak 132.183 pengunjung. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang sangat signifikan tidak hanya berdampak pada kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tapi juga pada PAD Kabupaten Luwu. Peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Luwu didorong oleh tren wisata berbasis alam dan budaya, yang diperkuat oleh optimalisasi infrastruktur serta gencar promosi. Adapun faktor utama yang menyebabkan lonjakan kunjungan wisatawan di Kabupaten Luwu antara lain:

1. Tren Healing ke Wisata Alam Terbuka seperti Wisata Alam wai Tiddo, Nebuba yang terletak di kecamatan Bua
 2. Daya Tarik Budaya dan Sejarah: Sebagai pusat Kerajaan Luwu yang bersejarah, wilayah ini memiliki daya tarik wisata kultural dan adat istiadat yang memikat wisatawan mancanegara untuk menggali sejarah peradaban tertua di Sulawesi Selatan
 3. Keberagaman Objek Wisata : Luwu memiliki variasi destinasi lengkap, mulai dari wisata bahari seperti Pantai Ponnori, hingga wisata petualangan dan pendakian Gunung Latimojong
- Berikut dapat dilihat grafik yang menggambarkan Peningkatan Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara :

Grafik 2.73.
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

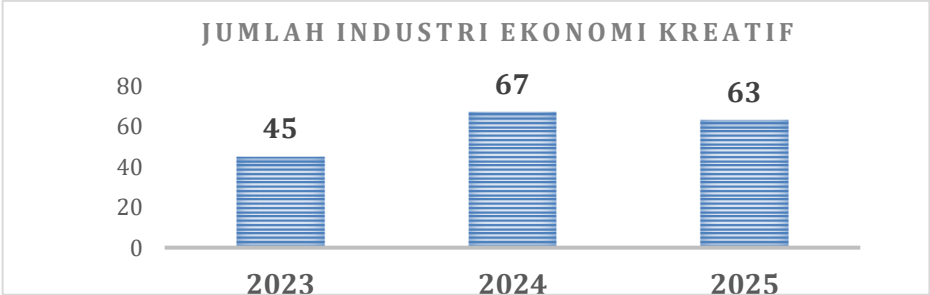


Sumber : Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, 2026.

d. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Perpres No 8 Tahun 2008, terdapat 14 subsektor industri kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video/film/animasi/fotografi, game, musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, software, televisi/radio, dan riset & pengembangan. Jumlah industri ekonomi kreatif di Kabupaten Luwu pada tahun 2023 sebanyak 45 industri meningkat menjadi 67 industri pada tahun 2024 hal ini disebabkan oleh adopsi digitalisasi pemasaran, dukungan program pembinaan pemerintah daerah, hilirisasi produk berbasis sumber daya alam lokal, serta peluang pasar yang semakin luas, serta kolaborasi lintas sektor dengan pihak swasta (seperti PT Masmindo Dwi Area) bersama pemerintah turut memberdayakan masyarakat, misalnya melalui penyediaan fasilitas pengolahan untuk koperasi petani. Sementara pada tahun 2025 kembali turun menjadi 63 industri.

Grafik 2.74.
Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten Luwu
Tahun 2023-2025

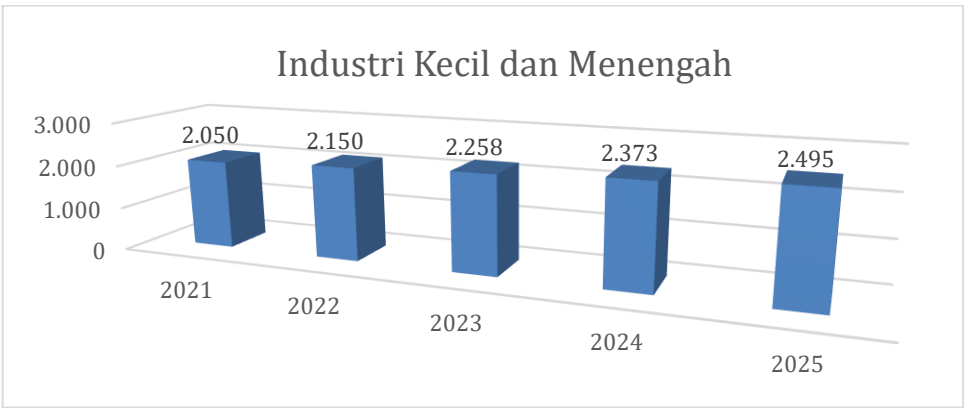


Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2026.

e. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu dari tahun 2021 sebesar 2.050 terus menerus meningkat hingga tahun 2025 menjadi 2.495. peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang melonjak sebesar 7,43 persen serta meningkatnya adopsi digitalisasi dan pemasaran produk lokal khususnya sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang terus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan produk olahan berniali tambah. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.75.
Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



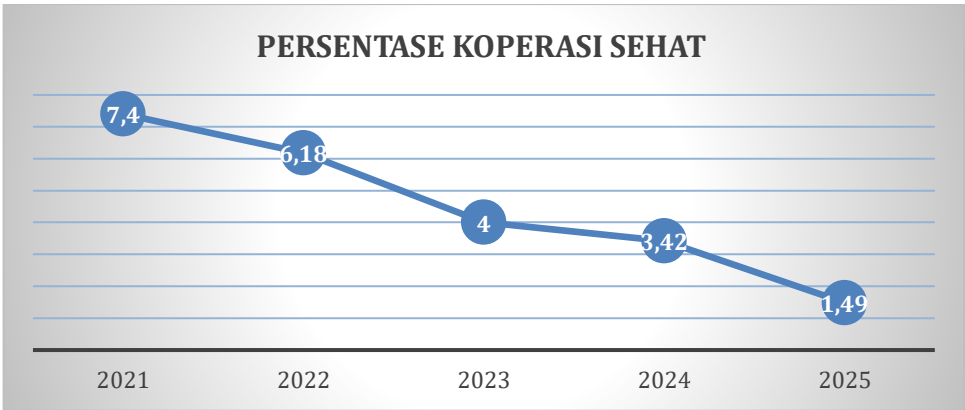
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, 2026.

f. Persentase Koperasi Sehat

Kopersai yang sehat merupakan koperasi yang memenuhi prinsip-prinsip koperasi, menerapkan manajemen yang baik, dan

mematuhi peraturan perundang-undangan. Peran koperasi dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. koperasi yang memenuhi prinsip-prinsip koperasi, menerapkan manajemen yang baik, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Luwu pada tahun 2021 hingga tahun 2025 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 7,4 persen menjadi 1.49 % di tahun 2025. Penurunan persentase Koperasi Sehat di Kabupeten Luwu terutama disebabkan oleh tingginya jumlah koperasi yang vakum dan tidak melaksanakan kewajiban administratif, rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola, serta permodalan yang terbatas.

Grafik 2.76.
Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, tahun 2026.

g. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Adapun persentase Koperasi Aktif di tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari 18,00% menjadi 41,27% namun di tahun 2025 kembali menurun menjadi 3,74%. Terjadinya penurunan persentase koperasi aktif di Kabupaten Luwu pada tahun 2024-2025 didominasi oleh tidak dilaksanakannya Rapat Anggaran Tahunan (RAT), ketiadaan aktivitas usaha, serta kelembagaan yang tidak sehat. Minimnya regenerasi pengurus dan lambatnya adopsi digital juga menyebabkan banyak koperasi akhirnya vakum atau beralih menjadi usaha non-koperasi. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.77.
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025

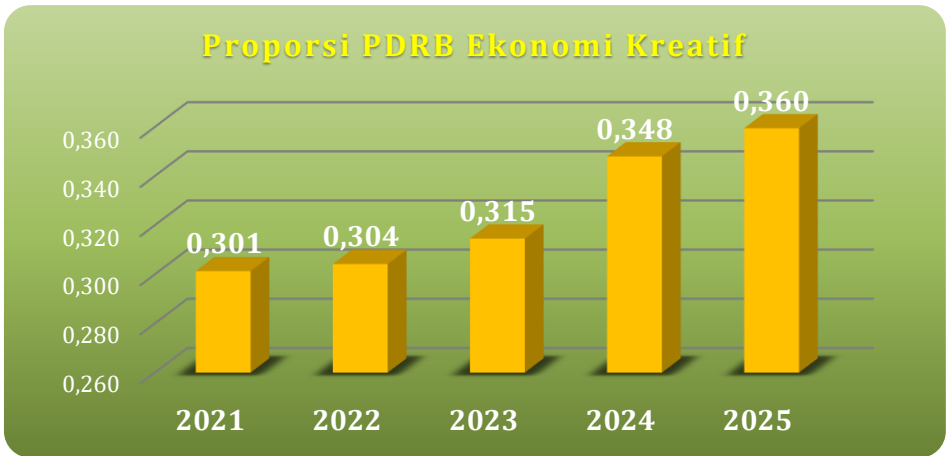


Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, Tahun 2026.

h. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB ekonomi kreatif adalah indikator yang menilai tambah bruto yang dihasilkan oleh subsektor industri kreatif (seperti kuliner, kriya, fesyen,) di suatu wilayah dibagi dengan total PDRB wilayah tersebut. Proporsi PDRB ekonomi kreatif di Kabupaten Luwu pada tahun 2021-2025 terus meningkat. Dimana pada tahun 2021 sebesar 0,301 persen menjadi 0,36 di tahun 2025. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya aktivitas kesenian hiburan dan rekreasi yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.78.
Prporosi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



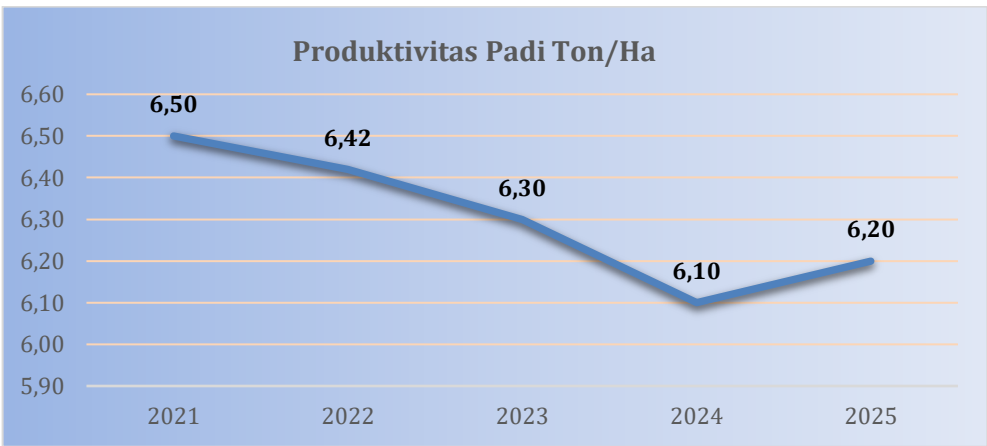
Sumber : PDRB Kab. Luwu menurut lapangan usaha tahun 2021-2025.

i. Produktivitas Padi

Produktivitas padi adalah ukuran seberapa banyak gabah kering giling (GKG) yang dapat dihasilkan dari satu hektar sawah dalam satu musim tanam. Ini merupakan indikator penting bagi

ketahanan pangan suatu daerah. Dengan produktivitas yang tinggi, dapat menjamin ketersediaan beras sebagai makanan pokok bagi seluruh masyarakat. Selain itu, peningkatan produktivitas juga dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut ini data produktivitas Padi di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 sampai Tahun 2025.

Grafik 2.79.
Produktivitas Padi Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2026.

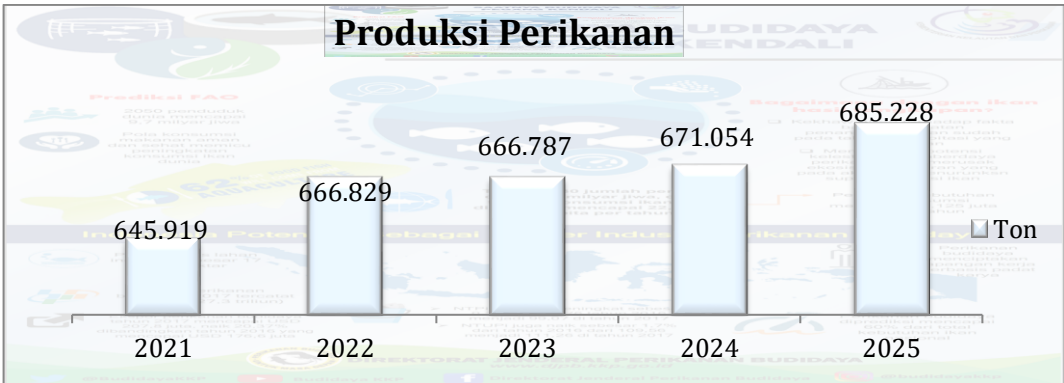
Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun tahun 2021 produktivitas padi di Kabupaten Luwu mencapai 6,50 Ton/Ha. Selanjutnya dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terus menerus mengalami penurunan menjadi 6,1 Ton/Ha di tahun 2024. Penurunan produktivitas padi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain varietas padi, kualitas tanah, ketersediaan air, pupuk dan pestisida, teknologi pertanian dan iklim, untuk tahun 2025 kembali mengalami peningkatan sebesar 6,2 Ton/Ha peningkatan ini dipengaruhi oleh penggunaan benih unggul, pembangunan infrastruktur irigasi, dan modernisasi pertanian.

j. Jumlah Produksi Perikanan

Pemerintah berupaya meningkatkan produksi perikanan melalui berbagai kebijakan, seperti pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Total produksi perikanan Kabupaten Luwu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan produksi sektor perikanan belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga pendapatan masyarakat sektor

perikanan masih rendah. Produksi perikanan Kabupaten luwu lima tahun terakhir (2021-2025) dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.80.
Produksi Perikanan Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



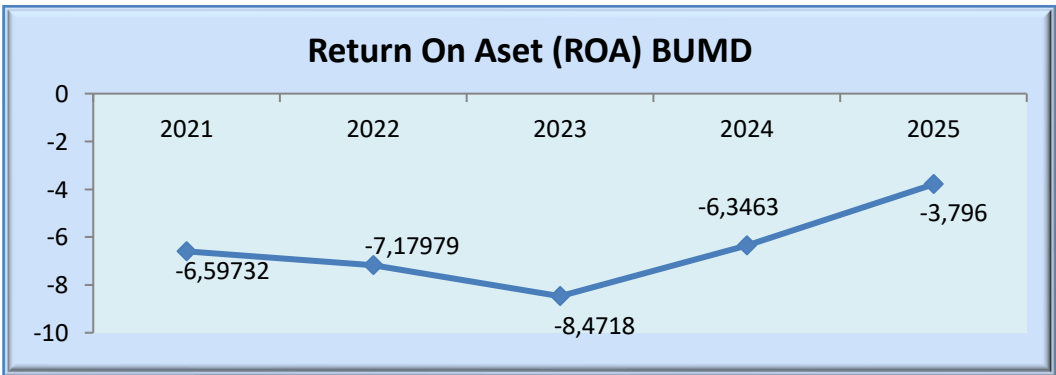
Sumber Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan grafik diatas Total Produksi Perikanan Kabupaten Luwu pada tahun 2021 sebesar 645.919,16 ton, kemudian pada tahun 2022 sebesar 666.829,06 ton dan pada tahun 2025 mencapai 685.228,95 ton.

k. Return on Aset (ROA) BUMD

Return on aset (ROA) merupakan ukuran nilai keuntungan suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Dalam kurung waktu tahun 2021 hingga tahun 2025 return on aset PDAM Kabupaten Luwu minus karena laba merugi akibat dari biaya tidak langsung atau biaya penyusutan aset. Pada tahun 2021 sebesar -6,59732 menjadi -8,4718 pada tahun 2023, kemudian di tahun 2025 sebesar -3,796. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.81.
Return on Asset (ROA) Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025

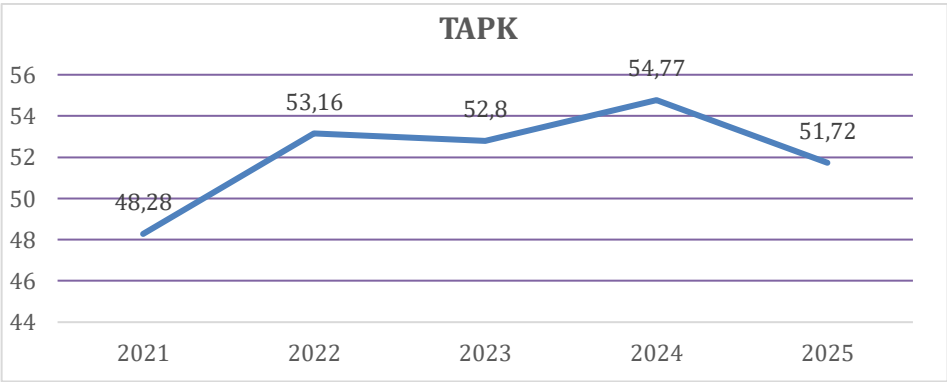


Sumber : PDAM Kabupaten Luwu Tahun 2026.

1. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja. Berikut Grafik yang menggambarkan TPAKP selama 5 (Lima) Tahun terakhir.

Grafik 2.82.
TPAKP di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

Grafik diatas menunjukkan capaian TPAKP Kabupaten Luwu pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebesar 10,05 poin atau menjadi sebesar 53,16 persen dan mengalami penurunan sebesar 3,05 poin atau menjadi sebesar 51,72 persen pada tahun 2025.

e. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi

menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Berikut Grafik Tingkat Partispasi angkatan Kerja di Kabupten Luwu Tahun 2021-2025.

Grafik 2.83.
Perkembangan TPAK Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber Data : Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2026.

Grafik di atas menggambarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu untuk lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan tetapi masih berfluktuasi dimana TPAK pada tahun 202 sebesar 64,72 persen terjadi peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 68,61 persen kemudian menurun lagi pada tahun 2025 sebesar 67,74 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja tidak disertai dengan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Luwu.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan Kerja. Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran terbuka di Kabupaten Luwu, masih menjadi masalah aktual. Berikut Grafik yang menggambarkan perkembangan TPT di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir :

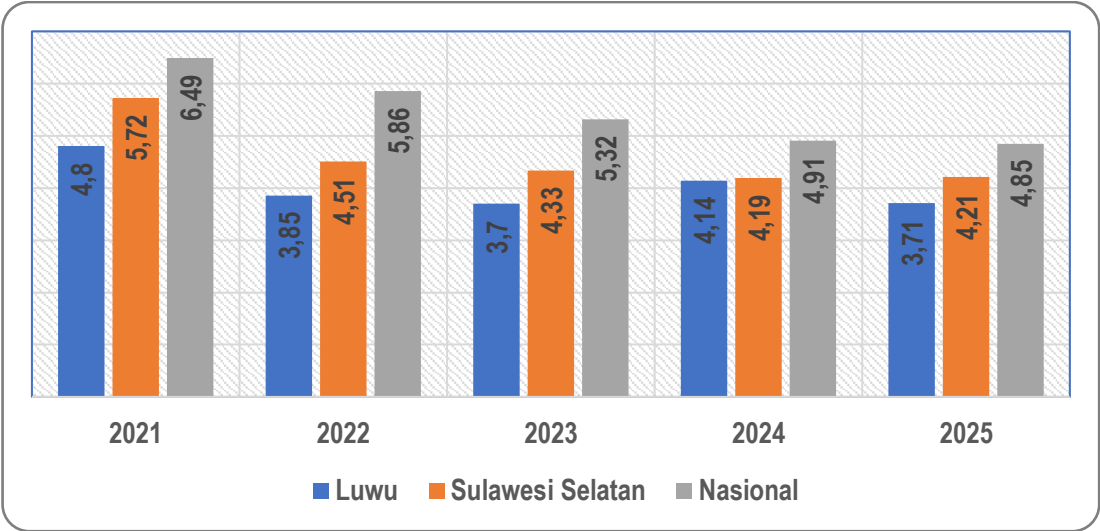
Grafik 2.84.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2026.

Berdasarkan data perkembangan TPT Kabupaten Luwu tersebut di atas, nampak bahwa angka TPT Kabupaten Luwu pada tahun 2025 sebesar 3,71 persen, capaian tersebut menurun sebesar 0,43 persen. Adapun penurunan TPT di kabupaten Luwu didorong oleh beberapa factor antara lain peningkatan aktivitas ekonomi local yang berkontribusi positif dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi yang membantu menciptakan lapangan kerja baru di kabupaten Luwu salah satunya adalah PT Tiara Tirta Energi dan PT Macmahong yang telah beroperasi, serta peningkatan kinerja pemerintah daerah termasuk efektivitas program ketenagakerjaan yang berdampak pada penurunan angka pengangguran.

Grafik 2.85.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2021-2025

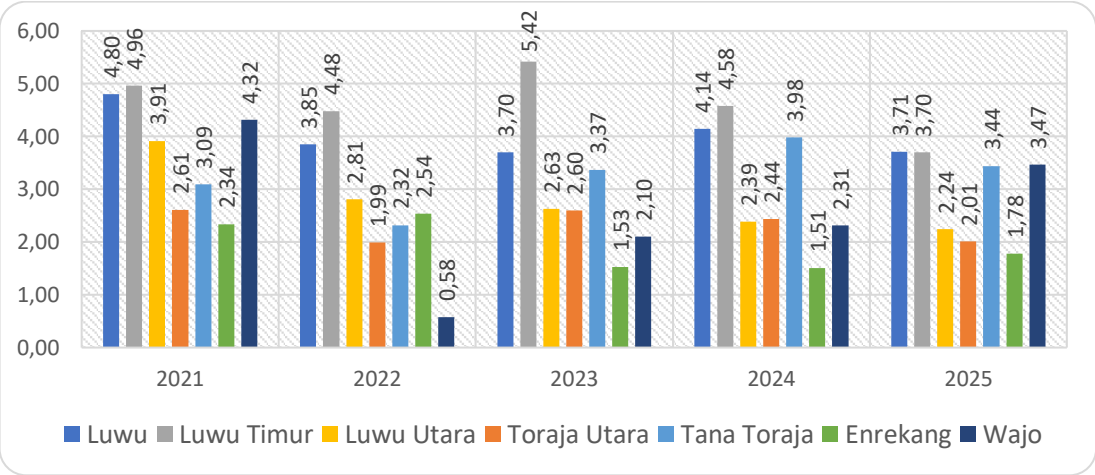


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2026.

Data perkembangan capaian persentase TPT tersebut di atas menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Luwu pada tahun 2021-2025

selalu berada dibawah capaian persentase TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dimana capaian persentase TPT Kabupaten Luwu pada tahun 2025 sebesar 3,71 persen, sementara pada tingkat Provinsi Sulawesi selatan sebesar 4,21 persen dan Nasional sebesar 4,85 persen.

Grafik 2.86.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2021-2025



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

Dari grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian persentase TPT Kabupaten Luwu tertinggi dari 6 kabupaten/kota sekitar. Adapun capaian Kabupaten Luwu yakni sebesar 3,71 persen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya jumlah serapan angkatan kerja, dimana yang berstatus bekerja hanya sebesar 192.308 orang dari angkatan kerja sebanyak 199.713 orang.

g. Indeks Inovasi daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi dan kemampuan daerah atau wilayah dalam mengembangkan solusi kreatif dan baru untuk berbagai tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Hal ini mencakup berbagai aspek inovasi, seperti penelitian dan pengembangan, investasi dalam teknologi, dan kemitraan inovatif. Penilaian tingkat inovasi daerah dapat bervariasi berdasarkan metodologi yang digunakan dalam pengukuran, dan faktor-faktor seperti investasi dalam inovasi dan kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat memengaruhi perubahan dalam nilai Indeks Inovasi Daerah dari

tahun ke tahun. Berikut adalah data indeks inovasi daerah di Kabupaten Luwu tahun 2021-2025.

Grafik 2.87.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri, 2026.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa indeks inovasi daerah pada tahun 2022 sampai 2025 cenderung satagnan pada kategori inovatif. dimana pada tahun 2021 sebanyak 19,59 pada kategori kurang inovatif kemudian pada tahun 2022 hingga tahun 2025 meningkat dari 42,59 dan pada tahun 2025 menjadi 49.34 dengan kategori inovatif.

h. Indeks Kapabilitas Inovasi

Indeks Kapabilitas Inovasi adalah salah satu pilar Indeks Daya Saing Daerah yang mengukur kemampuan daerah dalam melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, yang bertujuan untuk memperoleh ukuran daya saing daerah. Dalam mengukur indeks kapabilitas inovasi menekankan pentingnya kualitas inovasi dari pada kuantitas. Perkembangan indeks kapabilitas inovasi daerah Kabupaten Luwu berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2023 dengan nilai 1,05, pada tahun 2024 dengan nilai 1,56 dan pada tahun 2025 meningkat dengan nilai 2,64.

2.3.3 PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

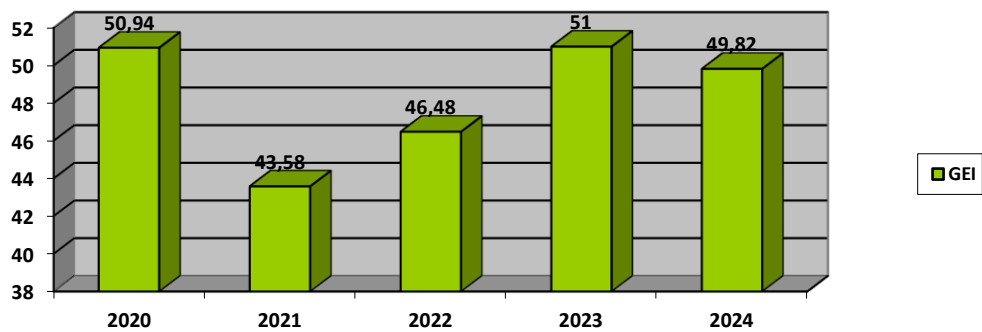
a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau atau Green Economy Index (GEI) adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi. Indeks Ekonomi Hijau mengukur perkembangan keseimbangan

antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini merupakan indeks komposit dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, berskala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin baik.

Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi, namun masih dalam kategori Sedang. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, tetapi kembali meningkat pada tahun 2022 hingga tahun 2023 dengan capaian 51,00 poin, kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 49,82 poin. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.88.
Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber: Litbang Provinsi Sulawesi Selatan, 2025.

b. Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi Biru adalah konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.

Indeks Ekonomi Biru menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari 0-100 dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. Indeks Ekonomi Biru disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. Skor Indeks Ekonomi Biru yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya

lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup.

Skor Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Luwu pada tahun 2023 adalah sebesar 79,47 poin. Jika dibandingkan dengan wilayah setara, Kabupaten Luwu memiliki skor tertinggi disusul oleh Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dengan skor masing-masing sebesar 79,58 dan 77,08. Pada tahun 2024 Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Luwu mencapai 90,31.

2.3.4 TRANSFORMASI DIGITAL

a. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi

Layanan publik *online* dan terintegrasi adalah suatu sistem dimana berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses secara digital dan terhubung satu sama lain. Sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administratif, seperti perizinan, kependudukan, pembayaran pajak, atau pelaporan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Berikut ini data persentase Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025.

Grafik 2.89.
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Luwu lima tahun terakhir (2021-2025) mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2021 capaiannya sebesar 43,00% meningkat menjadi

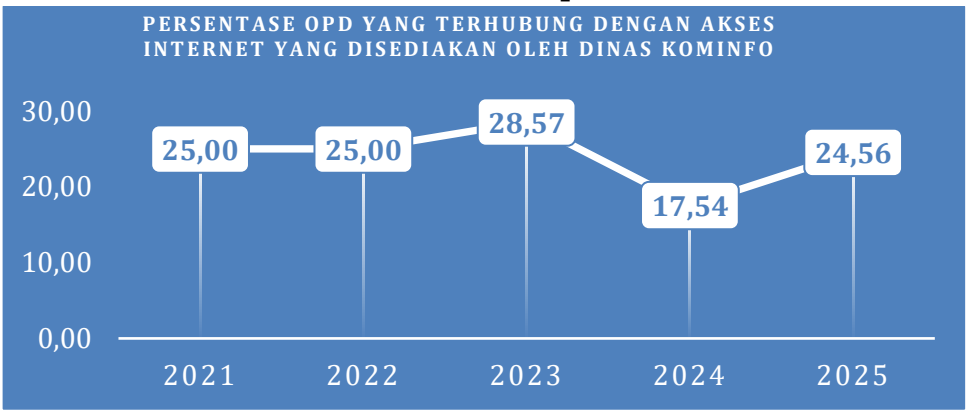
60,00% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya layanan publik yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi di Kabupaten Luwu.

b. Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo

Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo adalah Indikator yang digunakan untuk menunjukkan berapa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disambungkan sistem jaringan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Indikator ini untuk menilai kinerja Diskominfo dalam menyediakan akses sistem jaringan informasi kepada OPD. Indikator ini juga digunakan untuk mengukur kemajuan dalam penggunaan teknologi informasi.

Berikut grafik data capaian Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025:

Grafik 2.90.
Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2026.

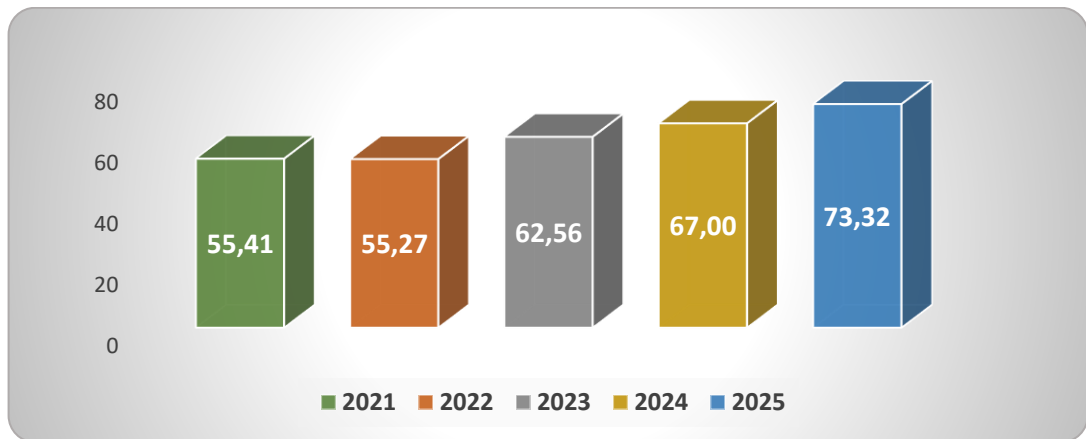
Berdasarkan grafik data persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo di kabupaten luwu pada tahun 2025 meningkat menjadi 24,56 dari tahun 2024 yaitu 17,54. Namun demikian, perolehan tersebut masih tergolong rendah dimana masih ada gap sebesar 74,44 persen OPD yang belum mengakses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat terhubung dengan internet yang

disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Luwu untuk mewujudkan tersedianya sebuah jaringan informasi yang lebih mudah diakses dan lebih Akuntabel dalam satu server.

c. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga dengan akses internet adalah ukuran penting yang menggambarkan sejauh mana masyarakat telah terhubung dengan dunia digital. Indikator ini juga dapat mencerminkan kemajuan beberapa aspek seperti kemajuan digital, inklusi sosial, dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga semakin tinggi proporsi indikator ini, maka semakin besar potensi suatu wilayah untuk memanfaatkan peluang di era digital. Berikut perkembangan nilai proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Luwu tahun 2021-2025.

Grafik 2.91.
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yaitu dari 39,84% pada tahun 2020 menjadi 67,00% pada tahun 2024. Dari data tersebut masih terdapat 33,00% rumah tangga yang belum mendapatkan akses internet sehingga hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat mengentaskan area *blankspot* sehingga semua wilayah di Kabupaten Luwu bisa mendapatkan akses internet.

d. **Jumlah dan Lokasi *Blankspot***

Blankspot adalah wilayah yang belum memiliki akses komunikasi dan informasi, baik analog maupun digital. Di era serba digital seperti sekarang, keberadaan *blankspot* menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan akses komunikasi dan informasi di seluruh wilayah. Ketidaktersediaan akses komunikasi dapat menghambat berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, hingga akses ke layanan darurat. Berikut data lokasi *blankspot* di Kabupaten Luwu tahun 2025.

Tabel 2.36.
Lokasi *Blankspot* di Kabupaten Luwu
Tahun 2025

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Bajo Barat	Desa Bonelemo Barat
2	Basse Sangtempe	Desa Sinaji
3	Basse Sangtempe	Desa Tabi
4	Basse Sangtempe	Desa Ledan
5	Basse Sangtempe Utara	Desa Dampan
6	Bua	Desa Posi
7	Bua Ponrang	Desa Tampumia
8	Ponrang	Desa Tampa
9	Larompong Selatan	Desa Malewong
10	Larompong	Desa Bukit Sutra
11	Latimojong	Desa Boneposi
12	Latimojong	Desa Pangi
13	Latimojong	Desa Kadundung
14	Latimojong	Rante Balla
15	Latimojong	Desa Tibussan
16	Suli Barat	Desa Poringan
17	Suli Barat	Desa Kaili
18	Suli Barat	Desa Muhajirin
19	Walenrang Utara	Desa Siteba
20	Walenrang	Desa Limbong
21	Walenrang Barat	Desa Ilan Batu Uru
22	Walenrang Barat	Desa Ilan Batu

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Luwu, 2026.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 22 Desa dari 13 Kecamatan yang masuk dalam lokasi *blankspot*. Kecamatan Latimojong merupakan kecamatan dengan Lokasi *blankspot* terbanyak yaitu terdapat 5 desa, kemudian disusul

Kecamatan Basse Sangtempe dan Kecamatan Suli Barat dengan masing-masing 3 desa.

e. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Masyarakat digital adalah masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Proses digitalisasi membentuk karakter esensial mereka, dengan aktivitas yang dilakukan secara elektronik dan bebas kertas. Seluruh kegiatan, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, kini sepenuhnya berbasis teknologi. Pengukuran IMDI secara rutin dilakukan mulai dari tahun 2022, untuk memantau perkembangan kompetensi digital masyarakat Indonesia secara menyeluruh dari skala nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Kerangka kerja IMDI terdiri dari tiga komponen, yaitu pilar, subpilar, dan indikator. Adapun komponen pilar terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Infrastruktur dan ekosistem;
- 2) Keterampilan Digital;
- 3) Pemberdayaan; dan
- 4) Pekerjaan.

Pilar-pilar tersebut bersama-sama mewujudkan pengukuran keterampilan digital yang komprehensif, objektif, dan terstandarisasi. Masing-masing pilar dijabarkan menjadi sepuluh subpilar spesifik, yang kemudian diukur melalui indikator-indikator yang berasal dari data primer dan sekunder. Berikut nilai IMDI Kabupaten Luwu tahun 2022-2025.

Grafik 2.92.
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kabupaten Luwu Tahun 2022-2025



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Tabel 2.37.

Nilai dan Kategori IMDI Kabupaten Luwu Tahun 2025
Berdasarkan Pilar

Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Pilar				Kategori
	Infrastruktur dan Ekosistem	Keterampilan Digital	Pemberdayaan	Pekerjaan	
41,34	46,76	54,26	28,16	36,30	Cukup

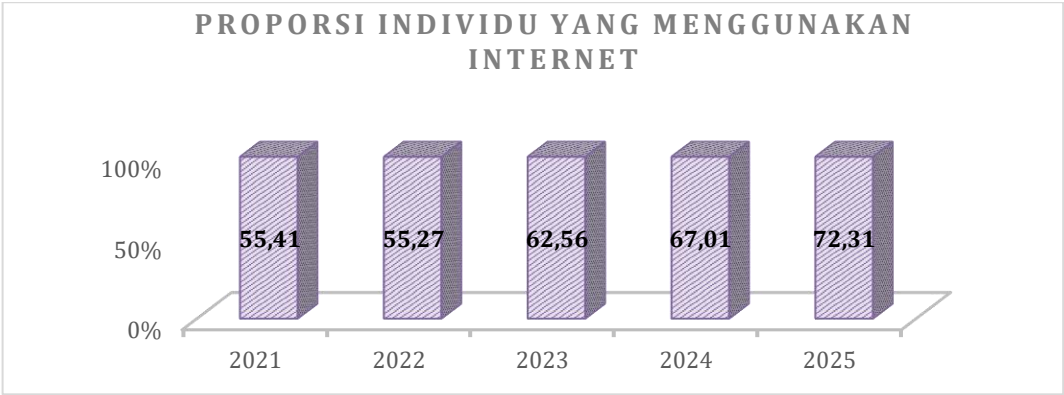
Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Berdasarkan data di atas, nilai IMDI Kabupaten Luwu mengalami peningkatan yaitu dari 18,83 pada tahun 2022 menjadi 42,67 pada tahun 2024 dan Kembali menurun d tahun 2025 41.34 akan tetapi masi berada pada kategori “Cukup”. Pilar Pemberdayaan dan Pekerjaan menjadi pilar yang memiliki nilai paling rendah. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital untuk aktivitas digital yang produktif baik sebagai pengguna ataupun penyedia serta masih kurangnya adopsi teknologi digital pada industri dan kebutuhan keterampilan digital sebagian besar industri masih di level dasar (*basic*).

f. Proporsi Individu yang Menggunakan Internet

Proporsi Individu yang menggunakan internet merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah persentase penduduk yang mengakses dan menggunakan internet. Indikator ini memungkinkan untuk memahami perkembangan digitalisasi suatu daerah. Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang dilakukan pengukuran terkait jumlah penggunaan internet oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu. Berikut grafik Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025:

Grafik 2.93.
Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2026.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa proporsi individu yang menggunakan internet memiliki tren yang meningkat. Data tahun 2021 tercatat 55,41 persen penduduk Kabupaten Luwu mengakses internet kemudian meningkat menjadi 72,31 persen pada tahun 2025. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup baik, namun data diatas menunjukkan masih ada 27.69 persen masyarakat yang belum mengakses internet sehingga kedepan rencana pembangunan diarahkan untuk melakukan perluasan jangkauan internet secara merata sampai ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Luwu.

Pemerataan akses internet di wilayah kabupaten Luwu merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Akses internet yang merata memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, akses internet juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah terpencil, seperti melalui e-commerce dan pariwisata digital. Dengan demikian, pemerataan akses internet dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh cakupan wilayah Kabupaten Luwu.

2.3.5 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

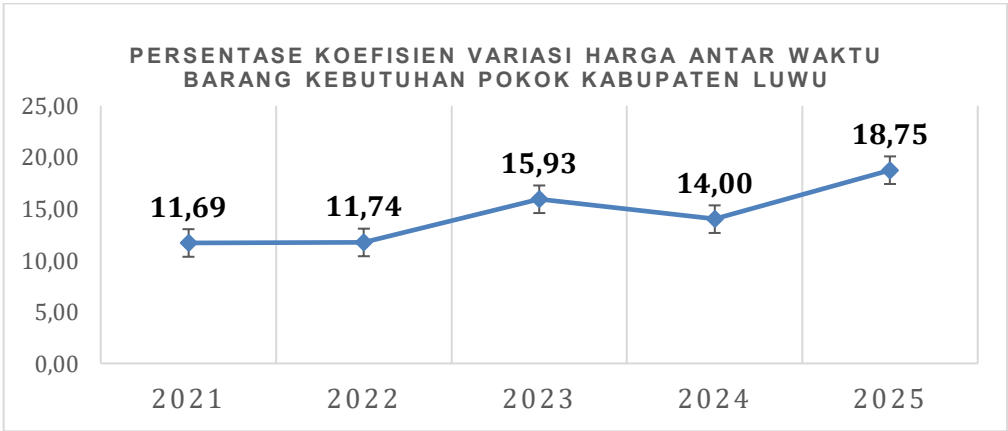
Integrasi ekonomi domestik dan global adalah pengaturan antar negara yang mencakup pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan dan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Integrasi ekonomi domestik dan global yaitu proses penggabungan ekonomi

suatu Negara dengan ekonomi global sehingga terjadi peningkatan perdagangan, investasi dan kerja sama ekonomi antar Negara. integrasi ekonomi di Kabupaten Luwu dapat digambarkan dalam beberapa indikator sebagai berikut.

a. **Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok**

Koefisien variasi harga antar waktu kebutuhan pokok adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Secara umum, koefisien variasi harga sebesar $\leq 5\%$ dianggap baik, sedangkan koefisien variasi harga sebesar $\geq 10\%$ dianggap buruk. Berikut ini data persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2025.

Grafik 2.94.
Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Luwu, 2026.

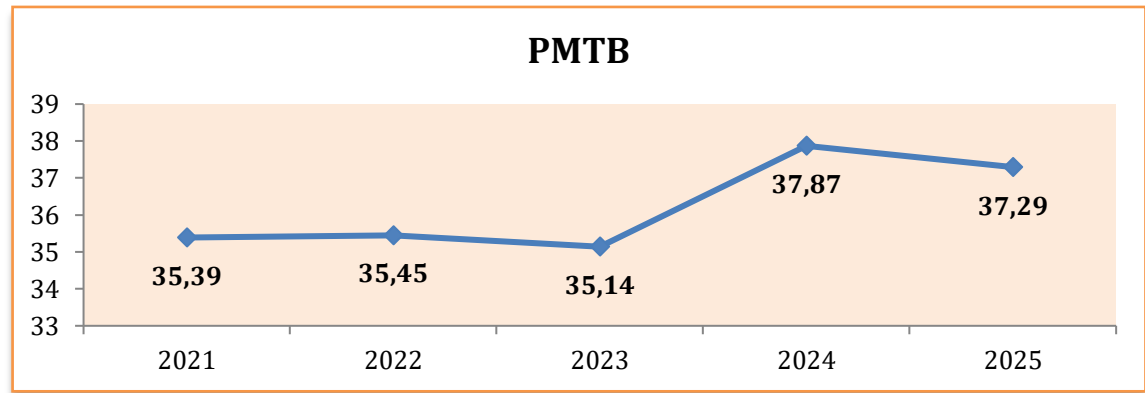
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat selama tahun 2020 hingga tahun 2024 koefisien variasi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Luwu berada di atas 10% dan memiliki tren yang

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan dalam keadaan yang tidak stabil yang berarti dalam satu tahun terjadi perubahan harga kebutuhan pokok yang cukup drastis.

b. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. PMTB memiliki kontribusi yang relatif besar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu. Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2025 berfluktuasi. Pada tahun 2021 sebesar 35,39 turun pada tahun 2023 menjadi 35,14, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 37,87 persen dan Kembali menurun di tahun 2025 sebesar 37,29. Persentase Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.95.
PMTB Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

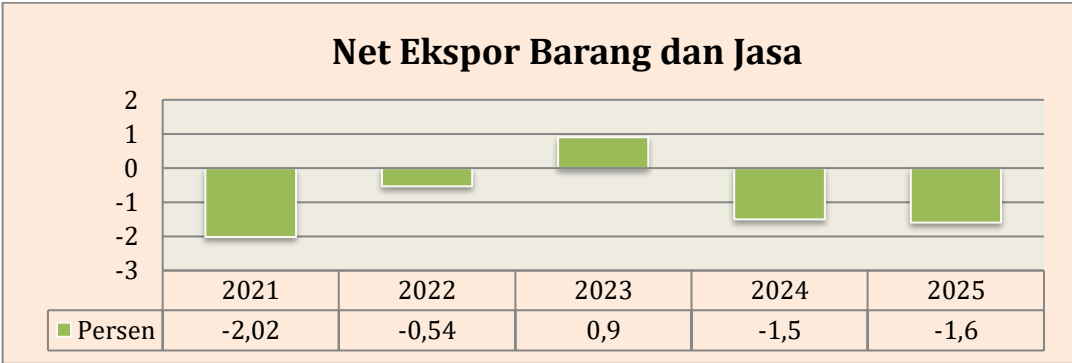


Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2026.

c. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor merupakan selisih dari ekspor dikurangi dengan impor. Net ekspor bernilai positif manakala ekspor lebih besar daripada impor dan net ekspor bernilai negatif manakala impor lebih besar daripada ekspor. Berikut ini data net ekspor barang dan jasa Kabupaten Luwu tahun 2021-2025.

Grafik 2.96.
Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2022 net ekspor barang dan jasa Kabupaten Luwu selalu bernilai negatif yang berarti impor lebih besar daripada ekspor. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan net ekspor menjadi 0,91%. Peningkatan tersebut memberikan indikasi yang baik, dimana ekspor lebih besar dibandingkan impor. Hal ini juga menggambarkan bahwa perekonomian daerah mengalami surplus. Namun di tahun 2024-2025 kembali mengalami penurunan sebesar -1,5 dan -1,60.

2.3.6 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Pengembangan wilayah perkotaan yang maju harus beriringan dengan pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan. Konsep kota sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju harus dipadukan dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Hal ini berarti kota harus menyediakan akses yang adil terhadap layanan publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi bagi seluruh warganya, tanpa mengesampingkan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penerapan teknologi hijau menjadi kunci keberhasilannya. Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus diarahkan pada kemandirian ekonomi dan sosial. Hal ini dapat dicapai melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan. Integrasi antara perkotaan dan perdesaan sangat penting, di mana kota dapat berfungsi sebagai pusat layanan dan

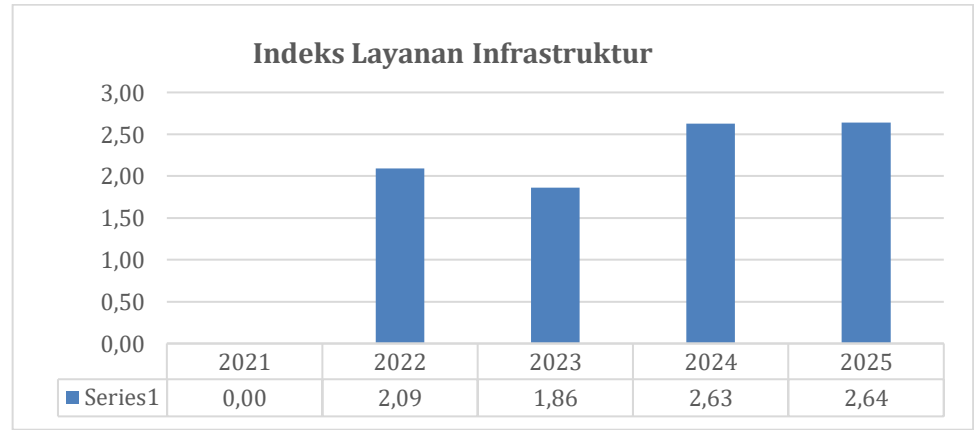
pasar bagi produk-produk dari desa, sementara desa dapat menyediakan ruang terbuka hijau dan sumber daya alam yang mendukung keberlanjutan kota. Dengan demikian, pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan akan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Untuk merencanakan konsep perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten Luwu dalam lima tahun kedepan, perlu melakukan peninjauan terhadap gambaran capaian indikator kinerja kabupaten luwu selama lima tahun terakhir. Adapun indikator yang dijadikan acuan dalam perencanaan penataan kota dan pedesaan yakni Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri.

a. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah. Berdasarkan pendekatan teori sistem, batasan kriteria efektif dalam pengukuran pembangunan tiap jenis infrastruktur yakni: ketersediaan infrastruktur, fungsi infrastruktur, kondisi infrastruktur, manfaat infrastruktur, mutu dan kualitas infrastruktur. Indikator ini merupakan ukuran yang penting untuk melihat sejauh mana pemerintah dapat menyediakan infrastruktur yang memiliki nilai kualitas yang tinggi serta memiliki kriteria andal yang baik.

Grafik 2.97.
Indeks Layanan Infrastruktur Kab. Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : BRIN 2026.

Pengukuran Indeks ini baru dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga capaian tahun 2021 menjadi tidak terukur atau nol. Perolehan nilai pengukuran Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu dalam Lima tahun terakhir secara umum menunjukkan adanya performa yang fluktuatif. Pada tahun 2022 layanan infrastruktur kabupaten Luwu berada pada skor 2,09 dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dimana skornya meningkat menjadi 2,64. Capaian nilai tersebut diukur berdasarkan beberapa indikator, diantaranya Pemenuhan SPM Jalan, Kualitas Infrastruktur Jalan, Layanan Infrastruktur Kereta api, Layanan Infrastruktur Bandara, Layanan Infrastruktur Pelabuhan, Rasio Elektrifikasi, susut energi listrik, penyediaan Akses Air Minum Layak dan Tingkat kehilangan Air.

Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Luwu merupakan kabupaten yang Agraris dimana sebagian besar pendapatan masyarakat bertumpuh pada kegiatan pertanian perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur kedepan akan memberikan porsi yang optimal untuk mengangkat daya pada sektor-sektor unggulan daerah tersebut. Konektifitas antar pusat kegiatan masyarakat khususnya jalan jalan antar koneksi kecamatan, jalan Tani dan jalan Perikanan, Infrastruktur Pertanian, Pengadaan Fasilitas Pengolahan hasil bumi, pusat niaga, akses air bersih, Infrastruktur kesehatan, Infrastruktur Pendidikan, jaringan internet menjadi beberapa agenda utama Pemerintah Kabupaten Luwu dalam kurun lima tahun kedepan.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang berkualitas, pencapaian target Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan. Indikator ini menggambarkan hunian yang memenuhi standar minimal kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Di dalam indikator tersebut terkandung empat komponen kriteria yang menjadi barometer pembentuk. Pertama, ketahanan bangunan memastikan struktur rumah mampu melindungi penghuninya dari ancaman bencana alam dan kondisi cuaca ekstrem, serta menjamin keamanan jangka panjang tanpa risiko keruntuhan. Kedua, kecukupan luas menekankan

pentingnya ruang yang memadai bagi setiap anggota keluarga, mencegah kepadatan berlebihan yang dapat memicu masalah kesehatan, privasi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketiga akses air minum yang layak Akses air minum layak berarti setiap rumah tangga memiliki ketersediaan air bersih yang aman untuk dikonsumsi, mudah diakses, dan terjangkau, sehingga meminimalkan risiko penyakit bawaan air dan mendukung praktik kebersihan pribadi dan yang keempat yaitu akses sanitasi layak menjamin ketersediaan fasilitas jamban yang higienis dan sistem pembuangan limbah yang memadai. Komponen ini krusial untuk mencegah penyebaran penyakit menular, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara kolektif, membentuk fondasi hunian yang sehat. Kurangnya akses terhadap toilet yang bersih dan aman, serta sistem pengelolaan limbah yang tidak efektif, dapat memicu penyebaran penyakit menular seperti diare dan kolera, terutama di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur sanitasi, edukasi publik tentang praktik higiene, dan kebijakan yang inklusif merupakan langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua.

Tabel 2.38.
Capaian Akses Rumah Layak Huni menurut Komponen
Kelayakan Tahun 2025

Kab/kota	Rumah Layak Huni	Ketahanan Bangunan	Kecukupan Luas	Air Minum Layak	Sanitasi Layak
Luwu	80,61	97,58	97,7	87,33	94,26
Palopo	85.06	97,59	92,4	95,82	96,52
Wajo	85,86	98,43	97,66	93,01	95,66
Luwu Utara	84,96	97,09	97,75	91,81	95,66
Enrekang	79,79	97,42	92,43	88,28	97,1

Sumber: BPS 2026.

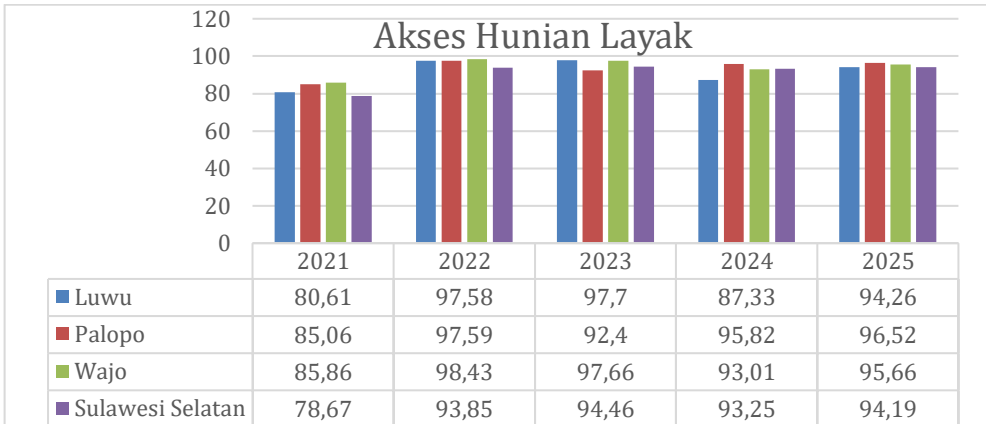
Data pencatatan capaian rumah layak huni menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh kabupaten Luwu berada pada urutan kedua terendah jika dibandingkan dengan kabupaten yang berbatasan di sekitarnya. Dari empat aspek kelayakan huni, dari aspek Ketahan Bangunan Luwu berada di posisi ketiga setelah wajo dan palopo. Dari Aspek Kecukupan Luas menunjukkan Luwu unggul

dari Palopo, Wajo, Luwu Utara dan Enrekang. Dilihat dari aspek Air Minum, Kabupaten Luwu berpredikat paling rendah dan dari aspek Sanitasi Layak Luwu Juga memiliki nilai yang paling rendah dari Kabupaten di sekitarnya. Melihat hasil penilaian kelayakan huni di atas, kabupaten Luwu perlu untuk melakukan peningkatan kinerja untuk program rumah layak huni.

Pemerintah daerah harus memulai dengan melakukan pendataan komprehensif untuk mengidentifikasi rumah tangga yang belum memenuhi kriteria kelayakan pada keempat komponen tersebut. Berdasarkan data ini, program rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat diintensifkan, didukung dengan penyediaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) atau milik (Rusunami) di perkotaan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan dan memenuhi kebutuhan kecukupan luas. Penegakan regulasi dan standar bangunan untuk memastikan setiap pembangunan hunian baru memenuhi kriteria kelayakan sejak awal.

Di sisi lain, peningkatan akses air minum layak dan sanitasi layak menuntut investasi signifikan dalam pengembangan infrastruktur. Perluasan jaringan perpipaan air bersih, pembangunan instalasi pengolahan air minum, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat atau komunal yang efektif harus menjadi prioritas. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air bersih dan praktik sanitasi yang benar juga tak kalah penting. Kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mencapai target indikator ini, demi terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Grafik 2.98.
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Luwu,
Wilayah Sekitar dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2026.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak di seluruh kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan. Secara umum rumah tangga yang dapat mengakses hunian yang layak di kabupaten Luwu cenderung mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan Kota, kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Wajo, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan terlihat capaian Kabupaten Luwu Masih berada dibawah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan capaian ini agar masyarakat kabupaten Luwu dapat secara menyeluruh memperoleh akses hunian yang layak.

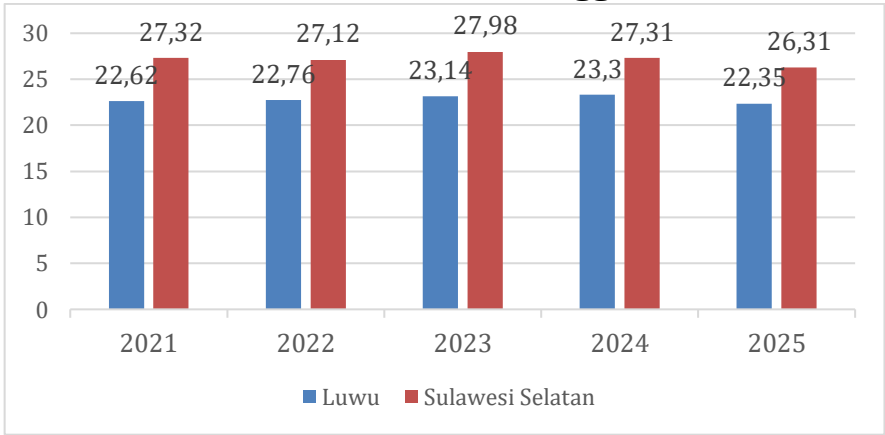
Akses terhadap hunian yang layak sangat erat kaitannya dengan faktor keterjangkauan secara ekonomi oleh masyarakat. Untuk memperoleh hunia yang layak saat ini perlu mengeluarkan dana yang cukup besar yang kemungkinan agak sulit untuk dijangkau. Perlu adanya upaya pemerintah dalam pemberian bantuan kepada masyarakat untuk meringankan pengeluaran untuk memperoleh hunian yang layak

Akses terhadap hunian yang layak tidak dapat dipisahkan dari faktor keterjangkauan secara ekonomi bagi masyarakat. Biaya untuk memperoleh hunian yang memenuhi standar kelayakan seringkali memerlukan pengeluaran dana yang lebih besar. Hal tersebut menjadi batasan yang menimbulkan tantangan besar bagi mayoritas lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah. Kesenjangan antara harga properti yang terus meningkat dengan daya

beli masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan impian memiliki rumah yang aman dan nyaman. Tanpa intervensi yang optimal dari pemerintah, kondisi dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peran pemerintah menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan keterjangkauan ini. Diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah untuk memberikan bantuan yang meringankan beban finansial masyarakat dalam mengakses hunian layak. Bantuan ini dapat berbentuk beragam, mulai dari skema subsidi bunga kredit perumahan, penyediaan lahan yang terjangkau untuk pembangunan perumahan bersubsidi, program bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah swadaya, hingga fasilitasi kepemilikan melalui skema sewa-beli atau rumah susun sederhana. Dengan dukungan kebijakan dan program yang tepat sasaran, pemerintah dapat secara signifikan membantu masyarakat mewujudkan hak dasar mereka atas hunian yang layak, sehingga berdampak positif pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Grafik 2.99.
Data capaian Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2026.

Meskipun pada data persentase pengeluaran perkapita sebulan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga di kabupaten Luwu masih di bawah dari capaian provinsi Sulawesi Selatan, namun proporsi tersebut masih relatif tinggi. Pemerintah perlu hadir untuk memberikan stimulan yang lebih proporsional seperti bantuan listrik, air, dan kebersihan hunian sebagai upaya yang konkret. Dengan menurunkan pengeluaran perkapita untuk kebutuhan perumahan

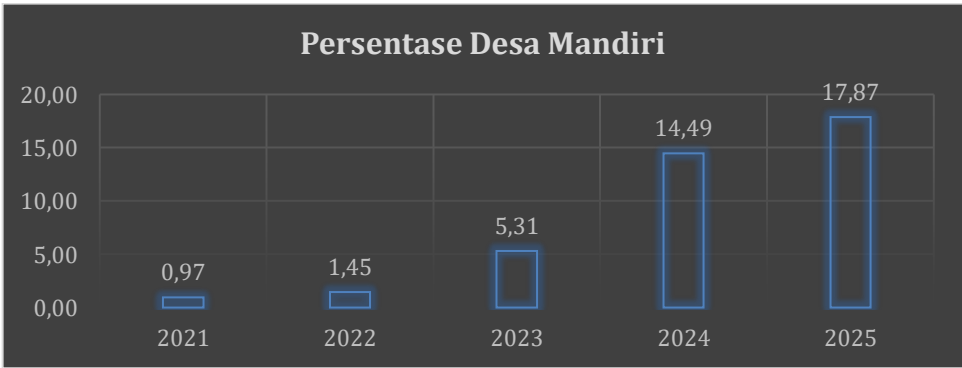
untuk memberikan porsi pengeluaran yang sifatnya produktif seperti untuk membiayai permodalan untuk usaha dan investasi lainnya maka diharapkan derajat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.

c. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan salah satu predikat/Status dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam Peraturan Kementerian Desa nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, disebutkan bahwa Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengukuran ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melakukan kinerja dalam upaya mengentaskan desa-desa yang masih masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Persentase status desa mandiri kabupaten Luwu pada tahun 2025 tercatat 17.87 persen atau 37 desa dari 207 desa. Berdasarkan data pencatatan dari dinas DPMD kabupaten Luwu dari tahun 2021 sampai tahun 2025, terlihat adanya peningkatan jumlah desa yang memperoleh status Desa Mandiri sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.100.
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Data Perencanaan Dinas DPMD Kab Luwu tahun 2026.

Desa mandiri di kabupaten Luwu terus meningkat jumlahnya. Keberhasilan tersebut mengindikasikan adanya pengelolaan administrasi yang baik oleh pemerintah desa dan adanya dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Kolaborasi ini diharapkan terus

ditingkatkan demi mencapai kesejahteraan masyarakat luwu. Kerja sama yang serius akan terus ditingkatkan dengan adanya program-program yang tujuannya memberikan penguatan kepada pemerintah desa untuk menuntaskan permasalahan yang ada di desa terutama perogram yang menjadi prioritas nasional dan kabupaten seperti penurunan stunting, anak tidak sekolah dan lainnya.

Pencapaian derajat desa mandiri ditinjau berdasarkan beberapa aspek. Aspek ketahanan sosial, aspek ketahanan ekonomi dan aspek ketahanan ekologi/lingkungan menjadi rangkaian komposit yang harus dikembangkan untuk memaksimalkan potensi desa itu sendiri. Kemandirian suatu desa dapat dilihat dari cara desa memanfaatkan potensi yang ada melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat perekonomiannya. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mengaktifkan badan usaha milik desa. Badan usaha yang dimiliki oleh desa, baik seluruhnya maupun sebagian besar modalnya, dan didirikan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui badan usaha ini, bantuan pemodal dapat diberikan untuk usaha yang akan dijalankan oleh masyarakat. Namun demikian, BUMDes harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi yang baik harus dilakukan agar badan ini dapat berjalan dengan baik.

Pemeringkatan BUMDes dan BUMDes Bersama yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui evaluasi kinerja dan potensi badan usaha milik desa. Penilaian mencakup beberapa aspek yakni aspek kelembagaan, aspek manajemen, aspek usaha dan unit usaha, aspek kemitraan, aspek aset dan permodalan, aspek administrasi laporan Keuangan dan akuntabilitas, aspek keuntungan dan mafaat bagi desan dan masyarakat. Bagi BUMDes yang berkinerja baik, pemeringkatan ini membuka peluang untuk mendapatkan penghargaan, pendampingan, dan akses pendanaan, sehingga mendorong percepatan pengembangan usaha desa. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong

persaingan sehat antardesa dalam mengelola BUMDes secara profesional dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kriteria penilaian yang komprehensif, pemeringkatan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, tetapi juga sebagai panduan pengembangan bagi BUMDes untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing. Bagi desa-desa berprestasi, program ini memberikan insentif berupa penghargaan, pendampingan teknis, dan akses pendanaan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui mekanisme ini, Kemendesa PDTT berupaya menciptakan ekosistem BUMDes yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemeringkatan BUMDes

bukan sekadar kompetisi, melainkan langkah nyata menuju kemandirian ekonomi desa. Berikut Pemeringkatan BUMDes di Kabupaten Luwu pada tahun 2025.

Tabel 2.39.
Pemeringkatan BUMDes Kabupaten Luwu Tahun 2025

No.	Kecamatan	Pemeringkatan			
		Berkembang	Pemula	Perintis	Maju
1	Bajo	4	6	0	1
2	Bajo Barat	4	1	2	0
3	Basse Sangtempe	1	0	11	0
4	Basse Sangtempe Utara	0	0	12	0
5	Belopa	2	0	3	0
6	Belopa Utara	6	0	0	0
7	Bua	9	4	0	0
8	Bua Ponrang	3	2	2	0
9	Kamanre	2	2	3	0
10	Lamasi	9	0	0	0
11	Lamasi Timur	4	1	4	0
12	Larompong	2	7	3	0
13	Larompong Selatan	2	2	5	0
14	Latimojong	2	4	6	0
15	Ponrang	0	0	8	0
16	Ponrang Selatan	1	6	4	0
17	Suli	4	5	3	0

No.	Kecamatan	Pemeringkatan			
		Berkembang	Pemula	Perintis	Maju
18	Suli Barat	4	1	2	0
19	Walenrang	0	0	8	0
20	Walenrang Barat	2	0	4	0
21	Walenrang Timur	2	2	5	0
22	Walenrang Utara	4	1	4	0

Sumber : DPMD Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

Berdasarkan data pemeringkatan BUMDes dikabupaten Luwu tahun 2025, terlihat bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas pengelolaan organisasi. Pemerintah Kabupaten Luwu perlu meningkatkan fasilitasi dalam rangka pembinaan BUMDes sehingga organisasi tingkat desa ini dapat memberikan manfaat yang nyata untuk meningkatkan kemandirian desa.

d. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Terhadap Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Luwu terhadap Provinsi masih rendah walaupun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 Kabupaten Luwu hanya menopang perekonomian Sulawesi Selatan sebesar 3,27 persen meningkat menjadi 3,29 pada tahun 2024, mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 3,28 persen. Kontribusi PDRB kabupaten luwu terhadap provinsi lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.101.
Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu terhadap
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025



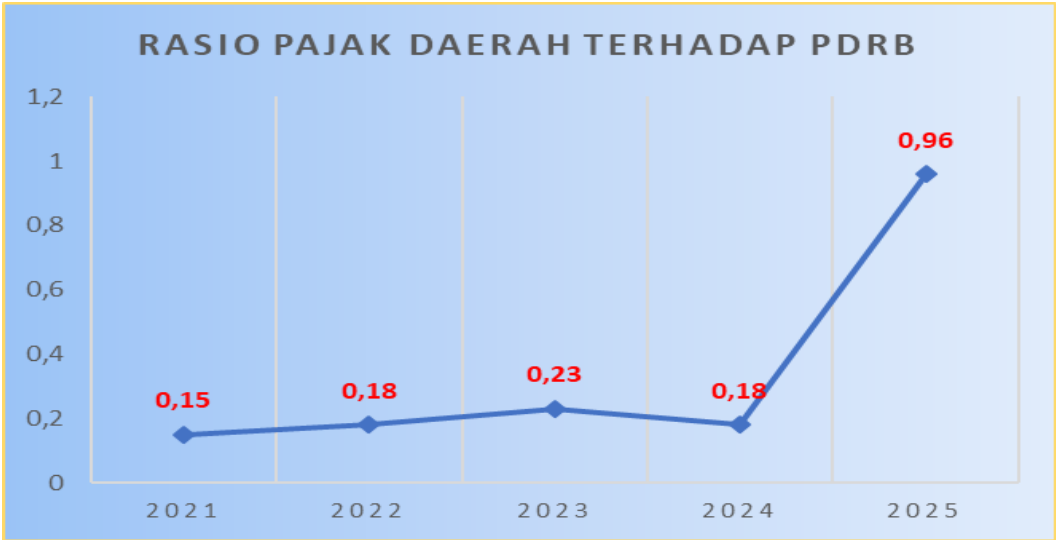
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2026.

2.3.7 STABILITAS EKONOMI MAKRO

a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat. Pemerintah daerah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mengatur dan mengumpulkan penerimaan sendiri, khususnya dalam hal perpajakan yang dapat memperkuat kapasitas fiskalnya. Rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Luwu pada tahun 2021 berada pada level 0,15 naik pada tahun 2023 menjadi 0,23 persen. Namun pada tahun 2024 turun menjadi 0,18 persen dan kembali mengalami peningkatan sebesar 0.96 persen di tahun 2025. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.102.
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Luwu
Tahun 20221-2025

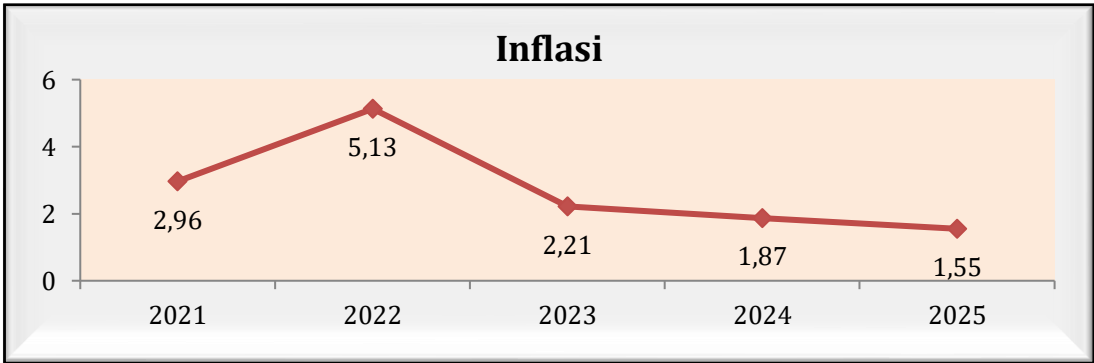


Sumber : Bapenda Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

b. Tingkat Inflasi Gabungan

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi Kabupaten Luwu berdasarkan IHK Kota Palopo. Nilai inflasi zona Kota Palopo lima tahun terakhir (2021-2025) berfluktuasi, terendah pada tahun 2025 sebesar 1,55 dan tertinggi di tahun 2022 sebesar 5,13. Perkembangan laju inflasi IHK Palopo dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.103.
Inflasi Kabupten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

c. Pertumbuhan Investasi Daerah

Pertumbuhan investasi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur dinamika perekonomian suatu daerah. Investasi yang masuk ke suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Berikut ini data pertumbuhan investasi daerah di Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2025.

Tabel 2.40.
Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Realisasi	336.613.519.	1.876.267.7	2.570.604.53		
Investasi (Rp)	167	03.941	1.514	1.290.283.00 0.000	1.528.168.641. 214
Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	-5,88	457,40	37,01	-50	118

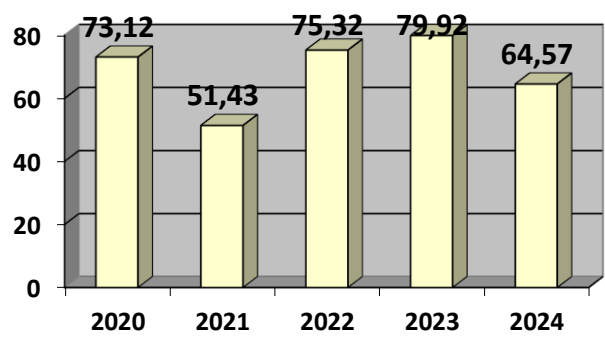
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2026.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu bahwa pertumbuhan investasi Kabupaten Luwu selama tahun 2021 hingga tahun 2025 sangat fluktuatif. Dimana pada tahun 2021 pertumbuhan investasi bernilai negatif yaitu -5,88 kemudian meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 457,40% dengan nilai realisasi investasi sebesar 1,87 triliun rupiah. Pada tahun 2023 pertumbuhan investasi di Kabupaten Luwu meningkat sebesar 37,01% dengan nilai realisasi investasi sebesar 2,57 triliun rupiah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -50% dengan nilai investasi sebesar 1,29 triliun dan kembali meningkat di tahun 2025 menjadi 118 dengan nilai realisasi 1,52 triliun rupiah.

d. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks pengelolaan keuangan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan mengukur berbagai aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sebagai gambaran seberapa baik pengelolaan anggaran daerah. Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.104.
IPKD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



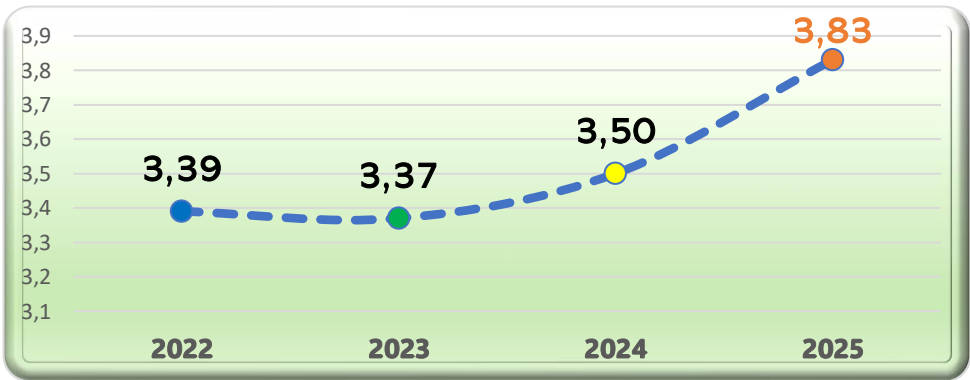
Sumber : SK Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2025.

Pada grafik diatas menunjukan nilai indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu tahun 2020 sebesar 73,12, mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 51,43, kemudian meningkat di tahun 2022 hingga 2023 sebesar 75,32 dan 79,92 dan kembali menurun di tahun 2024 sebesar 64.57 (perlu perbaikan) atau nilai B.

e. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks ini terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10. Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Berikut data IKAD Kabupaten Luwu tahun 2022-2025.

Grafik 2.105.
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2025



Sumber : Bappenas, 2026.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian IKAD Kabupaten Luwu selama empat tahun terakhir masih tergolong rendah yaitu berkisar di angka 3 poin. Dimana pada tahun 2022 nilai IKAD sebesar 3,39 poin kemudian menurun di tahun 2023 menjadi 3,37 poin. Pada tahun 2024-2025 kembali meningkat menjadi 3,83 poin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat akses keuangan masyarakat di Kabupaten Luwu semakin membaik namun, masih tergolong rendah yang disebabkan beberapa hal seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan masyarakat, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau terutama pada daerah terpencil, dan kualitas penggunaan produk/layanan keuangan yang masih rendah.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum merupakan bentuk kebijakan atau program layanan publik yang diberikan oleh satu pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan dasar, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Aspek pelayanan umum digambarkan dalam: (1) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif; (2) hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial; (3) ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan; dan (4) kinerja setiap urusan pemerintah daerah, yang tercerminkan dalam pencapaian indikator – indikatornya sebagai berikut:

2.4.1.TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN INOVATIF

Perbaikan Penyelenggaraan pemerintahan harus di topang dengan regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inovatif. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif dan inklusif. Hal ini dilakukan untuk dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai

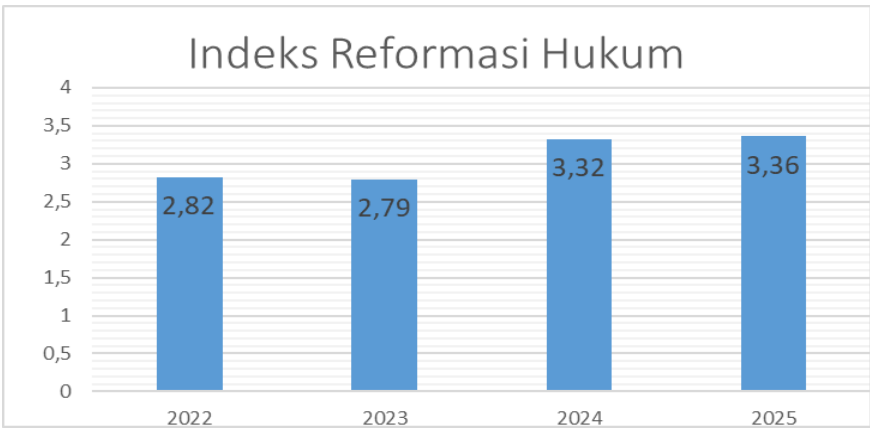
dengan aturan hukum yang berlaku dan juga mampu menyesuaikan dengan tuntutan zaman saat ini dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kehandalan dalam pelayanan pemerintahan.

a. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum (IRH) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya reformasi di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan pemerintah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pengukuran indeks reformasi hukum ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin tinggi nilai indeks reformasi hukum maka semakin berhasil pelaksanaan komponen reformasi hukum.

Data indeks reformasi hukum yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memperlihatkan jika nilai indeks reformasi hukum di Kabupaten Luwu tahun 2025 98.76 % (kategori AA) bertahan pada posisi tahun 2024 98,08 (kategori AA) dengan predikat sangat baik. Nilai ini meningkatkan signifikan dari tahun sebelumnya, dimana nilai indeks reformasi hukum tahun 2023 adalah 55,3 (kategori CC) dengan predikat cukup. Hal ini mengindikasikan jika upaya upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel sudah sangat baik. Hasil ini menjadi tantangan kedepannya untuk dapat dipertahankan bahkan di tingkatkan sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih baik. Adapun data capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu dapat di lihat pada garik di bawah ini :

Grafik 2.106.
Indeks Reformasi Hukum Kab. Luwu Tahun 2022 - 2025



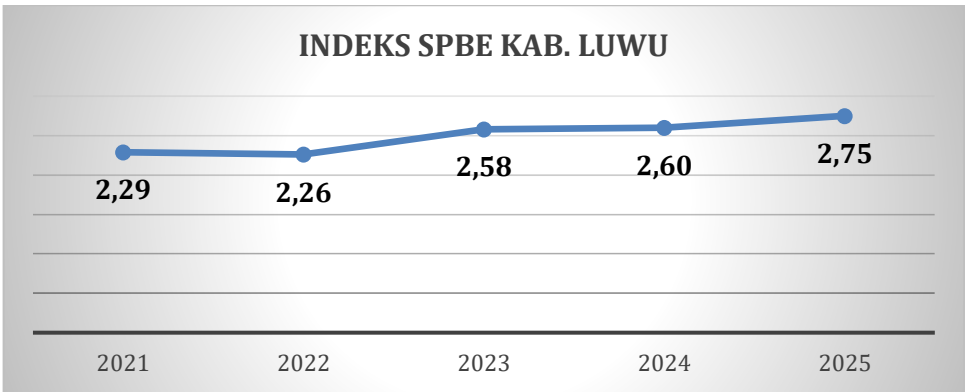
Sumber : Kementerian Hukum dan HAM, 2026.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan saat ini, yang penerapannya bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah layanan pemerintahan. Indeks pemerintahan berbasis elektronik digunakan untuk mengukur sejauh mana negara atau daerah telah mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini merepresentasikan tingkat kematangan dan efektivitas implementasi E-Government yang mencakup penyediaan layanan publik secara digital, transparansi, partisipasi masyarakat, serta integrasi sistem pemerintahan.

Data nilai indeks SPBE Kabupaten Luwu dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.107.
**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025**



Sumber : Kementerian PAN RB, 2026.

Grafik diatas memperlihatkan jika indeks SPBE tahun 2025 2,76 dengan kategori baik meningkat dari tahun sebelumnya 2024 sebesar 2,60 poin hal ini menunjukkan jika sudah ada upaya peningkatan dalam pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Luwu meskipun belum maksimal sehingga peningkatannya belum cukup signifikan. Kedepannya Pelayanan berbasis digital ini harus terus di tingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efesien.

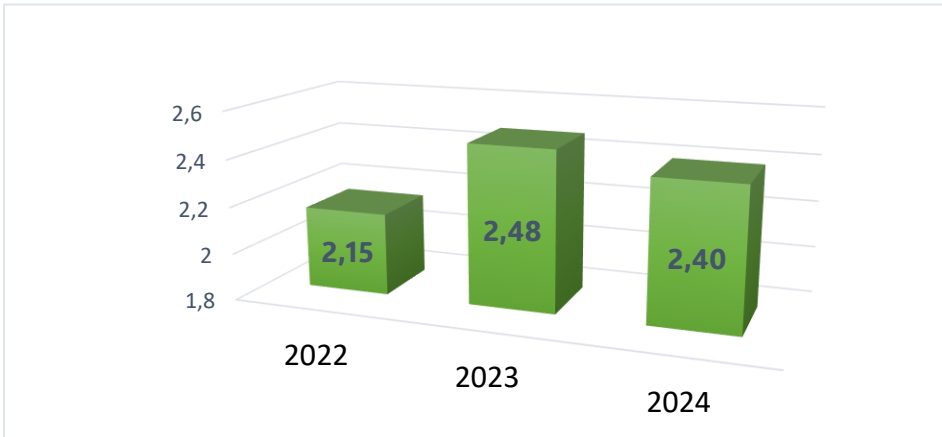
c. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan hal yang kerap mendapat perhatian dari pimpinan daerah karena ini menjadi gambaran awal dari penyelenggaraan pemerintah di suatu daerah. pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dalam rentang waktu tahun 2022-2024 menempatkan Kabupaten Luwu dalam kategori C (Cukup), dengan nilai skor indeks 2,15 di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 2,48 di tahun 2023, namun kemudian menurun menjadi 2,40 di tahun 2024. Nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Luwu yang masih berada dalam kategori C ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Luwu, karenanya upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua aspek harus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten di tahun-tahun mendatang agar nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Luwu meingkat menjadi kategori Baik. Adapun data indeks pelayanan publik Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.108.
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2024



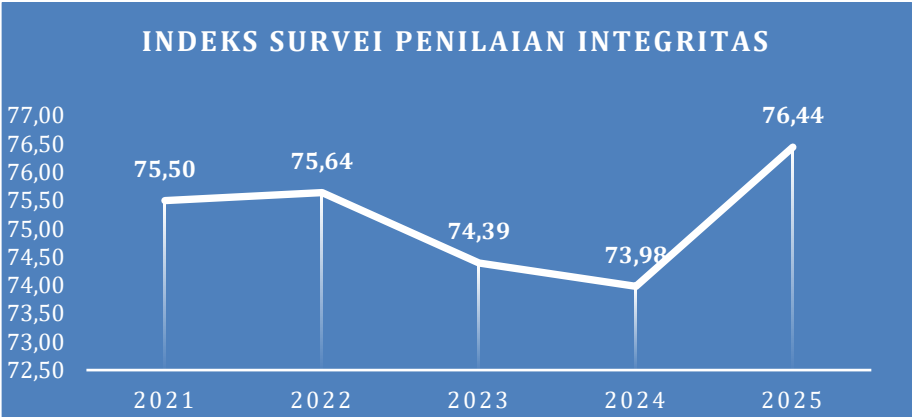
Sumber :Ombudsman RI, 2025.

d. Indeks Survei Penilaian Integritas

Pelayanan pemerintahan yang berintegritas adalah pelayanan yang dilakukan dengan jujur, adil dan bertanggung jawab tanpa adanya niat untuk melakukan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang berintegritas menjadi syarat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Indeks integritas nasional merupakan alat untuk mengukur atau menilai tingkat kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2025 Kabupaten luwu berada dalam kategori waspada dengan nilai indeks 76,44 poin. Nilai indeks ini mengalami peningkatan jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana di tahun 2024 nilai indeks SPI sebesar 73.98 poin, meskipun masih di kategori yang sama yakni waspada. Nilai Indeks SPI tahun 2025 yang menempatkan Kabupaten Luwu dalam kategori waspada ini menunjukkan jika upaya pencegahan korupsi yang di lakukan di Kabupaten Luwu masih sangat rendah. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari segenap stakeholder yang ada untuk menciptakan pememerintahan yang lebih bersih dan transparan. Adapun indeks penilaian integritas Kabupaten Luwu selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. Adapun indeks penilaian integritas Kabupaten Luwu selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.109.
Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026.

Penurunan nilai Indeks SPI terjadi di dua tahun terakhir seperti yang terlihat pada grafik di atas yaitu di tahun 2023 dan 2024 Namun di Tahun 2025 terjadi peningkatan nilai Indeks yaitu 76.44 poin merupakan nilai tertinggi selama survey SPI dilakukan di Kabupaten Luwu meskipun juga masih dalam kategori Waspada. Hal ini menunjukkan jika upaya pencegahan korupsi yang di lakukan di Kabupaten Luwu sudah mengalami peningkatan tetapi masi perlu upaya serius dari segenap stakeholder yang ada untuk menciptakan pengelolaan dan pelayanan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan dengan melakukan pengawasan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan integritas ASN dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

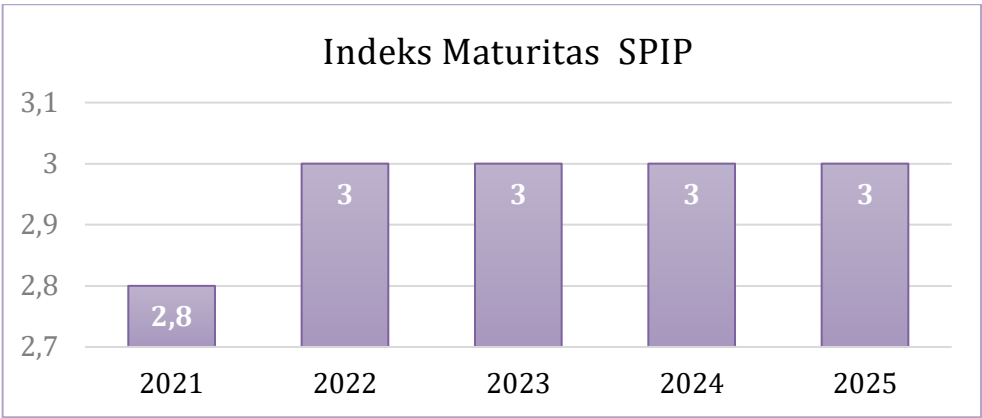
e. Indeks Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang dirancang untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Penilaian SPIP ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan model maturitas SPIP yang mengacu pada lima komponen utama yakni : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring pengendalian.

Indeks Maturitas SPIP ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPIP yang di klasifikasikan dengan level 0 – 5, semakin tinggi nilai indeks maturitas semakin

menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP di suatu Pemerintah Daerah. Adapun data Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu tahun 2021 – 2025 tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.110.
Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, 2026.

Rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seperti yang tersaji di grafik diatas memperlihatkan jika indeks maturitas SPIP Kabupaten Luwu dalam 4 tahun terkahir mencapai level 3 (terdefenisi). Hal ini mengindikasikan jika kualitas penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Luwu sudah baik, pencapaian ini tentunya di dukung oleh sistem pengendalian yang terstruktur dengan dokumentasi dan mekanisme pengukuran yang jelas. Kedepanya sistem yang sudah baik ini harus lebih dioptimalkan lagi agar level indeks maturitas SPIP Kabupaten Luwu dapat ditingkatkan menjadi level 4 (terkelola).

Indeks maturitas bukan hanya menjadi sekedar alat ukur tetapi menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih efektif dan bertingteritas. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dengan prinsip good governance, transparan dan bebas korupsi. Penetapan target peningkatan level maturitas SPIP diharapkan dapat meminimalkan resiko, meningkatkan akuntabilitas, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif.

f. Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK

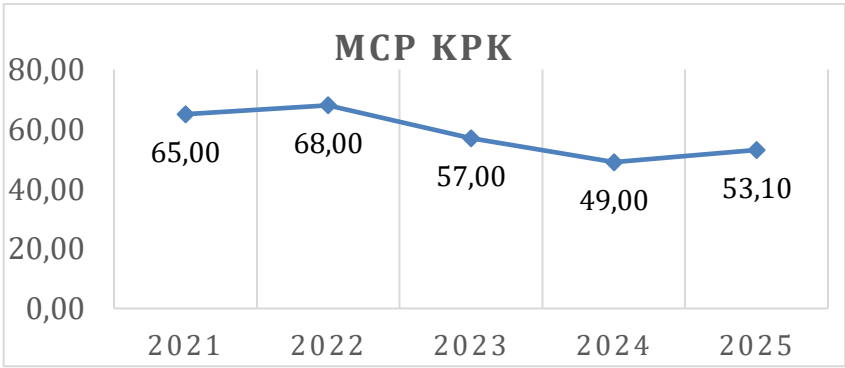
Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya untuk memastikan adanya regulasi dan sistem yang

mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan sistem *Monitoring Center For Prevention* (MCP) untuk memantau dan mengidentifikasi resiko korupsi di suatu pemerintah daerah.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK merupakan program monitoring capaian kinerja program, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK yang bertujuan untuk memantau titik-titik rawan korupsi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Ada delapan area intervensi MCP yang menjadi fokus yakni manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Skor MCP KPK merupakan tolak ukur untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pencegahan korupsi. Peningkatan skor MCP ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem pemerintahan. Skor MCP KPK Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.111.
MCP KPK Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026

Grafik diatas memperlihatkan jika terjadi peningkatan skor MCP KPK di tahun 2025 yakni 53,10 walaupun dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan yakni 57 di tahun 2023 dan menurun lagi menjadi 49 di tahun 2024. Terjadinya peningkatan MCP KPK di

tahun 2025 merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi serta memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Peningkatan skor MCP KPK di tahun 2025 merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam peningkatan efektivitas di delapan area intervensi utama dan meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan di tingkat opd serta membuat sistem pengawasan internal yang lebih baik.

Upaya intervensi delapan fokus utama ini dapat berupa : perencanaan dan penganggaran yang transparan, pengadaan barang dan jasa yang efisien, pelayanan publik prima, pengawasan apip yang efektif, manajemen ASN yang profesional, pengelolaan BMD yang tepat, optimalisasi pajak daerah, pembentukan tim asistensi dan verifikasi, kolaborasi dengan Kejaksaan dan KPK untuk pendampingan, pengawasan dan evaluasi berkala. Dengan upaya perbaikan pada delapan intervensi ini diharapkan dapat meningkatkan skor MCP KPK kedepannya sehingga Kabupaten Luwu dapat keluar dari kategori rentan dalam upaya pencegahan Korupsi.

g. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen kinerja yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk merencanakan, mengukur, melaporkan dan mempertanggung jawabkan capaian kinerja secara transparan, akuntabel dan terukur sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Penilaian sakip bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, mendorong kinerja yang efektif dan efisien, transparansi dan partisipasi publik, serta sebagai dasar dalam evaluasi kebijakan.

Peningkatan nilai sakip menjadi indikasi adanya komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, dan menjadi gambaran utuh perbaikan tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan akuntabilitas kinerja. Capaian nilai sakip Kabupaten Luwu sudah cukup baik, dimana dalam kurun waktu empat tahun terakhir Kabupaten meraih kategori baik (B) dalam penilaian sakip. Adapun nilai Sakip Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Tabel 2.41.
Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Tahun 2021 - 2025

Indikator	Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai SAKIP	Huruf/	60,08	60,88	60,88	62,18	62,55
Kabupaten	Angka	B	B	B	B	B

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Luwu, 2026.

Capaian nilai sakip Kabupaten Luwu seperti yang di sajikan pada grafik diatas memperlihatkan konsistensi Kabupaten Luwu yang selalu berada dalam kategori baik (B) dalam penilaian Sakip. hal ini menunjukkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Luwu sudah cukup baik, namum kedepanya masih diperlukan lagi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan komitmen dalam manajemen kinerja agar nilai sakip dapat ditingkatkan untuk menjadi kategori sangat baik (BB).

2.4.2. KETAATAN HUKUM, KETERTIBAN DAN KEAMANAN TANGGUH DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi subtansial merupakan elemen penting yang saling terkait dan harus dikuatkan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dengan stabilitas politik dan keamanan yang selalu kondusif. Ketika ketiga elemen ini terjaga maka pembangunan nasional dapat lebih cepat dilakukan karena dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga harmonisasi sosial antar warga negara sehingga pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Negara maju dan berdaulat hanya dapat di wujudkan jika ketiga elemen penting ini menjadi kuat. Hukum yang berkadilan dapat memastikan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Keamanan nasional yang tangguh menggambarkan kemampuan negara melindungi kedaulatan, keutuhan wilayahnya dan keamanan masyarakatnya dari segala bentuk ancaman, dan Demokrasi subtansial memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat

untuk berekpresi dan mengemukakan pendapat dan turut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

a. **Persentase Penegakan Perda**

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah indikator kinerja Satpol PP untuk mengukur sejauh mana Perda ditegakkan sesuai standar. Persentase ini dihitung dari perbandingan jumlah Perda yang berhasil diselesaikan penegakannya dengan jumlah pelanggaran. Pelaksanaan penegakan Perda di Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2025 telah mencapai 100 persen dengan jumlah pelanggaran Perda yang ditindak pada tahun 2025 sebanyak 18 kasus.

Tabel 2.42.
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Tahun 2021 - 2025

Indikator	Satuan	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu, 2026.

b. **Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan mengacu pada tingkat atau persentase keberhasilan penegakan Perda dan Perkada yang ditetapkan. Berdasarkan laporan pelaksanaan kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten sudah terlaksana secara maksimal, dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai tahun 2025, nilai persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Luwu adalah 100 persen. Hal ini mengindikasikan konsistensi dari OPD terkait dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, dan juga menggambarkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi Perda dan Perkada yang ditetapkan.

Tabel 2.43.
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Tahun 2021 - 2025

Indikator	Satuan	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu, 2026.

Kemampuan suatu daerah dalam penegakan Perda dan Perkada disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah sosialisasi Perda dan Perkada yang efektif, penegakan aturan hukum, keberadaan intitusi yang kuat dan terpercaya, Perda dan Perkada yang jelas dan dapat di terapkan, kerjasama antar stakholder terkait, serta kesadaran dari masyarakat dalam mematuhi perda dan perkada yang ditetapkan.

c. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Selesaikan

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kondisi kehidupan bermasyarakat yang teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, dan tertib. Untuk mewujudkan kondusifitas lingkungan di wilayah Kabupaten Luwu maka diperlukan usaha bersama dari seluruh stakeholder terkait dan juga seluruh elemen masyarakat.

Tabel 2.44.
Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Selesaikan
Tahun 2021 - 2025

Indikator	Satuan	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Selesaikan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu, 2026.

Kondisi Trantinbum di Kab. Luwu sudah sangat baik, dimana Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Satuan Polisi Pamong

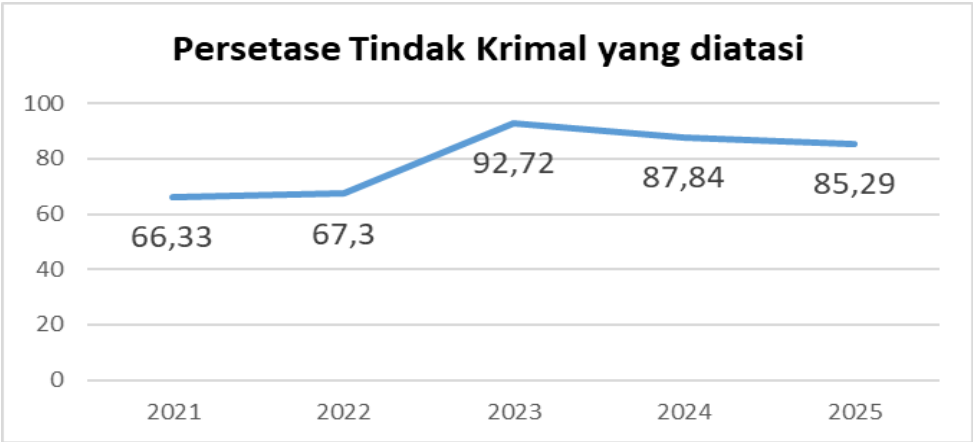
Praja mencapai skor sempurna yakni 100 persen dalam mencegah dan meredam gangguan Tratinbum di Kabupaten Luwu. Kedepannya kondisi ini tentu harus tetap dipertahankan dengan upaya deteksi dini segenap potensi gangguan tratinbum sehingga upaya pencegahan gangguan tratinbum dapat lebih cepat dilakukan.

d. Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani

Persentase tindak kriminal yang ditangani menunjukkan jumlah kejadian kriminal yang dilaporkan pada instansi yang berwenang, dan mendapat penanganan dan dapat teratasi. Rilis data tindak kriminal yang ditangani, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Luwu memperlihatkan adanya peningkatan signifikan dari persentase tindak kriminal yang diatasi, yang sebelumnya sebesar 67,3% pada tahun 2022 menjadi 92,72% di tahun 2023 namun kembali menurun menjadi 87,83% tahun 2024 dan 85,29% di tahun 2025. Hal ini memperlihatkan jika pada dasarnya kinerja dari instansi terkait sudah cukup baik. Namun perlu konsistensi dalam upaya penanganan tindak kriminal agar tidak terjadi penurunan. Keberhasilan penanganan kasus tindak kriminal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan sumber daya, sarana prasarana baik itu dalam hal jumlah personil kepolisian maupun ketersediaan peralatan investigasi dan peralatan pendukung lainnya, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan memberikan informasi terkait kasus yang ditangani.

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, persentase tindak kriminal yang ditangani cenderung meningkat. Penurunan hanya terjadi di tahun 2024 dengan nilai persentase sebesar 87,84 % setelah di tahun sebelumnya di tahun 2023 memperoleh nilai persentase sebesar 92,72 % yang merupakan nilai persentase tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. adapun data persentase tindak kriminal yang diatasi tahun 2021 -2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.112.
Persentase Tindak Kriminal Yang Diatasi
Tahun 2021-2025



Sumber : Kepolisian Resor Luwu Tahun 2026.

Penurunan nilai persentase di tahun 2025 sebesar 85.29 % seperti yang terlihat pada grafik diatas diharapkan tidak berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, namun sebaiknya kembali dapat ditingkatkan, untuk itu diperlukan upaya berupa peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat, sosialisasi terkait jenis dan pencegahan tindak kriminal, serta pelibatan masyarakat dalam memberikan informasi tindak kriminal yang terjadi wilayah masing-masing. Dengan komptensi SDM yang cukup dan di tunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana, serta didukung peran aktif masyarakat, maka diharapkan kondisi keamanan dapat lebih terjaga sehingga masyarakat dapat beraktiftitas dengan tenang dan nyaman.

e. Pesentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Isu kesetaraan gender menjadi konsen dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dimaksudkan agar kaum perempuan mengambil peran dalam jalannya pemerintahan dengan memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Dalam hal partisipasi politik, isu kesetaraan gender ini di akomodir dengan mensyaratkan tiap partai politik mengusung minimal 30% kaum perempuan sebagai caleg dalam pemilihan legislatif.

Besarnya partisipasi perempuan dalam politik dan besarnya keterwakilan suara Perempuan dalam pengambilan keputusan

tercerminkan dalam besarnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keterwakilan perempuan di Dewan DPRD merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat inklusivitas demokrasi di tingkat lokal.

Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2025 masih terdapat 4 orang perempuan dari 35 anggota DPRD Kabupaten Luwu, atau 11,4 % dari total anggota DPRD Kabupaten Luwu. Persentase perempuan tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 karena periode berlaku selama 5 tahun. namun pada dasarnya nilai ini masih tergolong rendah karena capaiannya yang masih kurang dari kuota 30 % untuk anggota DPRD perempuan. adapun data persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD di Kabupaten Luwu tahun 2021-2025 dapat lihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 2.113.
Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2026.

Grafik di atas memperlihatkan jika dalam rentang waktu lima tahun terakhir, persentase perempuan terpilih dari total anggota DPRD Kabupaten Luwu masih dibawah 30 %, hal mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam politik masih cukup rendah sehingga akan berpengaruh pada keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan terkhusus lagi terhadap isu-isu kesetaraan gender, perlindungan dan pemberdayaan kaum perempuan.

Kurangnya perempuan yang terpilih bisa disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya adalah faktor budaya patriarki di

masyarakat yang masih memandang persoalan politik merupakan dunia laki-laki sehingga pemilih cenderung lebih memilih calon laki – laki untuk menjadi anggota DPRD, rekrutmen dan kaderisasi partai pada kader perempuan yang belum berjalan dengan baik sehingga kader perempuan dengan kapasitas yang baik masih kurang sehingga kecenderungan calon legislatif perempuan yang didorong untuk maju dalam pemilihan legislatif terkadang bukan hadir dari kaderisasi partai dan seleksi yang ketat tapi hanya semata untuk memenuhi syarat pengajuan 30 % caleg perempuan.

Untuk itu kedepannya, pemerintah bersama dengan partai politik perlu berupaya upaya mendorong pendidikan politik bagi kaum perempuan dengan mengaktifkan organisasi-organisasi perempuan, melakukan pelatihan kepemimpinan khusus perempuan, sosialisasi terkait pentingnya keterwakilan perempuan di DPRD, pengembangan kapasitas dan pendampingan calon perempuan sehingga dengan itu diharapkan persentase perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD dapat meningkat.

f. PERDA yang merupakan Inisiatif DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki 3 fungsi utama, yang salah satunya adalah fungsi legislasi. Fungsi ini mencakup penyusunan dan pengajuan rancangan Peraturan Daerah baik itu inisiatif DPRD maupun usulan dari pihak eksekutif, dan melakukan pengesahaan Ranperda menjadi Perda. Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD merupakan peraturan yang digagas dan diajukan oleh anggota DPRD sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan di tingkat daerah. Berbeda dengan perda yang diusulkan oleh eksekutif (Pemerintah Daerah), Perda inisiatif ini mencerminkan aspirasi masyarakat yang di angkat melalui fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.

Jumlah perda inisiatif DPRD menjadi gambaran seberapa besar DPRD Kabupaten Luwu menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan Peraturan Daerah. Adapun jumlah perda inisiatif DPRD

Kabupaten Luwu yang di buat dalam rentang waktu tahun 2020 – 2024 tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.114.
Jumlah PERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan grafik di atas terlihat jika perda inisiatif DPRD yang dibuat dalam kurun 5 waktu terakhir masih cendrung fluktuatif, tahun 2022 merupakan tahun dengan jumlah Perda tertinggi dengan jumlah 4 perda, yang kemudian menurun di tiga tahun terkahir yakni 3 perda di tahun 2023, 2 Perda di tahun 2024 dan 2 di tahun 2025. hal ini dapat mengindentifikasian jika anggota DPRD belum memaksimalkan hak inisiatifnya dalam pembentukan perda, atautkah perda usulan dari pihak eksekutif sudah mengakomodir aspirasi masyarakat, yang menjadi indikasi positif jika pihak pemerintah sudah cukup baik dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

DPRD memiliki hak inisiatif dalam pembentukan Perda yang diperoleh dari aspirasi masyarakat. Kedepannya, DPRD Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengajukan lebih banyak Perda yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena dianggap lebih mengerti kondisi dan keinginan masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah Perda inisiatif DPRD maka bertambah pula aspirasi masyarakat yang diakomodir menjadi peraturan daerah yang nantinya akan menjadi payung hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan fungsinya dalam hal pembangunan, pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

g. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Partai Politik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi, keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik memiliki nilai yang strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemerintahan yang inklusif dan kebijakan yang responsif. Keterlibatan perempuan diharapkan dapat lebih mampu mengadvokasi isu-isu yang lebih dekat dengan kaum perempuan seperti perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan reproduksi, dll.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender dalam politik. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui berbagai regulasi, pendidikan politik, maupun dukungan partai politik, namun tantangannya masih tetap ada, yang salah satunya masih kuatnya budaya patriarki yang masih menganggap politik sebagai urusan laki-laki, sehingga perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, partai politik, masyarakat, dan perempuan sendiri untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan dalam politik. Adapun data persentase perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Luwu tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.115.
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025



Sumber : Badan DP3A Kabupaten Luwu, 2026.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase Perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Luwu dari tahun 2021 hingga tahun 2023 stagnan di angka 25,27%, namun meningkat menjadi 30 % di tahun di tahun 2024 dan 2025. Peningkatan ini

menjadi tanda positif bagi keterlibatan perempuan dalam partai politik dan mengindikasikan jika ruang ekspresi politik bagi kaum perempuan sudah cukup terbuka dan mengidentifikasikan jika masyarakat sudah mulai memberikan dukungan bagi perempuan yang hendak masuk dalam dunia politik. Dengan memiliki pengurus perempuan, maka partai politik sebagai lembaga penopang demokrasi akan lebih mudah dalam melaksanakan program-program yang terkait dengan perempuan baik berupa pelatihan kepemimpinan perempuan, pencegahan kekerasan perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

Keterlibatan perempuan sebagai pengurus partai politik bukan hanya tentang keadilan gender tetapi juga tentang kualitas demokrasi. Partai politik yang inklusif akan melahirkan kebijakan yang lebih adil dan kepemimpinan yang representatif. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari partai politik, pemerintah dan masyarakat dalam membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat berperan aktif dalam politik sehingga perempuan dapat lebih berdaya dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terutama pada hal-hal yang terkait langsung dengan kaum perempuan.

2.4.3.KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN DAYA SAING DAERAH TINGGI

Ketangguhan diplomasi adalah kemampuan suatu negara untuk secara adaptif merespon tantangan dalam hubungan internasionalnya sedang pertahanan berdaya gentar kawasan adalah kemampuan suatu negara untuk mencegah ancaman dan serangan dari pihak lain dengan menunjukkan kekuatan dan kesiapan yang memadai.

Diplomasi dan pertahanan harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional diberbagai bidang, dan tetap memelihara hubungan internasional yang konstruktif. Diplomasi yang kuat dan didukung oleh pertahanan yang tangguh akan meningkatkan posisi tawar yang tinggi dalam geopolitik dunia sehingga kita tidak hanya menjaga kedaulatan negara Indonesia, tetapi juga mampu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

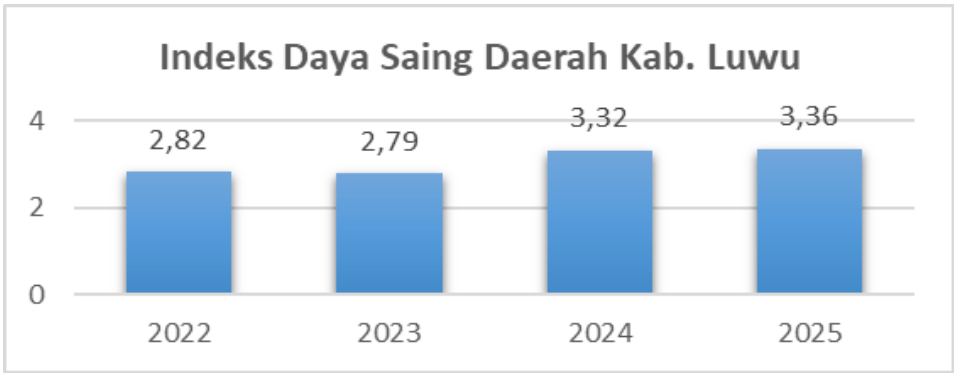
a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya, potensi dan peluang yang dimilikinya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indeks ini menjadi informasi yang digunakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan suatu daerah, dan menjadi acuan dalam menyusun program prioritas suatu daerah sehingga dapat dirumuskan konsep dan strategi pengembangan suatu daerah.

Daya saing suatu daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktifitas di tiga lini yakni : produktifitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong efesiensi, dan produktifitas yang di dorong oleh inovasi yang dituangkan dalam 4 komponen utama yang terdiri dari : lingkungan pendukung, SDM, Pasar, Ekosistem Inovasi dan dijabarkan dalam 12 pilar daya saing.

Pengukuran Indeks daya saing daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dimaksudkan untuk menyediakan data dasar yang akurat dengan mengukur produktifitas dan kemajuan daerah menggunakan kerangka global competitiveness indeks (GCI) dari word economic forum (WEF). Adapun data indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.116.
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2025



Sumber: BRIN, 2026.

Grafik di atas memperlihatkan jika Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu masih fluktuatif. Indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 2,82 di tahun 2022 menjadi 2,79 di tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 3,23 di tahun 2024 dan 3.36 tahun 2025.

Peningkatan indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu di tahun ini mengindikasikan jika Kabupaten Luwu sudah cukup mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saingnya meskipun belum cukup maksimal. Peningkatan ini tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan indeks daya daerah ini tentunya harus dapat dipertahankan bahkan di tingkatkan dengan melakukan intervensi pada aspek-aspek pendukung daya saing daerah sehingga Kabupaten Luwu dapat berkembang menjadi daerah yang lebih kompetitif dengan daerah lain.

b. Jumlah Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti

Dalam upaya memajukan pembangunan daerah di berbagai sektor, Pemerintah Kabupaten luwu telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta dan Universitas. Kerjasama daerah dengan berbagai pihak ini merupakan salah satu kunci penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potensi sumber daya, mengatasi permasalahan dan keterbatasan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten telah menjalin kerjasama di berbagai bidang diantaranya kesehatan, hukum, infrasturuktur, pengembangan desa/Pemerintahan, ekonomi, penanggulangan bencana, pengembangan SDM, pendidikan dan penelitian, pertanahan, ketahanan pangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program kegiatan yang nyata.

Adapun jumlah kerjasama daerah yang ditindaklanjuti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.45.
Jumlah Kerjasama Daerah Yang Ditindaklanjuti
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Kerjasama
1.	2021	3
2.	2022	3
3.	2023	37
4.	2024	6

No	Tahun	Jumlah Kerjasama
5.	2025	10

Sumber : Sekertariat Daerah Kab. Luwu 2026.

2.4.4. KINERJA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.4.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.4.1.1. Urusan Pendidikan

Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Luwu selama periode 2021–2025 secara umum menunjukkan capaian yang tinggi pada indikator partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama, dengan tingkat partisipasi berada pada kisaran 93%–98%. Namun demikian, terdapat fluktuasi capaian pada tahun 2023–2025, khususnya pada indikator PAUD dan pendidikan kesetaraan.

Partisipasi PAUD mengalami ketidakstabilan dengan penurunan signifikan pada tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2025. Sementara itu, partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama relatif stabil tinggi, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat pada tahun 2025. Adapun partisipasi pendidikan kesetaraan menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam hingga tahun 2025.

Permasalahan utama yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain terkait dengan konsistensi dan validitas data, perubahan metodologi pendataan, serta belum optimalnya jangkauan layanan pendidikan nonformal, khususnya bagi anak tidak sekolah.

Dalam rangka peningkatan kinerja, arah kebijakan difokuskan pada penguatan sistem data pendidikan yang terintegrasi, pemerataan akses layanan pendidikan, penguatan program wajib belajar 12 tahun, serta revitalisasi pendidikan kesetaraan melalui peningkatan identifikasi dan penanganan anak tidak sekolah.

Tabel 2.46.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PENDIDIKAN						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	92.17	93.66	40.98	93.53	66.71

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PENDIDIKAN						
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	93.94	94.14	98.48	79.48	98.50
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	%	94.28	96.08	95.06	75.7	96.51
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	91.85	93.48	93.48	40.92	15.62

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.1.2. **Urusan Kesehatan**

Penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten Luwu selama periode 2021–2025 menunjukkan capaian yang secara umum mengalami peningkatan signifikan, khususnya pada indikator pelayanan kesehatan dasar, skrining kesehatan, serta penanganan penyakit prioritas. Hal ini mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan program kesehatan yang berfokus pada upaya promotif dan preventif, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada aspek sarana dan prasarana, rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk menunjukkan tren yang fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Namun demikian, seluruh rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota telah terakreditasi 100 persen, yang menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, capaian indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat pelayanan yang tinggi pada ibu hamil, persalinan, dan bayi baru lahir. Meskipun

demikian, terdapat sedikit penurunan pada tahun terakhir yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam menjaga kesinambungan akses layanan dan kualitas pelayanan di lapangan. Cakupan pelayanan kesehatan balita juga mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2024, namun kembali menurun pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan cakupan layanan secara konsisten.

Pada kelompok usia sekolah dan usia produktif, capaian indikator menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Hal ini didukung oleh optimalisasi program skrining kesehatan, peningkatan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta integrasi layanan kesehatan dengan institusi pendidikan dan lingkungan kerja. Capaian skrining kesehatan pada kelompok lansia juga mengalami peningkatan yang signifikan, yang mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap kesehatan kelompok rentan.

Dalam penanganan penyakit prioritas, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan gangguan jiwa, capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik dan relatif stabil pada tingkat tinggi. Sementara itu, indikator pelayanan terhadap penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV menunjukkan fluktuasi, yang dipengaruhi oleh faktor deteksi kasus, kepatuhan pengobatan, serta masih adanya stigma di masyarakat terhadap penyakit tersebut.

Memperhatikan capaian tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan ke depan difokuskan pada peningkatan pemerataan dan kapasitas sarana prasarana kesehatan, penguatan layanan kesehatan primer, serta peningkatan kualitas dan distribusi sumber daya manusia kesehatan. Selain itu, diperlukan penguatan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cakupan skrining kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kesehatan.

Upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga perlu terus ditingkatkan melalui deteksi dini, pengobatan yang berkesinambungan, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi faktor risiko. Dengan demikian, diharapkan capaian indikator kesehatan dapat terus meningkat secara merata dan berkelanjutan, serta mampu mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Tabel 2.47.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	KESEHATAN						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka	0.095	0.103	0.098	0.091	0.1009
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	81.71	96.66	95.03	97.42	94.2
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	89.45	94.88	99.27	99.71	98.28
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	91.88	99.26	98.27	99.43	96.51
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	75.96	89.82	93.24	97.17	87.62
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	16.37	78.28	92.53	96.16	98.81
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75.08	90.13	96.24	99.33	96.78
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	46.11	66.64	97.91	98.37	98.1
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	64.36	80.97	93.05	98.40	98.41
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87.56	100	98.56	98.32	98.78
12	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	78.8	93.28	97.24	99.23	99.55
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	%	42.00	92.69	90.67	84.68	94.65

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	KESEHATAN						
	pelayanan TBC sesuai standar						
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	84.39	91.83	94.33	80.48	87.52

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.1.3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rasio Luas Kawasan permukiman Rawan banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai yang berada dalam Kabupaten Luwu merupakan persentase luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendali banjir terhadap luas Kawasan banjir total yang ada di kabupaten Luwu. Indikator ini menunjukkan kinerja pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman yang teridentifikasi sebagai area yang sering terpapar banjir. Wilayah permukiman rawan banjir umumnya berada di dekat aliran sungai yang ketika terjadi hujan dengan intensitas yang relatif besar, air sungai cenderung meluap dan membanjiri area di sekitarnya. Oleh sebab itu, untuk menangani masalah luapan air banjir tersebut pemerintah kabupaten Luwu melakukan penanganan terhadap alur sungai berupa normalisasi alur sungai atau dengan melakukan pembangunan tanggul banjir di sepanjang segmen sungai yang diidentifikasi sebagai lokasi luapan air banjir.

Secara historis, area kawasan banjir di kabupaten Luwu tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bua, kamanre, Lamasi Timur, Walenrang Timur, Larompong, Larompong Selatan, Ponrang, Ponrang Selatan, Suli dan Suli Barat. Selama lima tahun terakhir area ini menjadi area yang tergenang oleh banjir hampir tiap tahunnya. Sehingga pemerintah kabupaten Luwu setiap tahun terus melakukan perbaikan pada alur sungai untuk meminimalisir dampak banjir di area kawasan permukiman tersebut.

Berdasarkan data capaian dalam lima tahun terakhir. Rasio Luas Permukiman rawan banjir di kabupaten Luwu terus mengalami penurunan. Kawasan Permukiman yang terdampak banjir terus

mengalami perbaikan infratraktur. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur banjir terus meningkat. Luasan banjir yang mendapat infrastruktur pelindung banjir dari 8% pada tahun 2021 meningkat menjadi 10% di tahun 2025.

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah kabupaten

Luwu merupakan persentase dari luas permukiman yang mendapatkan infratraktur pelindung pengaman pantai terhadap luas kawasan permukiman yang ada di wilayah pantai kabupaten Luwu. Indikator ini menggambarkan kinerja dari layanan infrastruktur yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap kawasan Permukiman yang ada disepanjang pantai kabupaten Luwu.

Berdasarkan data capaian selama lima tahun terakhir, pesentase kawasan permukiman sepanjang pantai yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai terlihat masih belum mengalami peningkatan. Rasio tersebut berada pada nilai 13,73 % dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Hal ini terjadi karena umumnya daerah tersebut sudah terlindungi secara alami. Pantai di sepanjang garis pantai kabupaten Luwu, sebagian besar ditumbuhi oleh mangrove. Tumbuhan ini menjadi pelindung alami terhadap ancaman abrasi pantai. Tumbuhan ini meberikan perlindungan dan sekaligus rumah bagi biota laut sehingga ekosistem sepanjang pesisir dapat terus lestari. Namun demikian, meskipun area rawan abrasi telah terjaga ekosistemnya, pemerintah kabupaten Luwu dan segenap elemen pemerintah beserta masyarakat terus melakukan pemantauan. Beberapa aktivitas rutin dilaksanakan dalam rangka menjaga ekosistem pesisir ini yakni pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove.

Kabupaten Luwu sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian yang besar terus melakukan upaya peningkatan kualitas infrastruktur irigasi. Peningkatan kualitas infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian masyarakat Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu memiliki luas lahan sawah sebesar 34.238,70 Ha sesuai dengan SK LP2B No. 837/X11/2023 yang tersebar di 69 daerah irigasi kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Kondisi

infrastruktur jaringan irigasi dalam wilayah tersebut masih belum optimal sehingga diperlukan upaya perbaikan dan perluasan jaringan irigasi. Berdasarkan capaian indikator **rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani irigasi** yang tercatat dari tahun 2021 yakni sebesar 37,9 persen dan terus mengalami peningkatan sampai 68,17 persen di tahun 2025. Peningkatan ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Luwu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 yakni peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan khususnya komoditas pertanian. Dengan melakukan peningkatan daerah layanan irigasi, diharapkan dapat menaikkan Indek Penanaman petani dari IP 185 menuju IP 250-300.

Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Rasio Jaringan Irigasi

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota merupakan salah satu pilar utama dalam pemenuhan layanan dasar sekaligus sebagai upaya penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrim di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, data menggambarkan bahwa dari tahun 2021-2025 layanan akses air minum di Kabupaten Luwu cenderung stagnan dan belum mengalami lompatan capaian yang masif. Pada awal periode, yaitu tahun 2021 baseline capaian berada pada angka 81,40%. Kemudian meningkat secara bertahap menjadi 81,47% pada tahun 2022, pada tahun 2023 menjadi 81,83% menjadi dan mengalami kontraksi pada tahun 2024 menjadi 80,41 %, penurunan ini terjadi disebabkan oleh pertumbuhan jumlah rumah tangga baru yang bergerak lebih cepat daripada kapasitas pemerintah daerah dalam memperluas infrastruktur layanan air minum baru, selain itu adanya faktor penyusutan kualitas idle capacity pada SPAM eksisting mempengaruhi peserta layanan pada SPAM Perkotaan. Namun pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 81,08% pada tahun 2025. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam perluasan jaringan SPAM diantaranya adalah kemampuan fiskal yang terbatas, banyak sarana air minum berbasis masyarakat yang mengalami penurunan fungsi karena kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan berkala

serta pertumbuhan permukiman baru yang belum terintegrasi secara langsung dengan jaringan perpipaan Perumda Air Minum. Untuk meningkatkan capaian indikator ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah diantaranya melakukan pemeliharaan berkala pada SPAM perpipaan yang mengalami penurunan kinerja, mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola air minum tingkat desa (KPSPAM) agar infrastruktur SPAM Pedesaan dapat berfungsi dalam jangka panjang serta meningkatkan sinergitas pendanaan mengoptimalkan skema pendanaan diluar APBD seperti pemanfaatan CSR serta sinkronisasi program pusat dan daerah demi mewujudkan akses air minum layak 100%.

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2024 hingga 2025, kinerja pelayanan sanitasi daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2024 capaian layanan pengolahan air limbah domestik tercatat sebesar 76,88%. Namun tahun 2025, menurun sebesar 0,89 % menjadi 75,99%. Penurunan capaian ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara laju pertumbuhan rumah tangga dengan kemampuan fiskal daerah dalam merealisasikan infrastruktur sanitasi yang terstandar. Selain itu belum optimalnya keberfungsian IPAL komunal serta pemeliharaan tangki septik berbasis masyarakat yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya turut memicu penurunan fungsi kelayakan sarana sanitasi. Untuk meningkatkan layanan pengelolaan air limbah domestik perlu dilakukan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan tangki individual maupun komunal melalui sinergi DAK Fisik Sanitasi, DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh, Alokasi dana desa khususnya lokus desa rawan sanitasi serta sinkronisasi pusat dan daerah sehingga akses sanitasi layak 100% dapat tercapai.

Tabel 2.48.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	8.00	9.7	10.51	10.89	10.89
2	Rasio luas Kawasan permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	13.73	13.78	13.78	13.78	13.78
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	37.9	77,73	69,86	68.17	68.17
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	81.40	81.47	81.83	80.41	81.08
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	na	na	na	76.88	75.99
6	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	1	1	1	1	1
7	Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	%	34.55	28.96	30.17	30.67	31.80
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	5.38	36.00	49.71	0	98.33
9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	na	na	na	na	na

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah indikator kinerja yang termuat dalam Permendagri 18 Tahun 2020 untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Didalam regulasi tersebut dijabarkan 5 (lima) indikator outcome yang menjadi urusan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun indikator tersebut ialah

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban

bencana merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh korban bencana memperoleh hunian yang aman, layak, dan sesuai standar, sehingga dapat mendukung proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Selama beberapa tahun terakhir, capaian indikator program ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi mencapai 100 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Keberhasilan tersebut didorong oleh komitmen kuat pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana, dukungan anggaran yang memadai baik dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya, serta koordinasi yang efektif antar perangkat daerah terkait.

Selain itu, keberhasilan capaian juga dipengaruhi oleh sistem pendataan korban bencana yang semakin akurat dan terintegrasi, sehingga penetapan sasaran penerima bantuan dapat dilakukan secara tepat. Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang telah terstandar serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan turut mempercepat penyelesaian rehabilitasi dan pembangunan rumah layak huni.

Meskipun capaian kinerja telah mencapai target secara konsisten, ke depan perlu dilakukan penyempurnaan dalam aspek kualitas hunian, ketahanan terhadap bencana, serta ketepatan waktu penyelesaian. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa target yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, sehingga program ini tidak hanya berhasil secara

kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana.

2. **Fasilitasi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten** merupakan program pemerintah yang menjamin pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat yang harus berpindah tempat tinggal akibat pelaksanaan program pembangunan daerah. Pada periode tahun 2022 – 2023, Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu mencapai 100 %, ini artinya pemerintah kabupaten Luwu berhasil menyediakan rumah layak huni untuk seluruh masyarakat yang terdampak. Sementara pada tahun 2024-2025 capaian kinerja tercatat sebesar 0 %. Rendahnya capaian ini bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja pelaksanaan program, namun hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten Luwu pada periode tersebut. Sehingga capaian yang fluktuatif tersebut dipengaruhi oleh kondisi kebutuhan dilapangan, bukan faktor kinerja pelaksanaan.
3. **Persentase Kawasan Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani**, merupakan indikator yang menggambarkan tingkat penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten pada tahun berjalan. Berdasarkan SK Kumuh Kabupaten Luwu Nomor 219/IV/2022, terdapat sekitar 20 Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu dengan total luas kawasan sekitar 83,78 Ha. Pada Tabel digambarkan bahwa mulai tahun 2021-2023 capaian indikator ini belum tersedia, hal ini disebabkan dilaksanakannya penanganan terhadap kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten pada periode tersebut. Kemudian pada tahun 2024, persentase kawasan kumuh yang ditangani sekitar 0,07 %, Kawasan yang ditangani pada tahun ini seluas tersebar di 2 Kawasan yaitu Kawasan Kumuh Madura di Kelurahan Lamasi dan Kawasan Kumuh Pasar Baru di Kelurahan Bajo. Selanjutnya, pada tahun 2025, Pemerintah kabupaten Luwu kembali menangani kawasan kumuh kewenangan Kabupaten yaitu Kawasan Kumuh Salodidi seluas 1,57 Ha sehingga

persentase peningkatan kawasan kumuh mencapai 2,10%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memulai dan meningkatkan penanganan kawasan kumuh secara bertahap.

Dalam rangka meningkatkan persentase penanganan kawasan kumuh dibawah 10 ha, Pemerintah Kabupaten Luwu perlu mengoptimalkan sinergi antar organisasi perangkat daerah terkait serta mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi serta pihak CSR guna memperkuat dukungan pendanaan. Selain itu, upaya pencegahan terhadap munculnya kawasan kumuh baru perlu dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan bangunan yang lebih ketat, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman secara terpadu dan berkelanjutan.

4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni dengan total unit rumah yang ada di Kabupaten Luwu. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan data pada tahun 2022 hingga 2025, terlihat bahwa jumlah unit rumah tidak layak huni mengalami penurunan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, persentase RTLH tercatat sebesar 11,57%, kemudian menurun menjadi 11,40% pada tahun 2023. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 sebesar 10,86%, hingga mencapai 10,75% pada tahun 2025. Penurunan yang berkelanjutan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Luwu dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, di antaranya adanya kolaborasi pendanaan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, sehingga program penanganan RTLH dapat dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahunnya.

5. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah unit rumah yang dibangun terfasilitasi

PSU dibandingkan dengan jumlah unit rumah di Kabupaten Luwu. Indikator ini dihitung untuk memberikan gambaran seberapa besar unit rumah pada perumahan yang telah menyerahkan asetnya ke Pemerintah dan telah di fasilitasi PSU. Pada Tahun 2023-2025, menunjukkan capaian yang fluktuatif, pada tahun 2023 capaian sebesar 7,98%, tahun 2024 sebesar 3,96% dan tahun 2025 sebesar 7,60%. Hal ini dipengaruhi oleh masih kurangnya Pengembang yang menyerahkan aset perumahannya ke Pemerintah Daerah sehingga mempengaruhi capaian program ini. Untuk mendorong peningkatan capaian indikator ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis, antara lain dengan memperkuat regulasi terkait kewajiban penyediaan dan penyerahan PSU oleh pengembang, termasuk penegakan sanksi yang tegas bagi pengembang yang tidak memenuhi ketentuan. Di samping itu, perlu dilakukan, peningkatan pengawasan sejak tahap pembangunan perumahan, serta percepatan penyelesaian backlog PSU yang belum diserahkan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengembang dan mendorong terciptanya ketersediaan PSU yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.49.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.	%	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.	%	na	100	100	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	na	na	na	0.07	2,10
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	na	11,57	11,40	10.86	10,75

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	na	na	7,98	3.96	7,60

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang bertujuan untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tangguh terhadap bencana. Kinerja urusan ini diukur melalui sejumlah indikator kinerja kunci (IKK) yang mencerminkan efektivitas penegakan regulasi daerah, penanganan gangguan ketertiban, serta kapasitas penanggulangan bencana dan kebakaran.

Indikator **persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan** menunjukkan tingkat kepatuhan dan efektivitas penegakan regulasi daerah oleh aparat penegak perda. Di kabupaten Luwu selama periode 2021–2025, capaian indikator ini relatif tinggi dan stabil pada angka 100%, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 89,29%. Penurunan tersebut disebabkan oleh oleh lemahnya pengawasan atau keterbatasan sumber daya dalam penegakan aturan. Namun, setelah itu capaian kembali stabil di angka 100% karena adanya perbaikan mekanisme penegakan hukum dan koordinasi antar instansi. Adapun upaya untuk meningkatkan capaian indikator tersebut yaitu dengan memperkuat koordinasi antar instansi penegak hukum, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi agar kepatuhan tetap terjaga.

Indikator **persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang dapat diselesaikan** menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, kabupaten Luwu capaian indikator ini dari 29,72% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya kapasitas penanganan gangguan trantibum, yang didukung oleh peningkatan

koordinasi lintas sektor, responsivitas aparat, serta peran aktif masyarakat dalam pelaporan kejadian.

Pada aspek kebencanaan, indikator **jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu menunjukkan banyaknya warga negara atau masyarakat kabupaten Luwu yang berada pada daerah rawan bencana yang menerima layanan informasi mengenai kebencanaan. Persentase capaian indikator ini bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2022 tercatat masing-masing 63.238 orang, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 68.238 orang. Pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 63.238 orang, dan pada tahun 2025 meningkat signifikan menjadi 91.751 orang. Secara umum, terjadi peningkatan pada akhir periode yang menunjukkan adanya penguatan dalam penyelenggaraan layanan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah dengan melaksanakan dan meningkatkan kegiatan mitigasi bencana baik melalui pemasangan papan peringatan informasi rawan bencana, penyebaran informasi melalui media cetak, media online dan media sosial (Website, Facebook, Instagram, Tiktok) serta peningkatan kegiatan penguatan kapasitas kawasan dan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Sementara itu, indikator **jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu menggambarkan banyaknya masyarakat yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang antara lain memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana. Selama periode tahun 2021–2025, capaian indikator ini menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 tercatat masing-masing sebanyak 36.391 orang, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 92.882 orang dan Pada tahun 2025 tetap pada angka 92.882 orang. capaian pada akhir periode menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagai hasil dari penguatan program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Upaya peningkatan indikator jumlah

warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan membuat regulasi terkait penanggulangan bencana berbasis komunitas masyarakat, perluasan jangkauan sosialisasi dan edukasi kebencanaan hingga ke wilayah rawan dan terpencil, peningkatan frekuensi pelatihan serta simulasi bencana bagi masyarakat, penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, relawan, dan komunitas lokal, serta pengembangan program desa tangguh bencana.

Indikator **jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** merupakan indikator yang menggambarkan banyaknya masyarakat terdampak bencana yang berhasil mendapatkan layanan penyelamatan, pertolongan dan evakuasi pada saat tanggap darurat bencana oleh petugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB), sebagai upaya perlindungan jiwa masyarakat terdampak bencana. Selama periode tahun 2021–2025, tercatat pada tahun 2021 sampai Tahun 2023 jumlah masyarakat terdampak yang telah terlayani sebanyak 44.595 orang setiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan tingginya skala kejadian bencana sehingga mempengaruhi banyaknya masyarakat terdampak kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 3.335 orang dan Pada tahun 2025 semakin menurun menjadi 1.512 orang hal ini disebabkan karena kurangnya kejadian bencana alam sehingga dampak terhadap masyarakat juga berkurang. Upaya peningkatan indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu dengan melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (TRC) melalui pelatihan dan simulasi secara berkala, penyediaan sarana dan prasarana evakuasi yang memadai, penguatan sistem komando dan koordinasi lintas sektor.

Pada layanan kebakaran, indikator **persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** merupakan indikator yang mengukur tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada warga negara yang terdampak bencana dan digunakan untuk mengukur efektivitas dan kesiapsiagaan petugas dalam menyelamatkan nyawa manusia saat terjadi kebakaran. Secara

teknis, indikator ini menghitung rasio antara jumlah korban yang berhasil diselamatkan/dievacuasi dengan total seluruh korban yang terdampak dalam suatu kejadian kebakaran. Adapun tujuan indikator ini yakni mengukur atau menilai kemampuan teknik pencarian dan penyelamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban di lokasi bencana kebakaran. Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tabel di atas, nampak bahwa pelayanan penyelamatan pada periode tahun 2021-2025 mengalami tren penurunan, dimana pada tahun 2021 sebesar 90,38 persen, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dengan nilai capaian sebesar 23,52 persen, kemudian pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 41,18 persen atau menjadi sebesar 64,70 persen. Adapun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yakni masih terjadinya kendala aksesibilitas dan respon time serta ketersediaan/kondisi sarana dan prasarana, dimana diketahui bahwa Kabupaten Luwu memiliki 22 Kecamatan dan 227 Desa/Kelurahan sehingga terkadang jauhnya lokasi kejadian dari pos pemadam terdekat serta padatnya volume kendaraan di jalan raya sehingga memperlambat laju armada untuk melakukan penanganan untuk tiba tepat waktu di lokasi kejadian. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu akan terus berupaya maksimal untuk menambah armada dan meningkatkan jumlah pos pemadaman di wilayah yang tergolong rawan terjadi kebakaran.

Adapun indikator **waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran** diartikan sebagai tingkat waktu tanggap (durasi waktu yang dihitung sejak diterimanya laporan/panggilan darurat oleh pusat pengatur (Call Center/Pos Damkar) hingga petugas sampai di lokasi kejadian dan mulai melakukan tindakan pemadaman atau penyelamatan (pemberian layanan). Indikator ini merupakan parameter utama dalam mengukur efektivitas dan kinerja satuan pemadam kebakaran. Secara teknis indikator ini menghitung rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya informasi atau laporan hingga tim tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi, berdasarkan seluruh kejadian yang terjadi dalam periode tertentu. Adapun tujuan indikator ini yakni efisiensi dan kesiapan operasional dalam menangani situasi darurat,

dimana semakin kecil angka, berarti hal tersebut menandakan semakin cepat waktu tanggap dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi, yang mencerminkan tingkat efisiensi dan kesiapan operasional yang lebih baik. Capaian response time menunjukkan kinerja yang konsisten, yaitu sebesar 15 menit sepanjang periode 2021–2025. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan minimal telah terpenuhi, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan ke arah waktu tanggap yang lebih cepat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan ini ke depan, kabupaten Luwu memerlukan sejumlah upaya strategis, antara lain melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, peningkatan sarana dan prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peringatan dini dan pelaporan masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor serta evaluasi kinerja secara berkala juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.50.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT						
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	89,29	100	100	100
2	Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	%	29,72	80	75	80	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	63.238	63.238	68.238	63.238	91.751
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	36.391	36.391	36.391	92.882	92.882
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	orang	44.595	44.595	44.595	3.335	1.512
6	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan	%	90,38	86,96	71,59	23,52	64,70

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Evakuasi Korban Kebakaran						
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.1.6. **Urusan Sosial**

Penyelenggaraan urusan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang meliputi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, serta penanganan korban bencana alam dan sosial. Kinerja urusan sosial diukur melalui dua indikator utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan di luar panti dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Luwu, capaian indikator kinerja urusan sosial selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Pada indikator persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, capaian menunjukkan tren meningkat dari 90,5 persen pada tahun 2021 menjadi 91 persen pada tahun 2022, kemudian 91,5 persen pada tahun 2023, dan mencapai 92,72 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi sosial, bantuan sosial, serta penguatan layanan berbasis keluarga dan masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2025 capaian indikator ini mengalami penurunan menjadi 89,30 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, keterbatasan jangkauan pelayanan di wilayah terpencil, serta tekanan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sementara itu, pada indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat, capaian menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 100 persen pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 93,12 persen yang

disebabkan oleh kendala distribusi bantuan, aksesibilitas wilayah terdampak, serta meningkatnya intensitas kejadian bencana. Namun pada tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi 100 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem penanganan bencana, termasuk kesiapan logistik dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja urusan sosial di Kabupaten Luwu, diperlukan beberapa upaya strategis, antara lain penguatan basis data terpadu kesejahteraan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial berbasis masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana, penyediaan cadangan logistik yang memadai, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan respons yang cepat dan efektif dalam penanganan korban bencana.

Tabel 2.51.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SOSIAL						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	90,50	91,00	91,50	92.72	89,30
2	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	100	100	93.12	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu selama periode tahun 2021–2025 diukur melalui lima indikator

kinerja utama (IKK outcome), yaitu persentase kesesuaian kegiatan terhadap Rencana Tenaga Kerja, persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, tingkat produktivitas tenaga kerja, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, serta persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja.

Indikator pertama, **persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja**, menunjukkan capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 41,67% meningkat menjadi 56,52% pada tahun 2022, kemudian menurun pada tahun 2023 sebesar 43,48% dan relatif stabil pada tahun 2024–2025 sebesar 46,15%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan implementasi program ketenagakerjaan di kabupaten Luwu masih belum optimal dan dipengaruhi oleh perubahan prioritas pembangunan serta keterbatasan anggaran.

Selanjutnya, **persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi** mengalami penurunan signifikan selama periode tersebut. Capaian tahun 2021 sebesar 58,33% menurun menjadi 41,29% pada 2022, kembali turun pada 2023 menjadi 28,65%, kemudian meningkat pada 2024 sebesar 50,64%, namun kembali menurun pada 2025 menjadi 20%. Fluktuasi ini menunjukkan masih terbatasnya akses dan keberlanjutan program pelatihan serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja, termasuk keterbatasan pembiayaan dan belum optimalnya sinergi dengan dunia usaha dan industri.

Untuk indikator **tingkat produktivitas tenaga kerja**, capaian menunjukkan tren relatif stabil dengan kecenderungan meningkat hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 sebesar 59,78 juta rupiah per pekerja meningkat menjadi 64,08 juta rupiah pada tahun 2024, namun menurun pada tahun 2025 menjadi 60,84 juta rupiah. Penurunan ini mengindikasikan adanya perlambatan aktivitas ekonomi dan masih terbatasnya peningkatan kualitas serta teknologi kerja pada sektor produktif.

Pada indikator **persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak**, terlihat peningkatan kecil hingga tahun 2023 dari 21,32% menjadi 24,14%, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar 16,85% dan 16,51%. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya

tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, termasuk penerapan peraturan perusahaan, struktur skala upah, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, **persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja** menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 4,71% dan 2023 sebesar 1,45%, capaian meningkat pada tahun 2024 menjadi 20,97% dan kembali naik pada tahun 2025 menjadi 22,94%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan layanan penempatan tenaga kerja serta pemulihan kondisi pasar kerja.

Secara umum, kinerja urusan ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan utama berupa rendahnya sertifikasi kompetensi tenaga kerja, belum optimalnya penerapan tata kelola kerja yang layak oleh perusahaan, serta fluktuasi keselarasan program dengan rencana tenaga kerja. Namun demikian, terdapat perbaikan pada aspek penempatan tenaga kerja yang menunjukkan efektivitas layanan antar kerja mulai meningkat.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Luwu, diperlukan beberapa upaya strategis, antara lain, diperlukan penguatan kebijakan melalui peningkatan pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi, penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan pengawasan dan kepatuhan ketenagakerjaan, serta integrasi yang lebih kuat antara perencanaan tenaga kerja dengan perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, produktivitas, serta daya saing tenaga kerja daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.52.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	TENAGA KERJA						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	%	41,67	56,52	43,48	46,15	46,15
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	58,33	41,29	28,65	50,64	20,00
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupah /Pekerja	59,78	62,75	61,92	64,08	60,84
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata	%	21,32	22,97	24,14	16,85	16,51

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)						
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	11,36	4,71	1,45	20,97	22,94

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.2. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu selama Tahun 2021–2025 diukur melalui beberapa indikator kinerja outcome yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan anak, serta penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Indikator **Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD** menunjukkan proporsi alokasi anggaran yang telah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Selama periode 2021–2025, capaian indikator ini mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 18 persen pada tahun 2021, menurun menjadi 17 persen pada tahun 2022, meningkat kembali menjadi 18 persen pada tahun 2023, kembali menurun menjadi 17 persen pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 20 persen pada tahun 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender belum sepenuhnya konsisten di seluruh perangkat daerah. Namun demikian, peningkatan pada tahun 2025 mencerminkan adanya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong integrasi perspektif gender melalui peningkatan kapasitas perencana serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Indikator **Persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait kabupaten** menggambarkan tingkat layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Capaian indikator ini

menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun masih fluktuatif, yaitu sebesar 0,016 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 0,029 persen pada tahun 2022, sedikit menurun menjadi 0,026 persen pada tahun 2023, kembali menurun menjadi 0,017 persen pada tahun 2024, dan meningkat signifikan menjadi 0,04 persen pada tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat pelaporan kasus yang masih relatif rendah, keterbatasan akses layanan di beberapa wilayah, serta kapasitas kelembagaan yang belum optimal. Peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pelaporan dan penanganan kasus serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak.

Sementara itu, indikator **Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan** menunjukkan tingkat prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Capaian indikator ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 0,0017 pada tahun 2021, meningkat menjadi 0,0026 pada tahun 2022, meningkat lagi menjadi 0,0106 pada tahun 2023, kemudian melonjak tajam menjadi 1,578 pada tahun 2024, dan menurun drastis menjadi 0,005 pada tahun 2025. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam pelaporan dan pencatatan kasus, termasuk kemungkinan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor serta perbaikan sistem pendataan pada periode tertentu. Lonjakan pada tahun 2024 diduga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan atau perubahan metode pencatatan, sedangkan penurunan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator tersebut, diperlukan beberapa upaya strategis, antara lain penguatan kebijakan pengarusutamaan gender melalui integrasi ARG pada seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di perangkat daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak perlu dilakukan melalui perluasan jangkauan layanan hingga tingkat desa, penguatan sistem pelaporan berbasis masyarakat dan digital, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Upaya pencegahan

kekerasan terhadap perempuan juga perlu diperkuat melalui edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penguatan sistem perlindungan hukum dan pendataan kasus yang lebih akurat dan terintegrasi.

Tabel 2.53.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2025

No .	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	18	17	18	17	20
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,016	0,029	0,026	0.017	0,04
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	0,0017	0,0026	0,0106	1,578	0,005

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.3. Urusan Pangan

Urusan pangan tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan pemenuhan kebutuhan akan makanan saja, tetapi urusan pangan merupakan gambaran akan ketangguhan, kemandirian dan stabilitas suatu daerah. Permasalahan pada sektor pangan berpengaruh pada banyak hal seperti stabilitas ekonomi lokal, kualitas kesehatan dan sumber daya manusia, ketahanan dan kemandirian daerah, serta pelestarian lingkungan.

Saat ini, tantangan urusan pangan tidak lagi sekedar masalah budidaya untuk peningkatan produksi saja, tetapi juga persoalan struktural dan sistemik seperti tekanan alih fungsi lahan, keamanan dan kerawanan pangan, fluktuasi harga dan inflasi, diversifikasi pangan, perubahan iklim, serta regenerasi petani. Kebijakan pembangunan daerah haruslah menempatkan urusan pangan pada posisi yang sentral dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah karena urusan pangan merupakan pilar pembangunan yang bersifat multisektor, yang keberhasilannya akan menjadi landasan

kuat bagi terwujudnya daerah yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan urusan pangan oleh pemerintah merupakan mandat konstitusi untuk menjamin hak atas pangan bagi setiap warga negara, oleh karena itu dalam kebijakan tata kelola urusan pangan harus menjadi prioritas dengan mengarahkan pada pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Pemenuhan tersebut diarahkan dengan memperkuat sistem logistik yang terintegrasi, melalui penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah, operasi pasar, pengujian keamanan makanan, penguatan diversifikasi pangan lokal, penurunan daerah rawan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan serta pemenuhan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi pangan.

Persentase Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Pangan

Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan merupakan rasio jumlah stok pangan yang dikuasai atau dikelola oleh pemerintah dibandingkan dengan total kebutuhan konsumsi pangan seluruh penduduk di wilayah tersebut dalam satu periode tertentu. Penyediaan Cadangan pangan merupakan upaya menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah, cadangan pangan ini menjadi jaring pengaman bagi daerah saat mengalami bencana, gagal panen, dan inflasi harga pangan, sehingga kebutuhan pangan masyarakat masih dapat diantisipasi oleh pemerintah.

Cadangan pangan ini menunjukkan tingkat kesiapsiagaan daerah, semakin tinggi persentasenya maka semakin kuat ketahanan pangan daerah terhadap guncangan ekonomi inflasi bahan pangan, maupun karena bencana alam. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan di Kab. Luwu cenderung fluktuatif, hal ini terlihat dimana pada tahun 2022 persentase cadangan pangan turun menjadi 5,90 % setelah di tahun 2021 berada di angka 13,28%, dan kemudian menjadi 0 % di tahun 2023, yang merupakan titik krusial ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten Luwu, namun kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 24 % di tahun 2024 dan 49,52 % di tahun 2025.

Penurunan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Luwu di tahun 2023 menjadi 0 terjadi karena adanya penyaluran cadangan

pangan pemerintah untuk kebutuhan penanganan rawan pangan di beberapa wilayah pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan pemanfaatan cadangan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat saat terjadinya situasi rawan pangan dan fluktuasi pasokan pangan.

Pengalokasian APBD untuk Peningkatan persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan sebesar 49,52 % persen pada tahun 2025 merupakan upaya pemerintah Kabupaten Luwu dalam menjaga ketersediaan stok pangan di tengah anomali cuaca yang terjadi saat ini yang dapat berpotensi bencana dan berpotensi menurunkan produktivitas tanaman pangan. Adapun data persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan di Kab. Luwu tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.54.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PANGAN						
1	Persentase Cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	%	13,28	5,90	0	24	49,52

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2026.

Keterbatasan APBD, tidak adanya gudang penyimpanan milik pemerintah daerah, keterbatasan SDM, resiko penyusutan dan kerusakan pangan di gudang penyimpanan, serta biaya pemeliharaan menjadi tantangan dalam upaya penyediaan cadangan pangan dalam jumlah besar. Penyediaan cadangan pangan harus dapat memperhitungkan tantangan-tantangan ini agar kiranya cadangan pangan dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang tetap terjaga.

Dalam upaya penyediaan cadangan pangan, pemerintah Kabupaten Luwu saat ini melakukan kerja sama dengan Perum Bulog dengan menitipkan cadangan pangan di gudang penyimpanan Perum Bulog yang nantinya akan disalurkan untuk mengantisipasi ketersediaan pangan saat terjadi bencana, kerawanan pangan, maupun saat terjadi inflasi. Penitipan cadangan pangan di gudang

Perum Bulog ini dilakukan karena tidak adanya gudang penyimpanan milik pemerintah daerah dan serta keterbatasan sumber daya manusia dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan.

Kebijakan pemerintah pusat yang saat ini juga menugaskan Perum Bulog untuk membeli gabah petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan cadangan pangan, karena dengan penugasan ini, Perum Bulog harus menyerap dan menampung secepat mungkin gabah petani sementara kapasitas gudang penyimpanan milik Perum Bulog juga terbatas. Keterbatasan kapasitas gudang bulog untuk menyimpan gabah hasil pembelian dari petani serta cadangan pangan pemerintah daerah tentunya harus segera disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dengan menyediakan alternatif lain dalam mengelola cadangan pangan pemerintah daerah.

Salah satu Langkah yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan Perum Bulog adalah dengan penyediaan gudang penyimpanan cadangan pangan milik pemerintah daerah dan penyediaan lumbung pangan di tingkat desa/kelurahan. Penyediaan gudang dan lumbung pangan ini sebaiknya sesegera mungkin direalisasikan agar penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah tidak hanya bertumpu pada penyimpanan di gudang Perum Bulog tetapi tersebar di beberapa titik.

Peningkatan persentase cadangan pangan pemerintah sesuai target yang di tetapkan dapat dicapai dengan penambahan postur anggaran penyediaan cadangan pangan pemerintah, namun tentunya tetap melihat kemampuan pengelolaan untuk meminimalisir resiko penyusutan dan kerusakan cadangan pangan di gudang penyimpanan. Selain itu, perlu juga di galakkan program ketahanan pangan berbasis keluarga/masyarakat dengan menghimbau masyarakat/petani untuk memiliki lumbung pangan skala keluarga dengan menyisihkan sebagian hasil panen sebelumnya untuk menjadi cadangan pangan keluarga sesuai kebutuhan dan perkiraan waktu sampai panen musim tanam berikutnya. Hal ini akan menjadi solusi kedepannya agar cadangan pangan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah tetapi juga masyarakat. Dengan tersedianya cadangan pangan yang tersebar di beberapa lumbung pangan di desa/kelurahan, dan lumbung pangan keluarga, maka distribusi

cadangan pangan dapat lebih mudah dilakukan sehingga kerawanan pangan di daerah dapat dikendalikan.

2.4.4.2.4. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan urusan yang kompleks dan strategis pada suatu daerah. Urusan pertanahan bukan sekedar urusan administratif terkait pencatatan dan pensertifikatan aset-aset daerah namun merupakan instrument penting yang mendukung terlaksananya pembangunan. Tata kelola urusan pertanahan yang baik memberikan jaminan kepastian hukum atas aset – aset daerah, melindungi hak-hak masyarakat atas tanah, memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas umum, dan memastikan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan perijinannya.

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkannya merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengawasi pemegang izin lokasi dalam merealisasikan investasinya sesuai dengan peruntukan perijinan yang diperolehnya. Indikator ini merupakan paramater untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap komitmen investasinya dan memberikan gambaran apakah pelaku benar-benar merealisasikan investasinya atau hanya sekedar melakukan penguasaan tanah tanpa ada pemanfaatan yang nyata di lokasi yang telah di berikan perijinannya.

Kesenjangan antara luas izin lokasi yang diterbitkan dengan luas pemanfaatan riil di lapangan sering kali menjadi pemicu munculnya fenomena tanah terlantar dan spekulasi tanah. Hal ini tentunya dapat berefek pada terhambatnya percepatan pembangunan ekonomi daerah karena lahan produktif yang telah diberikan izin tidak di kelola dengan baik. Tanah yang telah diberikan ijin untuk dikelola oleh pelaku usaha tertentu namun tidak di dimanfaatkan secara nyata terkadang dianggap sebagai tanah terlantar sehingga mendorong masyarakat disekitar lokasi untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan

yang dilakukan oleh masyarakat dalam waktu yang lama pada lahan yang telah berijin ini, berpotensi memunculkan konflik agraria antara masyarakat dengan pelaku usaha pemegang izin lokasi.

Data indikator Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkannya dalam rentang waktu tahun 2021-2025 belum dapat disajikan, hal ini disebabkan karena Indikator ini sebelumnya tidak digunakan atau tidak menjadi indikator kinerja kunci yang di tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019 – 2024. indikator ini baru di gunakan atau di tuangkan pada RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025 – 2029, namum pada tahun 2025, Organiansi perangkat daerah pengampu urusan pertanahan belum dapat melakukan perhitungan untuk indikator ini karena keterbatasan data base pertanahan.

Tidak adanya data mengenai indikator ini menggambarkan belum baiknya intervensi dan pengawasan pemerintah daerah terhadap kepatuhan pelaku usaha atau pemilik izin lokasi terhadap komitmen investasinya, hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki gambaran riil luas lahan sudah di dimanfaatkan oleh pelaku usaha pada lokasi yang sudah memiliki izin.

Tabel 2.55.
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Pertanahan Tahun 2026.

Ada beberapa faktor yang membuat data indikator ini belum tersedia, diantaranya: (1). Data base pertanahan yang belum baik, (2). Koordinasi yang belum begitu baik antar beberapa instansi terkait dengan updating dan sinkronisasi data izin lokasi yang diterbitkan

melalui sistem OSS dan persetujuan KPPR, (3). lemahnya mekanisme pelaporan pasca diterbitnya izin, dimana pelaku usaha sering kali tidak melaporkan secara berkala progres perolehan tanah dan pemanfaatan fisiknya, (4). faktor keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pada dinas yang mengampu urusan pertanahan membuat program monitoring lapangan dan survey spasial untuk memvalidasi pemanfaatan tanah pada lokasi yang di izinkan tidak dapat dilakukan dengan baik sehingga data tidak terupdate secara periodik.

Dalam upaya penyediaan dan perbaikan kualitas data kedepannya, maka langkah yang perlu dilakukan adalah: (1). penguatan regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mewajibkan setiap pemegang ijin lokasi untuk melaporkan progres pemanfaatan tanah secara periodik di tiap tirwulan atau semester, (2). membentuk tim terpadu yang melibatkan Dinas PTSP, Dinas PUTR, Dinas Perumahan Permukiman, Badan Pertanahan Nasional dan opd teknis terkait lainnya untuk menginvetarisir, monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah, (3). mendorong pengembangan sistem informasi pertanahan, serta (4). melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha/pemilik izin lokasi terkait kepatuhan pelaporan pemanfaatan lahan sesuai dengan izin lokasi peruntukannya.

2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rasio perbandingan antara jumlah tanah yang ditetapkan untuk pembangunan fasilitas umum dengan jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Indikator ini merupakan gambaran keberhasilan Pemerintah daerah dalam menyediakan, melegalkan, dan mengamankan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas umum. Penetapan tanah untuk pembangunan faslitas umum merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan lahan yang akan dibangun fasilitas umum clear and clean sebelum pembangunan dilakukan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir gangguan karena masalah pembebasan lahan saat pembangunan dilakukan.

Data dan informasi penetapan tanah ini digunakan untuk memetakan wilayah mana saja yang status lahannya aman untuk dilakukan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan dan anggaran pada tahun perencanaan.

Data capaian indikator penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dalam lima tahun terakhir dari tahun 2021 - 2025 belum dapat disajikan, hal ini tentunya harus menjadi evaluasi karena ketersediaan data ini dibutuhkan untuk menunjang penetapan lokasi pembangunan di daerah. Data persentase penetapan tanah ini merupakan data penting yang harus dimiliki sehingga kedepannya harus ada upaya dari dinas pengampu urusan pertanahan untuk menyediakan data tersebut. Data ini menggambarkan tentang kesiapan lahan dan legalitas lahan yang akan dibangun fasilitas umum, lewat penetapan tanah baik berupa SK keputusan penetapan lokasi, maupun sertifikat hak pakai/aset pemda.

Tabel 2.56.
Persentase PenetapanTanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum
Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Pertanahan Tahun 2026.

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan target indikator ini, diantaranya: data base pertanahan yang belum baik, koordinasi dan sinergitas antar organisasi perangkat daerah yang belum baik, kompleksitas pengadaan tanah, fluktuasi harga tanah, keterbatasan anggaran daerah.

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah perbaikan data base pertanahan berbasis spasial, penguatan koordinasi dengan organisasi perangk daerah, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, pembentukan bank tanah, percepatan penyerahan PSU pengembang

perumahan ke Pemerintah Daerah, serta monitoring lapangan secara berkala untuk updeting data pertanahan.

3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

Indikator persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal adalah indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah menyediakan lahan yang berstatus clean and clear serta di dukung oleh regulasi tata ruang yang sesuai untuk kegiatan investasi. Indikator ini menggambarkan daya saing daerah dalam menarik investor melalui kepastian lokasi pembangunan untuk kegiatan investasi. Penyediaan lokasi pembangunan ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi pelaku usaha dalam memperoleh lahan serta mepercepat realisasi investasi pasca penerbitan perizinan berusaha.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari 2021 – 2025, data untuk indikator tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal belum dapat disajikan, hal ini disebabkan karena Indikator ini sebelumnya tidak digunakan atau tidak menjadi indikator kinerja kunci yang di tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019 – 2024. indikator ini baru di gunakan atau di tuangkan pada RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025 – 2029, namum pada tahun 2025, Organisasi perangkat daerah pengampu urusan pertanahan belum dapat melakukan perhitungan untuk indikator ini karena keterbatasan data base pertanahan.

Tabel 2.57.
Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Pertanahan Tahun 2026.

Dalam pencapaian target indikator penyediaan lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal, terdapat beberapa

kendala utama yang sering dihadapi, diantaranya: ketidak sesuaian tata ruang dengan lokasi yang diminati investor, keterbatasan infrastuktur pendukung, kompleksitas pengadaan lahan, Integrasi rencana tata ruang dengan sistem OSS (online single submission), serta belum adanya dokumen rencana umum penanaman modal.

Peningkatan capaian indikator ini dapat dilakukan dengan mempercepat penetapan Rencana Detail Tatat Ruang dan disertai dengan pengintegrasian dengan sistem OSS untuk memberikan kepastian hukum zonasi wilayah yang diminati investor, pengembangan infrastruktur pendukung pada kawasan-kawasan strategis, serta penyederhanaan proses izin lokasi.

4. Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur capaian reformasi agraria, mengurangi ketimpangan penguasaan/kepemilikan tanah serta untuk memastikan tanah terdistribusi dengan baik. Redistribusi tanah bukan sekedar membagikan lahan secara gratis kepada masyarakat, melainkan upaya untuk penataan pertanahan dengan melakukan penataan dalam penguasaan/kepemilikan tanah serta pemanfaatan tanah demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, dengan memastikan legalitas kepemilikan atas lahan terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun data Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan absente dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.58.
Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap
distribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan
absente Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	NA	NA	100	100	100

Sumber : Dinas Pertanahan Tahun 2026.

Tabel diatas memperlihatkan capaian indikator ini tahun 2023 – 2025, dimana capaian indikator ini 100 persen, sementara untuk tahun 2021 dan 2022 tidak diperoleh data capaian dari indikator tersebut. Dalam pemenuhan indikator ini terdapat beberapa hambatan, yang ditemui diantaranya : data base pertanahan yang belum baik dan belum terintegrasi spasial sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi tanah absente dan tanah kelebihan maksimum, banyaknya lahan yang belum memiliki sertifikat, potensi konflik sosial dan resitensi msyarakat karena penolakan pemilik lahan dalam penetapan objek landreform,serta proses penyelesaian ganti kerugian untuk tanah kelebihan maksimun yang sering terkendala karena ketidaksepakatan nilai ganti rugi.

Untuk itu kedepanya, diperlukan perbaikan data base pertanahan dengan digitalisasi dan integrasi data spasial, optimalisasi panitia pertimbangan landreform, sosialisasi dan edukasi terkait aturan-aturan pertanahan terutama tentang kelebihan tanah maksimum dan tanah absente, penguatan koordinasi lintas sektor, serta monitoring secara berkala untuk update data pertanahan.

5. Tersedianya tanah untuk masyarakat

Tersedianya tanah untuk masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam menyediakan dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap lahan yang memiliki kepastian hukum. Penyediaan tanah untuk masyarakat

merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan dalam hal penguasaan tanah, sehingga dapat disediakan ruang hidup yang lebih layak dan aman dengan memberikan tanah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat digunakan untuk permukiman dan sumber penghidupannya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2021-2025 data indikator tersedianya tanah untuk masyarakat belum dapat disajikan, hal ini disebabkan karena Indikator ini sebelumnya tidak digunakan atau tidak menjadi indikator kinerja kunci yang di tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019–2024, sehingga pengukurannya tidak dilakukan oleh dinas pengampu urusan pertanahan. Indikator ini baru di gunakan atau di tuangkan pada RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025–2029, namun pada tahun 2025, Organisasi perangkat daerah belum dapat menyajikan data indikator tersebut. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan data base pertanahan yang terintegrasi. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan capaian indikator ini yakni : keterbatasan kewenangan daerah dalam hal pendaftaran tanah, pelepasan kawasan hutan menjadi APL menyebabkan daerah tidak dapat menyediakan tanah dari hasil reformasi agraria, keterbatasan fiskal daerah menyebabkan daerah kesulitan dalam melakukan pengadaan tanah untuk mengoptimalkan fungsi bank tanah, sengketa atau konflik tanah, serta sulitnya menyakinkan masyarakat untuk melaksanakan program konsolidasi tanah.

Kedepanya untuk dapat menyajikan data dan meningkatkan capaian indikator ini, maka diperlukan perbaikan atau pemutakhiran data base pertanahan, identifikasi dan inventarisasi tanah yang dapat diberikan rekomendasi untuk membuka lahan, penguatan gugus tugas atau tim pertanahan lintas sektoral, penguatan skema konsolidasi tanah yang bertujuan untuk penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah, penguatan program reformasi agraria dan percepatan program sertifikasi lahan, serta pembentukan dan pemanfaatan bank tanah.

Tabel 2.59.
Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat
Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Pertanahan Tahun 2026.

6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Sengketa tanah garapan adalah perselisihan hukum atau konflik sosial yang timbul karena adanya klaim kepemilikan atau penguasaan pada satu objek lahan yang sama. Sengketa ini muncul dikarenakan beberapa hal di antaranya: administrasi pertanahan yang belum baik, lonjakan nilai ekonomi tanah karena pembangunan dan berkembangnya investasi, serta desakan kebutuhan akan ruang yang makin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan tuntutan ekonomi masyarakat.

Sengketa tanah garapan harus dapat diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar, penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan lewat jalur litigasi (hukum/pengadilan) dan jalur non litigasi (musyawarah, mediasi dan fasilitasi). dalam penanganan sengketa tanah garapan di daerah, sebaiknya dilakukan melalui musyawarah untuk tetap menjaga kohesi sosial masyarakat dan untuk menghindari biaya dan waktu yang terbuang karena penyelesaian persoalan sengketa, serta untuk menghindari konflik antar masyrakat, karena itulah dibutuhkan kehadiran pemerintah daerah untuk menjadi mediator/fasilitator dalam penyelesaian sengketa agar dapat meminimalisir potensi konflik di masyarakat karena dampak dari sengketa tanah.

Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi di Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir cenderung fluakuatif, dimana di tahun 2023 capaiannya ada diangka 33,3 % kemudian meningkat menjadi 70 % di tahun 2022, dan turun kembali menjadi 54 % ditahun 2023, dan kemudian meningkat lagi menjadi 100 % di 2024, yang merupakan pencapaian tertinggi penyelesaian

sengketa tanah garapan dalam kurun lima tahun terakhir, dan kemudian turun menjadi 40 % di tahun 2025. Adapaun data capaian penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi tahun 2021-2025 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.60.
Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	33,3	70	54	100	40

Sumber : Dinas Pertanahan Tahun 2026.

Penaganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi ini masih fluktuatif dikarenakan beberapa faktor yakni : data administrasi pertanahan yang belum baik, posisi tawar yang berbeda antara pihak yang mengusai atau memanfaatkan dengan pihak yang memiliki alas hak, luasan lahan yang berbeda antara di sertifikat dengan kondisi real di lapangan, alas hak yang tidak ada, keterbatasan saksi-saksi yang mengetahui sejarah atau asal usul lahan, kepentingan pihak tertentu, keterbatasan SDM, serta keraguan atau kurang percayanya masyarakat terhadap netralitas pemerintah daerah sebagai mediator.

Upaya peningkatan pencapaian indikator ini dapat dilakukan dengan perbaikan data administrasi pertanahan dengan penguatan data pertanahan di tingkat Desa/Kelurahan, peningkatan program penataan tanah dengan program sertifikasi lahan/PTSL, peningkatan kompetensi SDM mediator, pembentukan tim terpadu lintas sektoral, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

2.4.4.1.8. Urusan Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup suatu daerah yang diukur melalui beberapa dimensi utama, seperti kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan. Indikator ini menjadi

tolak ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Luwu.

Pada periode tahun 2021 – 2025, capaian IKLH Kabupaten Luwu menunjukkan pola yang belfluktuasi. Pada tahun 2021, IKLH Kabupaten Luwu tercatat sebesar 46,69, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 71,89, pada tahun 2023 dan tahun 2024 menurun menjadi 48,15 dan 48,48 kemudian kembali meningkat secara signifikan menjadi 81,98. Fluktuasi capaian IKLH tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan hidup di Kabupaten Luwu belum stabil dan masih sangat dipengaruhi oleh dinamika pada kompoenen penyusunnya. Peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2025 diduga dipengaruhi oleh membaiknya kualitas pada salah satu atau beberapa indikator utama, seperti meningkatnya tutupan lahan, pengendalian pencemaran air, atau perbaikan kualitas udara. Sebaliknya, penurunan pada tahun 2023 dan stagnansis pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya komponen indikator komposit yang tidak dapat diukur capaiannya, yaitu indeks kualitas air.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan dan menjaga stabilitas capaian IKLH, antara lain melalui penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, perlindungan serta rehabilitasi kawasan hutan dan lahan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta integrasi kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan agar setiap kegiatan pembangunan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan upaya tersebut, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Luwu dapat meningkat secara berkelanjutan dan memberikan dukungan optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta Persetujuan/Perizinan Usaha dan/atau Kegiatan di bidang Lingkungan Hidup (PUU LH) merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan dokumen dan persetujuan lingkungan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

Tingkat ketaatan ini sangat menentukan kualitas lingkungan hidup daerah, karena pelanggaran terhadap izin lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Rendahnya tingkat kepatuhan umumnya disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban lingkungan, belum optimalnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah, serta belum konsistennya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pada tahun 2021 – 2023, data belum tersedia karena kegiatan pengawasan belum dilaksanakan, kemudian pada tahun 2024 ketaatan penanggungjawab usaha mencapai 100% dan pada tahun 2025 menurun menjadi 83,33%. Hal ini disebabkan oleh adanya 1 perusahaan dari 6 perusahaan yang diawasi tidak menaati pengawasan pengendalian air (PPA) sehingga hal ini menyebabkan Air Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional Stone Crusher mengalir ke sungai yang berdampak terjadinya kekeruhan air sungai, dan material dari galian/pengerukan jatuh ke badan sungai yang menyebabkan kekeruhan air dan penyempitan aliran air sungai.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap pelaku usaha, khususnya pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan air limbah sesuai standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah juga perlu

menerapkan sanksi administratif secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang terjadi guna meningkatkan efek jera dan kepatuhan.

Terlaksananya pengelolaan sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten merupakan indikator yang menggambarkan tentang total volume sampah yang ditangani di suatu daerah. Data dibawah ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan capaian pada tahun 2025, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa koreksi dalam perhitungan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota.

Tabel 2.61.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Skor Indeks	46.69	71.89	48.15	48.48	81.98
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	%	N.a	N.a	N.a	100	83.33
3	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	0.20	0.20	0.20	70.98	37.81

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peran strategis dalam penyediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Data kependudukan tersebut menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendukung perumusan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Di kabupaten luwu Kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode tahun 2021–2025 dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama (IKK outcome), yang meliputi persentase perekaman KTP

elektronik, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), persentase kepemilikan akta kelahiran, serta tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.

Secara umum, capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu menunjukkan hasil yang cukup baik, khususnya pada indikator perekaman KTP elektronik dan kepemilikan akta kelahiran yang berada pada kategori sangat tinggi dan relatif stabil. Persentase perekaman KTP elektronik berada pada kisaran 92,30% hingga 98,79%, dengan kecenderungan meningkat kembali setelah penurunan pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan perekaman KTP elektronik telah berjalan optimal melalui berbagai inovasi layanan, termasuk pelayanan jemput bola dan peningkatan akses layanan di tingkat kecamatan dan desa.

Selanjutnya, capaian kepemilikan akta kelahiran kabupaten Luwu juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rentang capaian 95,63% hingga 98,40%. Tingginya capaian tersebut mengindikasikan bahwa integrasi layanan pencatatan sipil dengan fasilitas kesehatan serta kesadaran masyarakat kabupaten Luwu terhadap pentingnya dokumen akta kelahiran telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sebagian kecil penduduk yang belum memiliki akta kelahiran akibat keterlambatan pelaporan peristiwa kelahiran.

Namun demikian, capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) masih relatif rendah dan berfluktuasi pada kisaran 30,03% hingga 42,93%. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA di kabupaten Luwu belum berjalan optimal, yang disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kolektif di satuan pendidikan, serta belum kuatnya kewajiban administratif kepemilikan KIA dalam berbagai layanan publik.

Sementara itu, pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah melalui perjanjian kerja sama menunjukkan kondisi stagnan pada angka 2,86% selama periode lima tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi dan pemanfaatan data lintas perangkat daerah belum berkembang secara optimal, yang antara lain disebabkan oleh terbatasnya jumlah OPD yang melakukan kerja sama, belum optimalnya implementasi kebijakan Satu Data Daerah,

serta masih rendahnya pemahaman teknis dalam pemanfaatan data kependudukan.

Dari sisi faktor pendukung, peningkatan capaian kinerja didorong oleh penguatan layanan berbasis digital, inovasi pelayanan jemput bola, serta peningkatan akses layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan turut memberikan kontribusi positif terhadap capaian indikator kinerja. Adapun faktor penghambat utama meliputi keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, rendahnya kepemilikan KIA, serta belum optimalnya integrasi dan pemanfaatan data kependudukan antar perangkat daerah.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator ini, kabupaten Luwu memerlukan beberapa upaya strategis, antara lain berupa peningkatan cakupan layanan perekaman KTP elektronik melalui penguatan layanan mobile service, optimalisasi sosialisasi dan pelayanan kolektif KIA di satuan pendidikan, serta percepatan digitalisasi layanan pencatatan sipil. Selain itu, perlu dilakukan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Daerah melalui peningkatan jumlah perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah serta peningkatan kapasitas SDM pengelola data. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Luwu diharapkan dapat semakin mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis data di masa mendatang.

Tabel 2.62.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	97,07	92,30	97,50	98,79	98,00
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,03	42,93	34,46	33,73	38,36
3	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	95,63	98,38	97,98	97,39	98,4

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.6. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Urusan Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karenanya masyarakat bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki peran dalam menentukan arah kemajuan desanya sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting agar potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan secara optimal. Kinerja urusan ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu persentase pengentasan desa tertinggal dan persentase peningkatan status desa mandiri.

Persentase pengentasan desa tertinggal kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2021–2025 menunjukkan kecenderungan fluktuatif dengan tren menurun. Pada Tahun 2021 capaian sebesar 25,12 persen, kemudian menurun menjadi 19,32 persen pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 22,71 persen, namun kembali menurun pada Tahun 2024 sebesar 19,8 persen dan Tahun 2025 menjadi 18,35 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan desa tertinggal belum optimal dan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kapasitas kelembagaan desa, serta belum meratanya pengembangan potensi ekonomi lokal.

Sementara itu, **persentase peningkatan status desa mandiri** di kabupaten Luwu menunjukkan tren yang positif dan signifikan. Capaian pada Tahun 2021 sebesar 0,97 persen meningkat secara bertahap menjadi 1,45 persen pada Tahun 2022, 5,31 persen pada Tahun 2023, 14,49 persen pada Tahun 2024, dan 17,87 persen pada Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa,

serta penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten Luwu, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, percepatan pembangunan infrastruktur dasar desa, penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan desa. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan intensif pada desa tertinggal serta penguatan sinergi lintas perangkat daerah agar intervensi pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Dengan upaya tersebut, diharapkan percepatan pengentasan desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri di kabupaten Luwu dapat tercapai secara lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.63.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	25,12	19,32	22,71	19,80	18,35
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,97	1,45	5,31	14,49	17,87

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Luwu selama periode 2021–2025 diukur melalui beberapa indikator utama yaitu Total Fertility Rate (TFR), Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), dan unmet need. Ketiga indikator tersebut menggambarkan dinamika pengendalian jumlah penduduk serta efektivitas pelayanan keluarga berencana di daerah.

Indikator **Total Fertility Rate (TFR)** menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Dalam periode 2021–2025, TFR mengalami fluktuasi,

yaitu dari 2,86 pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,11 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 2,42 pada tahun 2023 dan relatif stabil pada angka 2,33 pada tahun 2024 hingga 2025. Penurunan TFR pada periode akhir menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian angka kelahiran, meskipun sempat terjadi peningkatan pada tahun 2022 yang diduga dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan KB pada masa pemulihan pasca pandemi serta penundaan penggunaan kontrasepsi.

Indikator **Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)** menggambarkan tingkat penggunaan alat kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur. Capaian mCPR menunjukkan pola fluktuatif, yaitu 67,95% pada tahun 2021, menurun menjadi 50,25% pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 65,29% pada tahun 2023 dan 66,07% pada tahun 2024, sebelum sedikit menurun menjadi 61,77% pada tahun 2025. Penurunan signifikan pada tahun 2022 mengindikasikan adanya gangguan akses pelayanan KB, sementara pemulihan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan kembali layanan dan kesadaran masyarakat, meskipun belum sepenuhnya stabil.

Sementara itu, indikator **unmet need** menunjukkan persentase pasangan usia subur yang membutuhkan layanan KB namun belum menggunakannya. Capaian unmet need mengalami perbaikan signifikan, yaitu dari 12,41% pada tahun 2021 meningkat tajam menjadi 33,56% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 14,85% pada tahun 2023, 13,1% pada tahun 2024, dan mencapai 6,77% pada tahun 2025. Penurunan yang cukup drastis pada akhir periode menunjukkan peningkatan efektivitas pelayanan KB, perluasan jangkauan layanan, serta peningkatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Secara umum, kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu menunjukkan kecenderungan perbaikan, ditandai dengan penurunan TFR dan unmet need serta pemulihan mCPR setelah penurunan pada tahun 2022. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas capaian mCPR serta memastikan pemerataan akses pelayanan KB di seluruh wilayah.

Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB hingga wilayah terpencil, penguatan edukasi dan konseling keluarga berencana secara berkelanjutan, serta penguatan distribusi alat kontrasepsi yang merata dan berkesinambungan. Selain itu, diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah desa, fasilitas kesehatan, dan kader KB, guna memastikan kebutuhan ber-KB masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk yang lebih efektif.

Tabel 2.64.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,86	3,11	2,42	2,33	2,33
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate / mCPR)	%	67,95	50,25	65,29	66,07	61,77
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,41	33,56	14,85	13,1	6,77

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.8. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dengan capaian indikator kinerja tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65.

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PERHUBUNGAN						
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Unit/Smp /Jam	0,44	0,45	0,47	0,48	0,52

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2026

Rasio Konektivitas Kabupaten merupakan indikator yang menunjukkan performa layanan dari moda transportasi di suatu

wilayah kabupaten. Baik itu moda transportasi darat, laut sungai atau danau terhadap kebutuhan layanan trayek di wilayah kabupaten/kota. Semakin tinggi frekuensi layanan dari moda transportasi maka bobot terhadap kinerja layanannya akan semakin berpengaruh terhadap peningkatan dari rasio konektivitas. Artinya untuk meningkatkan nilai rasio konektivitas ini, dibutuhkan peningkatan frekuensi layanan serta pemenuhan jumlah trayek terhadap kebutuhan trayek yang ada di wilayah kabupaten. Performa layanan dari moda transportasi di kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir ditunjukkan melalui capaian Rasio Konektivitas Kabupaten yang mana dalam pengukurannya terus mengalami peningkatan. Tercatat dari tahun 2021, rasio konektivitas kabupaten berada pada nilai 0,6 dan terus mengalami peningkatan sampai pada nilai 0,63 pada tahun 2025. Meskipun peningkatan tersebut terlihat belum signifikan, namun perlu diketahui bahwa perubahan pola pemanfaatan moda transportasi umum terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut tentunya tidak lepas dari kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan ini dapat menjadi lebih mudah dan lebih fleksibel. Masyarakat lebih cenderung terhadap sarana transportasi yang dapat diakses lebih cepat dan diperoleh dimanapun. Sehingga pemusatan infrastruktur layanan transportasi seperti shelter dan terminal menjadi tidak begitu aktif untuk beberapa daerah. Namun demikian, eksistensi infrastruktur tersebut masih sangat dibutuhkan untuk mengatur agar layanan trayek lebih terkontrol sehingga meminimalisir kegaduhan trayek, keamanan pengguna transportasi umum dan penataan aktivitas transportasi.

Kinerja lalu lintas Kabupaten merupakan indikator yang menunjukkan aktivitas dari ruas jalan kabupaten. Peningkatan aktivitas dalam suatu ruas akan mempengaruhi kenyamanan dan keamanan penggunaan jalan. Aktivitas yang tinggi dalam suatu ruas jalan kabupaten sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan yang melewati ruas tersebut. Dalam lima tahun terakhir tercatat adanya peningkatan kinerja lalu lintas di kabupaten Luwu. Pada tahun 2021 tercatat kinerja layanan lalu lintas sebesar 0,44 dan terus meningkat menjadi 0,52 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang melintasi ruas kabupaten Luwu. Peningkatan ini paralel dengan adanya peningkatan

aktivitas dalam wilayah kabupaten Luwu dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas pekerja perusahaan tambang, smelter, konstruksi perumahan menyebabkan adanya loncatan volume kendaraan pada waktu-waktu tertentu. Untuk menekan kondisi saturasi dari kendaraan dalam ruas suatu ruas perlu didukung dengan peningkatan kapasitas jalan. Aktivitas yang terus diupayakan oleh pemerintah seperti pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, peningkatan kualitas badan jalan, dan rekayasa lalu lintas diharapkan dapat menurunkan nilai kinerja lalu lintas jalan di kabupaten Luwu kedepannya.

2.4.4.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama pada aspek penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat.

Pada indikator **persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**, capaian menunjukkan tren peningkatan dari 15,79 persen pada tahun 2021 menjadi 24,56 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Luwu dalam mendukung transformasi digital pemerintahan melalui penguatan konektivitas antar perangkat daerah. Namun demikian, capaian tersebut masih tergolong rendah sehingga memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan dan pemerataan akses internet di seluruh OPD.

Sementara itu, indikator **persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi** menunjukkan kondisi stagnan pada angka 64,05 persen selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya digitalisasi layanan publik belum mengalami perkembangan yang optimal, khususnya dalam hal integrasi sistem antar layanan dan pengembangan inovasi layanan berbasis elektronik. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, belum optimalnya interoperabilitas sistem, serta terbatasnya dukungan anggaran untuk pengembangan aplikasi layanan publik.

Pada indikator **persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah**, capaian mengalami peningkatan dari 47 persen pada tahun 2021 menjadi 70 persen pada tahun 2024, namun mengalami penurunan menjadi 60 persen pada tahun 2025. Peningkatan capaian pada periode awal menunjukkan keberhasilan strategi komunikasi publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital. Namun, penurunan pada tahun terakhir mengindikasikan perlunya penguatan kembali strategi diseminasi informasi yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika di kabupaten Luwu ke depan difokuskan pada percepatan transformasi digital pemerintahan melalui peningkatan konektivitas jaringan antar OPD, pengembangan dan integrasi layanan publik berbasis elektronik, serta penguatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Selain itu, peningkatan kualitas komunikasi publik juga menjadi prioritas melalui optimalisasi pemanfaatan media digital, penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penyusunan strategi komunikasi yang lebih efektif dan berbasis data. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.66.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	15.79	15.79	17.54	19.29	24.56
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	%	47	50	60	70	60

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten						

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.10. **Urusan Penanaman Modal**

Investasi yang terjadi pada suatu daerah dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi pembangunan dan perkembangan daerah. Investasi akan mendukung pertumbuhan dunia usaha dan industri kearah yang lebih baik. Adapun faktor yang mendorong peningkatan investasi adalah akselerasi regulasi dan kepastian hukum, stabilitas infrastruktur dan konektivitas serta proaktivitas layanan kawasan. Investasi di Kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan, karena disebabkan adanya perusahaan industri pengolahan, pertambangan, serta energi (pembangkit listrik tenaga air).

Tren **realisasi investasi** dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025, walaupun pada tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 49,81 persen, kemudian kembali tumbuh sebesar 118,44 persen pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena adanya pengoperasian pembangkit listrik tenaga air dan penambahan perusahaan konstruksi pada Smelter nikel serta penambahan perusahaan pada sektor pertambangan. Pertumbuhan investasi ini tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi telah menjadi motor penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja baru, transfer teknologi, dan penguatan struktur ekonomi daerah.

Untuk menjaga momentum pertumbyhan ini dan memastikan target investasi yang lebih tinggi pada tahun mendatang, maka langkah-langkah strategis yang akan dilakukan adalah pemerintah daerah komitmen untuk terus mendorong dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) dan penyusunan dokumen peta potensi Luwu. Dengan adanya dokumen tersebut, maka dengan mudahnya daerah akan mempromosikan keunggulan komparatif daerah khususnya pada hilirisasi pertanian dan perikanan

Tabel 2.67.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PENANAMAN MODAL						
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	72,44	85,60	87,71	-49,81	118,44

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu, capaian indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menggambarkan persentase pemuda di Kabupaten Luwu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri seperti wirausaha, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kegiatan ekonomi kreatif lainnya yang tidak bergantung pada sektor formal. Selama periode 2021–2025, capaian indikator menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi pemuda tercatat sebesar 2,95%, kemudian meningkat menjadi 3,01% pada tahun 2022, 3,03% pada tahun 2023, 3,05% pada tahun 2024, dan mencapai 3,07% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam keterlibatan pemuda pada kegiatan ekonomi produktif. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya akses pemuda terhadap pelatihan kewirausahaan, penguatan program pemberdayaan ekonomi pemuda, serta berkembangnya ekosistem ekonomi digital yang membuka peluang usaha baru. Namun demikian, peningkatan yang masih relatif kecil menunjukkan bahwa tantangan utama masih terletak pada keterbatasan akses permodalan, pendampingan usaha berkelanjutan, serta rendahnya transformasi minat pemuda ke sektor ekonomi produktif. Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan melalui perluasan program inkubasi bisnis pemuda, peningkatan akses pembiayaan usaha, penguatan pelatihan kewirausahaan berbasis digital, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan platform ekonomi digital untuk memperluas peluang usaha pemuda.

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yaitu mengukur tingkat keterlibatan pemuda kabupaten Luwu dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial, serta wadah kemasyarakatan lainnya yang mencerminkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial. Capaian indikator menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 sebesar 3,65%, meningkat menjadi 3,69% pada tahun 2022, 3,75% pada tahun 2023, 3,78% pada tahun 2024, dan mencapai 3,80% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi sosial pemuda meskipun masih dalam skala yang terbatas. Peningkatan tersebut didorong oleh aktivasi kembali organisasi kepemudaan pascapandemi, pelaksanaan program pembinaan organisasi oleh pemerintah daerah, serta meningkatnya kesadaran sosial pemuda di Kabupaten Luwu dalam kegiatan komunitas. Namun demikian, partisipasi pemuda masih menghadapi tantangan berupa pergeseran minat ke aktivitas berbasis digital, rendahnya daya tarik organisasi konvensional, serta kurang optimalnya kaderisasi dan regenerasi organisasi kepemudaan. Untuk meningkatkan capaian indikator ini, diperlukan upaya revitalisasi organisasi kepemudaan berbasis digital, penguatan peran karang taruna dan komunitas lokal, peningkatan program kaderisasi dan kepemimpinan pemuda, serta perluasan ruang partisipasi pemuda dalam proses pembangunan daerah.

Persentase Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional) yaitu mengukur peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Luwu yang ditunjukkan melalui jumlah perolehan medali pada event olahraga tingkat nasional maupun internasional. Selama periode 2021–2025, capaian indikator menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 sebesar 5%, meningkat tajam menjadi 22% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 7% pada tahun 2023 dan 3% pada tahun 2024, serta kembali meningkat signifikan menjadi 63% pada tahun 2025. Fluktuasi capaian tersebut menunjukkan bahwa prestasi olahraga daerah masih dipengaruhi oleh dinamika pembinaan atlet, intensitas keikutsertaan dalam kompetisi, serta ketersediaan dukungan pembinaan olahraga. Peningkatan signifikan pada tahun 2025 mengindikasikan adanya keberhasilan pembinaan atlet dan

peningkatan partisipasi pada event olahraga, namun penurunan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pembinaan masih belum sepenuhnya berkelanjutan dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pembinaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, penguatan pembinaan atlet usia dini melalui talent scouting di sekolah, serta peningkatan kemitraan dengan organisasi olahraga seperti KONI dan cabang olahraga terkait.

Secara umum, kinerja urusan kepemudaan dan olahraga menunjukkan tren positif pada aspek partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi dan sosial, meskipun peningkatannya masih relatif lambat. Sementara itu, capaian prestasi olahraga menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penguatan sistem pembinaan yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda serta prestasi olahraga daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.68.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2,95	3,01	3,03	3,05	3,07
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	3,65	3,69	3,75	3,78	3,80
3	Persentase Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	%	5	22	7	3	63

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.12. Urusan Kebudayaan

Terlestarikannya cagar budaya dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan penyelamatan objek-objek cagar budaya yang ada di wilayah kabupaten Luwu agar tidak mengalami

kerusakan, kepunahan, atau pengalihan fungsi secara ilegal. Capaian indikator tersebut menunjukkan trend yang positif dari 0 persen yang artinya tidak ada cagar budaya yang dilestarikan sehingga pemerintah fokus pada pelestarian cagar budaya tahun 2023 hingga 2025 menjadi 20 persen. hal ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah khususnya bagian kebudayaan untuk menetapkan legalitas cagar budaya melalui surat keputusan kepala daerah dan dinilai oleh tim ahli cagar budaya Provinsi.

Adapun yang harus menjadi perhatian yaitu cagar budaya yang telah dilestarikan maka harus dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah (heritage tourism) edukatif. Integrasi ini akan menciptakan multiplier effect, di mana kelestarian budaya yang terjaga mampu menghasilkan perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Tabel 2.69.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	KEBUDAYAAN						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	0	0	10	15	20

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.13. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Luwu diarahkan untuk mendukung terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis data (*evidence-based policy*). Pemanfaatan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terpadu menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kebijakan serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Dalam periode Tahun 2021–2025, kinerja penyelenggaraan urusan statistik kabupaten Luwu menunjukkan capaian yang sangat optimal. Hal ini tercermin dari indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah, yang secara konsisten mencapai angka **100 persen** setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Luwu telah memanfaatkan data statistik sebagai dasar

dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan data statistik sektoral yang semakin baik, meningkatnya koordinasi antar perangkat daerah, serta peran aktif perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam melakukan pembinaan statistik sektoral. Selain itu, adanya kebijakan yang mendorong penggunaan data dalam setiap tahapan pembangunan turut memperkuat implementasi perencanaan berbasis data.

Meskipun demikian, capaian indikator yang telah mencapai 100 persen perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pemanfaatan data. Penggunaan data statistik tidak hanya sebatas pemenuhan administratif, tetapi juga harus mampu memberikan analisis yang mendalam dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, tantangan ke depan terletak pada peningkatan kualitas data, integrasi sistem data antar sektor, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan analisis data.

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan urusan statistik Kabupaten Luwu ke depan difokuskan pada penguatan implementasi Satu Data Daerah, peningkatan kualitas dan interoperabilitas data statistik sektoral, serta pengembangan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan daerah yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Tabel 2.70.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	STATISTIK						
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	%	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam	%	100	100	100	100	100

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	melakukakn evaluasi pembangunan daerah						

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.14. **Urusan Persandian**

Indikator kinerja *Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah* merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mencakup pengelolaan risiko keamanan informasi, perlindungan data, pengendalian akses, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi insiden siber. Indikator ini secara umum dapat diukur melalui instrumen penilaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI).

Capaian kinerja indikator pada tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 100%, yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah Kabupaten Luwu telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut mencerminkan adanya penguatan tata kelola persandian, peningkatan implementasi kebijakan keamanan informasi, serta dukungan terhadap transformasi digital pemerintahan daerah. Namun demikian, pada tahun 2025 belum dilakukan penilaian Indeks KAMI sehingga belum tersedia data capaian terbaru yang dapat menggambarkan tingkat keamanan informasi secara terukur dan komprehensif. Kondisi ini mengakibatkan belum dapat dilakukannya evaluasi kesinambungan capaian indikator secara penuh pada periode perencanaan.

Adapun faktor yang memengaruhi capaian tersebut antara lain adanya konsistensi implementasi kebijakan keamanan informasi dan penguatan sistem SPBE pada periode 2021–2024, serta belum optimalnya pelaksanaan evaluasi melalui Indeks KAMI pada tahun 2025 yang disebabkan oleh aspek teknis dan penjadwalan evaluasi.

Untuk meningkatkan capaian indikator ke depan, diperlukan upaya strategis berupa pelaksanaan penilaian Indeks KAMI secara berkala dan terjadwal, penguatan tata kelola keamanan informasi daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian

dan keamanan siber, serta penguatan infrastruktur keamanan informasi melalui penerapan sistem pengamanan jaringan dan data yang lebih andal. Selain itu, diperlukan pula sinergi dengan instansi terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka peningkatan standar keamanan informasi pemerintah Kabupaten Luwu.

Tabel 2.71.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PERSANDIAN						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Belum Dilakukan Penilaian Indeks KAMI

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.15. Urusan Perpustakaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa yang bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui gerakan gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan pepustakaan sebagai sumber informasi dan wadah pengembangan literasi masyarakat, dimana Literasi ini sangatlah penting karena merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan rangkaian pembelajaran yang memungkinkan individu untuk dapat mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi penuh dalam masyarakat luas. Sebagaimana diketahui bahwa literasi tidak hanya diukur dari kelancaran membaca teks, tetapi juga dari

kemampuan memahami isi, mengaitkannya dengan pengalaman, dan mampu mengungkapkan kembali pemahamannya.

Urusan perpustakaan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi masyarakat. Indikator kinerja utama yang digunakan dalam urusan ini meliputi Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang mencerminkan perilaku membaca masyarakat serta kualitas ekosistem layanan literasi di daerah.

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM) merupakan instrumen strategis untuk mengukur budaya membaca masyarakat dengan menilai fase pra-membaca, saat membaca, pasca-membaca (durasi aktivitas membaca dalam kurun waktu tertentu), serta interaksi dengan perpustakaan (frekuensi kunjungan), adapun indikator ini menghadirkan gambaran menyeluruh tentang perilaku, kebiasaan dan minat individu terhadap bahan bacaan. Selama periode tahun 2021–2024, capaian TKM kabupaten Luwu menunjukkan kondisi yang relatif stagnan, yaitu berada pada kisaran 65,33 hingga 65,35. Hal ini mengindikasikan bahwa minat dan kebiasaan membaca masyarakat telah terbentuk, namun belum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2025, nilai TKM mengalami penurunan menjadi 60,41. Penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh perubahan metode dan instrumen pengukuran yang dilakukan secara nasional. Berdasarkan interpretasi terbaru, nilai tersebut menunjukkan bahwa perilaku membaca masyarakat sudah berjalan, namun belum terintegrasi secara kuat dan belum merata di seluruh wilayah.

Sementara itu, **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)** sebuah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan layanan perpustakaan dan tingkat pemanfaatan sarana literasi oleh masyarakat di suatu wilayah. Indikator ini menitikberatkan pada kinerja dan layanan perpustakaan sehingga bukan hanya melihat seberapa sering dikunjungi namun lebih fokus pada ketersediaan akses dan fasilitas perpustakaan itu sendiri. Berdasarkan Hasil perhitungan capaian indikator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu capaian IPLM kabupaten Luwu pada tahun 2021–2023 menunjukkan tren stagnan di kisaran 65,33 hingga

65,35. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 78,69 yang menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan dan pengelolaan perpustakaan. Namun, pada tahun 2025 nilai IPLM tercatat sebesar 5,53, hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan dan pendekatan pengukuran yang lebih komprehensif yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional.

Beberapa faktor yang memengaruhi masih rendahnya capaian indikator tersebut antara lain belum optimalnya integrasi ekosistem literasi antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat; keterbatasan akses terhadap bahan bacaan; serta belum maksimalnya pemanfaatan layanan perpustakaan, baik secara fisik maupun digital. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengarahkan masyarakat pada aktivitas literasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator urusan perpustakaan, arah kebijakan difokuskan pada penguatan ekosistem literasi yang terintegrasi dan inklusif. Upaya yang dilakukan antara lain melalui integrasi siklus literasi (pra, saat, dan pasca membaca) dalam program daerah, peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan perpustakaan, serta perluasan akses terhadap sumber daya informasi. Selain itu, peningkatan infrastruktur perpustakaan, pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan, serta pemanfaatan teknologi digital juga menjadi strategi penting untuk mendorong peningkatan minat baca dan literasi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat dapat meningkat secara merata dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Tabel 2.72.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PERPUSTAKAAN						
1	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65,33	65,34	65,35	65,35	60,41
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	65,33	65,34	65,35	78,69	5,53

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.2.16. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis bukti. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai rekaman kegiatan, tetapi juga sebagai alat bukti yang sah serta sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data kinerja Tahun 2021–2025 kabupaten Luwu, capaian indikator urusan kearsipan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Indikator **tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional** berada pada angka 80 persen selama periode 2021 hingga 2023, kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2024 dan 2025. Hal yang sama juga terjadi pada indikator **tingkat keberadaan dan keutuhan arsip**, yang menunjukkan capaian kinerja yang identik. Berdasarkan data capaian masing-masing indikator pada tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa permasalahan dihadapi yang jadi tantangan yakni antara lain belum tersedianya fasilitas kearsipan yang cukup memadai (Depo arsip), tidak memiliki depo arsip atau pusat penyimpanan arsip yang layak merupakan kendala serius dalam manajemen kearsipan, dimana hal tersebut bisa berdampak pada terjadinya penumpukan dokumen, hingga hilangnya memori organisasi serta risiko keamanan arsip. Oleh karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu kedepan diharapkan memiliki depo arsip bisa memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan dokumen karena dampaknya berkaitan dengan keamanan, efisiensi, dan penyelamatan arsip daerah.

Oleh karena itu, arah kebijakan urusan kearsipan difokuskan pada penguatan digitalisasi arsip, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan pembinaan kearsipan, serta pengembangan sistem kearsipan yang terintegrasi antar perangkat daerah. Dengan langkah tersebut, diharapkan pengelolaan arsip di Kabupaten Luwu dapat semakin mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.73.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	KEARSIPAN						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	80	80	80	100	100
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	80	80	80	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.4.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.4.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Total produksi perikanan adalah akumulasi hasil kegiatan perikanan tangkap dan perikan budidaya yang mencakup ikan, udang, rumput laut dan biota air lainnya. Tahun 2025 adalah tahun pertama RPJMD Kabupaten Luwu (2025-2029), dengan target total produksi perikanan tahun 2025 sebesar 684.720,66 ton. Total Produksi sektor perikanan Kabupaten Luwu lima tahun terakhir (2021-2025) mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 645.919 ton, hingga tahun 2025 mencapai 685228,95 ton. Berdasarkan capaian tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 101%. Untuk meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Luwu pada tahun 2027 dengan target produksi 701.838,70 diperlukan kebijakan pengembangan usaha perikanan melalui upaya Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar dan hilirisasi produk perikanan.

Data capaian produksi perikanan Kabupaten Luwu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PERIKANAN						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	645.91 9	666.82 9	666.78 7	671.05 4	685.22 8,95

Sumber: Dinas Perikanan, Tahun 2025.

2.4.4.3.2 Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu instrumen strategis daerah dalam menggerakkan roda perekonomian, memperluas lapangan kerja, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan sektor ini diukur melalui lima Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencakup aspek kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara), optimalisasi sarana penunjang (akomodasi), hingga kontribusi riil pariwisata terhadap makro ekonomi daerah (PDRB dan PAD). Pemantauan indikator ini menjadi landasan untuk melihat efektivitas kebijakan promosi, pengelolaan destinasi, serta daya tarik investasi sektor pariwisata di kabupaten.

Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara menunjukkan tidak adanya pertumbuhan atau nihilnya kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk secara langsung ke Kabupaten Luwu. Kondisi ini dapat dipicu oleh faktor geografis (bukan gerbang masuk utama internasional), keterbatasan aksesibilitas langsung, kurangnya promosi di kancah global.

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara mengalami peningkatan yang signifikan dimulai dari angka 0,14 persen sampai tahun 2025 sebesar 138,94 persen. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan perhitungan pada dinas pariwisata. Pada tahun 2024 banyaknya tempat wisata yang dikelola oleh swasta sehingga banyaknya kunjungan wisata, adanya optimalisasi promosi antardaerah, serta tingginya minat masyarakat nusantara untuk mengunjungi destinasi wisata di kabupaten Luwu.

Sejalan dengan lonjakan wisatawan domestik, tingkat hunian akomodasi merangkak naik signifikan dari 47,22 persen tahun 2021 hingga 93,10 persen tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas akomodasi di daerah sudah beroperasi hampir mendekati kapasitas penuh (full occupancy). Hal ini berdampak langsung pada perputaran ekonomi penyedia jasa akomodasi dan kuliner lokal.

Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bergerak naik secara konstan setiap tahun, yaitu 0,67 persen tahun 2021 hingga 0,84 persen tahun 2025. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan membuktikan bahwa sektor pariwisata secara nyata menyumbang nilai tambah ekonomi yang terus membesar bagi struktur PDRB kabupaten Luwu.

Peningkatan paling signifikan secara proporsional terlihat pada kontribusi terhadap PAD. Dari angka yang sangat kecil yaitu 0,0002 persen pada tahun 2021 naik menjadi 0,23 persen. hal ini terjadi lompatan multiplier ekonomi yang baik. Peningkatan kunjungan domestik dan keterisian hotel sukses dikonversi menjadi sumber pendapatan daerah melalui penarikan pajak hotel, restoran, retribusi tempat rekreasi, dan parkir.

Tabel 2.75.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PARIWISATA						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	0	0	0	0
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	0,14	0,06	0,03	100,24	138,94
3	Tingkat hunian akomodasi	%	47,22	46	57,6	88	93,10
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,67	0,73	0,77	0,80	0,84
5	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	0,0002	0,04	0,10	0,12	0,23

Sumber: Dinas Pariwisata, Tahun 2026.

Adapun strategi yang akan dilakukan agar terus meningkatkan sektor pariwisata yaitu fokuskan pada digitalisasi pemasaran, kolaborasi dengan komunitas lokal, penyelenggaraan

acara (event) tematik secara berkala, dan peningkatan kualitas pelayanan serta kebersihan untuk memperkuat branding destinasi.

2.4.4.3.3 Urusan Pertanian

Produktivitas padi adalah jumlah produksi per satuan luas lahan yang diukur dalam satuan ton per hektar (ton/ha). Pengukuran dilakukan oleh BPS melalui survei ubinan. Produksi padi (gabah) dapat dipengaruhi oleh luas lahan, pupuk, bibit, hama, dan Irigasi, serta tenaga kerja. Produktivitas pertanian padi Kabupaten Luwu lima tahun terakhir (2021-2025). Pada tahun 2021 mencapai 6,5 ton/ha mengalami penurunan hingga tahun 2025 hanya mencapai 5,54 ton/ha. Faktor utama penyebab menurunnya produktivitas padi di kabupaten Luwu adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga volume produksi belum maksimal. Adanya kerusakan infrastruktur Irigasi menyebabkan sebagian petani tidak turun sawah, masih kurangnya alat pertanian yang modern, minimnya akses bibit unggul dan pebtisida pembasmi organisme pengganggu tanaman.

Dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian padi Kabupaten luwu diperlukan penyediaan psarana dan prasarana yang memadai. kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan modernisasi pertanian. Prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur irigasi, mekanisasi pertanian yang lebih modern, penyediaan bibit unggul tahan hama dan kekeringan, perbaikan indeks pertanaman (IP200-IP300), penggunaan pupuk kimia dengan organik yang berimbang, pengendalian hama dan penyakit terpadu serta peningkatan sumber daya manusia tenaga kerja pertanian padi.

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular adalah indikator kinerja yang mengukur pengurangan kasus penyaki hewan menular pada periode tertentu dari periode sebelumnya. Pada tahun 2025 jumlah kejadian kasus penyakit menular di Kabupaten luwu meningkat drastis sebesar 223% disebabkan karena adanya penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak sapi. Hal menyebabkan menurunnya persentase capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian.

Dalam rangka penurunan persentase kejadian kasus penyakit hewan diperlukan upaya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada

hewan ternak yang meliputi penyediaan sarana dan prasaranan vaksinasi, biosekuriti ketat (sanitasi kandang dan disinfeksi), peningkatan daya tahan tubuh hewan dengan vitamin dan obat-obatan, serta upaya pencegahan melalui pembatasan lalu lintas ternak, serta isolasi hewan yang sakit. Hal ini perlu menjadi perhatian terkait penganggaran program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Berikut capaian kinerja Produktivitas Padi dan Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2025:

Tabel 2.76.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PERTANIAN						
1	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Ton/ha	6,5	6,4	6,3	6,1	5,52**
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10	10	60	-22	-223

Sumber: Dinas Pertanian, 2026.

2.4.4.3.4 Urusan Perdagangan

Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) merupakan rekomendasi izin di bidang perdagangan, khususnya untuk sektor Usaha Perdagangan Melalui Sistem Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan (Perdagangan Eceran/Ritel Modern). Setelah hasil rekomendasi dari bidang perdagangan maka akan ditindaklanjuti oleh bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) dari tahun 2021 sampai tahun 2025 semakin meningkat yaitu 92,33 persen (2021) sampai 98,95 persen (2025). Hal ini menunjukkan tren yang sangat positif dalam kepatuhan regulasi sektor perdagangan. Sektor ritel modern atau pasar swalayan Kabupaten Luwu telah bergerak ke arah yang lebih formal, terlindungi dengan hukum dan telah terdaftar pada OSS RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*).

Pemerintah daerah terus mendorong agar semua toko swalayan atau ritel modern agar bermohon pada dinas perdagangan untuk rekomendasi izin usaha yang akan disampaikan pada dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu agar menerbitkan NIB (Nomor induk berusaha).

Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku merupakan pilar utama dalam mewujudkan Daerah Tertib Ukur (DTU) dan perlindungan konsumen. Apabila peningkatan persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku mencerminkan semakin tingginya jaminan akurasi transaksi perdagangan di masyarakat. Capaian indikator tersebut mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir dan menurun pada tahun 2025 sebesar 85,25 persen, namun masih menunjukkan tren yang positif. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat ketidaksesuaian ukuran, takaran atau timbangan. Semakin mendekati angka 100 persen maka daerah semakin tertib ukur.

Hal yang perlu dilakukan agar capaian ini meningkat, maka adanya pemerintah berkomitmen untuk menjalankan tera berkeliling atau setiap pasar berlangsung maka dilakukan tera sah, serta dinas perdagangan rutin melakukan pengawasan UTTP.

Tabel 2.77.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PERDAGANGAN						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	%	92,33	94,10	95,88	97,33	98,95
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	84,22	86,07	91,02	91,73	85,25

Sumber: Dinas Perdagangan, 2026.

2.4.4.3.5 Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian Kabupaten Luwu dilaksanakan oleh dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dengan capaian indikator kinerja dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PERINDUSTRIAN						
1	Pertumbuhan Industri	%	4,11	4,87	5,02	5,09	5,14
2	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	90	90	90	90	98
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Unit	2050	2150	2258	2373	2495
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	n.a	4	5	7	0
5	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Kemasan	n.a	20	20	21	1000

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, 2026.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan industri terus mengalami peningkatan selama tahun 2021-2025 seiring dengan meningkatnya proporsi jumlah industri kecil dan menengah. Namun, disisi lain cakupan pembinaan kelompok pengraji menunjukkan penurunan. Hal ini perlu mendapat dukungan pemerintah daerah agar sektor industri rumah tangga dapat bersaing di era digital saat ini, melalui pelatihan keterampilan SDM, peningkatan kualitas produk melalui standar mutu, kemudahan kredit uaha rakyat, serta digital marketing.

2.4.4.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Fungsi Keuangan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan transparansi, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini bahwa **rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan** mengalami tren penurunan dari 12,44 persen tahun 2021 menjadi 11,41 persen tahun

2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya efisiensi iaya birokrasi, sehingga alokasi anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum mengalami peningkatan bertahap dari 81,09 persen tahun 2021 hingga mencapai 84,97 persen tahun 2025. Hal ini menunjukkan fokus pengeluaran yang semakin besar pada urusan pemerintahan wajib dan pilihan utama di luar pengeluaran transfer.

Opini Laporan Keuangan mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara konsisten selama 5 tahun berturut-turut (2021–2025). Ini membuktikan komitmen mutlak dalam akuntabilitas dan kesesuaian standar akuntansi pemerintahan.

Deviasi Realisasi Belanja mengalami penurunan persentase dari 99,06 persen tahun 2021 menjadi stabil di kisaran 93,49 persen tahun 2025. Penurunan deviasi (mendekati angka realisasi riil) menunjukkan kualitas perencanaan belanja yang semakin realistis dan eksekusi program yang makin presisi.

Manajemen aset dengan status yang tersedia dari tahun 2021 hingga 2025 yang berarti bahwa sistem inventarisasi dan pengelolaan aset daerah telah berjalan sesuai regulasi.

Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja APBD mengalami tren yang fluktuatif namun cenderung terkendali di angka yang rendah. Sempat turun dari 4,59 persen (2021) ke 2,03 persen (2023), lalu sedikit meningkat ke 3,47 persen (2025). Angka yang kecil ini menandakan perencanaan anggaran yang semakin matang sehingga sisa anggaran (SiLPA) tidak menumpuk sia-sia.

Rasio PAD menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten, naik dari 0,08 persen tahun 2021 menjadi 0,15 persen tahun 2025. Meskipun angkanya secara nominal terlihat kecil, pertumbuhan dua kali lipat ini menandakan adanya upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan mandiri daerah.

Deviasi Realisasi PAD berada pada level yang sangat rendah dan stabil, berkisar antara 0,92 persen tahun 2021 hingga 1,34 persen tahun 2025. Hal ini menandakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan setiap tahunnya sangat akurat dan hampir selalu terealisasi sesuai proyeksi.

Di bidang **transparansi dan keterbukaan informasi publik**, Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan capaian sempurna sebesar 100 persen secara berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 untuk kedua indikator ini. Capaian ini menegaskan ketaatan daerah dalam mengimplementasikan amanat undang-undang terkait keterbukaan informasi publik, di mana seluruh dokumen, laporan, dan akses informasi keuangan daerah dibuka secara transparan agar dapat diawasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Tabel 2.79.
Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Keuangan Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	FUNGSI KEUANGAN						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	12,44	12,57	11,32	11,73	11,41
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	81,09	83,17	83,36	83,91	84,97
3	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Deviasi Realisasi Belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	99,06	99,06	93,93	93,95	93,49
5	Manajemen Aset	Data	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi a
6	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,59	4,08	2,03	2,08	3,47
7	Rasio PAD	%	0,08	0,09	0,12	0,13	0,15
8	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	1,11	1,12	0,92	0,96	1,34
9	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100
10	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapenda dan BKAD, 2026.

Secara umum, kinerja Fungsi Keuangan selama periode 2021–2025 telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditandai dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP, keterbukaan informasi publik yang paripurna, akurasi target PAD yang presisi, serta efisiensi pada belanja pegawai non-pelayanan dasar. Rekomendasi untuk

tahun anggaran berikutnya adalah untuk terus mendorong peningkatan Rasio PAD secara lebih progresif guna memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam mendanai pembangunan secara mandiri.

Capaian SPIP pada Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi **stabil pada Level 3 (terdefinisi)**. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kerangka pengendalian intern telah tersedia, terdokumentasi, dan dilaksanakan secara konsisten di lingkungan perangkat daerah. Namun demikian, belum terdapat peningkatan menuju level yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa implementasi SPIP masih memerlukan penguatan terutama pada aspek integrasi berbasis risiko dan internalisasi dalam proses manajemen kinerja. Stabilitasnya capaian ini dipengaruhi oleh konsistensi penerapan kebijakan pengendalian intern, keberlanjutan pembinaan dari pemerintah pusat, serta meningkatnya kepatuhan perangkat daerah. Di sisi lain, belum optimalnya integrasi SPIP dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian internal, menjadi faktor yang menahan peningkatan capaian.

Indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan ukuran kemampuan kelembagaan pengawasan internal pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, profesional, dan independen.

Sementara itu, kinerja penyelenggaraan fungsi pengawasan yang diukur melalui capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Luwu selama tahun 2021–2025 berada pada **Level 3 (terdefinisi)** dan menunjukkan kondisi yang tidak mengalami perubahan selama periode lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa APIP telah memiliki struktur kelembagaan dan standar prosedur pengawasan yang jelas serta telah melaksanakan fungsi pengawasan secara rutin. Namun demikian, peningkatan kapabilitas menuju level yang lebih tinggi belum tercapai yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia pengawasan, khususnya dari aspek kompetensi teknis lanjutan, serta belum optimalnya peran APIP sebagai early warning

system dan advisory dalam pengambilan kebijakan strategis pemerintah daerah.

Secara umum, capaian kinerja fungsi perencanaan melalui indikator SPIP dan Kapabilitas APIP kabupaten Luwu selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi **stabil pada Level 3**, yang mencerminkan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan internal telah berjalan dengan baik namun belum mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada periode perencanaan berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis diantaranya : penguatan implementasi SPIP berbasis risiko pada seluruh perangkat daerah serta integrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah; Peningkatan kapasitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta sertifikasi jabatan fungsional auditor; Penguatan peran APIP sebagai mitra konsultatif dan sistem peringatan dini (early warning system) dalam pengambilan keputusan; Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan internal melalui pengembangan audit berbasis digital; dan Penguatan komitmen pimpinan daerah dalam membangun budaya pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.80.
Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PERENCANAAN						
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

Indikator kinerja penyelenggaraan **Urusan Pengadaan** terdiri atas tiga indikator utama. Pertama, *persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama*, yang mengukur ketepatan waktu pelaksanaan kontrak proyek konstruksi lintas tahun pada awal tahun anggaran. Semakin tinggi capaian indikator ini menunjukkan semakin baiknya percepatan pelaksanaan proyek konstruksi yang bersifat carry over.

Kedua, *persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif*, yang menggambarkan proporsi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui mekanisme persaingan seperti tender atau seleksi dibandingkan dengan total pengadaan. Indikator ini mencerminkan tingkat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Ketiga, *rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan*, yang menunjukkan proporsi belanja daerah yang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa terhadap total belanja daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat pemanfaatan sistem pengadaan dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah.

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Pengadaan kabupaten Luwu Tahun 2021–2025, indikator pertama yaitu persentase proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama menunjukkan capaian yang sangat rendah, yaitu 0% pada tahun 2021 dan 2022, meningkat sangat kecil menjadi 0,07% pada tahun 2023, kemudian kembali tidak mengalami capaian pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan penandatanganan kontrak proyek lintas tahun pada awal tahun anggaran masih belum optimal. Selanjutnya, indikator persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 sebesar 19,98%, menurun menjadi 12,41% pada tahun 2022 dan 10,31% pada tahun 2023, kemudian sempat meningkat menjadi 17,56% pada tahun 2024, namun kembali menurun tajam menjadi 3,07% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme kompetitif masih belum stabil dan cenderung menurun. Adapun indikator rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 sebesar 50,38% menjadi 54,17% pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya sebesar 57,88% pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan masing-masing menjadi 54,28% dan 44,67%. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan porsi belanja yang disalurkan melalui mekanisme pengadaan formal pada dua tahun terakhir.

Fluktuasi dan penurunan capaian indikator kinerja Urusan Pengadaan di Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya kesiapan perencanaan pengadaan pada

awal tahun anggaran, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan proses pemilihan penyedia. Selain itu, masih terdapat kecenderungan penggunaan metode pengadaan non-kompetitif untuk paket-paket tertentu, baik karena sifat kegiatan yang mendesak maupun nilai paket yang relatif kecil.

Faktor lainnya adalah belum optimalnya sinkronisasi antara proses perencanaan anggaran dan pengadaan, yang berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan proyek, termasuk proyek konstruksi lintas tahun. Di samping itu, kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan yang belum merata antar perangkat daerah juga turut memengaruhi kualitas dan metode pelaksanaan pengadaan.

Dalam rangka peningkatan kinerja Urusan Pengadaan di kabupaten Luwu, diperlukan upaya strategis antara lain percepatan perencanaan pengadaan, peningkatan penggunaan metode pengadaan kompetitif, Penguatan peran UKPBJ, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengadaan, Penguatan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pengadaan serta Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik.

Tabel 2.81.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengadaan Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	PENGADAAN						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	19,98	12,41	10,31	17,56	3,07
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	50,38	54,17	57,88	54,28	44,67

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

Urusan Kepegawaian merupakan salah satu unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Evaluasi kinerja pada urusan ini dilakukan melalui beberapa indikator kinerja utama (IKK)

yang mencerminkan kualitas pendidikan aparatur, profesionalitas jabatan fungsional, serta tingkat sertifikasi kompetensi ASN.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu, capaian indikator kinerja urusan Kepegawaian selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan tinggi (minimal strata satu) dan pendidikan menengah/dasar pada perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan.

Realisasi indikator pada tahun 2021 sebesar 0,35 meningkat menjadi 0,40 pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,35 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 0,293. Namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan menjadi 5,07. Fluktuasi capaian tersebut dipengaruhi oleh dinamika kepegawaian, antara lain proses pensiun ASN, rekrutmen pegawai baru, serta belum optimalnya regenerasi pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi pada periode tertentu. Adapun lonjakan pada tahun 2025 perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut terkait konsistensi data dan metode perhitungan indikator. Kedepan, diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan ASN melalui penguatan kebijakan rekrutmen berbasis kualifikasi, peningkatan kapasitas melalui tugas belajar, serta penyusunan kebutuhan formasi berbasis kompetensi.

Tabel 2.82.

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian Tahun 2021-2025

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	KEPEGAWAIAN						
1	Rasio Pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,35	0,40	0,35	0,293	5,07
2	Rasio pegawai fungsional (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,29	0,60	0,58	0,243	0,24
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat (Tidak	%	0,29	0,60	0,58	100	100

No.	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Termasuk guru dan tenaga kesehatan)						

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

2.5. CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Indikator Pembangunan Daerah adalah proses penilaian terhadap sejauh mana target-target pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan telah dicapai oleh suatu daerah. Pada subbab ini akan menguraikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu dan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 6 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Luwu. Berikut data pencapaian kedua indikator tersebut.

2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Tahun 2025

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 terdapat 35 indikator tujuan dan sasaran, namun yang ditetapkan menjadi IKU kepala daerah sebanyak 19 indikator yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja tujuan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran.

Berikut matriks pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Luwu tahun 2021-2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 yang ditetapkan. Uraian narasi atau penjelasan terkait masing-masing indikator terdapat pada uraian subbab Aspek-Aspek Pembangunan Daerah yang disajikan pada subbab sebelumnya.

Tabel 2.83.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025

Tujuan/ Sasaran	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
Tujuan 1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	48,30	53,38	57,36	59,73	63,45
Sasaran 1	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,03	5,69	5,64	4,36	7,43
Sasaran 2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,80	3,85	3,70	4,14	3,71
Tujuan 2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Pengeluaran perkapita	Ribu Rupiah	10.116	10.308	10.691	11.121	11.634
Sasaran 4	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	12,53	12,49	12,71	11,7	10,97
Sasaran 5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP	Skor	60,88	61,81	62,18	62,18	62,55
Sasaran 6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Skor	51,43	75,32	79,92	64,58	64,58
Sasaran 7	Terwujudnya Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Skor	19,59	42,38	44,95	44,22	49,34
Tujuan 4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,92	72,42	73,23	73,86	74,66
Tujuan 5	Meningkatnya Usaha Agribisnis yang Berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	Skor	43,58	46,48	51,00	49,82	Belum rilis
		Indeks Ekonomi Biru	Skor	N.A	N.A	79,47	79,50	Belum rilis
Sasaran 13	Berkembangnya Kegiatan Usaha Pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/Ha	6,50	6,42	6,30	6,10	6,20
Sasaran 14	Berkembangnya Kegiatan Usaha Perikanan	Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton/Ha	7,30	7,80	7,86	8,04	10,02
Sasaran 15	Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	81,28	81,88	81,61	82,23	71,45
Sasaran 16	Meningkatnya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas Wilayah	%	N.A	N.A	N.A	13,2	19,68
Sasaran 17	Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	%	37,9	77,73	69,86	68,17	68,17

Tujuan/ Sasaran	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
	minum yang layak bagi masyarakat							
Sasaran 19	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	%	0,97	1,45	5,31	14,49	17,87
Tujuan 8	Meningkatnya Ketahanan terhadap Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca	%	N.A	N.A	N.A	10	Belum rilis
Sasaran 21	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	46,69	71,89	48,15	48,48	81,98

2.5.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025

Capaian indikator kinerja daerah kabupaten Luwu mencakup Aspek Geografi dan Demografi yang meliputi; Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan, Lingkungan hidup Berkualitas, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dan Demografi. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi; Kesejahteraan Ekonomi, Kesehatan Untuk Semua, Pendidikan Berkualitas yang Merata, Perlindungan Sosial yang Adaptif, Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju dan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif. Aspek Daya Saing Daerah meliputi; Daya Saing Sumber Daya Manusia, Iptek, Inovasi dan Produktivitas, Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Ekonomi Makro. Aspek Pelayanan Umum Meliputi; Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial, Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

Capaian indikator kinerja dari setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Luwu selama periode 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Aspek Geografi dan Demografi							
1	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	n.a	252,26	24.928,66	24.625,78	24.625,78
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	7,93	10,79	7,61	6,8	4,86
3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81,28	81,88	81,61	82,23	71,45
4	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	78,80	78,00	81,20	77,00	90,60
5	Kapasitas Air Baku	m³/detik	n.a	n.a	n.a	448,51	448,51
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	n.a	n.a	14,77	44,76	45,5
II. Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pertumbuhan PDRB	%	6.03	5,69	5,64	4,36	7,43
2	Laju Inflasi	%	0,65	5,13	2,21	1,87	1,55
3	PDRB per Kapita	Juta Rp	48,55	54,03	57,36	59,73	63,45
4	Angka Melek Huruf	%	93,62	96,29	96,35	95,07	95,16
5	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,35	8,48	8,73	8,81	8,96
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,39	13,4	13,41	13,43	13,44
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,44	70,75	71	71,23	73,85
8	Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,19	0,1	0,1
9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,22	72,94	65,64	68,31	67,74
10	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	66,25	70,13	72,53	65,48	84,54
11	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,43	11,33	12,82	11,37	15,61
12	Ketersediaan pangan utama	%	68,78	82	78,54	n.a	720,75
13	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	53,21	53,8	52,49	51,73	50,65
14	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,07	10,27	10,77	11,09	11,19
15	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,94	3,83	3,8	4,10	4,78
16	Pertumbuhan Industri	%	4,10	4,87	5,02	5,09	5,14
III. Aspek Daya Saing Daerah							
1	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Juta Rupiah	0,93	0,90	0,94	1,02	1,14
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	48,36	44,51	43,39	45,25	47,37
3	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (keterbukaan ekonomi)	%	0,79	0,83	0,83	-0,15	-1,6
4	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	n.a	85,29
5	Rasio ketergantungan	%	61,33	47,35	46,98	45,51	48,47
VI. Aspek Pelayanan Umum							
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	n.a	2,82	2,79	3,32	3,36
2	Indeks SPBE	Angka	2,29	2,26	2,58	2,60	2,75
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	n.a	2,15	2,48	2,40	2,40
4	Indeks Survey Penilaian Integritas	Angka	75,50	75,64	74,39	73,98	76,44
5	Nilai MCP KPK	Angka	65,00	68,00	57,00	49,00	53,10

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Indeks Maturitas SPIP	Angka	2,8	3	3	3	3
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB							
A.1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1. PENDIDIKAN							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	93,66	93,48	40,98	93,53	39,12
1.2	Angka partisipasi kasar:						
1.2.1	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	94,36	94,47	98,48	99,84	102,6
1.2.2	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	80,93	95,00	79,76	99,46	104,12
1.2.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	%	83,170	89,71	93,73	79,47	99,97
1.3	Angka Partisipasi Murni :						
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94,14	93,63	98,48	79,57	92,18
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	96,56	95,49	79,76	76,53	80,92
1.4	Angka partisipasi sekolah :						
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	94,14	94,35	98,48	68,56	99,39
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	96,08	95,06	79,76	75,70	98,50
1.5	Angka Putus Sekolah:						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,83	0,78	0,09	2,56	0,03
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,04	3,42	2,79	2,8	1,82
1.6	Angka Kelulusan:						
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	95,58	89,71	93,83	2,56	99,97
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,04	90,51	81,59	2,80	100
1.7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,8	98,46	81,9	98,00	76,01
1.9	Fasilitas Pendidikan:						
1.10	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	16,44	14,6	58,27	86,73	23,06
1.11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Per 10.000 penduduk	67,36	67,25	31,72	42,18	95,41
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Per 10.000 murid	715,44	671,59	n.a	807,36	876,37
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	93,62	96,29	96,35	95,07	95,16
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	84,24	72,06	89,96	48,46	73,29
1.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	91,85	93,48	n.a	29,85	32,63
2 KESEHATAN							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	8,26	13,21	15,34	11,4	11,18
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98.87	97,36	98,70	98,86	988,82
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	9,66	14,04	16,27	2,29	0,430
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	6,55	10,57	15,71	10,39	9,245
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	233,75	181,7	129,39	166,29	86,003

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Angka	0,01	0,014	13,08	15,11	16,9185
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Angka	0,00064	0,00064	0,00064	0,00062	0,61760
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00515
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Angka	0,00012	0,00015	0,0002	0,0003	0,2395
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0,0012	0,00135	0,0016	0,0047	0,2395
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	73,34	64,78
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89,45	73,49	75,82	58,52	56,76
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	97,36	97,36	97,36	97,80	96,78
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
2.15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100	100	100	100	100
2.16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	0,75	8	6,79	4,3	2,363
2.17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100
2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Per 100.000	54,33	77,31	75,00	68,65	68,65
2.19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	142,6	214,97	207,97	222,76	199
2.20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	12,79	14,6	11,02	17,79	17
2.21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	50,38	71,11	67,89	74,06	67
2.22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	45,48	47,83	34,7	16,13	91,63
2.23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
2.24	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	32,151
2.25	Angka kejadian Malaria		117	160	n.a	n.a	3114
2.26	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	100
2.27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Angka	0	0,015	2,57	0,0095	0,009
2.28	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	56.66	75,43	100	100	14.409
2.29	Cakupan kunjungan bayi	%	100	93,14	100	61,36	97,03
2.30	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100
2.31	Cakupan pembantu puskesmas	%	52,86	53,74	54,63	56,39	77,09
2.32	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	84,11	70,63	70,42	53,56	52,68
2.33	Cakupan pelayanan nifas	%	87,83	72,21	75,22	58,68	55,56
2.34	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	32,91	100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
2.35	Cakupan pelayanan anak balita	%	70,33	72,28	66,45	74,1	71,59
2.36	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	80,66	85,29	88,16	92,5	97,6
2.37	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	75,4	83	85,49	94,22	92,04
2.38	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
2.39	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap/ Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	34,55	48,32	30,17	30,67	31,80
3.2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	17,76	21,66	23,34	24,11	25,46
3.3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	0,0061	0,0061	0,0059	0,0103	0,0101
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	86,53	86,53	76,65	76,88	75,99
3.5	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	7,71	7,71	2,63
3.6	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	47,56	53,65	60,39	69,19	69,19
3.7	Persentase penduduk berakses air minum	%	81,4	81,47	81,83	80,41	81,08
3.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	68,36	69,56	69,88	70,12	70,85
3.9	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	n.a	n.a	n.a	n.a	3,11
3.10	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	n.a	n.a	n.a	n.a	0,3
3.11	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	6,15	5,92	5,29	5,65	5,16
3.12	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	46,18	46,5	46,5	47,3	9,78
3.13	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	8,26	8,91	10,48	0,12	0,135
3.14	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,0000001
3.15	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	35,27	35,45	35,45	33,92	36,25
3.16	Tingkat Mobilitas (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,87	0,87	0,683	0,588	0,608
3.17	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	%	5,415	6,028	9,66	10,43	10,57
3.18	Persentase pembangunan turap di wilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	n.a	n.a	n.a	n.a	28,43
3.19	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana	%	80	82	n.a	50,75	0,56

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	kebinamargaan dalam kondisi baik						
3.20	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	100,00	67,00	n.a	0,12	0,5614
3.21	Ketaatan terhadap RTRW	%	n.a	n.a	n.a	n.a	36,10
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
4.1	Rasio rumah layak huni	Angka	0,207	0.202	0,197	0,199	0,194
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0688	0.075	0,075	0,07	0,07
4.3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	n.a	n.a	n.a	n.a	89,27
4.4	Cakupan Layanan rumah Layak Huni yang terjangkau	%	n.a	n.a	n.a	n.a	77,78
4.5	Rasio permukiman layak huni	Angka	0,97	0.97	0,97	0,971	0,971
4.7	Persentase permukiman yang tertata	%	0,224	0.240	0.240	0,14	0,02
4.8	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	3,88	5,62	5,62	6,22	25,04
4.9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	1.60	5.98	5.98	5,99	1,65
4.10	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	97	74,89	3,64	n.a	n.a
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,63	0,31	0,70	0,50	100,00
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan)	%	100	70	100	100	100,00
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	95,00	95,00	66,14	66,14	100,00
5.4	Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	90,38	86,95	70,11	23,52	100,00
5.5	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00
5.6	Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara	Persen	0,00	85,00	100,00	80,00	85,00
5.7	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	60,00	30,00	90,00	85,00	95,00
5.8	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	%	25,00	90,00	100,00	95,00	85,00
5.9	Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	%	0,00	95,00	100,00	95,00	95,00
6	SOSIAL						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100,00	97,00	98,00	54,00	71,55
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	30,45	95,00	97,00	54,00	71,55

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	12,35	98,00	98,00	55,00	71,79
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	100,00	100,00	90,00	88,00	100,00
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	92,00	98,00	100,00	100,00
6.6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100,00	100,00	100,00	93,00	100,00
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	69,12	n.a	98,00	81,00	89,33
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1 TENAGA KERJA							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	n.a	n.a	0	0	0,71
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	11,36	4,71	1,45	20,89	22,94
1.4	Keselamatan dan perlindungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3,77
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	76,51	71,93	56,10	77,94	81,62
1.6	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	41,11	81,68	87,27	54,93	12,56
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	80,00	48,00	32,00	48,00	72,73
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	21,09	5,34	15,00	0,12	0,26
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	5,71	5,71	2,86	2,86	11,43
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	75,00	27,00	6,30	n.a	22,19
2.4	Rasio KDRT	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005
2.5	Cakupan Perempuan dan anak Korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu						
2.7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	18,51	0,00	75,00	100,00	100,00
2.9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	6,85	100,00	0,00	0,00	100,00
2.10	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.11	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	%	94,14	n.a	0,00	100,70	100,00
2.12	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	%	96,56	n.a	0,00	97,60	100,00
2.13	Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1,02	n.a	0,00	98,00	99,92
2.14	Indeks Pembangunan Gender	%	92,58	92,79	92,79	92,80	92,83
3	PANGAN						
3.1	Ketersediaan pangan utama	Kg	845,75	824,21	785,41	750,09	720,25
3.2	Ketersediaan energi perkapita	Energi per Kapita	6.132	6.103	7.590	7.399	7.474
	Ketersediaan protein perkapita	Protein per kapita	180,00	181,00	203,00	214,70	215,00
4	PERTANAHAN						
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	118,95	49,33	0,07	26,25	15
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	33,33	70,00	53,85	66,67	40
5	LINGKUNGAN HIDUP						
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	50	50	67	70	77,28
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	90,12	91,7	91,61	92,44	80,,41
5.6	Hasil Pengukuran indeks Kualitas tutupan lahan	Indeks	n.a	n.a	n.a	50,43	68,08
5.7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5.8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	n.a	100	100	100	100
5.9	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang di awasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan, izin PPLH dan PU U LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	n.a	100	100	n.a	83,33
5.10	Timbulan sampah yang ditangani	%	77,13	69,50	22,60	79,11	37,81
5.11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	7,53	24,87	7,65	0,20	20,70
5.12	Persentase cakupan area pelayanan	%	27,27	27,00	27,27	50,00	2,10
5.13	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	77,13	31,94	30,25	79,11	37,81
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
6.1	Rasio Penduduk ber-KTP per satu penduduk	Rasio	0,97	0,92	0,97	0,99	97,66
6.2	Rasio Penduduk ber-KK	Rasio	0,34	0,99	0,99	0,76	99,7
6.3	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,96	0,98	0,98	0,97	96,14
6.4	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,2	0,42	0,43	0,48	49,14
6.5	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.7	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	95,63	98,38	97,98	97,39	97,66
6.8	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	95,63	98,38	98,50	97,39	52,62
6.9	Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah ke dalam database	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	98,55	57,97	57,97	60,39	57,97
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah	228,00	227,00	227,00	227,00	213
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
7.4	Persentase LSM aktif	%	44,06	44,06	44,06	8,60	12,20
7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	0,00	0,88	0,88	0,88	1,00
7.6	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.7	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	93,02	95,14	100,00	100,00
7.8	Jumlah BUMDes Bersama	Jumlah	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Nilai	1,37	1,35	1,35	1,34	0,97
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	3,11	2,41	2,33	2,33
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	8,57	20	57,89	62,00	21,05
8.4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Nilai	3	3	3	3	3
8.5	Rasio Akseptor KB	Rasio	78,87	87,16	60,47	73,39	87,51
8.6	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	67,95	50,25	65,29	66,07	61,77
8.7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	0,89	0,95	0,88	0,36	0,79
8.8	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,41	33,56	14,85	9,26	0,79
8.9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	23,73	30,58	26,48	24,94	21,77
8.10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	126,78	114,73	165,36	136,25	16,2
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	61,44	84,35	37,88	50,64	87,62
8.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	50,17	10,69	16,21	29,91	38,26
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	40,71	6,90	8,48	7,19	8,29
8.14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	9,09	9,09	13,63	100
8.15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	165,18	140,90	140,90	136,36	313,64
8.16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	90,00	100,00
8.17	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100
8.18	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	182,07	128,05	127,16	143,44	151,59
8.19	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	43,75	45,83	100	100	91,08
9	PERHUBUNGAN						
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	254.613	265.585	257.593	255.011	270,351
9.2	Rasio ijin trayek	Rasio	0	0	0	0	0,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1.924	1.400	0	978	662
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut	Jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1
9.5	Jumlah Bandara	Jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1
9.6	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	1
9.7	Persentase layanan angkutan darat	%	8,75	8,79	26,24	29,41	25,78
9.8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	35,40	50,80	100,00	62,10	52,71
9.9	Pemasangan Rambu-rambu	%	13,30	0,80	4,20	0,00	65,00
9.10	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02
9.11	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	233.908	244.755	226.623	203.714	241.558
9.12	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	250.341	265.585	257.593	218.286	241.558
9.13	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Ton	531	588	572	467	462
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	N.a	N.a	N.a	N.a	40
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80	85	90	90	92
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	86,48	84,15	83,99	84,21	81,38
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	55,41	55,27	62,56	67,01	72,31
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	35	40	50	60	65
10.6	Jumlah Server yang di kelola	Jumlah	10	10	11	10	10
10.7	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	Jumlah	7	8	8	8	8
10.8	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Tersedia / Belum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10.9	Persentase Website OPD	%	30,00	40,00	43,00	51,42	51,42
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
11.1	Persentase koperasi aktif	%	18,00	21,04	41,27	41,63	100,00
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	36,77	30,38	35,00	6,40	100,00
11.3	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah	25.221	26.121	26.500	8.538	8.630
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	90,13	90,47	6,40	6,40	100,00
11.5	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	Jumlah	18,00	18,00	92,00	18,00	18,00
12	PENANAMAN MODAL						
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	13	13	5.046	2.897	2.582
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	17,53	17,53	2.570	5.079	3.910,96
12.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	2,71	7,46	2,05	2,08	0,74
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	n.a	n.a	n.a	n.a	118,44

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
12.5	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,75	87,75	87,00	87,80	92,12
12.6	Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama	Kerja sama	n.a	n.a	n.a	n.a	1,00
12.7	Jumlah kegiatan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Investor	13	13	122	44	0
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	50	75	25	100	100
13.2	Cakupan pembinaan olahraga	%	n.a	80	50	0	57
13.3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	n.a	25	20	58	65
13.4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	n.a	65	3	0	60
13.5	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	n.a	25	45	9	10
13.6	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	n.a	8	6	5	10
13.7	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah	31	24	28	51	17
13.8	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah	2	1	23	3	10
13.9	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah	n.a	2	9	2	2
13.10	Jumlah Organisasi Olah Raga	Jumlah	1	24	33	3	3
13.11	Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif	%	50	80	30	100	100
13.12	Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	%	n.a	15	20	0	40
13.13	Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun	Jumlah	n.a	5	6	4	2
13.14	Jumlah Klub Olah Raga	Jumlah	n.a	22	15	0	22
13.15	Jumlah Gedung Olahraga	Jumlah	1	1	1	1	40
13.16	Jumlah Lapangan Olahraga	Jumlah	229	229	229	229	40
13.17	Jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jumlah	n.a	2	0	5	5
14	STATISTIK						
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.4	Buku "PDRB"	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	PERSANDIAN						
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
15.2	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Dalam perencanaan untuk dilakukan penilaian indeks KAMI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
16	KEBUDAYAAN						
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	2	2	2	1
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	8	8	8	8	20
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	n.a	0	2	0	0
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	13	13	13	17	5
17	PERPUSTAKAAN						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	21.868	26.224	28.580	30.798	18,479
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	48.912	49.746	52.067	52.067	1.274.350
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,00077	0,00077	0,00077	0,00077	3,48
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan	Jumlah	911	1.093	1.191	1.283	1.540
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	52.377	52.377	52.377	52.067	52.267
17.6	Persentase pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	58,33	61,54	77,78
17.7	Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola	Jumlah	113	113	113	113	113
17.8	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi	Jumlah	0	0	0	0	1
17.9	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	Jumlah	2	2	2	2	3
18	KEARSIPAN						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
18.2	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah	5	6	7	8	9
18.3	Jumlah Arsip daerah yang dikelola	Jumlah	5	5	7	7	8
18.4	Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Jumlah	10	11	12	13	13
C.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.1	Jumlah Produksi perikanan	ton	645.919,16	666.829,06	666.787,25	671.054,41	685.228,95
1.2	Angka Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	54,21	54,84	55,89	56,26	57,50
1.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	4,01	17,15	3,13	6,26	4,07
1.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	41,18	42,25	42,85	45,69	48,33
2	PARIWISATA						
2.1	Kunjungan wisata	Jumlah	1.800	800	308	55.354	10,00
2.2	Lama kunjungan Wisata	hari	1	1	1	1	2
2.3	PAD sektor pariwisata	%	0,02	0,004	0,002	3,76	0,00068

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	Jumlah	11	11	11	11	21
2.5	Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	Jumlah	27	27	29	29	64
2.6	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	Jumlah	20	20	20	20	24
2.7	Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2	2	2	2	2
2.8	Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar		3	3	3	3	3
2.9	Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	Jumlah	1	1	1	1	2
2.10	Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	Jumlah	2	2	2	2	3
2.11	Jumlah Objek Wisata dikelola dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	Jumlah	0	3	1	0	0
2.12	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	Jumlah	1	1	1	1	1
2.13	Jumlah Objek wisata yang dikelola oleh Swasta	Jumlah	3	3	3	3	5
3 PERTANIAN							
3.1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija)	Rp.Juta	1.249.42	1.249.42	1.448.138,20	n.a	3.675,80
3.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	7	7	12,68	n.a	51,11
3.3	Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Rp.Juta	2.631.475,00	2.631.475,00	3.822.220,80	n.a	2.793,89
3.4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	53,21	53,21	33,47	n.a	38,85
3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	n.a	6,4	6,3	6,1	6,2
3.6	Cakupan bina kelompok petani	%	5,84	9,61	30,47	4,18	16
4 PERDAGANGAN							
4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta Rupiah	938.022,49	291.417,31	0	0	0
4.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	65,64	n.a	n.a	n.a	n.a
5 PERINDUSTRIAN							
6.1	Pertumbuhan Industri	%	4,11	4,87	5,02	5,09	5,14
6.2	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	n.a	4	5	7	0
6.3	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Jumlah	n.a	20	20	21	1000
7 TRANSMIGRASI							
7.1	Transmigran swakarsa	KK	50	50	37	26	17,93
7.2	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	12	12	13	184,5	184,5
7.3	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	254	254	254	254	254

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
D.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	74,72
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100
2	KEUANGAN						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jenis Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,59	4,43	2,03	2,08	3,47
2.3	Persentase program dan kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,45	0	0	1,99	4,23
2.4	Persentase belanja pendidikan	%	27,76	26,81	29,32	30,01	31,42
2.5	Persentase belanja kesehatan	%	17,13	17,85	18,82	22,27	25,28
2.6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,2	0,2	0,33	0	0,36
2.7	Penetapan APBD	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20,58	12	70,77	16,23	61
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5,25	3,64	16,52	5,48	4,6
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	15	13,21	8,23	4,33	2,9
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	37	37	37	38	34
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	208	207	201	198	186
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	3348	3948	3935	3812	3602

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100
4.3	PENERAPAN SIDA :						
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100	100	100
E.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
5	PENGAWASAN						
5.1	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	83,00	80,00	81,00	85,00	82,98
5.2	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00
5.3	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	90,00	100,00	90,00	100,00	100,00
5.4	Persentase pelanggaran pegawai yang diproses	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5.5	Jumlah temuan BPK	Jumlah	14	7	12	16	18
F.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
6	SEKRETARIAT DEWAN						
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	SEKRETARIAT DAERAH						
7.1	Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan	%	70,00	90,00	95,00	96,00	97,00
7.2	Persentase UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	%	100	100	100	100	100
7.3	Persentase Paket Tender yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	97	97	100
7.4	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	100	100	100	100	100
7.5	Persentase Asset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi	%	97,00	97,00	97,00	97,00	98,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
7.6	Nilai LPPD	Nilai	29,74	34,50	24,15	3,20	Belum rilis
7.7	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	90	90	100	100	100
7.8	Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN	%	100	100	100	100	100
7.9	Persentase ketersediaan analisis jabatan	%	100	100	100	100	100
7.10	Tingkat kematangan UKPBJ	%	1/9	1/9	4/9	7/9	9/9
G.	UNSUR KEWILAYAHAN						
9	KECAMATAN						
9.1	Jumlah Kecamatan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di atas 80%	jumlah	22	22	22	22	22
9.2	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100
9.3	Persentase Konflik yang tertangani di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100

2.5.3. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pemerintah Kabupaten Luwu telah menerapkan standar pelayanan minimal guna mengetahui ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar. Adapun capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Luwu tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.85.
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2025

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
1.	PENDIDIKAN							
1.1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	93,66	58,4	53,56	53,56	66,71
		Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,71	97,04	97,60	97,60	99,39

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
		(SD/Mi,SMP/MTs)						
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	30,21	4,92	9,03	9,03	15,62
1.2	Pendidikan Dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	N.a	43,79	40,05	66,23	73,93
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	N.a	32,84	33,03	62,82	73,07
		Indeks iklim keamanan di satuan pendidikan	Angka	N.a	74,25	67,64	75,9	78,98
		Indeks iklim kebinekaan di satuan pendidikan	Angka	N.a	70,32	63,18	74,2	73,17
		Indeks iklim inklusivitas di satuan pendidikan	Angka	N.a	58,67	52,62	57,74	61,17
1.3	Pendidikan Menengah Pertama	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Angka	N.a	53,88	52,08	57,35	57,25
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Angka	N.a	49,11	51,7	49,15	56,68
		Indeks iklim keamanan di satuan pendidikan	Angka	N.a	67,75	64,04	71,31	70,20
		Indeks iklim kebinekaan di satuan pendidikan	Angka	N.a	66,07	65,76	73,51	71,90
		Indeks iklim inklusivitas di satuan pendidikan	Angka	N.a	55,73	54,48	57,4	56,88
1.4	Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan	%	N.a	70,25	61,92	61,92	61,78

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
		minimal akreditasi B						
1.5	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D4	%	N.a	58,73	65,1	65,1	62,66
2.	KESEHATAN							
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	100	89,16	93,92	96,82	94,20
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	98,98	99,09	99,63	98,28
2.3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	97,72	97,84	99,29	96,51
2.4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	86,73	91,55	96,46	87,62
2.5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	99,95	90,67	96,3	98,81
2.6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	87,66	95,61	99,16	96,78
2.7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	62,43	97,42	97,97	98,10
2.8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	72,21	91,31	98,01	98,41
2.9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang	%	100	100	100	97,89	98,78

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
		mendapatkan pelayanan kesehatan						
2.10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	100	91,6	96,56	99,03	99,55
2.11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	91,04	90,41	82,1	94,65
2.12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	94,89	92,93	75,6	87,52
3	PEKERJAAN UMUM							
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	88,5	81,47	81,83	80,41	81,08
3.2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelohan air limbah domestic	%	98,78	81,65	75,95	75,98	75,99
4.	PERUMAHAN RAKYAT							
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program	%	N.a	0	0	N.A	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
	relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Pemerintah Daerah						
5	TRANTIBUNLINMAS							
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/kota	%	100	100	100	89,88	96,57
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	80,42	68,08	26,68	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	25	34,89	26,68	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	26,68	100
5.5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	90	70,11	100	64,70
6	SOSIAL							
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100	92	100	90,15	100
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	95	100	100	100

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100	95	100	100	100
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	95	100	76,25	80,33
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jamninan sosial pada saat dan setelah tangga darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	95	100	100	100

Sumber : OPD Pengelola SPM, Kabupaten Luwu 2026.

2.5.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusifdan terlaksananya tatakelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas

pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Terdapat tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (human development), di antaranya pendidikan, kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (social economic development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan (environmental development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.86.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2025

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tujuan SDGs 01 :	MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
Target 1.1 :	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrem	BPS	%	2,61	1,97	1,50	0,70	0,15
Target 1.2 :	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	12,53	12,49	12,71	11,70	10,97
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	BPS	%	12,53	12,49	12,71	11,70	10,97
Target 1.3 :	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.3.1.[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS/TN2K: Basis Data Terpadu, BPJS Kesehatan	%	N.A	88,6	N.A	90,62	95,00
1.3.1.[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	%	76,51	71,93	56,1	58,06	92,90
Target 1.4 :	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	BPS : Sensus Penduduk, Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 1.5 :	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000 orang	74,02	73,55	879,25	1855,66	144451
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	BPBD	%	N.A	N.A	37,5	25	40
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN								
Target 2.1 :	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun							
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Dinas Ketahanan Pangan	%	7,93	10,79	7,61	6,8	4,86
Target 2.2 :	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	%	22,8	25,7	32,1	23,60	23,60
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada	Dinas Kesehatan	%	N.A	2,27	1,8	2,2	1,90

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe							
2.2.2.[a]	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	78,8	78	81,2	86,27	90,6
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Dinas Kesehatan	%	N.A	4,84	5,49	9,20	19,70
Target 2.4 :	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan							
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Dinas Pertanian	%	N.A	N.A	64,41	55,25	55,25
Tujuan SDGs 03 :	MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
Target 3.1 :	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Per 100.000 Kelahiran Hidup	233,75	181,7	129,39	166,29	86,00

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan / BPS	%	89,45	73,49	75,82	58,52	56,43
Target 3.2 :	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000							
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup							
	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 Kelahiran Hidup	9,66	14,04	16,27	2,29	11,61
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 Kelahiran Hidup	8,26	13,21	15,34	11,40	11,18
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	Per 1000 Kelahiran Hidup	6,55	10,57	15,71	10,39	9,24
Target 3.3 :	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3.3.2*	Insidens Tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Per 100.000 penduduk	142,6	214,97	207,97	222,76	765
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	0,232	0,435	0,45	0,38	0,31
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	N.A	0,00075	0,54	0,51	0,69
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.							
	(a) Filariasis	Dinas Kesehatan	%	N.A	N.A	100	100	0
	(b) Kusta	Dinas Kesehatan	%	N.A	N.A	100	100	22
Target 3.4 :	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis	BPJS Kesehatan	Angka	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Dinas Kesehatan	%	2,97	2,96	8,8	8,7	2,41
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	13,16	13,33	13,37	13,32	30,52

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan	%	5,81	6,41	32,7	32,7	30,54
Target 3.7 :	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional							
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	%	2,86	3,11	2,41	2,33	2,33
Target 3.8 :	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Dinas Kesehatan	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan / BPS : Susenas	%	12,41	N.A	N.A	N.A	N.A
3.8.2.(a)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	%	84,26	88,71	85,38	88,42	88,28
Tujuan SDGs 04 :	MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
Target 4.1 :	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat							
	(i) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD	Dinas Pendidikan	%	93,84	95,58	69,94	99,33	99,97
	(ii) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP	Dinas Pendidikan	%	97,46	97,04	80,98	98,11	100
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun							
	(i) Angka Anak tidak sekolah usia 7-12 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	0,13	0,15	0,16	0,13	0,70
	(ii) Angka Anak tidak sekolah usia 13-15 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	0,73	0,25	0,57	0,3	3,73
Target 4.4 :	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan							
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS : Susenas	%	N.A	4,08	N.A	N.A	N.A
Target 4.5 :	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat	Dinas Pendidikan	%	93,94	94,14	98,48	79,57	92,18
	(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat	Dinas Pendidikan	%	98,68	96,08	79,76	75,7	80,92
Target 4.6 :	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek asara penduduk umur ≥15 tahun	BPS : Susenas	%	93,62	96,29	96,35	95,07	96,87
Tujuan SDGs 05 :	MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
Target 5.5 :	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah	DINAS P3A	%	5,71	5,71	2,86	2,86	11,43
Target 5.6 :	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reuiu dari konferensi-konferensi tersebut							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DINAS P3A	Ada/Tidak Ada	N.A	N.A	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Target 5.b :	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Tujuan SDGs 06 :	MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUT AN UNTUK SEMUA							
Target 6.1 :	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua							
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Dinas Kesehatan	%	N.A	N.A	N.A	21,71	22,25
Target 6.2 :	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	(i) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman	PUTR / BPS : Susenas	%	1,5	4,6	4,6	4,52	4,96
	(ii) Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun	PUTR / BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	4,96
Target 6.3 :	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global							
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	DLH	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 6.4 :	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air							
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	PUTR	Liter/Detik	N.A	N.A	2	2	1,5
Tujuan SDGs 07 :	MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA							
Target 7.1 :	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	PLN	%	99,02	99,45	99,72	99,78	99,78
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS	Angka	91,63	88,24	94,23	N.A	N.A
Tujuan SDGs 08 :	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN K ERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA							
Target 8.1 :	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS, DINAS STATISTIK	%	10,44	11,29	6,16	4,13	6,24
8.1.1.[a]	PDB per kapita	BPS, DINAS STATISTIK	Juta	48,55	54,03	57,36	59,73	63,45
Traget 8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS : Sakernas	%	N.A	N.A	61,92	64,08	68,02

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target 8.5 :	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	DINAS TENAGA KERJA	Rp	16.025	17.406	18.752	19.805	22.800
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS	%	4,8	3,85	3,70	4,14	3,71
8.5.2.[a]	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	11,82	8,74	9,57	7,03	7,07
Target 8.6 :	Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	DINAS TENAGA KERJA	%	11,57	9,92	0,67	0,29	10,38
Target 8.9 :	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							
8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	N.A	N.A	19	40	17
8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	BPS : Susenas	Orang	N.A	N.A	263.054	55.314	132.166
Tujuan SDGs 09 :	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target 9.1 :	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua							
9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional	PUTR	%	N.A	N.A	98	98	98
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi							
	1. Angkutan Udara (Pesawat)							
	Jumlah Penumpang	Dinas Perhubungan	Orang	N.A	N.A	30.970	36.725	29
	Jumlah Barang	Dinas Perhubungan	Ton	N.A	N.A	181	201.841	169
	2. Angkutan Umum (Mobil)							
	Jumlah Penumpang	Dinas Perhubungan	Orang	N.A	N.A	226.623	218.286	242
	Jumlah Barang	Dinas Perhubungan	Ton	N.A	N.A	382	350	393,3
9.1.2.[a]	Jumlah Bandara	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	1	1
9.1.2.[b]	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	Unit	0	0	0	0	0
Target 9.2 :	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	BPS	%	7,66	4,51	4,35	15,33	32,39

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target 9.5 :	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset terhadap PDB	Bappelitbangda	%	0,0042	0,0036	0,0045	0,0011	0,0018
Tujua SDGs 10 :	MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA							
Target 10.1 :	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1.(a)	Rasio Gini	BPS	Angka	0,375	0,364	0,341	0,319	0,331
10.1.1 (b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	12,53	12,49	12,71	11,70	10,97
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa	52	52	47	41	38
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa	2	3	11	30	37
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 10.2 :	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
10.2.1.*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	BPS : Susenas / DINAS SOSIAL	%	N.A	N.A	N.A	N.A	55,39
Target 10.3 :	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut							
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	DP3A	Kebijakan	N.A	0	0	0	0
Target 10.4 :	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar							
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	%	76,51	71,93	56,1	58,06	92,90
Tujuan SDGs 11 :	MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN							
Target 11.1 :	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap	DINAS PERKIM / BPS	%	87,78	78,98	79,5	71,53	78,,49

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	hunian yang layak dan terjangkau							
Target 11.3 :	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara							
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	PUTR	Angka	N.A	N.A	1,68	1,68	1,7
Target 11.5 :	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansi mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang	74,02	73,55	879,25	1855,66	14451
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap pendapatan domestik bruto	BPBD	%	N.A	873,06	66,67	1130,94	11,19
Target 11.6 :	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota							
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	DLH	%	0,5	0,5	0,5	0,5	70

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	DLH	%	30,77	30,77	30,77	30,59	70
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	DLH	Angka	90,12	91,7	91,61	92,44	80,41
Target 11.b :	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>							
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	%	N.A	N.A	37,5	25	40
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN								
Target 12.3 :	Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen							
12.3.1.(a)	Persentase penurunan susut dan sisa pangan (<i>food loss and waste</i>)	DLH	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target 12.4 :	Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan	DLH	Ton	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	DLH	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 12.5 :	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali							
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	%	2.529,34	1.303.81	N.A	N.A	N.A
Target 12.6 :	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka							
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DLH	Perusahaan	N.A	Tidak ada	N.A	N.A	N.A
Target 12.8 :	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
12.8.1.[a]	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLH	Unit	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 12.b :	Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal							
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism development</i>)	Dinas Pariwisata	Destinasi	N.A	N.A	1	1	2
Tujuan SDGs 13 :	MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA							
Target 13.1 :	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BPBD	Orang	N.A	272	3.335	7.151	14.451
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	%	N.A	N.A	37,5	25	40

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target 13.2 :	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional							
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Bappelitbangda	Ton CO ² eq	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
13.2.2.[a]	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappelitbangda	Ton CO ² eq	218.212,00	219.136,52	223.729,01	1.341.279,21	1.341.279,21
13.2.2.[b]	Persentase potensi penurunan intesitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappelitbangda	%	N.A	N.A	N.A	N.A	10
Tujuan SDGs 16 :	MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES Keadilan untuk SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN							
Target 16.1 :	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES LUWU	Kasus	N.A	2	0	N.A	3
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES LUWU	Per 100.000 penduduk	0	0,58	N.A	N.A	0
Target 16.2 :	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak							
16.2.2*	Angka korban perdagangan orang per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin,	DP3A/POLRES LUWU	Per 100.000 penduduk	N.A	N.A	0	0	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	kelompok umur dan jenis eksploitasi							
Target 16.3 :	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementrian Hukum & HAM, BPHN	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Target 16.6 :	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD	%	100	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B	Bag. Organisasi SETDA	%	N.A	1,33	61,81 B	62,18 B	62,03 B
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B	Bag. Organisasi SETDA	%	N.A	100	C	46,49 C	63,00 B
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Diskominfo	Instansi	N.A	N.A	N.A	N.A	14
Target 16.7 :	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	DP3A/ SETWAN	%	5,71	5,71	5,71	11,4	11,43
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan Eselon II)	DP3A/ BKPSDM	%	N.A	N.A	8,28	11,43	11,8
Target 16.9 :	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	BPS : Susenas	%	87,61	95,72	97,98	97,39	96,14
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A	N.A	94,99
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil / BPS : Susenas	%	N.A	8,48	98,55	93,21	96,76
Target 16.10 :	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Diskominfo	%	N.A	N.A	N.A	N.A	40
Target 16.b :	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	DP3A / Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kebijakan	N.A	0	0	0	0
Tujuan SDGs 17	MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
Target 17.1 :	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BAPENDA/ BPS	%	N.A	26,7	7,15	6,97	6,15
17.1.1.[a]	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BAPENDA/ BPS	%	0,15	0,07	0,23	0,18	0,33
Target 17.8 :	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi							
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Diskominfo	%	36,54	45,23	62,56	67,01	67,01
Target 17.17 :	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama							

Kode	Tujuan/Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	DPMPTSP	Dokumen	N.A	N.A	0	0	1
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	DPMPTSP	Proyek	N.A	0	0	0	1
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani	DPMPTSP	Rp	N.A	N.A	0	0	0
Target 17.19 :	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil	Tersedia / Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber : OPD Pengampu SDG's Kabupaten Luwu, 2026.

2.6. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025
DAN REALISASI RPJMD TAHUN 2025

2.6.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

- 1. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- 2. Konsistensi antara RPJMD dengan RKPD;
- 3. Konsistensi antara RKPD dengan Renja PD;
- 4. Konsistensi antara RKPD dengan APBD; dan
- 5. Konsistensi antara RPJMD dengan APBD.

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan antara RPJMD, RKPD, Renja dan APBD.

2.6.1.1. Konsistensi Program RPJMD dan RKPD

Subbab ini menjelaskan mengenai konsistensi antara program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029 dengan program dalam RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025. Berikut ini tabel yang menggambarkan konsistensi program antara RPJMD dan RKPD tahun 2025.

Tabel 2.87.
Konsistensi Program RPJMD dan RKPD
Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Program Yang Sama	Program Tidak Sama
		RPJMD	RKPD	RPJMD & RKPD	RPJMD & RKPD
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	5	4	4	1
2	RSUD BATARA GURU	3	2	2	1
3	DINAS KESEHATAN	5	5	5	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	12	12	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Program Yang Sama	Program Tidak Sama
		RPJMD	RKPD	RPJMD & RKPD	RPJMD & RKPD
1	2	3	4	5	6
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	2	2	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	2	2	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	2	2	0
9	DINAS SOSIAL	6	6	6	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	7	5	5	2
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	4	4	3
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	4	4	1
13	DINAS PERTANAHAN	5	4	4	1
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	8	8	3
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	3	3	2
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	3	3	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	5	5	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	9	6	6	3
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	5	5	1
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	4	4	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	3	3	2
24	DINAS PERIKANAN	5	4	4	1
25	DINAS PARIWISATA	9	7	7	2
26	DINAS PERTANIAN	6	5	5	1

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Program Yang Sama	Program Tidak Sama
		RPJMD	RKPD	RPJMD & RKPD	RPJMD & RKPD
1	2	3	4	5	6
27	DINAS PERDAGANGAN	7	5	5	2
28	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	0
29	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	5	5	5	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3	3	3	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	2	2	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	6	6	0
Jumlah		177	151	151	26

Sumber : SIPD Kemendagri, Tahun 2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD antara lain sebagai berikut:

- Jumlah rencana program dalam RPJMD yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 177 program dan jumlah program dalam RKPD tahun 2025 berjumlah 151 program.
- Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 26 program yang tidak terakomodir. Adapun penyebab tidak terakomodirnya program tersebut karena RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan hasil evaluasi pembangunan. Program yang tidak dimuat pada RKPD tahun 2025 bukan berarti dihapus dari RPJMD, melainkan akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya sesuai tahapan pencapaian target RPJMD dan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, tidak seluruh program yang tercantum dalam RPJMD harus dilaksanakan pada tahun yang sama, melainkan

diimplementasikan secara bertahap selama periode RPJMD. Selain itu, adanya efisiensi anggaran juga mempengaruhi pagu anggaran tahunan sehingga tidak mencukupi untuk menjalankan seluruh program yang ada dalam RPJMD.

2.6.1.2. Konsistensi Program RKPD dan Renja PD

Subbab ini menjelaskan mengenai konsistensi antara program yang ada dalam RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025 dengan program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Luwu tahun 2025. Berikut ini tabel yang menggambarkan konsistensi program antara RKPD dan Renja PD tahun 2025.

Tabel 2.88.
Konsistensi Program RKPD dan Renja PD
Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Program Yang Sama	Program Tidak Sama
		RKPD	Renja-PD	RKPD & Renja	RKPD & Renja
1	2	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN	4	4	4	0
2	RSUD BATARA GURU	2	2	2	0
3	DINAS KESEHATAN	5	5	5	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	12	12	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	2	2	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	2	2	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	2	2	0
9	DINAS SOSIAL	6	6	6	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	5	5	5	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	4	4	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	4	4	4	0
13	DINAS PERTANAHAN	4	4	4	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	8	8	0
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	3	3	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Program Yang Sama	Program Tidak Sama
		RKPD	Renja-PD	RKPD & Renja	RKPD & Renja
1	2	4	5	6	7
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	3	3	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	5	5	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	6	6	6	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	5	5	0
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	4	4	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	3	3	0
24	DINAS PERIKANAN	4	4	4	0
25	DINAS PARIWISATA	7	7	7	0
26	DINAS PERTANIAN	5	5	5	0
27	DINAS PERDAGANGAN	5	5	5	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	0
29	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	5	5	5	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3	3	3	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	2	2	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	6	6	0
Jumlah		151	151	151	0

Sumber : SIPD Kemendagri, Tahun 2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RKPD ke dalam Renja PD antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 151 program dan jumlah program dalam Renja-PD juga berjumlah 151 program.
- b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD telah konsisten.

2.6.1.3. Konsistensi Program RKPD dan APBD

Subbab ini menjelaskan mengenai konsistensi antara program yang ada dalam RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025 dengan program dalam APBD Kabupaten Luwu tahun 2025. Berikut ini tabel yang menggambarkan konsistensi program antara RKPD dan APBD tahun 2025.

Tabel 2.89.
Konsistensi Program RKPD dan APBD
Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Program Yang Sama	Program Tidak Sama
		RKPD	APBD	RKPD & APBD	RKPD & APBD
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	4	4	4	0
2	RSUD BATARA GURU	2	2	2	0
3	DINAS KESEHATAN	5	5	5	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	12	12	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	2	2	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	2	2	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	2	2	0
9	DINAS SOSIAL	6	6	6	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	5	5	5	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	4	4	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	4	4	4	0
13	DINAS PERTANAHAN	4	4	4	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	8	8	0
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	3	3	0
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	3	3	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	5	5	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	6	6	6	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program		Program Yang Sama	Program Tidak Sama
		RKPD	APBD	RKPD & APBD	RKPD & APBD
1	2	3	4	5	6
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	5	5	0
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	4	4	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	3	3	0
24	DINAS PERIKANAN	4	4	4	0
25	DINAS PARIWISATA	7	7	7	0
26	DINAS PERTANIAN	5	5	5	0
27	DINAS PERDAGANGAN	5	5	5	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	0
29	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	5	5	5	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3	3	3	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	2	2	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	6	6	0
Jumlah		151	151	151	0

Sumber : SIPD Kemendagri, Tahun 2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RKPD ke dalam APBD antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 151 program sedangkan jumlah program dalam APBD juga berjumlah 151 program.
- b. Jumlah program antara dokumen RKPD dan APBD telah konsisten.

2.6.1.4. Konsistensi Program RPJMD dan APBD

Subbab ini menjelaskan mengenai konsistensi antara program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029 dengan program dalam APBD Kabupaten Luwu tahun 2025. Berikut ini tabel

yang menggambarkan konsistensi program antara RPJMD dan APBD tahun 2025.

Tabel 2.90.
Konsistensi Program RPJMD dan APBD
Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program	Program Yang Sama	Program Tidak Sama
		RPJMD	APBD	RPJMD & APBD	RPJMD & APBD
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	5	4	4	1
2	RSUD BATARA GURU	3	2	2	1
3	DINAS KESEHATAN	5	5	5	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	12	12	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	2	2	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	2	2	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	2	2	0
9	DINAS SOSIAL	6	6	6	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	7	5	5	2
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	4	4	3
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	4	4	1
13	DINAS PERTANAHAN	5	4	4	1
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	8	8	3
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	3	3	2
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	3	3	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	5	5	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	9	6	6	3
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	5	5	1
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	4	4	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	3	3	2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program	Program Yang Sama	Program Tidak Sama
		RPJMD	APBD	RPJMD & APBD	RPJMD & APBD
1	2	3	4	5	6
24	DINAS PERIKANAN	5	4	4	1
25	DINAS PARIWISATA	9	7	7	2
26	DINAS PERTANIAN	6	5	5	1
27	DINAS PERDAGANGAN	7	5	5	2
28	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	0
29	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	5	5	5	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3	3	3	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	2	2	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	6	6	0
Jumlah		177	151	151	26

Sumber : SIPD Kemendagri, Tahun 2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RKPD ke dalam APBD antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 177 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 151 program.
- b. Terdapat 26 program RPJMD yang tidak terakomodir dalam APBD. Penyebab tidak terakomodirnya program tersebut dalam APBD karena APBD merupakan penjabaran penganggaran dari RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD yang disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah, hasil pembahasan KUA-PPAS dan Rancangan APBD bersama DPRD, serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses tersebut dilakukan rasionalisasi dan konsolidasi program agar belanja daerah lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian prioritas pembangunan. Oleh karena itu, tidak seluruh program yang direncanakan dalam RPJMD dapat diakomodasi dalam APBD tahun berjalan. Selain itu, adanya

pengurangan dana transfer ke daerah juga mempengaruhi pagu anggaran tahunan sehingga tidak mencukupi untuk menjalankan seluruh program yang ada dalam RPJMD.

2.6.1.5. Konsistensi Kegiatan RKPD dan Renja PD

Subbab ini menjelaskan mengenai konsistensi antara kegiatan yang ada dalam RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025 dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) kabupaten Luwu tahun 2025. Adapun gambaran konsistensi kegiatan RKPD kabupaten Luwu tahun 2025 dengan Renja PD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.91.
Konsistensi Kegiatan RKPD dan Renja PD Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan		Kegiatan Yang Sama	Kegiatan Tidak Sama
		RKPD	Renja	RKPD & Renja	RKPD & Renja
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	13	13	13	0
2	RSUD BATARA GURU	2	2	2	0
3	DINAS KESEHATAN	20	20	20	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20	20	20	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15	15	15	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11	11	11	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	12	12	12	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10	10	10	0
9	DINAS SOSIAL	13	13	13	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	13	13	13	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	10	10	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	13	13	13	0
13	DINAS PERTANAHAN	9	9	9	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13	13	13	0
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15	15	15	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10	10	10	0
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11	11	11	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	13	13	13	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan		Kegiatan Yang Sama	Kegiatan Tidak Sama
		RKPD	Renja	RKPD & Renja	RKPD & Renja
1	2	3	4	5	6
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	10	10	10	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	12	12	12	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	11	11	0
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	13	13	13	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	10	10	0
24	DINAS PERIKANAN	14	14	14	0
25	DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN	14	14	14	0
26	DINAS PERTANIAN	12	12	12	0
27	DINAS PERDAGANGAN	12	12	12	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	20	20	20	0
29	SEKRETARIAT DPRD	16	16	16	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	18	18	18	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14	14	14	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9	9	9	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12	12	12	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	12	12	12	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13	13	13	0
Jumlah		445	445	445	0

Sumber : SIPD Kemendagri, Tahun 2026.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi kegiatan RKPD ke dalam Renja PD antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah kegiatan dalam RKPD tahun 2025 adalah sebanyak 445 begitupun dengan kegiatan pada Renja PD berjumlah 445.
- b. Jumlah kegiatan antara dokumen RKPD dan Renja PD telah konsisten.

2.6.1.6. Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD

Subbab ini menjelaskan mengenai konsistensi antara kegiatan yang ada dalam RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025 dengan kegiatan dalam APBD kabupaten Luwu tahun 2025. Adapun gambaran konsistensi kegiatan RKPD kabupaten Luwu tahun 2025 dengan APBD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.92.
Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan		Kegiatan Yang Sama	Kegiatan Tidak Sama
		RKPD	APBD	RKPD & APBD	RKPD & APBD
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	13	13	13	0
2	RSUD BATARA GURU	2	2	2	0
3	DINAS KESEHATAN	20	20	20	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20	20	20	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15	15	15	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11	11	11	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	12	12	12	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10	10	10	0
9	DINAS SOSIAL	13	13	13	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	13	13	13	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	10	10	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	13	13	13	0
13	DINAS PERTANAHAN	9	9	9	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13	13	13	0
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15	15	15	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10	10	10	0
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11	11	11	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	13	13	13	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	10	10	10	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	12	12	12	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan		Kegiatan Yang Sama	Kegiatan Tidak Sama
		RKPD	APBD	RKPD & APBD	RKPD & APBD
1	2	3	4	5	6
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	11	11	0
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	13	13	13	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	10	10	0
24	DINAS PERIKANAN	14	14	14	0
25	DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN	14	14	14	0
26	DINAS PERTANIAN	12	12	12	0
27	DINAS PERDAGANGAN	12	12	12	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	20	20	20	0
29	SEKRETARIAT DPRD	16	16	16	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	18	18	18	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14	14	14	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9	9	9	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12	12	12	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	12	12	12	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13	13	13	0
Jumlah		445	445	445	0

Sumber : SIPD Kemendagri, Tahun 2026.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi kegiatan RKPD ke dalam Renja PD antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah kegiatan dalam RKPD tahun 2025 adalah 445 dan APBD juga sebanyak 445.
- b. Jumlah kegiatan antara dokumen RKPD dan APBD telah konsisten.

2.6.1.7. Konsistensi Kegiatan Renja PD dan APBD

Subbab ini menjelaskan mengenai konsistensi antara kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Luwu tahun 2025 dengan kegiatan dalam APBD kabupaten Luwu tahun 2025. Adapun gambaran konsistensi kegiatan Renja PD

kabupaten Luwu tahun 2025 dengan APBD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.93.
Konsistensi Kegiatan Renja PD dan APBD Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan		Kegiatan Yang Sama	Kegiatan Tidak Sama
		Renja	APBD	Renja & APBD	Renja & APBD
1	2	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN	13	13	13	0
2	RSUD BATARA GURU	2	2	2	0
3	DINAS KESEHATAN	20	20	20	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20	20	20	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15	15	15	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11	11	11	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	12	12	12	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10	10	10	0
9	DINAS SOSIAL	13	13	13	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	13	13	13	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	10	10	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	13	13	13	0
13	DINAS PERTANAHAN	9	9	9	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13	13	13	0
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15	15	15	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10	10	10	0
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11	11	11	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	13	13	13	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	10	10	10	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	12	12	12	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	11	11	0
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	13	13	13	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	10	10	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan		Kegiatan Yang Sama	Kegiatan Tidak Sama
		Renja	APBD	Renja & APBD	Renja & APBD
1	2	4	5	6	7
24	DINAS PERIKANAN	14	14	14	0
25	DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN	14	14	14	0
26	DINAS PERTANIAN	12	12	12	0
27	DINAS PERDAGANGAN	12	12	12	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	20	20	20	0
29	SEKRETARIAT DPRD	16	16	16	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	18	18	18	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14	14	14	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9	9	9	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12	12	12	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	12	12	12	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13	13	13	0
Jumlah		445	445	445	0

Sumber : SIPD Kemendagri, 2026.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi kegiatan Renja PD ke dalam APBD antara lain sebagai berikut:

- c. Jumlah kegiatan dalam Renja PD tahun 2025 adalah 445 dan APBD juga sebanyak 445.
- d. Jumlah kegiatan antara dokumen Renja PD dan APBD telah konsisten.

2.6.1.8. Konsistensi Subkegiatan RKPD dan Renja PD

Subbab ini menjelaskan mengenai konsistensi antara subkegiatan yang ada dalam RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Luwu tahun 2025. Adapun gambaran konsistensi kegiatan RKPD dan Renja PD kabupaten Luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.94.
Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dan Renja PD Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan		Sub Kegiatan Yang Sama	Sub Kegiatan Tidak Sama
		RKPD	Renja	RKPD & Renja	RKPD & Renja
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	105	105	105	0
2	RSUD BATARA GURU	2	2	2	0
3	DINAS KESEHATAN	95	95	95	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51	51	51	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	51	51	51	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	59	59	59	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	28	28	28	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34	34	34	0
9	DINAS SOSIAL	35	35	35	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	24	24	24	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16	16	16	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	34	34	34	0
13	DINAS PERTANAHAN	22	22	22	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34	34	34	0
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	40	40	40	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28	28	28	0
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33	33	33	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	33	33	33	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	32	32	32	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	28	28	28	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30	30	30	0
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	34	34	34	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	35	35	35	0
24	DINAS PERIKANAN	30	30	30	0
25	DINAS PARIWISATA	35	35	35	0
26	DINAS PERTANIAN	26	26	26	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan		Sub Kegiatan Yang Sama	Sub Kegiatan Tidak Sama
		RKPD	Renja	RKPD & Renja	RKPD & Renja
1	2	3	4	5	6
27	DINAS PERDAGANGAN	32	32	32	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	65	65	65	0
29	SEKRETARIAT DPRD	61	61	61	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	67	67	67	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	68	68	68	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	51	51	51	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	41	41	41	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	43	43	43	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32	32	32	0
Jumlah		1434	1434	1434	0

Sumber : SIPD Kemendagri, 2026.

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel diatas, dapat dijelaskan konsistensi sub kegiatan RKPD terhadap Renja PD antara lain sebagai berikut:

1. Konsistensi Subkegiatan RKPD dan Renja-PD
 - a. Sub Kegiatan dalam RKPD tahun 2025 adalah sejumlah 1434 dan pada Renja-PD juga sejumlah 1434. Jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen telah konsisten.
 - b. Persentase konsistensi subkegiatan RKPD dan Renja-PD sebesar 100%.

2.6.1.9. Konsistensi Subkegiatan RKPD dan APBD

Subbab ini menjelaskan mengenai konsistensi antara subkegiatan yang ada dalam RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun 2025. Adapun gambaran konsistensi kegiatan RKPD dan APBD kabupaten Luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.95.
Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan		Sub Kegiatan Yang Sama	Sub Kegiatan Tidak Sama
		RKPD	APBD	RKPD & APBD	RKPD & APBD
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	105	74	74	31
2	RSUD BATARA GURU	2	2	2	0
3	DINAS KESEHATAN	95	95	95	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51	51	51	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	51	51	51	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	59	59	59	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	28	28	28	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34	34	34	0
9	DINAS SOSIAL	35	35	35	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	24	24	24	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16	16	16	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	34	34	34	0
13	DINAS PERTANAHAN	22	22	22	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34	34	34	0
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	40	40	40	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28	28	28	0
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33	33	33	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	33	33	33	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	32	32	32	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	28	28	28	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30	30	30	0
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	34	34	34	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	35	35	35	0
24	DINAS PERIKANAN	30	30	30	0
25	DINAS PARIWISATA	35	35	35	0
26	DINAS PERTANIAN	26	26	26	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan		Sub Kegiatan Yang Sama	Sub Kegiatan Tidak Sama
		RKPD	APBD	RKPD & APBD	RKPD & APBD
1	2	3	4	5	6
27	DINAS PERDAGANGAN	32	32	32	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	65	65	65	0
29	SEKRETARIAT DPRD	61	61	61	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	67	67	67	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	68	68	68	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	51	51	51	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	41	41	41	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	43	43	43	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32	32	32	0
Jumlah		1434	1403	1403	31

Sumber : SIPD Kemendagri, 2026.

Berdasarkan data dalam tabel diatas, dapat dijelaskan konsistensi sub kegiatan RKPD terhadap APBD antara lain sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1434 sedangkan jumlah sub kegiatan APBD adalah sejumlah 1403. Terdapat selisih jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen yaitu sebanyak 31 sub kegiatan.
- b. 31 subkegiatan yang tidak terakomodir dalam APBD kabupaten Luwu tahun 2025 merupakan subkegiatan pada Dinas Pendidikan. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut ada pemotongan DAU SG sebesar 21 persen.

2.6.1.10.Konsistensi Subkegiatan Renja PD dan APBD

Subbab ini menjelaskan mengenai konsistensi antara subkegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Luwu tahun 2025 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun 2025. Adapun gambaran konsistensi kegiatan Renja PD dan APBD kabupaten Luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.96.
Konsistensi Sub Kegiatan Renja PD dan APBD Tahun 2025

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan		Sub Kegiatan Yang Sama	Sub Kegiatan Tidak Sama
		Renja	APBD	Renja & APBD	Renja & APBD
1	2	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	105	74	74	31
2	RSUD BATARA GURU	2	2	2	0
3	DINAS KESEHATAN	95	95	95	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51	51	51	0
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	51	51	51	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	59	59	59	0
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	28	28	28	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34	34	34	0
9	DINAS SOSIAL	35	35	35	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	24	24	24	0
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16	16	16	0
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	34	34	34	0
13	DINAS PERTANAHAN	22	22	22	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34	34	34	0
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	40	40	40	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28	28	28	0
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33	33	33	0
18	DINAS PERHUBUNGAN	33	33	33	0
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	32	32	32	0
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	28	28	28	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30	30	30	0
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	34	34	34	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	35	35	35	0
24	DINAS PERIKANAN	30	30	30	0
25	DINAS PARIWISATA	35	35	35	0
26	DINAS PERTANIAN	26	26	26	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan		Sub Kegiatan Yang Sama	Sub Kegiatan Tidak Sama
		Renja	APBD	Renja & APBD	Renja & APBD
1	2	4	5	6	7
27	DINAS PERDAGANGAN	32	32	32	0
28	SEKRETARIAT DAERAH	65	65	65	0
29	SEKRETARIAT DPRD	61	61	61	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	67	67	67	0
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	68	68	68	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	51	51	51	0
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	41	41	41	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	43	43	43	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32	32	32	0
Jumlah		1434	1403	1403	31

Sumber :SIPD Kemendagri, 2026.

Berdasarkan data dalam tabel diatas, dapat dijelaskan konsistensi sub kegiatan Renja PD terhadap APBD antara lain sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan dalam Renja PD adalah sejumlah 1434 sedangkan jumlah sub kegiatan APBD adalah sejumlah 1403. Terdapat selisih jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen yaitu sebanyak 31 sub kegiatan.
- b. 31 subkegiatan yang tidak terakomodir dalam APBD kabupaten Luwu tahun 2025 merupakan subkegiatan pada Dinas Pendidikan. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut ada pemotongan DAU SG sebesar 21 persen.

2.6.1.11.Konsistensi Kerangka Pendanaan

RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD. Namun, penyusunan perubahan RKPD kabupaten Luwu tahun 2025 telah

disinkronisasikan dengan penyusunan RPJMD kabupaten Luwu tahun 2025-2029 sehingga anggaran pada perubahan RKPD sama dengan anggaran RPJMD untuk periode tahun 2025. Kerangka pendanaan dalam RPJMD yang diturunkan dalam dokumen RKPD serta dijabarkan dalam APBD untuk tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2.97.
Perbandingan Pendapatan dan Belanja Daerah pada RPJMD, RKPD dan APBD Kabupatn Luwu Tahun 2025

No	Uraian	RPJMD*	RKPD**	APBD***
1	Pendapatan Daerah	1.562.022.082.341	1.562.022.082.341	1.576.004.563.182
2	Belanja Daerah	1.593.287.451.679	1.593.287.451.679	1.604.207.045.244
	a. Belanja Operasi	1.129.757.672.243	1.129.757.672.243	1.144.039.406.442
	b. Belanja Modal	175.589.803.533	175.589.803.533	196.266.388.001
	c. Belanja Tidak Terduga	28.819.286.094	28.819.286.094	4.740.467.094
	d. Belanja Transfer	259.120.689.809	259.120.689.809	259.160.783.706

Sumber :

*) Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Luwu tahun 2025-2029.

**) Peraturan Bupati Luwu Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

***) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan kondisi perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

Pendapatan daerah dalam RKPD sama dengan RPJMD. Pendapatan daerah dalam APBD lebih besar dari RPJMD dan RKPD. Untuk belanja daerah pada RKPD sama dengan RPJMD sedangkan belanja daerah pada APBD lebih besar dari pada RPJMD dan RKPD. Penjabaran pendanaan belanja dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD pada setiap perangkat daerah terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98.
Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD
Kabupaten Luwu Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2025							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD	%RPJMD	Renja-PD	% RKPD	APBD	%RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4)-(3)	(8) = (6)-(4)	(9) = (6)-(3)
1	DINAS PENDIDIKAN	465.186.014.085,00	465.186.014.085,00	100	465.186.014.085,00	100	433.831.750.189,30	93,26	0,00	- 31.354.263.895,70	- 31.354.263.895,70
2	RSUD BATARA GURU	173.062.186.288,00	173.062.186.288,00	100	173.062.186.288,00	100	148.958.264.233,11	86,07	0,00	- 24.103.922.054,89	- 24.103.922.054,89
3	DINAS KESEHATAN	222.842.906.327,00	222.842.906.327,00	100	222.842.906.327,00	100	191.085.538.532,00	85,75	0,00	- 31.757.367.795,00	- 31.757.367.795,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55.086.552.271,00	55.086.552.271,00	100	55.086.552.271,00	100	24.354.888.424,74	44,21	0,00	- 30.731.663.846,26	- 30.731.663.846,26
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.121.926.349,00	12.121.926.349,00	100	12.121.926.349,00	100	8.107.417.581,00	66,88	0,00	- 4.014.508.768,00	- 4.014.508.768,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.086.133.172,00	7.086.133.172,00	100	7.086.133.172,00	100	7.696.420.993,00	108,61	0,00	610.287.821,00	610.287.821,00
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	7.065.476.145,00	7.065.476.145,00	100	7.065.476.145,00	100	7.469.764.940,00	105,72	0,00	404.288.795,00	404.288.795,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28.999.009.853,00	28.999.009.853,00	100	28.999.009.853,00	100	4.492.250.292,00	15,49	0,00	- 24.506.759.561,00	- 24.506.759.561,00
9	DINAS SOSIAL	4.960.488.263,00	4.960.488.263,00	100	4.960.488.263,00	100	4.603.410.907,00	92,80	0,00	- 357.077.356,00	- 357.077.356,00
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	7.502.878.900,00	7.502.878.900,00	100	7.502.878.900,00	100	7.349.504.782,00	97,96	0,00	- 153.374.118,00	- 153.374.118,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.288.262.406,00	3.288.262.406,00	100	3.288.262.406,00	100	3.124.274.485,00	95,01	0,00	- 163.987.921,00	- 163.987.921,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.913.160.021,00	3.913.160.021,00	100	3.913.160.021,00	100	3.834.565.268,00	97,99	0,00	- 78.594.753,00	- 78.594.753,00
13	DINAS PERTANAHAN	2.295.399.374,00	2.295.399.374,00	100	2.295.399.374,00	100	2.287.359.422,00	99,65	0,00	- 8.039.952,00	- 8.039.952,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

No	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2025							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD	%RPJMD	Renja-PD	% RKPD	APBD	%RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4)-(3)	(8) = (6)-(4)	(9) = (6)-(3)
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.993.637.471,00	12.993.637.471,00	100	12.993.637.471,00	100	5.969.165.433,00	45,94	0,00	- 7.024.472.038,00	- 7.024.472.038,00
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.154.254.106,00	6.154.254.106,00	100	6.154.254.106,00	100	5.481.202.339,00	89,06	0,00	- 673.051.767,00	- 673.051.767,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.811.740.363,00	8.811.740.363,00	100	8.811.740.363,00	100	8.935.470.255,00	101,40	0,00	123.729.892,00	123.729.892,00
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.784.183.801,00	10.784.183.801,00	100	10.784.183.801,00	100	9.935.451.715,00	92,13	0,00	- 848.732.086,00	- 848.732.086,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	10.947.050.061,00	10.947.050.061,00	100	10.947.050.061,00	100	10.179.029.904,00	92,98	0,00	- 768.020.157,00	- 768.020.157,00
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.615.836.364,00	6.615.836.364,00	100	6.615.836.364,00	100	6.485.044.488,00	98,02	0,00	- 130.791.876,00	- 130.791.876,00
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	3.709.240.669,00	3.709.240.669,00	100	3.709.240.669,00	100	3.332.173.948,00	89,83	0,00	- 377.066.721,00	- 377.066.721,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.007.037.742,00	5.007.037.742,00	100	5.007.037.742,00	100	4.724.490.446,00	94,36	0,00	- 282.547.296,00	- 282.547.296,00
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	6.907.320.247,00	6.907.320.247,00	100	6.907.320.247,00	100	6.395.476.379,00	92,59	0,00	- 511.843.868,00	- 511.843.868,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.784.459.209,00	5.784.459.209,00	100	5.784.459.209,00	100	5.618.577.146,00	97,13	0,00	- 165.882.063,00	- 165.882.063,00
24	DINAS PERIKANAN	6.269.269.684,00	6.269.269.684,00	100	6.269.269.684,00	100	6.162.093.183,00	98,29	0,00	- 107.176.501,00	- 107.176.501,00
25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.184.583.431,00	5.184.583.431,00	100	5.184.583.431,00	100	1.365.932.534,00	26,35	0,00	- 3.818.650.897,00	- 3.818.650.897,00
26	DINAS PERTANIAN	32.786.439.834,60	32.786.439.834,60	100	32.786.439.834,60	100	32.605.912.241,73	99,45	0,00	- 180.527.592,87	- 180.527.592,87
27	DINAS PERDAGANGAN	6.529.607.445,00	6.529.607.445,00	100	6.529.607.445,00	100	5.837.317.692,00	89,40	0,00	- 692.289.753,00	- 692.289.753,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2025							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD	%RPJMD	Renja-PD	% RKPD	APBD	%RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7) = (4)-(3)	(8) = (6)-(4)	(9) = (6)-(3)
28	SEKRETARIAT DAERAH	40.686.167.730,00	40.686.167.730,00	100	40.686.167.730,00	100	37.095.240.289,00	91,17	0,00	- 3.590.927.441,00	- 3.590.927.441,00
29	SEKRETARIAT DPRD	30.117.425.360,00	30.117.425.360,00	100	30.117.425.360,00	100	31.376.449.111,00	104,18	0,00	1.259.023.751,00	1.259.023.751,00
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	7.012.956.803,00	7.012.956.803,00	100	7.012.956.803,00	100	6.246.890.538,00	89,08	0,00	- 766.066.265,00	- 766.066.265,00
31	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	298.578.816.220,40	298.578.816.220,40	100	298.578.816.220,40	100	10.185.923.090,00	3,41	0,00	- 288.392.893.130,40	- 288.392.893.130,40
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.130.272.603,00	14.130.272.603,00	100	14.130.272.603,00	100	13.604.211.178,00	96,28	0,00	- 526.061.425,00	- 526.061.425,00
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.148.975.543,00	8.148.975.543,00	100	8.148.975.543,00	100	7.395.232.520,00	90,75	0,00	- 753.743.023,00	- 753.743.023,00
34	INSPEKTORAT DAERAH	10.165.371.539,00	10.165.371.539,00	100	10.165.371.539,00	100	9.817.885.823,00	96,58	0,00	- 347.485.716,00	- 347.485.716,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.474.675.514,00	5.474.675.514,00	100	5.474.675.514,00	100	5.407.130.204,00	98,77	0,00	- 67.545.310,00	- 67.545.310,00
36	Kecamatan Larompong Selatan	2.047.854.431,00	2.047.854.431,00	100	2.047.854.431,00	100	2.128.911.105,90	103,96	0,00	81.056.674,90	81.056.674,90
37	Kecamatan Larompong	2.439.442.151,00	2.439.442.151,00	100	2.439.442.151,00	100	2.734.357.788,00	112,09	0,00	294.915.637,00	294.915.637,00
38	Kecamatan Suli	2.065.580.343,00	2.065.580.343,00	100	2.065.580.343,00	100	2.037.142.874,00	98,62	0,00	- 28.437.469,00	- 28.437.469,00
39	Kecamatan Suli Barat	1.697.573.603,00	1.697.573.603,00	100	1.697.573.603,00	100	1.799.230.013,00	105,99	0,00	101.656.410,00	101.656.410,00
40	Kecamatan Belopa	5.075.972.521,00	5.075.972.521,00	100	5.075.972.521,00	100	5.094.029.510,00	100,36	0,00	18.056.989,00	18.056.989,00
41	Kecamatan Belopa Utara	3.256.842.570,00	3.256.842.570,00	100	3.256.842.570,00	100	3.306.313.063,00	101,52	0,00	49.470.493,00	49.470.493,00
42	Kecamatan Kamanre	2.107.648.956,00	2.107.648.956,00	100	2.107.648.956,00	100	2.284.470.400,00	108,39	0,00	176.821.444,00	176.821.444,00
43	Kecamatan Bajo	2.868.028.798,00	2.868.028.798,00	100	2.868.028.798,00	100	2.776.619.498,00	96,81	0,00	- 91.409.300,00	- 91.409.300,00

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

No	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD Tahun 2025							Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD	%RPJMD	Renja-PD	% RKPD	APBD	%RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4)-(3)	(8) = (6)-(4)	(9) = (6)-(3)
44	Kecamatan Bajo Barat	1.468.627.120,00	1.468.627.120,00	100	1.468.627.120,00	100	1.392.157.203,00	94,79	0,00	- 76.469.917,00	- 76.469.917,00
45	Kecamatan Latimojong	1.602.520.971,00	1.602.520.971,00	100	1.602.520.971,00	100	1.550.346.815,00	96,74	0,00	- 52.174.156,00	- 52.174.156,00
46	Kecamatan Bastem	1.714.568.129,00	1.714.568.129,00	100	1.714.568.129,00	100	1.677.663.040,00	97,85	0,00	- 36.905.089,00	- 36.905.089,00
47	Kecamatan Bastem Utara	1.818.343.086,00	1.818.343.086,00	100	1.818.343.086,00	100	1.753.891.363,00	96,46	0,00	- 64.451.723,00	- 64.451.723,00
48	Kecamatan Ponrang Selatan	2.582.980.881,00	2.582.980.881,00	100	2.582.980.881,00	100	2.611.317.446,00	101,10	0,00	28.336.565,00	28.336.565,00
49	Kecamatan Ponrang	4.426.482.870,00	4.426.482.870,00	100	4.426.482.870,00	100	4.363.485.519,00	98,58	0,00	- 62.997.351,00	- 62.997.351,00
50	Kecamatan Bupon	2.258.704.492,00	2.258.704.492,00	100	2.258.704.492,00	100	2.336.109.177,00	103,43	0,00	77.404.685,00	77.404.685,00
51	Kecamatan Bua	4.271.850.541,00	4.271.850.541,00	100	4.271.850.541,00	100	4.104.866.172,00	96,09	0,00	- 166.984.369,00	- 166.984.369,00
52	Kecamatan Walenrang	3.353.499.084,00	3.353.499.084,00	100	3.353.499.084,00	100	3.131.475.016,00	93,38	0,00	- 222.024.068,00	- 222.024.068,00
53	Kecamatan Walenrang Barat	2.273.415.994,00	2.273.415.994,00	100	2.273.415.994,00	100	2.193.731.254,00	96,49	0,00	- 79.684.740,00	- 79.684.740,00
54	Kecamatan Walenrang Utara	3.398.314.065,00	3.398.314.065,00	100	3.398.314.065,00	100	3.405.334.351,00	100,21	0,00	7.020.286,00	7.020.286,00
55	Kecamatan Walenrang Timur	1.790.723.617,00	1.790.723.617,00	100	1.790.723.617,00	100	1.796.297.115,00	100,31	0,00	5.573.498,00	5.573.498,00
56	Kecamatan Lamasi	3.245.987.419,00	3.245.987.419,00	100	3.245.987.419,00	100	3.248.718.595,00	100,08	0,00	2.731.176,00	2.731.176,00
57	Kecamatan Lamasi Timur	1.312.774.843,00	1.312.774.843,00	100	1.312.774.843,00	100	1.583.299.167,00	120,61	0,00	270.524.324,00	270.524.324,00
	JUMLAH	1.593.287.451.679,00	1.593.287.451.679,00	100	1.593.287.451.679,00	100	1.138.661.476.990,78	71,47	0,00	- 454.625.974.688,22	- 454.625.974.688,22

Keterangan :

Kolom 1 memuat nomor urut.

Kolom 2 memuat perangkat daerah di lingkungan kabupaten Luwu.

Kolom 3 jumlah pagu indikatif seluruh program pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD kabupaten Luwu.

Kolom 4 memuat jumlah pagu indikatif seluruh program pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan RKPD kabupaten Luwu tahun 2025 dan persentasenya dibandingkan dengan pagu RPJMD tahun 2025-2029.

Kolom 5 memuat jumlah pagu indikatif seluruh program pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan Perubahan Renja-PD tahun 2025 dan persentasenya dibandingkan dengan pagu Perubahan RKPD tahun 2025.

Kolom 6 memuat jumlah pagu anggaran seluruh program yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan Perda APBD tahun 2025 dan persentasenya dibandingkan dengan pagu RPJMD.

Kolom 7 memuat selisih pagu indikatif antara perubahan RKPD tahun 2025 dan RPJMD untuk tahun 2023.

Kolom 8 memuat selisih pagu indikatif antara perubahan APBD tahun 2025 dan perubahan RKPD tahun 2025.

Kolom 9 memuat selisih pagu indikatif antara perubahan APBD tahun 2025 dan RPJMD untuk tahun 2025.

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat Gambaran pada tabel di atas antara lain sebagai berikut :

1. RKPD terhadap RPJMD

Tidak terdapat perbedaan pagu antara RKPD tahun 2025 dengan RPJMD tahun 2025 karena pada saat penyusunan perubahan RKPD tahun 2025 bersamaan dengan penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 sehingga pagu indikatif untuk tahun 2025 telah disinkronisasikan.

2. APBD terhadap RKPD

- a. Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu RKPD dengan persentase selisih sebesar 39,92 persen. dengan jumlah selisih sebesar Rp. 454.625.974.688,22,- (Empat ratus lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua rupiah).
- b. Terdapat 16 (enam belas) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih besar dibanding pagu indikatif RKPD, dan sisanya sejumlah 41 (empat puluh satu) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD yang lebih kecil dibanding pagu indikatif RKPD.

3. APBD terhadap RPJMD
- a. Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu RPJMD dengan persentase selisih sebesar 39,92 persen dengan jumlah selisih sebesar Rp 454.625.974.688,22,- (Empat ratus lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua rupiah).
 - b. Terdapat 16 (enam belas) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih besar dibanding pagu indikatif RPJMD, dan sisanya sejumlah 41 (empat puluh satu) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD yang lebih kecil dibanding pagu indikatif RPJMD.

Sementara itu, capaian kinerja dan anggaran program pada pelaksanaan RKPD tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99.
Capaian Target Outcome dan Anggaran Program RKPD
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Capaian Target Outcome				
		Jumlah Indikator	Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Tercapai	Melampaui
1	DINAS PENDIDIKAN	6	98,88	3	1	2
2	RSUD BATARA GURU	2	81,80	1	1	0
3	DINAS KESEHATAN	7	93,65	3	2	2
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	88,02	7	3	1
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	92,75	2	1	2
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	90,73	0	0	1
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	2	94,25	1	1	0
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	96,64	0	3	0
9	DINAS SOSIAL	5	89,68	1	4	0
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	5	91,35	3	1	1
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	88,36	3	2	1
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	92,91	4	0	2
13	DINAS PERTANAHAN	5	93,66	4	1	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	94,20	7	0	1
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	94,34	4	2	2
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	94,39	5	0	0
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	84,68	2	1	1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah	Jumlah Indikator	Capaian Target Outcome			
			Rerata Anggaran	Belum Tercapai	Tercapai	Melampaui
18	DINAS PERHUBUNGAN	2	95,12	0	0	2
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6	96,83	1	3	2
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	9	93,70	7	2	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	91,96	2	2	1
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3	94,20	2	1	0
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	93,72	1	2	0
24	DINAS PERIKANAN	4	95,49	3	1	0
25	DINAS PARIWISATA	8	94,75	8	0	0
26	DINAS PERTANIAN	8	96,72	5	2	1
27	DINAS PERDAGANGAN	6	93,56	4	1	1
28	SEKRETARIAT DAERAH	5	90,66	1	2	2
29	SEKRETARIAT DPRD	2	96,64	1	1	0
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	6	90,66	2	3	1
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2	91,19	1	1	0
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	94,66	0	0	1
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4	89,48	4	0	0
34	INSPEKTORAT DAERAH	6	96,94	4	2	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5	95,10	2	1	2
	JUMLAH	174	92,90	98	47	29

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Tahun 2026.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat 174 indikator kinerja *outcome* dalam RKPD Kabupaten Luwu tahun 2025.
2. Rata-rata capaian kinerja anggaran seluruh program pembangunan daerah tersebut adalah 92,90%.
3. Sebanyak 98 indikator kinerja *outcome* belum mencapai target dari yang ditetapkan. Hal ini karena terjadi efisiensi anggaran yang menyebabkan tidak semua program dapat dilaksanakan pada tahun berjalan. Sementara 47 indikator kinerja *outcome* mencapai target 100 persen, dan 29 indikator kinerja *outcome* melampaui target yang ditetapkan.

3. Review Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu periode 2025-2029 tahun pelaksanaan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Review Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
	Tujuan 1 : Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah	PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	(Juta. Rp)	59,73	74,23		59,73		80,47		Tinggi		
	Sasaran 1: Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	Persen	4,36	6,12		7,43		121,41		Sangat Tinggi		
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usah Mikro dan Kecil yang Di bina	Persen	6,4	8,02	10.059.515	100	363.841.319	1246,88	3616,89	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustian
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian	Persentse SDM Koperasi yang telah memperoleh Pendidikan dan Latihan Perkoprasian	Persen	72,3	100	24.992.940	56,60	143.160.892	56,6	572,81	Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustian
3	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Persentase Peningkatan Perjalanan wisatawan nusanatara yang datang ke kabupaten	Persen	9,89	9,95	134.995.000	40	24.203.400	402,01	17,93	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
4	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Di kembangkan	Persen	0	10,15	24.965.000	0,03	24.222.000	0,30	97,02	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi Pedagangan	Persen	90,1	95,4	68.692.324	77,27	44.750.000	81,00	65,15	Tinggi	Rendah	Dinas Perdagangan
	Sasaran 2 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Persen	4,14	3,2		3,71		86,25		Tinggi		
1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	Persen	50,64	52,77	1.095.131.625	20,00	493.833.245	37,90	45,09	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Ketenagakerjaaaan dan Transmigrasi
2	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga Kerja yang di tempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	20,97	21,43	21.058.841	22,94	62.717.254	107,05	297,82	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Ketenagakerjaaaan dan Transmigrasi
	Sasaran 3 : Meningkatnya Hirilisasi sumber daya unggulan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	Persen	4,09	5,77		4,78		82,84		Tinggi		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
1	program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pembangunan sektor industri	persen	33,33	33,33	301.060.202		443.653.044	0,00	147,36	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
2	Program pengembangan iklim penanaman modal	Realisasi toal investasi terhadap target investasi	persen	12,1	20,368	37.585.115		37.128.400	0,00	98,78	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	persen	-6,06	5,22	44.624.305		44.489.105	0,00	99,70	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase LUAS Wilayah yang beririgasi	persen	89,9	90,8	5.727.989.530	0,00	5.853.579.495	0,00	102,19	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian
	Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribu. Rp)	(Ribu. Rp)	11.121	12.482		11.634		93,21		Sangat Tinggi		
	Sasaran 1 : Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat kemiskinan (%)	Persen	11,71	10,55		10,97		96,17		Sangat Tinggi		
1	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	persen	56,09	62	295.442.478	80,67	213.747.606	130,11	72,35	Sangat Tinggi	Sedang	Dinas Sosial
2	Program pemberdayaan sosial	persentase persediaan lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	persen	87,5	100	11.082.965	100	8.841.760	100,00	79,78	Sangat Tinggi	Tinggi	Dinas Sosial

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
3	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Indeks SPM	Angka	60,34	100	145.701.970.150	95,77	230.557.242.730,11	95,77	79,39	Sangat Tinggi	Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentaase Pemenuhan sxarana dan Prasarana upaya kesehatan masyarakat	persen	100	100	144.700.000.000	100		100,00				Dinas Kesehatan
4	Program hubungan industrial	Persentase Perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak	Persen	50,64	52,77	928.815.264	16,51	1.234.937.100	31,29	132,96	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Ketenaga Kerjaandan Transmigrasi
	Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)	Angka	57,1	57,5		60,89		105,90		Sangat Tinggi		
	Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	Angka	62,18	62,3		62,55		100,40		Sangat Tinggi		
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	persentase pemenuhan dan penerapan SOP Tupoksi Perangkat Daerah	Persen	100	100	740.570.964.185	0	658.194.187.699,00	0,00	88,88	Sangat Rendah	Tinggi	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
2	Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penyelesaian Penyusunan PERDA sesuai dengan Prolegda	Persen	85,71	100	170.553.350	54,54	7.552.616.176	54,54	4428,30	Rendah	Sangat Tinggi	Sekretariat Dewan
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kenaikan capaian LPPD	Persen	1,35	1,35	301.379.360	75	3.438.660.311	5555,56	1140,97	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		Persentase Fasilitas keagamaan dalam Kondisi baik	Persen	100	100	1.790.106.536	75		75,00	192,09			Sekretariat Daerah
		persentase ketersediaan produk hukum daerah	Persen	100	100	301.379.360	100		100,00	1140,97			Sekretariat Daerah
4	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentasetindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	Persen	90	90	1.496.523.197,00	90	1.936.973.620	100,00	129,43	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Inspektorat Daerah
		Persentase tindak Lanjut Temuan BPK	Persen	85	85		82,99		97,64				Inspektorat Daerah
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP	Persen	90	92		90		97,83				Inspektorat Daerah
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi	Persen	100	100		100		100,00				Inspektorat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tangani	Persen	100	100		90		90,00				Inspektorat Daerah
5	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase UMKM yang memperoleh aksese Lembaga Keuangan	Persen	52,09	100	394.846.776	100	1.244.911.753	100,00	315,29	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretaris Daerah
		Tingkat Kematangan keuangan	Persen	8	9	627.916.135	99		1100,00	198,26			Sekretaris Daerah
6	Program kepegawaian daerah	Persentase pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	85,92	100	516.271.806	93,3	1.597.638.351	93,30	309,46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	BKPSDM
		Persentase ASN yang di tingkatkan kopotensinya	Persen	5,48	10,23	1.398.670.112	4,7		45,94	114,23			BKPSDM
		Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen	4,62	6,22	405.171.425	93		1495,18	394,31			BKPSDM
	Sasaran 2 :meningkatkan Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	Angka	79,92	80,37		belum rilis						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pesentase keselarasan nomenklatur dan anggaran Program RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	735.886.913	100	629.227.962	100	85,51	Sangat Tinggi	Tinggi	Badan Perencanaan, Peneli- tian, Pengembanga n dan Litbang Daerah
		Persentase perangkat Daerah Predikat kinerja program "Sangat Tinggi"	Persen	75,22	82		51,43		62,72				
2	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerepan anggaran	Persen	93,95	100	290.582.165.145	93,49	2.603.888.296	93,49	0,90	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Persen	9,97	10,32	2.124.886.865	100	1.963.398.931	968,9922481	92,40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Badan Pendapatan Daerah
	Sasaran 3 :Terwujudnya pemerintahan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	Angka	2,6	2,9		2,76		95,17		Sangat Tinggi		
		Indeks Inovasi Daerah (Angka)	Angka	44,22	44,4		49,34		111,13		Sangat Tinggi		
1	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan Akses internet yang di sediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	19,29	19,29	785.122.710	24,56	564.501.795	127,3198548	71,90	Sangat Tinggi	Sedang	Dinas Kominfo

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
2	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas insormasi publik yang disampaikan termasuk keakurata,n relevansi, dan kecepatan informasi	Persen	80	82,4	1.291.753.050	82,4	1.518.596.149	100	117,56	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Kominfo
		Pesentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	60	62,44		43		68,87				
3	Program pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Persen	3,5	16	204.507.906	4,72	183.231.600	29,5	89,60	Sangat Rendah	Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	35,57	36		38,36		106,56				
4	Program penelitian dan pengembangan daerah	persentase hasil kelitbangan daerah yang mendukung prioritas	Persen	100	100	552.872.734	100	192.135.026,00	100	34,75	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Badan Perencanaan, Peneli tian, Pengembanga n dan Litbang Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
		pembangunan daerah											
5	Program riset dan inovasi daerah	Persentase Inovasi Dearah yang memiliki kematangan >75 dalam IID pada Tahun Pelaporan	Persen	30	40	108.961.180	80,95	102.501.877,00	202,375	94,07	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Litbang Daerah
6	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	Persen	66,24	70,25	502.797.471	2,9	483.214.200,00	4,13	96,11	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	BKPSDM
	Sasaran 4 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	Angka	2,49	2,42		4,56		53,07		Rendah		
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase capaian SPM bidang Pelayanan Trantibun	Persen	100	100	2.083.199.312	96,57	1.896.494.418	96,57	91,04	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Satpol PP
2	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	85	100	622.598.999	95	590.959.548	95,00	94,92	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
	Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	Angka	73,86	74,02		74,66		100,86		Sangat Tinggi		
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	Angka	73,78	80,2		73,78		92,00		Sangat Tinggi		
1	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	54,09	100	107.878.093.765,0	93,99	65.675.317.038	93,99	60,88	Sangat Tinggi	Rendah	Dinas Pendidikan
		Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Persen	71,87	100		93,49		93,49				
		Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasardan atau menengah yang Perpartisipasinya dalam pendididkan kesetaraan	Persen	40,92	100		83,12		83,12				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
2	Program pengembangan kurikulum	Persentase Kurikulum yang Diterapkan	Persen	20	100	274.925.108	100	189.945.108	100,00	69,09	Sangat Tinggi	Sedang	Dinas Pendidikan
3	Program pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang memiliki sertifikat Pendidik	Persen	89,96	81,34	1.608.337.266	71,00	1.392.793.527	87,29	86,60	Tinggi	Tinggi	Dinas Pendidikan
4	Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang berstandar nasional perpustakaan	Angka	20,89	24,59	800.000.000	24,59	720.484.154	100,00	90,06	Sangat Tinggi	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	Angka	82,23	83,09		82,85		99,71		Sangat Tinggi		
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Indeks SPM	Angka	60,34	100	145.701.970.150	0,00	115.883.431.325,41	0,00	79,53	Sangat Rendah	Tinggi	RsUD Batara Guru
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana dan upaya kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	144.700.000.000	94,97		94,97	80,09			RsUD Batara Guru
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	Persen	100	100	619.052.100	n.a	5.350.000	n.a	0,86	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase Peningkatan tingkat Kepuasan pasien di Rumah Sakit	Persen	80,24	100		n.a		n.a	0,86			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Kopetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	77,27	90,27	1.347.377.278	90,79	1.313.184.705	100,58	97,46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	Sasaran 3 : Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan keluarga (Angka)	Angka	56,07	60,36		67,5		111,83		Sangat Tinggi		
		Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	Angka	60,23	60,55		3,07		5,07		Sangat Rendah		
1	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase perempuan kepala keluarga yang di berdayakan	Persen	20	22	0,00	98	0,00	445,45	0,00	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Dinas Perlindungan Perempuan & Perlindungan anak
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak Korban kekerasan yang ditnagani instansi terkait kabupaten	Persen	0,017	100	0,00	49	0,00	49,00	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Perlindungan Perempuan & Perlindungan anak
3	Program pengendalian penduduk	Total Fertility	Angka	2,33	2,35	483.561.141	2,33	349.442.000	99,15	72,26	Sangat Tinggi	Sedang	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
4	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan,orga nisasi sosial kemasyarakatan dan yang mengikuti pelatihan kewiraushaan	Persen	90,01	90,39	38.578.743	90	38.288.500	99,57	99,25	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Program pengembangan daya saing keolahragaan	Persentase peningkatan jumlah medali yang di peroleh dcalam even olahraga nasional dan internasional	Persen	9,29	10,33	2.950.491.492	80	2.372.997.440	774,44	80,43	Sangat Tinggi	Tinggi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks kerukunan umat beragama (Angka)	Angka	73,83	74,22		75		101,05		Sangat Tinggi		
1	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase kenaikan capaian LPPD	Persen	1,35	1,35	301.379.360	75	3.438.660.311	5555,56	1140,97	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		Persentase fasilitas keagamaan dalam kondii baik	Persen	100	100	1.790.106.536	75		75,00	192,09			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
		Persentase Produk hukum Daerah	Persen	100	100	301.379.360	100		100,00	100			
2	Program pengembangan kebudayaan	Persentaser kebudayaan masyarakat yang di kembangkan	Persen	70,57	71,28	860.177.990	25	700.046.375	35,07	81,38389765	Sangat Rendah	Tinggi	dinas pariwisata dan kebuyaan
	Tujuan 5 : Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan	Indeks ekonomi hijau (Angka)	Angka	9,82	50,22		belum rilis						
		Indeks ekonomi biru (Angka)	Angka	90,31	101,14		belum rilis						
	Sasaran 1 : Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	(Ton/Ha)	6,10	6,50		6,20		95,38		Sangat Tinggi		
		Nilai Tukar Petani (NTP) (Angka)	Angka	100,66	101,17		111,2		109,91		Sangat Tinggi		
1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persenase peningkat produksi peternakan	Persen	5,53	8,67	5.561.972.873	0,42	5.432.790.508	4,84	97,68	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas pertanian
		persentase peningkatan komoditi tanaman hortikultura	Persen	16,09	4,12		-34,21		-830,34				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
		persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan	Persen	0,17	2,34		-0,15		-6,41				
		persentase peningkatan produksi Komodititi tanaman pangan	Persen	-1,99	2,5		2,76		110,40				
2	Program penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang di tingkatkan	Persen	76,22	84,14	1.753.963.400	100	1.474.515.567	118,85	84,07	Sangat Tinggi	Tinggi	Dinas pertanian
	Sasaran 2 : Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas perikanan (Ton/Ha)	(Ton/Ha)	8,04	10,22		10,02		98,04		Sangat Tinggi		
		Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Angka)	Angka	109,22	110,2		110,35		100,14		Sangat Tinggi		
1	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	0,33	1,5	916.304.000	0,01	937.702.899	0,67	102,34	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Perikanan
2	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	0,64	1,89	587.294.150	0,03	449.144.750	1,59	76,48	Sangat Rendah	Tinggi	Dinas Perikanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
3	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Komsumsi lkan	Persen	56,26	57,39	15.431.600	57,5	0,00	100,19	0,00	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Dinas Perikanan
	Sasaran 3 : Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan pangan Angka)	Angka	82,23	82,77		71,45		86,32		Tinggi		
1	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat Komsumsi Energi	kkal/kapita/hr	-85,19%	109,52%	333.235.407	63,59	347.675.382	5806,25	104,33	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan pangan
		Tingkat Komsumsi Protein	gram/kapita/har	99,65%	-108,77%		19,85		-1824,95				
		Rasio CadanganPangan Pemerintah Kabupaten	Persen	24%	-37%		0,5		-135,14				
	Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur (Angka)	Angka	2,63	2,72		2,64		97,06		Sangat Tinggi		
	Sasaran 1 : Meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas Wilayah (%)	Persen	13,2	14,02		19,68		140,34		Sangat Tinggi		
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap kabupaten	Persen	36,67	32,54	30.240.675.830	31,8	3.057.722.590	97,73	10,11	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Tingkat pelayanan lalu lintas (v/c)	Persen	60	100	49.669.038	0,52	4.807.896.018	0,52	9679,87	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
	Sasaran 2 : Terpenuhiya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	Persen	10,9	10,66		68,17		639,49		Sangat Tinggi		
		Akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	Angka	21,71	28		22,25		79,46		Tinggi		
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadapvair minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	80,41	81,02	884.431.000	81,08	678.855.750	100,07	76,76	Sangat Tinggi	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan	Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persen	0,14	4,12		89,61		2175		Sangat Tinggi		
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase jsln ysng memiliki drainase/saluran pembuangair (minimal 1,5 m)	Persen	80,9	81,02	557.705.895	0,5801	0,00	0,72	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)yang di tangani	Persen	3,96	6,18	5.338.223.430	1,25	975.940.625	20,23	18,28	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang di tangani	Persen	0,07	2,44	1.128.400.093	0,75	358.951.000	30,74	31,81	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Program Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	0	16,67	100.000.000	N.a	0	N.a	0,00	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Dinas Pertanahan
	Tujuan 7 : Meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan Desa	Indeks desa (Angka)	Angka	70,32	72,21		68,73		95,18		Sangat Tinggi		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
	Sasaran 1 : Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa mandiri (%)	Persen	14,49	19,32		17,87		92,49		Sangat Tinggi		
1	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Bumdes yang Terkelola dengan baik	Persen	50,2203	52,86	3.842.379.508	15,46	3.540.840.464	29,25	92,15	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Indeks SDGs desa	Persen	4,83092	7,25		43,98		606,62				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Persen	16,91	21,74	783.182.134	18,81	1.074.268.769	86,52	137,17	Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Tujuan 8 : Meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	Persen	10	14,82		belum rilis						
	Sasaran 1 : Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (Angka)	Angka	186,59	189,22		147,48		128,30		Sangat Tinggi		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
1	Program penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	95	100	25.522.623.727	100	399.787.492	100	1,57	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persen	90	100		100		100				
		Persentasewarga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100		100		100				
2	Program pengembangan perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korbanbencana kabupaten	Persen	100	100	264.860.373	100	111.243.350	100	42,00	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

N o	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
		persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	0	100		0		0				
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	23,52	35,23	93.208.590	100	120.382.646	283,85	129,15	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase kasus kebakaran di WMK yang tetangani dalam waktu 15 menit	Persen	61,76	100		64,70		64,70				
4	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	93,12	100	240.589.321	100	209.122.112	100,00	86,92	Sangat Tinggi	Tinggi	Dinas Sosial

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Tujuan/Sasaran/Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Tahun 2025				Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2025		Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
					Target	Rp							
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)		48,48	76,54		81,98		107,11		Sangat Tinggi		
1	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan nilai indekskualitas air	Persen	68,24	100	76.114.569	93,8	193.044.670	93,80	253,62	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah wilayah kabupaten	Persen	96,31	100	9.596.587.472	97,88	2.453.648.252	97,88	25,57	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Penyelenggaraan Penata Ruang	ketaatan terhadap RTRW	Persen	5,62	5,69	880.467.508	5,63	307.658.877	98,95	34,94	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	Persen	70,89	72,89	400.000.000	3,13	0	4,29	0,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sumber: OPD Kabupaten Luwu, 2026.

2.6.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Berdasarkan Urusan Tahun 2025

Evaluasi realisasi anggaran dan kinerja pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu berdasarkan urusan sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 rata-rata berpredikat sangat tinggi untuk kinerja dan anggaran dengan klasifikasi realisasi dari 91-100 persen. Capaian kinerja dan anggaran per urusan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja kategori Sangat Tinggi, dan untuk realisasi anggaran masuk dalam kategori Tinggi;
2. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja dalam kategori Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran masuk dalam kategori Sangat Tinggi;
3. Urusan Pemerintah Pilihan dengan rata-rata capaian kinerja dalam kategori Tinggi, dan realisasi anggaran masuk dalam kategori Sangat Tinggi;
4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah dengan rata-rata capaian kinerja masih dalam kategori Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran masuk dalam kategori Sangat Tinggi;
5. Unsur Penunjang Urusan pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja dalam kategori Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran masuk dalam kategori Sangat Tinggi;
6. Unsur pengawasan Urusan pemerintahan rata-rata capaian kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran juga masuk dalam kategori Sangat Tinggi; dan
7. Unsur pemerintahan umum rata-rata capaian kinerja dalam kategori Sangat Tinggi, sementara untuk realisasi anggaran juga masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Tabel 2.101.
Capaian Kinerja RKPD berdasarkan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Luwu Tahun 2025

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp. (%)	K	Rp.
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	1.035.238.052.802	971.612.826.625	883.264.434.548	86,69	90,91	Tinggi	Tinggi
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	939.610.874.078	886.460.995.942	804.396.832.614	92,85	90,74	Sangat Tinggi	Tinggi
I	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	465.186.014.085	433.831.750.189	428.986.103.106	103,68	98,88	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
I	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	359.105.273.940	395.905.092.615	324.011.746.964	94,27	81,84	Sangat Tinggi	Tinggi
I	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	55.086.552.271	24.354.888.425	21.436.715.867	101,53	88,02	Sangat Tinggi	Tinggi
I	04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	12.121.926.349	8.107.417.581	7.519.453.256	66,44	92,75	Sedang	Sangat Tinggi
I	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	43.150.619.170	19.658.436.225	18.314.572.669	96,55	93,16	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
I	06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4.960.488.263	4.603.410.907	4.128.240.752	94,61	89,68	Sangat Tinggi	Tinggi
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	95.627.178.724	85.151.830.683	78.867.601.934	80,54	92,62	Tinggi	Sangat Tinggi
2	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.295.399.374	2.287.359.422	2.142.258.238	53,81	93,66	Rendah	Sangat Tinggi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp. (%)	K	Rp.
2	02	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	71.359.594	55.258.435	54.920.100	105,50	99,39	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	7.495.767.172	7.349.504.782	6.708.289.193	78	91,28	Tinggi	Sangat Tinggi
2	08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.288.262.406	3.124.274.485	2.760.556.446	100	88,36	Sangat Tinggi	Tinggi
2	09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3.913.160.021	3.834.565.268	3.562.589.561	82,25	92,91	Tinggi	Sangat Tinggi
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	12.993.637.471	5.969.165.433	5.622.698.619	92,11	94,20	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.154.254.106	5.481.202.339	5.170.755.264	79,24	94,34	Tinggi	Sangat Tinggi
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.811.740.363	8.935.470.255	8.433.798.507	52,45	94,39	Rendah	Sangat Tinggi
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.784.183.801	9.935.451.715	8.413.192.535	55,52	84,68	Rendah	Tinggi
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	10.947.050.061	10.179.029.904	9.681.881.146	106,19	95,12	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	6.509.213.670	6.485.044.488	6.277.501.553	105,50	96,80	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	3.098.827.406	3.332.173.948	3.122.506.701	53,25	93,71	Rendah	Sangat Tinggi

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp. (%)	K	Rp.
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5.007.037.742	4.724.490.446	4.344.409.548	53,19	91,96	Rendah	Sangat Tinggi
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	6.907.320.247	6.395.476.379	6.024.742.174	54,25	94,20	Rendah	Sangat Tinggi
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	35.263.100	30.998.432	30.960.000	105,50	99,88	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.530.242.981	1.365.932.534	1.205.621.205	77,13	88,26	Tinggi	Tinggi
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.749.028.937	5.618.577.146	5.268.442.507	97,92	93,77	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	35.430.272	47.855.272	42.478.637	97,92	88,76	Sangat Tinggi	Tinggi
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	49.857.182.405	49.042.611.343	47.098.146.517	83,15	96,04	Tinggi	Sangat Tinggi
3	03	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6.529.607.445	5.837.317.692	5.461.183.538	113,8	93,56	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	6.269.269.684	6.162.093.183	5.884.261.416	76,71	95,49	Tinggi	Sangat Tinggi
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.654.340.450	3.655.581.170	3.463.815.681	77,13	94,75	Tinggi	Sangat Tinggi
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	32.786.439.835	32.605.912.242	31.537.370.052	100	96,72	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	610.413.263	774.595.328	748.075.990	53,25	96,58	Rendah	Sangat Tinggi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp. (%)	K	Rp.
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	7.111.728	7.111.728	3.439.840	78	48,37	Tinggi	Sangat Rendah
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	70.803.593.090	68.471.689.400	63.954.120.923	88,59	93,40	Tinggi	Sangat Tinggi
4	01	Sekretariat Daerah	40.686.167.730	37.095.240.289	33.631.109.890	96,87	90,66	Sangat Tinggi	Tinggi
4	02	Sekretariat DPRD	30.117.425.360	31.376.449.111	30.323.011.033	80,3	96,64	Tinggi	Sangat Tinggi
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	327.871.021.169	38.238.786.413	35.234.806.128	77,42	92,14	Tinggi	Sangat Tinggi
5	01	Perencanaan	6.351.122.889	6.246.890.538	5.747.877.045	91,70	92,01	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	02	Keuangan	312.709.088.823	23.790.134.268	22.179.088.504	100,00	93,23	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	03	Kepegawaian	7.646.178.072	7.395.232.520	6.632.491.353	51,84	89,69	Rendah	Tinggi
5	04	Pendidikan Dan Pelatihan	502.797.471	565.675.891	483.214.200	51,84	85,42	Rendah	Tinggi
5	05	Penelitian Dan Pengembangan	661.833.914	240.853.196	192.135.026	91,70	79,77	Sangat Tinggi	Tinggi
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.165.371.539	9.817.885.823	9.517.659.187	96,25	96,94	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	01	Inspektorat Daerah	10.165.371.539	9.817.885.823	9.517.659.187	96,25	96,94	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode		Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	Realisasi	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja RKPD			
						K(%)	Rp. (%)	K	Rp.
7		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.474.675.514	5.407.130.204	5.141.924.038	100	95,10	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.474.675.514	5.407.130.204	5.141.924.038	100	95,10	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

2.7. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN ISU STRATEGIS

Penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari upaya mencapai tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauhmana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan.

Sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah, sebuah kebijakan publik selalu selalu diawali dengan identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*). Suatu analisis dilakukan guna menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa mendatang adalah kesempatan yang memberi peluang positif atau yang memberi dampak buruk bagi masyarakat. Hal-hal semacam ini harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Subbab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, serta rangkaian kerja program kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 mendatang.

2.7.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Langka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan. Dengan mengacu pada hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, sebagaimana telah disajikan pada Bab II Gambaran Umum, maka dirumuskan sejumlah permasalahan yang dijadikan dasar pemikiran dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesejahteraan yang Masih Rendah dan Belum Merata

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa pendekatan kondisi sosial ekonomi, salah satunya ialah kemiskinan yang acap kali menjadi polemik bagi suatu daerah karena banyaknya variabel yang berpengaruh terhadapnya. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2025 dapat mencapai 10,97%. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik namun capaian ini masih berada pada posisi sedikit diatas dari target 10,55%. Sedangkan *gini ratio* yang berada pada angka 0,331 menandakan masih terjadi ketimpangan pendapatan masyarakat. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk memiliki pendapatan yang rendah.

Rendahnya pendapatan masyarakat sangat erat berhubungan dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dimana apabila pendapatan masyarakat yang rendah maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Secara statistik, pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Luwu dalam beberapa tahun terakhir cenderung membaik (59,73 Juta) namun masih jauh tertinggal dari beberapa daerah lainnya hal ini sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka yang berhasil ditekan diangka 3,71%. Kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah yang mencapai 10,86% juga menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu masih tergolong rendah.

2. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Yang Belum Merata

Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah yang eksistensinya diukur tidak hanya dari kuantitasnya, tetapi juga harus dijamin kualitasnya sesuai dengan standar, serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Merujuk pada capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan perumahan permukiman, secara umum ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar daerah masih tergolong rendah.

Tercatat panjang jalan kabupaten di Kabupaten Luwu adalah 1.823,4 km, dimana pada tahun 2025 jaringan jalan yang berada dalam kondisi mantap hanya sekitar 579,8 km atau 31,8%. Hal ini tentu saja berdampak pada mobilitas manusia dan barang serta konektifitas antar wilayah yang terhambat. Kondisi ini diperparah dengan layanan sistem drainase yang rendah, dimana drainase dan gorong-gorong yang ber kondisi baik hanya sekitar 10,43%. Demikian pula kualitas layanan irigasi dan pengairan, dimana irigasi kabupaten dalam kondisi baik hanya sekitar 69,19%, padahal Kabupaten Luwu termasuk dalam kategori kawasan rawan bencana dan kawasan lumbung pangan.

Di bidang perumahan dan permukiman, penyediaan PSU juga belum optimal dimana luasan kumuh di wilayah perkotaan mencapai 7,60% dengan rumah tangga yang mengakses sanitasi aman hanya sebesar 4,96%. Sedangkan penyediaan air minum sudah tergolong baik yakni sebesar 81,08% namun capaian ini menunjukkan layanan belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Tingkat Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Rendah

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Pendidikan yang berkualitas berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Berdasarkan kinerja capaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu, berbagai data menunjukkan bahwa layanan pendidikan yang berkualitas belum dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Hal ini ditandai

salah satunya oleh capaian Rerata lama sekolah (RLS) Kabupaten Luwu pada tahun 2025 hanya mencapai 8,96 Tahun dimana hal ini berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SMP kelas 3. Hal ini diperparah dengan masih adanya angka putus sekolah pada tingkat SD/MI sebesar 0,06% dan tingkat SMP/MTs sebanyak 1,82%.

Berbagai kondisi ini perlu menjadi perhatian penting pemerintah dengan meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan sistem dan layanan yang inklusif, pengajar berkompeten dan sarana prasana pendidikan yang memadai. Pemerintah juga perlu menunjukkan keberpihakan terhadap anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah agar tidak ada lagi anak-anak sekolah yang harus putus sekolah dikarenakan keterbatasan biaya.

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan secara Inklusif. Secara umum derajat kesehatan masyarakat mencerminkan tingkat Kesehatan bagi masyarakat yang terutama pada kasus-kasus penyakit menular, gizi buruk, tingginya angka stunting sampai dengan masih adanya kasus kematian bayi dan balita. Kesenjangan aksesibilitas layanan kesehatan selain dipengaruhi oleh aspek morfologi wilayah, juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan dokter dan paramedis, serta tingkat pendapatan masyarakat.

Kebijakan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi pondasi dasar dalam membangun upaya kesehatan yang kemudian juga harus diikuti dengan peningkatan layanan pada fasilitas kesehatan tingkat dasar, dimana hanya terdapat sekitar 60 persen unit layanan kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap. Hal ini juga diperparah dengan rasio ketesediaan dokter yang hanya mencapai 0,00020. Dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, berbagai hal lain juga harus diperhatikan seperti aspek kemudahan, dan kenyamanan layanan yang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan teknologi seperti seperti layanan konsultasi

dan pemeriksaan kesehatan jarak jauh untuk mengatasi masalah aksesibilitas masyarakat yang terbatas.

4. Tata Kelola dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Belum Optimal

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dalam penyelenggaraannya mengaplikasikan prinsip-prinsip *clean and good governance*, dimana aspek transparansi dan akuntabilitas memegang peranan penting didalamnya. Disamping itu pelayanan prima sebagai aspek penting dalam pemerintahan harus didukung dengan sistem dan aparatur yang handal dan terampil, berbagai variabel ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola dan tata laksana pemerintahan yang baik.

Berdasarkan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 79,92 menggambarkan perlu adanya perbaikan, terutama pada aspek kemandirian keuangan. Disamping itu, sebagaimana laporan hasil evaluasi SAKIP sebesar 62,55 juga mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan. Kedua capaian ini menjadi penting untuk diperhatikan guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pengelolaan keuangan, perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja. Sedangkan dari aspek pelayanan publik, Nilai IKM hanya mencapai angka 2,4 (Cukup) merefleksikan perlu adanya upaya peningkatan yang masif dan terutama pada aspek kemudahan layanan dimana dengan capaian 2,6, elektonifikasi sistem pemerintahan (SPBE) juga memang belum berjalan optimal.

Dari aspek pengelolaan kepegawaian daerah, penerapan merit sistem dalam penempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi yang masih rendah (rerata 16,23 JP per orang/tahun) menjadi salah satu aspek yang harus ditingkatkan mengingat aparatur menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan dan ujung tombak pelayan masyarakat. Disisi lain, berdasarkan pengukuran kemandirian desa, hanya terdapat 11 (sebelas) desa berstatus mandiri dari total 207 desa yang berada diwilayah Kabupaten Luwu yang mana hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa belum berjalan baik sehingga pembinaan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan desa perlu ditingkatkan sejalan dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pedesaan.

5. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Yang Rendah

Pembangunan berkelanjutan menjadi isu yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi perhatian dunia. Dengan fenomena perubahan iklim dan degradasi lingkungan, pemerintah di seluruh dunia dituntut dapat melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan dan menjamin kelestarian lingkungan. Gagasan mengenai konsep Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam Pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi dan sosial. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dokumen tata ruang mengatur peruntukan kawasan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berpengaruh tidak hanya dari sisi kepentingan ekonomi tetapi juga menjamin jasa ekosistem lingkungan tetap terjaga. Dengan perkembangan pembangunan, alih fungsi lahan menjadi kegiatan yang tidak dapat terbantahkan namun perubahan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dapat meminimalisir degradasi lingkungan. Dengan persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang hanya sebesar 5,32% mengindikasikan banyaknya pembangunan yang belum berkesesuaian dengan peruntukannya atau bahkan tidak melalui proses dan mekanisme perizinan yang ditetapkan. Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti dengan memperkuat aspek pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Degradasi lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang berkegiatan didalamnya. Kegiatan pertanian dan perkebunan yang tidak terkontrol pada wilayah-wilayah

pegunungan dan bantaran sungai dapat mempengaruhi turunnya jasa ekosistem disekitarnya yang kemudian dapat memicu terjadinya bencana, terutama banjir dan longsor dimana tercatat bahwa 7,71% sempadan sungai digunakan oleh bangunan liar. Berbagai potret permasalahan ini tentunya perlu mendapat perhatian penting, semisal dengan pembatasan dan pengaturan jenis vegetasi dan tanaman yang diperbolehkan untuk dibudidayakan. Disisi lain dalam lima tahun terakhir tercatat rata-rata timbulan sampah yang tertangani hanya 80% yang juga mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan dan layanan persampahan diwilayah Kabupaten Luwu yang keserluruhannya akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

6. Pemanfaatan Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Masih Belum Optimal

Pengelolaan potensi perekonomian daerah merupakan suatu upaya terpadu yang dilakukan oleh pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ini melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang kemudian nantinya bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan karakteristik wilayah yang khas sumber daya alam yang melimpah nyatanya belum mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat inklusif bagi masyarakat.

Belum optimalnya pengelolaan perekonomian daerah diantaranya dapat terlihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB tetapi belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani yang signifikan, pun demikian halnya dengan para nelayan. Dengan produktifitas pertanian sebesar 6,37 ton/tahun dan perikanan 7,9 ton/tahun seharusnya dapat lebih dioptimalkan mengingat modernisasi berbagai sarana dan prasarana serta teknik/metode pertanian dan perikanan yang berkembang pesat.

Upaya-upaya lain seperti pengembangan sektor UMKM dan pariwisata juga harus terus didorong sehingga kontribusinya dapat meningkat dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah

juga perlu meningkatkan upaya promosi investasi daerah sejalan dengan kebijakan kemudahan proses perizinan didalamnya. Dengan tren investasi dan penanaman modal yang meningkat, menggambarkan bahwa Kabupaten Luwu memiliki potensi yang besar sehingga upaya penguatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat sehingga nantinya dapat mendorong kegiatan-kegiatan yang menstimulasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

7. Peran Desa Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal Belum Berjalan Secara Optimal

Desa memiliki peran strategis sebagai fondasi perekonomian nasional karena menyimpan potensi sumber daya alam, manusia, dan sosial budaya yang sangat besar. Di tingkat kabupaten, desa seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, kerajinan tangan, dan industri rumah tangga. Namun, pada kenyataannya, banyak desa di wilayah kabupaten belum mampu menjalankan peran tersebut secara optimal. Berbagai potensi lokal yang dimiliki sering kali belum diidentifikasi dan dikembangkan secara menyeluruh karena keterbatasan data, kurangnya perencanaan pembangunan yang berbasis potensi wilayah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Banyak desa hanya menjalankan program-program yang bersifat seremonial atau mengikuti instruksi dari pemerintah pusat tanpa memahami kebutuhan dan keunggulan komparatif yang dimiliki.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya peran desa dalam mendorong perekonomian daerah adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, baik dalam aspek manajerial, kewirausahaan, maupun pengelolaan potensi lokal. Aparatur desa masih banyak yang belum memiliki kemampuan teknis dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan

produksi, irigasi, pasar desa, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian masih belum merata dan memadai. Hal ini menyulitkan pelaku ekonomi di desa untuk mengembangkan usahanya atau mengakses pasar yang lebih luas. Tak hanya itu, lemahnya sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan turut memperburuk kondisi ini. Perencanaan pembangunan yang seharusnya bersifat bottom-up sering kali menjadi top-down, sehingga banyak kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat desa.

Lebih lanjut, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi desa juga belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Banyak BUMDes yang belum mampu menjalankan fungsi usaha secara profesional karena kurangnya pembinaan, modal kerja, dan akses terhadap jaringan usaha yang lebih luas. Di sisi lain, keterlibatan pemuda dan perempuan dalam kegiatan ekonomi desa juga masih rendah, padahal mereka merupakan aset penting dalam menggerakkan inovasi ekonomi desa berbasis potensi lokal. Selain itu, ketergantungan desa pada dana transfer dari pusat seperti Dana Desa juga sering kali menyebabkan inisiatif lokal menjadi pasif dan menunggu arahan dari pemerintah kabupaten atau pusat, bukan tumbuh dari inisiatif internal desa sendiri. Ini menjadi indikasi bahwa belum terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan, sebagaimana data tahun 2024 menunjukkan hanya terdapat (satu) 1 Bumdes dengan kategori maju dan 21 Bumdes berkategori berkembang di wilayah Kabupaten Luwu.

2.7.2. PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, diidentifikasi sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
1.	Pendidikan	▪ APK PAUD 32,68% dari 19.892 jiwa penduduk usia 4-6 tahun ▪ APK SMP/MTs/Paket B 88,91% dari 22.008 jiwa penduduk usia 13-15 tahun ▪ Angka Putus Sekolah SD/MI 0.06% dari 40.156 murid, dan SMP/MTs 1,82% dari 18.746 siswa ▪ Ruang kelas SD/MI kondisi rusak 52,26% dari 2.103 ruang kelas ▪ Ruang kelas SMP/MTs kondisi rusak 25,06% dari 451 ruang kelas ▪ Guru tenaga pendidik yang memenuhi kalifikasi S1/D-IV 73,29% dari 5.162 guru, dan memiliki sertifikasi pendidik 56,10% ▪ Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-12 Thn 263 Org, usia 13-15 thn 821 org, usia 16-18 thn 1.660 org ▪ Rata-rata kemampuan literasi peserta didik 62,04% (Indeks Literasi 63,73), rata-rata kemampuan numerasi 73,70% (Angka Numerasi 65,89%). ▪ Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 66,78 poin ▪ Penerapan kurikulum sekolah 73,17%, dan penerapan kurikulum muatan lokal ada 2 kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan non formal	✚ Rendahnya Angka Partisipasi Kasar pada jenjang PAUD dan SLTP ✚ Adanya anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs ✚ Banyaknya ruang kelas yang kondisi rusak ✚ Belum optimalnya kualitas dan mutu pendidikan khususnya kemampuan literasi dan numerasi anak didik ✚ Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan budaya literasi masyarakat ✚ Kurikulum sekolah belum sepenuhnya diterapkan oleh beberapa satuan pendidikan termasuk kurikulum muatan lokal yang masih terbatas
2.	Kesehatan	▪ Angka Kematian Bayi (AKB) per1000 KH 11.18, ada 52 bayi meninggal berumur kurang 1 tahun dari 4651 lahir hidup ▪ Angka Kematian Neonatal per 1000 KH 9,25, ada 43 meninggal berumur kurang 1 bulan dari 4651 lahir hidup	✚ Belum optimalnya kualitas dan cakupan pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan Balita ✚ Masih tingginya kasus Balita stunting dan penderita TBC ✚ Masih adanya warga/penduduk yang

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
		▪ Tingkat prevalensi tuberculosi per 100.000 pddk 199, ada 765 penderita TBC ▪ Cakupan kunjungan ibu hamil K4 52,68 dari 8.645 ibu hamil ▪ Cakupan pelayanan anak Balita 71,59% dari 30.340 orang Balita ▪ Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 95% ▪ Rumah tangga yang menerapkan PHBS 58,96% ▪ Prevalensi Stunting Balita 6,20% ▪ SDM bidang kesehatan yang memiliki kompetensi meningkat 90,79% ▪ Status akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan minimal Madya 80% ▪ Pemenuhan sarana dan prasarana upaya kesehatan masyarakat 94,97%	belum tercover jaminan kesehatan nasional ✚ Belum maksimalnya cakupan Rumah Tangga yang menerapkan PHBS ✚ Masih ada SDM tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar kompetensi ✚ Masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi, dan sarana prasarana masih terbatas
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	▪ Luas Daerah Irigasi kondisi baik 6.161 Ha atau 69,19% ▪ Penduduk dengan akses air minum 81,08% ▪ Proporsi jaringan jalan kondisi mantap 31,80% dari 1.823,4 Km jalan kabupaten ▪ Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak 75,99%, sanitasi aman 4,96% dari 79.950 RT, sedangkan RT dengan akses layanan SPALD-T 0,68% ▪ Wilayah perkotaan yang terlayani oleh sistem persampahan 3,13%	✚ Daerah Irigasi yang kondisi tidak baik cukup luas ✚ Sebagian Penduduk belum memiliki akses air minum layak ✚ Tingkat kemantapan jalan kabupaten cukup rendah ✚ Rumah Tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak dan aman cukup tinggi ✚ Kurangnya cakupan wilayah yang mendapatkan layanan persampahan
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	▪ Rumah tangga MBR dengan akses hunian layak terjangkau 77,78% dari 41.142 rumah MBR ▪ Cakupan ketersediaan rumah layak huni 89,27% dari total 85.004 unit rumah ▪ Lingkungan permukiman kumuh seluas 209,09 Ha atau 0,07% dari luas wilayah kabupaten	✚ Rumah Tangga MBR yang belum memiliki hunian layak cukup banyak ✚ Adanya beberapa titik permukiman kumuh di kawasan perkotaan ✚ Lingkungan perumahan masih sebagian besar belum terpenuhi kebutuhan PSU

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
		▪ Luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani 25,04% dari total 6,27 Ha ▪ Perumahan yang telah dilengkapi PSU 7,60%	
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	▪ Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah 18 kasus ▪ Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) 37 kasus ▪ Kejadian bencana banjir 34 kali, tanah longsor 10 kali dan puting beliung 10 kali, keseluruhan ada 3.119 KK yang terdampak ▪ Kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK ada 85 kasus dan yang tertangani 55 kasus, dengan luas WMK 1.984,37 Km²	✚ Terjadinya beberapa kasus pelanggaran ketertiban dan ketentraman maupun pelanggaran Peraturan Daerah ✚ Belum optimalnya mitigasi bencana ✚ Belum maksimalnya cakupan penanganan kasus kejadian kebakaran
6.	Sosial	▪ PPKS yang memperoleh bantuan sosial 71,79%, dan perlindungan jaminan sosial 80,67% dari total 76.416 PPKS ▪ Penyandang cacat fisik dan mental, serta Lansia tidak potensial menerima jaminan sosial 89,33% ▪ Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 79,41% ▪ Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 90,10% ▪ Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 87,98%	✚ Warga sebagai PPKS yang belum sepenuhnya memperoleh bantuan sosial dan perlindungan jaminan sosial ✚ Belum maksimalnya cakupan rehabilitasi sosial bagi anak telantar, disabilitas dan lansia

B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
1.	Tenaga Kerja	▪ Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 22,94% dari total 6.405 Pencaker ▪ Perusahaan yang menerapkan K3 3,77% dari total 424 perusahaan ▪ Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 92,90% ▪ Tenaga kerja yang mendapat pelatihan	✚ Penempatan pencari kerja masih rendah dari total pencari kerja ✚ Rendahnya perusahaan yang menerapkan K3 ✚ Masih adanya tenaga kerja yang belum tercakup dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
		kompetensi 12,56% dari 637 pendaftar ▪ Tenaga kerja bersertifikat kompetensi 20,00% ▪ Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah 22,94%	✚ Rendahnya pemenuhan pelatihan kompetensi bagi tenaga kerja ✚ Rendahnya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi ✚ Layanan antar kerja bagi tenaga kerja belum maksimal
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	▪ Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 0,26% dari 13.082 pekerja perempuan ▪ Perempuan yang menduduki kursi di DPRD 11,43% dari 35 kursi DPRD ▪ Partisipasi perempuan di lembaga swasta 22,19% dari 13.082 pekerja perempuan ▪ Kekerasan kepada perempuan dan anak 50 kasus (aduan/laporan) 100% mendapat penanganan unit layanan ▪ Indeks Pembangunan Gender 92,83, Indeks Pemberdayaan Gender 58,03, Indeks Ketimpangan Gender 0,53, dan Indeks Perlindungan Anak 56,47 ▪ Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 1,58 ▪ Perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	✚ Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta masih rendah ✚ Masih adanya kasus-kasus kekerasan kepada perempuan dan anak, serta pernikahan usia anak ✚ Rendahnya kapasitas pemberdayaan gender dan perlindungan anak
3.	Pangan	▪ Daerah rawan pangan 64 desa/ kelurahan, sebaran terbanyak di kecamatan Bastem 12, Bastem Utara 12, Latomojong 10, Larompong 6 ▪ Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan 66,67% ▪ Skor Pola Pangan Harapan 90,60 ▪ Ketersediaan pangan utama 720,25 kg/kpt/thn, (280.361.000 kg terhadap 389.256 penduduk) ▪ Ketersediaan Protein 215 gram/kpt/hr, dan	✚ Banyaknya wilayah desa yang masih kategori rawan pangan ✚ Masih adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi harga pangan dan distribusi pangan ✚ Pola pangan harapan belum optimal

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
		ketersediaan energi 7.474 kkal/kpt/hr	
4.	Pertanahan	▪ Luas lahan bersertifikat 15% dari 3.000,25 Ha luas wilayah Kab. Luwu ▪ Sengketa tanah negara 10 kasus, yang selesai 4 kasus atau 40% ▪ Aset tanah Pemda yang bersertifikat 17%	✚ Luasan lahan/tanah bersertifikat masih rendah ✚ Rendahnya tingkat penyelesaian kasus sengketa tanah
5.	Lingkungan Hidup	▪ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,54 mencakup Indeks kualitas air 77,28; kualitas udara 80,41 dan; kualitas tutupan lahan 68,09 ▪ Ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap dokumen lingkungan yang diterbitkan 83,33% ▪ Timbulan sampah yang tertangani 37,81% dari total 56.272,05 Ton sampah, dan 20,7% pengurangan melalui 3R ▪ Area pelayanan persampahan 62,87 Km² atau 2,1% dari luas wilayah Kabupaten	✚ Kurangnya ketaatan stakeholder dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ✚ Rendahnya cakupan dan kualitas layanan dan penanganan persampahan
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	▪ Penduduk wajib KTP yang telah ber-KTP 97,66% dari 280.759 jiwa yang berusia >17 tahun dan atau telah menikah ▪ Penduduk yang ber-KK 99,70% dari 130.459 pasangan keluarga/nikah ▪ Bayi ber-Akte Kelahiran 96,14% dari 8.372 bayi, dan kepemilikan KIA anak usia 0-17 tahun 38,36% ▪ Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 52,62% ▪ Pasangan yang ber-Akte Nikah 49,14% dari 164.404 pasangan nikah ▪ Kepemilikan Akta Cerai 45,02% dari 5.662 orang dengan status Perceraian Tercatat ▪ Lembaga pemerintah dengan perjanjian kerjasama Dukcapil untuk memanfaatkan data informasi kependudukan 2,86%	✚ Adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil (KTP, KK, Akte Kelahiran, maupun Akta Nikah dan Akta Cerai) ✚ Pemanfaatan dan pengelolaan data informasi kependudukan belum maksimal

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Desa Tertinggal 18,36% (38 Desa), Desa Maju 33,33% (76 desa), dan Desa Mandiri 17,87% (37 Desa) - Sarana prasarana perkantoran pemeritahan desa yang baik 57,97% - Kelompok binaan LPM 213 kelompok atau 32,72% dari jumlah 651 LPM - Kelompok binaan PKK 7 kelompok atau 2,81% dari jumlah 249 PKK - BUMDes yang terkelola dengan baik 15,46%, dan Indeks SDGs Desa 43,98	- Adanya ketimpangan pembangunan desa, beberapa desa masih kategori tertinggal - Sarana prasaran perkantoran beberapa pemerintah desa masih belum memadai - Lemahnya kapasitas pembinaan kelompok LPM dan PKK di desa - Lemahnya kapasitas pengelolaan BUMDes dan SDGs Desa
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Total Fertility Rate (TPR) 2,29, dan laju pertumbuhan penduduk 0,97% - Akseptor KB 87,51% dari 43.346 Pasangan Usia Subur (PUS) - Angka pemakaian kontrasepsi /mCPR perempuan menikah usia 15-49 tahun 61,77% dari total 43.346 PUS - Indeks Pembangunan Keluarga 67,5 - Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi 77,7% - Rata-rata usia kawain pertama wanita - BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 80%	- Pengendalian penduduk dengan Angka Kelahiran Total belum mencapai kondisi ideal - Masih kurangnya kualitas dan cakupan pelayanan KB kepada PUS - Belum optimalnya penyelenggaraan bina keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga
9.	Perhubungan	- Kepemilikan KIR angkutan umum 52,71% dari jumlah 1.400 angkutan umum - Pemenuhan pemasangan rambu-rambu jalan 65% dari yang seharusnya terpasang 500 unit - Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan 0,02 Km/Unit - Layanan angkutan darat 25,78%	- Banyaknya angkutan umum yang belum memenuhi standar kelayakan kendaraan - Kurangnya ketersediaan rambu-rambu jalan pada titik-titik strategis untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas - Terminal angkutan penumpang belum berfungsi secara baik
10.	Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan telekomunikasi berdasarkan luas wilayah	Adanya beberapa wilayah yang <i>blank spot</i> telekomunikasi

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
		92% dan penduduk yang menggunakan HP 81,38% ▪ Rumah tangga dengan akses internet 72,31% ▪ Cakupan akses layanan internet di desa dengan baik 67% ▪ Cakupan layanan internet pada OPD yang dikelola 24,56% ▪ Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ▪ Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah 90%	✚ Cakupan akses layanan internet di desa/pedesaan belum merata ✚ Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi belum maksimal ✚ Belum optimalnya sistem pengamanan informasi pemerintahan daerah
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	▪ Jumlah produk asli daerah hasil dari UKM 18 produk ▪ UMKM aktif 100% dari jumlah 8.630 unit ▪ Koperasi aktif 3,74% dari jumlah 401 unit, dan 56,6% SDM koperasi yang telah memperoleh pelatihan perkoperasian	✚ Kurangnya produk-produk asli daerah dari pelaku UKM ✚ Lemahnya kapasitas pelaku UMKM dalam pengembangan skala usaha maupun kualitas produk ✚ Kurangnya koperasi aktif dan SDM koperasi yang terlatih masih kurang
12.	Penanaman Modal	▪ Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp.2.818.452.341.214 dan realisasi investasi Rp.1.528.168.641.214 ▪ Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan 92,12%	✚ Adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha sesuai ketentuan ✚ Rendahnya realisasi investasi daerah
13.	Kepemudaan dan Olahraga	▪ Pelaku wirausaha muda 31,41% atau 3.067 wirausaha muda ▪ Organisasi pemuda yang aktif 17 organisasi, cakupan cabang olah raga yang dibina 22 Cabor. ▪ Cakupan pelatih yang bersertifikat 60% atau 25 orang, dengan jumlah atlit berprestasi 23 orang dan ada 30 prestasi olah raga ▪ Indeks pembangunan pemuda 3,07	✚ Kurangnya jiwa kewirausahaan pada para pemuda ✚ Kurangnya peran pemuda dan keaktifan organisasi pemuda ✚ Pelatih bersertifikat masih rendah ✚ Belum optimalnya pembinaan cabang olah raga dalam mendorong prestasi atlit maupun prestasi olah raga
14.	Statistik	▪ Penggunaan data statistik oleh OPD dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	✚ Belum maksimalnya penggunaan dan ketersediaan data statistik yang valid bagi penyelenggara pemerintahan daerah

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
15.	Persandian	▪ Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah ▪ Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) ...	✚ Terbatasnya kapasitas pengamanan informasi pemerintah daerah
16.	Kebudayaan	▪ Benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan 100% dari total 16 jenis ▪ Penetapan benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya 15% dari total yang diregistrasi ▪ Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu ada 5 unit	✚ Masih banyaknya benda, bangunan dan situs cagar budaya daerah yang belum ditetapkan ✚ Terbatasnya pengelolaan cagar budaya secara terpadu
17.	Perpustakaan	▪ Kunjungan perpustakaan 20.786 orang, terdiri dari 16.511 org di perpustakaan Pemda dan 4.275 org di perpustakaan non Pemda ▪ Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah 52.267 judul, dan koleksi bukunya 1.274.350 eksemplar ▪ Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat 14 orang atau 77,78% ▪ Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 64,28	✚ Masih terbatasnya kapasitas layanan dan SDM tenaga perpustakaan yang bersertifikasi ✚ Belum optimalnya perkembangan literasi masyarakat
18.	Kearsipan	▪ Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku 80% atau 35 OPD ▪ Jumlah arsip daerah yang dikelola 8 arsip, SDM pengelola arsip 9 orang	✚ Pengelolaan arsip oleh beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya menerapkan secara baku ✚ Terbatasnya jenis arsip yang dikelola dan kapasitas SDM pengelola arsip

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
1.	Kelautan dan Perikanan	▪ Produksi Perikanan 685.228,95 Ton, termasuk produksi ikan daerah 19.102,70 Ton dan 9.233,26 Ton dikontribusi hasil kelompok nelayan atau 48,33%	✚ Belum optimalnya produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya ✚ Rendahnya bina kelompok nelayan dan kontribusi kelompok nelayan untuk produksi ikan daerah

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
		▪ Bina kelompok nelayan 4,07% atau 8 kelompok dari total 326 kelompok ▪ Nilai Tukar Nelayan 117,28 ▪ Produktivitas perikanan tangkap 3.354,88 Kg/Org, produktivitas perikanan budidaya 10,02 Ton/Ha ▪ Konsumsi Ikan 57,5 Kg/kpt/thn	✚ Rendahnya konsumsi ikan masyarakat ✚ Rendahnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir
2.	Pariwisata	▪ Kunjungan wisata daerah 132.166 Orang, rata-rata 11.015 Org/Bln ▪ Objek wisata yang terkelola 6 objek (Pemda 1 objek, Swasta 5 objek) atau 5,04% dari 119 objek dari 7 jenis objek yang terdata dan terdaftar ▪ Perkembangan pelaku ekonomi kreatif 0,03% dari total 63 pelaku Ekraf	✚ Terbatasnya kapasitas dan cakupan pengelolaan objek wisata baik dari Pemerintah Daerah maupun swasta ✚ Belum maksimalnya kualitas kunjungan wisata daerah ✚ Lambatnya perkembangan pelaku ekonomi kreatif
3.	Pertanian	▪ Produksi tanaman padi 461.206,11 Ton pada luas areal 74.036,48 Ha atau rata-rata 6,2 Ton/Ha ▪ Indeks Pertanaman (IP) Padi 185 ▪ Cakupan bina kelompok tani (yang mendapat bantuan Pemda 2025) 16% atau 585 KT dari 3.624 KT ▪ Produksi Tanaman Pangan dan Palawija 484.617,83 Ton meningkat 2,76%; Hortikultura 1.591,55 Ton menurun -34,21%; Perkebunan 27.077,45 Ton menurun -0,15%; Peternakan 127.929,30 Ton meningkat 0,42% (Daging 2.102,85 Ton & Telur 125.826,45 Ton) dengan populasi Ternak Besar 13.153 ek, Ternak Kecil 25.402 ek, dan Unggas 2.665.375 ek	✚ Belum optimalnya produktivitas tanaman padi dan indeks pertanaman yang rendah ✚ Rendahnya cakupan bina kelompok petani ✚ Rendahnya perkembangan produksi hasil pada semua sub sektor pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
4.	Transmigrasi	- Luasan kawasan transmigrasi yang dikembangkan 35% - Transmigrasi Swakarsa 17,93% atau 26 orang dari total 145 orang transmigran - Cakupan areal transmigrasi yang terkelola 72,64% atau 184,5 Ha dari total 254 Ha	- Minimnya pengelolaan kawasan transmigrasi - Rendahnya minat transmigrasi swakarsa
5.	Perdagangan	- Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok 18,75% - Kinerja realisasi pupuk 67,05% - Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 85,25% - Kecamatan yang memiliki sarana distribusi perdagangan/pasar rakyat 77,27% (17 Kec.)	- Terbatasnya akses masyarakat terhadap sarana distribusi perdagangan/pasar rakyat - Rendahnya kinerja penyaluran pupuk untuk petani/petambak - Belum optimalnya pengendalian/pemantauan perubahan harga kebutuhan pokok - Terjadinya perilaku pedagang yang menggunakan alat ukur, takar, timbangan yang tidak tertera
6.	Perindustrian	- Pertumbuhan sektor industri pengolahan 5,14% - Jumlah IKM 2.495 unit - Bina kelompok pengrajin 0% dari total ada 4 kelompok pengrajin - Kemasan lokal yang tercipta dari IKM 118	- Lambatnya perkembangan ekonomi sektor pengolahan - Rendahnya cakupan bina kelompok pengrajin IKM - Kurangnya kemasan lokal produk IKM

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
1.	Sekretariat Daerah	- Nilai Indeks Reformasi Hukum 98,76 - Nilai SAKIP 62,55 - Kenaikan capaian LPPD 75% - Penyelesaian tapal batas kecamatan 97%	- Rendahnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Belum maksimalnya capaian LPPD - Banyaknya fasilitas keagamaan yang kondisi tidak baik

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
		▪ Fasilitas keagamaan kondisi baik 75%	✚ Belum optimalnya layanan informasi produk hukum ✚ Belum optimalnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa ✚ Belum optimalnya penyelesaian tapal batas wilayah kecamatan dan desa ✚ Belum optimalnya akses keuangan bagi pelaku usaha
2.	Sekretariat DPRD	▪ Penyelesaian penyusunan Perda sesuai Prolegda 54,54% atau 6 dari total 11 rencana prolegda ▪ Jumlah kegiatan pengawasan 2 kegiatan	✚ Rendahnya realisasi pelaksanaan Prolegda/Propemperda ✚ Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
3	Kesbangpol	▪ Organisasi masyarakat yang aktif 67,81% ▪ Konflik sosial yang diselesaikan 95% ▪ Pelaksanaan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan 99%	✚ Rendahnya organisasi masyarakat yang aktif ✚ Kurangnya pemahaman dan internalisasi wawasan kebangsaan pada generasi muda ✚ Belum optimalnya komunikasi intelijen daerah dalam pencegahan konflik sosial serta peredaran dan penyalahgunaan Narkoba

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
1.	Perencanaan	▪ Program yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBD yang tidak terlaksana sebanyak 6 dari total 345 program atau 1,74% ▪ Kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBD yang tidak terlaksana sebanyak 19 dari total 762 kegiatan atau 2,49%	✚ Belum optimalnya penyelenggaraan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah ✚ Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah ✚ Belum optimalnya penerapan perencanaan berbasis data/SDI
2.	Keuangan (BKAD dan	▪ Anggaran SILPA 3,47% atau Rp. 52,020	✚ Tingginya anggaran belanja APBD yang

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
	BAPENDA)	Miliar dari total APBD Rp.1,499 Trilliun lebih - Tingkat penyerapan anggaran 93,49% - Penatausahaan BMD yang baik dan benar 85%	tidak terealisasi (SILPA) - Belum optimalnya penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Daerah - Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah dan potensi pendapatan daerah
3.	Kepegawaian	- ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 4,7% atau 323 orang dari total ASN 6.830 orang - Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural 2,9% atau 20 orang dari total pejabat 686 orang - ASN yang diringkatkan kompetensinya 4,7%, dan pengembangan karir ASN sesuai kompetensinya 93%	- Rendahnya pemenuhan diklat struktural bagi para ASN pemangku jabatan struktural - Rendahnya pemenuhan diklat fungsional bagi para ASN pemangku jabatan fungsional - Masih terjadinya pengembangan karir ASN yang tidak berdasarkan kompetensi
4.	Penelitian dan Pengembangan	Indeks Inovasi Daerah 49,34 poin dengan kategori inovatif	- Rendahnya penerapan dan perkembangan inovasi daerah - Kurangnya hasil penelitian dan kajian yang dijadikan bahan kebijakan pemerintah daerah

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Data Dukung (2025)	Permasalahan
1.	Inspektorat Daerah	- Tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten 90% atau 68 dari total 75 temuan - Tindak lanjut temuan BPK 82,98% atau 18 dari total 22 temuan - Indeks Survey Penilaian Integritas 76,44, dan Indeks Persepsi Korupsi 53,10, serta Indeks Maturitas SPIP Level 3 - Kapabilitas APIP Level 3	- Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan - Belum optimalnya penerapan SPIP - Kurangnya kapabilitas APIP - Belum optimalnya sistem pengendalian dan pencegahan korupsi dalam pemerintahan daerah

2.8. ISU STRATEGIS

2.8.1. ISU STRATEGIS GLOBAL

2.8.1.1. Perang Rusia – Ukraina

Perang Rusia – Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 menuai berbagai dampak global. Dampak pertama yang dirasakan oleh Indonesia berasal dari sektor perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia yang terganggu akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan menurunnya ekspor nonmigas Indonesia dan menghambat impor gandum dan memiliki potensi menaikkan harga bahan pangan berbahan dasar gandum. Keterbatasan transfer energi dari Rusia ke benua Eropa juga memberikan dampak pada meningkatnya biaya produksi barang-barang dari Eropa utamanya produk teknologi tinggi. Selain itu, dampak berikutnya adalah risiko perlambatan ekonomi global akibat lonjakan inflasi. Kondisi inflasi yang tinggi tersebut akan direspons dengan kenaikan suku bunga secara global sehingga risiko perlambatan ekonomi tersebut mencuat dan menjadi ancaman perekonomian global.

Dalam hubungan perdagangan Rusia-Indonesia, impor terbesar Indonesia dari Rusia yaitu ingot besi baja (bahan baku baja) sebesar 486 ribu ton dengan nilai USD326 juta sepanjang tahun 2021. Impor itu menjadi yang terbesar dan berikutnya adalah pupuk buatan sebesar 974,32 ribu ton dengan nilai USD326,03 juta. Walaupun pada tahun 2021 neraca perdagangan Rusia – Indonesia meningkat, namun di tahun 2023 antisipasi terhadap ketidakstabilan perekonomian global perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi khususnya pada bidang peningkatan kualitas layanan infrastruktur jalan, jembatan, serta infrastruktur sektor pertanian dan perikanan untuk mendukung percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Selatan.

2.8.1.2. Perang Amerika-Iran

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran, jalur yang dilalui sekitar 25% perdagangan minyak dunia (US EIA, 2025), mengguncang pasar energi global. Dalam periode 27 Februari-9 Maret 2026, harga minyak Brent melonjak menjadi US\$91,8 per barel (+27%), sementara harga gas mencapai €55,8 per MWh (+74%). Lonjakan harga energi ini berpotensi

mendorong kenaikan harga pangan dan memperberat biaya hidup, terutama bagi kelompok rentan, di tengah ruang fiskal banyak negara berkembang yang semakin terbatas.

Dampaknya juga mulai terasa di Indonesia. Sejak memanasnya konflik pada 18 Februari, tercatat arus modal keluar dari pasar obligasi sebesar US\$0,41 miliar hingga 6 Maret 2026. Tekanan ini turut melemahkan rupiah yang pada 9 Maret sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS sebelum ditutup di sekitar Rp16.974 per dolar AS. Jika harga minyak bertahan tinggi, defisit APBN berpotensi melebar melampaui 3% PDB tanpa penyesuaian kebijakan/revisi anggaran.

Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, peninjauan belanja menjadi langkah yang realistis. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat stabilisasi tingkat harga dan nilai tukar untuk meredam dampak tekanan inflasi dan volatilitas nilai tukar, serta mulai menerapkan strategi diversifikasi sumber energi guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari kawasan yang rentan terhadap konflik geopolitik.

Pada saat yang sama, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan perlu diperkuat, salah satunya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lebih tepat sasaran, diikuti dengan komitmen Pemerintah Daerah memperkuat kualitas pelayanan publik dalam menjamin rantai pasok dan keterjangkauan harga bahan-bahan pokok maupun barang-barang strategis ditingkat masyarakat yang kemungkinan terjadi kelangkaan seperti kelangkaan BBM dan gas LPG subsidi, termasuk pengendalian maupun pengawasannya agar tepat sasaran.

2.8.1.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan

yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Dalam rangka akselerasi pembangunan SDM, pemerintahan daerah perlu secara konsisten dan berkesinambungan menyelenggarakan kebijakan dan rencana aksi mewujudkan TPB/SDG's di daerah dan pencapaian target-target indikator SDG's yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan TPB/SDG's tahun 2025 Kabupaten Luwu, maka interpretasi capaian TPB/SDG's sebagai berikut:

1. Tujuan 01: **mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun**; target indikatornya ada 3 tercapai, 1 tidak tercapai, 4 akan dicapai, dan 3 akan dikembangkan.
2. Tujuan 02: **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**; target indikatornya ada 3 tercapai, 2 tidak tercapai, 1 akan dicapai, dan 2 akan dikembangkan
3. Tujuan 03: **Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**; target indikatornya ada 12 tercapai, 4 tidak tercapai, 3 akan dicapai, dan 4 akan dikembangkan
4. Tujuan 04: **Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua**; target indikatornya ada 2 tercapai, 3 tidak tercapai, 0 akan dicapai, dan 4 akan dikembangkan.
5. Tujuan 05: **Mencapai Kesenjangan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan**; target indikatornya ada 1 tercapai, 0 tidak tercapai, 1 akan dicapai, dan 5 akan dikembangkan.
6. Tujuan 06: **Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua**; target indikatornya ada 2 tercapai, 1 tidak tercapai, 0 akan dicapai, dan 1 akan dikembangkan.

7. Tujuan 07: **Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua**; target indikatornya ada 0 tercapai, 0 tidak tercapai, 0 akan dicapai, dan 1 akan dikembangkan, dan ada 2 yang tidak dilakukan perhitungan.
8. Tujuan 08: **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua**; target indikatornya ada 2 tercapai, 4 tidak tercapai, 4 akan dicapai, dan 0 akan dikembangkan, dan ada 1 yang tidak dilakukan perhitungan.
9. Tujuan 09: **Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi**; target indikatornya ada 6 tercapai, 2 tidak tercapai, 0 akan dicapai, dan 1 akan dikembangkan, dan ada 4 yang tidak dilakukan perhitungan.
10. Tujuan 10: **Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara**; target indikatornya ada 2 tercapai, 2 tidak tercapai, 2 akan dicapai, dan 1 akan dikembangkan, dan ada 2 yang tidak dilakukan perhitungan.
11. Tujuan 11: **Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan**; target indikatornya ada 7 tercapai, 2 tidak tercapai, 1 akan dicapai, dan 4 akan dikembangkan, dan ada 1 yang tidak dilakukan perhitungan.
12. Tujuan 12: **Menjamin Pola Produksi Dan Konsumsi Yang Berkelanjutan**; target indikatornya ada 1 tercapai, 0 tidak tercapai, 0 akan dicapai, dan 1 akan dikembangkan, dan ada 4 yang tidak dilakukan perhitungan.
13. Tujuan 13: **Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya**; target indikatornya ada 2 tercapai, 0 tidak tercapai, 0 akan dicapai, dan 2 akan dikembangkan, dan ada 1 yang tidak dilakukan perhitungan.
14. Tujuan 14: **Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan**; target indikatornya ada 0 tercapai, 0 tidak tercapai, 0 akan dicapai, dan 0 akan dikembangkan, dan ada 1 yang tidak dilakukan perhitungan.
15. Tujuan 15: **Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan**

Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati; target indikatornya ada 0 tercapai, 0 tidak tercapai, 0 akan dicapai, dan 0 akan dikembangkan, dan ada 1 yang tidak dilakukan perhitungan.

16. Tujuan 16: **Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Disemua Tingkatan;** target indikatornya ada 11 tercapai, 3 tidak tercapai, 1 akan dicapai, dan 3 akan dikembangkan, dan ada 3 yang tidak dilakukan perhitungan.

17. Tujuan 17: **Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan;** target indikatornya ada 4 tercapai, 2 tidak tercapai, 1 akan dicapai, dan 2 akan dikembangkan, dan ada 1 yang tidak ada data dasar.

2.8.1.4. Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement ToThe United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-

Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan *Conference of the Parties (COP) 24* di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada *Talanoa Dialogue*.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Integrasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan daerah sudah merupah keharusan guna memastikan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi ini menuntut keselarasan antar sector, dimana kelestarian lingkungan menjadi fondasi utama dalam merajut kesejahteraan masyarakat didaerah.

Perubahan iklim mengancam stabilitas produksi sector unggulan daerah seperti pertanian dan perikanan melalui cuaca ekstrem dan pergeseran musim. Dengan mengadopsi ekonomi hijau, daerah dapat menciptakan peluang usaha pesisir berkelanjutan dan ekowisata yang mendongkrak pendapatan lokal. Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Perubahan Iklim memastikan kerugian akibat bencana dapat ditekan seminimal mungkin.

Pertumbuhan ekonomi yang tangguh membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya produktif, tetapi juga sadar lingkungan. Pemerintah daerah perlu membekali angkatan kerja dengan keterampilan (*green skills*) yang relevan untuk transisi energi dan industri ramah lingkungan. Peningkatan literasi iklim bagi petani dan nelayan lokal juga esensial agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pola tanam dan tangkap.

2.8.1.5. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan katalisator utama untuk mengintegrasikan pembangunan SDM, pelayanan publik, dan

infrastruktur. Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan pembaruan menyeluruh pada proses tata kelola pemerintahan. Hal ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan infrastruktur fisik dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Jumlah Usaha Mikro Sulawesi Selatan adalah pada tahun 2020 adalah 121.097 atau 3,09% dibanding seluruh pelaku usaha mikro di Indonesia.

Namun demikian, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam

perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah daerah berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dukungan pemerintah Kabupaten Luwu, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA lokal daerah.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan

teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

Keseluruhan proses ini bermuara pada peningkatan iklim investasi dan daya saing daerah. Ketika SDM terampil didukung oleh infrastruktur memadai, pelayanan publik digital akan berjalan optimal, yang pada akhirnya bermuara pada penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan asli daerah.

2.8.2. ISU STRATEGIS NASIONAL

2.8.2.1. Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

Implementasi SPM dalam perencanaan pembangunan tahun 2027, diharapkan untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia, pelayanan publik dibidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta ketersediaan infrastruktur yang lebih mantap guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah fondasi mutlak dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). SPM memastikan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan terpenuhi. SDM yang sehat dan terdidik merupakan aset utama (modal manusia) yang produktif dan inovatif. Pelayanan publik yang prima menjamin akses kesehatan dan pendidikan dasar, sementara infrastruktur yang memadai membuka simpul ekonomi daerah. Ketiganya bersinergi secara berkesinambungan untuk menciptakan ekosistem pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

2.8.2.2. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan.

Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu harus menangkap peluang ini agar menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sinergi melalui pembangunan SDM unggul dan berdaya saing, pelayanan publik yang efisien, serta dukungan infrastruktur yang memadai

Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika angkatan kerja memiliki keterampilan tinggi dan berdaya saing. Peningkatan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan (seperti yang dilakukan di berbagai daerah) memastikan pemuda setempat siap mengisi dan menciptakan lapangan kerja, sekaligus menekan angka pengangguran.

Untuk menghindari agar bonus demografi tidak memberikan dampak negatif bagi pembangunan daerah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Angkatan kerja yang berlimpah tersebut haruslah berkualitas, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kompetensi profesionalnya sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri.
2. Suplai tenaga kerja produktif yang besar harus diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga pendapatan per kapita meningkat dan penduduk dapat menabung sehingga akan meningkatkan tabungan di tingkat keluarga dan nasional.

2.8.2.3. Inflasi

Inflasi merupakan Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus dalam jangka waktu tertentu dimana kenaikan harga beberapa barang dapat mengakibatkan kenaikan harga barang yang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang kemudian memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Upaya pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025 mencatatkan tingkat inflasi yang cukup baik. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi umum secara tahunan (year-on-year) pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen. Capaian ini menunjukkan inflasi masih tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional yakni rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Sementara mengenai inflasi volatile food atau harga pangan bergejolak, apabila ditarik rerata capaian inflasi pangan secara tahunan selama 12 bulan di 2 tahun terakhir, maka dapat terlihat pergerakan yang cukup baik. Pada 2024, rerata inflasi pangan dalam 12 bulan berada di tingkat 4,88 persen. Sementara pada 2025 menurun ke 3,32 persen.

Perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bisa merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam tim pengendalian inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Inflasi yang tetap terkendali hingga akhir tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga.

Inflasi yang terkendali memastikan kestabilan daya beli masyarakat dan harga-harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah secara proaktif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga pasokan dan kelancaran distribusi. Dengan stabilitas ini, pelaku usaha (khususnya UMKM) dapat memproyeksikan biaya produksi secara pasti, sekaligus mencegah masyarakat jatuh dalam jurang kemiskinan akibat lonjakan.

Pengendalian inflasi yang stabil menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan ruang fiskal yang aman untuk mempercepat pembangunan SDM, mengoptimalkan pelayanan publik, dan meratakan infrastruktur.

2.8.2.4. Kemiskinan Ekstrem

Secara kategori, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Sedangkan penduduk miskin ekstrem adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah US\$2,15 dolar (Purchasing Power Parity tahun 2017) per kapita per hari, mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia. Untuk memastikan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana Arahan Presiden RI, Kemenko PMK memprakarsai Inpres Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang “Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” ditetapkan pada 8 Juni 2022 yang selaras dengan SDGs yang menarget penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Inpres No. 4 Tahun 2022 telah menginstruksikan kepada 22 Kementerian dan 6 Lembaga serta seluruh Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk bekerja sama antar kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui keterpaduan dan sinergi program kegiatan dalam rangka penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Upaya penurunan jumlah penduduk miskin termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem di atas, selama ini telah dan akan terus dilanjutkan melalui tiga strategi, yaitu (1) pengurangan beban pengeluaran melalui program bantuan dan perlindungan sosial; (2) peningkatan pendapatan Masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi Masyarakat miskin; dan (3) pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program peningkatan sarana dan prasarana permukiman atau infrastruktur dasar lainnya. Menurut data BPS tahun 2025, angka kemiskinan Ekstrem Sulawesi Selatan belum mencapai angka 0 dan masih dibesarkan 1,41%, begitupula halnya dengan Kabupaten Luwu masih di besarkan 1,56%.

Penanganan kemiskinan ekstrem merupakan hulu dari agenda pembangunan yang menuntut pendekatan holistik. Isu ini diselesaikan secara selaras melalui pembangunan SDM untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, penyediaan pelayanan publik yang merata untuk menjamin akses dasar, dan akselerasi infrastruktur guna membuka pusat-pusat ekonomi baru.

Masyarakat miskin ekstrem sering kali terjebak dalam siklus keterbatasan akses dasar seperti layanan kesehatan buruk, putus

sekolah, dan gizi buruk. Pembangunan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi memungkinkan masyarakat rentan memiliki keterampilan bernilai ekonomis tinggi. Kehadiran layanan publik yang prima memastikan setiap kelompok masyarakat menikmati fasilitas kesehatan, bantuan sosial yang tepat sasaran, dan pendidikan. Hal ini menciptakan kesetaraan peluang sekaligus melindungi daya beli masyarakat rentan dari kerentanan ekonomi. Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih tidak hanya membuka isolasi wilayah, tetapi juga menekan biaya logistik. Ini memungkinkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal mendistribusikan produk dengan efisien, sehingga lapangan kerja baru tercipta.

2.8.3. ISU STRATEGIS KABUPATEN LUWU

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis regional, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Pemulihan Pasca Bencana dan Resiko Bencana Yang Masih Tinggi

Pasca kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang masif terjadi pada sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu pada tanggal 3 Mei 2024, pemerintah menetapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Dokumen R3P berisi informasi kerusakan dan kerugian, kewenangan, kebutuhan serta indikasi program dan pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan pada sektor-sektor yang terdampak oleh kejadian bencana selama 3 (tiga) tahun mendatang. Penting bagi pemangku kepentingan agar R3P menjadi pertimbangan dalam meletakkan prioritas arah kebijakan pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang holistik dan integratif dalam urusan kebencanaan dan penanganan pasca bencana daerah.

Berdasarkan data hasil pengukuran Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dalam kurun beberapa tahun terakhir, Kabupaten Luwu memiliki nilai indeks yang cenderung membaik, namun hal ini tidak menunjukkan tingkat resiko yang menurun karena nyatanya Kabupaten Luwu masih memiliki kelas resiko tinggi dengan nilai indeks yang tertinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (186,58). Hal ini tidak terlepas dari karakteristik dan morfologi wilayah yang banyak didominasi oleh pegunungan dengan sungai-sungai besar yang melintasi wilayah dataran rendah yang diperparah dengan minimnya keberpihakan terhadap kebijakan upaya pengurangan resiko bencana yang ada wilayah Kabupaten Luwu.

Upaya mitigasi struktural dan nonstruktural menjadi pendekatan yang wajib dilakukan. Mitigasi Nonstruktural dilakukan salah satunya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dengan penerapan skema insentif dan disentif terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian ruang sehingga proses perizinan dan pengawasannya menjadi sangat penting. Disamping itu berbagai upaya adaptasi bencana semisal dengan penguatan aspek kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana juga menjadi penting untuk diperluas. Sedangkan Mitigasi struktural dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai tindakan rekayasa teknis pada wilayah-wilayah dataran tinggi yang menjadi hunian atau tempat kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti menormalisasi sedimen dan aliran sungai, perkuatan tebing pada wilayah-wilayah berpotensi longsor dan upaya teknis lainnya. Pemerintah juga harus terus mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan terutama masyarakat dengan memastikan jasa ekosistem dan daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi bencana dengan menjamin ketersediaan cadangan pangan guna memastikan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok dapat dijangkau oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat pada situasi tanggap darurat bencana. Pengembangan dan penerapan

teknologi serta hasil-hasil riset yang memberikan rekomendasi dan pengetahuan dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan juga perlu dioptimalkan, semisal dengan mengembangkan varietas tanaman pangan dan ternak yang tahan terhadap berbagai kondisi cuaca ekstrem dan potensi dampak perubahan iklim yang terjadi.

2. Potensi dan Peluang Investasi Daerah

Seiring dengan perluasan pasar global dunia, kesempatan dan peluang bisnis juga semakin terbuka lebar. Dengan bentangan wilayah yang luas dan letak geografis yang strategis serta kekayaan sumber daya alam yang beragam, Kabupaten Luwu menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun sayangnya belum diikuti dengan pendapatan perkapita yang besar (59,73 juta) dan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi (11,70%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum mampu memperoleh manfaat yang signifikan terhadap pengelolaan sumber daya dan kebijakan pembangunan daerah.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah terus berupaya mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi nasional, hal ini salah satunya dapat dilihat dengan munculnya beberapa perusahaan skala besar yang berinvestasi dan beroperasi diwilayah Kabupaten Luwu terutama pada sektor barang konsumsi bergerak cepat atau fast moving consumer goods (FCMG), sektor industri, sektor pertambangan dan sektor konstruksi serta real estate yang cenderung meningkat pertumbuhannya bila mengacu pada sektor lapangan usaha PDRB 5 (lima) tahun terakhir.

Kondisi ini tentunya akan menimbulkan multiplier effect yang seyogyanya perlu diantisipasi kedepannya. Pemerintah daerah perlu berinovasi dengan menstimulasi sub-sektor yang berperan dalam supply chain atau rantai distribusi yang memiliki daya ungkit tinggi. Disamping itu, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah juga dapat terlibat langsung melalui pembentukan badan-badan usaha yang terafiliasi dengan

kegiatan tersebut sehingga dapat mengilhami masyarakat dan menginisiasi pembentukan kerjasama pada bidang-bidang usaha lainnya yang kemudian diharapkan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu.

Keterlibatan aktor-aktor dan mitra pembangunan seperti sektor swasta dan organisasi atau Lembaga swadaya masyarakat juga dapat menjadi hal lain yang perlu ditingkatkan. Program-program pemerintah diseluruh sektor yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama dengan kementerian/lembaga, Non-Government Organization (NgO) atau kegiatan yang bersumber dari funding sektor swasta harus dilaksanakan secara optimal dan dapat ditingkatkan sehingga memberikan dampak signifikan pada lokasi fokus kegiatan yang dilaksanakan sekaligus dapat mendorong pusat-pusat pertumbuhan kawasan baru serta mendorong praktik-praktik baik pada wilayah sekitarnya.

3. Hilirisasi dan Pemerataan Pendapatan

Dengan penetapan Kabupaten Luwu sebagai Kawasan Komoditas Unggulan (Kakao dan Kopi), Kawasan Swasembada Pangan dan Kawasan Afirmasi Teluk Bone dan Sekitarnya dalam kebijakan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan mempertegas potensi kekayaan sumber daya alam daerah yang sangat besar didalamnya. Dengan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah (6,1 ton/tahun) sepatutnya perlu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pelaku usaha yang terlibat didalamnya.

Selain itu, dengan rata-rata produktivitas perikanan sebesar 7,9 ton/tahun, Kabupaten Luwu juga berperan penting dalam sektor perikanan sebagai salahsatu kawasan andalan Teluk Bone. Disamping menjaga ketersediaan pangan, berbagai komoditas pada kedua sektor ini juga perlu terus ditopang dan ditingkatkan melalui mekanisme hilirisasi sehingga tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tetapi juga dapat mendorong pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai solusi jangka panjang pembangunan berkelanjutan.

Hiilirasi produk menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pengembangan komoditas unggulan daerah. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan investasi dan penanaman modal disektor industri pengolahan melalui regulasi yang memberikan kemudahan kepada para pelaku dan calon pelaku usaha didaerah mengingat pertumbuhan industri yang rata-ratanya hanya sekitar 5% pertahun. Kebijakan hilirisasi diharapkan juga nantinya dapat berimplikasi terhadap langsung terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

4. Konektifitas dan Kesenjangan Antar Wilayah

Ditinjau dari sisi kondisi geografis, Kabupaten Luwu secara umum terbagi kedalam wilayah utara dan selatan, wilayah utara Kabupaten Luwu mencakup seluruh kecamatan Walenrang-Lamasi (Walmas) dan wilayah selatan yang meliputi Kecamatan Bua sampai dengan Kecamatan Larompong Selatan. Wilayah Walmas yang terdiri dari enam (6) kecamatan berada sekitar 60 - 75 Km dengan jarak tempuh 90 – 120 menit via kendaraan bermotor dari wilayah perkotaan Belopa yang merupakan ibukota Kabupaten Luwu. Selain itu dengan wilayah yang juga didominasi oleh wilayah pegunungan menjadikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta jangkauan layanan infrastruktur yang merata bagi masyarakat.

Guna menanggulangi hal ini, pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunan pada wilayah-wilayah yang ditetapkan pada pusat pengembangan kawasan dengan menangkap berbagai kebijakan pembangunan Infrastruktur, dan sarana-prasarana pemerintah pusat dan provinsi serta sumber-sumber lainnya wilayah di Kabupaten Luwu. Selain itu seluruh layanan pemerintahan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah melalui pembentukan pusat-pusat layanan terpadu dan terintegrasi yang tidak hanya terbatas pada layanan administrasi tetapi juga layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

5. Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu wilayah Walenrang dan Lamasi (Walmas) merupakan gagasan yang muncul atas respons dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut, terutama setelah pemindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Belopa. Berbagai faktor penting yang memperkuat isu ini diantaranya kondisi geografis yang unik, di mana wilayah Walmas terpisah dari ibu kota Kabupaten Luwu, yakni Belopa, dan diapit oleh Kota Palopo sehingga menyebabkan sulitnya pemerintah dalam mengoptimalkan pemerataan penyediaan infrastruktur, layanan dasar dan terutama pada aspek layanan administrasi publik karena masyarakat akan terbebani oleh besarnya biaya dan waktu yang digunakan untuk memperoleh layanan mengingat jarak yang cukup jauh.

Dalam dekade terakhir berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan legislator baik ditingkat daerah maupun pusat dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, namun sayangnya usulan ini terkendala oleh moratorium pemerintah di tingkat pusat, untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya yang masif oleh seluruh pemangku kepentingan mengingat hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik.

6. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal Daerah

Penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal daerah adalah dua pilar utama yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam konteks otonomi daerah. Keduanya adalah prasyarat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Dengan capaian Indeks SPBE yang cukup meningkat dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah cukup baik, namun hal ini belum memberikan gambaran utuh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dari aspek akuntabilitas belanja, pendapatan dan pengelolaan aset daerah serta pemenuhan layanan-layanan dasar masyarakat.

Disisi lain, mengacu pada postur anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu hanya berkontribusi sekitar 15,61% terhadap seluruh pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang mana kondisi ini juga diperparah dengan besarnya pos belanja pegawai terhadap APBD. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pada tahun 2027 belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja APBD. Situasi ini tentunya akan berdampak pada fleksibilitas pembangunan daerah mengingat dana transfer pusat ke daerah umumnya diikuti dengan kebijakan penggunaannya yang diarahkan untuk menunjang prioritas pembangunan nasional sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber pendapatan dan retribusi daerah, memperkuat pengawasan dalam rangka perencanaan dan penganggaran belanja daerah, serta mendorong berbagai skema kerjasama pembangunan yang dimungkinkan dalam rangka mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

7. Perkembangan Teknologi dan Transformasi Digital

Di era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang sangat penting. Perkembangan teknologi diikuti oleh kemajuan pertukaran informasi yang begitu masif karena ditunjang oleh konektivitas digital yang berperan penting bagi kemajuan pada seluruh bidang dan sektor-sektor vital didunia. Disisi lain kemajuan teknologi dan transformasi menjadi dua mata pisau yang perlu diantisipasi guna mengoptimalkan peluang yang ada dan meminimalisir dampak buruk yang timbul. Konektivitas memainkan peran yang sangat strategis dalam menghubungkan individu, komunitas, dan pemerintah. Dengan persentase pengguna layanan internet yang hanya 67% pemerintah perlu mendorong penyediaan dan pemerataan serta kesiapan jaringan telekomunikasi dan internet yang terjangkau

dan dapat diandalkan terutama pada daerah-daerah rural Kabupaten Luwu, dimana layanan Internet yang baik hanya dapat diakses oleh sekitar 65% desa saja.

Sekaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Luwu perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengoptimalkan seluruh bentuk kegiatan pelayanan publik yang terintegrasi dengan berbagai jenis platform dan layanan digital sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) juga sangat penting, dengan capaian indeks SPBE 2,6 menandakan bahwa upaya yang masif perlu dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat aspek keterbukaan informasi publik yang selama ini hanya berkategori “cukup”

Dengan pemanfaatan yang tepat, kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital pada sektor sosial ekonomi masyarakat dapat mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mendorong produktifitas masyarakat. Semisal pemanfaatan layanan digital dapat digunakan oleh pelaku ekonomi dalam perolehan informasi pengetahuan, pengembangan produk, harga pasar, dan kondisi cuaca sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan mengefisiensikan biaya produksi, dan atau memasarkan hasil usaha secara luas baik secara langsung maupun daring.

Dengan perkembangan yang begitu pesat, kemajuan dibidang teknologi informasi dan konektivitas digital juga memberikan dampak pada pengaruh masuknya budaya luar dan atau informasi serta konten-konten negatif yang berpotensi tersebar diberbagai platform. Untuk itu intervensi pemerintah dan peran orangtua menjadi hal sangat esensial. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan pembatasan terhadap berbagai informasi dan konten sensitif yang dapat memicu kekerasan, pelecehan dan kerusakan norma serta tatanan sosial, sebagaimana yang

tergambar pada capaian Indeks Perlindungan Anak yang cenderung turun (56,57). Orangtua juga harus memberi andil penting dalam pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penggunaan gawai, media dan platform digital yang digunakan oleh anak-anaknya.

8. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi di mana suatu wilayah memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang relatif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun), dimana berdasarkan proyeksi kependudukan kondisi ini terjadi di Kabupaten Luwu dalam rentang tahun 2025 sampai dengan tahun 2034.

Pembangunan sumber daya manusia yang diawali dari pendidikan anak usia dini hingga pembangunan kepemudaan menjadi critical path (jalur kritis) dalam menyikapi manfaat dari fenomena ini. Untuk itu peningkatan kualitas asupan gizi anak hingga kualitas layanan pendidikan serta peningkatan keterampilan dan media kreatifitas pemuda menjadi hal yang perlu difasilitasi oleh pemerintah. Sebaliknya, bila fenomena ini tidak dapat diantisipasi dengan baik maka akan memberi dampak buruk terhadap potensi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Seiring perkembangan wilayah, sektor agraris yang menjadi ciri khas sektor perekonomian pedesaan secara alami lambat laun terkikis oleh berbagai kemajuan teknologi dan informasi. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan penyiapan kelompok usia produktif yang tidak hanya memiliki keterampilan dan kemampuan mengolah lahan-lahan pertanian, perkebunan dan perikanan secara modern, tetapi juga mampu memperkuat kelembagaan dan sistem pasar yang terintegrasi. Hal ini penting, selain untuk menjaga keberlangsungan dan kemandirian pangan daerah, juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bagi petani dan nelayan dimasa mendatang.

9. Wajah Perkotaan dan Daya Saing Daerah

Dalam konteks perkotaan “wajah kota” merujuk pada tampilan fisik, karakter, dan ciri khas suatu kota yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti arsitektur, infrastruktur, lingkungan, hingga aktivitas sosial dan budaya yang terjadi di dalamnya. Sejak ditetapkan wilayah Belopa sebagai ibukota Kabupaten Luwu 18 tahun silam, kawasan perkotaan belopa mengalami perkembangan yang begitu signifikan dari berbagai aspek sejalan dengan ditetapkan Kecamatan Belopa dan Belopa Utara sebagai kawasan perkotaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu. Hal ini menjadi sebuah isu tersendiri dimana karakteristik perkotaan akan selalu berkembang dengan dominasi aktifitas pemerintahan, hunian, perdagangan dan jasa didalamnya.

Polarisasi yang terjadi di wilayah perkotaan menuntut penyediaan Infrastruktur yang memadai dan mumpuni sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan wilayah. Dengan berbagai dinamika kegiatan pembangunan, pemerintah daerah perlu tetap memperhatikan aspek-aspek penting pembentuk ciri khas yang menjadi identitas dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu, terutama pada tampilan visual bangunan-bangunannya, namun tetap mendorong percepatan pembangunan pemenuhan sarana dan prasarana wilayah perkotaan melalui mekanisme tertentu, semisal dengan pengaturan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

Karakteristik wilayah perkotaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan handal. Pemenuhan fasilitas umum seperti fasilitas olahraga dan rekreasi menjadi hal yang penting guna mempertegas karakteristik wilayah perkotaan. Selain itu ketersediaan penyediaan sarana dan prasarana yang berkarakter dapat menjadi Landmark yang mampu mendorong kegiatan-kegiatan perekonomian seperti aktifitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang di area sekitarnya. Pemenuhan Infrastruktur perkotaan diharapkan nantinya dapat menjadi daya tarik bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berskala regional maupun

nasional diwilayah Kabupaten Luwu sekaligus menjadi pengungkit terhadap peningkatan daya saing daerah.

2.9. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD adalah rumusan aspirasi yang dihimpun dari hasil kegiatan DPRD (seperti reses, penjangkaran aspirasi, dan hasil kajian komisi) yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Pokir Adalah usulan program dan kegiatan Pembangunan yang berasal dari suara rakyat yang diwakili oleh legislator.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 153 menyebutkan bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Oleh karena itu dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Luwu tahun 2027 harus memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Luwu. Pokok-pokok pikiran DPRD ini harus diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pada RKPD Tahun 2027 terdapat sejumlah pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 1.943 Usulan, usulan tersebut disinkronkan dengan prioritas Pembangunan sebanyak 1.816 Usulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.102.
Kesesuaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu

Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Usulan	Perangkat Daerah
Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Pelatihan Kerja	2	Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pengadaan Alat Perbengkelan, Alat Mesin Pertukangan, Mesin Jahit	4	
	Bantuan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	8	Koperasi, UMKM, dan Perindustrian
	Pembangunan Baruga Kesenian	2	Pariwisata dan kebudayaan
	Pembangunan Gazebo	2	

Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Usulan	Perangkat Daerah
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Wisata	6	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Daerah Wisata	1	
	Fasilitasi Bantuan keluarga Miskin	5	Sosial
layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	Pengadaan Jaringan Telekomunikasi dan Internet	4	Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Paving blok halaman Puskesmas	4	Kesehatan
	Paving blok halaman pustu	4	
	Pembangunan Labkesda	1	
	Pembangunan pagar Poskesdes	3	
	Pembangunan pagar puskesmas	2	
	Pembangunan pagar pustu	12	
	Pembangunan Poskesdes	2	
	Pengadaan Alat Kesehatan	1	
	Rehabilitasi / Renovasi Pustu	5	
	Rehabilitasi / Renovasi Puskesmas	1	
	Rehabilitasi / Renovasi Poskesdes	5	
	Pembangunan Puskesmas	1	
	Pembangunan Pustu	3	
	Pembangunan Gedung PAUD	3	Pendidikan

Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Usulan	Perangkat Daerah
	Pembangunan Pagar Sekolah	38	
	Pembangunan Perpustakaan SD	1	
	Pembangunan Ruang Guru	1	
	Pembangunan Ruang kelas PAUD	3	
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah	1	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD	4	
	Pembangunan UKS SD	5	
	Penambahan ruang Dinas Guru SD, SMP dan Penjaga Sekolah	10	
	Pembangunan Mushallah sekolah SD dan SMP	4	
	Pembangunan Toilet (Jamban) SD	14	
	Penimbunan Halaman Sekolah	24	
	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	10	
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru	3	
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang UKS	1	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung PAUD	2	
	Rehabilitasi sedang/berat pagar sekolah	9	
	Rehabilitasi sedang/berat Toilet (jamban) PAUD	1	
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kepala Sekolah	21	
	Penimbungan Lapangan Sepak Bola	14	Kepemudaan dan Olahraga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Usulan	Perangkat Daerah
	Pembangunan lapangan Bulu Tangkis	1	
	Pembangunan Lapangan Futsal	2	
	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	1	
	Pembangunan Lapangan Tennis	1	
	Pembangunan Tribun Lapangan	18	
	Pengadaan Karpet Lapangan	1	
	Penimbunan Lapangan Volley	1	
	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola	7	
	Rehabilitasi Lapangan Tennis	1	
	Pembangunan Lapangan Volley	8	
	Rehabilitasi Lapangan Volley	3	
	Pembangunan Pagar Lapangan	8	
	Pembangunan Rumah Adat	4	
	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	5	
	Pembangunan Baruga Kesenian	2	
Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar	71	Perikanan
	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/p eternakan	350	Pertanian
Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Galian Sungai	46	PUTR
	pedistrian jalan	2	

Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Usulan	Perangkat Daerah
	Pelatihan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Konstruksi	1	
	Pelebaran Jalan	58	
	Pemasangan Bronjong	22	
	Pembangunan Box Culver	1	
	Pembangunan Drainase	127	
	Pembangunan Gerbang	2	
	Pembangunan Irigasi	28	
	Pembangunan Kantor Lurah	1	
	Pembangunan Pembangunan Jembatan Rangka Baja	1	
	Pembangunan Plat Duiker	47	
	Pemeliharaan Jalan Aspal dan Kerikil	1	
	Pengadaan Sumur Bor	3	
	Pengaspalan Jalan	70	
	Pengkerikilan Jalan	48	
	Penimbunan Jalan	9	
	Peningkatan, Perkerasan, dan Perintisan Jalan	109	
	Pembangunan Rabat Beton	148	
	Rehabilitasi Drainase, Jembatan, Irigasi sekunder, Plat Duiker,	14	
	Pembangunan dan Perluasan SPAM Jaringan	2	
	Pembangunan Talud	87	
	Pembangunan Tanggul Sungai	6	
	Pembentukan Jalan	41	
	Pembukaan Jalan Baru	2	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Usulan	Perangkat Daerah
	Pembangunan Jembatan Beton	22	
	Pembangunan Jembatan Gantung	13	
	Pembangunan Jembatan Kayu	2	
	Pembangunan Jembatan Beton	22	
	Pembangunan Pasar Rakyat	4	Perdagangan
	Rehabilitasi Pasar Rakyat	1	
	Pembangunan Pagar Pasar	2	
	Penimbunan Pasar Rakyat	1	
	Pembangunan Tempat Ibadah Pasar	1	
	Rehabilitasi Jalan Pasar Rakyat	3	
	Pembangunan Drainase Pasar	2	
	Pengadaan lampu Jalan Kabupaten	17	Perhubungan
	Pembebasan lahan	11	Pertanahan
	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	33	Perumahan dan Permukiman Rakyat
	Pembangunan MCK dan Air Bersih	21	
	Pembangunan Pagar Kuburan dan Peningkatan jalan ke peruburan	4	
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	22	
	Peningkatan Jalan Permukiman	25	
Desa mandiri	-	-	-
	Kendaraan Pengangkut Sampah	3	Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Usulan	Perangkat Daerah
Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Pembangunan TPA	1	PUTR

2.10. INOVASI DAERAH

Riset adalah kegiatan penyelidikan atau penelitian sistematis, kritis, dan ilmiah untuk menemukan fakta baru, memecahkan masalah, atau mengembangkan pengetahuan. Tujuan utama dari riset adalah menjelaskan hubungan antara variabel, menguji hipotesis dan memecahkan masalah tertentu dengan menggunakan metode ilmiah yang tepat. Pada tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS) dan Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo melaksanakan kegiatan riset Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kakao. Hasil riset menghasilkan Dokumen RAD Kelapa Sawit yang memuat basis data perkebunan sawit dan luasan lahan serta penguatan koordinasi lintas sektoral perangkat daerah terkait pengembangan sawit berkelanjutan. Sedangkan RAD Kakao memuat rehabilitasi/peremajaan tanaman kakao yang tidak produktif, peningkatan produksi melalui sambung pucuk, pemangkasan, pemupukan dan sanitasi kebun serta penurunan hama penyakit kakao. Sedangkan Aspek Mutu dan Hilirisasi, Peningkatan mutu biji kakao melalui fermentasi dan pencapaian yang baik, penguatan unit pengolahan hasil kakao skala kelompok, meningkatkannya nilai tambah produk kakako.

Selain melaksanakan riset, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Luwu juga bertugas melakukan pendampingan dan pembinaan inovasi bagi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Luwu. Pengembangan dan penerapan suatu inovasi menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif atau daya saing daerah. Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, dijelaskan bahwa Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja

Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi daerah menjadi hal penting yang harus diterapkan oleh Kabupaten Luwu, Penerapan inovasi daerah nantinya akan melibatkan seluruh Perangkat daerah di kabupaten Luwu sehingga diharapkan setiap Perangkat daerah menciptakan satu atau beberapa inovasi yang dikembangkan, hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah cara baru dalam meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan meningkatkan produktifitas sebuah pekerjaan/keadaan secara dinamis dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Pengembangan Inovasi daerah, Kabupaten Luwu berupaya untuk mengembangkan berbagai inovasi yang mampu menciptakan sebuah hal baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut daftar inovasi daerah yang telah diinisiasi, diterapkan, dikembangkan dan dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu pada situs indeks inovasi Kemendagri tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.103.

Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Luwu yang Dilaporkan pada Indeks Inovasi Kemendagri Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	Penataan UMKM Kuliner IDAMAN (Indah, Aman dan Nyaman) Kabupaten Luwu
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu	Satu Pintu Cegah dan Atasi Stunting di Kabupaten Luwu (Satu Hatiku)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Luwu	Peningkatan Pemeliharaan Jalan Melalui Pembentukan Tim Reaksi Cepat (PERAN TRC)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Luwu	Wadah dan Ruang Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (WARUNG MASIJA'KI)
5	Dinas Kesehatan Kab.Luwu	Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan (SI KEPO NAKES)

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
6	Dinas Kesehatan Kab.Luwu	Transformasi Layanan Puskesmas Melalui Akselerasi Badan Layanan Umum Daerah (SIAP MEKA BLUD)
7	Dinas Perhubungan Kab.Luwu	Penataan Parkir di Tepi Jalan (PAK DILAN)
8	Dinas Pertanahan Kab.Luwu	Pendaftaran Pensertipikatan Aset Tanah On-Line Aset Tanah Kabupaten Luwu
9	Kecamatan Larompong	Penguatan Karakter Masyarakat Desa Dengan Menumbuhkan Kembali Nilai-Nilai Kearifan Lokal
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Luwu	Komunitas Belajar Pendidik Dalam Menyuskseskan Implementasi Kurikulum Merdeka (KOPIKU MERDEKA)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Luwu	Sistem Informasi Pemetaan dan Pemantauan Gedung (SIPEMANDU)
12	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Luwu	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Melalui Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (SMART DESA)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu	Cegah Stunting Dengan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (ChatingAN KeReN)
14	Walenrang Timur	WARKOP KELILING DESA (Warung Koordinasi Keliling Desa)
15	Dinas Perdagangan	Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Secara Non Tunai (SIRUNTU)
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu	Petugas Peduli Stunting Melalui Bimbingan dan Pendampingan Dalam Rangka Pencegahan Stunting (PEPES BANDENG)
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab.Luwu	Penghargaan ASN Teladan Organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu (PESAN OPU)
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Luwu	Gerakan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini Yang Menyenangkan (GEBRAK PAUD)
19	Kecamatan Basse Sangtempe' Kab.Luwu	Potensi PBB yang Terpendam
20	Kecamatan Bajo Barat	Menuju Desa Mandiri Pangan Melalui Penguatan Kelompok Dasawisma (MENU PEDAS)
21	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan dan Persandian Kab.Luwu	Digitalisasi Persandian Berita (DPE BERITA)

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
22	Kecamatan Bajo Kab.Luwu	Polisi dan Rakyat Bersatu Dalam Keamanan Lingkungan (PRABU TEMANKU)
23	Bappelitbangda Kab. Luwu	Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat Secara Elektronik
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Luwu	Efektifitas Proses Penerbitan SPM Alokasi Dana Desa Pada Sub Bagian Keuangan BKAD ("TASEPPE" SPM ADD)
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Luwu	Sistem Informasi Pengarsipan Data Evaluasi Dokumen Dan Laporan Kinerja
26	Dinas Kesehatan Kab.Luwu	Buku Tamu Berbasis Digital (Bukuta Di)
27	Kecamatan Belopa Utara Kab.Luwu	Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Forum Komunikasi Pemerhati Pemuda Sabe FKP2S (OPEN PBB-P2)
28	Bappelitbangda Kab. Luwu	Sistem Digital Keuangan (SIDAK)
29	Kecamatan Suli Barat Kab.Luwu	Penggalakan Tanaman Obat Keluarga Di Halaman Rumah (TOGA)
30	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Penertiban Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
31	Kecamatan Bajo Kab.Luwu	Gerakan Kampanye Lingkungan (GAMPANG)
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Luwu	Digitalisasi Penyusunan Laporan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DIPAMONEV-RK-DP3A)
33	Dinas Sosial Kab.Luwu	Sistem Pengawasan Penggunaan Anggaran (SiPAPA)
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Informasi Berbasis Digital (Narsis Di') Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Kecamatan Ponrang Kab.Luwu	Pojok Layanan Aduan PBB
36	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Luwu	Inventarisasi Barang Milik Daerah Berbasis Qr Code Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kab. Luwu (INDAH BARCODE)

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
37	Kecamatan Basse Sangtempe Kab.Luwu	Optimalisasi Layanan Posyandu Balita Melalui Pemberdayaan Kader Posyandu Di Desa Sinaji Kecamatan Basse Sangtempe Kecamatan Basse Sangtempe Kab.Luwu
38	Bappelitbangda Kab. Luwu	Pengelolaan Arsip Digital (One Click)
39	Badan Pendapatan Daerah Kab.Luwu	Smart Pajak Bapenda
40	Kecamatan Larompong Selatan Kab.Luwu	Meningkatkan Kedisiplinan ASN Dan Non ASN Dikantor Lurah Bonepute
41	Kecamatan Bua Kab.Luwu	Manajemen Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Sakti (MASSIPAKI)
42	Dinas Sosial Kab.Luwu	Pengarsipan Dokumen Melalui Arsip Digital (PANADA)
43	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Panduan Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Non Asn Pada Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga Pimpinan (JAGA Non ASN)
44	Kecamatan Ponrang Kab.Luwu	Digitalisasi Laporan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Kerja Pada Kecamatan Ponrang (DILAMAR KA')
45	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Optimalisasi Penyusunan Agenda Kegiatan Pimpinan Menuju Protokol Yang Lebih Profesional (TEMAN PROTOKOL)
46	Bappelitbangda Kab. Luwu	Bank Data Terintegrasi Kabupaten Luwu New Generation (Badik Luwu-NG)
47	Kecamatan Basse Sangtempe Kab.Luwu	Pengarsipan Surat Masuk Dan Keluar Berbasis Digital Dikantor Kecamatan Basse Sangtempe (SiSUMARDI)
48	Kecamatan Belopa Utara Kab.Luwu	Penataan Arsip Digitalisasi (PADI)
49	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Optimalisasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
50	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Peningkatkan Pemahaman Tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah
51	Dinas Perdagangan Kab.Luwu	Literasi Finansial Pedagang Dan Pengelola Pasar
52	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	Sistem Informasi Pelayanan Akurasi Cermat (SiPAC)
53	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Luwu	Sistem Informasi Penyaluran Dana Transfer Daerah (PAMDAWA)

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Luwu	Sinkronisasi Integrasi Data Kepegawaian (SEDATAKI)
55	Sekretariat Daerah Kab.Luwu	System Informasi Pengolahan Data Pengadaan Barang/Jasa (SISOLA PBJ)
56	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Luwu	Sistem Perhitungan Data Kebutuhan Guru (Sipakatau)
57	Sekretariat Daerah Kab. Luwu	Kolaborasi Aksi Pengembangan Pusat Kuliner Kawasan Strategis
58	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu	“JIKA DIBAKAR” Jangan Panik Apabila Terjadi Kebakaran
59	Sekretariat DPRD	“DAPOTE” Data Pokok Pikiran Terpadu DPRD
60	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu	“TRANSFORMERS” Transformasi Linmas Penguatan Peran dan Fungsi
61	Sekretariat Daerah Kab. Luwu	“MIMPI INDAH DI LUWU” Mitigasi Komoditas Pangan Dalam Pengendalian Inflasi Daerah di Kab. Luwu
62	Sekretariat Daerah Kab. Luwu	“BANG KUMIS” Bantuan Penanganan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
63	Kecamatan Basse Sangtempe	“PANEN BUMDES” Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Basse Sangtempe
64	Bappelitbangda Kab. Luwu	Sahabat Perencanaan
65	Kecamatan Suli	“PENA SULI” Gerakan Pengentasan Kemiskinan Kecamatan Suli
66	Dinas Pertanahan Kab. Luwu	Satu Data Aset Tanah (TU.DA.TA)
67	BKPSDM Kab. Luwu	“OPA PEKAT” Optimalisasi Proses Kenaikan Pangkat ASN
68	BPBD Kab. Luwu	Brigade Penanganan Bencana di Desa “GENANGAN DESA”
69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu	“GAMACCA” Gerakan Taman Baca Pada Fasilitas Umum
70	Dinas Pendidikan Kab. Luwu	Optimalisasi Penyusunan Arkas melalui WARKOP SEKOLAH
71	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu	“ASSIPA-E” Aksi Sistem Penyelamatan Ular dan Edukasi
72	Kecamatan Lamasi	“TERAS DATA” Integrasi Data Kecamatan
73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu	SAPA DESA NO STUNTING
74	Kecamatan Ponrang	Optimalisasi Pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

No.	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
75	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu	“RESEH LU” Optimalisasi Rekonsiliasi Aset Daerah Kab. Luwu
76	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Luwu	“PEDAS PANGAN” Peningkatan Daya Saing Produk IKM Pengelolaan Makanan Melalui Pembenahan Kemasan dan Labeling
77	Kecamatan Larompong	“GEBRAK PBB” Gerakan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
78	Kecamatan Walenrang Barat	“PERAMAH” Pemanfaatan Pekarangan Melalui Poilibag
79	Dinas Pendidikan Kab. Luwu	Integrasi WEBKU berAKHLAK Solusi Digital Pelayanan Publik
80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu	“WALMAS MAGATTI”
81	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu	“PUGALU” Pemuda Unggulan Luwu dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pemuda Melalui Pelatihan Kepeloporan Kewirausahaan Pemuda di Kab. Luwu
82	Dinas Perdagangan Kab. Luwu	“PERMATA HATI” Percepatan Informasi Berita Harga Komoditi
83	Puskesmas Bajo Barat	“PENTAS To Bajo Barat” Masyarakat Bajo Barat Peduli dan Tanggap Stunting
84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu	“MABASSA PROFIL DESA” Manajemen Database Profil Desa
85	Kecamatan Bajo	“GREBEK PUTIN” Gerakan Berdayakan Masyarakat Peduli Stunting
86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu	“MATA DESA” Manajemen Database Perangkat Desa
87	Dinas Pertanian Kab. Luwu	Sinkronisasi Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Pada Dinas Pertanian Kab. Luwu (SIRETA)

Sumber : Indeks Inovasi Kemendagri, 2026.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab ini menggambarkan arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan Kabupaten Luwu tahun 2027. Dimana arah kebijakan ekonomi menjelaskan terkait proyeksi ekonomi makro tahun 2027 yang mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Kabupaten Luwu. Sedangkan keuangan daerah memuat realisasi pendapatan dan belanja daerah serta memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiataan untuk Pembangunan tahun 2027.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dibidang ekonomi yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi daerah merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan tahunan daerah serta mengatasi isu strategis dan menyelesaikan permasalahan daerah yang dilakukan melalui prioritas perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2027, diarahkan pada “Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal “Luwu Berdaya”; Layanan publik yang professional dan bermartabat “Luwu Malebbi”; Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing; Pelopor kedaulatan pangan “Luwu Mappatuwo”; Infrastruktur merata dan

berkelanjutan; dan Desa mandiri; serta Lingkungan yang sehat dan Tangguh bencana “Luwu Lestari”

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah

Posisi geografis Kabupaten Luwu memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan dan dapat mendukung perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu memberikan kontribusi sebesar 3,34 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dalam kaitan itu Kabupaten Luwu dapat mengambil Langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian di Kawasan Palopo.

Prospek perekonomian Kabupaten Luwu pada tahun 2027 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2026. Pemerintah berupaya menggerakkan Kembali perekonomian daerah yakni meningkatkan pengembangan potensi unggulan daerah, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif, membuat Kawasan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pertumbuhan investasi bidang industry pengolahan, energi, dan pertambangan di Kabupaten Luwu, serta Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

Prospek perekonomian Kabupaten Luwu dikaitkan dengan tema Pembangunan Tahun 2027 yaitu Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital. Berdasarkan tema tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sektor pertanian, Perkebunan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 50,65 persen terhadap PDRB Kabupaten Luwu, sama halnya dengan perdagangan besar dan eceran berkontribusi sebesar 11,19 persen dan konstruksi sebesar 9,22 persen. Berdasarkan kontribusi tersebut, Pembangunan ekonomi akan upayakan dalam hilirisasi pertanian, Perkebunan dan pertanian, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja, serta mendorong investasi pada sektor unggulan Kabupaten Luwu.

Aspek lain Pembangunan ekonomi tahun 2027 adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi dan akan berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk kedepan harus diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, membangun infrastruktur yang ramah lingkungan serta memperhatikan pengelolaan lahan sesuai dengan peruntukannya.

Inovasi di bidang pertanian, Perkebunan dan perikanan sangat diperlukan, agar Masyarakat Kabupaten Luwu dapat berinovasi dalam mengolah hasil panen menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, sehingga dapat bernilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.

3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Global

Ekonomi global tahun 2025 tumbuh 3,4 persen dan diperkirakan melambat menjadi 3,1 persen pada tahun 2026 dan 3,2 persen pada tahun 2027 (berdasarkan world economic outlook; International Monetary Fund). Hal ini terjadi karena aktivitas global dihadapkan pada ujian besar akibat pecahnya perang di timur Tengah dan ketidakpastian kebijakan tarif. Ketidakpastian tarif ini berpotensi menekan kinerja perdagangan dan rantai pasok global.

Penerapan tarif oleh Amerika Serikat yang tinggi untuk beberapa negara saingannya, selain itu juga melemahnya perdagangan, dan penurunan pasar properti di negara-negara utama seperti Tiongkok telah memperlambat memperlambat momentum perekonomian. Pertumbuhan PDB AS berpotensi turun setengahnya. Risiko inflasi dari permintaan infrastruktur AI dan tekanan pada penggunaan energi hijau telah menambah tekanan pada kondisi ekonomi global.

Fragmentasi geopolitik pada gilirannya akan mengganggu rantai pasokan global, wujud nyata dari fragmentasi ini dilakukan dengan mendorong proteksionisme, hambatan perdagangan, dan kesepakatan berbasis kepentingan kelompok (bilateral maupun multilateral). Penerapannya akan menyebabkan biaya lebih tinggi, penundaan kegiatan, dan penurunan efisiensi. Para pelaku bisnis akan meresponsnya antara lain dengan regionalisasi dan diversifikasi,

tetapi risiko yang berkepanjangan akan menambah kerentanan, antara lain kekurangan pasokan dan inflasi.

Langkah-langkah proteksionis seperti tarif dan sanksi pembatasan arus komoditi, akan menciptakan kekurangan input bagi suatu kegiatan atau industri dan akan memaksa pengalihan rute atau melakukan penimbunan yang akan berakibat pada penambahan biaya yang tidak kecil. Jalur utama perdagangan menghadapi hambatan akibat adopsi teknologi yang tidak merata dan penundaan pembangunan infrastruktur akibat kondisi fiskal di negara yang bersangkutan. Fragmentasi dan konflik antar kelompok negara juga akan mengikis kepercayaan pada multilateralisme, merusak jalur perdagangan dan memperburuk efek berantai di seluruh kegiatan perekonomian global.

3.1.1.3. Tantangan Perekonomian Nasional

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2027 diperkirakan akan memengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan bisnis yang adaptif dan berbasis data. Wawasan yang mendalam terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna menjaga stabilitas dan kinerja bisnis di tahun 2027.

Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia tercatat tetap kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2026 tetap terjaga, ditopang pertumbuhan ekonomi 5,61 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh akselerasi konsumsi Masyarakat pada momentum Hari Besar Jeagamaan Nasional (HKBN); imlementasi program prioritas Pembangunan serta peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan produksi.

Inflasi yang masi terjaga pada bulan maret tahun 2026 sebesar 3,48% (yoy). Bank Indonesia meyakini inflasi 2026 secara tahunan tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$. Prakiraan ini didukung oleh konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Ke depan, ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap tangguh dengan pertumbuhan stabil di kisaran 5% yang didorong oleh investasi, hilirisasi, digitalisasi, dan transisi energi hijau. Meskipun tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik dan isu lingkungan tetap ada, yang harus diatasi melalui reformasi kebijakan dan peningkatan SDM masyarakat dan aparatur negara.

Pertumbuhan PDB yang konsisten dan stabilitas makro menjadi modal kuat di tengah gejolak global. Pasar domestik yang besar dan bonus demografi menjadi daya tarik bagi investasi. Selain itu program-program; hilirisasi berbagai komoditi baik sumber daya alam maupun hasil pertanian dan perkebunan serta kelautan, pengembangan kendaraan listrik, dan semikonduktor akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Indonesia yang berada pada jalur transit utama dunia dapat meningkatkan peran ekonomi global. Secara global, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS memperluas akses pasar dan memperkuat posisi global. Selanjutnya kemajuan teknologi terutama digital dan AI perlu segera diadopsi dengan kebijakan yang mempermudah akses, menjaga keamanan penggunaan dan membangun infrastruktur digital yang dibutuhkan, Komitmen dan konsistensi pemerintah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.

Tantangan dan strategi yang akan dihadapi dan harus disiapkan oleh Indonesia menyangkut ketidakpastian global seperti; perang dagang, inflasi, dan perlambatan ekonomi global. Tekanan global terkait isu iklim mendorong adaptasi kebijakan lingkungan dan kebijakan serta upaya penurunan emisi. Dorongan transisi ke energi terbarukan menjadi bagian penting dari strategi ekonomi masa depan.

3.1.1.4. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulsel tumbuh kuat pada triwulan I tahun 2026 sebesar 6,88 persen, kuatnya ekonomi Sulsel ditopang dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 20,56 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 35,14 persen.

Prospek positif tersebut dibayangi sejumlah faktir Risiko yang dapat berdampak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ke depan. *Upside risks* menekankan pada kelanjutan stimulus fiskal – sosial (BLT Kesejahteraan Rakyat, bantuan pangan, subsidi transport/logistic, PPH 21 DTP) menopang konsumsi rumah tangga dan aktivitas perdagangan; Hilirisasi dan kebijakan industry menopang sektor industry pengolahan dan ekspor bernilai tambah; berlanjutnya proyek kontruksi mendorong permintaan bahan bangunan dan barang modal. Sedangkan *Downside Risk*, diantaranya penyesuaian RKAB (Rencana kerja anggaran biaya) dan kuota tambang menahan produksi nikel dan hilirisasi mineral; Ekskalasi konflik timur Tengah dapat meningkatkan harga energi, menambah tekanan nilai tukar dan jalur logistic global, sehingga berdampak pada biaya input, impor bahan baku, meningkatkan biaya logistic, serta menahan produksi; Risiko iklim moderat-kuat dapat menekankan produktivitas sektor pertanian dan berdampak pada pasokan bahan baku industry; Ketidakpastian global mendorong pelaku usaha untuk menunda Keputusan investasi dan ekspansi.

Inflasi gabungan kota IHK di Sulsel triwulan I tahun 2026 sebesar 4,5 persen. Bank Indonesia tetap optimis bahwa inflasi tahun 2026 tetap stabil dan berada pada rentang sasaran $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulsel. Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diperkirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir tahun 2026.

Namun demikian, Risiko tekanan inflasi ke depan tetap perlu diwaspadai, terutama bersumber dari penyesuaian administred proce, peningkatan UMP, serta potensi dampak lanjutan kenaikan harga energi dan volatilitas pangan yang dapat memengaruhi realisasi inflasi Sulawesi Selatan. Hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian tarif PDAM, penyesuaian harga BBM, LPG, dan Avtur akibat konflik geopolitik; potensi peningkatan harga komoditas umum dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM dan Avtur; serta Risiko gangguan distribusi meningkatkan volatilitas harga pangan.

3.1.1.5. Tantangan Perekonomian Kabupaten Luwu

Tantangan perekonomian Kabupaten Luwu mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga pemerintah mendorong pencapaian pembangunan lain yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia.

Tantangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan perkapita, menurunkan ketimpangan, stunting, kemiskinan, mengendalikan harga pasar (inflasi) dan menyediakan lapangan pekerjaan serta membangun infrastruktur yang ramah lingkungan. Dimana dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang ditargetkan sebesar 9,33-9,95 persen dengan kebijakan Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di perdesaan dan daerah terpencil antara lain dengan penyediaan jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.

Tingkat pengangguran terbuka terus diupayakan untuk menurun di tahun 2027 dengan target 2,87-3,13 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Dengan ini perlu menjadi perhatian untuk pemerintah Luwu agar lebih menyiapkan sumber daya manusia dengan keahlian Angkatan kerja melalui Lembaga pelatihan serta mempersiapkan penempatan tenaga kerja,

memperluas kesempatan kerja, dan mengadakan job fair. Sehingga target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik.

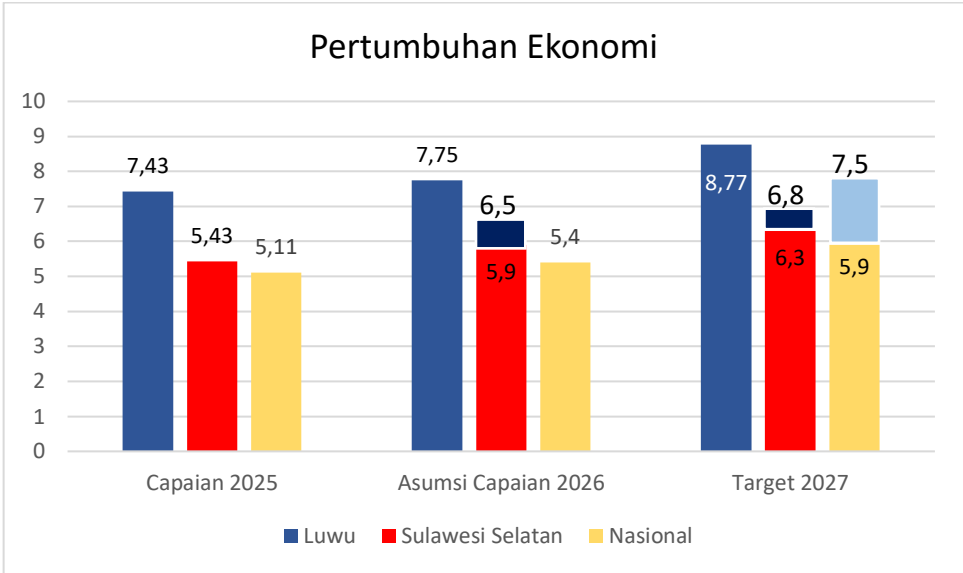
Kemiskinan dan Gini rasio saling terkait untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu. Sehingga Gini Rasio diperkirakan untuk terus menurun sebesar 0,324-0,300 tahun 2027. Meskipun gini rasio Luwu terendah ke tiga di Provinsi Sulawesi Selatan, namun pemerataan pendapatan di Luwu adalah merata berpendapatan rendah. Inilah yang menjadi tantangan pemerintah untuk menurunkan ketimpangan pendapatan seiring dengan menurunnya kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat.

3.1.1.5.1. *Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB*

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Pada tahun 2025 perekonomian Luwu tumbuh sebesar 7,43 persen, hal ini merupakan capaian tertinggi selama delapan tahun. Pertumbuhan ini ditopang oleh lapangan usaha industry pengolahan, jasa lainnya, dan administrasi pemerintahan sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Berdasarkan capaian tersebut maka Pemerintah Optimis untuk menaikkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,77 persen pada tahun 2027.

Grafik 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2025, Asumsi
Capaian 2026 dan Target 2027



Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

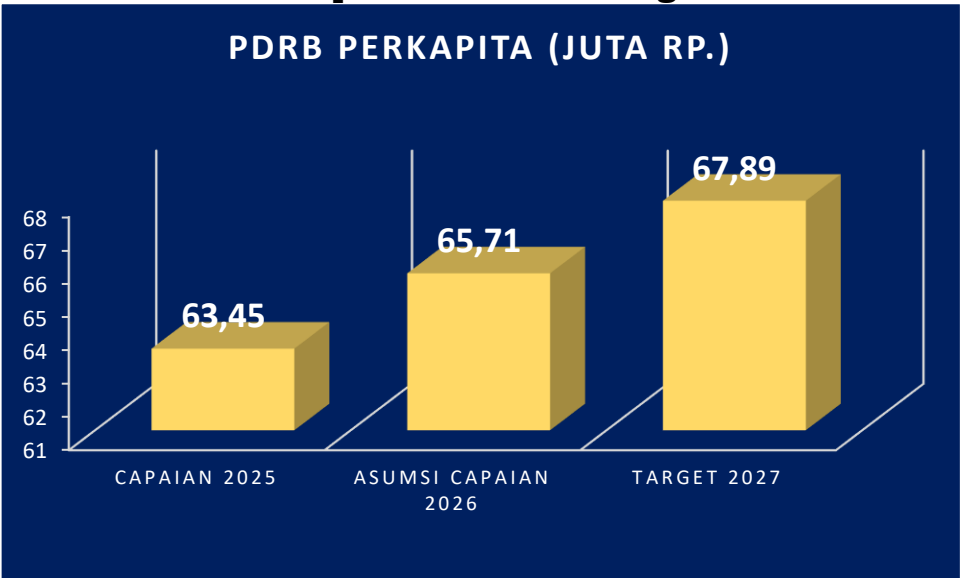
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu di 2027, Pemerintah daerah dan seluruh masyarakat harus bekerja keras dan bersinergi untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah juga dapat memetakan kawasan-kawasan yang memiliki proporsi cukup besar, dalam menyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Luwu, yaitu kawasan industri pengolahan, agro eko-wisata, peningkatan produksi pertanian dan perikanan, pertambangan serta energi.

Pemerintah Kabupaten Luwu melaksanakan berbagai strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya mewujudkan indeks pertanaman (IP 200- IP 300) dengan penyediaan benih; peningkatan infrastruktur pertanian; penyediaan sarana prasarana pertanian yang dikelola brigade pangan petani milenial. Hilirisasi komoditi unggulan melalui penyediaan pabrik cokelat; pabrik kopi; pabrik beras; serta mendorong investasi pabrik rumput laut di Kabupaten Luwu. Pengembangan kawasan agrowisata. Pemerintah Kabupaten Luwu juga terus mendorong investasi pada sektor industri pengolahan diantaranya industri nikel, pertambangan dan energi.

3.1.1.5.2. *PDRB Perkapita*

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. PDRB per kapita Kabupaten Luwu tahun 2025 adalah 63,45 Juta Rupiah, tahun 2026 diperkirakan meningkat menjadi 65,71 juta rupiah. Proyeksi Nilai PDRB perkapita ADHB tahun 2027 sebesar 67,89 juta rupiah.

Grafik 3.2.
Capaian PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Luwu Tahun 2025, Asumsi Capaian 2026 dan Target 2027



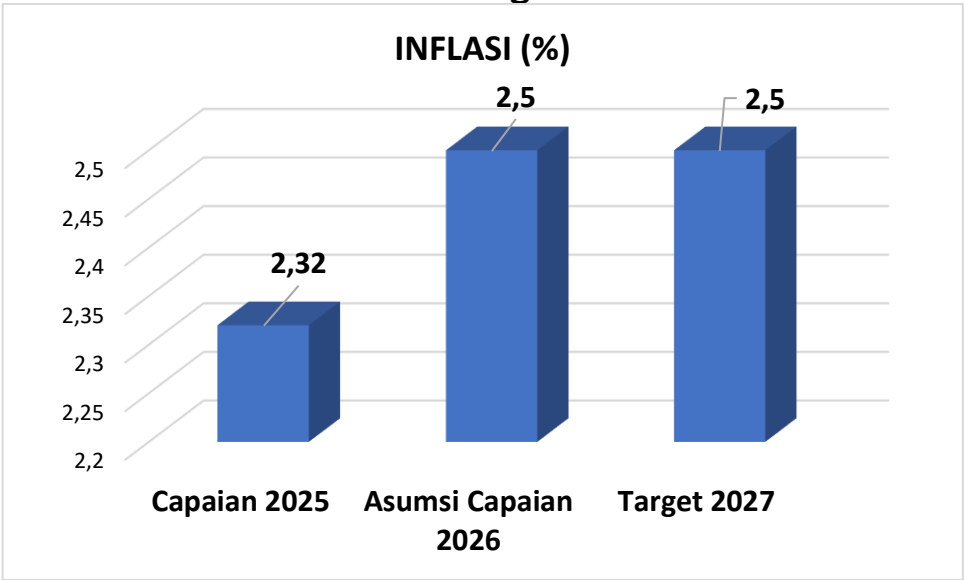
Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Dengan meningkatnya pendapatan perkapita akan mewujudkan beberapa langkah strategis, yaitu melalui revitalisasi industri, mendorong modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur, transformasi sektor jasa, dan mendorong investasi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah optimis dalam meningkatkan pendapatan perkapita karena adanya perusahaan industri besar yang telah beroperasi di Kabupaten Luwu yang menciptakan lapangan pekerjaan serta mendatangkan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Pembangunan sektor perumahan semakin meningkat, serta meningkatnya pelaku UMKM yang tumbuh disekitar Kawasan industri.

3.1.1.5.3. *Inflasi*

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Grafik 3.3.
Inflasi Kabupaten Luwu Tahun 2025, Asumsi Capaian 2026 dan Target 2027



Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam rangka menjaga 4 K (Keterjangkauan harga, ketersediaan harga, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), hal ini mencakup operasi pasar, Gerakan pangan murah, pengelolaan Cadangan pangan pemerintah, konektivitas antar wilayah serta penguatan koordinasi antar daerah dan pusat.

Dengan arahan diatas, maka pemerintah optimis untuk mengikuti target nasional dalam menurunkan inflasi atau menjaga kestabilan harga dengan target sebesar 2,5 pada tahun 2027. Prakiraan ini didukung oleh konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Daerah.

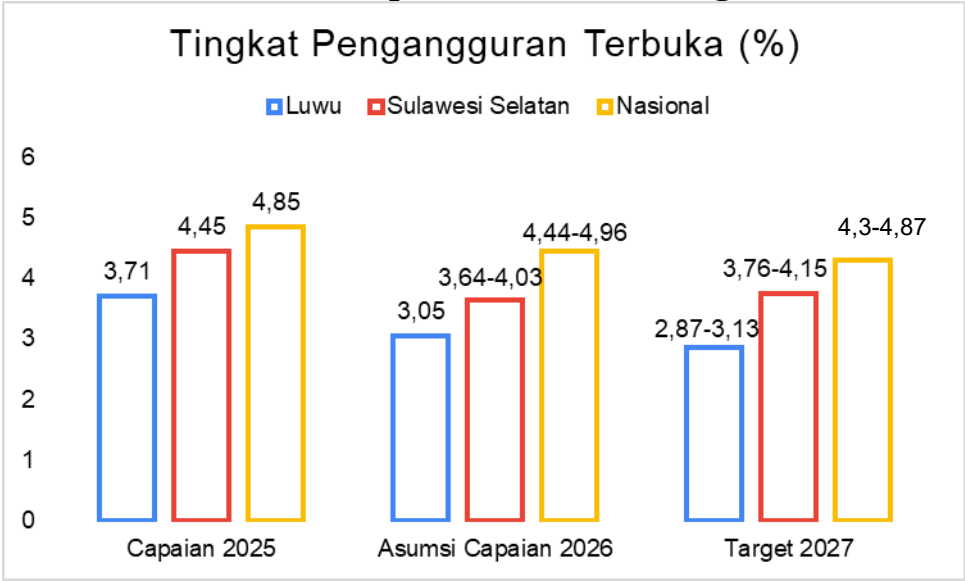
Langkah-langkah untuk menjaga inflasi di Kabupaten Luwu diantaranya melakukan pemantauan harian terhadap harga serta ketersediaan stok barang pokok untuk memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi; menjamin kelancaran distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya dari produsen ke pasar (kegiatan ini merupakan pembangunan infrastruktur dasar); Gerakan menanam dimana kegiatan ini merupakan pemanfaatan pekarangan halaman rumah dengan menanam tanaman pangan, sayuran yang dikelola oleh tim dasawisma; Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas perdagangan dan ketahanan pangan untuk memberikan akses harga terjangkau bagi masyarakat.

3.1.1.5.4. *Tingkat Pengangguran Terbuka*

Pembangunan sumber daya manusia adalah salah satu program prioritas nasional, program tersebut masih menemui tantangan yakni tingginya angka pengangguran. Untuk itu, dengan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) dapat mengatasi tantangan tersebut. Dengan lebih menekankan pada pentingnya penguasaan dan keterampilan di berbagai bidang termasuk penguasaan teknologi dan kemampuan berbahasa asing agar dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Luwu pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,71 persen. Hal ini disebabkan karena adanya Perusahaan PT Macmahon Indonesia; PT Tiara Tirta Energi; PT Bukaka Mandiri Sejahtera yang membuka lapangan pekerjaan pada tahun 2025. Namun pada tahun 2027 diperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Luwu akan berada pada 2,87-3,13 persen. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Tahun 2025, Asumsi Capaian 2026 dan Target 2027



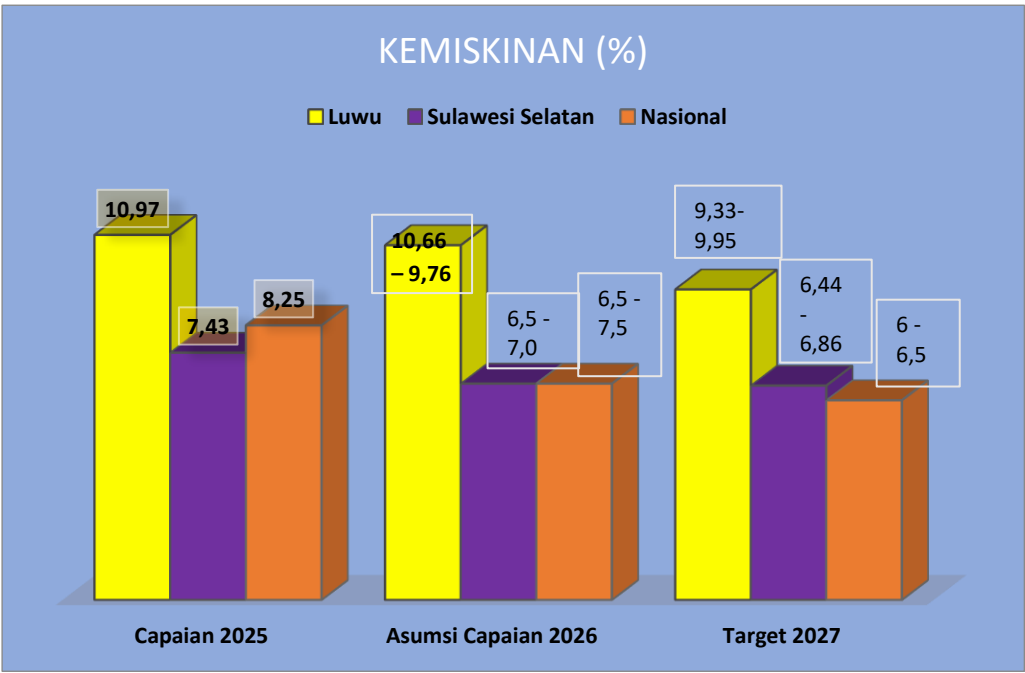
Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Pemerintah Kabupaten Luwu sangat optimis dalam menurunkan angka pengangguran pada tahun 2027, dikarenakan pemerintah akan bekerja keras dalam mengatasi masalah tersebut yakni mendorong investasi di sektor-sektor yang menjanjikan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan akses pelatihan keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja, dan fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri.

3.1.1.5.5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 menurun menjadi 10,97 persen dibanding pada tahun 2024 yang mencapai 11,70 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa kebijakan pemerintah yang mampu menurunkan penduduk miskin diantaranya pemberian bantuan sosial, Pembangunan rumah layak huni, perbaikan infrastruktur dasar, serta bantuan Pendidikan, Kesehatan, pertanian dan perikanan. Pendapatan Masyarakat Luwu akan terus di tingkatkan melalui pemberdayaan ekonomi Masyarakat Luwu agar pengeluaran berada pada diatas garis kemiskinan.

Grafik 3.5.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2025, Asumsi
Capaian 2026 dan Target 2027



Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Berdasarkan asumsi bahwa tahun 2026 kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan diupayakan untuk tetap membaik sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Luwu, maka dari itu ditargetkan tingkat kemiskinan menurun sebesar 10,66 – 9,76 persen (2026) dan 9,33 – 9,95 persen (2027). Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mewujudkan manusia yang unggul, pelayanan kesehatan berbasis e-KTP, bantuan pertanian dan perikanan berbasis masyarakat serta adanya program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2026 dan 2027.

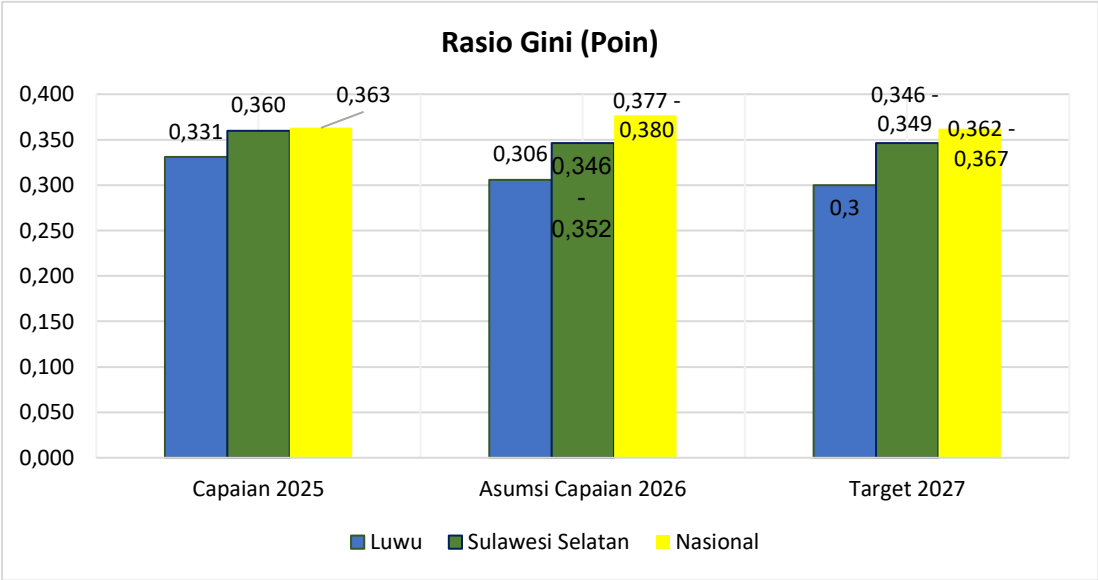
3.1.1.5.6. Gini Rasio

Gini rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai gini rasio yang semakin mendekati angka 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan gini rasio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna.

Gini rasio Kabupaten Luwu Tahun 2025 sebesar 0,331, hal ini masih berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Selatan (0,360). Untuk tahun 2026 Kabupaten Luwu memperkirakan capaian sebesar 0,306

yang artinya semakin mendekati angka 0, hingga penurunan ini terus ditargetkan tahun 2027 sebesar 0,300, hal ini masih tergolong ketimpangan menengah.

Grafik 3.6.
Gini Ratio Kabupaten Luwu Tahun 2025, Asumsi Capaian 2026 dan Target 2027



Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu.

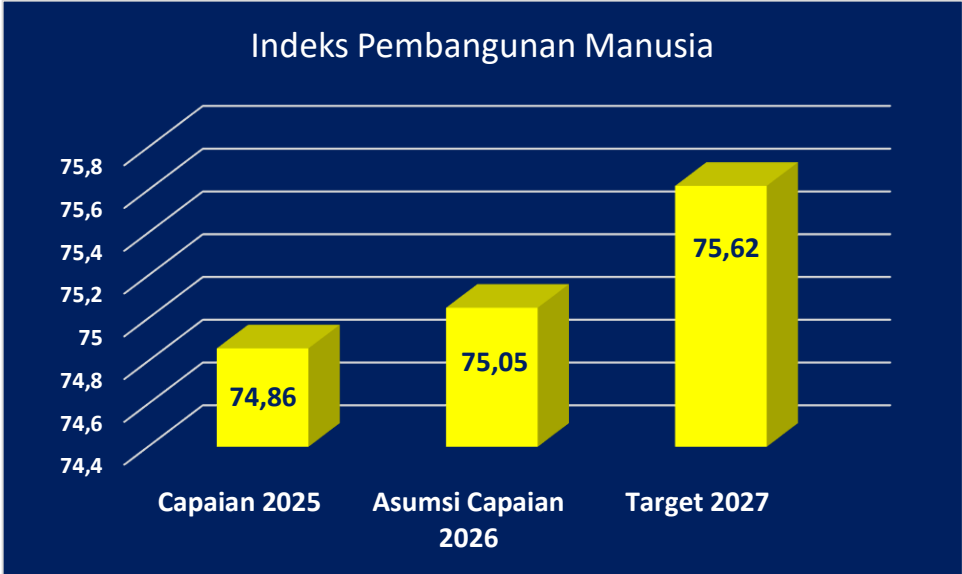
Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan beberapa strategi dalam menurunkan gini rasio yakni sinkronisasi dokumen Perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kualitas BumDes dan Koperasi Desa Merah Putih, Membangun infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tertinggal dapat membuka akses bagi masyarakat di sana untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi, serta Pemberdayaan digital, terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal, dapat membuka peluang kerja jarak jauh, meningkatkan akses ke informasi, serta membuka peluang pasar hasil produksi Masyarakat Desa.

3.1.1.5.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas

hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 3.7.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Tahun 2025,
Asumsi Capaian 2026 dan Target 2027



Sumber: BPS dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Luwu tahun 2025 berada dalam kategori tinggi dengan angka indeks sebesar 74,86. Pemerintah terus optimis untuk meningkatkan pada asumsi capaian 2026 sebesar 75,05 dan ditargetkan tahun 2027 sebesar 75,62. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah dibidang Kesehatan, pendidikan dan pendapatan Masyarakat. Bidang Kesehatan agar meningkatkan Upaya promotive dan preventif, meningkatkan pelayanan Kesehatan ibu anak dan perbaikan gizi. Bidang pendidikan agar mempercepat peningkatan taraf pendidikan di seluruh Masyarakat untuk memenuhi hal seluruh penduduk usia sekolah

dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas. Serta pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan skill Masyarakat sehingga dapat berusaha sendiri dan meningkatkan pendapatan Masyarakat.

3.1.2. Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2027 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dengan Tema “**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri**”. RKP Tahun 2027 menetapkan fokus pada tiga subtema yaitu produktivitas, investasi, dan industri yang dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional (PKPN) yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, Pendidikan, Kesehatan, penurunan kemiskinan, hilirisasi industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa.

Pemerintah fokus pada pencapaian Trisula pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam mencapai target tersebut, RKP tahun 2027 dilaksanakan melalui delapan prioritas nasional sebagai berikut:

1. **prioritas nasional 1.** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. **Prioritas Nasional 2.** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. **Prioritas nasional 3.** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal;
4. **Prioritas nasional 4.** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran

Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;

- 5. **Prioritas nasional 5.** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- 6. **Prioritas nasional 6.** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- 7. **Prioritas nasional 7.** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
- 8. **Prioritas nasional 8.** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Pemerintah fokus pada Pembangunan 1. Kualitas sumber daya manusia, tenaga kerja produktif dan inovasi; 2. Stimulus untuk produktivitas dan daya beli Masyarakat; 3. Digitalisasi dan efisiensi tata Kelola; 4. Regulasi dan Kelembagaan; 5. Efisiensi dan efektivitas investasi; 6. Infrastruktur dan Konektivitas ekonomi; 7. Inovasi pembiayaan Pembangunan; 8. Investasi berorientasi industry dan ekspor; 9. Industri nasional; 10. Hilirisasi SDA Strategis; 11. Swasembada pangan, energi, dan air. Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2027 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

No.	Sasaran	Indikator	Target 2027
1.	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,5
		GNI Per Capita (US\$)	5.800 – 5.840
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	76,84
2	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00 – 6,50
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,30 – 4,87

No.	Sasaran	Indikator	Target 2027
		Rasio Gini (Indeks)	0,362 – 0,367
		Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0
3	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,575

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah dan mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan teatap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuan. Dengan demikian, arah kebijakan keaungan daerah akan diuraikan pada maisng-masing komponen keuangan daerah sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025-2029 didasarkan pada beberapa asumsi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa adanya peningkatan PAD pada tahun 2027 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain

Pendapatan daerah yang Sah. Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2026 masih bergantung dari penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Selain itu, kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa mengurangi kemudahan berusaha dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun 2027, arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Luwu diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peningkatan penerimaan pajak daerah dilakukan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Ekstensifikasi pajak daerah dilaksanakan melalui penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta pengembangan potensi objek pajak baru sesuai kewenangan daerah. Sementara itu, intensifikasi pajak daerah dilakukan melalui optimalisasi pemungutan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sistem pengawasan,

serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah meliputi:

1. Melakukan pendataan, pemutakhiran, validasi, dan integrasi basis data objek serta subjek pajak dan retribusi daerah secara berkala.
2. Meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengawasan, penagihan aktif, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Melaksanakan ekstensifikasi pajak daerah dengan mengidentifikasi potensi wajib pajak dan objek pajak baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah sebagai sumber pendapatan melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, bangun guna serah, atau bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) dan digitalisasi pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.
6. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Badan Pendapatan Daerah, BKAD, perangkat daerah penghasil, instansi vertikal, pemerintah desa/kelurahan, serta pihak terkait lainnya dalam optimalisasi pendapatan daerah.
7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah melalui penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi.
8. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kinerja usaha, dan optimalisasi penyertaan modal yang produktif.
9. Mendorong peningkatan investasi daerah, kemudahan berusaha, dan pengembangan sektor-sektor unggulan sebagai upaya memperluas basis pajak daerah.
10. Mengoptimalkan perolehan pendapatan transfer melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, dan pemenuhan

indikator kinerja yang menjadi persyaratan penyaluran dana transfer pemerintah pusat.

11. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap capaian target pendapatan daerah serta menyusun langkah-langkah percepatan apabila terjadi deviasi terhadap target yang telah ditetapkan.
12. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kompetensi di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah akan diarahkan kepada antara lain;

1. Wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan tinggi namun belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal.
2. Wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah guna meningkatkan efektivitas penagihan dan kepatuhan.
3. Wajib pajak yang terindikasi menyampaikan data, laporan, atau perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
4. Objek pajak baru yang belum terdaftar dalam basis data pemerintah daerah melalui kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi lapangan.
5. Objek pajak yang mengalami perubahan luas, fungsi, kapasitas, atau nilai ekonomi yang berpotensi memengaruhi besaran pajak terutang.
6. Peningkatan kualitas basis data pajak daerah melalui integrasi data dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta pemanfaatan teknologi informasi.
7. Penguatan pengawasan terhadap proses pemungutan pajak daerah guna meminimalkan potensi kebocoran penerimaan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak secara selektif, berbasis risiko (*risk-based audit*), dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pajak daerah dalam bidang pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan kepatuhan perpajakan daerah.

10. Pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi administrasi perpajakan untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan pengendalian penerimaan pajak daerah secara lebih efektif.

3.2.1.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu 2024-2028

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menggali, mengelola, dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal dan meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan pengelolaan pendapatan transfer, serta optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Luwu terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang berlaku di luar PAD dan pendapatan transfer.

Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2023-2025, target APBD Pokok Tahun 2026 serta proyeksi pendapatan tahun 2027 dan 2028 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023-2028

URAIAN (PP 12/2019)	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026	PROYEKSI	
					2027	2028
PENDAPATAN	1.556.240.483.898	1.598.627.285.952	1.518.633.329.152	1.397.819.240.227	1.716.233.878.610	1.702.256.217.396
Pendapatan Asli Daerah	202.050.719.098	181.327.932.458	237.122.724.593	246.804.576.194	269.693.541.267	272.390.476.680
Pajak Daerah	50.438.568.926	41.438.612.755	82.225.962.983	97.116.724.994	108.539.554.987	109.624.950.537
Retribusi Daerah	10.657.004.004	11.937.916.466	136.791.460.488	140.187.851.200	151.153.986.280	152.665.526.143
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.933.719.708	5.984.942.696	6.358.187.925	5.500.000.000	6.000.000.000	6.060.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	135.021.426.460	121.966.460.541	11.747.113.197	4.000.000.000	4.000.000.000	4.040.000.000
Pendapatan Transfer	1.329.704.495.044	1.353.095.095.295	1.257.559.115.178	1.124.618.268.328	1.420.143.941.638	1.403.205.381.054
Pendapatan Transfer Pusat	1.223.542.473.104	1.293.386.126.349	1.171.404.628.998	1.069.555.925.000	1.362.407.246.130	1.344.891.318.591
Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.162.021.940	59.708.968.946	86.154.486.180	55.062.343.328	57.736.695.508	58.314.062.463
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.485.269.756	64.204.258.199	23.951.489.381	26.396.395.705	26.396.395.705	26.660.359.662
Hibah	24.485.269.756	41.429.572.996	0	0	0	0
Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0	22.774.685.203	23.951.489.381	26.396.395.705	26.396.395.705	26.660.359.662

Sumber: Bapenda dan BAPPEDA 2026

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, serta mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah disusun secara terencana, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result oriented) dengan mengedepankan prinsip value for money serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Luwu Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025–2029, selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita), Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan efisiensi belanja, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan daya saing daerah.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2027 akan dititikberatkan pada:

1. Pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, kesehatan, pengawasan, infrastruktur, serta belanja yang menjadi prioritas nasional dan daerah.
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang mendukung konektivitas wilayah, peningkatan aksesibilitas, ketahanan

pangan, penyediaan air minum, sanitasi, irigasi, dan pengembangan kawasan strategis.

4. Penguatan sektor ekonomi unggulan daerah, khususnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, UMKM, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
6. Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, termasuk pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
7. Peningkatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan risiko bencana melalui pelestarian lingkungan hidup, rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan sampah, pengurangan emisi, serta penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
8. Pengendalian inflasi daerah dan penguatan ketahanan pangan, melalui dukungan terhadap peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, dan penguatan distribusi pangan.
9. Peningkatan kualitas belanja daerah dengan menerapkan prinsip *money follows program, spending better*, dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan.
10. Optimalisasi belanja yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya melalui sinergi pendanaan, sehingga program pembangunan strategis dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan arah kebijakan tersebut, belanja daerah Tahun 2027 diharapkan mampu mendukung percepatan pencapaian target pembangunan Kabupaten Luwu, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

3.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3.2.2.1.3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

1. Belanja Tanah digunakan untuk pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap berupa tanah yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan publik.
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
6. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah,

tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4. Belanja Transfer

3.2.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2027, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2026 yang belum direalisasikan kepada Desa atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

3.2.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah

daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Nomor 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Tahun Anggaran 2025 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan tersebut adalah Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2027 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023-2028
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019

Uraian (PP12/2019)	Realisasi 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026	PROYEKSI	
					2027	2028
BELANJA	1.499.998.049.538	1.597.498.327.904	1.499.815.148.131	1.443.624.696.195	1.711.233.878.610	1.697.256.217.396
Belanja Operasi	1.011.443.186.661	1.066.238.873.818	1.097.295.666.878	1.111.125.688.914	1.132.548.169.215	1.143.873.650.908
Belanja Pegawai	571.451.593.674	634.928.648.058	678.472.403.154	680.840.594.927	678.250.413.933	685.032.918.072
Belanja Barang dan Jasa	390.906.132.336	354.420.802.198	400.072.872.523	415.224.417.221	441.960.565.004	446.380.170.654
Belanja Hibah	12.396.578.154	76.719.423.562	18.603.391.201	14.978.676.766	12.236.690.278	12.359.057.181
Belanja Bantuan Sosial	422.500.000	170.000.000	147.000.000	82.000.000	100.500.000	101.505.000
Belanja Modal	315.845.774.632	272.943.249.862	174.992.193.865	97.953.063.911	340.226.593.377	312.598.859.311
Belanja Modal Tanah					3.000.000.000	2.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.359.340.682	43.087.466.961	43.621.183.203	23.044.467.777	36.423.576.595	36.787.812.361
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.004.695.772	109.972.509.051	62.051.624.325	17.672.752.407	140.850.722.143	112.259.229.364
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	169.416.302.978	113.785.163.733	61.660.831.555	52.174.484.831	157.048.169.360	158.618.651.054
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.015.435.200	5.477.220.767	6.366.842.632	2.153.633.896	56.021.348	56.581.561
Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	620.889.350	1.291.712.150	2.907.725.000	2.848.103.931	2.876.584.970
Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	1.272.669.418	2.054.485.549	4.781.066.750	6.000.000.000	6.000.000.000
Belanja Transfer	248.637.284.983	257.043.534.806	225.472.801.839	229.764.876.620	232.459.116.017	234.783.707.177
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.270.883.007	0	5.357.901.143	11.230.457.620	12.201.624.869	12.323.641.118

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Uraian (PP12/2019)	Realisasi 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026	PROYEKSI	
					2027	2028
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	249.515.608.000	257.043.534.806	220.114.900.696	218.534.419.000	220.086.375.398	222.287.239.152

Sumber: BKAD dan BAPPEDA 2026

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp.1.711.233.878.610 yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.132.548.169.215, Belanja Modal sebesar Rp.340.226.593.377, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 6.000.000.000, serta Belanja Transfer sebesar Rp. 232.459.116.017. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2027.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2027 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024-2028 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2024-2027

Uraian (PP12/2019)	Realisasi 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	TARGET 2026	PROYEKSI	
					2027	2028
Penerimaan Pembiayaan	60.206.662.407	32.114.608.764	33.202.482.062	45.805.455.968	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembiayaan Netto	60.206.662.407	27.114.608.764	33.202.482.062	45.805.455.968	-5.000.000.000	-5.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kab.Luwu 2026.

3.2.4. Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Luwu mendorong Pemerintah Daerah dalam mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.2.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Luwu selain bersumber dari APBD Kabupaten Luwu, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan berupa Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.2.4.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat

berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2027

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2027 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati Luwu yang termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 beserta permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2027 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu 2011-2031, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan potensi sektor unggulan di Kabupaten Luwu.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Merujuk pada pengertian yang tercantum dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran dapat dimaknai rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi Kabupaten Luwu selama 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun pelaksanaan 2027 yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan

dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, maka perlu penjabaran lebih lanjut dengan menetapkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Luwu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, oleh karena itu rumusan tujuan dan sasaran RKPD berpedoman pada atau diturunkan secara langsung dari RPJMD. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027 merupakan implementasi pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 adalah **“LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS”**. Sasaran rumusan Visi tersebut dijabarkan pada 3 (Tiga) pokok visi yang menjadi pilar utama dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu 2025-2029

VISI	POKOK VISI	PENJELASAN
Luwu Unggul, Berkarakter Dan Berbasis Agribisnis	Unggul	Mewujudkan Kabupaten Luwu yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif sumber daya alam dan pengembangan lokasi yang spesifik berdasarkan karakter lingkungan dan tersebar serta didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing
	Berkarakter	Membangun pribadi Masyarakat yang memiliki sikap berahlak mulia, berkesadaran, sikap mental dan kualitas kehidupan, religius yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang memiliki nilai etika, disiplin, bertanggungjawab, cinta tanah air, berpikir kritis hormat pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan
	Agribisnis	Berkembangnya perekonomian pedesaan pada sektor pertanian dan perikanan sebagai basis lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Luwu.

Sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029

Adapun Misi pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mewujudkan Visi tersebut adalah:

1. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif;
3. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal;
4. Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan;

- 6. Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa;
- 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Luwu 2025-2029

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial	Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat diwujudkan melalui sinergi yang harmonis antara daya dukung sosial dan sumber daya potensial. Daya dukung sosial sebagai pilar keukuata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup modal sosial yang terjalin erat, seperti kepercayaan, gotong royong, dan partisipasi aktif Masyarakat dalam proses Pembangunan. Sedangkan sumber daya potensial sebagai motor penggerak yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Ini mencakup kekayaan alam yang melimpah yakni pertanian, perikanan, industri dan pertambangan	Unggul
2	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif	Tata kelola pemerintahan bersih pada prinsipnya adalah sebuah model penyelenggaraan pemerintahan yang paling diminati bahkan dijadikan nilai kerja untuk memperoleh kepercayaan publik. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Luwu melalui misi ini tidak hanya menjadikan hal tersebut sebagai narasi melainkan tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih salah satu hal yang paling esensial adalah penyelenggaraan pemerintahan secara profesional	Berkarakter
3	Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal	Sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal merupakan modal dasar pembangunan menuju tercapainya visi berkarakter. Oleh karena itu	Berkarakter

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
		pembangunan harus diawali dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pembentukan modal manusia sebagai aspek utama pembangunan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi transformasi pembangunan	
4	Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan	Pembangunan agribisnis yang berkelanjutan agar diupayakan pengembangan sistem agribisnis tidak hanya focus pada peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi untuk suatu daerah, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan generasi mendatang. Hal ini dilakukan dengan pendekatan holistic yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam seluruh rantai nilai agribisnis mulai dari produksi hulu, hingga pengolahan, pemasaran dan konsumsi hilir	Agribisnis
5	Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan merupakan pondasi utama kemajuan suatu daerah yang akan membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara merata di seluruh wilayah. Pembangunan infrastruktur bertujuan mendukung pelayanan dasar untuk meningkatkan akses, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas.	Unggul
6	Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa	Pembangunan desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata Kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah desa agar mengidentifikasi daan memetakan secara komprehensif seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial dan budaya. Pengembangan ekonomi local bebrbasis potensi dan mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Agribisnis

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
7	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggungjawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan Masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem	Unggul

Sumber : RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029

Berdasarkan analisis pembangunan daerah dalam rangka penyusunan RKPD dan evaluasi indikator tujuan dan sasaran maka terdapat beberapa target yang mengalami perubahan diantaranya 1) PDRB Perkapita target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar 76,3 Juta Rupiah sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 56,71 Juta Rupiah, sehingga tahun 2027 mengalami perubahan dan hasil kesepakatan dengan Provinsi maka ditetapkan sebesar 67,89 Juta Rupiah. 2) Pertumbuhan ekonomi, berdasarkan capaian tahun 2025 sebesar 7,43 persen maka dari itu berdasarkan hasil kesepakatan dengan Provinsi maka target tahun 2027 dinaikkan menjadi 8,77 persen, dimana melebihi dari target pada RPJMD Tahun 2025-2029. 3) Tingkat Kemiskinan, dimana ditargetkan pada RPJMD tahun 2025-2029 sebesar 10,35 persen, namun pada RKPD lebih optimis lagi dapat diturunkan menjadi 9,95 – 9,33 persen. Hal ini didasari karena pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu semakin meningkat setiap tahunnya. 4) Indeks Pembangunan Manusia, capaian pada tahun 2025 melebihi dari target RPJMD tahun 2025-2029 yaitu 74,86 poin, maka dari itu pemerintah Luwu optimis untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2027 sebesar 75,62 poin. Adapun target-target indikator tujuan dan sasaran dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target RPJMD TAHUN 2025-2029 untuk Tahun 2027	Target 2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita	Juta. Rp	63,45	76,3	67,89
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	7,43	6,53	8,77
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,71	2,87	2,87 – 3,13
		Berkembangnya Hilisasi sumber daya unggulan	Kontiribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	%	4,78	7,01	7,01
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran Perkapita	Ribu. Rp	11634	14.621	14.621
		Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan	%	10,97	10,35	9,33 – 9,95
3			Indeks Reformasi Birokrasi General	Angka	50,15	58,2	58,2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target RPJMD TAHUN 2025-2029 untuk Tahun 2027	Target 2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP	Angka	62,25	62,66	62,66
		meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Angka	64,58	81,92	81,92
		Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE	Angka	2,75	3,9	3,9
			Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,34	45,18	50,12
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	4,56	1,91	1,91
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,66	74,8	75,62 – 76,09

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target RPJMD TAHUN 2025-2029 untuk Tahun 2027	Target 2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan	Angka	73,8	82,35	82,35
		meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Angka	82,85	84,11	84,11
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	67,5	62,09	73,6
			Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	30,6	60,83	60,83
		meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	75	75,06	75,06
5	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan		Indeks Ekonomi Hijau	Angka	49,82	51,41	51,41

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target RPJMD TAHUN 2025-2029 untuk Tahun 2027	Target 2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Indeks Ekonomi Biru	Angka	79,5	122,82	122,82
		Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/Ha	6,2	7,8	7,8
			Nilai Tukar Petani (Angka)	Angka	111,2	104,03	104,3
		Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas Perikanan	Rp/Jiwa	10,02	11,05	11,05
			Nilai Tukar Nelayan	Angka	110,35	111,8	111,8
		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	71,45	83,61	83,61
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur	Angka	2,64	3,02	3,02
		Meningkatnya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas wilayah	Angka	19,64	15,14	15,14
		Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	%	68,17	10,85	10,85

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target RPJMD TAHUN 2025-2029 untuk Tahun 2027	Target 2027
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		air minum yang layak bagi masyarakat	akses rumah tangga terhadap air minum aman	Angka	22,25	34	34
		Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	80,61	8,9	89
7	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks Desa (Angka)	Angka	68,73	75,38	75,38
		Meningkaatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	%	17,87	24,15	24,15
8	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca	%	Belum Rilis	25,92	25,92
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	Angka	147,48	185,58	129,23
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	81,98	77,92	82,33 – 83,60

Sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027

Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah Tahun 2027 adalah Gambaran prioritas Pembangunan tahun 2027 yang diambil dan dikaitkan dengan prioritas Pembangunan nasional tahun 2027, prioritas Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 dan program Pembangunan daerah tahun 2027 pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Pencapaian visi Indonesia Emas 2045 memerlukan kesinambungan arah kebijakan perencanaan pembangunan yang dirancang secara bertahap dan terintegrasi. Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 menjadi landasan strategis yang menetapkan arah transformasi bangsa selama 20 tahun ke depan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 lahir sebagai pelaksanaan tahap pertama pada RPJPN 2025-2045. Sekaligus memuat delapan visi Presiden yang tertuang dalam astha cita. Selanjutnya Astha Cita diterjemahkan ke dalam delapan prioritas nasional sebagai acuan utama pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Trisula Pembangunan.

4.2.1.1. Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2027 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2027 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dengan Tema “**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri**”. Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027 yang telah disesuaikan dengan tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029 yaitu **Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital**.

Tabel 4.4
Keselarasan Tema RKP Tahun 2027 dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027

TEMA RKP Nasional	TEMA RKPD LUWU
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital

Pemerintah fokus pada pencapaian Trisula pembangunan yaitu tahap awal pertumbuhan ekonomi berkualitas, kemudian dilanjutkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berakhir pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam mencapai target tersebut, RKP tahun 2027 dilaksanakan melalui delapan prioritas nasional **prioritas nasional 1**. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); **Prioritas Nasional 2**. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru; **prioritas nasional 3**. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal; **prioritas nasional 4**. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas; **prioritas nasional 5**. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; **prioritas nasional 6**.

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan; **prioritas nasional 7**. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; **prioritas nasional 8**. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2027 diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas; penurunan kemiskinan dan ketimpangan; peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka akan dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada tabel 4.5. sebagai berikut:

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027

RKP TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN LUWU	
No.	Sasaran	Indikator	Target 2027	Indikator	TARGET 2027
1.	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,90 – 7,50	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	8,77
		GNI Per Capita (US\$)	5.900 – 5.990	PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	67,89
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57	Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca (%)	25,84
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	76,84	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	82,02
2	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00 - 6,50	Tingkat kemiskinan (%)	9,33 – 9,95
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,30 - 4,87	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	2,87 – 3,13
		Rasio Gini (Indeks)	0,362 – 0,367	Rasio Gini (Indeks)	0,324 – 0,300
		Kemiskinan Ekstrem (%)	0	Kemiskinan Ekstrem (%)	0
3	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,575	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	75,62 – 76,09

Sumber: Rancangan RKP 2027

Sasaran pembangunan dalam RKP 2027 tahun 2027 dicapai melalui pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dirancang secara terpadu, sinergis, dan saling mendukung antar sektor pembangunan. PKPN menjadi instrumen untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional melalui penguatan berbagai bidang prioritas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia dengan delapan klaster yaitu 1. Kedaulatan pangan; 2. Kemandirian energi dan air; 3. Pendidikan; 4. Kesehatan; 5. Penurunan kemiskinan; 6. Hilirisasi dan Industrialisasi; 7; Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; 8. Ekonomi kerakyatan dan desa.

4.2.1.2. Pengarusutamaan Pembangunan

pemerintah berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui pemenuhan hak asasi, kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi strategi fundamental dalam setiap kebijakan untuk memastikan seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara inklusif dan serponsif terhadap kebutuhan yang beragam.

1. Pengarusutamaan Gender

Strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program. Tujuannya adalah memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, dengan sasaran meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan.

2. Inklusi Sosial

Pembangunan inklusif merupakan proses dan upaya untuk

memastikan seluruh individu dan kelompok masyarakat, terutama yang rentan, miskin, terpinggirkan, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak, masyarakat adat, dan kelompok lainnya, dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya tanpa mengalami diskriminasi, dengan dua sasaran yakni, 1) Terpenuhinya hak dan perlindungan anak; 2) Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

3. *Sustainable Development Goals*

Sebanyak 116 indikator dan 193 target SDGs telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP 2027, dengan dukungan implementasi hingga tingkat daerah melalui Renja K/L dan RAD SDGs. Percepatan pencapaian SDGs diperkuat melalui keterlibatan aktor nonpemerintah, pengembangan ekosistem kewirausahaan dan inovasi lintas sektor, penguatan talenta profesional adaptif, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan melalui fungsi knowledge hub dan dukungan pendanaan berkelanjutan, yang seluruhnya didukung sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital. Sasaran SDGs tahun 2027 menguatnya pelaksanaan SDGs melalui integrasi perencanaan, pelaporan, serta rekognisi.

4. Transformasi Digital

Transformasi digital diarahkan untuk mewujudkan ekosistem digital yang berdaulat, terpercaya, terbuka, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat melalui penguatan infrastruktur digital, ekonomi dan industri digital, layanan pemerintahan berbasis digital, serta peningkatan literasi dan kapasitas SDM digital. Upaya ini didukung penguatan tata kelola data dan keamanan siber, pemerataan akses internet hingga daerah terpencil, serta pembangunan sistem terpadu seperti Satu Data Indonesia dan platform layanan publik digital dengan prinsip interoperabilitas, metadata, dan standar data guna memastikan transformasi digital berjalan aman, terintegrasi, mudah diakses dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Sasaran transformasi digital meningkatnya pengembangan ekonomi

digital dalam mendukung kontribusi ekonomi digital terhadap PDB; Meningkatnya transformasi digital; Meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan Masyarakat digital; terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; Meningkatnya Pembangunan TIK di Tingkat nasional.

5. Pembangunan Rendah Karbon

Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan nasional diarahkan untuk mendukung penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emissions 2060 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fokus intervensi mencakup sektor energi, kehutanan dan lahan (FOLU), pertanian, limbah, serta kelautan pesisir (*blue carbon*), melalui peningkatan pemanfaatan energi bersih dan efisiensi energi, restorasi dan rehabilitasi hutan serta gambut, penguatan praktik pertanian rendah karbon, dekarbonisasi subsektor industri, penguatan pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta peningkatan cadangan karbon ekosistem karbon biru yang didukung tata kelola dan nilai ekonomi karbon untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi GRK. Untuk sasaran Pembangunan rendah karbon yaitu menurunnya emisi gas rumah kaca dengan indikator penurunan emisi GRK Kumulatif (%) dan penurunan emisi GRK Tahunan (%)

6. Pembangunan Berketahanan Iklim

Peningkatan intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim menimbulkan tekanan signifikan terhadap Pembangunan nasional, khususnya pada sektor prioritas yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan Kesehatan. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya Risiko kerugian ekonomi, gangguan kayanan dasar, serta penurunan kesejahteraan Masyarakat, terutama di wilayah rentan.

Pengarusutamaan berketahanan iklim diarahkan untuk menurunkan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim melalui penguatan perencanaan berbasis Lokasi prioritas,

integrasi lintas sektor, serta pelaksanaan aksi yang terukur dan kolaboratif antara pemerintah, Masyarakat dan mitra Pembangunan, dengan sasaran menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat oerubahan iklim pada empat sektor prioritas (kelautan, pesisir, air, pertanian dan Kesehatan).

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP). Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025

TEMA RKPD PROVINSI	TEMA RKPD KABUPATEN
Akselerasi Pembangunan sumber daya manusia, pelayanan publik, dan infrastruktur untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital

Tabel 4.7.
Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
1	Meningkatnya kualitas Modal Manusia		Indeks Modal Manusia (Angka)	0,547 – 0,560	1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	67,89
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan secara Merata	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,33			Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	8,77
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Untuk Semua secara Merata dan Inklusif	Rata rata lama sekolah (Tahun)	9,72			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	2,87 – 3,13
			Harapan lama sekolah (Tahun)	13,94 - 13,96			Berkembangnya Hilisasi sumber daya unggulan	Kontiribusi Industri pengolahan terhadap PDRB (%)	7,01
2	Meningkatnya ketahanan daerah dan Masyarakat		Indeks Ketahanan Nasional (Angka)	3,14	2.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran perkapita	14.621

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
	terhadap tantangan Pembangunan global				3		Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	9,33 – 9,95
		Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi Provinsi (Angka)	82,05 – 85,30		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)	58,2
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Pemajuan Kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	79,96			Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	62,66
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)	58,21			meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	81,92
		Meningkatnya perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Indeks Perlindungan Anak (Angka)	73,32			Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	3,9
			Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	68,27				Indeks Inovasi Daerah (Angka)	50,12

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	0,324			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	1,91
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3 – 6,8	4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	75,02 – 76,09
			Rasio Gini (Angka)	0,346 – 0,349			Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	82,35
		Meningkatnya Produktivitas Ekonomi dan Swasembada Pangan	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	14,17			meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	84,11
			Rasio Volume usaha Kopersasi terhadap PDRB (%)	0,84			Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, kualitas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	73,6
			Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	76,28				Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	60,83
		Meningkatnya Integrasi Ekonomi Regional dan Global	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	11,4			meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	75,06

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
		Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi makro daerah	Tingkat Inflasi (%)	3,0	5	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan		Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	51,41
			Inklusi Keuangan (Angka)	90,33				Indeks Ekonomi Biru (Angka)	122,82
		Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri (%)	40,15			Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	7,8
			Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran (%)	6,44 – 6,86				Nilai Tukar Petani (Angka)	104,3
		Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,76 – 4,15			Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas Perikanan (Rp/Jiwa)	11,05
								Nilai Tukar Nelayan (Angka)	111,8
4	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital		Indeks Transformasi Digital Nasional (Angka)	62			Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	83,61
		Meningkatnya Jangkauan Infrastruktur	Nilai Pilar Infrastruktur	49,05					

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
		Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks TDN (Angka)						
		Meningkatnya Ketrampilan Digital Masyarakat	Nilai Pilar Keterampilan Masyarakat ITDN (Angka)	68,10	6	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Angka)	3,02
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif		Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	85,20			Meningkatnya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas wilayah (Angka)	15,14
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP (Angka)	70,50			Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	10,85

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,48				akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	34
		Meningkatnya Inovasi Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	62,5				Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	8,9
6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan		Indeks williamson (Angka)	0,53	7	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks Desa (Angka)	75,38
			Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (%)	37,22			Meningkaatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	24,15
		Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks infrastruktur (Angka)	89,33	8	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca (%)	25,92

NO.	PROVINSI SULAWESI SELATAN				NO.	KABUPATEN LUWU			
	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027		Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) (Angka)	82,23			Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah (Angka)	185,58
			Indeks Risiko Bencana (Angka)	132,94 - 130,79			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	82,02

4.2.2.1. Keselarasan antara Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dengan Program Prioritas Kabupaten Luwu

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu dilaksanakan dengan mematuhi prinsip sinergi dan integrasi antar tingkatan pemerintahan. Keselarasan antara Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan instrumen krusial untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta pencapaian target pembangunan daerah yang saling mendukung (sistemik dan simbiotik).

Melalui pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*, Pemerintah Kabupaten Luwu memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya dan perumusan target indikator kinerja utama (IKU) tidak hanya merespons kebutuhan lokal masyarakat daerah, tetapi juga secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro dan sasaran prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.8.
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Luwu terhadap Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
5	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
6	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten
10	Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
11	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
13	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
14	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
15	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
16	Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
17	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
19	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
20	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
23	Program Pengembangan UMKM	
24	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
26	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
27	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten
31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
32	Program Penyuluh Pertanian	Program Penyuluh Pertanian
33	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
34	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
35	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
36	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
37	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
38	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
39	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-
41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
42	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
43	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
44	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
45	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan
46	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
47	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
48	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
49	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
50	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
51	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
52	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana
53	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
54	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
55	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
56	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten
57	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
58	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
59	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
60	Program Penataan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah
61	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
62	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
63	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
64	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan
65	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
66	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
67	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
68	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
69	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
70	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
71	Program Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan
72	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
73	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
74	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	-
75	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
76	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
77	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
78	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
79	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten
80	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
81	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
82	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
83	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
84	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	-
85	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	-
86	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
87	Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
88	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	
89	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah
90	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
91	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu

Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2027 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan dan isu strategis pembangunan Tahun 2027. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan disusun berdasarkan arah kebijakan serta menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan penahapan pada RPJMD tahun 2027, maka tema pembangunan daerah tahun 2027 yaitu: **“Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal “Luwu Berdaya”;
2. Layanan public yang professional dan bermartabat “Luwu Malebbi”;

- 3. Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing;
- 4. Pelopor kedaulatan pangan “ Luwu Mappatuwo”;
- 5. Infrastruktur merata dan berkelanjutan; dan
- 6. Desa mandiri; serta
- 7. Lingkungan yang sehat dan Tangguh bencana “Luwu Lestari”

Untuk melihat sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.9.
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Luwu, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2027

PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
PRIORITAS 1. Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	PRIORITAS 5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
		Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
PRIORITAS 2. layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	PRIORITAS 4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
	PRIORITAS 6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
PRIORITAS 3. Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	PRIORITAS 1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi; PRIORITAS 2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
		Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
		Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
PRIORITAS 4. Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	PRIORITAS 3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
PRIORITAS 5. Infrastruktur merata dan berkelanjutan	PRIORITAS 7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
PRIORITAS 6. Desa mandiri	PRIORITAS 5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
PRIORITAS 7. Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	PRIORITAS 8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027
4.2.3.1 Target Indikator Makro Pembangunan

Perekonomian suatu daerah tidak akan terlepas dari masalah pengangguran dan inflasi yang dampaknya mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Ekonomi makro memberikan penjelasan tentang perubahan ekonomi suatu daerah yang berdampak pada masyarakatnya. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini melalui serangkaian kebijakan. Ekonomi makro dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah terkait perekonomian, dan juga sebagai alat untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, untuk menjadi tolok ukur dalam menentukan kebijakan maupun mengukur keberhasilan, untuk masing-masing aspek ditetapkan suatu target.

Dalam pencapaian target indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi daerah dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya. adapun tabel keselarasan target indikator makro pembangunan tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2027

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2027	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3 – 6,8	8,77	8,77	Sesuai Kesepakatan Rakortek
2.	PDRB Per Kapita (juta)	86,9 – 92,7	67,89	67,89	Sesuai Kesepakatan Rakortek
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	3,20	3,34	3,34	Sesuai Kesepakatan Rakortek
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,44 - 6,86	9,95 - 9,33	9,95 - 9,33	Sesuai Kesepakatan Rakortek

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2027	KETERANGAN
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,76 - 4,15	3,13 - 2,87	3,13 - 2,87	Sesuai Kesepakatan Rakortek
6.	Rasio Gini	0,346 - 0349	0,324 - 0,300	0,324 - 0,300	Sesuai Kesepakatan Rakortek
7.	Indeks Modal Manusia)	0,547 - 0,560	-	-	Sesuai Kesepakatan Rakortek
	Indeks Pembangunan Manusia	-	75,62 - 76,09	75,62 - 76,09	Sesuai Kesepakatan Rakortek
8.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca(%)	37,22	25,84	25,84	Sesuai Kesepakatan Rakortek
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,23	82,02	82,02	Sesuai Kesepakatan Rakortek

Sumber : Tim Penyusun RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027

4.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program pembangunan yang termasuk dalam program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan format penentuan outcome program telah disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Adapun Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.11.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
1	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	76,21					
			Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	8,07	Meningkatnya skala usaha pelaku UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	11,09	URUSAN KOPERASI DAN UMKM
						Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	4,8	
						Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	15	URUSAN PARIWISATA
						berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1,90	URUSAN PARIWISATA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
						Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	100	URUSAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,87 – 3,13	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	54,55	URUSAN KETENAGAKERJAAN
							Tingkat produktivitas tenaga kerja		65,7	
						meningkatnya tenaga kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Program penempatan tenaga kerja	28	
			Meningkatnya Hirilisasi sumber daya unggulan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	7,01	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pembangunan sektor industri dan kawasan industri	program Perencanaan dan Pembangunan Industri	30,25	UNSUR KOPERASI DAN UMKM
						Meningkatnya nilai investasi daerah berbasis sumber daya unggulan	Realisasi total investasi terhadap target investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	100	URUSAN PENANAMAN MODAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
						Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program promosi penanaman modal	8,29	URUSAN PERTANIAN
						Meingkatnya luas areal yang terfasilitasi prasarana pertanian	Persentase luas sawah yang beririgasi	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	95,69	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran perkapita (Ribu. Rp)	14.621					
			Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat kemiskinan (%)	9,33 – 9,95	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	100	URUSAN SOSIAL
						Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Program pemberdayaan sosial	100	
						Terjaminnya perlindungan jaminan kesehatan dan pemenuhan standar layanan masyarakat	Indeks SPM Bidang Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
						Meningkatnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan/ penyedia kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Program hubungan industrial	50	URUSAN KETENAGAKERJAAN
2	layanan publik yang profesional dan bermartabat "Luwu Malebbi"	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)	58,2					
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	62,66	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	Seluruh OPD
						Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	80	URUSAN PEMERINTAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
						Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggara n pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT	100	
						Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD		20,28	
						Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik		80	
						Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah		100	
						Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	Program penyelenggara n pengawasan	90	URUSAN PENGAWASAN
							Persentase tindak lanjut temuan BPK		85	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
							Persentase tindak lanjut temuan BPKP		90	
							Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi		90	
							Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani		100	
						meningkatnya akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi	Persentase UMKM yang memperoleh akses lembaga keuangan	Program perekonomian dan pembangunan	75	URUSAN PEMERINTAHAN
						Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ		9	
						Meningkatnya Kualitas Penilaian kinerja ASN	Pesentase pegawai dengan SKP Bernilai baik	Program kepegawaian daerah	100	URUSAN KEPEGAWAIAN
						Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		13,92	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
						Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		10,45	
			meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	81,92	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase keselarasan nomenklatur dan anggaran antara program RPJMD dengan RKPD	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	URUSAN PERENCA NAAN
							Persentase Perangkat Daerah dengan predikat kinerja program "Sangat Tinggi"		100	
						meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran	Program pengelolaan keuangan daerah	85	URUSAN KEUANGA N
						meningkatnya pendapatan daerah	Presentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan	Program pengelolaan pendapatan daerah	100	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
			Terwujudnya pemerintahan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	3,9	Terintegrasinya aplikasi daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Program pengelolaan aplikasi informatika	28,07	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik yang disampaikan, termasuk keakuratan, relevansi, dan kecepatan informasi.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	83,1	
							Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		90 - 100	
						Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program pendaftaran penduduk	98,95	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		35	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)	50,12	Meningkatnya jumlah kelitbangan daerah yang mendukung kebijakan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	100	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						meningkatnya kualitas riset dan ekosistem inovasi	Persentase inovasi daerah yang memiliki kematangan >75 dalam IID pada tahun pelaporan	Program riset dan inovasi daerah	100	
						meningkatnya kualitas aparatur sipil negara	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	Program pengembangan sumber daya manusia	20,45	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	1,91	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat berkat Aparatur yang Berkompeten serta Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Daerah	Persentase capaian SPM bidang pelayananTrant ibum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
						meningkatnya kualitas penanganan penyelesaian konflik daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	80	URUSAN KESBANG POL
3	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	75,02 – 76,09					
			Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	82,35	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Program pengelolaan pendidikan	100	URUSAN PENDIDIKAN
							Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)		100	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
							Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		100	
						meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal untuk penguatan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program pengembangan kurikulum	100	
						meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program pendidik dan tenaga pendidik	100	
						meningkatnya pembinaan dan kualitas layanan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang ber Standar Nasional Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	40,23	
			meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	84,11	Terjaminnya perlindungan jaminan kesehatan dan pemenuhan standar layanan masyarakat	Indeks SPM	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	URUSAN KESEHATAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
						Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Persentase lembaga/organisasi yang memperoleh sosialisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	
						Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	81,5	
			Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, kualitas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan keluarga (Angka)	73,6	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase perempuan kepala keluarga yang diberdayakan	Program peningkatan kualitas keluarga	87	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	60,34	
						Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (TFR)	Program pengendalian penduduk	2,2	Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
				Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	60,83	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	91	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
						meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga nasional dan internasional	Program pengembangan daya saing keolahragaan	86,5	
			meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks kerukunan umat beragama (Angka)	75,06	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD	Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	20,28	Urusan Pemerintahan
						Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik		80	
						Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah		100	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
						Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	Program pengembangan kebudayaan	91,30	URUSAN KEBUDAY AAN
4	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan		Indeks ekonomi hijau (Angka)	51,41					
				indeks ekonomi biru (Angka)	122,82					
			Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	7,8	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan produksi peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4,2	Urusan Pertanian
							Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura		5	
							Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan		4,2	
							Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman pangan		5,5	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
			Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP) (Angka)	104,3	meningkatnya kualitas layanan penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Program penyuluhan pertanian	34,22	Urusan Perikanan
				Produktivitas perikanan (Rp/Jiwa)	11,05	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	1,97	
						Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	3,22	
				Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Angka)	111,8	Meningkatnya pemanfaatan hasil perikanan oleh masyarakat	angka konsumsi ikan	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	59,70	
			Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan pangan (Angka)	83,61	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Energi	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.250	Urusan Ketahanan Pangan
						Terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Rasio Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten		59	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
5	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Angka)	3,02					
			Meningkatnya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas infrastruktur (%)	15,14	Meningkatnya kondisi jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraa n Jalan	34,17	Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
						Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat pelayanan lalu lintas (V/C)	Program penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	0,51	Urusan Perhubung an
			Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	10,85	Meningkatnya kondisi irigasi dalam kondisi baik	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Program pengelolaan sumber daya air	71,89	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
				Akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	34	Tersedianya akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kot a	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	81,93	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman
				Meningkatnya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan	8,9	Meningkatnya layanan drainase perkotaan/saluran pembuangan air	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	0,8065	
						Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	9,92	
						meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Program kawasan permukiman	5,02	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
						Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100	Urusan Pertanahan
6	Desa mandiri	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks desa (Angka)	75,38					
			Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri (%)	24,15	Meningkatnya status legalitas Bumdes	Persentase Bumdes yang dikelola dengan baik	Program administrasi pemerintahan desa	30	Urusan pemberdayaan dan masyarakat desa
						Tercapainya SDGs Desa	Indeks SDGs Desa		10	
						Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	58	
7	Lingkungan yang sehat dan tangguh	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	25,92					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
	bencana "Luwu Lestari"		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (Angka)	129,28	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana	100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		100	
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	
						terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program pengembangan perumahan	100	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman
							persentase warga negara yang terkena relokasi akibat pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan		100	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
							rumah yang layak huni			
						meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan , penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100	Urusan Pemadam kebakaran
							Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit		30,46	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82.33 – 83,60	meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Program penanganan bencana	100	Urusan Sosial
						Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	85	Urusan lingkungan hidup

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	URUSAN
				(IKLHD) (Angka)		Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Program pengelolaan persampahan	100	Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	5,86	
						Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	3,19	

Prioritas Pembangunan tahun 2027 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah, sinkronisasi permasalahan terhadap prioritas Pembangunan tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Hubungan Prioritas Pembangunan dengan
Permasalahan dan Isu Strategis

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Tingkat Kesejahteraan yang masih Rendah dan Belum Merata	Hilirasi dan Pemerataan Pendapatan	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"
2	Pemanfaatan Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Masih Belum Optimal	Potensi dan Peluang Investasi Daerah	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"
3	Peran Desa Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal Belum Berjalan Secara Optimal	Perkembangan Teknologi dan Transformasi Digital	Desa mandiri
4	Tingkat Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Rendah	Bonus Demografi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing
5	Tata Kelola dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Belum Optimal	Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal Daerah Pembentukan Daerah Otonomi Baru	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"
6	Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wulayah yang Belum Merata	Konektifitas dan Kesenjangan Antar Wilayah Wajah Perkotaan dan Daya Saing Daerah	Infrastruktur merata dan berkelanjutan
7	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana Yang Rendah	Pemulihan Pasca Bencana dan Resiko Bencana Yang Masih Tinggi	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"

4.2.3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2027

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari perencanaan pembangunan agar lebih optimal dalam mencapai sasaran pembangunan. Prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Sedangkan arah kebijakan menjadi pedoman untuk mengoperasionalisasikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

strategi yang dipilih agar lebih fokus terhadap capaian yang diinginkan. Disamping itu arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program/kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Adapun rumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Luwu untuk tahun 2027 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.13
Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten Luwu tahun 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
T1-S1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Meningkatkan efisiensi distribusi produk unggulan serta penguatan pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, disertai penguatan kapasitas dan pengawasan kelembagaan koperasi	1	peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui Pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih,
				2	peningkatan sarana dan prasarana industri kecil menengah,
				3	peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, melibatkan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan,
				4	peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
				5	meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana objek wisata berbasis agro-ekologi, Fasilitasi penyusunan Rippow destinasi wisata, serta Meningkatkan pemasaran objek wisata prioritas di Kabupaten Luwu melalui promosi terpadu dan pemanfaatan teknologi digital
T1-S2		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri	1	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja formal melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu, pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,
				2	penguatan kerja sama dengan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi, fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri;
				3	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
T1-S3		Berkembangnya hilirisasi sumber daya unggulan	Meningkatkan nilai tambah perekonomian melalui hilirisasi sumber daya alam serta penguatan investasi di sektor industri pengolahan, energi, dan pertambangan	1	Mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi Daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan;
				2	Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao,
				3	peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor;
				4	pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha,
				5	peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
T2-S4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat dengan penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, jaminan kesehatan, perlindungan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	1	Penurunan tingkat kemiskinan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi di seluruh masyarakat kabupaten Luwu;
				2	strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, Monitoring dan Evaluasi terhadap penerima manfaat bantuan sosial, pemberian bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pemberian pakaian seragam + sepatu dan tas bagi siswa SD dan SMP;
				3	strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja;
				4	strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan layanan infrastruktur dasar diantaranya rumah, air minum layak, sanitasi layak, layanan kesehatan dan layanan pendidikan di Desa-deserta tertinggal;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
				5	serta pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi landasan untuk memastikan program-program yang telah dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi Masyarakat.
T3-S5	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel, serta mendukung implementasi pembangunan daerah melalui penyusunan regulasi yang efektif	1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan birokrasi melalui penguatan peran APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan, program kegiatan kepala daerah, kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi;
				2	penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas dan kinerja aparatur sipil negara;
				3	penyusunan produk hukum yang mendukung perencanaan dan program kerja pemerintah daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
T3-S6		meningkatkan Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan pendapatan, serta diversifikasi sumber pendapatan, disertai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan peran Perseroda.	1	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi;
				2	Percepatan penataan dan perbaikan serta mengoptimalkan fungsi aset pemerintah Kabupaten Luwu;
				3	peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak seperti pengembangan usaha baru berbasis aset daerah, retribusi jasa lingkungan, pemanfaatan pariwisata, Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM), potensi lokal lainnya, serta peningkatan iklim investasi;
				4	pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Intensifikasi Pajak dan Retribusi;
				5	serta pembentukan Perusahaan Perseroan daerah untuk berkontribusi pada kemandirian fiscal daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
T3-S7		Terwujudnya pemerintahan yang adaptif dan inovatif	Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan riset., pengembangan smart government dan digitalisasi layanan publik, penguatan infrastruktur TIK dan ekosistem inovasi, serta penyediaan kajian kelayakan dan perencanaan yang komprehensif dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru	1	pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kependudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan internet pada ruang publik, pendidikan, dan kesehatan;
				2	peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan;
				3	peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal;
				4	Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
T3-S8		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif dan kolaboratif, serta pengendalian dan penegakan hukum/Perda, termasuk implementasi tata ruang daerah	1	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum, penanganan konflik;
				2	penguatan ideologi pancasila dan wawasan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda
T4-S9	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun dengan sarana prasarana memadai; peningkatan kualitas tenaga pendidik; penguatan pendidikan digital berbasis TIK/IoT; serta pengembangan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi	1	Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan;
				2	pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan;
				3	penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal;
				4	memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar;
				5	peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
T4-S10				6	pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan sekolah;
				7	serta penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
		meningkatnya kualitas layanan kesehatan	pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu; pembudayaan hidup sehat dengan sarana prasarana memadai; peningkatan kualitas, pemerataan, dan insentif tenaga kesehatan; serta perluasan layanan promotif, preventif, kuratif, dan	1	Mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Peningkatan status Puskesmas, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat,
				2	pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
T4-S11			rehabilitatif di seluruh wilayah	3	Penguatan layanan kesehatan berbasis E-KTP atau Universal health Coverage untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien,
				4	penguatan intervensi pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi agar tepat sasaran serta upaya Promotif dan Preventif yang tepat sasaran
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, kualitas pemuda dan masyarakat Inklusif	Meningkatkan kompetensi dan daya saing pemuda, penguatan sumber daya dan kelembagaan olahraga; integrasi GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) pada seluruh sektor Pembangunan, serta menguatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak dan Perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.	1	Membangun keluarga yang berkualitas melalui penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, dan integrasi karakter;
				2	peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
				3	peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
				4	peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, pengembangan sarana dan prasarana olahraga bestandar nasional yang ramah disabilitas melalui perencanaan pembangunan stadion dan sirkuit,
				5	peningkatan partisipasi penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga
T4-S12		meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	membangun kehidupan beragama yang harmonis dan bermanfaat, serta pelestarian kebudayaan lokal dan penguatan karakter masyarakat melalui warisan budaya dan seni tradisional.	1	Menjalankan nilai-nilai spiritual dalam Masyarakat dengan Penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama;.
				2	peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
				3	peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, melibatkan tokoh agama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
				4	Menanamkan nilai-nilai luhur budaya local dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter Masyarakat melalui pelestarian warisan budaya dan seni tradisional
T5-S13	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan	Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan, penerapan teknologi ramah lingkungan, pengembangan rantai pasok yang efisien, pemberdayaan petani dan nelayan secara inklusif, serta Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi	1	Pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bibit-bibit unggul sektor pertanian;
				2	Percepatan pembangunan irigasi tersier, embung, Dam Parit, Pintu air, jalan usaha tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian;
				3	Pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan;
				4	pengembangan kelembagaan petani melalui kegiatan tudang sipulung, pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial;
				5	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian;
				6	Mendorong pemanfaatan pupuk organik dan pengawasan pendistribusian pupuk;
				7	Pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
			pangan bergizi seimbang	8	Mendorong optimalisasi lahan dalam pencapaian IP 200-300;
				9	Mendorong pemanfaatan teknologi reproduksi ternak melalui inseminasi buatan;
				10	perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani
T5-S14		Berkembangnya kegiatan usaha perikanan		1	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak;
				2	perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan;
				3	peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap pada seluruh wilayah pesisir teluk bone;
				4	Pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan; dan penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kawasan pesisir teluk bone.
T5-S15		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan		1	Menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
				2	penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan Cadangan pangan pemerintah; serta penyusunan peta Kawasan pangan
T6-S16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata untuk mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar masyarakat, serta daya saing daerah	1	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak sedang menjadi kondisi mantap, Pembangunan dan rehabilitasi jembatan;
				2	Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;.
				3	Peningkatan penerangan jalan pada setiap daerah tertinggal
T6-S17		Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat		1	Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Luwu;)
				2	penyediaan instalasi air minum aman dengan mengutamakan Lokasi 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan pendekatan berkelanjutan;
				3	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS (City Wide Inclusive Sanitation)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
T6-S18		Meningkatnya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan		1	Perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu;
				2	Percepatan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pendekatan yang lebih holistic;
				3	peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak;
				4	percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan;
				5	Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
T7-S19	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan peran desa secara inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa yang adaptif	1	Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif;
				2	Peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
				3	Pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan;
				4	Pengembangan produk unggulan desa melalui pemanfaatan bumdes dan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
				5	Peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah desa
T8-S20	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Menurunnya risiko bencana	Penguatan ketangguhan, mitigasi, dan manajemen risiko bencana serta integrasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam seluruh sektor pembangunan	1	Pengelolaan risiko bencana melalui ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah;
				2	peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana;
				3	Peningkatan Upaya pencegahan dan mitigasi bencana;
				4	peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana;
				5	pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
				6	peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	NO	STRATEGI
T8-S21		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan upaya pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta pengelolaan limbah dan sampah berkelanjutan	1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang;
				2	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
				3	Pengembangan kawasan konservasi ex-situ; Mengembangkan dan menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim;
				4	Penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon; Perubahan perilaku dan penguatan tata Kelola persampahan;
				5	peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah perkotaan

4.3. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kabupaten Luwu tahun 2027.

Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027 menjadi wujud nyata keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat. Hal ini menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui penyelarasan arah kebijakan dengan RKP Nasional Tahun 2027.

Keselarasan dan konsistensi rencana Pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2027 diwujudkan dalam 1) keselarasan outcome prioritas mendukung asta cita hasil kesepakatan desk urusan rakortekrenbang tahun 2026 rencana kerja pemerintah daerah kab. Luwu tahun 2027; 2) Keselarasan subkegiatan dengan PRO-SN dan tematik Pembangunan 2027; 3) Keselarasan program, kegiatan dan subkegiatan dengan Kegiatan prioritas Utama (KPU) tahun 2027.

4.3.1. Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2027 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2027

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, program pembangunan nasional harus terstruktur dalam program pembangunan daerah. salah satu instrumen utama dalam menjamin keteroaduan tersebut adalah hasil kesepakatan yang dirumuskan dalam rapat teknis perencanaan pembangunan tahun 2027. Konsistensi yang tertuang memberikan jaminan akuntabilitas bahwa target nasional dan daerah bergerak simultan.

Hasil kesepakatan Rakortekrenbang mencerminkan keselarasan dukungan terhadap asta cita dan outcome prioritas dalam bentuk nyata berupa subkegiatan yang terbagi berdasarkan : (1). bidang urusan pemerintah daerah; (2) Program Strategis Nasional (Pro SN) dan (3) Tematik Pembangunan. Keselarasan Kesepakatan Rakortekrenbang dengan RKPD Tahun 2027 adalah kepatuhan asas

dan perwujudan Pembangunan yang sinergis, melalui komitmen yang dituangkan matriks sandingan berikut.

Tabel 4.14.
Keselerasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita
Hasil Kesepakatan Desk Urusan Rakortekrenbang Tahun 2026
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Luwu Tahun 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal									
					2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	15	6.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Telah terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, namun perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait penurunan jumlah target yang disepakati daA, agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daA,, dilengkapi dengan target daA,, dukungan pendanaan daA,am Bab V Rencana Kerja daA, Pendanaan KABKOTA (admin7317) : Adanya penurunan target terhadap Kegiatan usaha yang diawasi, karena terbatasnya anggaran fiskal daerah.
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	2	20.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Adanya kenaikan target dari 2 kegiatan usaha menjadi 20 yang akan difasilitasi terkait masalah penanaman modal SKPD : APIP :
2.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar									

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Domestik dan Global									
					3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
							3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	120		PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daA, dilengkapi dengan target daA, dukungan pendanaan daA,am Bab V Rencana Kerja daA, Pendanaan KABKOTA (admin7317) : Perangkat daerah tidak melakukan pengisian target pada subkegiatanPemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan. Tetapi output dari kegiatan tersebut merupakan 12 Laporan.
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	5	5.00	Target pada subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan telah sesuai dengan hasil rakortekrenbang
3.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional									
					3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
							3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1		PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target kesepakatan belum terakomodasi dalam RAKPD Tahun 2027, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan KABKOTA (admin7317) : Kabupaten Luwu sudah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, maka dari itu tidak menganggarkan subkegiatan ini.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	7	1.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ„ dilengkapi dengan target daÄ„ dukungan pendanaan daÄ„am Bab V Rencana Kerja daÄ„, Pendanaan KABKOTA (admin7317) : Target pada subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat adalah 1 dokumen dalam 1 tahun, karena dokumen akhir tahun, sedangkan 7 yang sesuai dengan kesepakatan adalah laporan perbulan. SKPD : APIP :
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	60	1.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄam Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA (admin7317) : adanya penyesuaian target pada subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dari 60 dokumen menjadi 1 dokumen, hal ini dikarenakan dalam satu tahun hanya 1 (satu) dokumen yang dikeluarkan pada akhir tahun.
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha	Dokumen	20	25.00	Terdapat perubahan target, karena terdapat 25 kegiatan usaha yang akan difasilitasi dalam satu tahun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Sistem Online Single Submission	Menengah-Tinggi dan Tinggi,				
4.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang									
					1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
							1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen			Sudah terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan target 1 Dokumen

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus			Sudah terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan target 1 Kasus
				Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan									
					1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
							1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM		7.75	pada penginputan SIPD Pusdatin telah dilakukan pengisian target pada subkegiatan ini sepanjang 7,75 KM.
							1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM		1.00	Akan dilakukan perubahan pada inputan renstra SIPD Bangda sesuai dengan inputan target RKPD pada SIPD Pusdatin tahun anggaran 2027 dengan target subkegiatan sepanjang 1 Km
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen		1.00	pada subkegiatan ini telah diakomodir pada RKPD dengan target 1 (Satu) Dokumen yaitu RISPAM
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		135.00	Pada subkegiatan ini telah diakomodir pada RKPD dengan target 135 Sambungan Rumah (SR)
					1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							
							1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang			subkegiatan ini sudah diakomodir kedalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kab. Luwu dengan target 30 orang
							1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit		1.00	Subkegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS telah di akomodir kedalama RKPD dengan target 1 unit Penyediaan Sarana pada TPA Tallangbulawang
					1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit			Subkegiatan ini sudah diakomodir kedalam RKPD dengan target 2 unit yang akan dilakukan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
							1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Subkegiatan ini tidak terakomodir pada tahun 2027 karena sudah di akomodir penyusunan dokumen RISPALD Kabupaten Luwu Tahun 2026-2046 pada APBD TA. 2026 SKPD : APIP :
					1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
							1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM		7.11	Subkegiatan ini sudah diakomodir kedalam RKPD dengan target 7,11 Km yang akan dilakukan rehabilitasi jalan
							1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM		27.52	Subkegiatan ini sudah diakomodir kedalam RKPD dengan target 27,52 Km yang akan dilakukan rekonstruksi jalan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
							1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan			subkegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota telah diakomodir kedalam RKPD dengan target 350 Paket pekerjaan pada tahun anggaran 2027
							1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga			Subkegiatan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi telah diakomodir kedalam RKPD Tahun 2027 dengan target sebanyak 1 lembaga
5.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta										

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									
					2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
							2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	220	250.00	subkegiatan ini terdapat penyesuaian target dari 200 unit menjadi 250 unitu perlengkapan jalan yang disediakan, hal ini dikarenakan merupakan prioritas daerah.
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	3.00	subkegiatan ini dilakukan penyesuaian target dari 1 menjadi 3 unit yang akan direhabilitasi pada terminal tpe C Kabupaten Luwu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
							2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0		Kabupaten Luwu tidak memiliki pelabuhan sungai dan danau, maka dari itu subkegiatan ini tidak dianggarkan
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	0		Belum ada Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia
6.	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Meningkatnya ketahanan pangan									
					2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	210	150.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai keepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA (admin7317) : Akibat penurunan fiskal daerah, dilakukan penyesuaian target RKPD untuk peserta sosialisasi peningkatan ketahanan pangan keluarga, dari yang semula 210 keluarga menjadi 150 keluarga
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : subkegiatan ini sudah sesuai dengan hasil keepakatan pada rakortekrenbang tahun 2027. SKPD : APIP :
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang
7.	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan									
					3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	35	5.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄam Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : Karena terdapat pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan tersebut, target yang telah disepakati pada Rakortekrenbang belum dapat terakomodasi, sehingga target tahun 2027 disesuaikan menjadi 5 dari 35 unit.
							3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	0		Aktivitas pada Subkegiatan ini sudah diakomodir kedalam subkegiatan penyediaan data dan informasi pembudidaya ikan dalam satu kabupaten/kota, dimana sudah mencakup pengelolaan perikanan budidaya secara keseluruhan
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
							3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	150	5.00	Pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan ini menyebabkan target yang disepakati dalam Rakortekrenbang belum terakomodasi. Akibatnya, target tahun 2027 yang terrealisasi hanya 5 dari 150 pelaku usaha yang diawasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	40	5.00	Pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan ini menyebabkan target yang disepakati dalam Rakortekrenbang belum terakomodasi. Akibatnya, target tahun 2027 yang terealisasi hanya 5 dari 40 pelaku usaha yang diawasi
8.	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Meningkatnya Produksi Pertanian									
					3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
							3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	12.00	Meskipun target yang disepakati semula sebanyak 1 Laporan. Namun dalam jangka 1 tahun, laporan yang akan disusun sebanyak 12 laporan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	50	20.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : Target yang disepakati pada Rakortekrenbang belum terakomodasi akibat adanya pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan tersebut. Oleh karena itu, target tahun 2027 disesuaikan menjadi 20 dari 50 ton yang semula disepakati.
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
							3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang
							3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9.	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.										
				Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah									
					2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
							2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang
							2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	0	6.00	Telah diakomodir kedalam RKPD dan renja dengan target sebanyak 6 laporan yang disusun tahun 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10.	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Lingkungan Hidup Berkualitas									
					2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
							2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	1	3.00	Berdasarkan hasil evaluasi, terdpat 3 lokasi yang akan dipantau untuk indeks kualitas lingkungan hidup
							2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang
					2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN							

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
							2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	5	1.00	belum ada Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia
							2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	12	12.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang
11.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.										
				Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan									
					1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
							1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	5	5.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	0		Telah diakomodir pada RKPD dengan target 1 unit rumah baru layak huni
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	2	3.00	Terdapat 3 lokasi yang akan diperbaiki pada tahun 2027.
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	22	5.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daA, dilengkapi dengan target daA, dukungan pendanaan daA,am Bab V Rencana Kerja daA, Pendanaan KABKOTA : Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyediaan PSU hanya dapat diakomodasi untuk 5 perumahan, sehingga targetnya belum memenuhi kesepakatan Rakortekrenbang.
12.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.										
				Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor									
					3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	0		Subkegiatan ini tidak dialokasikan dalam anggaran karena peruntukannya khusus bagi transmigran baru
							3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	0		Subkegiatan ini tidak dialokasikan dalam anggaran karena peruntukannya khusus bagi transmigran baru
13.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial									
					1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	7	7.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang
							1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	0		Telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target 10 orang
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
							1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	155	203.00	Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah penerima manfaat yang mendapatkan bantuan disesuaikan menjadi 203 orang dari target awal sebanyak 155 orang.
							1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	60.000	12.00	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan tersebut berbentuk laporan kompilasi, sehingga target yang diakomodasi disesuaikan menjadi 12 usulan
14.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan									
					2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
							2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	96	64.00	Target yang disepakati pada Rakortekrenbang belum terakomodasi akibat adanya pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan tersebut. Oleh karena itu, target tahun 2027 disesuaikan menjadi 64 dari 96 orang yang semula disepakati.
					2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
							2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	4	4.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	19434	16434.00	Berdasarkan hasil evaluasi, hanya 16.434 orang yang akan diberikan bantuan jaminan sosial ketenagkerjaan. Oleh karena itu, alokasi tersebut belum dapat disesuaikan dengan hasil Rakortekrenbang.
15.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa									
					2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
							2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	6	20.00	terdapat 207 desa di Kabupaten Luwu, dan hanya 20 irang yang akan difasilitasi terkait kawasan pedesaan.
							2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabu	Dokumen	0		subkegiatan ini tidak dianggarkan karena dalam struktur perangkat desa di Kabupaten Luwu, tidak ada jabatan kepala wilayah untuk kampung.
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
							2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	0	414.00	Telah diakomodir kedalam RKPD dengan target 414 aparatur yang dibina
							2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	25	15.00	Karena terdapat pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan tersebut, target yang telah disepakati pada Rakortekrenbang belum dapat terakomodasi, sehingga target tahun 2027 disesuaikan menjadi 15 dari 25 dokumen
16.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.										

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)									
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
							2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	70	75.00	
							2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	%	25	40.00	
17.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).										
				Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah									
					2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	268.238	0.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : Subkegiatan ini telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target sebanyak 268.238 orang
							2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Dokumen	4	0.00	telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target 1 dokumen
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
							2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Titik	77	57.00	Perangkat daerah dan UPTD di kab. Luwu hanya 57, maka dari itu target pada rakortekrenbang tidak sepenuhnya diakomodir.
							2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	3	2.00	hanya 2 layanan yang ada di Kabupaten Luwu yaitu Kec. Belopa dan Kec. Walenrang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional									
					8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
							8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	100	30.00	Pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan ini menyebabkan target yang disepakati dalam Rakortekrenbang belum terakomodasi. Akibatnya, target tahun 2027 yang terrealisasi hanya 30 dari 100 orang yang direncanakan
							8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Orang	150	100.00	Pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan ini menyebabkan target yang disepakati dalam Rakortekrenbang belum terakomodasi. Akibatnya, target tahun 2027 yang terrealisasi hanya 100 dari 150 orang yang direncanakan
					8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
							8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	Orang	75	0.00	Aktivitas pada subkegiatan ini dialihkan dan dilaksanakan pada subkegiatan dengan kode rekening 0004 karena subkegiatan asal tidak diakomodasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Penanganan Konflik di Daerah					
							8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	100	60.00	target yang telah disepakati tidak sepenuhnya diakomodir karena kegiatan ini hanya dilaksanakan 2 kali dengan jumlah peserta sebanyak 30 per kegiatan.
19.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah									

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
							2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	0		Telah diakomodir kedalam RKPD dengan target 2 dokumen
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	0	2.00	Telah diakomodir kedalam RKPD dengan target 2 berita acara
20.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM									
					2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	113		PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄam Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : Subkegiatan ini tidak diakomodasi kedalam RKPD 2027, namun aktivitas akan dilaksanakan pada subkegiatan yang termasyk SKPD : APIP :
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
							2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Orang	30	30.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang
							2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Kegiatan	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang
21.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di										

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional									
					3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
							3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1		Telah diakomodir kedalam RKPD dengan target 1 kegiatan
							3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
							3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0		Subkegiatan ini tidak diakomodir kedalam RKPD Kabupaten Luwu, karena Kabupaten Luwu belum mempunyai kota kreatif
							3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	30		Subkegiatan ini telah diakomodir kedalam RKPD dengan 1 Kegiatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
22.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)									
					2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	50		Telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target sebanyak 50 orang
							2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen	1	1.00	
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek	2		Telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target 2 objek
							2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	1		Telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target 1 objek
23.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan									
					1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
							1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	350	275.00	Karena terdapat pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan tersebut, target yang telah disepakati pada Rakortekrenbang belum dapat terakomodasi, sehingga target tahun 2027 disesuaikan menjadi 275 dari 350 orang
							1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	350	240.00	Karena terdapat pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan tersebut, target yang telah disepakati pada Rakortekrenbang belum dapat terakomodasi, sehingga target tahun 2027 disesuaikan menjadi 240 dari 350 orang
							1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	700	700.00	Sesuai Kesepakatan rakortekrenbang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	50	50.00	Sesuai Kesepakatan rakortekrenbang
24.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Kesehatan Untuk Semua									
					1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
							1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	6	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	1	2.00	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	3.00	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
							1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	22		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
25.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.										
				Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya									
					2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
							2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	30	30.00	
							2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	15		Telah diakomdir kedalam RKPD 2027 dengan tarteg 15 lembaga

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
							2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Orang	15	50.00	
							2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	3	3.00	Telah sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang
26.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital									
					2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
							2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4	1.00	target yang disepakati tidak dapat diakomodir, karena hanya 1 Laporan yang akan disusun selama tahun 2027.

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	0	6.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : subkegiatan ini telah diakomodir pada RKPD 2027 dengan target 6 laporan yang akan disusun SKPD : APIP :
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
							2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d	Laporan	4		PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : aktivitas dalam subkegiatan ini sudah termuat pada subkegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk SKPD : APIP :
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	4	6.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : pada subkegiatan ini terdapat 6 laporan yang akan disusun pada tahun 2027. SKPD : APIP :
27.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan										

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			penyanggah disabilitas.										
				Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas									
					2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
							2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	0	1.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : subkegiatan ini telah diakomodir pada RKPD 2027 dengan target 1 kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD : APIP :
							2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Telah sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang SKPD : APIP :
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
							2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Laporan / Dokumen	0	1.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : subkegiatan ini telah diakomodir pada RKPD 2027 dengan target 1 laporan yang akan disusun SKPD : APIP :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	0	1.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : subkegiatan ini telah diakomodir pada RKPD 2027 dengan target 1 laporan yang akan disusun SKPD : APIP :
28.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga									
					2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
							2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	40	44.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah peserta yang akan ditingkatkan kapasitasnya disesuaikan menjadi 44 orang dari target awal sebanyak 40 orang SKPD : APIP :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	20	20.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekembang SKPD : APIP :
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
							2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	45	45.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekembang SKPD : APIP :
							2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	Orang	70	0.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : subkegiatan ini telah diakomodir dengan anggaran sebesar 124 juta untuk 70 orang olahragawan di kabupaten luwu tahun 2027 SKPD : APIP :
29.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan										

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat									
					2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
							2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	50	50.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Telah sesuai dengan rakortekrenbang SKPD : APIP :
							2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	35	5.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan tersebut menyebabkan tidak terakomodasinya target Rakortekrenbang, sehingga target tahun 2027 menyesuaikan menjadi 5 dari 35 perpustakaan yang telah disepakati SKPD : APIP :
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	2	7.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : tahun 2027 terdapat 7 orang yang berperan dalam penyimpanan dan perawatan naskah kuno, hal ini dikarenakan tahun 2026 terdpat 7 org yang dibina untuk perawatan naskah kuno SKPD : APIP :
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	3	3.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Telah sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang SKPD : APIP :
30.	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
							1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	700	80.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daA, dilengkapi dengan target daA, dukungan pendanaan daA,am Bab V Rencana Kerja daA, Pendanaan KABKOTA (admin7317) : belum terakomodasinya target yang disepakati pada rakortekrenbang, karena terjadi pengurangan alokasi anggaran pada subkegiatan tersebut, maka dari itu target tahun 2027 sebanyak 80 orang SKPD : APIP :
							1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	6	1.00	PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : subkegiatan ini tidak sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang. karena adanya efisiensi anggaran, maka dari itu hanya 1 kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2027 SKPD : APIP :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	200	90.00	subkegiatan ini tidak sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang. karena adanya efisiensi anggaran, maka dari itu hanya 90 orang yang akan mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana.
							1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	2	1.00	subkegiatan ini tidak sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang. karena berdasarkan hasil evaluasi hanya 1 kawasan yang akan dibina.
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
					1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
							1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12.00	Telah sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
							1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12		Pada Subkegiatan telah disesuaikan dengan penginputan pada SIPD Pusdatin dengan target 1 laporan pada tahun 2027. hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan, karena dalam 1 tahun hanya 1 laporan yang akan disusun.
							1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1		Pada Subkegiatan telah disesuaikan dengan penginputan pada SIPD Pusdatin dengan target 1 dokumen pada tahun 2027
31.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat										

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa									
					2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
							2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang
							2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	1	1.00	Telah sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang

Program Strategis Nasional (Pro SN) adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Keselarasan hasil rakortekrenbang dalam mendukung Program Strategis Nasional berupa program dan sub kegiatan terjabarkan dalam 5 Program Strategis Nasional (Pro SN) yang terdiri atas (1) Pengentasan Kemiskinan; (2) Ketahanan Pangan, (3). Kesehatan untuk Semua; (4) Perluasan Akses Pendidikan; dan (5) Pertumbuhan Ekonomi. Adapun dukungan program dan sub kegiatan pada masing-masing Pro SN tersebut selengkapnya pada matriks berikut.

Tabel 4.15.
Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Terhadap Prioritas Strategis Nasional dan Tematik Pembangunan Tahun 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	DIGITALISASI PEMBELAJARAN									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	230	230.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	10	10.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	103	240.00	Hasil evaluasi capaian tahun 2025 (sebanyak 110 orang) menjadi dasar penyesuaian target yang diakomodasi menjadi 240 orang, sehingga melebihi hasil kesepakatan awal
2.	EKONOMI SYARIAH									
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	7.00	Salah satu dari 7 laporan yang dikeluarkan oleh TPAKD memiliki output terkait ekonomi syariah
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha	30	30.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	12	12.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan	Unit Usaha	50	50.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			USAHA KECIL, DAN MENENGAH			Standardisasi Produk				
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
3.	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN									
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)								
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0		Kabupaten Luwu Tidak memiliki jaringan irigasi rawa kewenangan Kabupaten.
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0		Tidak terdapat jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara oleh Kabupaten Luwu
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	12		Meskipun telah diakomodasi dalam RKPD 2027, dokumen yang disusun hanya berjumlah 1 dokumen. Oleh karena itu, hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	7.37	7.37	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
4.	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)									
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	12	12.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
5.	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH									
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih								

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	20	15.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : Karena adanya pengurangan alokasi anggaran, maka yang direncanakan pada tahun 2027 tidak sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang yakni 15 unit jumlah sarana dan prasarana disediakan.
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	0	10.00	Subkegiatan ini telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target 10 kelompok nelayan
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	50.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : Alokasi anggaran pada subkegiatan ini mengalami pengurangan. Oleh karena itu, target awal tidak dapat diakomodasi sepenuhnya, sehingga peserta pengembangan kapasitas nelayan disesuaikan menjadi 50 orang
6.	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH									

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih								
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha		25.00	Subkegiatan ini telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target 25 Unit usaha
7.	MAKAN BERGIZI GRATIS									
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	200	275.00	Hasil evaluasi capaian tahun 2025 (sebanyak 250) menjadi dasar penyesuaian target yang diakomodasi menjadi 275 orang, sehingga melebihi hasil kesepakatan awal

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	0	2.00	Subkegiatan ini telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target 2 Unit usaha
8.	MASYARAKAT ADAT									
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Dokumen	30	40.00	Karena terdapat penambahan kegiatan pada Kelembagaan Masyarakat pada tahun 2026, target dokumen yang dihasilkan disesuaikan dari 30 menjadi 40 dokumen, sehingga melampaui kesepakatan awal

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	8.00	Berdasarkan hasil survei, masih terdapat 8 masyarakat adat yang belum memiliki legalitas. Maka dari itu kesepakatan target awal melebihi target yang diakomodir pada RKPD 2027
9.	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)									
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)								
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	39.000	0.00	PROVINSI (Tim 1 Bab 4 @ Bappelitbangda Prov Sul Sel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ, am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1.00	Telah diakomdir pada RKPD 2027 dengan target sebanyak 1 dokumen
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	1		PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Subkegiatan ini tidak dianggarkan, karena LOKPRI DAK terkait tematik swasembada pangan tidak terakomodir di Kabupaten Luwu SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	unit	2		PROVINSI : KABKOTA (admin7317) : Subkegiatan ini tidak dilaksanakan, karena Lokpri Tematik penyediaan infrastuktur tidak tersedia di Kabupaten Luwu SKPD : APIP :
10.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM									

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	203	203.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	227		Telah diakomodir kedalam RKPD 2027, dan telah disesuaikan dengan kesepakatan rakortekrenbang
11.	PANGAN AKUATIK									
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik								

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	0		Kabupaten luwu tidak memproduksi garam
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	0	1.00	Telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target 1 unit
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	20	15.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : Karena adanya pengurangan alokasi anggaran, maka yang direncanakan pada tahun 2027 tidak sesuai dengan kesepakatan rakortekrenbang yakni 15 unit jumlah sarana dan prasarana disediakan.
12.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA									
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota								

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	2.00	Pengembangan rumah sakit di Kabupaten Luwu terdapat 2 unit, yakni dikelola oleh pemerintah daerah dan 1 unit dikelola oleh swasta
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	22		Telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target 30 orang
13.	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH									
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah								

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	20	10.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : Berdasarkan data di Kabupaten Luwu, bahwa hanya terdapat 10 unit rumah yang belum dibangun untuk korban bencana
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	300	300.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	10	10.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	179	35.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : dengan adanya pengurangan anggaran pada Kab. Luwu, maka dari itu hanya 35 unit rumah yang akan dibangun untuk tahun 2027
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	10	2.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : SKPD : APIP :
14.	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS									
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan	Laporan	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Penyakit Menular	Kesehatan Penyakit Menular				
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
15.	PENANGGULANGAN BENCANA									
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1		Dokumen RPB sudah dianggarkan tahun 2026
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	2	2.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	35	35.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	20	1.00	Target yang telah disepakati tidak dapat diakomodasi sepenuhnya akibat adanya pengurangan anggaran. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan menjadi hanya 1 kegiatan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0		Kabupaten Luwu telah menyusun dokumen KRB Tahun 2025-2029
16.	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING									
	Kesehatan untuk Semua	Stunting								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	210	150.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : hanya 150 yang dapat diakomodir pada tahun 2027. Melihat capaian tahun 2025 hanya 50 orang.
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	1-1,5	0	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : target yang telah disepakati yaitu 1-1,5 liter/detik telah diakomodir pada RKPD 2027 SKPD : APIP :
			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	0		Telah diakomodir pada RKPD 2027 dengan target 1 kegiatan
17.	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN									
	Ketahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian								

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	Unit	22	5.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : untuk subkegiatan ini hanya 5 unit yang dapat diakomodir, karena untuk penyuluh pertanian sudah dialihkan pada kementerian pertanian
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	Unit	22	1.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA :untuk subkegiatan ini hanya 1 unit yang dapat diakomodir, karena untuk penyuluh pertanian sudah dialihkan pada kementerian pertanian
18.	PENGARUSUTAMAAN GENDER									
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	44	44.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	206	240.00	Capaian tahun 2025 sebanyak 200 orang, maka dari itu target untuk 2027 dinaikkan menjadi 240 orang melakukan bimbingan teknis
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	40	40.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Lembaga	67	67.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
19.	PENGENDALIAN INFLASI									
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen	laporan	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Konsumen di Kabupaten/Kota	dan Konsumen di Kabupaten/Kota				
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	120		Telah diakomodir kedala RKPD 2027 dengan target sebanyak 12 Laporan
20.	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)									
	Kesehatan untuk Semua	Penuntasan TBC								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7369	0.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, namun agar menjadi perhatian untuk diakomodasi karena terkait dengan highlight intervensi untuk Sulawesi Selatan. Selain itu perlu untuk memastikan subkegiatan tersebut termuat daÄ, dilengkapi dengan target daÄ, dukungan pendanaan daÄ,am Bab V Rencana Kerja daÄ, Pendanaan KABKOTA : Telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target sebanyak 10 orang SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan	Orang	200	203.00	capaian tahun 2025 sebanyak 200 orang, maka dari itu target untuk 2027

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				dinaikkan menjadi 203 orang yang menerima manfaat
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1049	0	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, namun agar menjadi perhatian untuk diakomodasi karena terkait dengan highlight intervensi untuk Sulawesi Selatan. Selain itu perlu untuk memastikan subkegiatan tersebut termuat daA,, dilengkapi dengan target daA,, dukungan pendanaan daA,,am Bab V Rencana Kerja daA,, Pendanaan KABKOTA : Telah diakomodir kedalam RKPD 2027 dengan target sebanyak 1.710 orang yang akan dilayani. SKPD : APIP :
21.	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah								

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	130.00	Sebanyak 130 kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2027, sehingga output yang dihasilkan adalah 130 dokumen
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
22.	PERLINDUNGAN ANAK									
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Orang	25	25.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Orang		50.00	Telah diakomodir pada RKPD 2027 dengan target 50 Orang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027**

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			DAN PERLINDUNGAN ANAK		layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.				
			5.01 PERENCANAAN	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	10	10.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang
23.	SEKOLAH RAKYAT									
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	744	12.00	PROVINSI (Tim1Bab4@BappelitbangdaProvSulSel) : Target belum terakomodasi sesuai kesepakatan Rakortekrenbang, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan terkait tidak tercantumnya target yang telah disepakati dan agar memastikan subkegiatan tersebut termuat daA, dilengkapi dengan target daA, dukungan pendanaan daA,am Bab V Rencana Kerja daA, Pendanaan KABKOTA : Hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan tersebut berbentuk laporan kompilasi, sehingga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										target yang diakomodasi disesuaikan menjadi 12 usulan
			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1	1.00	Telah sesuai dengan Kesepakatan Rakortekrenbang

Dalam struktur perencanaan Pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama (KPU) merupakan instrumen strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengawal pencapaian Prioritas Nasional (PN). KPU berfungsi sebagai komitmen operasional yang mengikat kelementerian/Lembaga teknis di pusat dengan pemerintah daerah. Agar KPU dapat terlaksana secara efektif di lapangan, Pemerintah daerah melakukan Keselarasan dalam konteks ini diwujudkan melalui dukungan konkret nomenklatur Program hingga Sub-Kegiatan yang direlevansikan langsung kedalam RKPD 2027. Adapun matriks keselarasan dukungan program sub kegiatan pemerintah Kabupaten Luwu terhadap Kegiatan Prioritas Utama tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16.
Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Subkegiatan Kabupaten Luwu
Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) tahun 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media	
		Penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
2	Prioritas Nasional 2	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
		Pembangunan pangan akuatik (<i>blue food</i>)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Penguatan Cadangan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Penganekaragamart Konsumsi Pangan		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Promosi Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		Penanganan Kerawanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
					Normalisasi/Restorasi Sungai	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		Industii Halal dan UMKM Halal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				dengan Para Pemangku Kepentingan		
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Akses Internet	
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Saopah serta PeEros€san Residu di TPA/ LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
		Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor pengelolaan limbah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
3	PRIORITAS NASIONAL 3	Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
					Pemeliharaan Rutin Jalan	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	
					Rehabilitasi Jalan	
					Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Rekonstruksi Jalan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
4	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekola	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
		Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan PendidikanSekola h Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Menengah Pertama		
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
		Pengerlbanan Anak Usia Dini Hotistik-Integratif (PAUD HI)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Layanan di Bidang Pendidikan	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
		Penguatan Pelatihan Vokasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
		Penurunan kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif dan lansia serta KB dan kespro	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
		Penuntasal TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
		Pengendalian penyakit menular lainnya	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan Penyakit	

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menular dan Tidak Menular	
		Pengendalian penyakit tidak menular dan pendekatan upaya kesehatan jiwa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
		Penyehatan lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Peningkatan ketangguhan keluarga	PROGRAMPEMBERDAYAAN DANPENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA(KS)	Pelaksanaan PembangunanKeluarga Melalui PembinaanKetahanan danKesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
		Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota	
		pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
		penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia	PROGRAM REHABILITASISOSIAL	Rehabilitasi Sosial DasarPenyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis diLuar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	
		pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
5	PRIORITAS NASIONAL 5	Pengembangan Hilirisasi Nikel	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
6	Prioritas Nasional 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data FakirMiskin Cakupan DaerahKabupate n/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan ekonomi lokal melalui koperasi desa/ kelurahan merah putih	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
		pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
				Pemerintahan Desa		
7	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Reviu Laporan Keuangan	
					Pengawasan Desa	
		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
		Tata kelola pelayanan publik	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2027			Keterangan
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pengawasan Penanaman Modal	
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Pengendalian komponen inflasi harga bergejolak	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
8	Prioritas Nasional 8	Penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYA	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
		Perlindungan dan pelestarian warisan budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya	

4.3.2. Keselarasan Highlight Intervensi Arah Pembangunan Kewilayaahn

Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2027 tidak lagi hanya memandang target capaian secara sektoral, melainkan bergeser secara tegas ke arah pendekatan spasial dan kewilayahan. Pemerintah pusat melalui Bappenas menepatkan indikasi intervensi pembangunan kwilayahan sebagai panduan mutlak lokasi mana saja yang menjadi fokus pertumbuhan ekonomi baru, pemerataan kesejahteraan, dan penanggulangan kesenjangan antar-wilayah.

Dalam rangka konsistensi perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Luwu menyelaraskan perencanaan agar seluruh potensi keunggulan komparatif daerah diakomodasi. Penyelarasan ini bertujuan memastikan bahwa Program dan Sub-Kegiatan yang dicanangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten mengintervensi titik-titik koordinat wilayah yang telah menjadi highlight nasional. Adapun matriks keselarasan dukungan program, sub kegiatan dan target RKPD 2027 terhadap Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan kewilayahan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.17
Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Target RKPD 2027 terhadap Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Kewilayahan RKP Tahun 2027

NO	RKP 2027		RKPD 2027	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2027
1	Kabupaten Luwu	Pengembangan Kawasan Perkebunan		
		Peningkatan produksi daging, susu dan telur	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Subkegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.000 Ekor

NO	RKP 2027		RKPD 2027	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2027
2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1 Unit
			Fokus Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	
			Elektrifikasi Desa	- PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3				- Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				- Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
				- Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
			Swasembada Pangan, Energi dan Air	
			Budidaya Ikan darat Tematik	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
				<i>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>
				Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

NO	RKP 2027		RKPD 2027	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2027
			Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan
			Subkegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	39.000 Ha
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	2 Unit
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	2 Unit
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2 Unit
		Swasembada Air (Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-SPALD)	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	
			- Subkegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			- Subkegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			- Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			- Subkegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

NO	RKP 2027		RKPD 2027	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2027
			- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			- Subkegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			- Subkegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
			- Subkegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
4	Pembangunan Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif dan Inovasi			
	Intervensi Penuntasan Tuberkulosis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
		Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.710 Orang	
	Program 3 Juta Rumah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		
		Subkegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2 Unit	
		Subkegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1 Unit	
		Subkegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	10 Rumah Tangga	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		

NO	RKP 2027		RKPD 2027	
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2027
			Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	31 Unit
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit
			Hilirisasi SDA Strategis	
5	Hilirisasi Industri Strategis: Industri Carrageenan (Rumput Laut)	- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
		- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
		- Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	

Tabel 4.18.
Keselarasan Intervensi Kewilayahan Kabupaten Luwu

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
1.	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Luwu	perwujudan luwu berdaya akan dilakukan intervensi berupa:	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"
		Pengembangan koperasi sektor produksi	
		Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah	
		Pengembangan UMKM dan Industri	
		Perluasan akses ke perizinan usaha	
		Fasilitasi akses pembiayaan usaha	
		peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran	
		Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor	
		Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif	
		prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan	
		Pendataan Masyarakat Miskin	
		Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi	
		Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)	

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
		BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan	
		Hilirisasi SDA Strategis	
		<i>Hilirisasi Industri Strategis: Industri Carrageenan (Rumput Laut)</i>	
2	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Luwu	Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:	layanan publik yang profesional dan bermartabat "Luwu Malebbi"
		Transformasi digital layanan publik prioritas	
		Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa	
		Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR	
		Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik	
		Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah	
		Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah	
		pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	
3	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Luwu	Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi:	Sumber daya manusia unggul

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
		Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi) Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan	dan berdaya saing

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
		Pelaksanaan Tabligh Akbar	
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	
		Investasi pelayanan kesehatan primer	
		Penurunan kematian ibu dan anak	
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	
		penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.	
		peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah	
		peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		peningkatan partisipasi penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga	

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
		Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko	
	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Luwu	Pembangunan Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif dan Inovasi	
		<i>Intervensi Penuntasan Tuberkulosis</i>	
4	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Luwu	Swasembada Pangan, Energi dan Air	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"
		Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi	
		Pengembangan petani muda milenial	
		Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian	
		Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura	
		Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan	
		Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	
		Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat	
		ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan	
		Implementasi pertanian rendah karbon	
		kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk	
		desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan	
		Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya	

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
		produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian	
		Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi	
		rekomendasi perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;	
		<i>Peningkatan produksi daging, susu dan telur</i>	
		<i>Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi</i>	
		Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha	

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
		mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian	
	Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur	Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar	
		produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, pengadaan benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat	
		Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pelabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur;	

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
		Pembangunan pangan akuatik (blue food) : a) peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; b) penguatan kapasitas SDM; serta c)penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan	
		<i>Budidaya Ikan darat Tematik</i>	
5	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Luwu	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi Peningkatan Penerangan Jalan Desa Pengelolaan sumber daya air <i>Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD</i> <i>Program 3 Juta Rumah</i> Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor;	Infrastruktur merata dan berkelanjutan

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
		▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU Konservasi sumberdaya air pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota; <i>Elektrifikasi Desa</i>	
6		Fasilitas desa belajar peningkatan kelembagaan BUMDES Pencapaian SDGs Desa Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. membuat peta potensi wilayah desa	Desa mandiri
7	Kecamatan Belopa, dan Bua Ponrang	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"

NO	KECAMATAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU
	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Luwu	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hijau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana. penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; Peningkatan mitigasi bencana dan Desa tangguh bencana Peningkatan layanan persampahan perkotaan Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	

Pembangunan Kawasan kabupaten Luwu tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi biru di Kawasan teluk Bone. Fokus utama Pembangunan di Kabupaten Luwu yaitu pengembangan Kawasan pangan yang terintegrasi diarahkan untuk menjadikan Kabupaten Luwu sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional, melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal secara produktif dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat setempat. Upaya ini dilaksanakan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik

lahan, kondisi lingkungan hidup, serta aspek sosial ekonomi wilayah dengan pendekatan terintegrasi dengan swasembada energi dan air.

Kabupaten Luwu khususnya Kecamatan Suli Barat, Suli, Bajo Barat, Latimojong, Bua Ponrang, Bajo dan Walenrang Barat diarahkan pada penguatan produksi komoditas Perkebunan dan hortikultura berorientasi nilai tambah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor Perkebunan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya ini dilaksanakan melalui penguatan kapasitas produksi di sisi hulu guna menjamin ketersediaan dan kualitas bahan baku, yang mencakup peremajaan tanaman, penerapan good algaculture practices, serta perlindungan tanaman. Strategi tersebut diintegrasikan dengan penguatan off-farm melalui perbaikan pasca panen, pengolahan, dan sertifikasi produk, serta didukung oleh penguatan kelembagaan terintegrasi dan penataan data Tunggal komoditas Perkebunan hortikultura bernilai tambah tinggi.

Kabupaten Luwu khususnya Kecamatan Belopa, Suli, Ponrang Selatan, Bassesangtempe, Walenrang, dan Lamasi diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan hewani sebagai Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi protein asal hewan, seperti produksi daging, susu, dan telur. Pencapaian ini didorong oleh peningkatan kuantitas dan kualitas input peternakan, terutama pengembangan genetika ternak unggul; Pengembangan peternakan modern dan terintegrasi melalui kemitraan dan investasi swasta; Penguatan pascapanen dan hilirisasi produk hasil ternak, melalui intervensi ekosistem pengembangan industry ayam terintegrasi; serta Peningkatan ketahanan sektor peternakan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak.

Kabupaten Luwu khususnya Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi diarahkan pada pengembangan pangan akuatik (Blue Food) untuk meningkatkan ketersediaan ikan bagi konsumsi Masyarakat sekaligus menjamin pasokan bahan baku industry pengolahan melalui peningkatan produksi dan produktivitas perikanan secara terpadu hulu dan hilir. Upaya ini dilakukan melalui 1) penguatan input produksi dan penyediaan saran dan prasarana perikanan budidaya, termasuk budidaya ikan darat tematik; 2) pengembangan Kawasan

berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat, termasuk tambak nila dan tabak udang; 3) penguatan tata Kelola yang mendukung transformasi perikanan tangkap dan budidaya; 4) pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan sentra/kampung nelayan merah putih, termasuk Pembangunan kapal ikan; 5) peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perikanan skala kecil; 6) peningkatan kapasitas pendampingan dan penyuluhan; 7) penguatan perlindungan pelaku usaha; serta 8) pengembangan infrastruktur pengolahan, sistem rantai dingin, dan logistic perikanan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor secara berkelanjutan.

Seluruh Kawasan Kabupaten Luwu diarahkan pada pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir yang dilaksanakan melalui 1) Pembangunan, peningkatan, dan perluasan infrastruktur air minum yang terintegrasi dari sumber air baku sampai rumah tangga; 2) pengaturan Kembali pengelolaan asset infrastruktur air minum; 3) Penguatan tata Kelola regulasi dan kelembagaan penyelenggara air minum; 4) Pengawasan kualitas air minum yang didukung oleh pemicuan kepada Masyarakat untuk mengakses air minum aman.

Seluruh Kawasan Kabupaten Luwu diarahkan pada penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, berketahaann iklim berbasis CWIS (Citywide Inclusive Sanitation) yang dilaksanakan melalui 1) Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); 2) Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S); 3) Optimalisasi dan rehabilitasi SPALD; 4) pemantauan dan inspeksi kualitas SPALD.

Kabupaten Luwu khususnya Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi diarahkan pada pengembangan hilirisasi rumput laut yang dilaksanakan melalui strategi 1) peningkatan kapasitas dan utilisasi industry pengolahan; 2) Standarisasi mutu dan ketertelurusan produk; 3) penguatan logistic, kepastian pasokan bahan baku, dan penyediaan fasilitas pasca panen; serta 4) fasilitasi investasi dan kemitraan usaha. Fokus ini ditujukan untuk mendorong pergeseran ekspor dari rumput laut kering menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut strategi yang

dilakukan meliputi fasilitasi pengembangan dan diversifikasi produk olahan rumput laut, bimbingan teknis mencakup aspek mutu, dan kesiapan ekspor.

Kabupaten Luwu khususnya Kecamatan Belopa dan Kecamatan Bua Ponrang diarahkan pada peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR. Sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini belum mampu mengatasi seluruh permasalahan karena masih terfragmentasi utamanya Adalah sistem di hulu (pemilahan dan pengumpulan serta tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle) dengan sistem di Tengah dan hilir (tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan tempat pemrosesan akhir (TPA)) serta masih mertumpu pada kumpul-angkut-buang. Pengelolaan ini berakibat pada kondisi darurat sampah di mana sampah bocor ke lingkungan dan menumpuk di TPA yang dioperasikan umumnya secara open dumping. Untuk memperbaiki hal tersebut, dibutuhkan pengelolaan terpadu melalui perbaikan layanan pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir melalui penyediaan dan optimalisasi infrastruktur tepat guna, ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Kabupaten Luwu khususnya Kecamatan Belopa, Latiojong, Bua, Bassesangtempe, dan Walenrang difokuskan pada peningkatan investasi swasta prioritas pendorong transformasi ekonomi, fokus tersebut diarahkan untuk mengembangkan sektor dan aktivitas produktif yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian. Upaya ini dilakukan melalui 1) dukungan terhadap transformasi digital; 2) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan investasi; 3) hilirisasi yang terintegrasi; 4) peningkatan pelayanan perizinan berusaha; 5) modernisasi dan digitalisasi pertanian; 6) penguatan ekonomi biru, industri kreatif, dan pariwisata; serta 7) meningkatkan keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah.

Kecamatan belopa dan Kecamatan Walenrang difokuskan pada transformasi digital layanan public prioritas yang diarahkan untuk menyederhanakan proses layanan, memperkuat integrasi kanal layanan, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Upaya yang dilakukan Adalah 1) penguatan portal pelayanan public dan portal pelayanan administrasi pemerintahan; 2) harmonisasi regulasi dan pemeliharaan sistem perizinan berusaha terintegrasi; 3) transformasi pelayanan pertanahan berbasis digital. Langkah ini diharapkan mewujudkan layanan yang lebih cepat,

mudah, transparan dan terhubung lintas instansi sesuai dengan prinsip pemanfaatan data bersama melalui satu data Indonesia.

Kabupaten Luwu difokuskan pada tata Kelola perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT yang diarahkan untuk memperkuat proses perencanaan Pembangunan yang lebih terukur, sinkron, dan akuntabel melalui oemanfaatan DTSEN, data sektoral, dan statistik yang bersumber dari pencatatan peristiwa vital penduduk. Pelaksanaannya difokuskan pada penguatan integrasi dan interoperabilitas data DTSEN, statistic sektoral, dan SIOD kedalam SEPAKAT, serta peningkatan kapasitas pusat dan daerah dalam Menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi Pembangunan berbasis bukti. Upaya ini diharapkan meningkatkan keterpaduan data dan dokumen perencanaan, ketepatan sasaran program, serta kualitas kebijakan Pembangunan.

Kabupaten Luwu difokuskan pada 1) penguatan JKN dan pendanaan Kesehatan diarahkan pada peningkatan pengelolaan kepesertaan dan keaktifan peserta JKN. 2) Pengembangan koperasi sektor produksi yang diarahkan untuk meningkatkan skala usaha, produktivitas, dan nilai tambah termasuk memperkuat peran Koperasi Desa/Keluraha Merah Putih dalam kegiatan produksi. 3) Perumahan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu mendukung peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, khususnya pada penanganan Kawasan permukiman kumuh, penanganan infrastruktur dasar lainnya (air minum, air limbah domestik, persampahan serta jalan dan drainase lingkungan). 4) Pengembangan sekolah terintegrasi, Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas, Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital, Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, serta pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (Sekolah rakyat). 5) Penyelenggaraan pemeriksaan Kesehatan gratis; Penuntasan tuberculosis, dan penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi.

Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Bua difokuskan pada Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas yang memiliki tujuan untuk mendukung pemerataan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan rujukan di Kawasan Palopo. Intervensi utama yang dilaksanakan meliputi pemenuhan sarana, prasarana dan alat

Kesehatan, pengembangan layanan kanker, jantung, stroke, Uronefrologi dan Kesehatan ibu anak, disertai pemenuhan tenaga medis dan tenaga Kesehatan sesuai standar.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027

Sebagaimana tertuang pada Bab III, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sejumlah Rp.1.716.233.878.610 yang bersumber dari PAD sebesar Rp.108.539.554.987, pendapatan Transfer sejumlah Rp.1.420.143.941.638 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.26.396.395.705. Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2027, dengan jumlah proyeksi belanja sebesar Rp.1.711.233.878.610.

Belanja daerah Tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada hasil (result oriented), dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025–2029, Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta tema pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2027.

Belanja daerah Tahun 2027 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi dan karakteristik Kabupaten Luwu. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting,

peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi daerah, pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan daya saing ekonomi daerah, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasian belanja daerah menerapkan prinsip *money follows program* dan *spending better*, sehingga anggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang terukur.

Selain itu, kebijakan belanja daerah tetap memperhatikan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, optimalisasi kualitas belanja, efisiensi penggunaan anggaran, serta sinergi pendanaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, dan sumber pendanaan sah lainnya untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2027.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2027

URAIAN (PP 12/2019)	PROYEKSI	
	2027	2028
PENDAPATAN	1.716.233.878.610	1.702.256.217.396
Pendapatan Asli Daerah	269.693.541.267	272.390.476.680
Pajak Daerah	108.539.554.987	109.624.950.537
Retribusi Daerah	151.153.986.280	152.665.526.143
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	6.000.000.000	6.060.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	4.000.000.000	4.040.000.000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

URAIAN (PP 12/2019)	PROYEKSI	
	2027	2028
Pendapatan Transfer	1.420.143.941.638	1.403.205.381.054
Pendapatan Transfer Pusat	1.362.407.246.130	1.344.891.318.591
Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.736.695.508	58.314.062.463
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26.396.395.705	26.660.359.662
Hibah	-	
Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	26.396.395.705	26.660.359.662
BELANJA	1.711.233.878.610	1.697.256.217.396
Belanja Operasi	1.132.548.169.215	1.143.873.650.908
Belanja Pegawai	678.250.413.933	685.032.918.072
Belanja Barang dan Jasa	441.960.565.004	446.380.170.654
Belanja Hibah	12.236.690.278	12.359.057.181
Belanja Bantuan Sosial	100.500.000	101.505.000
Belanja Modal	340.226.593.377	312.598.859.311
Belanja Modal Tanah	3.000.000.000	2.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.423.576.595	36.787.812.361
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.850.722.143	112.259.229.364
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157.048.169.360	158.618.651.054
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	56.021.348	56.581.561
Belanja Modal Aset Lainnya	2.848.103.931	2.876.584.970
Belanja Tak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000
Belanja Transfer	232.459.116.017	234.783.707.177
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.201.624.869	12.323.641.118
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	220.086.375.398	222.287.239.152

Sumber : Diolah tim penyusun RKPD, Tahun 2026.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan belanja daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengalokasian anggaran tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.

Pada Tahun Anggaran 2027, alokasi belanja untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp604.080.656.130 atau sekitar 35,59 persen dari total belanja daerah. Alokasi anggaran tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025–2029. Rincian alokasi anggaran berdasarkan bidang pelayanan dasar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Alokasi SPM

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	113.079.879.944	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	192.461.595.199	Dinas Kesehatan
			134.473.583.177	RSUD Batara Guru
3	Pekerja Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	126.699.111.497	Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	29.809.495.213	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.850.000.000	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	775.000.000	Dinas Perumahan dan Pemukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.217.966.194	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Bidang	Nama Program	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	Perlindungan Masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.915.282.692	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Penanggulangan Bencana	515.236.264	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	283.505.950	Dinas Sosial
TOTAL			604.080.656.130	35,59%

Sumber : Diolah tim penyusun RKPD, Tahun 2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Luwu telah menyusun pagu indikatif belanja perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Pengalokasian pagu tersebut dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, target kinerja yang akan dicapai, serta prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan pagu indikatif belanja perangkat daerah telah disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat daerah yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Luwu. Dengan demikian, alokasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Tabel 5.3
PAGU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD 2027
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	470.261.459.141
2	DINAS KESEHATAN	165.477.953.004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD 2027
3	RSUD BATARA GURU	281.682.758.712
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	195.271.644.937
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.741.260.193
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.337.355.738
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	11.427.157.016
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.465.977.026
9	DINAS SOSIAL	5.172.803.026
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	9.070.198.785
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.334.977.558
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.958.860.556
13	DINAS PERTANAHAN	5.141.064.173
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.964.374.443
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.895.413.747
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.602.755.777
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.887.816.882
18	DINAS PERHUBUNGAN	15.127.778.309
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.433.180.430
20	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	4.145.973.805
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.005.904.346
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.705.953.471
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.264.841.875
24	DINAS PERIKANAN	7.096.312.951
25	DINAS PARIWISATA	5.359.598.683
26	DINAS PERTANIAN	20.542.828.759
27	DINAS PERDAGANGAN	6.820.055.159
28	SEKRETARIAT DAERAH	35.963.118.081
29	SEKRETARIAT DPRD	31.009.707.097
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	6.815.033.592
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	246.821.351.693
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	15.777.109.493
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.155.109.429
34	INSPEKTORAT DAERAH	11.661.309.276
35	KECAMATAN BAJO	2.949.966.501
36	KECAMATAN BAJO BARAT	1.465.808.553
37	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	1.793.699.026

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD 2027
38	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	1.880.241.876
39	KECAMATAN BELOPA	5.672.319.591
40	KECAMATAN BELOPA UTARA	3.693.173.533
41	KECAMATAN BUPON	2.613.078.584
42	KECAMATAN KAMANRE	2.533.137.216
43	KECAMATAN LAMASI	3.256.402.875
44	KECAMATAN LAMASI TIMUR	1.797.103.297
45	KECAMATAN LAROMPONG	2.993.010.286
46	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	2.129.555.042
47	KECAMATAN LATIMOJONG	1.728.319.475
48	KECAMATAN PONRANG	4.603.187.154
49	KECAMATAN PONRANG SELATAN	2.732.686.674
50	KECAMATAN SULI	2.314.379.056
51	KECAMATAN SULI BARAT	2.203.002.061
52	KECAMATAN WALENRANG	3.170.429.798
53	KECAMATAN WALENRANG BARAT	2.299.407.039
54	KECAMATAN WALENRANG TIMUR	1.910.319.366
55	KECAMATAN WALENRANG UTARA	3.488.250.120
56	KECAMATAN BUA	4.061.110.406
57	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.546.293.918
	Total	1.711.233.878.610

Sumber : Diolah tim penyusun RKPD, Tahun 2026.

Sejak berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, Indonesia bersama 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi agenda pembangunan global Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Agenda ini menjadi komitmen global untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui pencapaian 17 tujuan (goals) dan 169 target yang dilaksanakan selama periode 2016–2030.

Berbeda dengan MDGs yang lebih berfokus pada negara berkembang, TPB/SDGs bersifat universal, sehingga berlaku bagi seluruh negara tanpa terkecuali. Pelaksanaannya mengedepankan prinsip *No One Left Behind* (Tidak Meninggalkan Seorang Pun), yaitu memastikan seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tertinggal, memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan. Prinsip tersebut diwujudkan melalui dua pendekatan utama, yaitu keadilan prosedural, yang menjamin keterlibatan seluruh pemangku

kepentingan dalam proses pembangunan, dan keadilan substantif, yang memastikan kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB/SDGs ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan target-target TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu mengintegrasikan target-target TPB/SDGs ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui penyelarasan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Integrasi tersebut difokuskan pada isu-isu strategis daerah, antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian TPB/SDGs, Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun 2027 mengalokasikan anggaran sebesar Rp889.702.986.325 atau sekitar 52 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp1.711.233.878.610 untuk mendanai program-program yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian target TPB/SDGs. Alokasi anggaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu.

Tabel 5.4
ALOKASI SDGs

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
1	Tujuan 1	1	Pengelolaan Pendidikan	113.079.879.944
	Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	326.935.178.376
		3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.850.000.000
		4	Program Pengembangan Perumahan	206.000.000
		5	Program Kawasan Permukiman	775.000.000
		6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	830.000.000
		7	Program Pemberdayaan Sosial	51.123.300
		8	Program Rehabilitasi Sosial	150.004.050
		9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	283.505.950
		10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.060.000.000
		11	Program Penanggulangan Bencana	515.236.264
		12	Program Pencatatan Sipil	50.310.730
		13	Program Pengendalian Penduduk	192.600.000
		14	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.234.588.628
		15	Program Pendaftaran Penduduk	310.094.170
2	Tujuan 2	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Tanpa Kelaparan : Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2	Program Penanggulangan Bencana	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		3	Program Penanganan Bencana	119.200.545
		5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	376.581.140
		6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	62.528.601
		7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.017.358.673

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
		8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.919.726.780
		9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	51.684.750
3	Tujuan 3	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.173.175.600
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.214.575.426
		4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
4	Tujuan 4	1	Pengelolaan Pendidikan	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Pendidikan Berkualitas : menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	2	Program Pengembangan Kurikulum	188.717.930
		3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.399.999.069
5	Tujuan 5	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	64.996.176
	Kesetaraan Gender :	2	Program Perlindungan Perempuan	65.723.420
	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Telah dianggarkan pada tujuan 2
6	Tujuan 6	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	29.809.495.213
	Air Bersih dan Sanitasi Layak :	2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Telah dianggarakan pada tujuan 1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	185.843.647
		4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	543.000.000
		5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	74.988.626
		6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		7	Program Perencanaan Lingkungan	559.140.000
7	Tujuan 7	1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Energi Bersih dan Terjangkau :			
	Menjamin akses energi yang			
	terjangkau, andal, berkelanjutan, dan			
	modern untuk semua;			
8	Tujuan 8	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Telah dianggarkan pada tujuan 2
	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Telah dianggarkan pada tujuan 2
	Ekonomi :	3	Program Penyuluhan Pertanian	168.560.360
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja			
	yang produktif dan menyeluruh, serta	4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.138.360.087
		5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.306.886.382

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
		6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	63.605.492
		7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	384.999.810
		8	Program Pemasaran Pariwisata	69.000.002
		9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	109.999.740
		10	Program Perizinan Usaha Pertanian	-
		11	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	11.163.160
		12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	758.272.448
		13	Program Pengembangan Ekspor	129.341.600
		14	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-
		15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	452.621.904
		16	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	830.886.940
		17	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.025.443.452
		18	Program Hubungan Industrial	2.102.112.540
9	Tujuan 9	1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur :	2	Program Pengelolaan Pelayaran	50.191.436
	meningkatkan industri kreatif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;	3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8.648.332.977
10	Tujuan 10	1	Program Pemberdayaan Sosial	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Berkurangnya kesenjangan :	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Telah dianggarakan pada tujuan 1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
		4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.076.286.040
		5	Program Penyelenggaraan Jalan	126.699.111.497
		6	Program Pengembangan Perumahan	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		7	Program Kawasan Permukiman	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		8	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		10	Program Pengelolaan Pendidikan	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		11	Program Penempatan Tenaga Kerja	170.959.734
		12	Program Hubungan Industrial	2.102.112.540
11	Tujuan 11	1	Program Penyelenggaraan Jalan	Telah dianggarkan pada tujuan 10
	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan.	2	Program Pengembangan Perumahan	Telah dianggarkan pada tujuan 10
	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan	3	Program Kawasan Permukiman	Telah dianggarkan pada tujuan 10
		4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Telah dianggarkan pada tujuan 10
		5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		6	Program Penanggulangan Bencana	Telah dianggarkan pada tujuan 1
		7	Program Pengelolaan Persampahan	1.892.677.681
12	Tujuan 12	1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	7.513.964
	Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan :	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah dianggarkan pada tujuan 6

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang	3	Program Pengelolaan Persampahan	Telah dianggarkan pada tujuan 11
	berkelanjutan;	4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Telah dianggarkan pada tujuan 11
13	Tujuan 13	1	Program Penanggulangan Bencana	Telah dianggarkan pada tujuan 1
	Penanganan Perubahan Iklim :	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah dianggarkan pada tujuan 6
	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi			
	perubahan iklim dan dampaknya			
14	Tujuan 14	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Telah dianggarkan pada tujuan 8
	Ekosistem Lautan :	2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Telah dianggarkan pada tujuan 8
	Melestarikan dan memanfaatkan secara			
	berkelanjutan sumber daya kelautan dan			
	samudera untuk pembangunan berkelanjutan			
15	Tujuan 15	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Telah dianggarkan pada tujuan 6

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
	Ekosistem Daratan : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan,mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggunaan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan Keanekaraman hayati	2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Telah dianggarkan pada tujuan 11
16	Tujuan 16	1	Program Perlindungan Khusus Anak	75.653.391
	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh :	2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-
		3	Program Perlindungan Perempuan	Telah dianggarkan pada tujuan 5
	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan,	4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	240.544.368.187
	menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat	5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.914.762.486
		6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	449.187.310
		7	Program Pendaftaran Penduduk	310.094.170
		8	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.610.929.122

NO	Tujuan TPB/SDGs	Program Daerah		Pagu Anggaran (Rp)
17	Tujuan 17	1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.918.820.386
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan :	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	330.474.479
		3	Program Pendaftaran Penduduk	Telah dianggarkan pada tujuan 1
Total Anggaran				889.702.986.325

5.2. Program Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2027

Rumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, disusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Bidang Sosial. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang urusan meliputi Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Sedangkan Urusan Pilihan sejumlah 6 (enam) bidang meliputi Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah 2 (dua) bidang urusan meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sejumlah 5 (lima) bidang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya Unsur Pengawasan meliputi Inspektorat Daerah serta Unsur Kewilyahan meliputi 22 (dua

puluh dua) Kecamatan, dan Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Poltik.

Tabel 5.5

Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
1	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	76,21						
			Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	8,07	Meningkatnya skala usaha pelaku UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	11,09	720.657.083	URUSAN KOPERASI DAN UMKM
						Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	4,8	34.699.635	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	15	384.999.810	URUSAN PARIWISATA
						berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1,9	109.999.740	URUSAN PARIWISATA
						Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	100	758.272.448	URUSAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,87 – 3,13	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	54,55	1.025.443.452	URUSAN KETENAGAKERJAAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
							Tingkat produktivitas tenaga kerja		65,7		
						meningkatnya tenaga kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Program penempatan tenaga kerja	28	170.959.734	
			Meningkatnya Hirilisasi sumber daya unggulan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	7,01	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pembangunan sektor industri dan kawasan industri	program Perencanaan dan Pembangunan Industri	30,25	452.621.904	UNSUR KOPERASI DAN UMKM
						Meningkatnya nilai investasi daerah berbasis sumber daya unggulan	Realisasi total investasi terhadap target investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	100	204.009.400	URUSAN PENANAMAN MODAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program promosi penanaman modal	8,29	204.009.400	
						Meingkatnya luas areal yang terfasilitasi prasarana pertanian	Persentase luas sawah yang beririgasi	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	95,69	1.919.726.780	URUSAN PERTANIAN
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran perkapita (Ribu. Rp)	14.621						
			Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat kemiskinan (%)	9,33 – 9,95	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	100	283.505.950	URUSAN SOSIAL
						Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Program pemberdayaan sosial	100	51.123.300	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						Terjaminnya perlindungan jaminan kesehatan dan pemenuhan standar layanan masyarakat	Indeks SPM Bidang Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	50.000.000.000	URUSAN KESEHATAN
						Meningkatnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan/ penyedia kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Program hubungan industrial	50	2.102.112.540	URUSAN KETENAGAKERJAAN
2	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang		Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)	58,2						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
		responsif, berintegritas dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	62,66	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	745.497.121.258	Seluruh OPD
						Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	80	8.866.682.960	URUSAN PEMERINTAHAN
						Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		100		
						Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20,28	6.654.548.975	
						Meningkatnya sarana dan	Persentase fasilitas		80		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						prasarana fasilitas keagamaan	keagamaan dalam kondisi baik				
						Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah		100		
						Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	Program penyelenggaraan pengawasan	90	2.914.762.486	URUSAN PENGAWASAN
							Persentase tindak lanjut temuan BPK		85		
							Persentase tindak lanjut temuan BPKP		90		
							Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi		90		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
							Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani		100		
						meningkatnya akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi	Persentase UMKM yang memperoleh akses lembaga keuangan	Program perekonomian dan pembangunan	75	1.156.762.637	URUSAN PEMERINTAHAN
						Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ		9		
						Meningkatnya Kualitas Penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP Bernilai baik	Program kepegawaian daerah	100	1.454.781.821	URUSAN KEPEGAWAIAN
						Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		13,92		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		10,45		
			meningkatkan Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	81,92	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase keselarasan nomenklatur dan anggaran antara program RPJMD dengan RKPD	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	373.275.449	URUSAN PERENCANAAN
							Persentase Perangkat Daerah dengan predikat kinerja program "Sangat Tinggi"		100		
						meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran	Program pengelolaan keuangan daerah	85	240.544.368.187	URUSAN KEUANGAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						meningkatnya pendapatan daerah	Presentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan	Program pengelolaan pendapatan daerah	100	2.918.820.386	
			Terwujudnya pemerintahan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	3,9	Terintegrasinya aplikasi daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Program pengelolaan aplikasi informatika	28,07	964.848.948	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik yang disampaikan, termasuk keakuratan, relevansi, dan kecepatan informasi.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	83,1	1.610.929.122	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
							Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		90 - 100		
						Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program pendaftaran penduduk	98,95	310.094.170	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		35		
				Indeks Inovasi Daerah (Angka)	50,12	Meningkatnya jumlah kelitbangan daerah yang mendukung kebijakan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	100	434.839.678	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						meningkatnya kualitas riset dan ekosistem inovasi	Persentase inovasi daerah yang memiliki kematangan >75 dalam IID pada tahun pelaporan	Program riset dan inovasi daerah	100	137.736.000	
						meningkatnya kualitas aparatur sipil negara	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	Program pengembangan sumber daya manusia	20,45	879.599.215	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	1,91	Meningkatnya Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat berkat Aparatur yang Berkompeten serta Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Perundang-	Persentase capaian SPM bidang pelayananTrantibum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100	1.217.966.194	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						undangan Daerah					
						meningkatnya kualitas penanganan penyelesaian konflik daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	80	623.699.224	URUSAN KESBANGPOL
3	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	75,02 – 76,09						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
			Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	82,35	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Program pengelolaan pendidikan	100 100	113.079.879.944	URUSAN PENDIDIKAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
							Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100		
						meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal untuk penguatan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program pengembangan kurikulum	100	188.717.930	
						meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program pendidik dan tenaga kependidik	100	1.399.999.069	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						meningkatnya pembinaan dan kualitas layanan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang ber Standar Nasional Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	40,23	394.067.270	URUSAN PERPUSTAKAAN
			meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	84,11	Terjaminnya perlindungan jaminan kesehatan dan pemenuhan standar layanan masyarakat	Indeks SPM	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	2,76935E+11	URUSAN KESEHATAN
						Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Persentase lembaga/organisasi yang memperoleh sosialisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	1.214.575.426	
						Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	81,5	2.173.175.600	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
			Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, kualitas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan keluarga (Angka)	73,6	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase perempuan kepala keluarga yang diberdayakan	Program peningkatan kualitas keluarga	87		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	60,34	75.653.391	
						Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (TFR)	Program pengendalian penduduk	2,2	192.600.000	Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
				Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	60,83	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	91	207.724.336	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
						meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga nasional dan internasional	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	86,5	3.599.465.008	
			meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan	Indeks kerukunan umat	75,06	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	20,28		Urusan Pemerintahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
			dan kualitas beragama	beragama (Angka)		Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	KESEJAHTERAAN RAKYAT	80		
						Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah	100			
						Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	Program pengembangan kebudayaan	91,3	521.359.212	URUSAN KEBUDAYAA N
4	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan		Indeks ekonomi hijau (Angka)	51,41						
				indeks ekonomi biru (Angka)	122,82						
			Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	7,8	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan produksi peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4,2	4.017.358.673	Urusan Pertanian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
							Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura		5		
							Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan		4,2		
							Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman pangan		5,5		
			Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP) (Angka)	104,3	meningkatnya kualitas layanan penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Program penyuluhan pertanian	34,22	168.560.360	Urusan Perikanan
				Produktivitas perikanan (Rp/Jiwa)	11,05	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	1,97	1.138.360.087	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	3,22	1.306.886.382	
				Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Angka)	111,8	Meningkatnya pemanfaatan hasil perikanan oleh masyarakat	angka konsumsi ikan	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	59,7	63.605.492	
			Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan pangan (Angka)	83,61	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Energi	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.250	376.581.140	Urusan Ketahanan Pangan
						Terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Rasio Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten		59		
5	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Angka)	3,02						
			Meningkatkannya aksesibilitas, mobilitas, dan	Tingkat Konektivitas infrastruktur (%)	15,14	Meningkatnya kondisi jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	34,17	126.699.111.497	Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
			keterhubungan antarwilayah			Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat pelayanan lalu lintas (V/C)	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	0,51	8.648.332.977	Urusan Perhubungan
			Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	10,85	Meningkatnya kondisi irigasi dalam kondisi baik	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Program pengelolaan sumber daya air	71,89	29.809.495.213	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
			minum yang layak bagi masyarakat	Akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	34	Tersedianya akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	81,93	1.850.000.000	
			Meningkatnya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan	Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	8,9	Meningkatnya layanan drainase perkotaan/saluran pembuangan air	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	0,8065	2.076.286.040	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	9,92	830.000.000	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman
						meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Program kawasan permukiman	5,02	775.000.000	
						Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	100	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Urusan Pertanahan
6	Desa mandiri	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks desa (Angka)	75,38						
			Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri (%)	24,15	Meningkatnya status legalitas Bumdes	Persentase Bumdes yang terkelola dengan baik	Program administrasi pemerintahan desa	30	8.312.961.146	Urusan pemberdayaan dan masyarakat desa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						Tercapainya SDGs Desa	Indeks SDGs Desa		10	1.060.000.000	
						Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	58		
7	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	25,92						
			Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (Angka)	129,28	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana	100	515.236.264	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		100		MASYARAKAT
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100		
						terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program pengembangan perumahan	100	206.000.000	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
							persentase warga negara yang terkena relokasi akibat pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		100	2.915.282.692	Urusan Pemadam kebakaran
						meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100		
							Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit		30,46		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Program penanganan bencana	100	119.200.545	Urusan Sosial
						Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	85	185.843.647	Urusan lingkungan hidup
							Meningkatnya tata kelola persampahan	Program pengelolaan persampahan	100	1.892.677.681	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET 2027	PAGU 2027	URUSAN
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5,86	1.248.663.242	Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
						Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampaham regional	3,19	2.236.062.877	

5.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Perumusan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan kedalam beberapa urusan dan unsur pemerintahan antara lain 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, dan urusan Bidang sosial. Untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, pertanahan, lingkungan hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari 6 (Enam) urusan antara lain Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi, disamping urusan tersebut berdasarkan permendagri 90 Tahun 2019 ditambah dengan 5 (lima) unsur antara lain Unsur Pendukung urusan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 5 (Lima) unsur yaitu Perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Untuk unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah Inspektorat Daerah, Daerah serta Unsur Kewilyahan meliputi 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dan Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan dalam rangka memenuhi target

capaian kinerja pembangunan yang optimal. Secara rinci rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. LUWU
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PENDIDIKAN			470.261.459.141,00					437.181.828.463,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			470.261.459.141,00					437.181.828.463,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			470.261.459.141,00					437.181.828.463,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			355.592.862.198,00					293.639.766.182,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	355.592.862.198,00				-	293.639.766.182,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			191.200.000,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah.		195.300.000,00	
		-			191.200.000,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah.		195.300.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	26.500.000,00				-	27.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	76.000.000,00				-	77.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	11.500.000,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	23.500.000,00				-	24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	22.000.000,00				-	22.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	8.500.000,00				-	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23.200.000,00				-	23.800.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			76.000.000,00					77.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	76.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			22.000.000,00					22.500.000,00	
		Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	22.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			23.500.000,00					24.000.000,00	
		Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	23.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	24.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			26.500.000,00					27.000.000,00	
		Tersediannya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	26.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			11.500.000,00					12.000.000,00	
		Tersediannya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.500.000,00					9.000.000,00	
		Tersediannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.200.000,00					23.800.000,00	
		Tertaskannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	23.200.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	23.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			351.518.702.263,00					290.229.739.015,00	
		-			351.518.702.263,00					290.229.739.015,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	326.640.000,00				-	431.760.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	35.219.300,00				-	36.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	32.554.383,00				-	34.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	351.124.288.580,00				-	289.727.979.015,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			351.124.288.580,00					289.727.979.015,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2281 Orang/bulan	351.124.288.580,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik- TVG PNSD		-	289.727.979.015,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			326.640.000,00					431.760.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	326.640.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	431.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			35.219.300,00					36.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	35.219.300,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			32.554.383,00					34.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	32.554.383,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	34.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			84.768.240,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		85.968.240,00	
		-			84.768.240,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		85.968.240,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	60.768.240,00				-	60.768.240,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	24.000.000,00				-	25.200.000,00	
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			60.768.240,00					60.768.240,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	60.768.240,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	60.768.240,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			24.000.000,00					25.200.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	24.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	25.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			290.467.185,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		307.810.370,00	
		-			290.467.185,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		307.810.370,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	79.955.125,00				-	79.955.125,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	33.422.060,00				-	92.955.245,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	66.000.000,00				-	64.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	111.090.000,00				-	70.900.000,00	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			66.000.000,00					64.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	66.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	64.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			79.955.125,00					79.955.125,00	
		Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	79.955.125,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	79.955.125,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			111.090.000,00					70.900.000,00	
		Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	111.090.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	70.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			33.422.060,00					92.955.245,00	
		Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	33.422.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	92.955.245,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.006.089.328,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		882.126.427,00	
		-			1.006.089.328,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		882.126.427,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disiapkan	-	45.000.000,00				-	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	150.000.000,00				-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	92.500.000,00				-	49.960.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	269.590.000,00				-	269.590.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	33.535.776,00				-	24.890.550,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	153.637.620,00				-	153.637.620,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	35.418.880,00				-	35.418.880,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	15.725.000,00				-	15.725.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	199.792.467,00				-	203.999.865,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	10.889.585,00				-	33.904.512,00	
				-	15.725.000,00				-	15.725.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.725.000,00				-	15.725.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	15.725.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	15.725.000,00	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			199.792.467,00					203.999.865,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	199.792.467,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	203.999.865,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.889.585,00					33.904.512,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10.889.585,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	33.904.512,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.535.776,00					24.890.550,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	33.535.776,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	24.890.550,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			35.418.880,00					35.418.880,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	35.418.880,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	35.418.880,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			45.000.000,00					45.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			153.637.620,00					153.637.620,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	153.637.620,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	153.637.620,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			92.500.000,00					49.960.000,00	
		Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	92.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	49.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			269.590.000,00					269.590.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	269.590.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	269.590.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			150.000.000,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		700.000.000,00	
		-			0,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		700.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0,00				-	700.000.000,00	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00					700.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.890.000.130,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		729.377.980,00	
		-			1.890.000.130,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		729.377.980,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	204.000.130,00				-	227.688.990,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.686.000.000,00				-	501.688.990,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			204.000.130,00					227.688.990,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.000.130,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	227.688.990,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.686.000.000,00					501.688.990,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1000 Laporan	1.686.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	501.688.990,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			611.635.052,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		509.444.150,00	
		-			611.635.052,00			Aparatur dan Perangkat organisasi Dinas Pendidikan serta sistem pendukung tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan kinerja perangkat daerah		509.444.150,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	349.500.000,00				-	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	14.500.000,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	233.015.052,00				-	114.224.150,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	14.620.000,00				-	20.220.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			233.015.052,00				-	114.224.150,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	233.015.052,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	114.224.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.500.000,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	14.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.620.000,00					20.220.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelithara	22 Unit	14.620.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	20.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			349.500.000,00					350.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	349.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			113.079.879.944,00					143.046.621.254,00	
			Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Bernartispasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	52 Persen	113.079.879.944,00				-	137.629.087.037,00	
			Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (%)	72 Persen	101.305.112.570,00				-	128.437.953.998,00	
			Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs) (%)	100 Persen	101.305.112.570,00				-	128.437.953.998,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			59.789.025.208,00			Satuan Pendidikan Pendidik dan Peserta Didik		84.639.328.273,00	
		-			59.789.025.208,00			Satuan Pendidikan Pendidik dan Peserta Didik		84.639.328.273,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	247.552.208,00				-	3.112.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	296.972.900,00				-	297.088.408,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan penundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	101.716.522,00				-	101.820.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	276.287.780,00				-	276.327.056,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	105.789.078,00				-	105.820.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	13.180.780,00				-	13.227.500,00	
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00				-	3.000.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	850.464.000,00				-	1.099.679.005,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	43.148.900,00				-	13.227.500,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	99.961.210,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	1.045.558.150,00				-	1.045.620.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	522.861.300,00				-	257.289.562,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	246.630.150,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	279.302.900,00				-	279.306.717,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	37.080.520.000,00				-	37.450.194.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	63.606.156,00				-	63.772.338,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	265.452.200,00				-	1.800.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00				-	320.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	8.927.214.720,00				-	3.538.021.380,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	3.400.105.410,00				-	13.629.325.242,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	0,00				-	2.888.306.137,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	1.045.543.200,00				-	212.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	674.256.960,00				-	329.520.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-	164.376.000,00				-	597.060.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	3.086.411.928,00				-	10.523.253.737,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00				-	368.825.527,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	218.074.522,00				-	279.306.717,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	0,00				-	1.800.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	220.662.800,00				-	387.606.812,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	27.107.432,00				-	27.130.897,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	406.807.352,00				-	407.049.490,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	79.460.656,00				-	216.510.248,00	
1.01.02.2.01.0001		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			0,00					1.800.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			265.452.200,00					1.800.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang	265.452.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.045.543.200,00					212.040.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.045.543.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	212.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah			522.861.300,00					257.289.562,00	
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	522.861.300,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	257.289.562,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.086.411.928,00					10.523.253.737,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	130 Unit	3.086.411.928,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	10.523.253.737,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0007		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			674.256.960,00					329.520.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	674.256.960,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	329.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0009		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			0,00					320.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0011		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			246.630.150,00					100.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	246.630.150,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0013		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			164.376.000,00					597.060.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	164.376.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	597.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah			850.464.000,00					1.099.679.005,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	50 Paket	850.464.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		-	1.099.679.005,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			406.807.352,00					407.049.490,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	406.807.352,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	407.049.490,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			99.961.210,00					100.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	99.961.210,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			220.662.800,00					387.606.812,00	
		Tertaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	275 Satuan Pendidikan	220.662.800,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	387.606.812,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			27.107.432,00					27.130.897,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	275 Satuan Pendidikan	27.107.432,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	27.130.897,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			79.460.656,00					216.510.248,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0 Orang	79.460.656,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	216.510.248,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			0,00					2.888.306.137,00	
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	30 Ruang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	2.888.306.137,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			0,00					3.000.000.000,00	
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			43.148.900,00					13.227.500,00	
		Tertaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	43.148.900,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	13.227.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			13.180.780,00					13.227.500,00	
		Tertaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	25 Konten Digital	13.180.780,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	13.227.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			63.606.156,00					63.772.338,00	
		Tertaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	63.606.156,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	63.772.338,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			296.972.900,00					297.088.408,00	
		Tertaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	296.972.900,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	297.088.408,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			276.287.780,00					276.327.056,00	
		Tertaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	276.287.780,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	276.327.056,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			105.789.078,00					105.820.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	105.789.078,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	105.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			101.716.522,00					101.820.000,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8 Kegiatan	101.716.522,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	101.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.045.558.150,00					1.045.620.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5907 Paket	1.045.558.150,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	1.045.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			8.927.214.720,00					3.538.021.380,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	8.927.214.720,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-sn		-	3.538.021.380,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			0,00					368.825.527,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	368.825.527,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			279.302.900,00					279.306.717,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	275 Orang	279.302.900,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	279.306.717,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			218.074.522,00					279.306.717,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	275 Satuan Pendidikan	218.074.522,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	279.306.717,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			3.400.105.410,00					13.629.325.242,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	60 Ruang	3.400.105.410,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	13.629.325.242,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			37.080.520.000,00					37.450.194.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35865 Peserta Didik	37.080.520.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOS Reguler		-	37.450.194.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			247.552.200,00					3.112.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket	247.552.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	3.112.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			37.093.228.138,00			Satuan Pendidikan Pendidik dan Peserta Didik		43.235.635.027,00	
		-			37.093.228.138,00			Satuan Pendidikan Pendidik dan Peserta Didik		43.235.635.027,00	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	-	250.000.000,00	-	-	-	-	2.161.950.000,00	-
		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	0,00	-	-	-	-	500.000.000,00	-
		Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	-	-	0,00	-	-	-	-	500.000.000,00	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	284.804.717,00	-	-	-	-	438.753.954,00	-
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	107.004.543,00	-	-	-	-	107.000.000,00	-
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	146.171.570,00	-	-	-	-	246.222.356,00	-
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	-	40.495.160,00	-	-	-	-	70.410.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	18.026.300,00				-	30.964.940,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	958.534.200,00				-	1.140.830.111,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	249.224.400,00				-	956.520.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	42.145.440,00				-	62.095.440,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	126.937.680,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	47.710.240,00				-	50.432.885,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	43.695.880,00				-	50.452.885,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	2.495.205.000,00				-	2.495.205.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0,00				-	640.744.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	899.332.200,00				-	780.432.645,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	100.000.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	19.589.010.000,00				-	18.055.096.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	90.318.160,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	35.276.300,00				-	20.202.500,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	1.039.324.000,00				-	772.740.556,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	875.113.200,00				-	2.400.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	2.448.810.000,00				-	800.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	3.494.176.200,00				-	1.134.141.305,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	893.412.000,00				-	4.164.300.485,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	386.906.000,00				-	164.206.300,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00				-	136.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	0,00				-	397.800.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00				-	256.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	1.391.779.472,00				-	3.536.717.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	497.835.000,00				-	109.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-	219.766.328,00				-	283.789.973,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	194.281.630,00				-	190.614.932,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	127.932.518,00				-	233.011.760,00	
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				1.039.324.000,00					772.740.556,00	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang		1.039.324.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	772.740.556,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				386.906.000,00					164.206.300,00	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		386.906.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	164.206.300,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0,00					640.744.000,00	
	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	640.744.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium				893.412.000,00					4.164.300.485,00	
	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Ruang		893.412.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	4.164.300.485,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				0,00					0,00	
	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah				0,00					500.000.000,00	
	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				0,00					397.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	397.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.391.779.472,00					3.536.717.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1.391.779.472,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	3.536.717.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			3.494.176.200,00					1.134.141.305,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	3.494.176.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	1.134.141.305,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			0,00					136.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	136.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			899.332.200,00					780.432.645,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	899.332.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	780.432.645,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			958.534.200,00					1.140.830.111,00	
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	958.534.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	1.140.830.111,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			0,00					256.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	256.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			497.835.000,00					109.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	497.835.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	109.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			249.224.400,00					956.520.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	40 Paket	249.224.400,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	956.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			19.589.010.000,00					18.055.096.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta Didik	19.589.010.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOS Reguler		-	18.055.096.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			194.281.630,00					190.614.932,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	194.281.630,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	190.614.932,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			43.695.880,00					50.452.885,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5 Orang	43.695.880,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	50.452.885,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			47.710.240,00					50.432.885,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naisn Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naisn Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	47.710.240,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	50.432.885,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			219.766.328,00					283.789.973,00	
		Tertaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	50 Satuan Pendidikan	219.766.328,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	283.789.973,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			127.932.518,00					233.011.760,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	127.932.518,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	233.011.760,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			42.145.440,00					62.095.440,00	
		Tertaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	41 Orang	42.145.440,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	62.095.440,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			18.026.300,00					30.964.940,00	
		Tertaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	40 Konten Digital	18.026.300,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	30.964.940,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			35.276.300,00					20.202.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	34 Orang	35.276.300,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	20.202.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			284.804.717,00					438.753.954,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	130 Dokumen	284.804.717,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	438.753.954,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			146.171.570,00					246.222.356,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	146.171.570,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	246.222.356,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			40.495.160,00					70.410.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	125 Komunitas	40.495.160,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	70.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			107.004.543,00					107.000.000,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	107.004.543,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	107.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			90.318.160,00					100.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	103 Satuan Pendidikan	90.318.160,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.448.810.000,00					800.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	2.448.810.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			100.000.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	240 Orang	100.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			2.495.205.000,00					2.495.205.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5100 Paket	2.495.205.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	2.495.205.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah			0,00					500.000.000,00	
		Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	0 Unit	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			875.113.200,00					2.400.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	875.113.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		-	2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			250.000.000,00					2.161.950.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	24 Paket	250.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	2.161.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			126.937.680,00					150.000.000,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	20 Paket	126.937.680,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			11.774.767.374,00			Satuan Pendidikan, Pendidik dan Peserta Didik		10.916.133.039,00	
	-				11.774.767.374,00			Satuan Pendidikan, Pendidik dan Peserta Didik		10.916.133.039,00	
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-		782.608.000,00				-	300.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		189.830.000,00				-	230.000.000,00	
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		49.943.780,00				-	49.980.965,00	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		136.077.140,00				-	136.217.366,00	
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-		358.696.800,00				-	93.683.000,00	
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		298.665.300,00				-	349.087.850,00	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		283.683.768,00				-	290.124.060,00	
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		1.509.916.200,00				-	1.520.000.000,00	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		182.000.000,00				-	183.000.000,00	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		4.469.440.000,00				-	3.935.920.000,00	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		99.934.072,00				-	100.000.000,00	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		24.802.534,00				-	25.000.000,00	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		0,00				-	430.000.000,00	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		0,00				-	300.000.000,00	
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		0,00				-	773.358.578,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2.798.640.000,00				-	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-	547.500.000,00				-	1.156.674.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00				-	500.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	43.029.780,00				-	43.087.220,00	
1.01.02.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			547.500.000,00					1.156.674.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	547.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		-	1.156.674.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0007		Pengadaan Mebel PAUD			358.696.800,00					93.683.000,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	358.696.800,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		-	93.683.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0011		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			4.469.440.000,00					3.935.920.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8135 Peserta Didik	4.469.440.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOS Reguler		-	3.935.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			283.683.768,00					290.124.060,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	283.683.768,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	290.124.060,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			298.665.300,00					349.087.850,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	227 Satuan Pendidikan	298.665.300,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	349.087.850,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0019		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			43.029.780,00					43.087.220,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	43.029.780,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	43.087.220,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0025		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			189.830.000,00					230.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	189.830.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0026		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			136.077.140,00					136.217.366,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	136.077.140,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	136.217.366,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0028		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			0,00					430.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		-	430.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0030		Pembangunan Ruang Kelas Baru			0,00					773.358.578,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		-	773.358.578,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0034		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			24.802.534,00					25.000.000,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta didik	24.802.534,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0037		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			49.943.780,00					49.980.965,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	49.943.780,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	49.980.965,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0039		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			182.000.000,00					183.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	230 Orang	182.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	183.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0041		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.509.916.200,00					1.520.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6080 Paket	1.509.916.200,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	1.520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0045		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			0,00					500.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Unit	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0046		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			782.608.000,00					300.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	50 Paket	782.608.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0047		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			99.934.072,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Pendidikan	222 Satuan Pendidikan	99.934.072,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			0,00					300.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.798.640.000,00					500.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Seding/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	10 Ruang	2.798.640.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4.422.859.226,00			Satuan Pendidikan,Pendidik dan Peserta Didik		4.255.524.915,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	-	1.031.467.500,00			Satuan Pendidikan,Pendidik dan Peserta Didik	-	4.255.524.915,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	99.953.880,00				-	145.550.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	49.981.378,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	262.035.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	99.970.240,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	117.484.962,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	60.000.000,00				-	117.600.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	2.299.880.000,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	24.992.306,00				-	1.984.890.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	0,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	-	0,00				-	300.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	-	0,00				-	225.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	-	150.000.000,00				-	120.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	-	0,00				-	400.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajem	-	49.900.720,00				-	400.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	27.447.280,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	99.758.600,00				-	7.484.915,00	
			Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	-	49.987.360,00				-	100.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			2.299.880.000,00					50.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	890 Peserta Didik	2.299.880.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOS Reguler		-	1.984.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			117.484.962,00					117.600.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14 Orang	117.484.962,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	117.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			99.970.240,00					100.000.000,00	
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	8 Orang	99.970.240,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			49.900.720,00					50.000.000,00	
		Terselaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Satuan Pendidikan	49.900.720,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			27.447.280,00					7.484.915,00	
		Terselaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8 Satuan Pendidikan	27.447.280,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	7.484.915,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			99.758.600,00					100.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8 Orang	99.758.600,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			24.992.306,00					25.000.000,00	
		Terselaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	8 Orang	24.992.306,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		-	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			99.953.880,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	99.953.880,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			49.981.378,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	49.981.378,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0032	Facilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			49.987.360,00					50.000.000,00	
		Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	7 Orang	49.987.360,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			0,00					300.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			0,00					400.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			60.000.000,00					60.000.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	60.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah			262.035.000,00					20.000.000,00	
		Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	262.035.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			150.000.000,00					400.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	3 unit	150.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			1.031.467.500,00					145.550.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	8 Paket	1.031.467.500,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		145.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			0,00					225.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			0,00					120.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			188.717.930,00					193.797.987,00	
		Persentase kurikulum yang diterapkan (%)		100 Persen	188.717.930,00			-		193.797.987,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			188.717.930,00			Kepala Sekolah,Guru,Pengawas Sekolah dan Peserta Didik SD		193.797.987,00	
		-			188.717.930,00			Kepala Sekolah,Guru,Pengawas Sekolah dan Peserta Didik SD		193.797.987,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	188.717.930,00			-		193.797.987,00	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			188.717.930,00					193.797.987,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	188.717.930,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		193.797.987,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1.399.999.069,00					301.643.040,00	
		Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)		99,56 Persen	1.399.999.069,00			-		301.643.040,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.399.999.069,00			Tenaga Pendidik		301.643.040,00	
		-			1.399.999.069,00			Tenaga Pendidik		301.643.040,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	398.999.069,00			-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	1.001.000.000,00			-		201.643.040,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			398.999.069,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	398.999.069,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.001.000.000,00					201.643.040,00	
		Tertaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	1.001.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-		201.643.040,00	DINAS PENDIDIKAN
		RSUD BATARA GURU			165.477.953.004,00					171.587.891.072,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			165.477.953.004,00					171.587.891.072,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			165.477.953.004,00					171.587.891.072,00	
5.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			30.929.381.201,00					31.182.736.590,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsus Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	30.929.381.201,00				-	31.182.736.590,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.929.381.201,00			ASN RSUD Batara Guru		31.182.736.590,00	
		-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	30.929.381.201,00			ASN RSUD Batara Guru	-	31.182.736.590,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.929.381.201,00				-	31.182.736.590,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	441 Orang/bulan	30.929.381.201,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lebani	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	31.182.736.590,00	RSUD BATARA GURU
6.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			134.473.583.177,00					140.330.154.482,00	
			Indeks SPM	100 Persen	134.473.583.177,00				-	140.330.154.482,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5.126.182.879,00			RSUD dan Masyarakat	-	8.400.804.821,00	
		-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	5.126.182.879,00			RSUD dan Masyarakat	-	8.400.804.821,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	2.626.225.879,00				-	2.554.802.096,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	2.499.957.000,00				-	4.551.477.089,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	0,00				-	1.294.525.636,00	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			0,00					1.294.525.636,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lebani	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		-	1.294.525.636,00	RSUD BATARA GURU
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.626.225.879,00					2.554.802.096,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	2.626.225.879,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lebani	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		-	2.554.802.096,00	RSUD BATARA GURU
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			2.499.957.000,00					4.551.477.089,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	2.499.957.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lebani	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		-	4.551.477.089,00	RSUD BATARA GURU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			129.347.400.298,00			RSUD dan Masyarakat		131.929.349.661,00	
		-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		129.347.400.298,00			RSUD dan Masyarakat		131.929.349.661,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-	129.097.401.628,00				-	131.679.349.661,00	
					249.998.670,00				-	250.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			129.097.401.628,00					131.679.349.661,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	129.097.401.628,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lebani	Pendapatan dari BLUD		-	131.679.349.661,00	RSUD BATARA GURU
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			249.998.670,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	249.998.670,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lebani	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	250.000.000,00	RSUD BATARA GURU
7.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			74.988.626,00					75.000.000,00	
			Persentase lembaga/organisasi yang memperoleh sosialisasi	100 Persen	74.988.626,00				-	75.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			74.988.626,00			RSUD dan Masyarakat		75.000.000,00	
		-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	74.988.626,00			RSUD dan Masyarakat	-	75.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			74.988.626,00					75.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	74.988.626,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Desa Lebani	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	75.000.000,00	RSUD BATARA GURU
		PUSKESMAS BELOPA			1.586.818.180,00					1.392.814.180,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.586.818.180,00					1.392.814.180,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.586.818.180,00					1.392.814.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
8.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.532.735.180,00					1.338.731.180,00	
			Indeks SPM								
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1.532.735.180,00			-	-	1.338.731.180,00	
					1.532.735.180,00					1.338.731.180,00	
					1.532.735.180,00					1.338.731.180,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	70.800.000,00			-	-	70.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	765.414.180,00			-	-	765.414.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	50.115.000,00			-	-	50.115.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	215.560.000,00			-	-	21.556.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	22.170.000,00			-	-	22.170.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	40.770.000,00			-	-	40.770.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1.080.000,00			-	-	1.080.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	158.877.000,00			-	-	158.877.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	62.385.000,00			-	-	62.385.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	101.700.000,00			-	-	101.700.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	25.830.000,00			-	-	25.830.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	15.870.000,00			-	-	15.870.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2.164.000,00			-	-	2.164.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			62.385.000,00					62.385.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	62.385.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	62.385.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			70.800.000,00					70.800.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	70.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	70.800.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			15.870.000,00					15.870.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	15.870.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	15.870.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			25.830.000,00					25.830.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	25.830.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	25.830.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			215.560.000,00					21.556.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	215.560.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	21.556.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			22.170.000,00					22.170.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	22.170.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	22.170.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			40.770.000,00					40.770.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	40.770.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	40.770.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			2.164.000,00					2.164.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	2.164.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	2.164.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			765.414.180,00					765.414.180,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	765.414.180,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada EFTP	-	-	765.414.180,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			158.877.000,00					158.877.000,00	
		Tersediannya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	158.877.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	158.877.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.080.000,00					1.080.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.080.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	1.080.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			50.115.000,00					50.115.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	50.115.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	50.115.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			101.700.000,00					101.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	101.700.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	101.700.000,00	PUSKESMAS BELOPA
9.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			54.083.000,00					54.083.000,00	
			Persentase Rumah Tangga Yang Menerapkan PHBS	89 Persen	21.000.000,00			-	-	21.000.000,00	
				-	33.083.000,00			-	-	33.083.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			21.000.000,00			-	-	21.000.000,00	
					21.000.000,00			-	-	21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	21.000.000,00			-	-	21.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			21.000.000,00					21.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	21.000.000,00	PUSKESMAS BELOPA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			33.083.000,00			-	-	33.083.000,00	
					33.083.000,00			-	-	33.083.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	33.083.000,00			-	-	33.083.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			33.083.000,00					33.083.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	1 Dokumen	33.083.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	33.083.000,00	PUSKESMAS BELOPA
		PUSKESMAS LATIMOJONG			1.611.976.582,00					1.674.101.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.611.976.582,00					1.674.101.200,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.611.976.582,00					1.674.101.200,00	
10.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.611.976.582,00					1.674.101.200,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.611.976.582,00			-	-	1.674.101.200,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.611.976.582,00			-	-	1.674.101.200,00	
					1.611.976.582,00			-	-	1.674.101.200,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	56.160.000,00			-	-	56.160.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	717.913.200,00			-	-	717.913.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	67.767.000,00			-	-	67.767.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	181.275.382,00			-	-	243.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	67.840.000,00			-	-	67.840.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	35.020.000,00			-	-	35.020.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	203.427.000,00			-	-	203.427.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	71.924.000,00			-	-	71.924.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	176.930.000,00			-	-	176.930.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	11.220.000,00			-	-	11.220.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	7.500.000,00			-	-	7.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	15.000.000,00			-	-	15.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			71.924.000,00			-	-	71.924.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	71.924.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	71.924.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			56.160.000,00			-	-	56.160.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	844 Orang	56.160.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	56.160.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			15.000.000,00			-	-	15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16 Orang	15.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	15.000.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			11.220.000,00			-	-	11.220.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	194 Orang	11.220.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	11.220.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			181.275.382,00			-	-	243.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	181.275.382,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	243.400.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			67.840.000,00			-	-	67.840.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	67.840.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	67.840.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			35.020.000,00			-	-	35.020.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	35.020.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	35.020.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			717.913.200,00			-	-	717.913.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	717.913.200,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	717.913.200,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			203.427.000,00			-	-	203.427.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	203.427.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	203.427.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			67.767.000,00			-	-	67.767.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	67.767.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	67.767.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			7.500.000,00			-	-	7.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	7.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	7.500.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			176.930.000,00			-	-	176.930.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	12 Laporan	176.930.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	176.930.000,00	PUSKESMAS LATIMOJONG
		PUSKESMAS NOLING			2.288.542.200,00					2.288.542.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.288.542.200,00					2.288.542.200,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.288.542.200,00					2.288.542.200,00	
11.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.230.992.200,00					2.230.992.200,00	
			INDEKS SPM	100 Persen	2.230.992.200,00			-	-	2.230.992.200,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.230.992.200,00			-	-	2.230.992.200,00	
					2.230.992.200,00			-	-	2.230.992.200,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	59.650.000,00			-	-	59.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.431.925.200,00			-	-	1.431.925.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	67.300.000,00			-	-	67.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	248.020.000,00			-	-	248.020.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	15.600.000,00				-	15.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	28.452.000,00				-	28.452.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	618.000,00				-	618.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	155.527.000,00				-	155.527.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	39.600.000,00				-	39.600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	126.100.000,00				-	126.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	29.600.000,00				-	29.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	19.200.000,00				-	19.200.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	9.400.000,00				-	9.400.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			39.600.000,00				-	39.600.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	341 Orang	39.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	39.600.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			59.650.000,00				-	59.650.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2064 Orang	59.650.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	59.650.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			19.200.000,00				-	19.200.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	19.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	19.200.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			29.600.000,00				-	29.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	284 Orang	29.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	29.600.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			248.020.000,00				-	248.020.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	248.020.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	248.020.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15.600.000,00				-	15.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	15.600.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			28.452.000,00				-	28.452.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	28.452.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	28.452.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			9.400.000,00				-	9.400.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1475 Orang	9.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	9.400.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.431.925.200,00				-	1.431.925.200,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.431.925.200,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	1.431.925.200,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			155.527.000,00				-	155.527.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	155.527.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	155.527.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			618.000,00				-	618.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	618.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	618.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			67.300.000,00				-	67.300.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan imunisasi	12 Dokumen	67.300.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	67.300.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			126.100.000,00				-	126.100.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Laporan	126.100.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	126.100.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			0,00				-	0,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS NOLING
12.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			57.550.000,00				-	57.550.000,00	
			Presentase rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 Persen	25.200.000,00				-	25.200.000,00	
			-	-	32.350.000,00				-	32.350.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25.200.000,00				-	25.200.000,00	
					25.200.000,00				-	25.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	25.200.000,00				-	25.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			25.200.000,00				-	25.200.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	25.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	25.200.000,00	PUSKESMAS NOLING
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			32.350.000,00				-	32.350.000,00	
					32.350.000,00				-	32.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	32.350.000,00				-	32.350.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			32.350.000,00				-	32.350.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	32.350.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	32.350.000,00	PUSKESMAS NOLING
		PUSKESMAS BASTEM			1.642.598.200,00				-	1.642.598.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.642.598.200,00				-	1.642.598.200,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.642.598.200,00				-	1.642.598.200,00	
13.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.573.514.200,00				-	1.573.514.200,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.573.514.200,00				-	1.573.514.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.573.514.200,00			-		1.573.514.200,00	
		-			1.573.514.200,00			-		1.573.514.200,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	37.444.000,00			-	-	37.444.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	732.445.200,00			-	-	732.445.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	83.490.000,00			-	-	83.490.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan	-	19.860.000,00			-	-	19.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	264.818.000,00			-	-	264.818.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	14.530.000,00			-	-	14.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	10.120.000,00			-	-	10.120.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1.608.000,00			-	-	1.608.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	149.591.000,00			-	-	149.591.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	72.576.000,00			-	-	72.576.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	24.776.000,00			-	-	24.776.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	100.000.000,00			-	-	100.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	20.240.000,00			-	-	20.240.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	20.112.000,00			-	-	20.112.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes) dan Sekolah	-	13.680.000,00			-	-	13.680.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	8.224.000,00			-	-	8.224.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			72.576.000,00					72.576.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	72.576.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	72.576.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			37.444.000,00					37.444.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	828 Orang	37.444.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	37.444.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			20.112.000,00					20.112.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	20.112.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	20.112.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			20.240.000,00					20.240.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	20.240.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	20.240.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			264.818.000,00					264.818.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25 Dokumen	264.818.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	264.818.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			14.530.000,00					14.530.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	14.530.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	14.530.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			10.120.000,00					10.120.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10.120.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	10.120.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			8.224.000,00					8.224.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	8.224.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	8.224.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			732.445.200,00					732.445.200,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	732.445.200,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	732.445.200,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			149.591.000,00					149.591.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	149.591.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	149.591.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			1.608.000,00					1.608.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	1.608.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	1.608.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan			19.860.000,00					19.860.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutanusiaan	144 Dokumen	19.860.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	19.860.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			83.490.000,00					83.490.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	180 Dokumen	83.490.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	83.490.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			24.776.000,00					24.776.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	12 Laporan	24.776.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	24.776.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			100.000.000,00					100.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	100.000.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes) dan Sekolah			13.680.000,00					13.680.000,00	
		Tertaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes) dan Sekolah	650 Orang	13.680.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	13.680.000,00	PUSKESMAS BASTEM
14.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			69.084.000,00					69.084.000,00	
		Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS		89 %	69.084.000,00			-	-	69.084.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.620.000,00			-		6.620.000,00	
		-			6.620.000,00			-		6.620.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	6.620.000,00				-	6.620.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			6.620.000,00					6.620.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	6.620.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	6.620.000,00	PUSKESMAS BASTEM
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			62.464.000,00				-	62.464.000,00	
					62.464.000,00				-	62.464.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	62.464.000,00				-	62.464.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			62.464.000,00					62.464.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	62.464.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	62.464.000,00	PUSKESMAS BASTEM
		PUSKESMAS WALENRANG			1.743.533.417,00					802.439.909,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.743.533.417,00					802.439.909,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.743.533.417,00					802.439.909,00	
15.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.743.533.417,00					756.499.909,00	
			Indeks SPM								
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Indeks	1.743.533.417,00				-	756.499.909,00	
					1.743.533.417,00				-	756.499.909,00	
					1.743.533.417,00					756.499.909,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	48.800.000,00				-	48.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.059.024.017,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	53.800.000,00				-	71.116.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	199.219.400,00				-	238.820.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	4.800.000,00				-	4.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	118.700.000,00				-	15.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	67.550.000,00				-	877.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	60.840.000,00				-	168.886.909,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	55.800.000,00				-	55.800.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	27.600.000,00				-	104.400.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	14.400.000,00				-	14.400.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	7.200.000,00				-	7.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	25.800.000,00				-	25.800.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			55.800.000,00					55.800.000,00	
		Tertelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	55.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	55.800.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			48.800.000,00					48.800.000,00	
		Tertelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	48.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	48.800.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			25.800.000,00					25.800.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	25.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	25.800.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			14.400.000,00					14.400.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	14.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	14.400.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			199.219.400,00					238.820.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	199.219.400,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	238.820.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			4.800.000,00					4.800.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	4.800.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			118.700.000,00					15.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	118.700.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	15.600.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.059.024.017,00					0,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.059.024.017,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKT		-	0,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			60.840.000,00					168.886.909,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	60.840.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	168.886.909,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			67.550.000,00					877.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	67.550.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	877.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			53.800.000,00					71.116.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	53.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	71.116.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			7.200.000,00					7.200.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	7.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	7.200.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			27.600.000,00					104.400.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	27.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	104.400.000,00	PUSKESMAS WALENRANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
16.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0,00					45.940.000,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	0,00				-	45.940.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00			-		24.340.000,00	
		-			0,00			-		24.340.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	0,00			-		24.340.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			0,00					24.340.000,00	
		Tertindakannya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		24.340.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00			-		21.600.000,00	
		-			0,00			-		21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0,00			-		21.600.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			0,00					21.600.000,00	
		Tertindakannya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		21.600.000,00	PUSKESMAS WALENRANG
		PUSKESMAS WALENRANG TIMUR			1.953.287.787,00					1.953.287.835,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.953.287.787,00					1.953.287.835,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.953.287.787,00					1.953.287.835,00	
17.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.891.437.787,00					1.891.437.835,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.888.037.787,00			-		1.888.037.835,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.891.437.787,00			-		1.891.437.835,00	
		-			1.891.437.787,00			-		1.891.437.835,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	69.650.000,00			-		69.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.147.803.787,00			-		1.147.803.835,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	42.900.000,00			-		42.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	246.620.000,00			-		246.620.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	29.300.000,00			-		29.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	17.287.000,00			-		17.287.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	3.400.000,00			-		3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	142.877.000,00			-		142.877.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	40.000.000,00			-		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Persekitir Menular	-	112.100.000,00			-		112.100.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	25.500.000,00			-		25.500.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	10.600.000,00			-		10.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	3.400.000,00			-		3.400.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			40.000.000,00					40.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	40.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		40.000.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			69.650.000,00					69.650.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	69.650.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		69.650.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.400.000,00					3.400.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	3.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		3.400.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			25.500.000,00					25.500.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	25.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		25.500.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			246.620.000,00					246.620.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	246.620.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		246.620.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			29.300.000,00					29.300.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	29.300.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		29.300.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.287.000,00					17.287.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	17.287.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		17.287.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.147.803.787,00					1.147.803.835,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumentasi Dokumen	1.147.803.787,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-		1.147.803.835,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			142.877.000,00					142.877.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	142.877.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		142.877.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			3.400.000,00					3.400.000,00	
		Tertindakannya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		3.400.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			42.900.000,00					42.900.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	42.900.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		42.900.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			10.600.000,00					10.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	10.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	10.600.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			112.100.000,00				-	112.100.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	112.100.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	112.100.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
18.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			61.850.000,00					61.850.000,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	16.750.000,00				-	16.750.000,00	
					45.100.000,00				-	45.100.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			16.750.000,00			-		16.750.000,00	
					16.750.000,00				-	16.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	16.750.000,00				-	16.750.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			16.750.000,00					16.750.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	16.750.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	16.750.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			45.100.000,00			-		45.100.000,00	
					45.100.000,00			-		45.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	45.100.000,00				-	45.100.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			45.100.000,00					45.100.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	45.100.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	45.100.000,00	PUSKESMAS WALENRANG TIMUR
		PUSKESMAS LAMASI TIMUR			1.643.984.474,00					1.627.784.864,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.643.984.474,00					1.627.784.864,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.643.984.474,00					1.627.784.864,00	
19.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.634.984.474,00					1.618.784.864,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.634.984.474,00				-	1.618.784.864,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.634.984.474,00			-		1.618.784.864,00	
					1.634.984.474,00					1.618.784.864,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	32.926.000,00				-	32.926.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	829.504.474,00				-	829.504.864,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	53.550.000,00				-	53.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	211.120.000,00				-	211.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	8.500.000,00				-	8.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	28.400.000,00				-	28.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1.500.000,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	200.427.000,00				-	200.427.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	65.400.000,00				-	65.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	129.857.000,00				-	129.857.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	21.600.000,00				-	21.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	52.200.000,00				-	36.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			65.400.000,00					65.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	65.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	65.400.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			32.926.000,00					32.926.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	32.926.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	32.926.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			52.200.000,00					36.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	52.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	36.000.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			21.600.000,00					21.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	21.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	21.600.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			211.120.000,00					211.120.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1000 Dokumen	211.120.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	211.120.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.500.000,00					8.500.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	8.500.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			28.400.000,00					28.400.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	28.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	28.400.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			829.504.474,00					829.504.864,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30 Dokumen	829.504.474,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	829.504.864,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			200.427.000,00					200.427.000,00	
		Tersediannya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	200.427.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	200.427.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			1.500.000,00					1.500.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	15 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	1.500.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			53.550.000,00					53.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	30 Dokumen	53.550.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	53.550.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			129.857.000,00				-	129.857.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	30 Laporan	129.857.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	129.857.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
20.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			9.000.000,00				-	9.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	9.000.000,00			-	-	9.000.000,00	
					9.000.000,00				-	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	9.000.000,00				-	9.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			9.000.000,00				-	9.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	9.000.000,00	PUSKESMAS LAMASI TIMUR
		DINAS KESEHATAN			239.182.271.568,90				-	162.477.813.865,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			239.182.271.568,90				-	162.477.813.865,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			239.182.271.568,90				-	162.477.813.865,00	
21.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			85.427.154.496,68				-	85.509.744.883,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah (Angka)	100 Persen	363.057.159,00				-	306.900.000,00	
				-	85.064.097.337,68				-	85.133.344.883,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			99.261.659,00			Masyarakat Kabupaten Luwu	-	99.000.000,00	
					99.261.659,00			Masyarakat Kabupaten Luwu	-	99.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.617.080,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	40.500.000,00				-	40.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.703.920,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.534.000,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.500.000,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.504.659,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	49.902.000,00				-	50.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.500.000,00				-	40.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.500.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	40.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.500.000,00				-	1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.534.000,00				-	1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.534.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.617.080,00				-	1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.617.080,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.703.920,00				-	1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.703.920,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.504.659,00				-	2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.504.659,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49.902.000,00				-	50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	49.902.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			83.623.556.703,00			Masyarakat Kabupaten Luwu	-	83.724.844.883,00	
					83.623.556.703,00			Masyarakat Kabupaten Luwu	-	83.724.844.883,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	3.004.060,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	285.900.000,00				-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	11.000.000,00				-	28.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	55.837.900,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	83.267.814.743,00				-	83.268.844.883,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			83.267.814.743,00				-	83.268.844.883,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4567 Orang/bulan	83.267.814.743,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	83.268.844.883,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			285.900.000,00				-	400.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	285.900.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.000.000,00				-	28.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			3.004.060,00				-	3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.004.060,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			55.837.900,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	55.837.900,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			36.752.500,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		37.400.000,00	
		-			36.752.500,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		37.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	17.000.000,00				-	17.400.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	19.752.500,00				-	20.000.000,00	
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			19.752.500,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	19.752.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			17.000.000,00					17.400.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	17.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			227.043.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		225.000.000,00	
		-			227.043.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	27.040.000,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	50.000.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	150.003.000,00				-	150.000.000,00	
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			27.040.000,00					25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	27.040.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			150.003.000,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	150.003.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			50.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	50.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			494.197.730,68			Masyarakat Kabupaten Luwu		447.500.000,00	
		-			494.197.730,68			Masyarakat Kabupaten Luwu		447.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	36.000.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	25.000.000,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	349.994.575,68				-	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	10.001.819,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	7.584.530,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	10.003.700,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.723.786,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	51.889.320,00				-	50.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.723.786,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.723.786,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			51.889.320,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.889.320,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.001.819,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.001.819,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			10.003.700,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.003.700,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			36.000.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			7.584.530,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.584.530,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.000.000,00					2.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			349.994.575,68					350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	349.994.575,68	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			83.994.000,00					0,00	
		-			83.994.000,00					0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	83.994.000,00				-	0,00	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			83.994.000,00					0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	83.994.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			548.798.904,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		759.000.000,00	
		-			548.798.904,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		759.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	249.998.904,00				-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	298.800.000,00				-	509.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			249.998.904,00					250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	249.998.904,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			298.800.000,00					509.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	298.800.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	509.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			246.950.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		195.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		-			246.950.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		195.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	-	196.930.000,00				-	195.000.000,00	
			Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikmnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	50.020.000,00				-	0,00	
1.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	196.930.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.020.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	50.020.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			66.600.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		22.000.000,00	
		-			66.600.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		22.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	66.600.000,00				-	22.000.000,00	
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			66.600.000,00					22.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	66.600.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
22.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			150.918.718.056,22					73.933.536.782,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	150.853.718.056,22				-	73.367.846.782,00	
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			87.099.243.851,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		9.614.030.315,00	
		-			87.099.243.851,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		9.614.030.315,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	93.812.000,00				-	94.448.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	1.122.540.000,00				-	1.035.990.000,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	178.500.448,00				-	179.053.500,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	1.795.960.000,00				-	500.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	542.250.000,00				-	321.505.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	3.122.245.900,00				-	3.030.024.815,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	-	25.000.000,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	2.114.700.000,00				-	1.646.150.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	61.149.146.000,00				-	1.154.520.000,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1.576.100.760,00				-	1.576.124.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	15.378.988.743,00				-	51.215.000,00	
1.02.02.2.01.0001		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			61.149.146.000,00					1.154.520.000,00	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	61.149.146.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Walenrang Utara Desa Bolong	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		-	1.154.520.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0003		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.795.960.000,00					500.000.000,00	
		Terbanggunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	1.795.960.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0006		Pengembangan Puskesmas			2.114.700.000,00					1.646.150.000,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2.114.700.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	1.646.150.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			542.250.000,00					321.505.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	542.250.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	321.505.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			15.378.988.743,00					51.215.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	15.378.988.743,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	51.215.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.576.100.760,00					1.576.124.000,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Unit	1.576.100.760,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	1.576.124.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1.122.540.000,00					1.035.990.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	1.122.540.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	1.035.990.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			93.812.000,00					94.448.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	110 Unit	93.812.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		-	94.448.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			3.122.245.900,00					3.030.024.815,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3.122.245.900,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		-	3.030.024.815,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0025		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)			25.000.000,00					25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	4 Layanan	25.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Waleleng Barat Desa Ilan Batu 1 Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Desa Lissaga 1 Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Latimojong Desa Pajang 1 Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			178.500.448,00					179.053.500,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	3 Paket	178.500.448,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		-	179.053.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.478.184.205,21			Masyarakat Kabupaten Luwu		63.978.126.467,00	
		-			63.478.184.205,21			Masyarakat Kabupaten Luwu		63.978.126.467,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	99.880.800,00				-	99.774.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	68.743.200,00				-	68.881.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1.090.640.000,00				-	1.089.398.100,00	
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	-	114.810.000,00				-	130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	6.000.000,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	49.533.988.000,00				-	50.039.693.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	10.000.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	35.107.090,00				-	35.107.120,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	14.612.510,00				-	14.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	497.326.144,00				-	497.326.320,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-	20.000.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1.220.613.380,00				-	1.220.613.556,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	25.000.000,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	372.743.600,00				-	372.758.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	491.960.000,00				-	491.960.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	624.600.000,00				-	623.834.245,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	300.000.000,00				-	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	666.057.768,00				-	666.057.915,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	5.562.041.850,00				-	5.562.059.250,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-	149.640.000,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah FKTP yang melaksanakan pengelolaan kesehatan primer	-	10.000.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	67.200.000,00				-	67.200.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	101.830.007,20				-	103.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	5.440.000,00				-	5.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	200.000.000,00				-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	291.747.511,01				-	291.747.511,00	
			Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit dengue	-	10.000.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit zoonosis	-	10.000.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	15.000.000,00				-	7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	832.450.000,00				-	810.900.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	95.687.800,00				-	96.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	10.000.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	5.000.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12.750.000,00				-	12.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasilitas dan Sekolah	-	9.970.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	113.820.000,00				-	113.834.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	21.375.000,00				-	21.375.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	54.175.000,00				-	54.175.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	104.382.750,00				-	104.382.750,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	20.400.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	241.230.000,00				-	250.000.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	300.279.795,00				-	300.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	41.682.000,00				-	41.774.700,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				101.830.007,20					103.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9010 Orang	101.830.007,20	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		103.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				67.200.000,00					67.200.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8944 Orang	67.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		67.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				1.090.640.000,00					1.089.398.100,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8352 Orang	1.090.640.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		1.089.398.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				68.743.200,00					68.881.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39977 Orang	68.743.200,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		68.881.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				99.880.800,00					99.774.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61304 Orang	99.880.800,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		99.774.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				104.382.750,00					104.382.750,00	
		Tertaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	259777 Orang	104.382.750,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		104.382.750,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				54.175.000,00					54.175.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42494 Orang	54.175.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		54.175.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				21.375.000,00					21.375.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88263 Orang	21.375.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		21.375.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				113.820.000,00					113.834.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6348 Orang	113.820.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		113.834.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				12.750.000,00					12.775.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	929 Orang	12.750.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		12.775.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				95.687.800,00					96.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10840 Orang	95.687.800,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		96.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				35.107.090,00					35.107.120,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	35.107.090,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		35.107.120,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				14.612.510,00					14.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	14.612.510,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		14.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				497.326.144,00					497.326.320,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	497.326.144,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		497.326.320,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1.220.613.380,00					1.220.613.556,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1.220.613.380,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		1.220.613.556,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				372.743.600,00					372.758.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	372.743.600,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		372.758.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				25.000.000,00					25.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				491.960.000,00					491.960.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	491.960.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		491.960.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			20.400.000,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	NA Orang	20.400.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			49.533.988.000,00					50.039.693.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	49.533.988.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendanaan Bagi Hasil Pajak Bumi	-		50.039.693.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			300.000.000,00					300.000.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			149.840.000,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit	149.840.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			5.562.041.850,00					5.562.059.250,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	5.562.041.850,00	Kab. Luwu	Lain-lain PAD Yang Sah	-		5.562.059.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			666.057.768,00					666.057.915,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	666.057.768,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		666.057.915,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)			5.440.000,00					5.400.000,00	
		Tertaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	1 Laporan	5.440.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		5.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			6.000.000,00					6.000.000,00	
		Tertaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			241.230.000,00					250.000.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	241.230.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			832.450.000,00					810.900.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1710 Orang	832.450.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		810.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			15.000.000,00					7.500.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	15.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			5.000.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	178 Orang	5.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			114.810.000,00					130.000.000,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	114.810.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			624.600.000,00					623.834.245,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	624.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		623.834.245,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			10.000.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			20.000.000,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0051	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit dengue			10.000.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit dengue	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit dengue	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0052	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit Zoonosis			10.000.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit Zoonosis	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit zoonosis	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			300.279.795,00					300.000.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	300.279.795,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja			41.682.000,00					41.774.700,00	
		Tertaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	41.682.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		41.774.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			10.000.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	NA Orang	10.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			200.000.000,00					200.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			291.747.511,01					291.747.511,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	291.747.511,01	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-		291.747.511,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0058	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Primer			10.000.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Kesehatan Primer di FKTP	Jumlah FKTP yang melaksanakan pengelolaan kesehatan primer	22 Unit	10.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			9.970.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	35194 Orang	9.970.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			170.690.000,01			Masyarakat Kabupaten Luwu		170.690.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	170.690.000,01			Masyarakat Kabupaten Luwu	-	170.690.000,00	
					170.690.000,01					170.690.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			170.690.000,01					170.690.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	170.690.000,01	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	170.690.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			170.600.000,00			-		170.690.000,00	
		-			170.600.000,00			-		170.690.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-	170.600.000,00				-	170.690.000,00	
					170.600.000,00					170.690.000,00	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			170.600.000,00					170.690.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	170.600.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	170.690.000,00	DINAS KESEHATAN
23.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			2.173.175.600,00					2.428.402.200,00	
		Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan (%)	81,5 Persen		2.173.175.600,00				-	2.428.402.200,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			45.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		45.000.000,00	
		-			45.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	20.000.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	25.000.000,00				-	25.000.000,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			25.000.000,00					25.000.000,00	
		Tertaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			20.000.000,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			869.675.600,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		725.941.200,00	
		-			869.675.600,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		725.941.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	629.675.600,00				-	725.941.200,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	240.000.000,00				-	0,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			629.675.600,00					725.941.200,00	
		Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	629.675.600,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		-	725.941.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			240.000.000,00					0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	240.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.258.500.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		1.657.461.000,00	
		-			1.258.500.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		1.657.461.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-	1.258.500.000,00				-	1.657.461.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.258.500.000,00					1.657.461.000,00	
		Tertaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	171 Orang	1.258.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		-	1.657.461.000,00	DINAS KESEHATAN
24.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			481.246.616,00					424.130.000,00	
		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	100 Persen		481.246.616,00				-	424.130.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			192.780.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		132.540.804,00	
		-			192.780.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		132.540.804,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	192.780.000,00				-	132.540.804,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			192.780.000,00					132.540.804,00	
		Tertaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	192.780.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		-	132.540.804,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			1.000.000,00			-		1.000.000,00	
		-			1.000.000,00			-		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	1.000.000,00				-	1.000.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			1.000.000,00					1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		-	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			10.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		10.000.000,00	
		-			10.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	10.000.000,00				-	10.000.000,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			10.000.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			277.466.616,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		280.589.196,00	
		-			277.466.616,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		280.589.196,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-	277.466.616,00				-	280.589.196,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			277.466.616,00					280.589.196,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit	277.466.616,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		-	280.589.196,00	DINAS KESEHATAN
25.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			181.976.800,00					182.000.000,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	87 %	181.976.800,00				-	182.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		150.000.000,00	
		-			150.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	150.000.000,00				-	150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			150.000.000,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.976.800,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		8.000.000,00	
		-			7.976.800,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	7.976.800,00				-	8.000.000,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			7.976.800,00					8.000.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	7.976.800,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		24.000.000,00	
		-			24.000.000,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	24.000.000,00				-	24.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			24.000.000,00					24.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Luwu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		-	24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN			1.808.105.124,00					1.808.105.124,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.808.105.124,00					1.808.105.124,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.808.105.124,00					1.808.105.124,00	
26.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.760.660.124,00					1.760.660.124,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.760.660.124,00				-	1.760.660.124,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.760.660.124,00					1.760.660.124,00	
		-			1.760.660.124,00				-	1.760.660.124,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	54.344.000,00				-	54.344.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	968.726.124,00				-	968.726.124,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	80.650.000,00				-	80.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	225.120.000,00				-	225.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	13.800.000,00				-	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	34.900.000,00				-	34.900.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	3.800.000,00				-	3.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	168.773.000,00				-	168.773.000,00	
			Jumlah ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	71.450.000,00				-	71.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	101.297.000,00				-	101.297.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	22.600.000,00				-	22.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	5.700.000,00				-	5.700.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	9.500.000,00				-	9.500.000,00	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			71.450.000,00					71.450.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	71.450.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		71.450.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			54.344.000,00					54.344.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	54.344.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		54.344.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			5.700.000,00					5.700.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	5.700.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		5.700.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			22.600.000,00					22.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	22.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		22.600.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			225.120.000,00					225.120.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen	225.120.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		225.120.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			13.800.000,00					13.800.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	13.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		13.800.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan			34.900.000,00					34.900.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	34.900.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		34.900.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			9.500.000,00					9.500.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	9.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		9.500.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			968.726.124,00					968.726.124,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	968.726.124,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKT	-		968.726.124,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas			168.773.000,00					168.773.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	168.773.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		168.773.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			3.800.000,00					3.800.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		3.800.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0048		Pengelolaan Layanan Imunisasi			80.650.000,00					80.650.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	15 Dokumen	80.650.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		80.650.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.02.2.02.0056		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			101.297.000,00					101.297.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	20 Laporan	101.297.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		101.297.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
27.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			47.445.000,00					47.445.000,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	47.445.000,00				-	47.445.000,00	
1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			18.395.000,00				-	18.395.000,00	
		-			18.395.000,00				-	18.395.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	18.395.000,00				-	18.395.000,00	
1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			18.395.000,00					18.395.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	18.395.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		18.395.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29.050.000,00				-	29.050.000,00	
		-			29.050.000,00				-	29.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	29.050.000,00				-	29.050.000,00	
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			29.050.000,00					29.050.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	29.050.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		29.050.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN
		PUSKESMAS LAROMPONG			1.941.658.800,00					1.941.618.800,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.941.658.800,00					1.941.618.800,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.941.658.800,00					1.941.618.800,00	
28.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.917.658.800,00					1.930.018.800,00	
			Indeks SPM	100 Persen	1.917.658.800,00				-	1.930.018.800,00	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.917.658.800,00				-	1.930.018.800,00	
		-			1.917.658.800,00				-	1.930.018.800,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	66.550.000,00				-	66.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.086.874.800,00				-	1.086.874.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	87.150.000,00				-	84.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	256.452.000,00				-	256.452.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	27.300.000,00				-	23.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	18.600.000,00				-	20.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1.200.000,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	184.668.000,00				-	195.968.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	38.400.000,00				-	43.860.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	98.814.000,00				-	98.814.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	28.800.000,00				-	28.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	11.650.000,00				-	11.650.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	11.200.000,00				-	11.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			38.400.000,00					43.860.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	38.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	43.860.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			66.550.000,00					66.550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	66.550.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	66.550.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			11.650.000,00					11.650.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	54 Orang	11.650.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	11.650.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			28.800.000,00					28.800.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55 Orang	28.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	28.800.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			256.452.000,00					256.452.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	468 Dokumen	256.452.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	256.452.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			27.300.000,00					23.150.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	350 Dokumen	27.300.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	23.150.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			18.600.000,00					20.550.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	250 Dokumen	18.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	20.550.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			11.200.000,00					11.200.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	280 Orang	11.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	11.200.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.086.874.800,00					1.086.874.800,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23 Dokumen	1.086.874.800,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	1.086.874.800,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			184.668.000,00					195.968.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	650 Dokumen	184.668.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	195.968.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			1.200.000,00					1.200.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	20 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	1.200.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			87.150.000,00					84.950.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	750 Dokumen	87.150.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	84.950.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			98.814.000,00					98.814.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	400 Laporan	98.814.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	98.814.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
29.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			24.000.000,00					19.600.000,00	
			Presentase Rumah Tangga Yang Menerapkan PHBS	89 Persen%	24.000.000,00				-	19.600.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.000.000,00					19.600.000,00	
		-			24.000.000,00				-	19.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	24.000.000,00				-	19.600.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			24.000.000,00					19.600.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	19.600.000,00	PUSKESMAS LAROMPONG
		PUSKESMAS SULI			1.861.108.372,00					1.861.108.372,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.861.108.372,00					1.861.108.372,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.861.108.372,00					1.861.108.372,00	
30.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.811.894.372,00					1.811.894.372,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.811.894.372,00				-	1.811.894.372,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.811.894.372,00				-	1.811.894.372,00	
		-			1.811.894.372,00				-	1.811.894.372,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	43.078.000,00				-	43.078.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.050.771.372,00				-	1.050.771.372,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	50.370.000,00				-	50.370.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	217.060.000,00				-	217.060.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	11.370.000,00				-	11.370.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	30.070.000,00				-	30.070.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2.220.000,00				-	2.220.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	158.233.000,00				-	158.233.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	85.520.000,00				-	85.520.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	118.832.000,00				-	118.832.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	25.530.000,00				-	25.530.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	13.320.000,00				-	13.320.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	5.520.000,00				-	5.520.000,00	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			85.520.000,00					85.520.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	85.520.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	85.520.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			43.078.000,00					43.078.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	43.078.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	43.078.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			13.320.000,00					13.320.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang	13.320.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	13.320.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			25.530.000,00					25.530.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Pasien Orang	25.530.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	25.530.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			217.060.000,00					217.060.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Bulan Dokumen	217.060.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	217.060.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			11.370.000,00					11.370.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	11.370.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	11.370.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan			30.070.000,00					30.070.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	30.070.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	30.070.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			5.520.000,00					5.520.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	5.520.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	5.520.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.050.771.372,00					1.050.771.372,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	1.050.771.372,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	1.050.771.372,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas			158.233.000,00					158.233.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	158.233.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	158.233.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.220.000,00					2.220.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.220.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	2.220.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0048		Pengelolaan Layanan Imunisasi			50.370.000,00					50.370.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Bulan Dokumen	50.370.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	50.370.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.02.2.02.0057		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			118.832.000,00					118.832.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	12 Bulan Laporan	118.832.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	118.832.000,00	PUSKESMAS SULI
31.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			49.214.000,00					49.214.000,00	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	87 %	49.214.000,00			-	-	49.214.000,00	
		-			14.564.000,00			-	-	14.564.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	14.564.000,00			-	-	14.564.000,00	
1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			14.564.000,00					14.564.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	14.564.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	14.564.000,00	PUSKESMAS SULI
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			34.650.000,00					34.650.000,00	
		-			34.650.000,00			-	-	34.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	34.650.000,00			-	-	34.650.000,00	
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			34.650.000,00					34.650.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	34.650.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-	34.650.000,00	PUSKESMAS SULI
		PUSKESMAS SULI BARAT			1.947.844.796,00					1.947.844.796,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.947.844.796,00					1.947.844.796,00	
		1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.947.844.796,00					1.947.844.796,00	
32.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.904.470.796,00					1.904.470.796,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.904.470.796,00			-	-	1.904.470.796,00	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.904.470.796,00			-	-	1.904.470.796,00	
		-			1.904.470.796,00			-	-	1.904.470.796,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	52.200.000,00			-	-	52.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.100.267.796,00			-	-	1.100.267.796,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	76.850.000,00			-	-	76.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	257.728.000,00			-	-	257.728.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	22.000.000,00			-	-	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	27.443.000,00				-	27.443.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1.800.000,00				-	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	162.132.000,00				-	162.132.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	36.600.000,00				-	36.600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	114.050.000,00				-	114.050.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	25.600.000,00				-	25.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	9.000.000,00				-	9.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	18.800.000,00				-	18.800.000,00	
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			36.600.000,00					36.600.000,00	
		Terketolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	36.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	36.600.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			52.200.000,00					52.200.000,00	
		Terketolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1118 Orang	52.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	52.200.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			9.000.000,00					9.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	24 Orang	9.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	9.000.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			25.600.000,00					25.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	25.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	25.600.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			257.728.000,00					257.728.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	257.728.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	257.728.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			22.000.000,00					22.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	22.000.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan			27.443.000,00					27.443.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	27.443.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	27.443.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			18.800.000,00					18.800.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	24 Orang	18.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	18.800.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.100.267.796,00					1.100.267.796,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.100.267.796,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	1.100.267.796,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas			162.132.000,00					162.132.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	162.132.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	162.132.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			1.800.000,00					1.800.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	1.800.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0048		Pengelolaan Layanan Imunisasi			76.850.000,00					76.850.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	76.850.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	76.850.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.02.2.02.0056		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			114.050.000,00					114.050.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	114.050.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	114.050.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
33. 1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			43.374.000,00					43.374.000,00	
			Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 Persen	21.214.000,00				-	21.214.000,00	
					22.160.000,00				-	22.160.000,00	
1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			21.214.000,00				-	21.214.000,00	
		-			21.214.000,00				-	21.214.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	21.214.000,00				-	21.214.000,00	
1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			21.214.000,00					21.214.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	21.214.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	21.214.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			22.160.000,00				-	22.160.000,00	
		-			22.160.000,00				-	22.160.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	22.160.000,00				-	22.160.000,00	
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			22.160.000,00					22.160.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	22.160.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	22.160.000,00	PUSKESMAS SULI BARAT
		PUSKESMAS BELOPA UTARA			1.646.534.272,00					1.646.534.272,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.646.534.272,00					1.646.534.272,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.646.534.272,00					1.646.534.272,00	
34. 1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.581.330.272,00					1.581.330.272,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.581.330.272,00				-	1.581.330.272,00	
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.581.330.272,00				-	1.581.330.272,00	
		-			1.581.330.272,00				-	1.581.330.272,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	69.450.000,00				-	69.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	802.939.272,00				-	802.939.272,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	39.750.000,00				-	39.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	218.620.000,00				-	218.620.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	21.000.000,00				-	21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	40.837.000,00				-	40.837.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1.200.000,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	141.223.000,00				-	141.223.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	80.561.000,00				-	80.561.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	47.850.000,00				-	47.850.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	57.750.000,00				-	57.750.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	31.200.000,00				-	31.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	22.500.000,00				-	22.500.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	6.450.000,00				-	6.450.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			80.561.000,00					80.561.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	447 Orang	80.561.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		80.561.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			69.450.000,00					69.450.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3469 Orang	69.450.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		69.450.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			22.500.000,00					22.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	22.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		22.500.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			31.200.000,00					31.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	308 Orang	31.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		31.200.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			218.620.000,00					218.620.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	218.620.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		218.620.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			21.000.000,00					21.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		21.000.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			40.837.000,00					40.837.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	40.837.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		40.837.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			6.450.000,00					6.450.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	6.450.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		6.450.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			802.939.272,00					802.939.272,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 tahun Dokumen	802.939.272,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-		802.939.272,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			141.223.000,00					141.223.000,00	
		Tersediannya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	141.223.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		141.223.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			1.200.000,00					1.200.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		1.200.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			39.750.000,00					39.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	39.750.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		39.750.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			47.850.000,00					47.850.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	47.850.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		47.850.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			57.750.000,00					57.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	57.750.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		57.750.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
35.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			65.204.000,00					65.204.000,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	65.204.000,00				-	65.204.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.650.000,00			-		4.650.000,00	
		-			4.650.000,00			-		4.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	4.650.000,00			-		4.650.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			4.650.000,00					4.650.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	4.650.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		4.650.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			60.554.000,00			-		60.554.000,00	
		-			60.554.000,00			-		60.554.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	-	60.554.000,00			-		60.554.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)			60.554.000,00					60.554.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	1 Dokumen	60.554.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		60.554.000,00	PUSKESMAS BELOPA UTARA
		PUSKESMAS BAJO			1.981.821.020,00					1.246.108.622,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.981.821.020,00					1.246.108.622,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.981.821.020,00					1.246.108.622,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
36.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.914.081.020,00					1.246.108.622,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.914.081.020,00				-	1.246.108.622,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.914.081.020,00			-		1.246.108.622,00	
					1.914.081.020,00			-		1.246.108.622,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	25.500.000,00			-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.132.826.020,00			-		1.246.108.622,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	53.550.000,00			-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	255.820.000,00			-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	26.400.000,00			-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	31.720.000,00			-		0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	728.000,00			-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	148.287.000,00			-		0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	72.600.000,00			-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	27.750.000,00			-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	69.600.000,00			-		0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	33.300.000,00			-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	27.000.000,00			-		0,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	9.000.000,00			-		0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			72.600.000,00					0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	900 Orang	72.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			25.500.000,00					0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12500 Orang	25.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			27.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang	27.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			33.300.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	368 Orang	33.300.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			255.820.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	255.820.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			26.400.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	26.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			31.720.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	31.720.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			9.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	9.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.132.826.020,00					1.246.108.622,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.132.826.020,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada EFTP	-		1.246.108.622,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			148.287.000,00					0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	148.287.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			728.000,00					0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	728.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			53.550.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	53.550.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			27.750.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	27.750.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			69.600.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	69.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
37.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			67.740.000,00					0,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	67.740.000,00					0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			41.040.000,00			-		0,00	
					41.040.000,00			-		0,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	41.040.000,00			-		0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			41.040.000,00					0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	41.040.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS BAJO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26.700.000,00			-		0,00	
					26.700.000,00			-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	-	26.700.000,00				-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)			26.700.000,00					0,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	1 Dokumen	26.700.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS BAJO
		PUSKESMAS BAJO BARAT			1.823.627.200,00					1.823.627.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.823.627.200,00					1.823.627.200,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.823.627.200,00					1.823.627.200,00	
38.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.778.470.200,00					1.778.470.200,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.778.470.200,00				-	1.778.470.200,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.778.470.200,00				-	1.778.470.200,00	
					1.778.470.200,00				-	1.778.470.200,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	60.400.000,00				-	60.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	995.485.200,00				-	995.485.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	49.650.000,00				-	49.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	228.620.000,00				-	228.620.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	11.900.000,00				-	11.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	42.450.000,00				-	42.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1.912.000,00				-	1.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	167.273.000,00				-	167.273.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	61.980.000,00				-	61.980.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	119.600.000,00				-	119.600.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	18.200.000,00				-	18.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	21.000.000,00				-	21.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			61.980.000,00					61.980.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	61.980.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	61.980.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			60.400.000,00					60.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2196 Orang	60.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	60.400.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			21.000.000,00					21.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	21.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	21.000.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			18.200.000,00					18.200.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	263 Orang	18.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	18.200.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			228.620.000,00					228.620.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	228.620.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	228.620.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			11.900.000,00					11.900.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.900.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	11.900.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			42.450.000,00					42.450.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	42.450.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	42.450.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			995.485.200,00					995.485.200,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	995.485.200,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada EKTIP		-	995.485.200,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			167.273.000,00					167.273.000,00	
		Tersediannya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	167.273.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	167.273.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			1.912.000,00					1.912.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1.912.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	1.912.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			49.650.000,00					49.650.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	49.650.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	49.650.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			119.600.000,00					119.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	12 Laporan	119.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	119.600.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
39.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			45.157.000,00					45.157.000,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	45.157.000,00				-	45.157.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			13.154.000,00				-	13.154.000,00	
		-			13.154.000,00				-	13.154.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	13.154.000,00				-	13.154.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			13.154.000,00					13.154.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	13.154.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	13.154.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			32.003.000,00				-	32.003.000,00	
		-			32.003.000,00				-	32.003.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	-	32.003.000,00				-	32.003.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)			32.003.000,00					32.003.000,00	
		Tertindakannya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	12 Dokumen	32.003.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	32.003.000,00	PUSKESMAS BAJO BARAT
		PUSKESMAS KAMANRE			1.563.481.410,00					1.417.866.460,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.563.481.410,00					1.417.866.460,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.563.481.410,00					1.417.866.460,00	
40.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.489.779.410,00					1.344.164.460,00	
			Indeks SPM		1.489.779.410,00				-	1.344.164.460,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Indeks	1.489.779.410,00			-	-	1.344.164.460,00	
					1.489.779.410,00			-		1.344.164.460,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	45.900.000,00			-	-	45.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	742.301.410,00			-	-	742.301.410,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	56.490.000,00			-	-	56.490.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	236.020.000,00			-	-	236.020.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	17.850.000,00			-	-	17.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	26.790.000,00			-	-	26.790.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2.050.000,00			-	-	2.050,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	143.567.000,00			-	-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	70.061.000,00			-	-	70.061.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	55.000.000,00			-	-	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	58.050.000,00			-	-	58.050.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	23.900.000,00			-	-	23.900.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	7.350.000,00			-	-	7.350.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	4.450.000,00			-	-	4.450.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			70.061.000,00					70.061.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 Orang	70.061.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	70.061.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			45.900.000,00					45.900.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1742 Orang	45.900.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	45.900.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.350.000,00					7.350.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	41 Orang	7.350.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	7.350.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			23.900.000,00					23.900.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	284 Orang	23.900.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	23.900.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			236.020.000,00					236.020.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen Dokumen	236.020.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	236.020.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			17.850.000,00					17.850.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	17.850.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	17.850.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			26.790.000,00					26.790.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen Dokumen	26.790.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	26.790.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			4.450.000,00					4.450.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	41 Orang	4.450.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	4.450.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			742.301.410,00					742.301.410,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	742.301.410,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	742.301.410,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			143.567.000,00					0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	143.567.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.050.000,00					2.050,00	
		Tertindakannya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.050.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	2.050,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			56.490.000,00					56.490.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	56.490.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	56.490.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			55.000.000,00					55.000.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	55.000.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			58.050.000,00					58.050.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	58.050.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	58.050.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
41.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			73.702.000,00					73.702.000,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	73.702.000,00				-	73.702.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.860.000,00			-	-	24.860.000,00	
					24.860.000,00			-		24.860.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	24.860.000,00				-	24.860.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			24.860.000,00					24.860.000,00	
		Tertindakannya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	24.860.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	24.860.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			48.842.000,00				-	48.842.000,00	
					48.842.000,00				-	48.842.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	48.842.000,00				-	48.842.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			48.842.000,00					48.842.000,00	
		Tertindakannya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	48.842.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	48.842.000,00	PUSKESMAS KAMANRE
		PUSKESMAS PONRANG SELATAN			2.229.257.066,00					2.229.257.066,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.229.257.066,00					2.229.257.066,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.229.257.066,00					2.229.257.066,00	
	42. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.182.360.066,00					2.182.360.066,00	
			Indeks SPM		2.182.360.066,00					2.182.360.066,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	2.182.360.066,00				-	2.182.360.066,00	
					2.182.360.066,00				-	2.182.360.066,00	
					2.182.360.066,00					2.182.360.066,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	53.500.000,00				-	53.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.360.091.066,00				-	1.360.091.066,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	60.000.000,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	250.320.000,00				-	250.320.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	8.300.000,00				-	8.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	32.000.000,00				-	32.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	4.000.000,00				-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	156.773.000,00				-	156.773.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	82.626.000,00				-	82.626.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	111.550.000,00				-	111.550.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	35.200.000,00				-	35.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12.000.000,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	16.000.000,00				-	16.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			82.626.000,00					82.626.000,00	
		Tertelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	82.626.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	82.626.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			53.500.000,00					53.500.000,00	
		Tertelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3764 Orang	53.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	53.500.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.000.000,00					12.000.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang	12.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	12.000.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			35.200.000,00					35.200.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	526 Orang	35.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	35.200.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			250.320.000,00					250.320.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	250.320.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	250.320.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.300.000,00					8.300.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	8.300.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	8.300.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			32.000.000,00					32.000.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	32.000.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			16.000.000,00					16.000.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	16.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	16.000.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.360.091.066,00					1.360.091.066,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.360.091.066,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	1.360.091.066,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			156.773.000,00					156.773.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	156.773.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	156.773.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			4.000.000,00					4.000.000,00	
		Tertindakannya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	4.000.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			60.000.000,00					60.000.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	60.000.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			111.550.000,00					111.550.000,00	
		Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	111.550.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	111.550.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
43.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			46.897.000,00					46.897.000,00	
			Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 Persen	12.200.000,00				-	12.200.000,00	
			-	-	34.697.000,00				-	34.697.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			12.200.000,00				-	12.200.000,00	
			-	-	12.200.000,00				-	12.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	12.200.000,00				-	12.200.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12.200.000,00					12.200.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	12.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	12.200.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			34.697.000,00				-	34.697.000,00	
		-	-	-	34.697.000,00				-	34.697.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	34.697.000,00				-	34.697.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)			34.697.000,00					34.697.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKRM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	34.697.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	34.697.000,00	PUSKESMAS PONRANG SELATAN
		PUSKESMAS PONRANG			2.446.396.173,00					0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.446.396.173,00					0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.446.396.173,00					0,00	
44.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.426.698.173,00					0,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	2.426.698.173,00				-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.426.698.173,00				-	0,00	
		-	-	-	2.426.698.173,00				-	0,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	91.838.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.612.174.173,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	70.861.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	199.920.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	20.700.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	33.980.000,00				-	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	600.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	158.129.000,00				-	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	62.400.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Perakit Tidak Menular	-	134.138.000,00				-	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	24.078.000,00				-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	9.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	8.880.000,00				-	0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			62.400.000,00					0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48 Orang	62.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			91.838.000,00					0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1400 Orang	91.838.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			9.000.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	9.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			24.078.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1700 Orang	24.078.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			199.920.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	199.920.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			20.700.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	20.700.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			33.980.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	33.980.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			8.880.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	8.880.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.612.174.173,00					0,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	1.612.174.173,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			158.129.000,00					0,00	
		Tersediannya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	158.129.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			600.000,00					0,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			70.861.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	70.861.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			134.138.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	12 Laporan	134.138.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS PONRANG
45.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			19.698.000,00					0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	19.698.000,00			-	-	0,00	
		-			19.698.000,00			-	-	0,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	19.698.000,00			-	-	0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			19.698.000,00					0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	19.698.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS PONRANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00			-		0,00	
		-			0,00			-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0,00			-	-	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			0,00					0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		0,00	PUSKESMAS PONRANG
		PUSKESMAS BUA			3.112.424.648,00					3.112.424.648,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.112.424.648,00					3.112.424.648,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.112.424.648,00					3.112.424.648,00	
46.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.057.324.648,00					3.057.324.648,00	
			Indeks SPM	100 Persen	3.057.324.648,00					3.057.324.648,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.057.324.648,00			-		3.057.324.648,00	
		-			3.057.324.648,00			-		3.057.324.648,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	43.850.000,00			-		43.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	2.256.447.648,00			-		2.256.447.648,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	63.500.000,00			-		63.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	278.220.000,00			-		278.220.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	18.400.000,00			-		18.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	38.500.000,00			-		38.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2.600.000,00			-		2.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	154.997.000,00			-		154.997.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	43.160.000,00			-		43.160.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	45.000.000,00			-		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	81.900.000,00			-		81.900.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	26.400.000,00			-		26.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	4.350.000,00			-		4.350.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			43.160.000,00					43.160.000,00	
		Terketolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	43.160.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		43.160.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			43.850.000,00					43.850.000,00	
		Terketolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	43.850.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		43.850.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			4.350.000,00					4.350.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Orang	4.350.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		4.350.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			26.400.000,00					26.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	26.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		26.400.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			278.220.000,00					278.220.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	278.220.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		278.220.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			18.400.000,00					18.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	18.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		18.400.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			38.500.000,00					38.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	38.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		38.500.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			2.256.447.648,00					2.256.447.648,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2.256.447.648,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-		2.256.447.648,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			154.997.000,00					154.997.000,00	
		Tersediannya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	154.997.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		154.997.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.600.000,00					2.600.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		2.600.000,00	PUSKESMAS BUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			63.500.000,00					63.500.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	63.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	63.500.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			45.000.000,00					45.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	45.000.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			81.900.000,00					81.900.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	81.900.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	81.900.000,00	PUSKESMAS BUA
47.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			55.100.000,00					55.100.000,00	
			Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan PHBS	89 Persen	18.900.000,00				-	18.900.000,00	
				-	36.200.000,00				-	36.200.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			18.900.000,00			-	-	18.900.000,00	
					18.900.000,00			-	-	18.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	18.900.000,00			-	-	18.900.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			18.900.000,00					18.900.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	18.900.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	18.900.000,00	PUSKESMAS BUA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			36.200.000,00			-	-	36.200.000,00	
					36.200.000,00			-	-	36.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	36.200.000,00			-	-	36.200.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			36.200.000,00					36.200.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	36.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	36.200.000,00	PUSKESMAS BUA
		PUSKESMAS BASTEM UTARA			1.754.759.291,00					1.754.759.291,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.754.759.291,00					1.754.759.291,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.754.759.291,00					1.754.759.291,00	
48.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.706.393.291,00					1.706.393.291,00	
			Indeks spm	100 persen	1.663.193.291,00			-	-	1.663.193.291,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.706.393.291,00			-	-	1.706.393.291,00	
					1.706.393.291,00					1.706.393.291,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	65.350.000,00			-	-	65.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	851.245.200,00			-	-	851.245.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	60.894.000,00			-	-	60.894.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	243.128.000,00			-	-	243.128.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	13.500.000,00			-	-	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	21.600.000,00			-	-	21.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	21.600.000,00			-	-	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	159.571.091,00			-	-	159.571.091,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	59.400.000,00			-	-	59.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	161.505.000,00			-	-	161.505.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	21.600.000,00			-	-	21.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	27.000.000,00			-	-	27.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			59.400.000,00					59.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	59.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	59.400.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			65.350.000,00					65.350.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	65.350.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	65.350.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			27.000.000,00					27.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	27.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	27.000.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			21.600.000,00					21.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	21.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	21.600.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			243.128.000,00					243.128.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50 Dokumen	243.128.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	243.128.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			13.500.000,00					13.500.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	13.500.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			21.600.000,00					21.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	21.600.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			851.245.200,00					851.245.200,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	851.245.200,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	851.245.200,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			159.571.091,00					159.571.091,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	50 Dokumen	159.571.091,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	159.571.091,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			21.600.000,00					21.600.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	30 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	21.600.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			60.894.000,00					60.894.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	20 Dokumen	60.894.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	60.894.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			161.505.000,00					161.505.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	200 Laporan	161.505.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	161.505.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
49.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			48.366.000,00					48.366.000,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	87 %	48.366.000,00				-	48.366.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			33.818.000,00				-	33.818.000,00	
					33.818.000,00				-	33.818.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	33.818.000,00				-	33.818.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			33.818.000,00					33.818.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	40 Dokumen	33.818.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	33.818.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			14.548.000,00				-	14.548.000,00	
					14.548.000,00				-	14.548.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	14.548.000,00				-	14.548.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			14.548.000,00					14.548.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen	14.548.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	14.548.000,00	PUSKESMAS BASTEM UTARA
		PUSKESMAS WALENRANG UTARA			1.783.310.684,00					1.783.311.684,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.783.310.684,00					1.783.311.684,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.783.310.684,00					1.783.311.684,00	
50.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.739.310.684,00					1.739.311.684,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	1.739.310.684,00				-	1.739.311.684,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.739.310.684,00				-	1.739.311.684,00	
					1.739.310.684,00					1.739.311.684,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	52.200.000,00				-	52.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	933.255.684,00				-	933.256.684,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	69.350.000,00				-	69.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	213.335.000,00				-	213.335.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	9.100.000,00				-	9.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	52.293.000,00				-	52.293.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	4.000.000,00				-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	155.927.000,00				-	155.927.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	95.000.000,00				-	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	106.550.000,00				-	106.550.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	29.700.000,00				-	29.700.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	6.600.000,00				-	6.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12.000.000,00				-	12.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			95.000.000,00					95.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35 Orang	95.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	95.000.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			52.200.000,00					52.200.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	52.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	52.200.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.000.000,00					12.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	12.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	12.000.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			29.700.000,00					29.700.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	29.700.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	29.700.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			213.335.000,00					213.335.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	213.335.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	213.335.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			9.100.000,00					9.100.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.100.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	9.100.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			52.293.000,00					52.293.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	52.293.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	52.293.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			933.255.684,00					933.256.684,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	933.255.684,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	933.256.684,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			155.927.000,00					155.927.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	155.927.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	155.927.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			4.000.000,00					4.000.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	4.000.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			69.350.000,00					69.350.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	69.350.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	69.350.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			6.600.000,00					6.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	35 Orang	6.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	6.600.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			106.550.000,00					106.550.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	1 Laporan	106.550.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	106.550.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
51.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			44.000.000,00					44.000.000,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	44.000.000,00				-	44.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			44.000.000,00				-	44.000.000,00	
		-			44.000.000,00				-	44.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	44.000.000,00				-	44.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			44.000.000,00					44.000.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	44.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	44.000.000,00	PUSKESMAS WALENRANG UTARA
		PUSKESMAS WALENRANG BARAT			2.058.602.055,00					2.058.602.200,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.058.602.055,00					2.058.602.200,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.058.602.055,00					2.058.602.200,00	
52.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.006.016.055,00					2.006.016.200,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	2.006.016.055,00				-	2.006.016.200,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.006.016.055,00				-	2.006.016.200,00	
		-			2.006.016.055,00				-	2.006.016.200,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	45.000.000,00				-	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.103.991.055,00				-	1.103.991.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	81.000.000,00				-	81.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	233.860.000,00				-	233.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	21.500.000,00				-	21.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	28.000.000,00				-	28.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	500.000,00				-	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	161.140.000,00				-	161.140.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	85.625.000,00				-	85.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	184.400.000,00				-	184.400.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	34.250.000,00				-	34.250.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	14.000.000,00				-	14.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12.750.000,00				-	12.750.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			85.625.000,00					85.625.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	85.625.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	85.625.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			45.000.000,00					45.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1147 Orang	45.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	45.000.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			12.750.000,00					12.750.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	12.750.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	12.750.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			34.250.000,00					34.250.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	34.250.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	34.250.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			233.860.000,00					233.860.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	233.860.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	233.860.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			21.500.000,00					21.500.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	21.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	21.500.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			28.000.000,00					28.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	28.000.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.103.991.055,00					1.103.991.200,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.103.991.055,00	Kab. Luwu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	1.103.991.200,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			161.140.000,00					161.140.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	161.140.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	161.140.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			500.000,00					500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		500.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			81.000.000,00					81.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	81.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		81.000.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa			14.000.000,00					14.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	14.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		14.000.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			184.400.000,00					184.400.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	40 Laporan	184.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		184.400.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
53.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			52.586.000,00					52.586.000,00	
			Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	89 %	52.586.000,00			-		52.586.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			15.394.000,00			-		15.394.000,00	
		-			15.394.000,00			-		15.394.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	15.394.000,00			-		15.394.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			15.394.000,00					15.394.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	20 Dokumen	15.394.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		15.394.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			37.192.000,00			-		37.192.000,00	
		-			37.192.000,00			-		37.192.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	37.192.000,00			-		37.192.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			37.192.000,00					37.192.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15 Dokumen	37.192.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		37.192.000,00	PUSKESMAS WALENRANG BARAT
		PUSKESMAS LAMASI			2.070.815.392,00					2.070.815.392,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.070.815.392,00					2.070.815.392,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.070.815.392,00					2.070.815.392,00	
54.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.047.255.392,00					2.047.255.392,00	
			Indeks SPM	100 Indeks	2.047.255.392,00			-		2.047.255.392,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.047.255.392,00			-		2.047.255.392,00	
		-			2.047.255.392,00			-		2.047.255.392,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	31.400.000,00			-		31.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1.241.641.392,00			-		1.241.641.392,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	215.320.000,00			-		215.320.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12.100.000,00			-		12.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	14.500.000,00			-		14.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	200.427.000,00			-		200.427.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	767.000,00			-		767.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	90.950.000,00			-		90.950.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	170.250.000,00			-		170.250.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	39.600.000,00			-		39.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	19.500.000,00			-		19.500.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	10.800.000,00			-		10.800.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			90.950.000,00					90.950.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	128 Orang	90.950.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		90.950.000,00	PUSKESMAS LAMASI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			767.000,00					767.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18 Orang	767.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		767.000,00	PUSKESMAS LAMASI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			31.400.000,00					31.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2338 Orang	31.400.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		31.400.000,00	PUSKESMAS LAMASI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			19.500.000,00					19.500.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	19.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		19.500.000,00	PUSKESMAS LAMASI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			39.600.000,00					39.600.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Orang	39.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		39.600.000,00	PUSKESMAS LAMASI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			215.320.000,00					215.320.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	138 Dokumen	215.320.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		215.320.000,00	PUSKESMAS LAMASI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12.100.000,00					12.100.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	12.100.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		12.100.000,00	PUSKESMAS LAMASI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			14.500.000,00					14.500.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	14.500.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		14.500.000,00	PUSKESMAS LAMASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			10.800.000,00					10.800.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	188 Orang	10.800.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	10.800.000,00	PUSKESMAS LAMASI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			1.241.641.392,00					1.241.641.392,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.241.641.392,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Kelurahan Lamasi n	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	1.241.641.392,00	PUSKESMAS LAMASI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			200.427.000,00					200.427.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	840 Dokumen	200.427.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	200.427.000,00	PUSKESMAS LAMASI
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			170.250.000,00					170.250.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	754 Laporan	170.250.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	170.250.000,00	PUSKESMAS LAMASI
55.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			23.560.000,00					23.560.000,00	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	89 %	23.560.000,00				-	23.560.000,00	
	1.02.05.2.03	-			23.560.000,00				-	23.560.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	23.560.000,00				-	23.560.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			23.560.000,00					23.560.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	23.560.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		-	23.560.000,00	PUSKESMAS LAMASI
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			195.271.644.937,00					252.473.614.470,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			195.271.644.937,00					252.473.614.470,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			195.271.644.937,00					252.473.614.470,00	
56.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.022.045.605,33					21.784.646.246,00	
		Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %		14.022.045.605,33				-	21.704.146.246,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			59.828.570,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		39.823.788,00	
		-			59.828.570,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		39.823.788,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.020.700,00				-	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	53.925.890,00				-	24.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.062.000,00				-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3.819.980,00				-	14.323.788,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			53.925.890,00					24.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	53.925.890,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabelo n	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	24.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.020.700,00					500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.020.700,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.062.000,00					500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.062.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.819.980,00					14.323.788,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3.819.980,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabelo n	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	14.323.788,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.863.962.960,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		11.021.538.032,00	
		-			9.863.962.960,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		11.021.538.032,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	162.275.000,00				-	317.113.920,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	3.354.040,00				-	13.423.087,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	9.698.333.920,00				-	10.691.001.025,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.698.333.920,00					10.691.001.025,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104 Orang/bulan	9.698.333.920,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabelo n	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.691.001.025,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			162.275.000,00					317.113.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	162.275.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	317.113.920,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.354.040,00					13.423.087,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	3.354.040,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	13.423.087,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12.789.694,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		13.301.294,00	
		-			12.789.694,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		13.301.294,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12.789.694,00				-	13.301.294,00	
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.789.694,00					13.301.294,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12.789.694,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	13.301.294,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			75.800.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		300.000.000,00	
		-			75.800.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	13.000.000,00				-	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	62.800.000,00				-	60.000.000,00	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			62.800.000,00					60.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	62.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lu	Opsen PKB		-	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			13.000.000,00					90.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	13.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			626.397.772,33			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		844.603.132,00	
		-			626.397.772,33			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		844.603.132,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	66.000.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	8.956.220,00				-	38.587.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	422.318.348,33				-	463.050.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	31.232.167,00				-	38.442.632,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	80.543.928,00				-	85.523.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	8.700.000,00				-	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	8.647.109,00				-	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00				-	80.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.647.109,00					17.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.647.109,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00					80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			31.232.167,00					38.442.632,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	31.232.167,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe LLO	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	38.442.632,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			8.700.000,00					22.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe LLO	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			66.000.000,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	66.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe LLO	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			80.543.928,00					85.523.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	80.543.928,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe LLO	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	85.523.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			8.956.220,00					38.587.500,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	8.956.220,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe LLO	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	38.587.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			422.318.348,33					463.050.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	422.318.348,33	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	463.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.742.356.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		7.730.000.000,00	
	-				1.742.356.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		7.730.000.000,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	1.698.300.000,00				-	7.600.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	44.056.000,00				-	80.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Luwu	Opsen PKB		-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			1.698.300.000,00					7.600.000.000,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.698.300.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	7.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			44.056.000,00					80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	44.056.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.318.680.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		964.000.000,00	
	-				1.318.680.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		964.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	151.680.000,00				-	166.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.143.000.000,00				-	771.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	24.000.000,00				-	26.400.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			24.000.000,00					26.400.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe LLO	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	26.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			151.680.000,00					166.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	151.680.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe LLO	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	166.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.143.000.000,00					771.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.143.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	771.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			322.230.609,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		871.380.000,00	
	-				322.230.609,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu		871.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	199.946.605,00				-	425.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00				-	104.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	103.804.004,00				-	290.380.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.480.000,00				-	52.000.000,00	
1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			103.804.004,00					290.380.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	62 Unit	103.804.004,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	290.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			199.946.605,00					425.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	25 Unit	199.946.605,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.480.000,00					52.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	18.480.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	52.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00					104.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	104.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			29.809.495.213,00					27.723.744.700,00	
		Persentase irigasi dalam kondisi baik		71,89 %	29.809.495.213,00				-	27.723.744.700,00	
1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.928.688.429,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		6.205.000.000,00	
		-			2.928.688.429,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		6.205.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		-	100.000.000,00				-	100.000.000,00	
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun		-	30.150.000,00				-	30.000.000,00	
		Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		-	497.500.000,00				-	225.000.000,00	
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan		-	1.100.142.043,00				-	4.500.000.000,00	
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		-	900.013.680,00				-	700.000.000,00	
		Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		-	100.856.880,00				-	150.000.000,00	
		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		-	200.025.826,00				-	500.000.000,00	
1.03.02.2.01.0073		Operasi dan Pemeliharaan Sungai			100.856.880,00					150.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM	100.856.880,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0093		Normalisasi/Restorasi Sungai			900.013.680,00					700.000.000,00	
		Tertaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	7,75 KM	900.013.680,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0101		Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			1.100.142.043,00					4.500.000.000,00	
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1,97 KM	1.100.142.043,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0115		Pembangunan Tanggul Sungai			200.025.826,00					500.000.000,00	
		Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1 KM	200.025.826,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0118		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			497.500.000,00					225.000.000,00	
		Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	497.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Ulu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0125		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			30.150.000,00					30.000.000,00	
		Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	30.150.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0127		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			100.000.000,00					100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			26.880.806.784,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		21.518.744.700,00	
		-			26.880.806.784,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		21.518.744.700,00	
		Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi		-	1.926.779.075,00				-	2.700.000.000,00	
		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya		-	87.273.825,00				-	90.200.000,00	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		-	1.900.025.680,00				-	450.000.000,00	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		-	266.602.628,00				-	768.544.700,00	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		-	9.877.465.544,00				-	800.000.000,00	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		-	12.822.660.032,00				-	16.710.000.000,00	
1.03.02.2.02.0002		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			1.900.025.680,00					450.000.000,00	
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,45 KM	1.900.025.680,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0008		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			12.822.660.032,00					16.710.000.000,00	
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5,8 KM	12.822.660.032,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengusahan		-	16.710.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			9.877.465.544,00					800.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,61 KM	9.877.465.544,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengusahan		-	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			266.602.628,00					768.544.700,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7,37 KM	266.602.628,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	768.544.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota			87.273.825,00					90.200.000,00	
		Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	1 Lembaga	87.273.825,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	90.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi			1.926.779.075,00					2.700.000.000,00	
		Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	4 UNIT	1.926.779.075,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			1.850.000.000,00					3.230.000.000,00	
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,93 %	1.750.000.000,00				-	3.230.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1.850.000.000,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		3.230.000.000,00	
		-			1.850.000.000,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		3.230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-	100.000.000,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	186.000.000,00				-	400.000.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	-	255.000.000,00				-	180.000.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	100.000.000,00				-	500.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-	279.000.000,00				-	1.400.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-	930.000.000,00				-	600.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			100.000.000,00					150.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			930.000.000,00					600.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1-1,5 Liter/Detik	930.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			279.000.000,00					1.400.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0,5-1 Liter/Detik	279.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			100.000.000,00					500.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 Unit	100.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			255.000.000,00					180.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	4 Unit	255.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			186.000.000,00					400.000.000,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	135 SR	186.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			2.236.062.877,00					5.835.000.000,00	
			Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	3,19 %	2.236.062.877,00				-	5.835.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			2.236.062.877,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		5.835.000.000,00	
		-			2.236.062.877,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		5.835.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-	150.000.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	86.002.677,00				-	85.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	-	0,00				-	700.000.000,00	
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	-	0,00				-	500.000.000,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	-	2.000.060.200,00				-	4.500.000.000,00	
	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan			86.002.677,00					85.000.000,00	
		Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	86.002.677,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			150.000.000,00					50.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			0,00					500.000.000,00	
		Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			0,00					700.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R			2.000.060.200,00					4.500.000.000,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 Ton/hari	2.000.060.200,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			543.000.000,00					1.925.000.000,00	
			Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	76,02 %	543.000.000,00				-	1.925.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			543.000.000,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		1.925.000.000,00	
		-			543.000.000,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		1.925.000.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	343.000.000,00				-	500.000.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	200.000.000,00				-	300.000.000,00	
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	-	0,00				-	1.000.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	0,00				-	125.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	2 M³/Hari	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0046	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1 Unit Rumah	343.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	2 M³/Hari	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (lebar minimal 1,5 m)	0,8065 %	2.076.286.039,62				-	2.120.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.076.286.039,62			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		2.120.000.000,00	
		-			2.076.286.039,62			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		2.120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	-	500.000.000,00				-	600.000.000,00	
			Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	-	0,00				-	600.000.000,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	-	1.576.286.039,62				-	920.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	606 M	1.576.286.039,62	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	920.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	0,00	Kab. Luwu	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN&B)		-	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	0,04 %	400.010.000,00				-	5.600.000.000,00	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			400.010.000,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		5.600.000.000,00	
		-			400.010.000,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		5.600.000.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	-	400.010.000,00				-	800.000.000,00	
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	-	0,00				-	300.000.000,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	-	0,00				-	4.500.000.000,00	
	1.03.07.2.01.0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 UNIT	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	1 Ton/hari	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0038	1.03.07.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	2 Unit	400.010.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase PBG yang diterbitkan	0,13 %	13.885.782.098,00				-	6.922.337.905,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			13.885.782.098,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		6.922.337.905,00	
		-			13.885.782.098,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		6.922.337.905,00	
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	-	12.700.224.200,00				-	6.000.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	1.000.144.000,00				-	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	185.413.898,00				-	122.337.905,00	
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			12.700.224.200,00					6.000.000.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	3 Bangunan Gedung	12.700.224.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			185.413.898,00					122.337.905,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300 Dokumen	185.413.898,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	122.337.905,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1.000.144.000,00					800.000.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Bangunan Gedung	1.000.144.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			2.200.023.200,00					4.950.000.000,00	
			Persentase RTH yang ditingkatkan/ tertata	0,000020 %	2.200.023.200,00				-	4.950.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			2.200.023.200,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		4.950.000.000,00	
		-			2.200.023.200,00			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		4.950.000.000,00	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-	2.200.023.200,00				-	4.950.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota			2.200.023.200,00					4.950.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	3 Kawasan	2.200.023.200,00	Kab. Luwu	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	4.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			126.699.111.497,05					170.374.083.782,00	
			Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap Kabupaten	34,17 %	126.699.111.497,05				-	170.374.083.782,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			126.699.111.497,05			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		170.374.083.782,00	
		-			126.699.111.497,05			Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		170.374.083.782,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-	9.728.000.000,00				-	10.931.482.116,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	-	500.000.000,00				-	1.250.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-	22.078.377.045,08				-	3.645.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	-	831.868.659,28				-	23.705.268.333,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	8.100.016.849,10				-	2.785.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	1.700.008.196,32				-	1.600.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	3.460.775.662,11				-	18.322.250.000,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	76.042.998.494,43				-	69.985.083.333,00	
			Panjang Jembatan yang dibangun	-	3.756.259.455,97				-	36.750.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang dilebarkan	-	200.686.086,64				-	1.000.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	-	300.121.048,12				-	400.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			9.728.000.000,00					10.931.482.116,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8 Dokumen	9.728.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.931.482.116,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			500.000.000,00					1.250.000.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	10,67 KM	500.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0049	Pelebaran Jembatan			200.686.086,64					1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang dilebarkan	2 Meter	200.686.086,64	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			1.700.008.196,32					1.600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	19 KM	1.700.008.196,32	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			22.078.377.045,08					3.645.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	31,46 KM	22.078.377.045,08	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.645.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan			3.460.775.662,11					18.322.250.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7,11 KM	3.460.775.662,11	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	18.322.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			8.100.016.849,10					2.785.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	4,36 KM	8.100.016.849,10	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.785.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan			300.121.048,12					400.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	6 Meter	300.121.048,12	Kab. Luwu	Opsen PKB		-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			76.042.998.494,43					69.985.083.333,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	27,52 KM	76.042.998.494,43	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah		-	69.985.083.333,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar			831.868.659,28					23.705.268.333,00	
		Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	54 KM	831.868.659,28	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	23.705.268.333,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			3.756.259.455,97					36.750.000.000,00	
		Tertaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	7 Meter	3.756.259.455,97	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	36.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
66.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			301.165.165,00					929.783.370,00	
			Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	47,76 %	301.165.165,00				-	929.783.370,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			180.125.120,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		776.670.770,00	
		-			180.125.120,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		776.670.770,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-	180.125.120,00				-	776.670.770,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			180.125.120,00					776.670.770,00	
		Tertfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	90 Orang	180.125.120,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lilo	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	776.670.770,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			44.042.722,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		51.575.100,00	
		-			44.042.722,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		51.575.100,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	-	44.042.722,00				-	22.368.600,00	
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	-	0,00				-	29.206.500,00	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			0,00					29.206.500,00	
		Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	3 Perangkat Pendukung	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lilo	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	29.206.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			44.042.722,00					22.368.600,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	44.042.722,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	22.368.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			76.997.323,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		101.537.500,00	
		-			76.997.323,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		101.537.500,00	
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	-	0,00				-	16.537.500,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	-	41.950.557,00				-	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-	35.046.766,00				-	40.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			35.046.766,00					40.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	350 Paket Pekerjaan	35.046.766,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			0,00					16.537.500,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lilo	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	16.537.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			41.950.557,00					45.000.000,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga	41.950.557,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
67.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.248.663.242,00					1.079.018.467,00	
			Ketaatan terhadap RTRW	5,86 %	1.248.663.242,00				-	1.079.018.467,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			217.123.744,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		156.000.000,00	
		-			217.123.744,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		156.000.000,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	-	52.114.500,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	-	54.120.820,00				-	0,00	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-	110.888.424,00				-	106.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota			110.888.424,00					106.000.000,00	
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.888.424,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	106.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			54.120.820,00					0,00	
		Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	54.120.820,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			52.114.500,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Laporan	52.114.500,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			769.012.296,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		450.000.000,00	
		-			769.012.296,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		450.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-	769.012.296,00				-	450.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			769.012.296,00					450.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	769.012.296,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			16.433.706,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		42.249.958,00	
		-			16.433.706,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		42.249.958,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-	16.433.706,00				-	42.249.958,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			16.433.706,00					42.249.958,00	
		Tersedianya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	90 Layanan	16.433.706,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	42.249.958,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			246.093.496,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		430.768.509,00	
		-			246.093.496,00			Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Luwu		430.768.509,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-	213.312.686,00				-	310.568.509,00	
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	-	10.611.230,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	-	22.169.580,00				-	110.200.000,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			213.312.686,00					310.568.509,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	213.312.686,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lilo	Opsen PKB		-	310.568.509,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR			10.611.230,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	10.611.230,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			22.169.580,00					110.200.000,00	
		Tertaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	22.169.580,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe Lilo	Opsen PKB		-	110.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			6.741.260.193,00					6.913.919.203,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.741.260.193,00					6.913.919.203,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			6.741.260.193,00					6.913.919.203,00	
68.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.870.260.193,00					4.252.599.203,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	3.807.701.183,00				-	4.197.474.203,00	
			-	-	62.559.010,00				-	0,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.761.894,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		47.251.000,00	
		-			22.761.894,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		47.251.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	3.573.728,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6.044.774,00				-	21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	3.028.700,00				-	2.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.590.224,00				-	2.626.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	3.004.316,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.520.152,00				-	10.500.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.044.774,00					21.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.044.774,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	21.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.004.316,00					5.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.004.316,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.590.224,00					2.626.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.590.224,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.626.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.573.728,00					5.250.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.573.728,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.028.700,00					2.625.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.028.700,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.625.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.520.152,00					10.500.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.520.152,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.123.248.151,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		3.349.248.203,00	
	-				3.123.248.151,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		3.349.248.203,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	2.602.234,00				-	2.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	136.980.000,00				-	214.305.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	5.503.172,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	6.002.552,00				-	6.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.972.160.193,00				-	3.120.768.203,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.972.160.193,00					3.120.768.203,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan	2.972.160.193,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.120.768.203,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			136.980.000,00					214.305.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	136.980.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	214.305.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.503.172,00					5.250.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5.503.172,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			2.602.234,00					2.625.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	2.602.234,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.625.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			6.002.552,00					6.300.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	6.002.552,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12.003.788,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		26.250.000,00	
	-				12.003.788,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		26.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12.003.788,00				-	26.250.000,00	
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.003.788,00					26.250.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.003.788,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	26.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.040.000,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		23.100.000,00	
	-				29.040.000,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		23.100.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	29.040.000,00				-	23.100.000,00	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			29.040.000,00					23.100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	29.040.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	23.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			225.039.023,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		384.750.000,00	
	-				225.039.023,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		384.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	5.000.000,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	170.000.000,00				-	262.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	15.006.598,00				-	10.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	20.003.654,00				-	15.750.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.002.020,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.003.485,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00				-	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	5.023.266,00				-	5.250.000,00	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.003.485,00					5.250.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.003.485,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00					75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.023.266,00					5.250.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	5.023.266,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.006.598,00					10.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.006.598,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.002.020,00					5.250.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	5.002.020,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.000.000,00					5.250.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			20.003.654,00					15.750.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket	20.003.654,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.750.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			170.000.000,00					262.500.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	170.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	262.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			62.559.010,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		0,00	
		-			62.559.010,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	62.559.010,00				-	0,00	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			62.559.010,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	62.559.010,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			341.600.000,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		369.500.000,00	
		-			341.600.000,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		369.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	110.000.000,00				-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	231.600.000,00				-	259.500.000,00	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			110.000.000,00					110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			231.600.000,00					259.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	231.600.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	259.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.008.327,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		52.500.000,00	
		-			54.008.327,00			Aparatur dilingkungan perangkat daerah		52.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	42.518.327,00				-	42.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	11.490.000,00				-	10.500.000,00	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			42.518.327,00					42.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	42.518.327,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.490.000,00					10.500.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	11.490.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
69.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			206.000.000,00					411.820.000,00	
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100 %	202.000.000,00				-	199.750.000,00	
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	2.000.000,00				-	52.320.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			70.000.000,00		Masyarakat Kab. Luwu			196.750.000,00	
		-			70.000.000,00		Masyarakat Kab. Luwu			196.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	0,00				-	10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	0,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	0,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	50.000.000,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	5.000.000,00				-	10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	-	0,00				-	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	-	15.000.000,00				-	10.500.000,00	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			0,00					60.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			15.000.000,00					10.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			0,00					40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			5.000.000,00					10.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			0,00					5.250.000,00	
		Tersusun dan Terverifikasi Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			50.000.000,00					60.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			0,00					10.500.000,00	
		Tersusun dan Terverifikasi Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			2.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		62.820.000,00	
		-			2.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		62.820.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	-	0,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	-	0,00				-	15.570.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	-	0,00				-	21.000.000,00	
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	2.000.000,00				-	10.500.000,00	
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	0,00				-	10.500.000,00	
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator			0,00					15.570.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	35 Orang	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.570.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan			0,00					5.250.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			0,00					10.500.000,00	
		Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 Orang	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			2.000.000,00					10.500.000,00	
		Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	2.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan			0,00					21.000.000,00	
		Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	70 Orang	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	21.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			92.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		42.000.000,00	
		-			92.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		42.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	60.000.000,00				-	10.500.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	0,00				-	10.500.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-	30.000.000,00				-	10.500.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	-	2.000.000,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	-	0,00				-	5.250.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			30.000.000,00					10.500.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	30.000.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			60.000.000,00					10.500.000,00	
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	60.000.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			2.000.000,00					5.250.000,00	
		Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	10 Rumah Tangga	2.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00					5.250.000,00	
		Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	10 Rumah Tangga	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			0,00					10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	10 Unit Rumah	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			2.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		21.000.000,00	
		-			2.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	0,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	0,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Pemediaan Rumah	-	2.000.000,00				-	5.250.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Pemediaan Rumah	-	0,00				-	5.250.000,00	
	1.04.02.2.04.0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			0,00					5.250.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Pemediaan Rumah	10 Rumah Tangga	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			0,00					5.250.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			0,00					5.250.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			2.000.000,00					5.250.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Pemediaan Rumah	1 Rumah Tangga	2.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			0,00			Masyarakat Kab. Luwu		5.250.000,00	
		-			0,00			Masyarakat Kab. Luwu		5.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	0,00				-	5.250.000,00	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			0,00					5.250.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			40.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		84.000.000,00	
		-			40.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		84.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	40.000.000,00				-	31.500.000,00	
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	-	0,00				-	52.500.000,00	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			40.000.000,00					31.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan	40.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	31.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			0,00					52.500.000,00	
		Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	52.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
70.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			775.000.000,00					1.165.500.000,00	
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	5.02 %	725.000.000,00				-	1.113.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			50.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		52.500.000,00	
		-			50.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		52.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	-	50.000.000,00				-	52.500.000,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP			50.000.000,00					52.500.000,00	
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	52.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			725.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		1.113.000.000,00	
		-			725.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		1.113.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	-	10.000.000,00				-	10.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	40.000.000,00				-	52.500.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	50.000.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-	125.000.000,00				-	250.000.000,00	
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	-	500.000.000,00				-	750.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			125.000.000,00					250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	5 Unit Rumah	125.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil		-	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			40.000.000,00					52.500.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10 Laporan	40.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	52.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			10.000.000,00					10.500.000,00	
		Tertaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			500.000.000,00					750.000.000,00	
		Tertaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	7,11 Ha	500.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			50.000.000,00					50.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
71.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			830.000.000,00					360.500.000,00	
		Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani		9,92 %	830.000.000,00				-	360.500.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			830.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		360.500.000,00	
		-			830.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		360.500.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		-	0,00				-	10.500.000,00	
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh		-	0,00				-	100.000.000,00	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		-	830.000.000,00				-	250.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			830.000.000,00					250.000.000,00	
		Tertaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	31 Unit Rumah	830.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil		-	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			0,00					100.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			0,00					10.500.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
72.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.060.000.000,00					723.500.000,00	
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		6,22 %	1.060.000.000,00				-	723.500.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.060.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		723.500.000,00	
		-			1.060.000.000,00			Masyarakat Kab. Luwu		723.500.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		-	40.000.000,00				-	52.500.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dan Pengembangan		-	20.000.000,00				-	21.000.000,00	
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		-	680.000.000,00				-	450.000.000,00	
		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		-	320.000.000,00				-	200.000.000,00	
		Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU		-	0,00				-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			40.000.000,00					52.500.000,00	
		Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	40.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		52.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU			0,00					0,00	
		Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	50 Kelompok	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			20.000.000,00					21.000.000,00	
		Tertindakannya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		21.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			320.000.000,00					200.000.000,00	
		Tertindakannya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	3 Lokasi	320.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			680.000.000,00					450.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	5 Lokasi	680.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah	-		450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			9.337.355.738,00					10.311.279.163,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.337.355.738,00					10.311.279.163,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.337.355.738,00					10.311.279.163,00	
	73. 1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.119.389.544,00					8.611.279.163,00	
		-	-	-	8.119.389.544,00			-	-	8.509.779.163,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.661.630,00			-		35.500.000,00	
		-	-	-	23.661.630,00			-		35.500.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	1.108.475,00			-		3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2.828.550,00			-		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	2.443.856,00			-		3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3.839.891,00			-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	3.009.994,00			-		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	3.264.936,00			-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.123.350,00			-		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.106.376,00			-		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.936.202,00			-		3.500.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.839.891,00			-		5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.839.891,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.123.350,00			-		4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.123.350,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.264.936,00			-		5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.264.936,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.828.550,00			-		4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.828.550,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			3.009.994,00			-		4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	3.009.994,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.106.376,00			-		3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.106.376,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.936.202,00			-		3.500.000,00	
		Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.936.202,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			2.443.856,00			-		3.500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.443.856,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			1.108.475,00			-		3.500.000,00	
		Tertindakannya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.108.475,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.636.316.416,00			-		8.176.500.000,00	
		-	-	-	7.636.316.416,00			-		8.176.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	2.289.564,00			-		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	2.278.376,00			-		3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1.909.098,00			-		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	150.430.380,00			-		160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.272.602,00			-		3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.740.407,00			-		3.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	7.475.395.989,00			-		8.000.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.475.395.989,00			-		8.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Gaii dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaii dan Tunjangan ASN	121 Orang/bulan	7.475.395.989,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	8.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			150.430.380,00				-	160.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.430.380,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2.278.376,00				-	3.500.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2.278.376,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.272.602,00				-	3.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.272.602,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			2.289.564,00				-	3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.289.564,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.740.407,00				-	3.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	1.740.407,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.909.098,00				-	3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.909.098,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.500.971,00				-	12.779.163,00	
					9.500.971,00				-	12.779.163,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1.226.880,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5.089.520,00				-	6.279.163,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1.285.981,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1.898.590,00				-	3.000.000,00	
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.898.590,00				-	3.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.898.590,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.226.880,00				-	2.000.000,00	
		Tertaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.226.880,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.285.981,00				-	1.500.000,00	
		Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.285.981,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.089.520,00				-	6.279.163,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.089.520,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.279.163,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.366.099,00				-	12.000.000,00	
					7.366.099,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	938.124,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	3.846.040,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1.328.067,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1.253.868,00				-	3.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1.253.868,00				-	3.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.253.868,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1.328.067,00				-	1.500.000,00	
		Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.328.067,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			938.124,00				-	1.500.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	938.124,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			3.846.040,00				-	6.000.000,00	
		Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.846.040,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			176.772.326,00				-	214.500.000,00	
					176.772.326,00				-	214.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	6.000.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	27.000.000,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	4.000.000,00				-	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	115.990.000,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	13.184.761,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	3.242.300,00				-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	4.295.200,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.060.065,00				-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	0,00				-	15.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.060.065,00				-	3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.060.065,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00				-	15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.184.761,00				-	15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.184.761,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.295.200,00				-	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.295.200,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.000.000,00				-	5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			3.242.300,00				-	3.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	3.242.300,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			4.800.000,00				-	4.500.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			115.990.000,00				-	150.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	115.990.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			27.000.000,00				-	12.000.000,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.825.000,00				-	20.000.000,00	
		-			13.825.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	13.825.000,00				-	20.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			13.825.000,00				-	20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	13.825.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.466.510,00				-	107.000.000,00	
		-			102.466.510,00				-	107.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	65.674.454,00				-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	36.000.000,00				-	36.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	792.056,00				-	1.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			792.056,00				-	1.000.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	792.056,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			65.674.454,00				-	70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.674.454,00	Kab. Luwu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			36.000.000,00				-	36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Luwu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	36.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			149.480.592,00				-	33.000.000,00	
		-			149.480.592,00				-	33.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	17.650.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	2.500.000,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	129.330.592,00				-	10.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.500.000,00				-	3.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.500.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			17.650.000,00				-	20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	17.650.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			129.330.592,00				-	10.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	129.330.592,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
74.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.217.966.194,00				-	1.700.000.000,00	
			Persentase Capaian SPM Bidang Pelayanan Trantibum	100 Persen	1.217.966.194,00				-	1.473.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.011.793.180,00				-	1.381.000.000,00	
		-			1.011.793.180,00				-	1.381.000.000,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-	76.062.088,00				-	85.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-	10.708.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-	13.991.640,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	6.561.760,00				-	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	23.009.660,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1.614.240,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	233.640,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-	3.288.230,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	-	15.195.596,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-	3.109.998,00				-	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	37.309.742,00				-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-	24.000.000,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	-	773.808.624,00				-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-	5.198.800,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-	0,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	17.701.162,00				-	20.000.000,00	
1.05.02.2.01.0003		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			23.009.660,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	23.009.660,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			37.309.742,00					40.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	37.309.742,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0006		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			6.561.760,00					7.000.000,00	
		Tertaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	6.561.760,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0008		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			3.109.998,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	3.109.998,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0013		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			17.701.162,00					20.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2237 Orang	17.701.162,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0014		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			76.062.088,00					85.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	121 Orang	76.062.088,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			773.808.624,00					1.000.000.000,00	
		Tertaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTertaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	773.808.624,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			24.000.000,00					25.000.000,00	
		Tertaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Laporan	24.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0017		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah			5.198.800,00					6.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	5.198.800,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0018		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kentraman dan Ketertiban Umum			0,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0019		Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota			15.195.596,00					20.000.000,00	
		Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	22 Dokumen	15.195.596,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0022		Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			3.288.230,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	1 Dokumen	3.288.230,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0023		Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum			1.614.240,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1.614.240,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0024		Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota			233.640,00					1.000.000,00	
		Tertaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	233.640,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			13.991.640,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	2 Orang	13.991.640,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0026	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			10.708.000,00					20.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	2 Orang	10.708.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			97.148.406,00			-		189.000.000,00	
		-			97.148.406,00			-		189.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	-	717.020,00			-		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	-	295.080,00			-		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	560.757,00			-		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	66.322.815,00			-		70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	76.700,00			-		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	8.894.000,00			-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	3.579.524,00			-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-	12.098.840,00			-		15.000.000,00	
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	-	2.198.670,00			-		3.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	-	2.405.000,00			-		50.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			8.894.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	8.894.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			2.405.000,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	2.405.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			3.579.524,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	3.579.524,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah			2.198.670,00					3.000.000,00	
		Tertaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan	2.198.670,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah			717.020,00					3.000.000,00	
		Tertaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	717.020,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			76.700,00					30.000.000,00	
		Tertaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	76.700,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			12.098.840,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12.098.840,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			66.322.815,00					70.000.000,00	
		Tertaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	66.322.815,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada			295.080,00					1.000.000,00	
		Tertaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	1 Dokumen	295.080,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0014	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			560.757,00					2.000.000,00	
		Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	560.757,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			109.024.608,00			-		130.000.000,00	
		-			109.024.608,00			-		130.000.000,00	
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	89.876.000,00			-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	7.455.828,00			-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-	11.422.612,00			-		15.000.000,00	
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	-	270.168,00			-		5.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS			270.168,00					5.000.000,00	
		Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	270.168,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			7.455.828,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	7.455.828,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah			89.876.000,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	12 Laporan	89.876.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.03.0005		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			11.422.612,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	11.422.612,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN			11.427.157.016,00					10.540.308.652,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.427.157.016,00					10.540.308.652,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.427.157.016,00					10.540.308.652,00	
75.1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.511.874.324,00					10.406.095.478,00	
		Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen		8.511.874.324,00			-		10.406.095.478,00	
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.691.270,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		8.607.438,00	
					8.691.270,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		8.607.438,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2.207.940,00			-		2.251.314,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.700.240,00			-		2.701.314,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.783.090,00			-		3.654.810,00	
1.05.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.700.240,00					2.701.314,00	
		Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.700.240,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		2.701.314,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.207.940,00					2.251.314,00	
		Tersediannya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.207.940,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		2.251.314,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.783.090,00					3.654.810,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.783.090,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		3.654.810,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.421.045.056,00			Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		7.127.703.052,00	
		-			7.421.045.056,00			Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		7.127.703.052,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	126.840.000,00			-		126.840.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	7.294.205.056,00			-		7.000.863.052,00	
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.294.205.056,00					7.000.863.052,00	
		Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/bulan	7.294.205.056,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		7.000.863.052,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			126.840.000,00					126.840.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	126.840.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		126.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.400.000,00	
		-			4.800.000,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00			-		4.400.000,00	
1.05.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					4.400.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		4.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			213.348.348,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		231.545.178,00	
		-			213.348.348,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		231.545.178,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	12.000.000,00			-		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	21.400.950,00			-		39.400.950,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	87.068.000,00			-		87.156.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	56.378.744,00			-		56.414.328,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	21.208.780,00			-		21.235.990,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	15.291.874,00			-		15.337.910,00	
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.291.874,00					15.337.910,00	
		Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.291.874,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		15.337.910,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			56.378.744,00					56.414.328,00	
		Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	56.378.744,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		56.414.328,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			21.208.780,00					21.235.990,00	
		Tersediannya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	21.208.780,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		21.235.990,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu			21.400.950,00					39.400.950,00	
		Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	21.400.950,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		39.400.950,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			87.068.000,00					87.156.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171 Laporan	87.068.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		87.156.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12.000.000,00					12.000.000,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		12.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.524.000,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		2.009.000.000,00	
		-			10.524.000,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		2.009.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0,00			-		2.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	10.524.000,00			-		9.000.000,00	
1.05.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00					2.000.000.000,00	
		Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		2.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.524.000,00					9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.524.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			596.623.360,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		741.538.300,00	
		-			596.623.360,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		741.538.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	63.929.000,00				-	63.929.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	531.145.660,00				-	676.060.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.548.700,00				-	1.548.700,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.548.700,00					1.548.700,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.548.700,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.548.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			63.929.000,00					63.929.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63.929.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	63.929.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			531.145.660,00					676.060.600,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	237 Laporan	531.145.660,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	676.060.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			256.842.290,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		279.301.510,00	
		-			256.842.290,00			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		279.301.510,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	54.843.000,00				-	60.684.510,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	145.922.090,00				-	162.517.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	56.077.200,00				-	56.100.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			56.077.200,00					56.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	56.077.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	56.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			145.922.090,00					162.517.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	145.922.090,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	162.517.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			54.843.000,00					60.684.510,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	54.843.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	60.684.510,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
76.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			2.915.282.692,00					134.213.174,00	
			Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit	100 persen	2.915.282.692,00				-	134.213.174,00	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	2.915.282.692,00				-	134.213.174,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.905.622.152,00			Masyarakat		124.699.463,00	
		-			2.905.622.152,00			Masyarakat		124.699.463,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	9.920.592,00				-	9.929.992,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-	1.330.560,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-	472.627.180,00				-	11.114.661,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-	2.236.930,00				-	3.654.810,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	3.288.600,00				-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-	2.416.218.290,00				-	100.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			472.627.180,00					11.114.661,00	
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	472.627.180,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	11.114.661,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.288.600,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	3.288.600,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			9.920.592,00					9.929.992,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	9.920.592,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	9.929.992,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			2.236.930,00					3.654.810,00	
		Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	2.236.930,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.654.810,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			1.330.560,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	1.330.560,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			2.416.218.290,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit	2.416.218.290,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			4.672.748,00			Masyarakat, pemilik gedung/toko, rumah sakit dan perkantoran		4.756.800,00	
		-			4.672.748,00			Masyarakat, pemilik gedung/toko, rumah sakit dan perkantoran		4.756.800,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	4.672.748,00				-	4.756.800,00	
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			4.672.748,00					4.756.800,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Laporan	4.672.748,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.756.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran			4.987.792,00			Masyarakat		4.756.911,00	
		-			4.987.792,00			Masyarakat		4.756.911,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	-	4.987.792,00				-	4.756.911,00	
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			4.987.792,00					4.756.911,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	4.987.792,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.756.911,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			5.465.977.026,00					9.235.559.715,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.465.977.026,00					9.235.559.715,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.465.977.026,00					9.235.559.715,00	
	77. 1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.950.740.762,00					5.408.981.719,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	4.950.740.762,00				-	5.351.432.819,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.463.421,00			BPBD KAB. LUWU		29.050.000,00	
		-			16.463.421,00			BPBD KAB. LUWU		29.050.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	608.290,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	13.158.351,00				-	21.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	461.380,00				-	1.720.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	432.470,00				-	500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	899.990,00				-	700.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	902.940,00				-	2.330.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.158.351,00					21.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.158.351,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	21.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			899.990,00					700.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	899.990,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			432.470,00					500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	432.470,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			608.290,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	608.290,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			461.380,00					1.720.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	461.380,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	1.720.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			902.940,00					2.330.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	902.940,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	2.330.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.356.357.458,00			BPBD KAB. LUWU		4.366.299.204,00	
		-			4.356.357.458,00			BPBD KAB. LUWU		4.366.299.204,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	88.200.000,00				-	81.720.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.435.377,00				-	9.548.900,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.240.677,00				-	9.548.900,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.265.481.404,00				-	4.265.481.404,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.265.481.404,00					4.265.481.404,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	782 Orang/bulan	4.265.481.404,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.265.481.404,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
1.05.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			88.200.000,00					81.720.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	88.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	81.720.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.435.377,00					9.548.900,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.435.377,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	9.548.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.240.677,00					9.548.900,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.240.677,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	9.548.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.359.900,00			BPBD KAB. LUWU		9.279.265,00	
		-			10.359.900,00			BPBD KAB. LUWU		9.279.265,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	10.000.000,00				-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	359.900,00				-	2.279.265,00	
1.05.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			359.900,00					2.279.265,00	
		Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	359.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	2.279.265,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000,00					7.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			176.561.107,00			BPBD KAB. LUWU		407.361.250,00	
		-			176.561.107,00			BPBD KAB. LUWU		407.361.250,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	3.000.000,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	8.286.296,00				-	18.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	139.283.400,00				-	324.067.350,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	20.256.891,00				-	27.765.650,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	4.724.720,00				-	8.164.250,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.009.800,00				-	3.964.000,00	
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.009.800,00					3.964.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.009.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	3.964.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.724.720,00					8.164.250,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.724.720,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	8.164.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.000.000,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			20.256.891,00					27.765.650,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	20.256.891,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	27.765.650,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu			8.286.296,00					18.400.000,00	
		Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.286.296,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	18.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			139.283.400,00					324.067.350,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	139.283.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	324.067.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28.620.900,00			BPBD KAB. LUWU		48.000.000,00	
		-			28.620.900,00			BPBD KAB. LUWU		48.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	28.620.900,00				-	48.000.000,00	
1.05.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			28.620.900,00					48.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	28.620.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	48.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			288.480.800,00			BPBD KAB. LUWU		545.200.000,00	
		-			288.480.800,00			BPBD KAB. LUWU		545.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	71.880.800,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	199.800.000,00				-	437.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	16.800.000,00				-	48.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			16.800.000,00					48.000.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	48.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			71.880.800,00					60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.880.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			199.800.000,00					437.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	199.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	437.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.897.176,00			BPBD KAB. LUWU		3.792.000,00	
		-			73.897.176,00			BPBD KAB. LUWU		3.792.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	68.047.176,00				-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5.850.000,00				-	3.792.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			68.047.176,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	68.047.176,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.850.000,00					3.792.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	5.850.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	3.792.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
78.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			515.236.264,00					3.826.577.996,00	
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	392.108.998,00				-	3.043.323.631,00	
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 %	55.812.626,00				-	421.789.325,00	
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	67.314.640,00				-	361.465.040,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			7.874.296,00			Masyarakat		130.307.610,00	
		-			7.874.296,00			Masyarakat		130.307.610,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	7.874.296,00				-	130.307.610,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			7.874.296,00					130.307.610,00	
		Tertaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	80 Orang	7.874.296,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	130.307.610,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			392.108.998,00			Masyarakat		3.043.323.631,00	
		-			392.108.998,00			Masyarakat		3.043.323.631,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	199.885,00				-	43.450.000,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-	121.107.665,00				-	39.565.020,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-	4.947.780,00				-	0,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-	50.107.301,00				-	6.446.451,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-	199.989.484,00				-	2.692.512.500,00	
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-	5.520.080,00				-	39.095.960,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	4.808.806,00				-	201.318.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-	5.427.997,00				-	20.935.000,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			4.947.780,00					0,00	
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	4.947.780,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			199.989.484,00					2.692.512.500,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	21 Unit	199.989.484,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	2.692.512.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			5.427.997,00					20.935.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	90 Orang	5.427.997,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	20.935.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			121.107.665,00					39.565.020,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	121.107.665,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	39.565.020,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			5.520.080,00					39.095.960,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	35 Orang	5.520.080,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	39.095.960,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota			199.885,00					43.450.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	199.885,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	43.450.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			50.107.301,00					6.446.451,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdatops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdatops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	50.107.301,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	6.446.451,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			4.808.806,00					201.318.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	40 Orang	4.808.806,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	201.318.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			47.938.330,00			Masyarakat		291.481.715,00	
		-			47.938.330,00			Masyarakat		291.481.715,00	
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	-	2.686.760,00				-	12.511.100,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-	12.033.140,00				-	45.714.400,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	14.826.250,00				-	174.043.665,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	12.115.740,00				-	27.994.550,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	-	6.276.440,00				-	31.218.000,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			12.033.140,00					45.714.400,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10 Dokumen	12.033.140,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	45.714.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			12.115.740,00					27.994.550,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	12.115.740,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	27.994.550,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota			2.686.760,00					12.511.100,00	
		Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	2.686.760,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	12.511.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			14.826.250,00					174.043.665,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	168 Orang	14.826.250,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	174.043.665,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			6.276.440,00					31.218.000,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	5 Laporan	6.276.440,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	31.218.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			67.314.640,00			Masyarakat		361.465.040,00	
		-			67.314.640,00			Masyarakat		361.465.040,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-	39.247.360,00				-	21.776.040,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	2.988.000,00				-	26.541.630,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	8.553.280,00				-	220.067.540,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	-	16.526.000,00				-	93.079.830,00	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			2.988.000,00					26.541.630,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	2.988.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	26.541.630,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			39.247.360,00					21.776.040,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	35 Orang	39.247.360,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	21.776.040,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			16.526.000,00					93.079.830,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	1 Kegiatan	16.526.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	93.079.830,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			8.553.280,00					220.067.540,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	8.553.280,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	220.067.540,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL			5.172.803.026,00					5.273.336.076,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.172.803.026,00					5.273.336.076,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.172.803.026,00					5.273.336.076,00	
79.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.547.965.181,00					4.777.336.076,00	
			Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	4.547.965.181,00				-	4.757.336.076,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.511.600,00			3 Dokumen		29.500.000,00	
					15.511.600,00			3 Dokumen		29.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	318.940,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	13.975.900,00				-	14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	259.600,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	203.720,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	277.640,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	475.800,00				-	7.500.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.975.900,00					14.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.975.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	14.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			277.640,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	277.640,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			203.720,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	203.720,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			318.940,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	318.940,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			259.600,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	259.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			475.800,00					7.500.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	475.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.824.813.276,00			2 Laporan		3.968.714.976,00	
		-			3.824.813.276,00			2 Laporan		3.968.714.976,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	848.960,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	68.520.000,00				-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.729.340,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.753.714.976,00				-	3.853.714.976,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.753.714.976,00					3.853.714.976,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	580 Orang/bulan	3.753.714.976,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.853.714.976,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPenukulan/Verifikasi Keuangan SKPD			68.520.000,00					110.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	68.520.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			848.960,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	848.960,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.729.340,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.729.340,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.550.600,00					7.500.000,00	
		-			5.550.600,00			2 Laporan		7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5.550.600,00			2 Laporan	-	7.500.000,00	
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.550.600,00					7.500.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.550.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			32.340.000,00					50.000.000,00	
		-			32.340.000,00			35 Orang		50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	32.340.000,00			35 Orang	-	50.000.000,00	
					32.340.000,00					50.000.000,00	
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			32.340.000,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	32.340.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			220.409.489,00					199.500.000,00	
		-			220.409.489,00			4 Laporan		199.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	4.800.000,00			4 Laporan	-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	0,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	192.140.000,00				-	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3.929.470,00				-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	15.713.059,00				-	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.074.399,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.752.561,00				-	4.000.000,00	
					2.752.561,00					4.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.752.561,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	2.752.561,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.929.470,00					3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.929.470,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.074.399,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.074.399,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800.000,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	4.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			15.713.059,00					13.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	55 Paket	15.713.059,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			0,00					2.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			192.140.000,00					130.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	192.140.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14.737.905,00			7 Laporan		70.000.000,00	
					14.737.905,00			7 Laporan		70.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	14.737.905,00				-	70.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.737.905,00					70.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	14.737.905,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			248.523.920,00			12 Laporan		263.121.100,00	
					248.523.920,00			12 Laporan		263.121.100,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	84.001.100,00				-	94.421.100,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	162.000.000,00				-	167.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.522.820,00				-	1.500.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.522.820,00					1.500.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	2.522.820,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			84.001.100,00					94.421.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.001.100,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	94.421.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			162.000.000,00					162.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	216 Laporan	162.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	167.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			186.078.391,00			20 Laporan		229.000.000,00	
		-			186.078.391,00			20 Laporan		229.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	164.969.391,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	15.620.000,00				-	49.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	5.489.000,00				-	30.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			164.969.391,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	164.969.391,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.620.000,00					49.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	15.620.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	49.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.489.000,00					30.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.489.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
80.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			51.123.300,00					23.000.000,00	
			Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten	100 %	51.123.300,00				-	9.000.000,00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			0,00			1 Komunitas		2.000.000,00	
		-			0,00			1 Komunitas		2.000.000,00	
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0,00				-	2.000.000,00	
	1.06.02.2.01.0004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan			0,00					2.000.000,00	
		Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			51.123.300,00			22 Orang		21.000.000,00	
		-			51.123.300,00			22 Orang		21.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30.000.000,00				-	7.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	0,00				-	7.000.000,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-	6.118.100,00				-	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15.005.200,00				-	7.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000,00					7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	30.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Bagi Hasil		-	7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			15.005.200,00					7.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.005.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			0,00					7.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	22 Orang	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi			6.118.100,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	10 Orang	6.118.100,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	0,00	DINAS SOSIAL
81.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			150.004.050,00					78.000.000,00	
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100 %	100.008.250,00				-	68.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			150.004.050,00			8 Orang		72.000.000,00	
		-			150.004.050,00			8 Orang		72.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50.012.450,00				-	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	49.995.800,00				-	7.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	49.995.800,00				-	0,00	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			50.012.450,00					40.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50.012.450,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			0,00					5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			49.995.800,00					7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	49.995.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)		-	7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			49.995.800,00					0,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	49.995.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			0,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			0,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			0,00			2 Orang		6.000.000,00	
					0,00			2 Orang		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	0,00				-	6.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			0,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	DINAS SOSIAL
82.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			283.505.950,00					225.000.000,00	
			persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	100 %	283.505.950,00				-	175.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			283.505.950,00			12 Laporan		225.000.000,00	
					283.505.950,00			12 Laporan		225.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	33.045.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	118.460.950,00				-	125.000.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-	32.000.000,00				-	50.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0004	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			33.045.000,00					50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	33.045.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			118.460.950,00					125.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	203 Orang	118.460.950,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			32.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	12 Usulan	32.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0009	Facilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin			100.000.000,00					0,00	
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	227 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	0,00	DINAS SOSIAL
83.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			119.200.545,00					160.000.000,00	
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	119.200.545,00				-	160.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			10.000.545,00			2.160 Orang		20.000.000,00	
					10.000.545,00			2.160 Orang		20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10.000.545,00				-	20.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			10.000.545,00					20.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2160 Orang	10.000.545,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			109.200.000,00			2.160 Orang		140.000.000,00	
					109.200.000,00			2.160 Orang		140.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	109.200.000,00				-	140.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			109.200.000,00					140.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	109.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	140.000.000,00	DINAS SOSIAL
84.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			21.004.000,00					10.000.000,00	
			Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	100 %	21.004.000,00				-	10.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			21.004.000,00			1 Makam		10.000.000,00	
					21.004.000,00			1 Makam		10.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-	21.004.000,00				-	10.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			21.004.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	21.004.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI			9.070.198.785,00					9.322.312.172,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.053.004.365,00					9.290.812.172,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9.053.004.365,00					9.290.812.172,00	
85.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.738.745.569,00					6.004.712.172,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	5.732.159.029,00				-	6.004.162.172,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.338.216,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		14.230.000,00	
		-			10.338.216,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		14.230.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	586.540,00				-	550.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	7.863.860,00				-	11.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	586.540,00				-	550.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	516.920,00				-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	784.356,00				-	780.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.863.860,00				-	11.850.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.863.860,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	11.850.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			586.540,00					550.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	586.540,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	550.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			586.540,00					550.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	586.540,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	550.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			516.920,00					500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	516.920,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			784.356,00					780.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	784.356,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	780.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.080.836.220,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		5.195.200.822,00	
		-			5.080.836.220,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		5.195.200.822,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	90.960.000,00				-	119.360.467,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.989.876.220,00				-	5.075.840.355,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.989.876.220,00					5.075.840.355,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	4.989.876.220,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Perizinan Tertentu Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.075.840.355,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			90.960.000,00					119.360.467,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	90.960.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Daerah - LRA		-	119.360.467,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		7.061.350,00	
		-			6.000.000,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		7.061.350,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	6.000.000,00				-	7.061.350,00	
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.000.000,00					7.061.350,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	7.061.350,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			225.226.147,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		284.600.000,00	
		-			225.226.147,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		284.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	6.000.000,00				-	23.400.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	2.840.250,00				-	11.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	183.790.500,00				-	204.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2.960.850,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	27.660.979,00				-	33.600.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.973.568,00				-	7.000.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.973.568,00					7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.973.568,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	7.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.960.850,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.960.850,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.000.000,00					23.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	23.400.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			27.660.979,00					33.600.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	27.660.979,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	33.600.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			2.840.250,00					11.600.000,00	
		Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2.840.250,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	11.600.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			183.790.500,00					204.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	183.790.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	204.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90.416.350,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		100.000.000,00	
		-			90.416.350,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		100.000.000,00	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		90.416.350,00				-	100.000.000,00	
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			90.416.350,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	90.416.350,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			278.039.236,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		222.120.000,00	
		-			278.039.236,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		222.120.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		100.640.000,00				-	74.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		176.400.000,00				-	129.600.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		999.236,00				-	18.520.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			999.236,00					18.520.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	999.236,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	18.520.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.640.000,00					74.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.640.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Pendapatan Bagi Hasil		-	74.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			176.400.000,00					129.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	176.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	129.600.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.889.400,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		181.500.000,00	
		-			47.889.400,00			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		181.500.000,00	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		5.016.000,00				-	120.500.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		38.243.400,00				-	50.500.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		4.630.000,00				-	10.500.000,00	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			38.243.400,00					50.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	38.243.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.630.000,00					10.500.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.630.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.016.000,00					120.500.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.016.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	120.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
86.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			15.743.070,00					28.000.000,00	
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	55,35 %		15.743.070,00				-	28.000.000,00	
		Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	70 %		15.743.070,00				-	28.000.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			15.743.070,00			Pemerintah dan Swasta (Perusahaan)		28.000.000,00	
		-			15.743.070,00			Pemerintah dan Swasta (Perusahaan)		28.000.000,00	
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-		15.743.070,00				-	28.000.000,00	
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			15.743.070,00					28.000.000,00	
		Tertaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 Orang	15.743.070,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	28.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
87.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1.025.443.452,00					514.400.000,00	
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	55 %		5.985.560,00				-	14.400.000,00	
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	55 %		1.019.457.892,00				-	500.000.000,00	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	86 Juta Rp/KK		1.025.443.452,00				-	514.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1.019.457.892,00			Pencari Kerja		500.000.000,00	
	-				1.019.457.892,00			Pencari Kerja		500.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-	535.200.000,00				-	0,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	484.257.892,00				-	500.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			535.200.000,00					0,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	535.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Desa Karang-Karangan 1	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			484.257.892,00					500.000.000,00	
		Tertaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	484.257.892,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Perizinan Tertentu		-	500.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			5.985.560,00			Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		14.400.000,00	
	-				5.985.560,00			Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		14.400.000,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-	5.985.560,00				-	14.400.000,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			5.985.560,00					14.400.000,00	
		Tertaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6 Lembaga	5.985.560,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	14.400.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
88.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			170.959.734,00					225.000.000,00	
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	23 %	170.959.734,00				-	175.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			108.309.024,00			Pencari Kerja		100.000.000,00	
	-				108.309.024,00			Pencari Kerja		100.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	57.192.670,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	51.116.354,00				-	50.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			51.116.354,00					50.000.000,00	
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500 Orang	51.116.354,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			57.192.670,00					50.000.000,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	57.192.670,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			52.499.130,00			Pencari Kerja		100.000.000,00	
	-				52.499.130,00			Pencari Kerja		100.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	52.499.130,00				-	100.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			52.499.130,00					100.000.000,00	
		Tertaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	52.499.130,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			10.151.580,00			CPMI/PMI		25.000.000,00	
	-				10.151.580,00			CPMI/PMI		25.000.000,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	10.151.580,00				-	25.000.000,00	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Mieran Indonesia (PMI)			10.151.580,00					25.000.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Mieran Indonesia (CPMI)/Pekerja Mieran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	10.151.580,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
89.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			2.102.112.540,00					2.518.700.000,00	
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	50 %	2.102.112.540,00				-	2.518.700.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			36.433.500,00			Perusahaan		77.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		-	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Peningkatan	-	36.433.500,00 24.292.080,00			Perusahaan		77.700.000,00 53.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Tendaftar di WLKP Online	-	12.141.420,00				-	24.700.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			12.141.420,00					24.700.000,00	
		Tertaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Tendaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Tendaftar di WLKP Online	4 Perusahaan	12.141.420,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	24.700.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Peningkatan			24.292.080,00					53.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Peningkatan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Peningkatan	1 Laporan	24.292.080,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	53.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			2.065.679.040,00			Perusahaan		2.441.000.000,00	
		-			2.065.679.040,00			Perusahaan		2.441.000.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	18.033.680,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-	10.048.560,00				-	37.400.000,00	
			Tertaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	2.037.596.800,00				-	2.383.600.000,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.048.560,00					37.400.000,00	
		Tertaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	10.048.560,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	37.400.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			18.033.680,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	18.033.680,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			2.037.596.800,00					2.383.600.000,00	
		Tertaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tertaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16434 Orang	2.037.596.800,00	Kab. Luwu	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.383.600.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			17.194.420,00					31.500.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			17.194.420,00					31.500.000,00	
	90. 3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			17.194.420,00					31.500.000,00	
			Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	63 %	17.194.420,00				-	31.500.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			17.194.420,00			Kawasan Transmigrasi		31.500.000,00	
					17.194.420,00			Kawasan Transmigrasi		31.500.000,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-	17.194.420,00				-	31.500.000,00	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman			17.194.420,00					31.500.000,00	
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga	17.194.420,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	31.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.334.977.558,00					4.968.618.374,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.334.977.558,00					4.968.618.374,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.334.977.558,00					4.968.618.374,00	
	91. 2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.094.294.249,00					3.496.738.796,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	3.094.294.249,00				-	3.466.738.796,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.317.000,00			Aparatur Sipil Negara Kab. Luwu		35.000.000,00	
		-			23.317.000,00			Aparatur Sipil Negara Kab. Luwu		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	23.317.000,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0,00				-	5.000.000,00	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			23.317.000,00					30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	23.317.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.565.012.057,00			Aparatur Sipil Negara Kab. Luwu		2.759.032.931,00	
		-			2.565.012.057,00			Aparatur Sipil Negara Kab. Luwu		2.759.032.931,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	71.040.000,00				-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.493.972.057,00				-	2.668.432.931,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.493.972.057,00					2.668.432.931,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	2.493.972.057,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I N	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.668.432.931,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			71.040.000,00					90.600.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.040.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I N	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	90.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.383.500,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		8.000.000,00	
		-			6.383.500,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	6.383.500,00				-	8.000.000,00	
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.383.500,00					8.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan Laporan	6.383.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I N	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah			0,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		75.000.000,00	
		-			0,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00				-	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00				-	30.000.000,00	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I N	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0,00					45.000.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	0,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			165.940.376,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		243.288.865,00	
		-			165.940.376,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		243.288.865,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	3.000.000,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	12.000.000,00				-	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	108.194.000,00				-	131.729.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	11.709.426,00				-	11.706.665,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	31.036.950,00				-	72.853.200,00	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.036.950,00					72.853.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	31.036.950,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I N	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	72.853.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.000.000,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I N	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			11.709.426,00					11.706.665,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19 Paket	11.709.426,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I N	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	11.706.665,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			108.194.000,00					131.729.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	108.194.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	131.729.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12.000.000,00					24.000.000,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I N	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	24.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37.750.000,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		75.000.000,00	
		-			37.750.000,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		75.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	37.750.000,00				-	75.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			37.750.000,00					75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	37.750.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			248.249.878,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		251.849.000,00	
		-			248.249.878,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		251.849.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	47.849.878,00				-	47.849.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	200.400.000,00				-	204.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			47.849.878,00					47.849.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47.849.878,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I O	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	47.849.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			200.400.000,00					204.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I O	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	204.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.641.438,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		49.568.000,00	
		-			47.641.438,00			Aparatur di Lingkungan DP3A Kab.Luwu		49.568.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	47.641.438,00				-	49.568.000,00	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47.641.438,00					49.568.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	47.641.438,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I O	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	49.568.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
92.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			64.996.176,00					119.986.062,00	
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Pada Belanja Langsung APBD	0,45 Persen	64.996.176,00				-	119.986.062,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			24.999.917,00			Gabungan Organisasi Wanita, Lintas Sektor , OPD dan Masyarakat Kab.Luwu		30.000.000,00	
		-			24.999.917,00			Gabungan Organisasi Wanita, Lintas Sektor , OPD dan Masyarakat Kab.Luwu		30.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-	24.999.917,00				-	30.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			24.999.917,00					30.000.000,00	
		Tertaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	67 Lembaga	24.999.917,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			39.996.259,00			Gabungan Organisasi Wanita, Lintas Sektor , OPD dan Masyarakat Kab.Luwu		89.986.062,00	
		-			39.996.259,00			Gabungan Organisasi Wanita, Lintas Sektor , OPD dan Masyarakat Kab.Luwu		89.986.062,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	39.996.259,00				-	39.986.062,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	0,00				-	50.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota			0,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	100 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota			39.996.259,00					39.986.062,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	5 Lembaga	39.996.259,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	39.986.062,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
93.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			65.723.420,00					521.685.140,00	
			Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	25 Angka	65.723.420,00				-	224.740.000,00	
				-	0,00				-	116.945.140,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			0,00			-		116.945.140,00	
					0,00					116.945.140,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-	0,00				-	18.034.500,00	
			Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-	0,00				-	68.910.640,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pembambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota			0,00					18.034.500,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pembambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	4 Kegiatan	0,00	Kab. Luwu	-		-	18.034.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0012	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota			0,00					68.910.640,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	300 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	68.910.640,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			65.723.420,00			Perempuan korban kekerasan dan Instansi terkait Kab. Luwu		374.740.000,00	
					65.723.420,00			Perempuan korban kekerasan dan Instansi terkait Kab. Luwu		374.740.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-	0,00				-	94.740.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	65.723.420,00				-		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-	0,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota			65.723.420,00					94.740.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30 Orang	65.723.420,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	94.740.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota			0,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	15 Orang	0,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0013	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0015	Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	15 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00			-		30.000.000,00	
		-			0,00			-		30.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	0,00				-	30.000.000,00	
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
94.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			0,00					160.600.000,00	
		Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Diberdayakan		87 Persen	0,00				-	160.600.000,00	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,00			Gabungan Organisasi Wanita, Lintas Sektor , perempuan potensial ,perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya		40.000.000,00	
		-			0,00			Gabungan Organisasi Wanita, Lintas Sektor , perempuan potensial ,perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya		40.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi penguatan kewenangan Kabupaten/Kota	-	0,00				-	40.000.000,00	
	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			0,00					40.000.000,00	
		Tertaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan advokasi dan sosialisasi penguatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi penguatan kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	0,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,00			Gabungan Organisasi Wanita, Lintas Sektor , perempuan potensial ,perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya		120.600.000,00	
		-			0,00			Gabungan Organisasi Wanita, Lintas Sektor , perempuan potensial ,perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya		120.600.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	-	0,00				-	90.600.000,00	
	2.08.04.2.03.0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota			0,00					90.600.000,00	
		Tertaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	25 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	90.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tertaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	15 Orang	0,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
95.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			0,00					60.097.736,00	
		Persentase Kebijakan /program yang berbasis Data Gender dan Anak yang tersedia dalam sistem		100 Persen	0,00				-	60.097.736,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00			Pemangku kepentingan , Lintas Sektor dan Instansi Terkait		60.097.736,00	
		-			0,00			Pemangku kepentingan , Lintas Sektor dan Instansi Terkait		60.097.736,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-	0,00				-	30.097.736,00	
			Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanaan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-	0,00				-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.08.05.2.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas			0,00					30.000.000,00	
		Terwujudnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA di daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanaan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyaljian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota			0,00					30.097.736,00	
		Tersediannya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.097.736,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
96.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			34.310.322,00					150.600.000,00	
			Persentase Peningkatan Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA) (%)	85,80 Persen	34.310.322,00				-	120.600.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			0,00			Pemangku kepentingan , Lintas Sektor dan Instansi Terkait		120.600.000,00	
		-			0,00			Pemangku kepentingan , Lintas Sektor dan Instansi Terkait		120.600.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-	0,00				-	90.600.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	0,00				-	30.000.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota			0,00					90.600.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	5 Lembaga	0,00	Kab. Luwu	-		-	90.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	50 Orang	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			34.310.322,00			Pemangku kepentingan , Lintas Sektor dan Instansi Terkait		30.000.000,00	
		-			34.310.322,00			Pemangku kepentingan , Lintas Sektor dan Instansi Terkait		30.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	34.310.322,00				-	30.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota			34.310.322,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	50 Orang	34.310.322,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
97.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			75.653.391,00					458.910.640,00	
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (%)	100 Persen	55.653.009,00				-	130.000.000,00	
			-	-	20.000.382,00				-	148.910.640,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			55.653.009,00			Anak Korban kekerasan , Pemangku kepentingan dan Lintas Sektor terkait		130.000.000,00	
		-			55.653.009,00			Anak Korban kekerasan , Pemangku kepentingan dan Lintas Sektor terkait		130.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-	55.653.009,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pembambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota			55.653.009,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pembambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	23 Kegiatan	55.653.009,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			9.999.930,00			-		230.000.000,00	
		-			9.999.930,00			-		230.000.000,00	
			Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesmas, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-	0,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-	9.999.930,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-	0,00				-	30.000.000,00	
2.08.07.2.02.0016		Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota			9.999.930,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	50 Orang	9.999.930,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.0018		Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.0019		Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota			0,00					50.000.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.0020		Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.0021		Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.0022		Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.0023		Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota			0,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.000.452,00			-		98.910.640,00	
					10.000.452,00					98.910.640,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi		10.000.452,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	0,00				-	68.910.640,00	
2.08.07.2.03.0015		Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota			10.000.452,00					30.000.000,00	
		Tertaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	3 Lembaga	10.000.452,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03.0016		Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota			0,00					68.910.640,00	
		Tertaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	300 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	68.910.640,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN			3.958.860.556,00					5.011.029.418,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.958.860.556,00					5.011.029.418,00	
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3.958.860.556,00					5.011.029.418,00	
98. 2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.484.118.984,00					4.197.563.145,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsut Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	3.484.118.984,00				-	4.149.903.145,00	
2.09.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.665.459,00			-		26.250.876,00	
					17.665.459,00					26.250.876,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.459.519,00				-	2.356.948,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4.110.012,00				-	5.208.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.246.767,00				-	2.048.796,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.820.964,00				-	3.248.726,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.911.824,00				-	3.019.063,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.906.300,00				-	4.022.022,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.210.073,00				-	6.347.321,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.110.012,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.208.000,00	
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.911.824,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.019.063,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.820.964,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.248.726,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.459.519,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.356.948,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.246.767,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.048.796,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.906.300,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.022.022,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.210.073,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.347.321,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.040.124.029,00				-	3.091.381.758,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	87.360.000,00				-	105.420.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	4.688.613,00				-	7.165.847,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	11.298.245,00				-	12.169.612,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.936.777.171,00				-	2.966.626.299,00	
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	87.360.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	105.420.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.688.613,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.165.847,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	11.298.245,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.169.612,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	3.983.165,00				-	5.850.027,00	
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.983.165,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.850.027,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	4.863.544,00				-	18.827.930,00	
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00				-	10.000.000,00	
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	4.863.544,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	8.827.930,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.745.496,00				-	2.669.839,00	
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.745.496,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.669.839,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.203.436,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.371.378,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.202.060,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	8.499.236,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	9.000.000,00				-	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			12.241.623,00					17.689.526,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12.241.623,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	17.689.526,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			4.000.000,00					6.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			111.954.000,00					305.786.600,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	111.954.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	305.786.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.792.950,00					267.195.975,00	
		-			35.792.950,00					267.195.975,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0,00			-	-	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	35.792.950,00			-	-	17.195.975,00	
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00					250.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.792.950,00					17.195.975,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	35.792.950,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	17.195.975,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			187.083.502,00			-	-	279.260.000,00	
		-			187.083.502,00			-	-	279.260.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	20.283.502,00			-	-	47.660.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	166.800.000,00			-	-	231.600.000,00	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.283.502,00					47.660.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	20.283.502,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	47.660.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			166.800.000,00					231.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	166.800.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	231.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.259.720,00			-	-	154.780.000,00	
		-			46.259.720,00			-	-	154.780.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1.385.000,00			-	-	100.060.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	40.814.720,00			-	-	47.660.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4.060.000,00			-	-	7.060.000,00	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40.814.720,00					47.660.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	40.814.720,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	47.660.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.060.000,00					7.060.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	4.060.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	7.060.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.385.000,00					100.060.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.385.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	100.060.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
99.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			376.581.140,00					619.738.069,00	
			Tingkat Konsumsi Energi	2250 Kkal/Kapita/Hari	376.581.140,00			-	-	619.738.069,00	
			Tingkat Konsumsi Protein	62,5 Gram/Kapita/Hari	376.581.140,00			-	-	619.738.069,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			89.059.550,00			-	-	139.237.404,00	
		-			89.059.550,00			-	-	139.237.404,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-	2.924.562,00			-	-	6.705.792,00	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-	23.682.183,00			-	-	1.229.298,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	3.356.276,00			-	-	6.769.512,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-	39.130.409,00			-	-	54.130.642,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	19.966.120,00			-	-	61.048.905,00	
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	-	0,00			-	-	9.353.255,00	
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			19.966.120,00					61.048.905,00	
		Tertaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 Keluarga	19.966.120,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	61.048.905,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			39.130.409,00					54.130.642,00	
		Tertaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	39.130.409,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	54.130.642,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			0,00					9.353.255,00	
		Tertaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	9.353.255,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			23.682.183,00					1.229.298,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	13 Laporan	23.682.183,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	1.229.298,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			3.356.276,00					6.769.512,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	3.356.276,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	6.769.512,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			2.924.562,00					6.705.792,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.924.562,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	6.705.792,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			204.238.992,00			Masyarakat		337.035.560,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		-			204.238.992,00			Masyarakat		337.035.560,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	199.944.992,00				-	326.352.000,00	
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	-	4.294.000,00				-	10.683.560,00	
2.09.03.2.02.0003		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			199.944.992,00					326.352.000,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12.50 Ton	199.944.992,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	326.352.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.0005		Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			4.294.000,00					10.683.560,00	
		Tertaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10 Ton	4.294.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.683.560,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			83.282.598,00				-	143.465.105,00	
		-			83.282.598,00					143.465.105,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	65.256.815,00				-	116.863.225,00	
			Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	18.025.783,00				-	26.601.880,00	
2.09.03.2.04.0002		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			65.256.815,00					116.863.225,00	
		Tertaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	65.256.815,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	116.863.225,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0005		Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			18.025.783,00					26.601.880,00	
		Tertaksananya Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	18.025.783,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	26.601.880,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
100. 2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			62.528.601,00					160.920.804,00	
			Persentase Desa/Kelurahan tahan pangan	85,46 persen	62.528.601,00				-	160.920.804,00	
2.09.04.2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			9.740.164,00					18.782.099,00	
		-			9.740.164,00					18.782.099,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	-	9.740.164,00				-	18.782.099,00	
2.09.04.2.01.0001		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			9.740.164,00					18.782.099,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	9.740.164,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	18.782.099,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			52.788.437,00					142.138.705,00	
		-			52.788.437,00					142.138.705,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-	20.499.951,00				-	116.285.435,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-	10.248.616,00				-	10.466.840,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	19.605.435,00				-	9.180.840,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-	2.434.435,00				-	6.205.590,00	
2.09.04.2.02.0002		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			19.605.435,00					9.180.840,00	
		Tertaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.605.435,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)		-	9.180.840,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			10.248.616,00					10.466.840,00	
		Tertaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	10.248.616,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.466.840,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02.0004		Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			20.499.951,00					116.285.435,00	
		Tertaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	20.499.951,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	116.285.435,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02.0005		Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			2.434.435,00					6.205.590,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.434.435,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.205.590,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
101. 2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			35.631.831,00					32.807.400,00	
			Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diuji	100 persen	35.631.831,00				-	32.807.400,00	
2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			35.631.831,00					32.807.400,00	
		-			35.631.831,00					32.807.400,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00				-	7.500.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-	35.631.831,00				-	25.307.400,00	
2.09.05.2.01.0004		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			0,00					7.500.000,00	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0007		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			35.631.831,00					25.307.400,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	35.631.831,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)		-	25.307.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS PERTANAHAN			5.141.064.173,00					6.907.400.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.141.064.173,00					6.907.400.000,00	
2.10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			5.141.064.173,00					6.907.400.000,00	
102. 2.10.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.018.258.008,00					3.989.400.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	2.018.258.008,00				-	3.921.400.000,00	
2.10.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.723.956,00			Dinas Pertanian Kab. Luwu		21.000.000,00	
		-			9.723.956,00			Dinas Pertanian Kab. Luwu		21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	949.910,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6.182.400,00				-	10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	967.106,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	658.620,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	965.920,00				-	3.000.000,00	
2.10.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.182.400,00					10.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.182.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	10.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			965.920,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	965.920,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	3.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			658.620,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	658.620,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	3.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			949.910,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	949.910,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	2.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			967.106,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	967.106,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	2.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.657.080.833,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		3.190.000.000,00	
		-			1.657.080.833,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		3.190.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	66.480.000,00				-	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	599.720,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.204.700,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.588.796.413,00				-	3.000.000.000,00	
2.10.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.588.796.413,00					3.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.588.796.413,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			66.480.000,00					170.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	66.480.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	170.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			599.720,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	599.720,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.204.700,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.204.700,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			564.180,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		5.000.000,00	
		-			564.180,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	564.180,00				-	5.000.000,00	
2.10.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			564.180,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	564.180,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah			0,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		0,00	
		-			0,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00				-	0,00	
2.10.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00					0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	0,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			89.349.823,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		335.000.000,00	
		-			89.349.823,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	500.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	68.727.000,00				-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5.318.391,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	10.842.130,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.256.263,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	445.483,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2.260.556,00				-	10.000.000,00	
2.10.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			445.483,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	445.483,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.260.556,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.260.556,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.318.391,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.318.391,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.256.263,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.256.263,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			10.842.130,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	10.842.130,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu			500.000,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			68.727.000,00					250.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	68.727.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			242.256.060,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		423.400.000,00	
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8.268.000,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	228.000.000,00					400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	5.988.060,00					8.400.000,00	
2.10.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.988.060,00					8.400.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.988.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	8.400.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.268.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.268.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pajak Daerah		-	15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			228.000.000,00					400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	228.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.283.156,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		15.000.000,00	
		-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	19.283.156,00			Dinas Pertanahan Kab. Luwu		15.000.000,00	
2.10.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			19.283.156,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	19.283.156,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
103. 2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			36.266.171,00					83.000.000,00	
			Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	36.266.171,00				-	83.000.000,00	
2.10.04.2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			36.266.171,00			Masyarakat		83.000.000,00	
		-	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	23.823.473,00			Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	12.442.698,00					33.000.000,00	
2.10.04.2.01.0004		Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			23.823.473,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	23.823.473,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.04.2.01.0005		Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			12.442.698,00					33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
104.	2.10.05	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	12.442.698,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	33.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			3.000.000.000,00					2.400.000.000,00	
			Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	100 Persentase	3.000.000.000,00			-	-	2.400.000.000,00	
		2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.000.000.000,00			Masyarakat		2.400.000.000,00	
		-			3.000.000.000,00			Masyarakat		2.400.000.000,00	
2.10.05.2.01.0002			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	3.000.000.000,00			-	-	2.400.000.000,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.000.000.000,00					2.400.000.000,00	
105.	2.10.06	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.000.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	2.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			21.992.356,00					35.000.000,00	
			Persentase penyelesaian redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang diselesaikan	100 %	21.992.356,00			-	-	30.000.000,00	
		2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			21.992.356,00			Masyarakat		35.000.000,00	
		-			21.992.356,00			Masyarakat		35.000.000,00	
2.10.06.2.01.0002			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	-	4.995.260,00			-	-	5.000.000,00	
			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	11.977.830,00			-	-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	4.636.106,00			-	-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	-	383.160,00			-	-	0,00	
					11.977.830,00					25.000.000,00	
2.10.06.2.01.0003		Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	11.977.830,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			383.160,00					0,00	
		Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	3 Dokumen	383.160,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00	DINAS PERTANAHAN
		2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			4.636.106,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.636.106,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.10.06.2.01.0006			Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria		4.995.260,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	2 Berita Acara	4.995.260,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
		106. 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			64.547.638,00					400.000.000,00	
			Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat	100 %	64.547.638,00			-	-	400.000.000,00	
		2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			64.547.638,00			Masyarakat & Pemerintah Kab. Luwu		400.000.000,00	
2.10.10.2.01.0003					64.547.638,00			Masyarakat & Pemerintah Kab. Luwu		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	64.547.638,00			-	-	400.000.000,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			64.547.638,00					400.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	64.547.638,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2	2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			6.964.374.443,00					10.930.723.855,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.964.374.443,00					10.930.723.855,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6.964.374.443,00					10.930.723.855,00	
		107. 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.233.646.331,00					3.148.052.185,00	
			Rata-Rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persentase	3.233.646.331,00			-	-	3.148.052.185,00	
2.11.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.495.921,00			-	-	19.647.713,00	
		-			8.495.921,00			-	-	19.647.713,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.384.970,00			-	-	2.099.085,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.892.130,00			-	-	12.726.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	761.041,00			-	-	754.085,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	950.532,00				-	749.648,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.144.804,00				-	1.168.396,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1.126.116,00				-	1.045.318,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.236.328,00				-	1.105.181,00	
2.11.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.892.130,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	12.726.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.144.804,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	1.168.396,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	950.532,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	749.648,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.384.970,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	2.099.085,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	761.041,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	754.085,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.126.116,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	1.045.318,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.236.328,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	1.105.181,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.632.384.664,00				-	2.577.514.550,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	135.360.000,00				-	87.480.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.362.581,00				-	1.379.185,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.055.514,00				-	1.249.296,00	
2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.494.606.569,00				-	2.487.406.069,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	2.494.606.569,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.487.406.069,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	135.360.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	87.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.362.581,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	1.379.185,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.055.514,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	1.249.296,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.124.028,00				-	6.324.136,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5.124.028,00				-	6.324.136,00	
2.11.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.124.028,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	6.324.136,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			29.700.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	29.700.000,00				-	0,00	
				-	29.700.000,00				-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
2.11.01.2.05.0002		Pengadaan Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			29.700.000,00					0,00	
		Tersedianya Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	29.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			136.807.383,00					124.703.786,00	
		-			136.807.383,00					124.703.786,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1.200.000,00			-	-	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	12.000.000,00			-	-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	97.651.521,00			-	-	109.078.601,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1.063.929,00			-	-	977.077,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	7.086.615,00			-	-	10.398.040,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.780.080,00			-	-	3.535.280,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	714.788,00			-	-	714.788,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	14.310.450,00			-	-	0,00	
2.11.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			714.788,00					714.788,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	714.788,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	714.788,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.310.450,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.310.450,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.063.929,00					977.077,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.063.929,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	977.077,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.780.080,00					3.535.280,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.780.080,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	3.535.280,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			7.086.615,00					10.398.040,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	7.086.615,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	10.398.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			97.651.521,00					109.078.601,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	97.651.521,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	109.078.601,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12.000.000,00					0,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan I 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			268.559.975,00					261.550.000,00	
		-			268.559.975,00					261.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	70.000.000,00			-	-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	192.000.000,00			-	-	189.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1.950.000,00			-	-	1.950.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	4.609.975,00			-	-	0,00	
2.11.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.609.975,00					0,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.609.975,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			70.000.000,00					70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.950.000,00					1.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.950.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	1.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			192.000.000,00					189.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	192.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	189.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152.574.360,00			-		158.312.000,00	
		-			152.574.360,00			-		158.312.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	152.574.360,00			-		158.312.000,00	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			152.574.360,00					158.312.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	152.574.360,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa I I 1	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	158.312.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
108.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			559.140.000,00					16.034.000,00	
			Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persentase	559.140.000,00				-	16.034.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			250.000.000,00			-		6.894.000,00	
		-			250.000.000,00			-		6.894.000,00	
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	-	250.000.000,00			-		6.894.000,00	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			250.000.000,00					6.894.000,00	
		RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	6.894.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			309.140.000,00			-		9.140.000,00	
		-			309.140.000,00			-		9.140.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-	300.000.000,00			-		9.140.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM Kabupaten/Kota yang Disusun	-	9.140.000,00			-		0,00	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM			9.140.000,00					0,00	
		Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJM Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	9.140.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			300.000.000,00					9.140.000,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	9.140.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
109.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			185.843.647,00					334.363.074,00	
			Persentase Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Air	77,68 Persentase	185.843.647,00				-	334.363.074,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			173.862.647,00			-		334.363.074,00	
		-			173.862.647,00					334.363.074,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	-	3.746.740,00			-		7.500.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	-	4.907.620,00			-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	6.679.940,00			-		9.830.477,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-	62.388.740,00			-		0,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	5.493.800,00			-		6.202.120,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	-	11.601.000,00			-		10.830.477,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	76.801.311,00			-		300.000.000,00	
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	-	2.243.496,00			-		0,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			5.493.800,00					6.202.120,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	5.493.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	6.202.120,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			6.679.940,00					9.830.477,00	
		Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	6.679.940,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	9.830.477,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			4.907.620,00					0,00	
		Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	4.907.620,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa I I 1	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			3.746.740,00					7.500.000,00	
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	3 Lokasi	3.746.740,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota			2.243.496,00					0,00	
		Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	2.243.496,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			62.388.740,00					0,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	62.388.740,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan			11.601.000,00					10.830.477,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	3 Paket	11.601.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	10.830.477,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			76.801.311,00					300.000.000,00	
		Tertaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	76.801.311,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			9.467.500,00			-		0,00	
		-			9.467.500,00			-		0,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	-	3.703.500,00			-	-	0,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	5.764.000,00			-		0,00	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			5.764.000,00					0,00	
		Tertaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	5.764.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan			3.703.500,00					0,00	
		Tertaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	1 Laporan	3.703.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.513.500,00			-		0,00	
		-			2.513.500,00			-		0,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	-	2.513.500,00			-	-	0,00	
	2.11.03.2.03.0014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan			2.513.500,00					0,00	
		Tertaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	1 Laporan	2.513.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
110.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1.007.091.871,00					8.114.000,00	
		Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)		70 Persentase	1.007.091.871,00			-	-	8.114.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			1.007.091.871,00			-		8.114.000,00	
		-			1.007.091.871,00			-		8.114.000,00	
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		-	1.007.091.871,00			-		8.114.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			1.007.091.871,00					8.114.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	1.007.091.871,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	8.114.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
111.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			7.513.964,00					14.779.647,00	
		Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Dalam Pengolahan B3 dan Limbah B3		50 Persentase	7.513.964,00			-	-	14.779.647,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			7.513.964,00			-		14.779.647,00	
		-			7.513.964,00			-		14.779.647,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	-	7.513.964,00				-	14.779.647,00	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			7.513.964,00					14.779.647,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	7.513.964,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	14.779.647,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
112.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			61.167.402,00					61.167.402,00	
			Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan	75 Persentase	61.167.402,00				-	61.167.402,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			61.167.402,00				-	61.167.402,00	
		-			61.167.402,00				-	61.167.402,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-	32.616.628,00				-	32.616.628,00	
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	-	7.310.000,00				-	7.310.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-	21.240.774,00				-	21.240.774,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			21.240.774,00					21.240.774,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	21.240.774,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	21.240.774,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			7.310.000,00					7.310.000,00	
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 Orang	7.310.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	7.310.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			32.616.628,00					32.616.628,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Badan Usaha	32.616.628,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	32.616.628,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
113.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			2.250.000,00					0,00	
			Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Lomba Lingkungan Hidup	75 Persen	2.250.000,00				-	0,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.250.000,00				-	0,00	
		-			2.250.000,00				-	0,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-	2.250.000,00				-	0,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			2.250.000,00					0,00	
		Tertaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15 Entitas	2.250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
114.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			15.043.547,00					15.043.547,00	
			Persentase Pengaduan masyarakat yang ditangani	75 Persentase	15.043.547,00				-	15.043.547,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			15.043.547,00				-	15.043.547,00	
		-			15.043.547,00				-	15.043.547,00	
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-	15.043.547,00				-	15.043.547,00	
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			15.043.547,00					15.043.547,00	
		Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Sanksi	15.043.547,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	15.043.547,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
115.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			1.892.677.681,00					7.333.170.000,00	
			Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	80 Persentase	1.892.677.681,00				-	7.333.170.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			1.892.677.681,00				-	7.333.170.000,00	
		-			1.892.677.681,00				-	7.333.170.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-	100.000.000,00				-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	-	270.003.181,00				-	0,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-	20.800.000,00				-	0,00	
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	-	15.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir	-	249.900.000,00				-	0,00	
			Jumlah sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-					-		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-	3.358.000,00				-	0,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-	1.209.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	-	15.916.500,00				-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-	7.200.000,00				-	7.333.170.000,00	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	-	1.500.000,00				-	0,00	
2.11.11.2.01.0004		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			20.800.000,00				-	0,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	22 Kelompok	20.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0007		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			7.200.000,00					7.333.170.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	7.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 1	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	7.333.170.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0008		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			100.000.000,00					0,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0009		Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah			270.003.181,00					0,00	
		Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	1 Unit	270.003.181,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0012		Penanganan sampah melalui pengangkutan			1.209.000.000,00					0,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	6077,54 Ton	1.209.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 1	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0016		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			1.500.000,00					0,00	
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	70 Persentase	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0017		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			3.358.000,00					0,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	15 Ton	3.358.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0020		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			249.900.000,00					0,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	6077,54 Ton	249.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 1	Retribusi Daerah - LRA		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0024		Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah			15.000.000,00					0,00	
		Tertaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	15 Ton	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0028		Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah			15.916.500,00					0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	100 Unit	15.916.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.895.413.747,00					5.580.578.725,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.895.413.747,00					5.580.578.725,00	
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.895.413.747,00					5.580.578.725,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
116.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.477.907.837,00					5.111.736.673,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	5.477.907.837,00				-	5.110.536.673,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.668.630,00			Aparatur Sipil Negara		18.900.000,00	
		-			19.668.630,00			Aparatur Sipil Negara		18.900.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.082.650,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	13.227.200,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.062.000,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.156.400,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.504.500,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.635.880,00				-	0,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.227.200,00					15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.227.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.504.500,00					1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.504.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.156.400,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.156.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.082.650,00					1.200.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.082.650,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.062.000,00					1.200.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.062.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.635.880,00					0,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.635.880,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.632.839.145,00			Aparatur Sipil Negara		3.624.939.325,00	
		-			3.632.839.145,00			Aparatur Sipil Negara		3.624.939.325,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	119.596.250,00				-	110.436.250,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.335.170,00				-	1.676.750,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.893.900,00				-	2.812.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.510.013.825,00				-	3.510.013.825,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.510.013.825,00					3.510.013.825,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.510.013.825,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.510.013.825,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			119.596.250,00					110.436.250,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119.596.250,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Pendapatan Bagi Hasil		-	110.436.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.335.170,00					1.676.750,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.335.170,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.676.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.893.900,00					2.812.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	1.893.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I O	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.812.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.966.980,00			Aparatur Sipil Negara		7.424.320,00	
		-			6.966.980,00			Aparatur Sipil Negara		7.424.320,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5.926.900,00				-	6.375.300,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1.040.080,00				-	1.049.020,00	
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.040.080,00					1.049.020,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertindakannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.040.080,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.049.020,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.926.900,00					6.375.300,00	
		Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.926.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.375.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.552.520,00			Aparatur Sipil Negara		2.804.480,00	
		-			2.552.520,00			Aparatur Sipil Negara		2.804.480,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	2.552.520,00				-	2.804.480,00	
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2.552.520,00					2.804.480,00	
		Tertindakannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.552.520,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.804.480,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			375.258.556,00			Aparatur Sipil Negara		190.809.548,00	
		-			375.258.556,00			Aparatur Sipil Negara		190.809.548,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	13.500.000,00				-	13.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	76.104.200,00				-	127.657.600,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	13.711.300,00				-	14.993.150,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	20.199.698,00				-	20.642.774,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.183.740,00				-	5.209.346,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	37.291.982,00				-	6.511.982,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	209.267.636,00				-	2.294.696,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			37.291.982,00					6.511.982,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	37.291.982,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.511.982,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			209.267.636,00					2.294.696,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	209.267.636,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.294.696,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.711.300,00					14.993.150,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.711.300,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	14.993.150,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.183.740,00					5.209.346,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	5.183.740,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.209.346,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			13.500.000,00					13.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	13.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	13.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			20.199.698,00					20.642.774,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket	20.199.698,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.642.774,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			76.104.200,00					127.657.600,00	
		Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	76.104.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	127.657.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			377.533.648,00			Aparatur Sipil Negara		500.000.000,00	
		-			377.533.648,00			Aparatur Sipil Negara		500.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	377.533.648,00				-	500.000.000,00	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			377.533.648,00					500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	377.533.648,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			915.912.328,00			Aparatur Sipil Negara		619.881.820,00	
		-			915.912.328,00			Aparatur Sipil Negara		619.881.820,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	472.967.180,00				-	176.914.712,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	440.400.000,00				-	440.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.545.148,00				-	2.567.108,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.545.148,00					2.567.108,00	
		Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.545.148,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.567.108,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			472.967.180,00					176.914.712,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	472.967.180,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	176.914.712,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			440.400.000,00					440.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	440.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pajak Daerah		-	440.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			147.176.030,00			Aparatur Sipil Negara		146.977.180,00	
	-				147.176.030,00			Aparatur Sipil Negara		146.977.180,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	132.076.030,00				-	139.177.180,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		11.440.000,00				-	4.140.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3.660.000,00				-	3.660.000,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			132.076.030,00					139.177.180,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	132.076.030,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	139.177.180,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.440.000,00					4.140.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	11.440.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.140.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.660.000,00					3.660.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	3.660.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.660.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
117.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			310.094.170,00					333.132.896,00	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	78 Persen	310.094.170,00				-	333.132.896,00	
			Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	57 Persen	310.094.170,00				-	333.132.896,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			280.079.410,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		302.719.896,00	
	-				280.079.410,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		302.719.896,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	1.518.160,00				-	1.205.380,00	
			Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	-	1.994.200,00				-	15.812.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	15.239.840,00				-	23.313.450,00	
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	261.327.210,00				-	262.388.866,00	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			1.518.160,00					1.205.380,00	
		Tertaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	1.518.160,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.205.380,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			15.239.840,00					23.313.450,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	15.239.840,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	23.313.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			261.327.210,00					262.388.866,00	
		Tertaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1 Laporan	261.327.210,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Bagi Hasil		-	262.388.866,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk			1.994.200,00					15.812.200,00	
		Tertaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	4 Dokumen	1.994.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.812.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			30.014.760,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		30.413.000,00	
	-				30.014.760,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		30.413.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-	6.576.760,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	23.438.000,00				-	30.413.000,00	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			23.438.000,00					30.413.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	23.438.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.413.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			6.576.760,00					0,00	
		Tertfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	6 Laporan	6.576.760,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
118.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			50.310.730,00					52.612.906,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan	97,50 Persen	50.310.730,00				-	52.612.906,00	
			Persentase Akta kematian yang diterbitkan	100 Persen	50.310.730,00				-	52.612.906,00	
			Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan	84 Persen	50.310.730,00				-	52.612.906,00	
			Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan	35 Persen	50.310.730,00				-	52.612.906,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			22.562.210,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		22.199.906,00	
		-			22.562.210,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		22.199.906,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	-	16.765.710,00				-	18.991.410,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	5.796.500,00				-	3.208.496,00	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			5.796.500,00					3.208.496,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	5.796.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.208.496,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			16.765.710,00					18.991.410,00	
		Tertaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	16.765.710,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	18.991.410,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			27.748.520,00					30.413.000,00	
		-			27.748.520,00					30.413.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-	4.310.520,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	23.438.000,00				-	30.413.000,00	
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			23.438.000,00					30.413.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	23.438.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.413.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			4.310.520,00					0,00	
		Tertfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	6 Laporan	4.310.520,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
119	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			50.368.900,00					75.465.220,00	
			Persentase Informasi kependudukan yang dimanfaatkan	100 Persen	50.368.900,00				-	75.465.220,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			4.618.080,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		7.966.180,00	
		-			4.618.080,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		7.966.180,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	4.618.080,00				-	7.966.180,00	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			4.618.080,00					7.966.180,00	
		Tertaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	4.618.080,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.966.180,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			45.750.820,00					67.499.040,00	
		-			45.750.820,00					67.499.040,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	-	5.094.680,00				-	17.228.040,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	4.066.140,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		36.590.000,00				-	50.271.000,00	
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			36.590.000,00					50.271.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	36.590.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.271.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			4.066.140,00					0,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	4.066.140,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			5.094.680,00					17.228.040,00	
		Tertaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen	5.094.680,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	17.228.040,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
120	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			6.732.110,00					7.631.030,00	
			Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan	100 Persen	6.732.110,00				-	7.631.030,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			6.732.110,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		7.631.030,00	
		-			6.732.110,00			Masyarakat Kabupaten Luwu		7.631.030,00	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	3.461.930,00				-	4.581.350,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-	3.270.180,00				-	3.049.680,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			3.461.930,00					4.581.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.461.930,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tanamanai 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.581.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			3.270.180,00					3.049.680,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	3.270.180,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.049.680,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			13.602.755.777,00					14.142.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.602.755.777,00					14.142.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			13.602.755.777,00					14.142.000.000,00	
	121. 2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.209.794.631,00					4.310.000.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	14.250.606,00				-	33.000.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	4.195.544.025,00				-	4.179.000.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.250.606,00			Desa dan Masyarakat		36.000.000,00	
					14.250.606,00			Desa dan Masyarakat		36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	0,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5.189.354,00				-	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	2.058.070,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.499.724,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.499.958,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.003.500,00				-	6.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.189.354,00					16.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.189.354,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.499.958,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.499.958,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.499.724,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.499.724,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			0,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.003.500,00					6.000.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.003.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			2.058.070,00					5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	2.058.070,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.538.833.124,00			Masyarakat		3.478.000.000,00	
		-			3.538.833.124,00			Masyarakat		3.478.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	101.640.000,00				-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.533.500,00				-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2.499.847,00				-	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.432.159.777,00				-	3.350.000.000,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.432.159.777,00					3.350.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.432.159.777,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			101.640.000,00					120.000.000,00	
		Tertakutannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	101.640.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.533.500,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan	2.533.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.499.847,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.499.847,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.381.075,00			Masyarakat		9.000.000,00	
		-			7.381.075,00			Masyarakat		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	7.381.075,00				-	9.000.000,00	
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			7.381.075,00					9.000.000,00	
		Tertakutannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	7.381.075,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.639.986,00			Masyarakat		31.000.000,00	
		-			25.639.986,00			Masyarakat		31.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	5.799.986,00				-	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	19.840.000,00				-	22.000.000,00	
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			19.840.000,00					22.000.000,00	
		Tersedianya Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	19.840.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5.799.986,00					9.000.000,00	
		Tertakutannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.799.986,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			150.684.770,00			Masyarakat		238.000.000,00	
		-			150.684.770,00			Masyarakat		238.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	19.200.000,00				-	21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	11.991.850,00				-	13.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	96.702.921,00				-	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5.101.510,00				-	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	5.002.264,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	4.983.680,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.488.812,00				-	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4.213.733,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	0,00				-	12.000.000,00	
2.13.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.488.812,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.488.812,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.213.733,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.213.733,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00					12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.101.510,00					11.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	5.101.510,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.983.680,00					6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.983.680,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			19.200.000,00					21.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	19.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			5.002.264,00					6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.002.264,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu			11.991.850,00					13.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	11.991.850,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			96.702.921,00					160.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	96.702.921,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			61.191.010,00			Masyarakat		61.000.000,00	
		-			61.191.010,00			Masyarakat		61.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	9.622.200,00				-	11.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	51.568.810,00				-	50.000.000,00	
2.13.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel			9.622.200,00					11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	9.622.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			51.568.810,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	51.568.810,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			332.796.000,00			Masyarakat		326.000.000,00	
		-			332.796.000,00			Masyarakat		326.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	21.996.000,00				-	23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	310.800.000,00				-	303.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			21.996.000,00					23.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.996.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			310.800.000,00					303.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	310.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	303.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.018.060,00			Masyarakat		131.000.000,00	
		-			79.018.060,00			Masyarakat		131.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	21.580.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	45.868.060,00				-	70.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	11.570.000,00				-	11.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			45.868.060,00					70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	45.868.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.570.000,00					11.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11.570.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			21.580.000,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.580.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
122.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			0,00					25.000.000,00	
			Persentase desa yang dilakukan penataan desa	76 Persen	0,00				-	5.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			0,00			Masyarakat		25.000.000,00	
		-			0,00			Masyarakat		25.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terasilitasi Penamaan dan Kode Desa	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Kewenangannya	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	-	0,00				-	5.000.000,00	
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			0,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Desa Desa	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			0,00					5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	207 Desa Desa	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa			0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	207 Desa Desa	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitas Penamaan dan Kode Desa			0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	207 Desa Desa	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa			0,00					5.000.000,00	
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
123.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			20.000.000,00					36.000.000,00	
			Persentase program kerja sama antar desa yang berlanjut setelah tahap awal pelaksanaan	100 Persen	10.000.000,00				-	36.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa			20.000.000,00			Desa dan Masyarakat		36.000.000,00	
		-			20.000.000,00			Desa dan Masyarakat		36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	10.000.000,00				-	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-	10.000.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-	0,00				-	10.000.000,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			10.000.000,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			0,00					10.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan			10.000.000,00					11.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	20 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
124.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			8.312.961.146,00					8.426.000.000,00	
			Indeks SDGs Desa	12.0773 Persen	8.312.961.146,00				-	8.331.000.000,00	
			Persentase Bumdes yang dikelola dengan baik	30 Persen	8.312.961.146,00				-	8.331.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			8.312.961.146,00			Desa dan Masyarakat		8.426.000.000,00	
		-			8.312.961.146,00			Desa dan Masyarakat		8.426.000.000,00	
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	130.640,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-	496.480,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-	100.000.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	0,00				-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	20.000.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	499.782,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	3.450.000.000,00				-	3.460.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-	499.770,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	100.859.484,00				-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	15.000.000,00				-	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-	25.000.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	474.990,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	4.600.000.000,00				-	4.600.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			15.000.000,00					16.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	207 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			499.770,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	499.770,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			0,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			3.450.000.000,00					3.460.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	207 Dokumen	3.450.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	3.460.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			496.480,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	414 Orang	496.480,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			0,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	207 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			0,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			100.859.484,00					200.000.000,00	
		Tertaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	207 Dokumen	100.859.484,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			4.600.000.000,00					4.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	92 Laporan	4.600.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			474.990,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Laporan	474.990,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Facilitasi Penyusunan Profil Desa			25.000.000,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	207 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			20.000.000,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	15 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa			499.782,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	207 Dokumen	499.782,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			130.640,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	130.640,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			100.000.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	30 Desa	100.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			0,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
125.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1.060.000.000,00					1.345.000.000,00	
			Presentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	58 %	1.020.000.000,00				-	1.265.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.060.000.000,00			Desa dan Masyarakat		1.345.000.000,00	
		-			1.060.000.000,00			Desa dan Masyarakat		1.345.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	20.000.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketertaman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-	1.000.000.000,00				-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-	20.000.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	20.000.000,00				-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bertaya Saine	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	0,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	0,00				-	10.000.000,00	
2.13.05.2.01.0001		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			20.000.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	8 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0002		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			20.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			0,00					10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0004		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			0,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0005		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			20.000.000,00					50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	22 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0008		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketetraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketetraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketetraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	22 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1.000.000.000,00					1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	207 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5.887.816.882,00					325.319.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.887.816.882,00					325.319.500,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5.887.816.882,00					325.319.500,00	
126.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.579.428.254,00					20.319.500,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	2.578.189.254,00				-	20.319.500,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.857.674,00			OPD		619.500,00	
		-			1.857.674,00			OPD		619.500,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	309.750,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	309.750,00				-	619.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	309.750,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	309.750,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	309.750,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	308.924,00				-	0,00	
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			309.750,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	309.750,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			309.750,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	309.750,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			309.750,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	309.750,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			309.750,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	309.750,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			308.924,00					0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	308.924,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			309.750,00					619.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen	309.750,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	619.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.056.204.882,00			OPD		0,00	
		-			2.056.204.882,00			OPD		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.056.204.882,00				-	0,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.056.204.882,00					0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	2.056.204.882,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			185.267.967,00			Masyarakat		7.200.000,00	
		-			185.267.967,00			Masyarakat		7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	3.600.000,00				-	7.200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	24.780.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	129.336.510,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5.553.554,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	17.284.223,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.905.800,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	807.880,00				-	0,00	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			807.880,00					0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	807.880,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.553.554,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.553.554,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3.905.800,00					0,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.905.800,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000,00					7.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			17.284.223,00					0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	17.284.223,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			24.780.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertindakannya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	24.780.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			129.336.510,00					0,00	
		Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	129.336.510,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			225.863.483,00			OPD		12.500.000,00	
		-			225.863.483,00			OPD		12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	17.161.147,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	198.320.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	10.382.336,00				-	12.500.000,00	
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.382.336,00					12.500.000,00	
		Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.382.336,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.161.147,00					0,00	
		Tertindakannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.161.147,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			198.320.000,00					0,00	
		Tertindakannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	198.320.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			110.234.248,00			OPD		0,00	
		-			110.234.248,00			OPD		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	110.234.248,00				-	0,00	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			110.234.248,00					0,00	
		Tertindakannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	110.234.248,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
127.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			192.600.000,00					200.000.000,00	
			Total Fertility Rate (TFR)	2,20 Angka	192.600.000,00				-	200.000.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			192.600.000,00			Keluarga dan Masyarakat		200.000.000,00	
		-			192.600.000,00			Keluarga dan Masyarakat		200.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-	192.600.000,00				-	200.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			192.600.000,00					200.000.000,00	
		Tertindakannya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	192.600.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKB-KB		-	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
128.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1.234.588.628,00					45.000.000,00	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	29 Persen	1.229.588.628,00				-	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	40 Persen	1.229.588.628,00				-	45.000.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			385.000.000,00			Keluarga dan Masyarakat		0,00	
		-			385.000.000,00			Keluarga dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	345.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	40.000.000,00				-	0,00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			345.000.000,00					0,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	345.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKB-KB		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			40.000.000,00					0,00	
		Tertaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	40.000.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKB-KB		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			170.250.000,00			Kader Instittsui Masyarakat Pedesaan (IMP)		0,00	
		-			170.250.000,00			Kader Instittsui Masyarakat Pedesaan (IMP)		0,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	170.250.000,00				-	0,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			170.250.000,00					0,00	
		Tertaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1412 Orang	170.250.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKB-KB		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			679.338.628,00			Keluarga dan Masyarakat		45.000.000,00	
		-			679.338.628,00			Keluarga dan Masyarakat		45.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	-	5.000.000,00				-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringian dan Jejaringnya	-	5.000.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringian dan Jejaringnya	-	42.300.000,00				-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	627.038.628,00				-	0,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			627.038.628,00					0,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2092 Orang	627.038.628,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKB-KB		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan			5.000.000,00					35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			42.300.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	42.300.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKB-KB		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			5.000.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
129.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1.881.200.000,00					60.000.000,00	
			Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	86 Persen	1.881.200.000,00				-	60.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.868.700.480,00			Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		30.000.000,00	
					1.868.700.480,00			Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		30.000.000,00	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-	1.861.200.000,00				-	0,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-	7.500.480,00				-	30.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			1.861.200.000,00					0,00	
		Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	846 Orang	1.861.200.000,00	Kab. Luwu	DAK Non Fisik-BOKB-KB		-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)			7.500.480,00					30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	1 Laporan / Dokumen	7.500.480,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			12.499.520,00			Keluarga dan Masyarakat		30.000.000,00	
					12.499.520,00			Keluarga dan Masyarakat		30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	5.000.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-	7.499.520,00				-	20.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			5.000.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga			7.499.520,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	7.499.520,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN			15.127.778.309,00					14.910.376.166,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.127.778.309,00					14.910.376.166,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			15.127.778.309,00					14.910.376.166,00	
130.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.429.253.896,00					5.095.376.166,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	5.489.121.967,00				-	4.278.500.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	940.131.929,00				-	800.376.166,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.140.180,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		20.500.000,00	
		-			20.140.180,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		20.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2.335.240,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5.370.960,00				-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	2.515.690,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.580.100,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.664.000,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4.674.190,00				-	5.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.370.960,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.664.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.580.100,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.335.240,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.515.690,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.674.190,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.468.981.787,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		4.264.000.000,00	
		-			5.468.981.787,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		4.264.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	7.371.192,00				-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	5.469.560,00				-	6.000.000,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	5.456.141.035,00				-	4.250.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	5.456.141.035,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU II)		-	4.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.371.192,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5.469.560,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			4.918.290,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		5.500.000,00	
		-			4.918.290,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	-	4.918.290,00				-	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			4.918.290,00					5.500.000,00	
		Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	4.918.290,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			235.018.654,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		159.000.000,00	
		-			235.018.654,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		159.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	10.200.000,00				-	8.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	5.000.000,00				-	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	129.299.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3.835.917,00				-	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	33.545.047,00				-	36.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	4.295.200,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	48.843.490,00				-	0,00	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			48.843.490,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	48.843.490,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe 0	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.835.917,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.835.917,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4.295.200,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	4.295.200,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.200.000,00					8.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	8.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			33.545.047,00					36.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	26 Paket	33.545.047,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	36.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.000.000,00					5.500.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			129.299.000,00					100.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	129.299.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			376.384.370,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		361.376.166,00	
		-			376.384.370,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		361.376.166,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	100.282.100,00				-	105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	254.850.000,00				-	235.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	21.252.270,00				-	21.376.166,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.252.270,00					21.376.166,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.252.270,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	21.376.166,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.282.100,00					105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.282.100,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			254.850.000,00					235.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	254.850.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	235.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			323.810.615,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		285.000.000,00	
		-			323.810.615,00			PNS, P3K dan P3K Paruh Waktu		285.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	238.895.700,00				-	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	78.414.915,00				-	80.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6.500.000,00				-	5.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			78.414.915,00					80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	78.414.915,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.500.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6.500.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			238.895.700,00					200.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	238.895.700,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
131.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			8.648.332.977,00					9.760.000.000,00	
			Tingkat pelayanan lalu lintas	0,51 Angka	8.598.346.426,00				-	9.690.000.000,00	
			Tingkat Pelayanan Lalu Lintas	0,51 Angka	49.986.551,00				-	70.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			7.778.773.858,00			Masyarakat pengguna jalan		8.850.000.000,00	
		-			7.778.773.858,00			Masyarakat pengguna jalan		8.850.000.000,00	
			Jumlah Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	3.431.029.900,00				-	3.000.000.000,00	
			Jumlah Pertengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	3.351.500.028,00				-	3.350.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	996.243.930,00				-	2.500.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3.431.029.900,00					3.000.000.000,00	
		Tersedianya Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pertengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	250 Unit	3.431.029.900,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			996.243.930,00					2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1500 Unit	996.243.930,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			3.351.500.028,00					3.350.000.000,00	
		Tertaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	32 Unit	3.351.500.028,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	3.350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			49.986.551,00			Masyarakat		70.000.000,00	
		-			49.986.551,00			Masyarakat		70.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-	49.986.551,00				-	70.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			49.986.551,00					70.000.000,00	
		Tertaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	49.986.551,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			246.638.540,00			Pemilik kendaraan umum roda empat		230.000.000,00	
		-			246.638.540,00			Pemilik kendaraan umum roda empat		230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	23.750.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-	62.371.720,00				-	65.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-	77.412.889,00				-	55.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	83.103.931,00				-	90.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			83.103.931,00					90.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7 Unit	83.103.931,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor			62.371.720,00					65.000.000,00	
		Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1000 Unit	62.371.720,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			23.750.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	600 Dokumen	23.750.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			77.412.889,00					55.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 Unit	77.412.889,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			551.465.212,00			Masyarakat pengguna jalan		585.000.000,00	
		-			551.465.212,00			Masyarakat pengguna jalan		585.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebiasaan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	434.765.212,00				-	435.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	-	116.700.000,00				-	150.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			434.765.212,00					435.000.000,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebiasaan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	434.765.212,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	435.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			116.700.000,00					150.000.000,00	
		Tertaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	1 Dokumen	116.700.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			21.468.816,00			Masyarakat atau badan pemilik usaha		25.000.000,00	
		-			21.468.816,00			Masyarakat atau badan pemilik usaha		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	21.468.816,00				-	25.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			21.468.816,00					25.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	21.468.816,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
132.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			50.191.436,00					55.000.000,00	
		Persentase perubahan yang terpelihara		80 %	50.191.436,00				-	55.000.000,00	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			50.191.436,00			Masyarakat pengguna transportasi laut		55.000.000,00	
		-			50.191.436,00			Masyarakat pengguna transportasi laut		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	50.191.436,00				-	55.000.000,00	
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			50.191.436,00					55.000.000,00	
		Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	50.191.436,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			7.433.180.430,00					5.997.832.985,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.433.180.430,00					5.997.832.985,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.325.220.397,00					5.820.632.985,00	
133.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.749.442.327,00					4.525.488.785,00	
		Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah		100 Persen	4.747.942.311,00				-	4.523.488.785,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.020.330,00			Meningkatkan Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan		34.426.999,00	
		-			16.020.330,00			Meningkatkan Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan		34.426.999,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	810.306,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	13.710.008,00				-	23.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	750.008,00				-	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	750.008,00				-	5.426.999,00	
2.16.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.710.008,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	750.008,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	810.306,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	750.008,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.426.999,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.840.177.793,00			Masyarakat		3.971.380.786,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	148.980.000,00				-	168.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	767.000,00				-	3.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	750.008,00				-	10.500.000,00	
2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	3.689.680.785,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.789.680.786,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	148.980.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	168.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	767.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	750.008,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.544.379,00			Masyarakat		329.781.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	0,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	82.685.000,00				-	80.171.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2.411.235,00				-	3.010.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	23.835.742,00				-	19.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.612.402,00				-	3.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00				-	220.000.000,00	
2.16.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.411.235,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.010.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.612.402,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	23.835.742,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	19.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.685.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	80.171.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			223.570.750,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	223.570.750,00				-	0,00	
2.16.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel			0,00				-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			223.570.750,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	223.570.750,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0,00					0,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			0,00					0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			465.641.800,00			Masyarakat		151.200.000,00	
		-			465.641.800,00			Masyarakat		151.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	25.241.800,00				-	25.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	440.400.000,00				-	126.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			25.241.800,00					25.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.241.800,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	25.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			440.400.000,00					126.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	440.400.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	126.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92.487.275,00			Masyarakat		38.700.000,00	
		-			92.487.275,00			Masyarakat		38.700.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	10.070.000,00				-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	39.897.275,00				-	30.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	42.520.000,00				-	8.200.000,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			39.897.275,00					30.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	39.897.275,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			42.520.000,00					8.200.000,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	42.520.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	8.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.070.000,00					0,00	
		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.070.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
134.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.610.929.122,00					295.144.200,00	
			Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara online dan terintegrasi	65,22 Persen	1.605.930.010,00				-	260.144.200,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.610.929.122,00			Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara online dan terintegrasi		295.144.200,00	
		-			1.610.929.122,00			Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara online dan terintegrasi		295.144.200,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-	1.499.069.562,00				-	124.144.200,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-	19.999.720,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-	4.999.112,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	48.791.177,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-	3.076.486,00				-	81.000.000,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-	4.999.112,00				-	5.000.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	29.993.953,00				-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			1.499.069.562,00					124.144.200,00	
		Tertaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dengan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	1.499.069.562,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	124.144.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			29.993.953,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan tertaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	90 %	29.993.953,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik			4.999.112,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	0 Orang	4.999.112,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			4.999.112,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	0 Dokumen	4.999.112,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			19.999.720,00					20.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	3 Orang	19.999.720,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			48.791.177,00					30.000.000,00	
		Tertaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	48.791.177,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten			3.076.486,00					81.000.000,00	
		Tertaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	100 Konten	3.076.486,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	81.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
135.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			964.848.948,00					1.000.000.000,00	
			Presentasi OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	28.07 %	964.848.948,00				-	1.000.000.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			964.848.948,00			Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo		1.000.000.000,00	
		-			964.848.948,00			Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo		1.000.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-	221.952.348,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-	4.000.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-	82.241.000,00				-	95.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	656.655.600,00				-	898.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			4.000.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet			656.655.600,00					898.000.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	16 Titik	656.655.600,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	898.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK			221.952.348,00					2.000.000,00	
		Tertaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen	221.952.348,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi			82.241.000,00					95.000.000,00	
		Tertaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	82.241.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				72.753.473,00					61.200.000,00	
136.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			72.753.473,00					61.200.000,00	
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	72.753.473,00				-	61.200.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			72.753.473,00			Masyarakat		61.200.000,00	
		-			72.753.473,00			Masyarakat		61.200.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-	33.765.760,00				-	18.000.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-	28.117.400,00				-	5.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	-	8.706.596,00				-	15.900.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-	304.020,00				-	500.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-	1.051.240,00				-	15.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-	808.457,00				-	6.500.000,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			1.051.240,00					15.300.000,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	40 %	1.051.240,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			8.706.596,00					15.900.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	75 %	8.706.596,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			28.117.400,00					5.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	40 Orang	28.117.400,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			808.457,00					6.500.000,00	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	40 %	808.457,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral			33.765.760,00					18.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan	33.765.760,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			304.020,00					500.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembeda data statistik pusat dan/atau daerah	40 %	304.020,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			35.206.560,00					116.000.000,00	
137.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			35.206.560,00					116.000.000,00	
			Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	100 Persen	35.206.560,00				-	116.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			35.206.560,00			Meningkatnya Perlindungan Keamanan Informasi		116.000.000,00	
		-			35.206.560,00			Meningkatnya Perlindungan Keamanan Informasi		116.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-	6.082.000,00				-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	27.134.560,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-	1.990.000,00				-	36.000.000,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			1.990.000,00					36.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	6 Laporan	1.990.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	36.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			6.082.000,00					80.000.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	6.082.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			27.134.560,00					0,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	27.134.560,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN			4.145.973.805,40					782.700.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.667.177.949,40					782.700.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			3.667.177.949,40					782.700.000,00	
138.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.818.858.717,00					753.500.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	2.818.858.717,00				-	750.000.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.631.594,00			Masyarakat		9.200.000,00	
		-			10.631.594,00			Masyarakat		9.200.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.480.476,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.999.220,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.404.200,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.686.940,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4.060.758,00				-	3.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.999.220,00					0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.999.220,00	Kab. Luwu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.686.940,00					3.000.000,00	
		Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.686.940,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.404.200,00					1.500.000,00	
		Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.404.200,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.480.476,00					1.500.000,00	
		Tersediannya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.480.476,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	1.500.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.060.758,00					3.200.000,00	
		Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.060.758,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.200.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.288.472.228,00			Masyarakat		101.000.000,00	
		-			2.288.472.228,00			Masyarakat		101.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	125.940.000,00				-	99.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	826.000,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	1.052.840,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.160.653.388,00				-	0,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.160.653.388,00					0,00	
		Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.160.653.388,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			125.940.000,00					99.000.000,00	
		Tertindakannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	125.940.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	99.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			826.000,00					1.000.000,00	
		Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	826.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			1.052.840,00					1.000.000,00	
		Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.052.840,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			258.656,00			Masyarakat		800.000,00	
		-			258.656,00			Masyarakat		800.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	258.656,00				-	800.000,00	
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			258.656,00					800.000,00	
		Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	258.656,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	800.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.980.000,00			Masyarakat		14.000.000,00	
					1.980.000,00			Masyarakat		14.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1.980.000,00				-	14.000.000,00	
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.980.000,00					14.000.000,00	
		Tersediannya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	1.980.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	14.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			196.279.425,00			Masyarakat		177.500.000,00	
		-			196.279.425,00			Masyarakat		177.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12.400.000,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	2.400.642,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	5.020.000,00				-	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	167.941.000,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	7.755.234,00				-	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	762.549,00				-	1.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			762.549,00					1.000.000,00	
		Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	762.549,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.400.000,00					12.000.000,00	
		Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.400.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			7.755.234,00					7.000.000,00	
		Tersediannya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40 Paket	7.755.234,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.020.000,00					5.500.000,00	
		Tertindakannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.020.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.500.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			167.941.000,00					150.000.000,00	
		Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	167.941.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2.400.642,00					2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.400.642,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00			Masyarakat		124.000.000,00	
		-			0,00			Masyarakat		124.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0,00				-	124.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00					124.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	124.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			321.236.814,00			Masyarakat		327.000.000,00	
		-			321.236.814,00			Masyarakat		327.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	42.836.814,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	278.400.000,00				-	277.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.836.814,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.836.814,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			278.400.000,00					277.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	278.400.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	277.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
139.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			40.006.630,00					25.200.000,00	
			Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	65 persen	40.006.630,00				-	25.200.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			40.006.630,00			Masyarakat		25.200.000,00	
		-			40.006.630,00			Masyarakat		25.200.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	40.006.630,00				-	25.200.000,00	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			40.006.630,00					25.200.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	450 Unit Usaha	40.006.630,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	25.200.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
140.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			1.159.864,00					0,00	
			Persentase Koperasi Aktif	23 Persen	1.159.864,00				-	0,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.159.864,00			Masyarakat		0,00	
		-			1.159.864,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	-	1.159.864,00				-	0,00	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			1.159.864,00					0,00	
		Tertaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	1.159.864,00	Kab. Luwu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
141.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			34.699.635,00					4.000.000,00	
			Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	60 Persen	34.699.635,00				-	4.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			34.699.635,00			Masyarakat		4.000.000,00	
		-			34.699.635,00			Masyarakat		4.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	34.699.635,00				-	4.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			34.699.635,00					4.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	34.699.635,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.000.000,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
142.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			51.796.020,00					0,00	
			Persentase koperasi yang berkualitas	41,25 Persen	51.796.020,00				-	0,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			51.796.020,00			Masyarakat		0,00	
		-			51.796.020,00			Masyarakat		0,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-	1.751.440,00				-	0,00	
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	50.044.580,00				-	0,00	
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi			50.044.580,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	113 Kelompok Masyarakat	50.044.580,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			1.751.440,00					0,00	
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	1.751.440,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
143.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			720.657.083,40					0,00	
			Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	100 Persen	720.657.083,40				-	0,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			720.657.083,40			Masyarakat		0,00	
		-			720.657.083,40			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-	23.805.011,40				-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-	44.241.164,00				-	0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-	4.999.924,00				-	0,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-	7.610.984,00				-	0,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	640.000.000,00				-	0,00	
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha			44.241.164,00					0,00	
		Tertaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	30 Orang	44.241.164,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha			4.999.924,00					0,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	44 Orang	4.999.924,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM			23.805.011,40					0,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	1 Kegiatan	23.805.011,40	Kab. Luwu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0025	Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM			640.000.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12 Unit Usaha	640.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk			7.610.984,00					0,00	
		Tertaksananya Pembinaan dan Fasilitas UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	50 Unit Usaha	7.610.984,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			478.795.856,00					0,00	
3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			478.795.856,00					0,00	
144.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			452.621.904,00					0,00	
			Persentase pembangunan sektor industri dan kawasan industri	100 persen	452.621.904,00				-	0,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			452.621.904,00			Masyarakat		0,00	
		-			452.621.904,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	506.220,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	270.541.000,00				-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	173.675.469,00				-	0,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-	7.899.215,00				-	0,00	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			270.541.000,00					0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	270.541.000,00	Kab. Luwu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			506.220,00					0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	506.220,00	Kab. Luwu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			173.675.469,00					0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	173.675.469,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota			7.899.215,00					0,00	
		Tertaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	12 Dokumen	7.899.215,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
145.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			1.104.480,00					0,00	
			Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	undefined	1.104.480,00				-	0,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			1.104.480,00			Masyarakat		0,00	
		-			1.104.480,00			Masyarakat		0,00	
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	502.680,00				-	0,00	
			-Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	601.800,00				-	0,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			502.680,00					0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	502.680,00	Kab. Luwu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			601.800,00					0,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	25 Dokumen	601.800,00	Kab. Luwu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
146.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			25.069.472,00					0,00	
			Persentase sistem informasi yang dikelola	100 Persen	25.069.472,00				-	0,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			25.069.472,00			Masyarakat		0,00	
		-			25.069.472,00			Masyarakat		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	25.069.472,00				-	0,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			25.069.472,00					0,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	25.069.472,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			5.005.904.346,00					5.234.473.303,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.005.904.346,00					5.234.473.303,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.005.904.346,00					5.234.473.303,00	
147.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.564.919.182,00					4.945.490.530,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	4.563.276.416,00				-	4.942.858.155,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.537.101,00			Masyarakat		20.252.484,00	
		-			11.537.101,00			Masyarakat		20.252.484,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2.190.075,00				-	3.201.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.642.766,00				-	2.633.375,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.333.800,00				-	3.120.052,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.784.446,00				-	2.632.375,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.642.766,00				-	2.632.375,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1.517.998,00				-	3.250.410,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.425.250,00				-	2.782.022,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.642.766,00					2.633.375,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.642.766,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.633.375,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.642.766,00					2.632.375,00	
		Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.642.766,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.632.375,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.784.446,00					2.632.375,00	
		Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.784.446,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.632.375,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.190.075,00					3.201.500,00	
		Tersediannya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.190.075,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.201.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.333.800,00					3.120.052,00	
		Tersediannya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.333.800,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.120.052,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.517.998,00					3.250.410,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.517.998,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.250.410,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.425.250,00					2.782.022,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.425.250,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.782.022,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.929.372.536,00			Masyarakat		3.298.963.700,00	
		-			2.929.372.536,00			Masyarakat		3.298.963.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	2.269.270,00				-	3.850.400,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	80.040.000,00				-	102.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.398.670,00				-	4.495.865,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	5.260.250,00				-	8.484.567,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.839.404.346,00				-	3.180.132.868,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.839.404.346,00					3.180.132.868,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	2.839.404.346,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.180.132.868,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			80.040.000,00					102.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	80.040.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	102.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.398.670,00					4.495.865,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.398.670,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.495.865,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			2.269.270,00					3.850.400,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	2.269.270,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.850.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.260.250,00					8.484.567,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.260.250,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	8.484.567,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.386.820,00			Masyarakat		13.768.625,00	
		-			10.386.820,00			Masyarakat		13.768.625,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	10.386.820,00				-	13.768.625,00	
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.386.820,00					13.768.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.386.820,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	13.768.625,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			214.047.621,00			Masyarakat		67.823.112,00	
		-			214.047.621,00			Masyarakat		67.823.112,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	5.500.000,00				-	6.160.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	15.900.000,00				-	4.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	132.979.000,00				-	261.621,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	19.515.276,00				-	9.011.930,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	7.380.900,00				-	7.066.661,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	8.861.699,00				-	8.604.632,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	23.910.746,00				-	32.518.268,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.861.699,00					8.604.632,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8.861.699,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	8.604.632,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			23.910.746,00					32.518.268,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	23.910.746,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	32.518.268,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.515.276,00					9.011.930,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	19.515.276,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	9.011.930,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.380.900,00					7.066.661,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.380.900,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.066.661,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.500.000,00					6.160.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.160.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			15.900.000,00					4.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	15.900.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			132.979.000,00					261.621,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	132.979.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	261.621,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17.999.760,00			Masyarakat		187.550.000,00	
		-			17.999.760,00			Masyarakat		187.550.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	17.999.760,00				-	187.550.000,00	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.999.760,00					187.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	17.999.760,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	187.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.139.652.867,00			Masyarakat		1.119.509.068,00	
		-			1.139.652.867,00			Masyarakat		1.119.509.068,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		560.866.344,00				-	630.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		566.400.000,00				-	476.900.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		12.386.523,00				-	12.109.068,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.386.523,00					12.109.068,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12.386.523,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.109.068,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			560.866.344,00					630.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	560.866.344,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	630.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			566.400.000,00					476.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	566.400.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	476.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			241.922.477,00			Masyarakat		237.623.541,00	
		-			241.922.477,00			Masyarakat		237.623.541,00	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		59.220.777,00				-	67.595.220,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		137.251.700,00				-	106.865.771,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		45.450.000,00				-	63.162.550,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			137.251.700,00					106.865.771,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	137.251.700,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	106.865.771,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45.450.000,00					63.162.550,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	45.450.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	63.162.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			59.220.777,00					67.595.220,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	59.220.777,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	67.595.220,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
148.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			204.009.400,00					98.500.450,00	
		Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi	100 %		204.009.400,00				-	98.500.450,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			204.009.400,00			Masyarakat		98.500.450,00	
		-			204.009.400,00			Masyarakat		98.500.450,00	
		Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		97.651.940,00				-	98.500.450,00	
		Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang BUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		106.357.460,00				-	0,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			106.357.460,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	106.357.460,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota			97.651.940,00					98.500.450,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	97.651.940,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	98.500.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
149	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			86.997.852,00					53.570.990,00	
			Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100 Persen	86.997.852,00				-	53.570.990,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			86.997.852,00			Masyarakat		53.570.990,00	
		-			86.997.852,00			Masyarakat		53.570.990,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	86.997.852,00				-	43.175.880,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-	0,00				-	10.395.110,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			86.997.852,00					43.175.880,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	86.997.852,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	43.175.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			0,00					10.395.110,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.395.110,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
150	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			64.977.451,00					51.823.900,00	
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	95 Persen	64.977.451,00				-	51.823.900,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			64.977.451,00			Masyarakat		51.823.900,00	
		-			64.977.451,00			Masyarakat		51.823.900,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	4.200.000,00				-	9.323.050,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	60.777.451,00				-	42.500.850,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			60.777.451,00					42.500.850,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	60.777.451,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	42.500.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			4.200.000,00					9.323.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	4.200.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	9.323.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
151.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			85.000.461,00					85.087.433,00	
			Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100 Persen	85.000.461,00				-	85.087.433,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			85.000.461,00			Masyarakat		85.087.433,00	
		-			85.000.461,00			Masyarakat		85.087.433,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	58.446.767,00				-	66.606.608,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	26.553.694,00				-	18.480.825,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			0,00					0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			58.446.767,00					66.606.608,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	6 Kegiatan Usaha	58.446.767,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	66.606.608,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya			26.553.694,00					18.480.825,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan Usaha	26.553.694,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	18.480.825,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			7.705.953.471,00					8.904.400.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.705.953.471,00					8.904.400.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			7.705.953.471,00					8.904.400.000,00	
152.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.749.953.471,00					4.090.400.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	3.749.953.471,00				-	4.019.400.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.721.114,00			Seluruh Pegawai, Pengelola Program, dan Pemangku Kepentingan Internal pada Dinas Kemudahan dan Olahraga Kabupaten Luwu		47.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		-			40.721.114,00			Seluruh Pegawai, Pengelola Program, dan Pemangku Kepentingan Internal pada Dinas Kemudahan dan Olahraga Kabupaten Luwu		47.700.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	4.723.291,00				-	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	9.928.114,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	4.721.168,00				-	6.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	4.255.438,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	5.946.684,00				-	6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5.925.568,00				-	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.220.851,00				-	6.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.928.114,00					10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.928.114,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.946.684,00					6.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.946.684,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.255.438,00					6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.255.438,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.723.291,00					5.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.723.291,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			4.721.168,00					6.200.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.721.168,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.925.568,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.925.568,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.220.851,00					6.000.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.220.851,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.211.743.741,00					3.250.500.000,00	
		-			3.211.743.741,00					3.250.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	138.306.650,00				-	139.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	3.663.620,00				-	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	5.820.000,00				-	7.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.063.953.471,00				-	3.100.000.000,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.063.953.471,00					3.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.063.953.471,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			138.306.650,00					138.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	138.306.650,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	139.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.663.620,00					4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.663.620,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.820.000,00					7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.820.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.606.512,00			Pengelola Barang, Seluruh Pegawai, dan Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		36.000.000,00	
		-			6.606.512,00			Pengelola Barang, Seluruh Pegawai, dan Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		36.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	6.606.512,00				-	36.000.000,00	
2.19.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.606.512,00					36.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.606.512,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	36.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			660.000,00			Seluruh Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		27.000.000,00	
		-			660.000,00			Seluruh Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		27.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	660.000,00				-	27.000.000,00	
2.19.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			660.000,00					27.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	660.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	27.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			91.053.750,00			Seluruh Pegawai dan Pengelola Administrasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		145.700.000,00	
		-			91.053.750,00			Seluruh Pegawai dan Pengelola Administrasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		145.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	8.400.000,00				-	9.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	64.905.500,00				-	115.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	6.465.016,00				-	7.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	7.157.914,00				-	7.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.165.300,00				-	3.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.960.020,00				-	3.000.000,00	
2.19.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.960.020,00					3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.960.020,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.465.016,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.465.016,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			2.165.300,00					3.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2.165.300,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400.000,00					9.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	8.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	9.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			7.157.914,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	7.157.914,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			64.905.500,00					115.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	64.905.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			750.000,00			Seluruh Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		50.000.000,00	
		-			750.000,00			Seluruh Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	750.000,00				-	50.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			750.000,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			310.000.000,00			Seluruh Pegawai dan Tenaga Jasa Penunjang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		320.000.000,00	
		-			310.000.000,00			Seluruh Pegawai dan Tenaga Jasa Penunjang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	46.000.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	264.000.000,00				-	270.000.000,00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			46.000.000,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			264.000.000,00					270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	264.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	270.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.418.354,00			Seluruh Pegawai dan Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		213.500.000,00	
		-			88.418.354,00			Seluruh Pegawai dan Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu		213.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	30.000.000,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	55.978.354,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2.440.000,00				-	3.500.000,00	
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55.978.354,00					60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	55.978.354,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.440.000,00					3.500.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.440.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.000.000,00					150.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
153.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			207.724.336,00					280.000.000,00	
			Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	100 %	207.724.336,00				-	280.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			81.108.782,00			Pemuda Usia 16 sampai 30 Tahun di Kabupaten Luwu		130.000.000,00	
		-			81.108.782,00			Pemuda Usia 16 sampai 30 Tahun di Kabupaten Luwu		130.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-	23.831.178,00				-	40.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemuda Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	57.277.604,00				-	90.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota			57.277.604,00					90.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	44 Orang	57.277.604,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota			23.831.178,00					40.000.000,00	
		Tertaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	23.831.178,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			126.615.554,00			Pemuda Usia 16 sampai 30 Tahun di Kabupaten Luwu		150.000.000,00	
		-			126.615.554,00			Pemuda Usia 16 sampai 30 Tahun di Kabupaten Luwu		150.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-	126.615.554,00				-	150.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			126.615.554,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Organisasi	126.615.554,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
154.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHAGRAAN			3.599.465.008,00					4.319.000.000,00	
			Persentase peningkatan jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga nasional dan internasional	86,5 %	134.300.468,00				-	169.000.000,00	
			Persentase peningkatan jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga nasional dan internasional	86,5 %	3.465.164.540,00				-	3.900.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.598.280.296,00			Pelajar/Siswa dan Atlet Pelajar se-Kabupaten Luwu		1.700.000.000,00	
		-			1.598.280.296,00			Pelajar/Siswa dan Atlet Pelajar se-Kabupaten Luwu		1.700.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-	1.598.280.296,00				-	1.700.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			1.598.280.296,00					1.700.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	257 Unit	1.598.280.296,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			317.778.878,00			Atlet, Pelatih, Official, dan Organisasi Olahraga/Pengkab Cabang Olahraga di Kabupaten/Kota		250.000.000,00	
		-			317.778.878,00			Atlet, Pelatih, Official, dan Organisasi Olahraga/Pengkab Cabang Olahraga di Kabupaten/Kota		250.000.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-	200.208.208,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-	117.570.670,00				-	150.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga			117.570.670,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	70 Orang	117.570.670,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota			200.208.208,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	1 Kegiatan	200.208.208,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			449.105.366,00			Atlet Berprestasi/Peraih Medali dan Calon Pelatih Cabang Olahraga		1.000.000.000,00	
		-			449.105.366,00			Atlet Berprestasi/Peraih Medali dan Calon Pelatih Cabang Olahraga		1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	-	54.388.608,00				-	250.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-	124.493.758,00				-	250.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Lathian Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-	270.223.000,00				-	500.000.000,00	
2.19.03.2.03.0011		Pemusatan Lathian Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			270.223.000,00					500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Lathian Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Lathian Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	45 Orang	270.223.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0013		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			124.493.758,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	0 Orang	124.493.758,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0014		Pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota			54.388.608,00					250.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	54.388.608,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			1.100.000.000,00			Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan National Paralympic Committee Indonesia (NPCi) Kabupaten Luwu		1.200.000.000,00	
		-			1.100.000.000,00			Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan National Paralympic Committee Indonesia (NPCi) Kabupaten Luwu		1.200.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-	1.100.000.000,00				-	1.200.000.000,00	
2.19.03.2.04.0007		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			1.100.000.000,00					1.200.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	2 Kerja Sama	1.100.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			134.300.468,00			Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), Induk Organisasi Olahraga (Inorga), serta Kelompok dan Pegiat Olahraga Tradisional/Masyarakat di Kabupaten Luwu		169.000.000,00	
		-			134.300.468,00			Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), Induk Organisasi Olahraga (Inorga), serta Kelompok dan Pegiat Olahraga Tradisional/Masyarakat di Kabupaten Luwu		169.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-	80.000.000,00				-	95.000.000,00	
			Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-	54.300.468,00				-	74.000.000,00	
2.19.03.2.05.0011		Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota			80.000.000,00					95.000.000,00	
		Terlaksana Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	1 Lembaga	80.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	95.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.0012		Peningkatan Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat			54.300.468,00					74.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	54.300.468,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	74.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
155. 2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			148.810.656,00					215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Persentase pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan	90,65 %	148.810.656,00				-	215.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			148.810.656,00			Organisasi Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Luwu		215.000.000,00	
		-			148.810.656,00			Organisasi Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Luwu		215.000.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	100.000.000,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	48.810.656,00				-	65.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			100.000.000,00					150.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0015	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			48.810.656,00					65.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	74 Orang	48.810.656,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Senga Selatan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	65.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			5.264.841.875,00					8.557.709.347,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.264.841.875,00					8.557.709.347,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.234.483.716,00					8.256.252.939,00	
156.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.826.987.696,00					6.596.303.203,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	6.265.288,00				-	23.000.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	4.818.499.048,00				-	5.693.803.203,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.661.768,00			Kab. Luwu		36.000.000,00	
		-			6.661.768,00			Kab. Luwu		36.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	138.060,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	340.000,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Untuk Perangkat Daerah	-	120.360,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	831.255,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	138.060,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.950.990,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	138.060,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	545.320,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	768.479,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	979.404,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	120.360,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	421.420,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-	170.000,00				-	1.000.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.950.990,00					20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.950.990,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			979.404,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	979.404,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			768.479,00					2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	768.479,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			831.255,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	831.255,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			545.320,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	545.320,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			120.360,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	120.360,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			421.420,00					1.000.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	421.420,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			138.060,00					1.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			120.360,00					1.000.000,00	
		Tertaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	120.360,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			138.060,00					1.000.000,00	
		Tertaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			138.060,00					1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			170.000,00					1.000.000,00	
		Terkkoordinaskannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Subtansi	170.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			340.000,00					1.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	340.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa I 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.055.511.355,00			Kab. Luwu		4.199.000.000,00	
		-			4.055.511.355,00			Kab. Luwu		4.199.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	138.060,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	170.000,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	138.060,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	138.060,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	91.800.000,00				-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	392.350,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	637.950,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.962.096.875,00				-	4.100.000.000,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.962.096.875,00					4.100.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3.962.096.875,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			170.000,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	170.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPenujian/Verifikasi Keuangan SKPD			91.800.000,00					90.000.000,00	
		Tertaklaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	91.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			138.060,00					1.000.000,00	
		Tertaklaksananya Koordinasi dan Petaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Petaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			392.350,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	392.350,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			138.060,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			637.950,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	637.950,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			138.060,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.076.320,00			Kab. Luwu		20.500.000,00	
		-			7.076.320,00			Kab. Luwu		20.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	141.680,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	141.680,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	120.360,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	138.060,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	6.258.420,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	138.060,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	138.060,00				-	2.500.000,00	
	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			138.060,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			141.680,00					2.000.000,00	
		Tertaklaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	141.680,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.23.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			138.060,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			120.360,00					2.000.000,00	
		Tertaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	120.360,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			138.060,00					2.000.000,00	
		Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.258.420,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.258.420,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			141.680,00					1.000.000,00	
		Tertaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	141.680,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			566.480,00			Kab. Luwu		61.200.000,00	
		-			566.480,00			Kab. Luwu		61.200.000,00	
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	0,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	170.000,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	120.360,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	138.060,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	0,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0,00				-	34.200.000,00	
			Jumlah Pegawai Pensun yang Dipulangkan	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	138.060,00				-	1.500.000,00	
	2.23.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			138.060,00					1.500.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			138.060,00					1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	138.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			170.000,00					1.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	170.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			120.360,00					1.500.000,00	
		Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	120.360,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0006		Pemulangan Pegawai yang Pensiun			0,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0007		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			0,00					1.500.000,00	
		Tertaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0008		Pemindahan Tugas ASN			0,00					2.000.000,00	
		Tertaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1 Orang	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0,00					34.200.000,00	
		Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	34.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0,00					2.000.000,00	
		Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0,00					1.500.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			130.029.437,00			Kab. Luwu		406.500.000,00	
		-			130.029.437,00			Kab. Luwu		406.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	4.000.000,00				-	42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	170.000,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	112.926,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	500.000,00				-	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	115.705.000,00				-	240.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1.981.857,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	3.798.091,00				-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.625.520,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.915.324,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	120.360,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	100.359,00				-	10.000.000,00	
2.23.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.915.324,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.915.324,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			120.360,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	120.360,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100.359,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	100.359,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.981.857,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.981.857,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.625.520,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.625.520,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.000.000,00					42.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	42.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			3.798.091,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	3.798.091,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			500.000,00					17.500.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	17.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			115.705.000,00					240.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	115.705.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			112.926,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	112.926,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			170.000,00					12.000.000,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	170.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.833.976,00			Kab. Luwu		618.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	11.833.976,00			Kab. Luwu		618.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	6.166.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4.100.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1.567.976,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0,00				-	100.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00					18.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.100.000,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	4.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.166.000,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.166.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.567.976,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.567.976,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			454.446.560,00			Kab. Luwu		510.400.000,00	
		-			454.446.560,00			Kab. Luwu		510.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	201.000.000,00				-	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	253.200.000,00				-	281.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	108.500,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	138.060,00				-	14.400.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			138.060,00					14.400.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	138.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	14.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			201.000.000,00					210.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	201.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	210.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			108.500,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	108.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			253.200.000,00					281.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	253.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	281.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			160.861.800,00			Kab. Luwu		744.703.203,00	
		-			160.861.800,00			Kab. Luwu		744.703.203,00	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	0,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	0,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berekuit yang Dipelihara	-	0,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	0,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	24.941.800,00				-	220.043.203,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1.628.400,00				-	185.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	126.695.600,00				-	185.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	0,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3.980.000,00				-	34.660.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1.108.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.508.000,00				-	15.000.000,00	
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	0,00				-	15.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			126.695.600,00					185.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	126.695.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	185.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.628.400,00					185.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.628.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	185.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			0,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			0,00					15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			0,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.980.000,00					34.660.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.980.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	34.660.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			0,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			0,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			24.941.800,00					220.043.203,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.941.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	220.043.203,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.108.000,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.108.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.508.000,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.508.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			0,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
157.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			394.067.270,00					1.614.949.736,00	
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,21 Persen	150.555.770,00				-	421.000.000,00	
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,21 Persen	243.341.500,00				-	1.193.949.736,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			243.511.500,00			Desa dan Sekolah Kab. Luwu	-	1.193.949.736,00	
					243.511.500,00			Desa dan Sekolah Kab. Luwu	-	1.193.949.736,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-	9.364.630,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	-	89.769.700,00				-	35.000.000,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	-	138.060,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	110.064.750,00				-	130.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Managemen Layanan TIK	-	170.000,00				-	40.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	-	14.552.050,00				-	43.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	7.294.500,00				-	807.364.402,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	7.620.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-	4.247.450,00				-	30.220.932,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	170.000,00				-	14.000.000,00	
			Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	-	120.360,00				-	29.364.402,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			7.294.500,00					807.364.402,00	
		Tertaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	7.294.500,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	807.364.402,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.247.450,00					30.220.932,00	
		Tertaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	4.247.450,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	30.220.932,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			14.552.050,00					43.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	50 Layanan	14.552.050,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	43.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			7.620.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	7.620.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat			138.060,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	80 Eksemplar	138.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi			120.360,00					29.364.402,00	
		Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Tertaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	1 Dokumen	120.360,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	29.364.402,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			170.000,00					14.000.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	14.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			89.769.700,00					35.000.000,00	
		Tertaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	25 Dokumen	89.769.700,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			9.364.630,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	9.364.630,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			110.064.750,00					130.000.000,00	
		Tertaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Eksemplar	110.064.750,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			170.000,00					40.000.000,00	
		Tertaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150.555.770,00			Kab. Luwu		421.000.000,00	
		-			150.555.770,00			Kab. Luwu		421.000.000,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	-	138.060,00				-	23.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-	120.360,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-	93.698.200,00				-	179.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-	56.259.150,00				-	192.000.000,00	
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	340.000,00				-	22.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			138.060,00					23.000.000,00	
		Tertaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	138.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			120.360,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	120.360,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			340.000,00					22.000.000,00	
		Tertaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	340.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			56.259.150,00					192.000.000,00	
		Tertaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	270 Orang	56.259.150,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	192.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			93.698.200,00					179.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	3 Lokus	93.698.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	179.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
158.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			13.428.750,00					45.000.000,00	
			Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yg dilestarikan	80 Persen	13.428.750,00				-	45.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			13.428.750,00			Kab. Luwu		45.000.000,00	
		-			13.428.750,00			Kab. Luwu		45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-	2.720.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-	10.708.750,00				-	40.000.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			2.720.000,00					5.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	7 Orang	2.720.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			10.708.750,00					40.000.000,00	
		Tertaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	3 Eksemplar	10.708.750,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			30.358.159,00					301.456.408,00	
159.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			28.013.879,00					186.456.408,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	80 Persen	27.163.879,00				-	106.456.408,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			20.797.819,00			Kab. Luwu		137.456.408,00	
		-			20.797.819,00			Kab. Luwu		137.456.408,00	
			Jumlah arsiparis	-	170.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	-	170.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	-	340.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-	11.321.280,00				-	21.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	-	170.000,00				-	21.456.408,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-	150.568,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	-	6.821.363,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	-	1.360.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	-	170.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	-	124.608,00				-	10.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			170.000,00					21.456.408,00	
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	25 Berkas	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	21.456.408,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			150.568,00					20.000.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2 Berkas	150.568,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			11.321.280,00					21.000.000,00	
		Tertaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	11.321.280,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis			124.608,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1 Unit	124.608,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			1.360.000,00					15.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	1 Lembaga	1.360.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0006	Penyusunan Database Arsiparis			170.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis	1 Dokumen	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan			170.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip			170.000,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	1 Lembaga	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			340.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	1 Laporan	340.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota			6.821.363,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	15 Instansi	6.821.363,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			340.000,00			Kab. Luwu		20.000.000,00	
		-			340.000,00			Kab. Luwu		20.000.000,00	
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	-	170.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	-	170.000,00				-	15.000.000,00	
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI			170.000,00					15.000.000,00	
		Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1 Arsip	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip			170.000,00					5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	1 Naskah	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			6.876.060,00			Kab. Luwu		29.000.000,00	
		-			6.876.060,00			Kab. Luwu		29.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-	138.060,00				-	14.000.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-	6.738.000,00				-	15.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			6.738.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	6.738.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			138.060,00					14.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	138.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	14.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
160.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			2.344.280,00					115.000.000,00	
			Persentase Dokumen Arsip daerah yang diselamatkan dan dilindungi	91,54 Persen	510.000,00				-	10.000.000,00	
			Persentase Dokumen Arsip daerah yang diselamatkan dan dilindungi	91,54 Persen	910.100,00				-	30.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			138.060,00			Kab. Luwu		10.000.000,00	
		-			138.060,00			Kab. Luwu		10.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	138.060,00				-	10.000.000,00	
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			138.060,00					10.000.000,00	
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5 Arsip	138.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			510.000,00			Kab. Luwu		20.000.000,00	
		-			510.000,00			Kab. Luwu		20.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-	340.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-	170.000,00				-	10.000.000,00	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			340.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 Arsip	340.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana			170.000,00					10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 Arsip	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			938.420,00			Kab. Luwu		55.000.000,00	
		-			938.420,00			Kab. Luwu		55.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	138.060,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	-	340.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	-	340.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	120.360,00				-	10.000.000,00	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			120.360,00					10.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar	120.360,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			138.060,00					15.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Arsip	138.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan			340.000,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	1 Arsip	340.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan			340.000,00					15.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1 Arsip	340.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			279.740,00			Kab. Luwu		15.000.000,00	
		-			279.740,00			Kab. Luwu		15.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	-	141.680,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	-	138.060,00				-	5.000.000,00	
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			138.060,00					5.000.000,00	
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	138.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			141.680,00					10.000.000,00	
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1 Arsip	141.680,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			478.060,00			Kab. Luwu		15.000.000,00	
		-			478.060,00			Kab. Luwu		15.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	-	170.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	-	138.060,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	-	170.000,00				-	5.000.000,00	
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang			138.060,00					5.000.000,00	
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	138.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang			170.000,00					5.000.000,00	
		Terkelolanya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	1 Arsip	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)			170.000,00					5.000.000,00	
		Terkelolanya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1 Arsip	170.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN			7.096.312.951,00					7.421.400.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.096.312.951,00					7.421.400.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.096.312.951,00					7.421.400.000,00	
161.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.557.436.773,00					4.171.400.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	4.437.436.773,00				-	4.117.600.000,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.719.444,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		48.800.000,00	
		-			45.719.444,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		48.800.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	4.090.400,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	18.061.480,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	4.882.550,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	4.224.450,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	5.604.184,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4.800.400,00				-	6.800.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4.055.980,00				-	6.000.000,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18.061.480,00					25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.061.480,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.604.184,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.604.184,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.224.450,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.224.450,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.090.400,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.090.400,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			4.882.550,00					6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.882.550,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.800.400,00					6.800.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.800.400,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.055.980,00					6.000.000,00	
		Terkelolanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.055.980,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.965.622.341,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		3.966.800.000,00	
		-			3.965.622.341,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		3.966.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	158.760.000,00				-	139.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	5.860.222,00				-	6.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.821.002.119,00				-	3.821.000.000,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.821.002.119,00					3.821.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	570 Orang/bulan	3.821.002.119,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.821.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			158.760.000,00					139.000.000,00	
		Terkelolanya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	158.760.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	139.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.860.222,00					6.800.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.860.222,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		4.800.000,00	
		-			4.800.000,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		4.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	4.800.000,00	
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					4.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.800.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			56.520.000,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		27.000.000,00	
	-				56.520.000,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		27.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	34.320.000,00				-	27.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	22.200.000,00				-	0,00	
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			34.320.000,00					27.000.000,00	
		Tersediannya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	34.320.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	27.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			22.200.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	22.200.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			177.875.362,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		23.000.000,00	
	-				177.875.362,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		23.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	8.700.000,00				-	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	120.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3.050.000,00				-	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	40.028.709,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.068.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.028.653,00				-	5.000.000,00	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.028.653,00					5.000.000,00	
		Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.028.653,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.050.000,00					4.000.000,00	
		Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.050.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3.068.000,00					5.000.000,00	
		Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.068.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.700.000,00					9.000.000,00	
		Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.700.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	9.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			40.028.709,00					0,00	
		Tersediannya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	40.028.709,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	120.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			71.033.626,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		45.000.000,00	
	-				71.033.626,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		45.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	41.379.400,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	29.654.226,00				-	25.000.000,00	
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			41.379.400,00					20.000.000,00	
		Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	41.379.400,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.654.226,00					25.000.000,00	
		Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	29.654.226,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			153.126.000,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		50.000.000,00	
	-				153.126.000,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	33.126.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	120.000.000,00				-	0,00	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			33.126.000,00					50.000.000,00	
		Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33.126.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			120.000.000,00					0,00	
		Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62.740.000,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		6.000.000,00	
	-				62.740.000,00			Dinas Perikanan Kabupaten Luwu		6.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	-	54.940.000,00				-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	7.800.000,00				-	6.000.000,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			54.940.000,00					0,00	
		Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	5 Unit	54.940.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.800.000,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.800.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
162.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1.138.360.087,00					1.280.000.000,00	
			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,97 Persen	1.138.360.087,00				-	1.252.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			108.301.120,00			Nelayan		28.000.000,00	
	-				108.301.120,00			Nelayan		28.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	19.611.060,00				-	28.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-	88.690.060,00				-	0,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			19.611.060,00					28.000.000,00	
		Tersediannya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	19.611.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	28.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			88.690.060,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	88.690.060,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.006.058.967,00			Nelayan		1.228.000.000,00	
		-			1.006.058.967,00			Nelayan		1.228.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-	8.057.400,00				-	0,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	25.001.567,00				-	28.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-	973.000.000,00				-	1.200.000.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			25.001.567,00					28.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil			25.001.567,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	28.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			8.057.400,00					0,00	
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	8.057.400,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil			973.000.000,00					1.200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	15 Unit	973.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			24.000.000,00			Nelayan		24.000.000,00	
		-			24.000.000,00			Nelayan		24.000.000,00	
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	24.000.000,00				-	24.000.000,00	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			24.000.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	24.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	24.000.000,00	DINAS PERIKANAN
163.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1.306.886.382,00					1.870.000.000,00	
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3,22 Persen	1.275.748.520,00				-	1.820.000.000,00	
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3,22 Persen	31.137.862,00				-	30.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			31.137.862,00			Pembudidaya Ikan		50.000.000,00	
		-			31.137.862,00			Pembudidaya Ikan		50.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	-	7.000.082,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-	20.008.880,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	4.128.900,00				-	20.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			20.008.880,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	20.008.880,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			7.000.082,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	7 Kelompok	7.000.082,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			4.128.900,00					20.000.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	4.128.900,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.275.748.520,00			Pembudidaya Ikan		1.820.000.000,00	
		-			1.275.748.520,00			Pembudidaya Ikan		1.820.000.000,00	
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-	6.018.280,00				-	0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	20.015.160,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	484.065.080,00				-	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	765.650.000,00				-	1.200.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.015.160,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.015.160,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			484.065.080,00					600.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	484.065.080,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			765.650.000,00					1.200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit	765.650.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil		-	1.200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			6.018.280,00					0,00	
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	6.018.280,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PERIKANAN
164.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			30.024.217,00					30.000.000,00	
			Persentase usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan pengawasan	96,78 Persen	30.024.217,00				-	10.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			30.024.217,00			Pelaku Usaha Perikanan		30.000.000,00	
		-			30.024.217,00			Pelaku Usaha Perikanan		30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	10.001.240,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	9.995.690,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	10.027.287,00				-	10.000.000,00	
3.25.05.2.01.0004		Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			9.995.690,00					10.000.000,00	
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	9.995.690,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.05.2.01.0006		Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota			10.001.240,00					10.000.000,00	
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	10.001.240,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.05.2.01.0007		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			10.027.287,00					10.000.000,00	
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	10.027.287,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
165.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			63.605.492,00					70.000.000,00	
			Angka Konsumsi ikan	59.70	8.727.960,00				-	0,00	
			Kg/Kapita/Tahun								
			Angka Konsumsi ikan	59.70	10.000.282,00				-	10.000.000,00	
			Kg/Kapita/Tahun								
			Angka Konsumsi ikan	59.70	44.877.250,00				-	60.000.000,00	
			Kg/Kapita/Tahun								
3.25.06.2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			10.000.282,00			Pelaku Usaha Perikanan		10.000.000,00	
		-			10.000.282,00			Pelaku Usaha Perikanan		10.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-	10.000.282,00				-	10.000.000,00	
3.25.06.2.01.0005		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko			10.000.282,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	10.000.282,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			8.727.960,00			Masyarakat		0,00	
		-			8.727.960,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-	8.727.960,00				-	0,00	
3.25.06.2.02.0002		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			8.727.960,00					0,00	
		Tertaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	8.727.960,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			44.877.250,00			Pelaku Usaha Perikanan		60.000.000,00	
		-			44.877.250,00			Pelaku Usaha Perikanan		60.000.000,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	44.877.250,00				-	60.000.000,00	
3.25.06.2.03.0001		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			44.877.250,00					60.000.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Ton	44.877.250,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			5.359.598.683,00					1.261.000.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.039.999.086,00					600.000.000,00	
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.039.999.086,00					600.000.000,00	
166.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			521.359.212,00					600.000.000,00	
			Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	91,30 persen	0,00				-	0,00	
			Persentase Kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	91,30 %	0,00				-	0,00	
			Persentase Kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	91,30 %	521.359.212,00				-	600.000.000,00	
2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			521.359.212,00			Masyarakat		600.000.000,00	
		-			521.359.212,00			Masyarakat		600.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-	431.721.176,00				-	600.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-	89.638.036,00				-	0,00	
2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			431.721.176,00					600.000.000,00	
		Tertaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	431.721.176,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota			89.638.036,00					0,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	1 Dokumen	89.638.036,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,00			Masyarakat		0,00	
		-			0,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan	-	0,00				-	0,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		0,00					0,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan	1 Objek	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,00			Masyarakat		0,00	
		-			0,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-	0,00				-	0,00	
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
167.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			404.038.874,00					0,00	
			Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan (%)	93,56 persen	404.038.874,00				-	0,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			404.038.874,00			Masyarakat		0,00	
		-			404.038.874,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	404.038.874,00				-	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-	0,00				-	0,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			0,00					0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			404.038.874,00					0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	404.038.874,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga L.O.	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
168.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			114.601.000,00					0,00	
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	40 %	114.601.000,00				-	0,00	
			undefined	undefined	114.601.000,00				-	0,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0,00				-	0,00	
		-			0,00				-	0,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-	0,00				-	0,00	
	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda			0,00					0,00	
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	1 Objek	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			114.601.000,00			Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan peneliti		0,00	
		-			114.601.000,00			Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan peneliti		0,00	
			Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	-	40.601.000,00				-	0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-	74.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-	0,00				-	0,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			74.000.000,00				-	0,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	74.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan			40.601.000,00					0,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	1 Objek	40.601.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.319.599.597,00					661.000.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.319.599.597,00					661.000.000,00	
169.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.755.600.045,00					51.000.000,00	
			Rata-rata capaian kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 Angka	5.406.340,00				-	0,00	
			Rata-rata capaian kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah	100 Angka	3.161.003.963,00				-	0,00	
			Rata-rata capaian kinerja unsur penunjang urusan pemerintah perangkat daerah	100 Angka	553.446.732,00				-	51.000.000,00	
			-	-	34.734.210,00				-	0,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.415.140,00			ASN dan Non ASN, Perangkat Daerah, Infrastruktur dan Aset Daerah		0,00	
		-			6.415.140,00			ASN dan Non ASN, Perangkat Daerah, Infrastruktur dan Aset Daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.094.940,00				-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.260.980,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.008.800,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.030.040,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.008.800,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.011.580,00				-	0,00	
3.26.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.260.980,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senoa	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.008.800,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.030.040,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.094.940,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.008.800,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.011.580,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.161.003.963,00			Pejabat Pengelola keuangan, kelompok penerima manfaat dan kelompok pengawas dan pembina	-	0,00	
		-			3.161.003.963,00			Pejabat Pengelola keuangan, kelompok penerima manfaat dan kelompok pengawas dan pembina	-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	81.840.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	3.649.460,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	7.265.820,00				-	0,00	
3.26.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2683 Orang/bulan	3.068.248.683,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	81.840.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.649.460,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7.265.820,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			23.100.000,00			Aparatur Sipil Negara	-	0,00	
		-			23.100.000,00			Aparatur Sipil Negara	-	0,00	
3.26.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	23.100.000,00				-	0,00	
3.26.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	23.100.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		-			145.518.488,00			Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	0,00	
		-			145.518.488,00			Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	2.400.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	1.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	127.354.551,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4.795.541,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	-	8.875.373,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.093.023,00				-	0,00	
3.26.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.093.023,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.795.541,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	5 Paket	8.875.373,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403 Laporan	127.354.551,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.634.210,00			Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	
		-			11.634.210,00			Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	11.634.210,00				-	0,00	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.634.210,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.634.210,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			273.600.000,00			Non-ASN		51.000.000,00	
		-			273.600.000,00			Non-ASN		51.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	50.400.000,00				-	51.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	164.400.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	58.800.000,00				-	0,00	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			58.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	58.800.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50.400.000,00					51.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	51.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			164.400.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	164.400.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			134.328.244,00			ASN , masyarakat		0,00	
		-			134.328.244,00			ASN , masyarakat		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	130.798.244,00				-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3.530.000,00				-	0,00	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			130.798.244,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	130.798.244,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.530.000,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.530.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
170.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			384.999.810,00					300.000.000,00	
			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	3,12 %	49.999.794,00				-	200.000.000,00	
			Persentase penioingkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	3,12 %	315.000.253,00				-	100.000.000,00	
				-	19.999.763,00				-	0,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			49.999.794,00			Masyarakat dan wisatawan		200.000.000,00	
		-			49.999.794,00			Masyarakat dan wisatawan		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	36.627.736,00				-	0,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	13.372.058,00				-	200.000.000,00	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			13.372.058,00					200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	13.372.058,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Larompong Desa Buntu Matabing 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			36.627.736,00					0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	36.627.736,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			315.000.253,00			Masyarakat, Wisatawan		100.000.000,00	
		-			315.000.253,00			Masyarakat, Wisatawan		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	-	300.000.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	15.000.253,00				-	0,00	
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000,00					100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Desa Tiromanda 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			15.000.253,00					0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	15.000.253,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			19.999.763,00			-		0,00	
		-			19.999.763,00					0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-	19.999.763,00				-	0,00	
	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha			19.999.763,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	30 Pelaku Usaha	19.999.763,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
171.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			69.000.002,00					100.000.000,00	
			Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	51,45 persen	69.000.002,00				-	100.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			69.000.002,00			Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	-	100.000.000,00	
		-			69.000.002,00			Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	36.960.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	32.040.002,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-	0,00				-	0,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			36.960.000,00					0,00	
		Tertaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	36.960.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			0,00					0,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			32.040.002,00					100.000.000,00	
		Tertaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	32.040.002,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
172.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			0,00					0,00	
			-	-	0,00				-	0,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			0,00			-	-	0,00	
		-			0,00			-	-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	-	0,00			-	-	0,00	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif			0,00					0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			0,00					0,00	
		-			0,00			-	-	0,00	
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-	0,00			-	-	0,00	
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual			0,00					0,00	
		Tertaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
173.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			109.999.740,00					210.000.000,00	
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	12 Persen	99.963.740,00				-	200.000.000,00	
					10.036.000,00				-	10.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			10.036.000,00			masyarakat	-	10.000.000,00	
		-			10.036.000,00			masyarakat	-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	10.036.000,00				-	10.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			10.036.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	10.036.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			99.963.740,00			Pelaku usaha , masyarakat		200.000.000,00	
		-			99.963.740,00			Pelaku usaha , masyarakat		200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	99.963.740,00				-	200.000.000,00	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			99.963.740,00					200.000.000,00	
		Tertaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	99.963.740,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERTANIAN			20.542.828.759,00					26.360.505.203,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			20.542.828.759,00					26.360.505.203,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			20.542.828.759,00					26.360.505.203,00	
174.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.188.490.676,00					8.510.505.203,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsurs Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	14.188.490.676,00				-	8.508.005.203,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.876.260,00			Masyarakat		17.100.000,00	
	-	-			11.876.260,00			Masyarakat		17.100.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2.163.960,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3.913.960,00				-	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	2.206.440,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3.591.900,00				-	4.600.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.913.960,00					7.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.913.960,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.163.960,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.163.960,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.206.440,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.206.440,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.591.900,00					4.600.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.591.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.253.246.301,00			Masyarakat		7.081.505.203,00	
	-	-			7.253.246.301,00			Masyarakat		7.081.505.203,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	192.720.000,00				-	19.003.002,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	4.524.100,00				-	6.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	7.056.002.201,00				-	7.056.002.201,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.056.002.201,00					7.056.002.201,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	648 Orang/bulan	7.056.002.201,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pajak Daerah Retribusi Jasa Usaha Dana Alokasi Umum (DAU)		-	7.056.002.201,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			192.720.000,00					19.003.002,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	192.720.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	19.003.002,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			4.524.100,00					6.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	4.524.100,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			274.365.923,00			Masyarakat		310.000.000,00	
	-	-			274.365.923,00			Masyarakat		310.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	26.800.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	214.110.000,00				-	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	9.894.026,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	23.561.897,00				-	30.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.894.026,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.894.026,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			26.800.000,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	26.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			23.561.897,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	23.561.897,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			214.110.000,00					250.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	214.110.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.584.341.682,00			Masyarakat		0,00	
	-	-			5.584.341.682,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5.584.341.682,00				-	0,00	
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.584.341.682,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	5.584.341.682,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			904.629.220,00			Masyarakat		926.900.000,00	
		-			904.629.220,00			Masyarakat		926.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	56.229.220,00				-	66.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	848.400.000,00				-	860.400.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			56.229.220,00					66.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56.229.220,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	66.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			848.400.000,00					860.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	848.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Retribusi Jasa Usaha Pendapatan Bagi Hasil		-	860.400.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			160.031.290,00			Masyarakat		175.000.000,00	
		-			160.031.290,00			Masyarakat		175.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	41.929.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	118.102.290,00				-	125.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0,00				-	0,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			118.102.290,00					125.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 Unit	118.102.290,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00					0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			41.929.000,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.929.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
176.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			4.017.358.673,00					8.600.000.000,00	
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	10 Persen	2.099.742.650,00				-	4.600.000.000,00	
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura	10 Persen	1.917.616.023,00				-	3.500.000.000,00	
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman pangan	3 Persen	1.917.616.023,00				-	3.500.000.000,00	
			Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan	2 Persen	4.017.358.673,00				-	7.100.000.000,00	
			Persentase peningkatan produksi peternakan	6 Persen	1.917.616.023,00				-	3.500.000.000,00	
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	6 Persen	2.099.742.650,00				-	4.600.000.000,00	
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3 Persen	2.099.742.650,00				-	4.600.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			2.099.742.650,00			Kelompok Tani,Kelompok Ternak, Petani		5.100.000.000,00	
		-			2.099.742.650,00			Kelompok Tani,Kelompok Ternak, Petani		5.100.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	-	934.668.150,00				-	1.000.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	-	99.800.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-	499.800.000,00				-	500.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-	500.074.500,00				-	500.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	65.400.000,00				-	3.000.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			65.400.000,00					3.000.000.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	65.400.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			500.074.500,00					500.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	20 Ton	500.074.500,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang			499.800.000,00					500.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	20000 Batang	499.800.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			934.668.150,00					1.000.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	8040 Batang	934.668.150,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan			99.800.000,00					100.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	100 Anakan	99.800.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			967.616.023,00			Petani, Kelompok Tani		2.500.000.000,00	
		-			967.616.023,00			Petani, Kelompok Tani		2.500.000.000,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-	967.616.023,00				-	2.500.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			967.616.023,00					2.500.000.000,00	
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	967.616.023,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senja	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			950.000.000,00			Masyarakat		1.000.000.000,00	
		-			950.000.000,00			Masyarakat		1.000.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-	950.000.000,00				-	1.000.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			950.000.000,00					1.000.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3000 Ekor	950.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
176.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1.919.726.780,00					8.700.000.000,00	
			Persentase luas sawah yang beririgasi	89 Persen	1.919.726.780,00				-	8.000.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			356.645.880,00			Masyarakat		650.000.000,00	
		-			356.645.880,00			Masyarakat		650.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	133.676.280,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	-	186.573.520,00				-	200.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-	8.386.520,00				-	50.000.000,00	
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	-	6.686.520,00				-	100.000.000,00	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-	8.886.520,00				-	100.000.000,00	
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-	12.436.520,00				-	50.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			133.676.280,00					150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	133.676.280,00	Kab. Luwu	DBH Sawit		-	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			6.686.520,00					100.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	39000 Ha	6.686.520,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan			186.573.520,00					200.000.000,00	
		terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	2 Unit	186.573.520,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota			8.886.520,00					100.000.000,00	
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	8.886.520,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota			8.386.520,00					50.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	8.386.520,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota			12.436.520,00					50.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	12.436.520,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			1.544.068.500,00			Masyarakat		8.000.000.000,00	
		-			1.544.068.500,00			Masyarakat		8.000.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	538.950.000,00				-	3.000.000.000,00	
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	157.500.000,00				-	500.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-	438.068.500,00				-	4.000.000.000,00	
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	94.500.000,00				-	500.000.000,00	
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	-	315.050.000,00				-	0,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			538.950.000,00					3.000.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	538.950.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			157.500.000,00					500.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	157.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			94.500.000,00					500.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	94.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			438.068.500,00					4.000.000.000,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	438.068.500,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			315.050.000,00					0,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	315.050.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Bakti	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			19.012.400,00			Masyarakat		50.000.000,00	
		-			19.012.400,00			Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	-	19.012.400,00				-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			19.012.400,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	19.012.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Desa Lingsong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
177.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			51.684.750,00					50.000.000,00	
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2 Persen	51.684.750,00				-	50.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			51.684.750,00			Masyarakat		50.000.000,00	
		-			51.684.750,00			Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-	51.684.750,00				-	50.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			51.684.750,00					50.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	51.684.750,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
178.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			197.007.520,00					200.000.000,00	
			Persentase Penanganan Bencana Pertanian	90 Persen	197.007.520,00				-	200.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			197.007.520,00			Masyarakat		200.000.000,00	
		-			197.007.520,00			Masyarakat		200.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-	197.007.520,00				-	200.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			197.007.520,00					200.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2 Ha	197.007.520,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
179.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			168.560.360,00					300.000.000,00	
			Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	100 Persen	168.560.360,00				-	300.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			168.560.360,00			Masyarakat		300.000.000,00	
		-			168.560.360,00			Masyarakat		300.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-	51.950.360,00				-	200.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-	0,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-	116.610.000,00				-	0,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			51.950.360,00					200.000.000,00	
		Tertaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	5 Unit	51.950.360,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa			0,00					100.000.000,00	
		Tertaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	22 Unit	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa			116.610.000,00					0,00	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	1 Unit	116.610.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Desa Buntu Kampir 1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERDAGANGAN			6.820.055.159,00					7.093.683.581,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.820.055.159,00					7.093.683.581,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			6.820.055.159,00					7.093.683.581,00	
180.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.291.093.707,00					5.860.512.822,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	5.291.093.707,00				-	5.799.512.822,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.631.600,00			Masyarakat		39.000.000,00	
		-			28.631.600,00			Masyarakat		39.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	12.236.000,00				-	12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	991.205,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1.002.000,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4.909.120,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	3.943.550,00				-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.001.685,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	998.520,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.498.004,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.051.516,00				-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.909.120,00					15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.909.120,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			998.520,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	998.520,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.001.685,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.001.685,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			991.205,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	991.205,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.498.004,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.498.004,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.051.516,00					1.000.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.051.516,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			1.002.000,00					1.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.002.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			3.943.550,00					4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	3.943.550,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			12.236.000,00					12.500.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	12.236.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	12.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.855.661.683,00			Masyarakat		3.698.672.822,00	
		-			3.855.661.683,00			Masyarakat		3.698.672.822,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	2.064.800,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	5.536.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	3.019.100,00				-	8.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.438.480,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.842.603.303,00				-	3.675.172.822,00	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.842.603.303,00					3.675.172.822,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	576 Orang/bulan	3.842.603.303,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.675.172.822,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3.019.100,00					8.500.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.019.100,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	8.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5.536.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.536.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.438.480,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.438.480,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			2.064.800,00					2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.064.800,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.989.794,00			Masyarakat		3.000.000,00	
		-			2.989.794,00			Masyarakat		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1.495.794,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1.494.000,00				-	1.500.000,00	
3.30.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.494.000,00				-	1.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.494.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	1.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.495.794,00					1.500.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.495.794,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	1.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			18.914.208,00			Masyarakat		19.000.000,00	
		-			18.914.208,00			Masyarakat		19.000.000,00	
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	11.900.000,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	2.491.976,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	3.024.724,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	1.497.508,00				-	1.500.000,00	
3.30.01.2.04.0001		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.491.976,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.491.976,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.04.0004		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			11.900.000,00					12.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	11.900.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.04.0005		Pengolahan Data Retribusi Daerah			3.024.724,00					3.000.000,00	
		Tertaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	3.024.724,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1.497.508,00					1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	1.497.508,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	1.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			53.480.458,00			Masyarakat		49.360.000,00	
		-			53.480.458,00			Masyarakat		49.360.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	3.980.458,00				-	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	49.500.000,00				-	45.360.000,00	
3.30.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			49.500.000,00					45.360.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	49.500.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	45.360.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3.980.458,00					4.000.000,00	
		Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40 Dokumen	3.980.458,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			322.547.875,00			Masyarakat		492.000.000,00	
		-			322.547.875,00			Masyarakat		492.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	18.000.000,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	269.040,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	6.000.000,00				-	27.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	229.414.948,00				-	347.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	9.998.012,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	39.999.394,00				-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.508.680,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.966.034,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	9.394.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	4.997.767,00				-	5.000.000,00	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.966.034,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.966.034,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.394.000,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.394.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.997.767,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	4.997.767,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.998.012,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.998.012,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.508.680,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.508.680,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			18.000.000,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			39.999.394,00					40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	39.999.394,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			6.000.000,00					27.500.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	6.000.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	27.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			229.414.948,00					347.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	229.414.948,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	347.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			269.040,00					2.500.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	360 Dokumen	269.040,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			905.028.147,00			Masyarakat		1.148.000.000,00	
		-			905.028.147,00			Masyarakat		1.148.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	42.944.147,00				-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	862.084.000,00				-	968.000.000,00	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.944.147,00					180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	42.944.147,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	180.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			862.084.000,00					968.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	862.084.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	968.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			103.839.942,00			Masyarakat		411.480.000,00	
		-			103.839.942,00			Masyarakat		411.480.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	36.000.000,00				-	86.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	14.000.000,00				-	36.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	49.089.942,00				-	270.380.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4.750.000,00				-	19.100.000,00	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			49.089.942,00					270.380.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	49.089.942,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	270.380.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.000.000,00					36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	14.000.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	36.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.750.000,00					19.100.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.750.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	19.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			36.000.000,00					86.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	86.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
181.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			11.163.160,00					47.036.564,00	
			Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Rekomendasi Izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	100 persen	11.163.160,00				-	23.518.282,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			5.723.160,00			masarakat		23.518.282,00	
		-			5.723.160,00			masarakat		23.518.282,00	
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	-	5.723.160,00				-	23.518.282,00	
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik			5.723.160,00					23.518.282,00	
		Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	12 laporan	5.723.160,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	23.518.282,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			5.440.000,00			pedagang		23.518.282,00	
		-			5.440.000,00			pedagang		23.518.282,00	
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-	5.440.000,00				-	23.518.282,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			5.440.000,00					23.518.282,00	
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	2 Dokumen	5.440.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	23.518.282,00	DINAS PERDAGANGAN
182.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			758.272.448,00					279.926.829,00	
			Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	92 persen	758.272.448,00				-	279.926.829,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			758.272.448,00			pedagang		279.926.829,00	
		-			758.272.448,00			pedagang		279.926.829,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	38.272.448,00				-	79.926.829,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-	720.000.000,00				-	200.000.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			720.000.000,00					200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	720.000.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			38.272.448,00					79.926.829,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	38.272.448,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	79.926.829,00	DINAS PERDAGANGAN
183.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			562.769.980,00					327.497.860,00	
			Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 persen	11.852.000,00				-	22.065.384,00	
			Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 Persen	550.917.980,00				-	305.432.476,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			11.852.000,00			masyarakat		22.065.384,00	
					11.852.000,00			masyarakat		22.065.384,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	6.922.000,00				-	16.352.184,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	4.930.000,00				-	5.713.200,00	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			6.922.000,00					16.352.184,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	6.922.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	16.352.184,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			4.930.000,00					5.713.200,00	
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	4.930.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	5.713.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			540.207.980,00			Masyarakat		281.864.997,00	
					540.207.980,00			Masyarakat		281.864.997,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	503.003.200,00				-	202.837.900,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	1.020.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	36.184.780,00				-	79.027.097,00	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			36.184.780,00					79.027.097,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	36.184.780,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	79.027.097,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			1.020.000,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0 Laporan	1.020.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			503.003.200,00					202.837.900,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	503.003.200,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	202.837.900,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.710.000,00			Masyarakat		23.567.479,00	
					10.710.000,00			Masyarakat		23.567.479,00	
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	-	4.930.000,00				-	16.954.979,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	5.780.000,00				-	6.612.500,00	
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			4.930.000,00					16.954.979,00	
		Tertengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	2 Dokumen	4.930.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	16.954.979,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			5.780.000,00					6.612.500,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	5.780.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	6.612.500,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
184.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			129.341.600,00					446.970.988,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan ekspor daerah	1.05 Persen	129.341.600,00			Masyarakat	-	446.970.988,00	
		-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-	31.241.000,00			Masyarakat	-	446.970.988,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-	54.207.600,00				-	299.336.925,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-	43.893.000,00				-	115.528.925,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	54.207.600,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	299.336.925,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	43.893.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	115.528.925,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	31.241.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	32.105.138,00	DINAS PERDAGANGAN
185.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			67.414.264,00					131.738.518,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTPI) bertanda tera sah yang berlaku	90 Persen	67.414.264,00			Masyarakat	-	131.738.518,00	
		-	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	33.779.916,00			Masyarakat	-	131.738.518,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	33.634.348,00				-	64.843.369,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	1000 Unit	33.779.916,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	66.895.149,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	25 Orang	33.634.348,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	64.843.369,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH			35.963.118.081,00					39.403.576.893,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			35.963.118.081,00					39.403.576.893,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH			35.963.118.081,00					39.403.576.893,00	
186.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			28.151.806.469,00					36.669.431.174,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	25.295.642.485,00				-	32.070.931.174,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	2.378.476.742,00				-	3.970.000.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	477.687.242,00				-	508.500.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			477.687.242,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Pemunjang Pemerintahan Daerah		508.500.000,00	
		-			477.687.242,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Pemunjang Pemerintahan Daerah		508.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	23.308.163,00				-	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	341.806.394,00				-	320.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	13.591.526,00				-	32.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	13.732.875,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	12.294.815,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	33.170.831,00				-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	39.782.638,00				-	36.500.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			341.806.394,00					320.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	341.806.394,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			12.294.815,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.294.815,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			13.732.875,00					15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.732.875,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			23.308.163,00					40.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	23.308.163,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			13.591.526,00					32.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.591.526,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	32.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			33.170.831,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	33.170.831,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39.782.638,00					36.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	39.782.638,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	36.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.481.701.382,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		11.620.000.000,00	
		-			11.481.701.382,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		11.620.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		1.123.194.085,00				-	1.400.000.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		52.495.552,00				-	85.000.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		48.999.643,00				-	35.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		10.257.012.102,00				-	10.100.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.257.012.102,00					10.100.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2940 Orang/bulan	10.257.012.102,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.123.194.085,00					1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.123.194.085,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			52.495.552,00					85.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	52.495.552,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			48.999.643,00					35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	48.999.643,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			210.844.683,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		120.000.000,00	
		-			210.844.683,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	210.844.683,00				-	120.000.000,00	
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			210.844.683,00					120.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	210.844.683,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			154.700.000,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		205.000.000,00	
		-			154.700.000,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		205.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00				-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	154.700.000,00				-	170.000.000,00	
4.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			154.700.000,00					170.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	154.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.378.476.742,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		3.970.000.000,00	
		-			2.378.476.742,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		3.970.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	107.200.000,00				-	180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	212.633.154,00				-	380.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	1.000.000.000,00				-	1.520.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	305.578.200,00				-	620.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	77.911.704,00				-	325.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	73.279.746,00				-	295.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	48.384.208,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	21.725.750,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	531.763.980,00				-	400.000.000,00	
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			48.384.208,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	48.384.208,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.725.750,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	21.725.750,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			531.763.980,00					400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	531.763.980,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			77.911.704,00					325.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	77.911.704,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			73.279.746,00					295.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	73.279.746,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	295.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			107.200.000,00					180.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	107.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.000.000.000,00					1.520.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	1.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			305.578.200,00					620.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	305.578.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			212.633.154,00					380.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen	212.633.154,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.603.833.501,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		162.000.000,00	
		-			1.603.833.501,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		162.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	167.564.750,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1.005.310.800,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	430.957.951,00				-	150.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.005.310.800,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1.005.310.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			167.564.750,00					2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	167.564.750,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			430.957.951,00					150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	430.957.951,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.340.364.084,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		5.860.000.000,00	
		-			4.340.364.084,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		5.860.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.732.275.740,00				-	1.930.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1.763.873.344,00				-	2.430.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	844.215.000,00				-	1.500.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.732.275.740,00					1.930.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.732.275.740,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Lain-lain PAD Yang Sah		-	1.930.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			844.215.000,00					1.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Laporan	844.215.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.763.873.344,00					2.430.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	1.763.873.344,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.286.059.898,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		1.700.000.000,00	
		-			1.286.059.898,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		1.700.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00				-	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1.068.170.650,00				-	1.130.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	137.739.248,00				-	265.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	80.150.000,00				-	130.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			137.739.248,00					265.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	137.739.248,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	265.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.068.170.650,00					1.130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	486 Unit	1.068.170.650,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00					175.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00					0,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.150.000,00					130.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	80.150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.796.910.083,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		4.070.000.000,00	
		-			2.796.910.083,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		4.070.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1.300.040.000,00				-	2.500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1.038.270.083,00				-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	220.000.000,00				-	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	238.600.000,00				-	250.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.038.270.083,00					1.100.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.038.270.083,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			238.600.000,00					250.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	57 Paket	238.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			220.000.000,00					220.000.000,00	
		Tertaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	220.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.300.040.000,00					2.500.000.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.300.040.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			2.536.562.380,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		3.075.000.000,00	
		-			2.536.562.380,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		3.075.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-	1.413.296.270,00				-	1.565.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	148.111.375,00				-	385.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	975.154.735,00				-	1.125.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.413.296.270,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.565.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	975.154.735,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	148.111.375,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pajak Daerah		-	385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			408.074.334,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		415.000.000,00	
		-			408.074.334,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		415.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	30.478.532,00				-	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	6.222.612,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	168.059.187,00				-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	57.318.216,00				-	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	145.995.787,00				-	115.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	168.059.187,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	57 Laporan	145.995.787,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	57.318.216,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	6.222.612,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			30.478.532,00					75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	30.478.532,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			476.592.140,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		4.963.931.174,00	
		-			476.592.140,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		4.963.931.174,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	-	380.662.200,00				-	515.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	95.929.940,00				-	4.448.931.174,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitas Keprotokolan			380.662.200,00					515.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 Laporan	380.662.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			95.929.940,00					4.448.931.174,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	95.929.940,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.448.931.174,00	SEKRETARIAT DAERAH
187.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			6.654.548.975,00					2.218.745.720,00	
			Persentase Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	80 Persen	5.480.288.434,00				-	1.058.745.724,00	
			Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	80 Persen	1.174.260.541,00				-	326.666.666,00	
			Persentase kenaikan capaian LPPD	10 Persen	6.084.506.942,00				-	1.225.412.390,00	
			Persentase Kenaikan Capaian LPPD	10 Persen	570.042.033,00				-	326.666.666,00	
			Persentase Kesiadaan Produk Hukum Daerah	100 Persen	604.218.508,00				-	166.666.666,00	
			Persentase ketersediaan produk hukum daerah	100 Persen	6.050.330.467,00				-	1.385.412.390,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			519.021.469,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		499.999.998,00	
		-			519.021.469,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		499.999.998,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	245.863.207,00				-	166.666.666,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-	168.020.661,00				-	166.666.666,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	105.137.601,00				-	166.666.666,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			168.020.661,00					166.666.666,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	168.020.661,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	166.666.666,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			105.137.601,00					166.666.666,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	105.137.601,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	166.666.666,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			245.863.207,00					166.666.666,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	245.863.207,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	166.666.666,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			5.480.288.434,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		1.058.745.724,00	
		-			5.480.288.434,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		1.058.745.724,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	3.480.288.434,00				-	373.745.724,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perindustrian, Kearsifan, Transilum Unmas	-	0,00				-	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	2.000.000.000,00				-	640.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			3.480.288.434,00					373.745.724,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11 Dokumen	3.480.288.434,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	373.745.724,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			2.000.000.000,00					640.000.000,00	
		Tertaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			0,00					45.000.000,00	
		Tertaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			604.218.508,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		499.999.998,00	
	-				604.218.508,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		499.999.998,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	262.572.929,00				-	166.666.666,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-	185.878.165,00				-	166.666.666,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-	155.767.414,00				-	166.666.666,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			185.878.165,00					166.666.666,00	
		Tertaksilasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	441 Dokumen	185.878.165,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	166.666.666,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			262.572.929,00					166.666.666,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	262.572.929,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	166.666.666,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			155.767.414,00					166.666.666,00	
		Tertaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1 Dokumen	155.767.414,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	166.666.666,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			51.020.564,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		160.000.000,00	
	-				51.020.564,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	44.229.865,00				-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	6.790.699,00				-	40.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			44.229.865,00					120.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	44.229.865,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			6.790.699,00					40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertindakannya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	6.790.699,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
188.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.156.762.637,00					515.399.999,00	
			Persentase UMKM yang memperoleh akses ke lembaga Keuangan	100 Persen	397.725.550,00				-	49.800.000,00	
			Persentase UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	9 Angka	700.566.769,00				-	70.333.333,00	
			Persentase UMKM yang memperoleh akses lembaga Keuangan	100 %	26.782.798,00				-	55.000.000,00	
			Persentase UMKM yang memperoleh akses lembaga Keuangan	100 Persen	31.687.520,00				-	100.000.000,00	
			Tingkat kematangan UKPBJ	9 Angka	58.470.318,00				-	155.000.000,00	
			Tingkat Kematangan UKPBJ	100 %	700.566.769,00				-	70.333.333,00	
			Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Angka	397.725.550,00				-	49.800.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			397.725.550,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		149.400.000,00	
		-			397.725.550,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		149.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	217.968.762,00				-	16.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	-	60.739.260,00				-	33.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	11.299.920,00				-	33.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	43.354.505,00				-	33.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	64.363.103,00				-	33.200.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			11.299.920,00					33.200.000,00	
		Tertindakannya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	11.299.920,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	33.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			64.363.103,00					33.200.000,00	
		Tertindakannya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 Laporan	64.363.103,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	33.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			43.354.505,00					33.200.000,00	
		Tertindakannya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	43.354.505,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	33.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			217.968.762,00					16.600.000,00	
		Tertindakannya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	217.968.762,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	16.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)			60.739.260,00					33.200.000,00	
		Tertindakannya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	1 Dokumen	60.739.260,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	33.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			31.687.520,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		100.000.000,00	
		-			31.687.520,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	31.687.520,00				-	100.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			31.687.520,00					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	31.687.520,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			700.566.769,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		210.999.999,00	
		-			700.566.769,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		210.999.999,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	127.648.837,00				-	70.333.333,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	479.554.743,00				-	70.333.333,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	93.363.189,00				-	70.333.333,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			479.554.743,00					70.333.333,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	479.554.743,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Retribusi Daerah - LRA		-	70.333.333,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			127.648.837,00					70.333.333,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	127.648.837,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	70.333.333,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			93.363.189,00					70.333.333,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	93.363.189,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	70.333.333,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			26.782.798,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		55.000.000,00	
		-			26.782.798,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-	26.782.798,00				-	55.000.000,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			26.782.798,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	26.782.798,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		-	55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD			31.009.707.097,00					36.004.021.347,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			31.009.707.097,00					36.004.021.347,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD			31.009.707.097,00					36.004.021.347,00	
189.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.143.024.137,00					24.373.134.517,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	22.116.181.217,00				-	24.315.027.117,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.925.840,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		87.174.479,00	
		-			23.925.840,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		87.174.479,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2.880.000,00				-	11.430.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6.202.920,00				-	16.519.679,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	2.880.000,00				-	11.430.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.880.000,00				-	11.430.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.880.000,00				-	11.430.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6.202.920,00				-	24.934.800,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.202.920,00					16.519.679,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.202.920,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	16.519.679,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.880.000,00					11.430.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	11.430.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.880.000,00					11.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	11.430.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.880.000,00					11.430.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	11.430.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.880.000,00					11.430.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	11.430.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.202.920,00					24.934.800,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.202.920,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	24.934.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.262.125.317,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		4.404.160.358,00	
					4.262.125.317,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		4.404.160.358,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	3.172.300,00					11.817.400,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	200.880.000,00					341.670.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	3.322.920,00					8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	3.249.000,00					11.817.400,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.051.501.097,00					4.030.855.558,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.051.501.097,00					4.030.855.558,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 Orang/bulan	4.051.501.097,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.030.855.558,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			200.880.000,00					341.670.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	200.880.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	341.670.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.322.920,00					8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.322.920,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	8.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			3.172.300,00					11.817.400,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.172.300,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	11.817.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			3.249.000,00					11.817.400,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.249.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	11.817.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.169.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		8.666.183,00	
					5.169.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		8.666.183,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5.169.000,00					8.666.183,00	
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.169.000,00					8.666.183,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.169.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	8.666.183,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			370.334.400,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		493.861.000,00	
					370.334.400,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		493.861.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	3.033.400,00					12.080.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	244.121.000,00					306.221.000,00	
			Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	34.320.000,00					55.360.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	88.860.000,00					120.000.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			34.320.000,00					55.360.000,00	
		Tersedianya Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	34.320.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	55.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3.033.400,00					12.080.000,00	
		Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.033.400,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	12.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			88.860.000,00					120.000.000,00	
		Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	88.860.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			244.121.000,00					306.221.000,00	
		Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	244.121.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	306.221.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			675.662.918,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		894.045.284,00	
					675.662.918,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		894.045.284,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	152.500.000,00					261.900.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	27.900.000,00					65.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	269.438.000,00					301.916.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	60.560.675,00					78.115.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	25.825.000,00					40.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	8.401.707,00					10.685.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	124.025.816,00					123.101.284,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	7.011.720,00					12.328.000,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.401.707,00					10.685.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.401.707,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.685.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			124.025.816,00					123.101.284,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	124.025.816,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	123.101.284,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.011.720,00					12.328.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	7.011.720,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	12.328.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			60.560.675,00					78.115.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	60.560.675,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	78.115.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			25.825.000,00					40.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.825.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	40.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			152.500.000,00					261.900.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	152.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	261.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			27.900.000,00					65.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27.900.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	65.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			269.438.000,00					301.916.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	269.438.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	301.916.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			163.599.800,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		297.000.000,00	
		-			163.599.800,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		297.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	94.217.800,00				-	152.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	69.382.000,00				-	145.000.000,00	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			94.217.800,00					152.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	94.217.800,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	152.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			69.382.000,00					145.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	69.382.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	145.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.000.533.518,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		936.860.500,00	
		-			1.000.533.518,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		936.860.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	376.533.518,00				-	378.860.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	600.000.000,00				-	534.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	12.000.000,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12.000.000,00				-	12.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000,00					12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Luwu	Lain-lain PAD Yang Sah		-	12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			376.533.518,00					378.860.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	376.533.518,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	378.860.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.000.000,00					12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Luwu	Lain-lain PAD Yang Sah		-	12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			600.000.000,00					534.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000,00	Kab. Luwu	Lain-lain PAD Yang Sah		-	534.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			443.940.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		647.053.390,00	
		-			443.940.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		647.053.390,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	21.850.000,00				-	160.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	251.390.000,00				-	287.050.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	134.700.000,00				-	133.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	26.400.000,00				-	46.460.380,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	9.600.000,00				-	20.343.010,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			134.700.000,00					133.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	134.700.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	133.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			251.390.000,00					287.050.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	251.390.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	287.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.400.000,00					46.460.380,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 Unit	26.400.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	46.460.380,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			21.850.000,00					160.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	21.850.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9.600.000,00					20.343.010,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	9.600.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	20.343.010,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			14.903.719.744,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		15.583.795.611,00	
		-			14.903.719.744,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		15.583.795.611,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-	14.549.914.744,00				-	15.174.795.611,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-	52.500.000,00				-	52.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-	301.305.000,00				-	356.500.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			14.549.914.744,00					15.174.795.611,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 Orang/Bulan	14.549.914.744,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	15.174.795.611,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			301.305.000,00					356.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	301.305.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	356.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			52.500.000,00					52.500.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	52.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			294.013.600,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		1.020.717.712,00	
	-	-			294.013.600,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		1.020.717.712,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-	96.613.600,00				-	96.613.600,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-	197.400.000,00				-	924.104.112,00	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			96.613.600,00					96.613.600,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	96.613.600,00	Kab. Luwu	Lain-lain PAD Yang Sah		-	96.613.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			197.400.000,00					924.104.112,00	
		Tertaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8 Paket	197.400.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	924.104.112,00	SEKRETARIAT DPRD
190.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			8.886.682.960,00					11.630.886.830,00	
			Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 Persen	8.449.960.960,00				-	11.221.414.480,00	
			Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	60 Persen	8.449.960.960,00				-	11.221.414.480,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1.886.563.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		3.003.313.000,00	
	-	-			1.886.563.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		3.003.313.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	1.742.063.000,00				-	2.811.313.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	6.000.000,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-	135.000.000,00				-	180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	3.500.000,00				-	6.000.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			6.000.000,00					6.000.000,00	
		Tertaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.742.063.000,00					2.811.313.000,00	
		Tertaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	1.742.063.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.811.313.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			3.500.000,00					6.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik			135.000.000,00					180.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			396.828.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		620.768.350,00	
	-	-			396.828.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		620.768.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-	127.606.000,00				-	202.796.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-	127.606.000,00				-	202.796.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-	10.500.000,00				-	20.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	120.616.000,00				-	174.176.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	10.500.000,00				-	20.500.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			10.500.000,00					20.500.000,00	
		Tertaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	20.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			10.500.000,00					20.500.000,00	
		Tertaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	20.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			127.606.000,00					202.796.000,00	
		Tertaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	127.606.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	202.796.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			127.606.000,00					202.796.000,00	
		Tertaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	127.606.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	202.796.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			120.616.000,00					174.176.350,00	
		Tertaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	120.616.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	174.176.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			165.616.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		229.176.350,00	
	-	-			165.616.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		229.176.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	45.000.000,00				-	55.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	120.616.000,00				-	174.176.350,00	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			45.000.000,00					55.000.000,00	
		Tertaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			120.616.000,00					174.176.350,00	
		Tertaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	120.616.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	174.176.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			3.260.995.200,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		2.990.275.050,00	
	-	-			3.260.995.200,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		2.990.275.050,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-	2.917.438.000,00				-	2.511.371.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	16.000.000,00				-	67.664.500,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-	29.057.200,00				-	121.639.550,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-	10.500.000,00				-	19.600.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	144.000.000,00				-	144.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-	144.000.000,00				-	126.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			2.917.438.000,00					2.511.371.000,00	
		Tertaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	2.917.438.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.511.371.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			144.000.000,00					144.000.000,00	
		Tersediannya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	144.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	144.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			144.000.000,00					126.000.000,00	
		Tersediannya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	144.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	126.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			16.000.000,00					67.664.500,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Luwu	Lain-lain PAD Yang Sah		-	67.664.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			10.500.000,00					19.600.000,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	19.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			29.057.200,00					121.639.550,00	
		Tertaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen	29.057.200,00	Kab. Luwu	Lain-lain PAD Yang Sah		-	121.639.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.746.555.760,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		1.653.527.080,00	
	-	-			1.746.555.760,00			Pimpinan dan Anggota DPRD		1.653.527.080,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-	1.681.720.240,00				-	1.414.276.380,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-	13.110.520,00				-	34.383.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-	51.725.000,00				-	204.867.500,00	
4.02.02.2.05.0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah			51.725.000,00					204.867.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	51.725.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	204.867.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0002		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD			13.110.520,00					34.383.200,00	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	-	13.110.520,00				-	34.383.200,00	SEKRETARIAT DPRD
			Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2 Dokumen	13.110.520,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	34.383.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003		Pelaksanaan Reses			1.681.720.240,00					1.414.276.380,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.681.720.240,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.414.276.380,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08		Tertindaknya Reses			1.410.125.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD	-	3.133.827.000,00	
			Fasilitasi Tugas DPRD	-	1.410.125.000,00			Pimpinan dan Anggota DPRD	-	3.133.827.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	1.406.625.000,00				-	3.127.827.000,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-	3.500.000,00				-	6.000.000,00	
4.02.02.2.08.0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			1.406.625.000,00					3.127.827.000,00	
			Tertindaknya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17 Dokumen	1.406.625.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.127.827.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0002		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			3.500.000,00					6.000.000,00	
			Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH			6.815.033.592,00					6.825.501.185,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.815.033.592,00					6.825.501.185,00	
5.01		PERENCANAAN			6.242.457.914,00					6.292.991.185,00	
191. 5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.538.707.986,00					5.458.286.235,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	5.538.471.986,00				-	5.456.886.235,00	
5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.852.840,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		14.935.000,00	
		-			9.852.840,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		14.935.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	6.260.000,00				-	6.215.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	236.000,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.866.800,00				-	5.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	236.000,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	254.040,00				-	1.200.000,00	
5.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.866.800,00					5.120.000,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.866.800,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	5.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			254.040,00					1.200.000,00	
			Tersediannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	254.040,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.01.0008		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			236.000,00					1.200.000,00	
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	236.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.01.0011		Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			236.000,00					1.200.000,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1 Dokumen	236.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.01.0013		Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			6.260.000,00					6.215.000,00	
			Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	6.260.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	6.215.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.638.580.165,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		3.658.397.124,00	
		-			3.638.580.165,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		3.658.397.124,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	13.060.000,00				-	4.610.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	131.280.000,00				-	168.350.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	916.980,00				-	3.580.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.493.323.185,00				-	3.481.857.124,00	
5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.493.323.185,00					3.481.857.124,00	
			Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.493.323.185,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU II)		-	3.481.857.124,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			131.280.000,00					168.350.000,00	
			Tertindaknya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	131.280.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	168.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			13.060.000,00					4.610.000,00	
			Tertindaknya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	13.060.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			916.980,00					3.580.000,00	
			Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	916.980,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.801.200,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		9.335.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		-			7.801.200,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		9.335.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1.501.200,00				-	635.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	6.300.000,00				-	8.700.000,00	
5.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.501.200,00					635.000,00	
		Tertaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.501.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	635.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.300.000,00					8.700.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.300.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	8.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			168.184.200,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		36.160.000,00	
		-			168.184.200,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		36.160.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	2.544.200,00				-	2.860.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	38.280.000,00				-	16.800.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	127.360.000,00				-	16.500.000,00	
5.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			38.280.000,00					16.800.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	38.280.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	16.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2.544.200,00					2.860.000,00	
		Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.544.200,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			127.360.000,00					16.500.000,00	
		Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	127.360.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			653.117.301,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		823.957.691,00	
		-			653.117.301,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		823.957.691,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	63.000.000,00				-	19.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	42.855.000,00				-	9.974.022,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	7.250.000,00				-	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	472.152.000,00				-	628.273.576,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	19.160.992,00				-	17.900.135,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12.862.334,00				-	108.933.194,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	10.352.176,00				-	4.750.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	8.144.180,00				-	10.294.326,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	17.340.619,00				-	10.532.438,00	
5.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.144.180,00					10.294.326,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.144.180,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.294.326,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.340.619,00					10.532.438,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.340.619,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.532.438,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.160.992,00					17.900.135,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.160.992,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	17.900.135,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			10.352.176,00					4.750.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.352.176,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			63.000.000,00					19.300.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	63.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	19.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			12.862.334,00					108.933.194,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	12.862.334,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	108.933.194,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu			7.250.000,00					14.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.250.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			472.152.000,00					628.273.576,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	472.152.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	628.273.576,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			42.855.000,00					9.974.022,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	42.855.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	9.974.022,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			227.300.800,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		105.173.820,00	
		-			227.300.800,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		105.173.820,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	12.506.000,00				-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	214.794.800,00				-	105.173.820,00	
5.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel			12.506.000,00					0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	12.506.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			214.794.800,00					105.173.820,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	214.794.800,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	105.173.820,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			477.671.480,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		497.946.000,00	
		-			477.671.480,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		497.946.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	170.638.700,00				-	190.676.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	306.000.000,00				-	306.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penvediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.032.780,00				-	1.270.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.032.780,00				-	1.270.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.032.780,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.270.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			170.638.700,00				-	190.676.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.638.700,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	190.676.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			306.000.000,00				-	306.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	306.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	306.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			356.200.000,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		313.381.600,00	
		-			356.200.000,00			Bappelitbangda Kab. Luwu		313.381.600,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	41.720.000,00				-	45.036.600,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknnya	-	264.130.000,00				-	227.905.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	50.350.000,00				-	40.440.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			264.130.000,00				-	227.905.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknnya	12 Unit	264.130.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	227.905.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.350.000,00				-	40.440.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	50.350.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	40.440.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			41.720.000,00				-	45.036.600,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	41.720.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	45.036.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
192.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			373.275.449,00					503.541.000,00	
			Persentase Keselarasan Nomenklatur dan Anggaran antara Program RPJMD dengan RKPD	100 Persen	373.275.449,00				-	503.541.000,00	
			Persentase PD Dengan Predikat Kinerja Program "Sangat Tinggi"	89 Persen	373.275.449,00				-	503.541.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			227.178.289,00			Kabupaten Luwu		309.098.000,00	
		-			227.178.289,00			Kabupaten Luwu		309.098.000,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	13.100.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-	16.000.000,00				-	16.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-	28.600.000,00				-	28.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RP/DP/RP/MD/RKPD)	-	46.325.580,00				-	26.158.000,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RP/MD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RP/MD Maka Rancangan Teknokratik)	-	11.932.089,00				-	10.375.000,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	-	80.840.620,00				-	177.845.000,00	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	30.380.000,00				-	29.920.000,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			11.932.089,00				-	10.375.000,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RP/MD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RP/MD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RP/MD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	11.932.089,00	Kab. Luwu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	10.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			80.840.620,00				-	177.845.000,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	80.840.620,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	177.845.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			16.000.000,00				-	16.000.000,00	
		Tertaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	16.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			13.100.000,00				-	20.000.000,00	
		Tertaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara	13.100.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			28.600.000,00				-	28.800.000,00	
		Tertaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	28.600.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	28.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			30.380.000,00				-	29.920.000,00	
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1135 Usulan	30.380.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	29.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			46.325.580,00				-	26.158.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RP/DP/RP/MD/RKPD)	2 Dokumen	46.325.580,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	26.158.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			59.097.160,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		95.443.000,00	
		-			59.097.160,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		95.443.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-	59.097.160,00				-	95.443.000,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			59.097.160,00				-	95.443.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	59.097.160,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	95.443.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			87.000.000,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		99.000.000,00	
		-			87.000.000,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		99.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	87.000.000,00				-	99.000.000,00	
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			87.000.000,00					99.000.000,00	
		Tertaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	87.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	99.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
193.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			330.474.479,00					330.163.950,00	
			Persentase Perangkat Daerah Yang Dikoordinasikan Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	187.994.135,00				-	188.094.950,00	
			Persentase Perangkat Daerah Yang Dikoordinasikan Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	135.520.344,00				-	139.212.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			189.954.135,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		189.974.950,00	
		-			189.954.135,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		189.974.950,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	960.000,00				-	880.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	1.000.000,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	6.000.000,00				-	1.738.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	2.500.000,00				-	1.858.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	960.000,00				-	880.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-	114.534.520,00				-	118.746.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-	62.999.615,00				-	63.872.000,00	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	1.000.000,00				-	1.000.000,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1.000.000,00					1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			2.500.000,00					1.858.000,00	
		Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	36 Laporan	2.500.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.858.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1.000.000,00					1.000.000,00	
		Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	36 Laporan	1.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			62.999.615,00					63.872.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	36 Laporan	62.999.615,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	63.872.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			960.000,00					880.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	960.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			6.000.000,00					1.738.000,00	
		Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	6.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.738.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			960.000,00					880.000,00	
		Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	960.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			114.534.520,00					118.746.950,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	114.534.520,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	118.746.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			70.238.466,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		70.092.000,00	
		-			70.238.466,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		70.092.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	5.570.648,00				-	3.155.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	1.673.818,00				-	3.130.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Perekonomian</u>	-	3.750.000,00				-	1.190.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>SDA</u>	-	5.000.000,00				-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Perekonomian</u>	-	5.780.000,00				-	1.104.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>SDA</u>	-	5.350.000,00				-	977.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang <u>Perekonomian</u>	-	21.849.000,00				-	10.833.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang <u>SDA</u>	-	21.265.000,00				-	49.203.000,00	
5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>Perekonomian</u> (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)			5.570.648,00					3.155.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>Perekonomian</u> (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>Perekonomian</u> yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	6 Dokumen	5.570.648,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.155.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.03.2.02.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Perekonomian</u>			3.750.000,00					1.190.000,00	
		Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Perekonomian</u>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Perekonomian</u>	6 Laporan	3.750.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.03.2.02.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Perekonomian</u>			5.780.000,00					1.104.000,00	
		Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Perekonomian</u>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Perekonomian</u>	6 Laporan	5.780.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.104.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.03.2.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>Perekonomian</u>			21.849.000,00					10.833.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang <u>Perekonomian</u>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang <u>Perekonomian</u>	6 Laporan	21.849.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.833.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.03.2.02.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>SDA</u> (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)			1.673.818,00					3.130.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>SDA</u> (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>SDA</u> yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	2 Dokumen	1.673.818,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.130.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.03.2.02.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>SDA</u>			5.000.000,00					500.000,00	
		Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>SDA</u>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>SDA</u>	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.03.2.02.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>SDA</u>			5.350.000,00					977.000,00	
		Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>SDA</u>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>SDA</u>	2 Laporan	5.350.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	977.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.03.2.02.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>SDA</u>			21.265.000,00					49.203.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang <u>SDA</u>	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang <u>SDA</u>	2 Laporan	21.265.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	49.203.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			70.281.878,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		70.097.000,00	
					70.281.878,00			Pemerintah Kabupaten Luwu		70.097.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	-	1.717.218,00				-	2.580.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	-	1.849.660,00				-	700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Infrastruktur</u>	-	5.000.000,00				-	780.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Kewilayahan</u>	-	6.000.000,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Infrastruktur</u>	-	6.050.000,00				-	1.741.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Kewilayahan</u>	-	5.200.000,00				-	977.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang <u>Infrastruktur</u>	-	22.125.000,00				-	54.136.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang <u>Kewilayahan</u>	-	22.340.000,00				-	8.183.000,00	
5.01.03.2.03.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>Infrastruktur</u> (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)			1.717.218,00					2.580.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>Infrastruktur</u> (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang <u>Infrastruktur</u> yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	3 Dokumen	1.717.218,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.03.2.03.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Infrastruktur</u>			5.000.000,00					780.000,00	
		Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Infrastruktur</u>	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Infrastruktur</u>	3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5.01.03.2.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang <u>Infrastruktur</u>			6.050.000,00					1.741.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	6.050.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.741.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			22.125.000,00					54.136.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	22.125.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	54.136.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)			1.849.860,00					700.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	3 Dokumen	1.849.860,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			6.000.000,00					1.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	6.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			5.200.000,00					977.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	5.200.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	977.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			22.340.000,00					8.183.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	22.340.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	8.183.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			572.575.678,00					532.510.000,00	
194.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			434.839.678,00					404.920.000,00	
			Persentase Hasil Kelitbangan Daerah Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	100 %	434.839.678,00				-	404.920.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			183.939.678,00			Pemerintah Kab. Luwu		243.300.000,00	
					183.939.678,00			Pemerintah Kab. Luwu		243.300.000,00	
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-	7.731.678,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	100.000.000,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	-	0,00				-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	-	0,00				-	90.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-	76.208.000,00				-	10.800.000,00	
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			100.000.000,00					60.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			0,00					80.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.02.2.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa			0,00					90.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			7.731.678,00					2.500.000,00	
		Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	7.731.678,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			76.208.000,00					10.800.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	76.208.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	10.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			130.000.000,00			Pemerintah Kab. Luwu		100.000.000,00	
					130.000.000,00			Pemerintah Kab. Luwu		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	80.000.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	50.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	-	0,00				-	0,00	
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			50.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			80.000.000,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja			0,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertelaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			120.900.000,00			Pemerintah Kab. Luwu		61.620.000,00	
		-			120.900.000,00			Pemerintah Kab. Luwu		61.620.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	33.250.000,00				-	27.920.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	87.650.000,00				-	33.700.000,00	
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			87.650.000,00					33.700.000,00	
		Tertelaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	87.650.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	33.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			33.250.000,00					27.920.000,00	
		Tertelaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	33.250.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	27.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.02.2.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan			0,00					0,00	
		Tertelaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	0 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
195.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			137.736.000,00					127.590.000,00	
		Persentase Inovasi Daerah Yang Memiliki Kematangan >75 Dalam IIP Pada Tahun Pelaporan		60 %	137.736.000,00				-	127.590.000,00	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi			137.736.000,00			Pemerintah Kab. Luwu		127.590.000,00	
		-			137.736.000,00			Pemerintah Kab. Luwu		127.590.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	-	50.570.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	-	0,00				-	22.700.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	-	87.166.000,00				-	89.890.000,00	
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi			0,00					22.700.000,00	
		Tertelaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	22.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			50.570.000,00					15.000.000,00	
		Tertelaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	50.570.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
	5.05.03.2.02.0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi			87.166.000,00					89.890.000,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan	87.166.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	89.890.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			246.821.351.693,00					232.851.882.239,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			246.821.351.693,00					232.851.882.239,00	
	5.02	KEUANGAN			246.821.351.693,00					232.851.882.239,00	
196.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.827.796.196,00					6.026.496.027,00	
			Rata-Rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	5.827.796.196,00				-	6.000.996.027,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.718.820,00			BKAD Kab. Luwu		97.667.678,00	
		-			64.718.820,00			BKAD Kab. Luwu		97.667.678,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	38.501.140,00				-	39.222.456,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.902.240,00				-	3.774.257,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	2.453.860,00				-	2.598.744,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.481.140,00				-	7.364.604,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.711.240,00				-	7.895.152,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	522.400,00				-	532.848,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	18.146.800,00				-	36.279.617,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.902.240,00					3.774.257,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.902.240,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	3.774.257,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.711.240,00					7.895.152,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.711.240,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	7.895.152,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.481.140,00					7.364.604,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.481.140,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	7.364.604,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			38.501.140,00					39.222.456,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	38.501.140,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	39.222.456,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.453.860,00					2.598.744,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.453.860,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	2.598.744,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			522.400,00					532.848,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	522.400,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	532.848,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.146.800,00					36.279.617,00	
		Tertelaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.146.800,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	36.279.617,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.881.895.069,00			BKAD Kab. Luwu		4.984.173.771,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	4.881.895.069,00			BKAD Kab. Luwu	-	4.984.173.771,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	501.936.176,00				-	510.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.327.280,00				-	5.231.720,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	2.395.720,00				-	5.201.441,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.375.235.893,00				-	4.462.740.610,00	
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang/bulan	4.375.235.893,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.462.740.610,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1500 Dokumen	501.936.176,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	510.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.327.280,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	5.231.720,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Pemiipapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	1.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.395.720,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	5.201.441,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	27.429.760,00			BKAD Kab. Luwu	-	27.329.804,00	
5.02.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	27.429.760,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	27.329.804,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	62.893.380,00			BKAD Kab. Luwu	-	73.290.472,00	
5.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	32.860.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	33.517.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42 Dokumen	18.731.840,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	23.025.329,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43 Dokumen	1.221.540,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	1.325.543,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	3.120.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	4.773.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	6.960.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	10.648.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	307.852.124,00			BKAD Kab. Luwu	-	366.123.041,00	
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.098.867,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	4.180.844,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.411.466,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	14.287.562,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.437.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	9.526.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	27 Dokumen	57.600.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	58.752.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			15.745.063,00					27.693.765,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.745.063,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	27.693.765,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			43.999.328,00					39.779.314,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	43.999.328,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	39.779.314,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			172.560.400,00					211.902.756,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	172.560.400,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	211.902.756,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			54.476.500,00			BKAD Kab. Luwu		76.248.060,00	
		-			54.476.500,00			BKAD Kab. Luwu		76.248.060,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	37.750.000,00				-	25.500.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0,00				-	25.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	16.726.500,00				-	25.248.060,00	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00					25.500.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	25.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			37.750.000,00					25.500.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	37.750.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	25.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.726.500,00					25.248.060,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.726.500,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	25.248.060,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			269.229.543,00			BKAD Kab. Luwu		281.699.001,00	
		-			269.229.543,00			BKAD Kab. Luwu		281.699.001,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	229.990.383,00				-	241.740.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	36.000.000,00				-	36.720.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	3.239.160,00				-	3.239.001,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.239.160,00					3.239.001,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.239.160,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	3.239.001,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			229.990.383,00					241.740.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	229.990.383,00	Kab. Luwu	Lain-lain PAD Yang Sah		-	241.740.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			36.000.000,00					36.720.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	36.720.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			159.301.000,00			BKAD Kab. Luwu		119.964.200,00	
		-			159.301.000,00			BKAD Kab. Luwu		119.964.200,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1.950.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	144.641.000,00				-	102.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	12.710.000,00				-	12.964.200,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			144.641.000,00					102.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	144.641.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	102.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.710.000,00					12.964.200,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	12.710.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	12.964.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.950.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.950.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
197	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			240.544.368.187,00					226.240.763.936,00	
		Persentase Penerapan Anggaran		98 Persen	240.544.368.187,00				-	226.210.163.936,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			903.955.527,00			SKPD Kab. Luwu		615.899.524,00	
		-			903.955.527,00			SKPD Kab. Luwu		615.899.524,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	84.662.494,00				-	86.194.312,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	27.249.820,00				-	27.800.646,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-	23.765.100,00				-	32.225.865,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-	19.362.940,00				-	27.721.630,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	0,00				-	5.100.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-	1.106.604,00				-	1.111.698,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	0,00				-	15.300.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	369.998.971,00				-	403.375.577,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	375.101.288,00				-	0,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-	1.018.580,00				-	1.036.091,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	708.400,00				-	8.036.149,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	981.330,00				-	7.997.556,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			23.765.100,00					32.225.865,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	23.765.100,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	32.225.865,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			19.362.940,00					27.721.630,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	19.362.940,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	27.721.630,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			981.330,00					7.997.556,00	
		Tertaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	981.330,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	7.997.556,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			708.400,00					8.036.149,00	
		Tertaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	708.400,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	8.036.149,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			1.106.604,00					1.111.698,00	
		Tertaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	1.106.604,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	1.111.698,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			1.018.580,00					1.036.091,00	
		Tertaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	1.018.580,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	1.036.091,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			369.998.971,00					403.375.577,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	369.998.971,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lain-lain PAD Yang Sah		-	403.375.577,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			375.101.288,00					0,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	375.101.288,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lain-lain PAD Yang Sah		-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			0,00					5.100.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	5.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			27.249.820,00					27.800.646,00	
		Tertaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 Dokumen	27.249.820,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	27.800.646,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			84.662.494,00					86.194.312,00	
		Tertaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	57 Dokumen	84.662.494,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	86.194.312,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00					15.300.000,00	
		Tertaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	0,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	15.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			174.891.553,00			SKPD Kab. Luwu		235.360.807,00	
	-	-			174.891.553,00			SKPD Kab. Luwu		235.360.807,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		48.162.791,00				-	58.459.804,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		39.550.480,00				-	47.499.033,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		20.869.380,00				-	30.664.851,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		23.612.740,00				-	32.813.149,00	
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		42.696.162,00				-	50.623.970,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		0,00				-	15.300.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			48.162.791,00					58.459.804,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	360 Dokumen	48.162.791,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	58.459.804,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			20.869.380,00					30.664.851,00	
		Tertaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	228 Dokumen	20.869.380,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	30.664.851,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			39.550.480,00					47.499.033,00	
		Tertaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	15 Dokumen	39.550.480,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	47.499.033,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			42.696.162,00					50.623.970,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	420 Laporan	42.696.162,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	50.623.970,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			23.612.740,00					32.813.149,00	
		Tertaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	57 Dokumen	23.612.740,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	32.813.149,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00					15.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	0,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	15.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			353.805.090,00			SKPD Kab. Luwu		362.369.713,00	
		-			353.805.090,00			SKPD Kab. Luwu		362.369.713,00	
		-	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	-	0,00				-	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	70.453.160,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ, dan Beban	-	19.638.360,00				-	25.509.410,00	
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	16.486.525,00				-	16.962.702,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	23.611.620,00				-	24.318.749,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	49.469.150,00				-	58.986.732,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	99.691.155,00				-	117.683.873,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	29.823.860,00				-	37.484.178,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	0,00				-	15.300.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	44.631.260,00				-	55.924.069,00	
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	0,00				-	0,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			49.469.150,00					58.986.732,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	57 Laporan	49.469.150,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	58.986.732,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ dan Beban			19.638.360,00					25.509.410,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ, dan Beban	57 Dokumen	19.638.360,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	25.509.410,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			29.823.860,00					37.484.178,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan	29.823.860,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	37.484.178,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			99.691.155,00					117.683.873,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	99.691.155,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	117.683.873,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			44.631.260,00					55.924.069,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	44.631.260,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	55.924.069,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			16.486.525,00					16.962.702,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	16.486.525,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	16.962.702,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			70.453.160,00					0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	50 Dokumen	70.453.160,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			23.611.620,00					24.318.749,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	23.611.620,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	24.318.749,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			0,00					0,00	
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00					15.300.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	0,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	15.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			0,00					10.200.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	0,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	10.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			238.459.116.017,00			Kab. Luwu		224.488.102.905,00	
		-			238.459.116.017,00			Kab. Luwu		224.488.102.905,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	220.086.375.398,00				-	224.488.102.905,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	12.372.740.619,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	6.000.000.000,00				-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			220.086.375.396,00					224.488.102.905,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	414 Laporan	220.086.375.396,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa		-	224.488.102.905,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			6.000.000.000,00					0,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan	6.000.000.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			12.372.740.619,00					0,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	414 Laporan	12.372.740.619,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA		-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			652.600.000,00			SKPD Kab. Luwu		539.030.987,00	
					652.600.000,00			SKPD Kab. Luwu		539.030.987,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	652.600.000,00				-	539.030.987,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			652.600.000,00					539.030.987,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	57 Dokumen	652.600.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	539.030.987,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
198.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			449.187.310,00					584.622.276,00	
		Persentase Penatausahaan BMD yang Baik dan Benar		87 Persen	449.187.310,00				-	584.622.276,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			449.187.310,00			SKPD Kab. Luwu		584.622.276,00	
		-			449.187.310,00			SKPD Kab. Luwu		584.622.276,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	61.048.266,00				-	66.566.588,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	6.711.640,00				-	61.898.860,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-	19.029.680,00				-	29.550.291,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-	22.513.920,00				-	30.879.104,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	23.821.220,00				-	24.608.175,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-	107.734.080,00				-	114.343.367,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	17.870.600,00				-	24.406.692,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	170.041.814,00				-	184.148.550,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	0,00				-	15.300.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	9.834.780,00				-	16.761.598,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	10.581.310,00				-	16.159.051,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			10.581.310,00					16.159.051,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	10.581.310,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	16.159.051,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			9.834.780,00					16.761.598,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	9.834.780,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	16.761.598,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			6.711.640,00					61.898.860,00	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	6.711.640,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	61.898.860,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			170.041.814,00					184.148.550,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	57 Laporan	170.041.814,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	184.148.550,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			22.513.920,00					30.879.104,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	57 Laporan	22.513.920,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	30.879.104,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			23.821.220,00					24.608.175,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	23.821.220,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	24.608.175,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			107.734.080,00					114.343.367,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	15 Laporan	107.734.080,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	114.343.367,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			0,00					0,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			61.048.266,00					66.566.588,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	57 Dokumen	61.048.266,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	66.566.588,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			17.870.600,00					24.406.692,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	57 Laporan	17.870.600,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	24.406.692,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			19.029.680,00					29.550.291,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	19.029.680,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	29.550.291,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			0,00					15.300.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114 Orang	0,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	15.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH			15.777.109.493,00					16.060.695.306,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			15.777.109.493,00					16.060.695.306,00	
	5.02	KEUANGAN			15.777.109.493,00					16.060.695.306,00	
199.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.858.289.107,00					12.476.884.178,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	41.946.000,00				-	60.037.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	12.742.403.859,00				-	12.005.062.403,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	63.423.248,00				-	411.784.325,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44.790.000,00			Perangkat Daerah		60.037.450,00	
		-			44.790.000,00			Perangkat Daerah		60.037.450,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	4.004.000,00				-	6.934.641,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	14.019.000,00				-	15.856.814,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	2.844.000,00				-	6.646.154,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	3.214.000,00				-	6.678.819,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	3.504.000,00				-	7.748.252,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.844.000,00				-	5.236.900,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	14.361.000,00				-	10.935.870,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.019.000,00					15.856.814,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	14.019.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	15.856.814,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.504.000,00					7.748.252,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	3.504.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	7.748.252,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.214.000,00					6.678.819,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	3.214.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	6.678.819,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.004.000,00					6.934.641,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.004.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	6.934.641,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2.844.000,00					6.646.154,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.844.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	6.646.154,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.844.000,00					5.236.900,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.844.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	5.236.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.361.000,00					10.935.870,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.361.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	10.935.870,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.455.659.267,00			Perangkat Daerah		8.065.366.425,00	
		-			8.455.659.267,00			Perangkat Daerah		8.065.366.425,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	7.672.000,00				-	8.163.810,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	10.215.000,00				-	9.594.251,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	7.672.000,00				-	4.128.827,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	222.732.000,00				-	273.228.985,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	12.470.000,00				-	12.337.056,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	3.836.000,00				-	4.518.651,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	8.191.062.267,00				-	7.753.394.845,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.191.062.267,00					7.753.394.845,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2693 Orang/bulan	8.191.062.267,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU)		-	7.753.394.845,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			222.732.000,00					273.228.985,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	222.732.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	273.228.985,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			10.215.000,00					9.594.251,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.215.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	9.594.251,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12.470.000,00					12.337.056,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12.470.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	12.337.056,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			7.672.000,00					8.163.810,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7.672.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	8.163.810,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			3.836.000,00					4.518.651,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	3.836.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	4.518.651,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			7.672.000,00					4.128.827,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	7.672.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	4.128.827,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			29.524.000,00			Perangkat Daerah		33.643.970,00	
		-			29.524.000,00			Perangkat Daerah		33.643.970,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12.012.000,00				-	21.320.644,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	17.512.000,00				-	12.323.326,00	
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			17.512.000,00					12.323.326,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.512.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	12.323.326,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
5.02.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.012.000,00					21.320.644,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.012.000,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	21.320.644,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			63.423.248,00			Perangkat Daerah		411.784.325,00	
		-			63.423.248,00			Perangkat Daerah		411.784.325,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	58.412.053,00				-	405.407.047,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	5.011.195,00				-	6.377.278,00	
5.02.01.2.04.0001		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			58.412.053,00					405.407.047,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	50 Dokumen	58.412.053,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	405.407.047,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04.0007		Penetapan Pengelolaan Retribusi Daerah			5.011.195,00					6.377.278,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	50 Dokumen	5.011.195,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	6.377.278,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			202.041.000,00			Perangkat Daerah		165.138.690,00	
		-			202.041.000,00			Perangkat Daerah		165.138.690,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	6.100.000,00				-	5.868.940,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	4.575.000,00				-	4.672.080,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	15.338.000,00				-	11.932.101,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	26.298.000,00				-	27.086.940,00	
			Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	149.600.000,00				-	115.444.729,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	130.000,00				-	133.900,00	
5.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			149.600.000,00					115.444.729,00	
		Tersedianya Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	149.600.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	115.444.729,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			15.338.000,00					11.932.101,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	15.338.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	11.932.101,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			6.100.000,00					5.868.940,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.100.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	5.868.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			4.575.000,00					4.672.080,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.575.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	4.672.080,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			130.000,00					133.900,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	130.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	133.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			26.298.000,00					27.086.940,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	26.298.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)		-	27.086.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.655.564.892,00			Perangkat Daerah		1.689.420.870,00	
		-			1.655.564.892,00			Perangkat Daerah		1.689.420.870,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	67.000.000,00				-	63.860.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	4.934.250,00				-	34.099.097,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	787.091.000,00				-	558.848.100,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	35.457.349,00				-	88.638.367,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	235.368.494,00				-	48.983.129,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	501.768.920,00				-	411.473.629,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	23.944.879,00				-	30.454.796,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00				-	453.063.752,00	
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.944.879,00					30.454.796,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.944.879,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	30.454.796,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00					453.063.752,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	453.063.752,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35.457.349,00					88.638.367,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	35.457.349,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	88.638.367,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			501.768.920,00					411.473.629,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	501.768.920,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	411.473.629,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			67.000.000,00					63.860.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	67.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	63.860.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			235.368.494,00					48.983.129,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	235.368.494,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	48.983.129,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu			4.934.250,00					34.099.097,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30 Laporan	4.934.250,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	34.099.097,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			787.091.000,00					558.848.100,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162 Laporan	787.091.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	558.848.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			521.685.000,00			Perangkat Daerah		440.024.340,00	
		-			521.685.000,00			Perangkat Daerah		440.024.340,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	521.685.000,00				-	440.024.340,00	
5.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			521.685.000,00					440.024.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	119 Unit	521.685.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	440.024.340,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.247.087.490,00			Perangkat Daerah		1.124.588.157,00	
		-			1.247.087.490,00			Perangkat Daerah		1.124.588.157,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		210.147.490,00				-	126.988.257,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		1.022.400.000,00				-	968.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		14.540.000,00				-	28.149.900,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		0,00				-	1.050.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00					1.050.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	1.050.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			210.147.490,00					126.988.257,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.147.490,00	Kab. Luwu	Retribusi Daerah - LRA		-	126.988.257,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.540.000,00					28.149.900,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Laporan	14.540.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	28.149.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.022.400.000,00					968.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	1.022.400.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	968.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			638.514.210,00			Perangkat Daerah		486.879.951,00	
		-			638.514.210,00			Perangkat Daerah		486.879.951,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		316.596.210,00				-	275.187.951,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		321.918.000,00				-	211.692.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			316.596.210,00					275.187.951,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	316.596.210,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	275.187.951,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			321.918.000,00					211.692.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	321.918.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	211.692.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
200.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2.918.820.386,00					3.583.811.128,00	
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	20 Persen		2.918.820.386,00				-	3.512.158.066,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.918.820.386,00			Perangkat Daerah		3.583.811.128,00	
		-			2.918.820.386,00			Perangkat Daerah		3.583.811.128,00	
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		18.448.000,00				-	75.482.018,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		30.076.000,00				-	79.801.299,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	-		710.054.533,00				-	530.820.467,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		312.369.367,00				-	485.835.085,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		3.000.000,00				-	73.300.786,00	
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		39.072.000,00				-	83.688.570,00	
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		18.334.000,00				-	75.248.916,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		33.834.000,00				-	81.416.451,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		29.196.000,00				-	95.070.707,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		302.722.000,00				-	71.653.062,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		11.664.000,00				-	73.811.348,00	
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		334.825.100,00				-	111.225.391,00	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		850.905.286,00				-	1.600.876.069,00	
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIOP nya	-		224.320.100,00				-	71.653.062,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		0,00				-	73.927.917,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			18.334.000,00					75.248.916,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	18.334.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	75.248.916,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			30.076.000,00					79.801.299,00	
		Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Tertaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	30.076.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	79.801.299,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			11.664.000,00					73.811.348,00	
		Tertaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	11.664.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	73.811.348,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			0,00					73.927.917,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	73.927.917,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			29.196.000,00					95.070.707,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	13 Laporan	29.196.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	95.070.707,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			302.722.000,00					71.653.062,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	195235 Laporan	302.722.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-		71.653.062,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			224.320.100,00					71.653.062,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	195235 Obyek Pajak	224.320.100,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-		71.653.062,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			39.072.000,00					83.688.570,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	194197 Dokumen	39.072.000,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-		83.688.570,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			850.905.286,00					1.600.876.069,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	194197 Layanan	850.905.286,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-		1.600.876.069,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			18.448.000,00					75.482.018,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	9 Dokumen	18.448.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah	-		75.482.018,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			710.054.533,00					530.820.467,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	194197 Dokumen	710.054.533,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-		530.820.467,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			3.000.000,00					73.300.766,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	8 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah	-		73.300.766,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			312.369.367,00					485.835.085,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	312.369.367,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	-		485.835.085,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			33.834.000,00					81.416.451,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	33.834.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah	-		81.416.451,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			334.825.100,00					111.225.391,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	334.825.100,00	Kab. Luwu	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-		111.225.391,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			7.155.109.429,00					8.400.622.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.155.109.429,00					8.400.622.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN			6.275.510.214,00					7.350.622.000,00	
201.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.820.728.393,00					5.685.622.000,00	
			Rata-rata capaian kinerja unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.820.728.393,00			-		5.541.622.000,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.586.590,00			Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah		176.000.000,00	
					60.586.590,00			Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah		176.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	7.125.980,00			-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	23.489.460,00			-		37.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	5.136.680,00			-		23.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	7.744.640,00			-		19.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	7.718.340,00			-		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4.483.730,00			-		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4.887.760,00			-		22.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			23.489.460,00					37.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.489.460,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		37.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			7.718.340,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.718.340,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			7.744.640,00					19.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.744.640,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			7.125.980,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.125.980,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			5.136.680,00					23.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.136.680,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		23.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.483.730,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.483.730,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.887.760,00					22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.887.760,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.646.203.318,00			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.187.022.000,00	
		-			3.646.203.318,00			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.187.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	137.820.000,00				-	140.022.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	6.802.860,00				-	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	5.670.900,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.495.909.558,00				-	4.000.000.000,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.495.909.558,00					4.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	3.495.909.558,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			137.820.000,00					140.022.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	137.820.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	140.022.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6.802.860,00					22.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.802.860,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.670.900,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.670.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			Terlaksananya administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah		4.800.000,00	
		-			4.800.000,00			Terlaksananya administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah		4.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	4.800.000,00	
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					4.800.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	4.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			491.308.883,00			Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		704.000.000,00	
		-			491.308.883,00			Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		704.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	148.800.000,00				-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	0,00				-	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	265.882.800,00				-	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	15.722.027,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	53.965.966,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	6.938.090,00				-	7.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.938.090,00					7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6.938.090,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.722.027,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.722.027,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			148.800.000,00					200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	148.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			53.965.966,00					50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	53.965.966,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			0,00					22.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			265.882.800,00					400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	265.882.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga 1110	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			98.612.430,00			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah		120.000.000,00	
		-			98.612.430,00			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah		120.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	98.612.430,00				-	120.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			98.612.430,00					120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	98.612.430,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga 1110	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			440.511.000,00			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		437.800.000,00	
		-			440.511.000,00			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		437.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	54.711.000,00				-	52.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	277.800.000,00				-	277.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	108.000.000,00				-	108.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			108.000.000,00					108.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	108.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga 1110	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	108.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			54.711.000,00					52.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.711.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga 1110	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			277.800.000,00					277.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	277.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga 1110	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	277.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78.706.172,00			Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		56.000.000,00	
		-			78.706.172,00			Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		56.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	59.826.172,00				-	38.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	18.880.000,00				-	18.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			59.826.172,00					38.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	59.826.172,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga 1110	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	38.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.880.000,00					18.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	18.880.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga 1110	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
202	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.454.781.821,00					1.665.000.000,00	
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	95 Persen	536.389.467,00				-	470.000.000,00	
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai Kompetensinya	95 Persen	918.392.354,00				-	1.050.000.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			278.615.467,00			ASN		315.000.000,00	
		-			278.615.467,00			ASN		315.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-	37.374.380,00				-	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	44.829.480,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	50.150.683,00				-	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-	66.003.812,00				-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-	52.120.872,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-	28.136.240,00				-	45.000.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			50.150.683,00					55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	500 Dokumen	50.150.683,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga 1110	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			66.003.812,00					70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500 Dokumen	66.003.812,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga 1110	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			37.374.380,00					45.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200 Dokumen	37.374.380,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senaga 1110	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			28.136.240,00					45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5 Lembaga	28.136.240,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			44.829.480,00					50.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2000 Dokumen	44.829.480,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			52.120.872,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2000 Laporan	52.120.872,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			164.573.320,00			ASN		190.000.000,00	
		-			164.573.320,00			ASN		190.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		93.472.820,00				-	110.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	71.100.500,00				-	80.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			93.472.820,00				-	110.000.000,00	
		Tertaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen	93.472.820,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			71.100.500,00					80.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	71.100.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			918.392.354,00			ASN		1.050.000.000,00	
		-			918.392.354,00			ASN		1.050.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-	43.646.600,00				-	55.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	-	67.661.304,00				-	65.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	195.000.000,00				-	200.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	43.540.100,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	-	64.754.040,00				-	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	-	110.769.726,00				-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-	393.020.584,00				-	350.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			43.540.100,00					60.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	43.540.100,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center			393.020.584,00					350.000.000,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	25 Dokumen	393.020.584,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			110.769.726,00					250.000.000,00	
		Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	20 Dokumen	110.769.726,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			195.000.000,00					200.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	195.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			64.754.040,00					70.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5 Dokumen	64.754.040,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			67.661.304,00					65.000.000,00	
		Tertaksananya Penyusunan Kebutuhan diklat dan Sertifikasi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	30 Orang	67.661.304,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			43.646.600,00					55.000.000,00	
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang	43.646.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			93.200.680,00			ASN		110.000.000,00	
		-			93.200.680,00			ASN		110.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-	47.065.260,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	46.135.420,00				-	50.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			47.065.260,00					60.000.000,00	
		Tertaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	47.065.260,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			46.135.420,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20 Laporan	46.135.420,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			879.599.215,00					1.050.000.000,00	
203.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			879.599.215,00					1.050.000.000,00	
			Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	97,02 Persen	879.599.215,00				-	1.050.000.000,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			879.599.215,00			ASN		1.050.000.000,00	
					879.599.215,00			ASN		1.050.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-	417.900.000,00				-	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	461.699.215,00				-	550.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota			417.900.000,00					500.000.000,00	
		Tertaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	17 Orang	417.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			461.699.215,00					550.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	500 Laporan	461.699.215,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH			11.661.309.276,00					0,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.661.309.276,00					0,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH			11.661.309.276,00					0,00	
204.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.029.527.850,00					0,00	
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.327.329.141,00				-	0,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	6.626.663.734,00				-	0,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 persen	75.534.975,00				-	0,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.534.975,00			Masyarakat		0,00	
					75.534.975,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	6.792.911,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	34.564.590,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	6.568.650,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	5.536.197,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	5.068.590,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	17.004.037,00				-	0,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			34.564.590,00					0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	34.564.590,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.068.590,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.068.590,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5.536.197,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.536.197,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			6.792.911,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.792.911,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			6.568.650,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.568.650,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.004.037,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	17.004.037,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda n	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.925.000.854,00			Masyarakat		0,00	
		-			5.925.000.854,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	195.560.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	8.855.010,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	8.270.249,00				-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	5.712.315.595,00				-	0,00	
6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.712.315.595,00					0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	5.712.315.595,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda n	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			195.560.000,00					0,00	
		Tertaksanannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	195.560.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda n	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			8.855.010,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.855.010,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda n	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			8.270.249,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	8.270.249,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda n	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.355.880,00			Masyarakat		0,00	
		-			10.355.880,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	10.355.880,00				-	0,00	
6.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.355.880,00					0,00	
		Tertaksanannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.355.880,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tanamanai n	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			691.307.000,00			Masyarakat		0,00	
		-			691.307.000,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	107.800.000,00				-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	583.507.000,00				-	0,00	
6.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			107.800.000,00					0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket	107.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda n	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			583.507.000,00					0,00	
		Tertaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	583.507.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda n	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			623.318.325,00			Masyarakat		0,00	
		-			623.318.325,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	75.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	40.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	271.322.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	20.768.400,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	69.562.870,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	16.067.550,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12.383.900,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	107.750.880,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	10.462.725,00				-	0,00	
6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.383.900,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	12.383.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			107.750.880,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	107.750.880,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.462.725,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	10.462.725,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.768.400,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	20.768.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.067.550,00					0,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	16.067.550,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			75.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			69.562.870,00					0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	69.562.870,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			40.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			271.322.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	271.322.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			47.670.500,00			Masyarakat		0,00	
		-			47.670.500,00			Masyarakat		0,00	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		34.562.500,00				-	0,00	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		0,00				-	0,00	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		13.108.000,00				-	0,00	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00					0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			34.562.500,00					0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	34.562.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13.108.000,00					0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	13.108.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampunia Badda I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			447.408.236,00			Masyarakat		0,00	
		-			447.408.236,00			Masyarakat		0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		111.408.236,00				-	0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		336.000.000,00				-	0,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			111.408.236,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.408.236,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			336.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	336.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208.932.080,00			Masyarakat		0,00	
		-			208.932.080,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	36.995.900,00				-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	138.836.180,00				-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	33.100.000,00				-	0,00	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			138.836.180,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	138.836.180,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.100.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	33.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			36.995.900,00					0,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	36.995.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
205.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2.914.762.486,00					0,00	
			Peresentase Pengaduan masyarakat yang ditangani	95 persen	1.031.328.115,00				-	0,00	
			Persentase tindak lanjut temuan BPKP	95 Persen	2.914.762.486,00				-	0,00	
			Persentase tindak lanjut temuan inspektorat kabupaten	100 persen	1.031.328.115,00				-	0,00	
			Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	100 Persen	2.914.762.486,00				-	0,00	
			persentase tindak lanjut temuan BPK	95 persen	1.883.434.371,00				-	0,00	
			persentase tindak lanjut temuan inspektorat kabupaten	100 persen	1.883.434.371,00				-	0,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1.883.434.371,00			Masyarakat		0,00	
		-			1.883.434.371,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ABIP	-	201.600.970,00				-	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	102.891.120,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	683.462.541,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	142.523.700,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	531.501.880,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	132.348.880,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	89.105.280,00				-	0,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			531.501.880,00					0,00	
		Tertaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	33 Laporan	531.501.880,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			142.523.700,00					0,00	
		Tertaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan	142.523.700,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			89.105.280,00					0,00	
		Tertaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	13 Laporan	89.105.280,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			132.348.880,00					0,00	
		Tertaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	26 Laporan	132.348.880,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			683.462.541,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertindakannya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	80 Laporan	683.462.541,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			102.891.120,00					0,00	
		Tertindakannya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	102.891.120,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			201.600.970,00					0,00	
		Tertindakannya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	201.600.970,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			1.031.328.115,00					0,00	
		-			1.031.328.115,00					0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	834.920.795,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-	196.407.320,00				-	0,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			196.407.320,00					0,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	196.407.320,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			834.920.795,00					0,00	
		Tertindakannya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	37 Laporan	834.920.795,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
206.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			717.018.940,00					0,00	
			Kapasitas APIP	Level 3	717.018.940,00				-	0,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			69.597.540,00					0,00	
		-			69.597.540,00					0,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	69.597.540,00				-	0,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			69.597.540,00					0,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	69.597.540,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			647.421.400,00					0,00	
		-			647.421.400,00					0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	164.496.370,00				-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	-	55.944.301,00				-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	84.797.219,00				-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	342.183.510,00				-	0,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			342.183.510,00					0,00	
		Tertindakannya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35 perangkat daerah	342.183.510,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			84.797.219,00					0,00	
		Tertindakannya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35 perangkat daerah	84.797.219,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			164.496.370,00					0,00	
		Tertindakannya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	164.496.370,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas			55.944.301,00					0,00	
		Tertindakannya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	35 perangkat daerah	55.944.301,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Badda I I I	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN BAJO			2.677.166.689,00					2.935.616.951,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.677.166.689,00					2.935.616.951,00	
	7.01	KECAMATAN			2.677.166.689,00					2.935.616.951,00	
207.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.677.166.689,00					2.903.616.951,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	97.985.359,00				-	121.300.000,00	
			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.121.488,00				-	4.850.000,00	
			Presentase Pemenuhan dan Penerapan SOP Tupoksi Perangkat Daerah	100 Persen	2.509.497.192,00				-	2.710.166.951,00	
				-	64.562.650,00				-	42.500.000,00	
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.121.488,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan		6.150.000,00	
		-			5.121.488,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan		6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	415.714,00				-	650.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	3.306.766,00				-	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	459.020,00				-	650.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	424.800,00				-	650.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	515.188,00				-	700.000,00	
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.306.766,00				-	3.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.306.766,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.500.000,00	KECAMATAN BAJO
7.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			515.188,00				-	700.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	515.188,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Pendapatan Bagi Hasil		-	700.000,00	KECAMATAN BAJO
7.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			424.800,00				-	650.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	424.800,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	650.000,00	KECAMATAN BAJO
7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			415.714,00				-	650.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	415.714,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	650.000,00	KECAMATAN BAJO
7.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			459.020,00				-	650.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	459.020,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	650.000,00	KECAMATAN BAJO
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.446.571.311,00				-	2.650.166.951,00	
		-			2.446.571.311,00				-	2.650.166.951,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	47.160.000,00				-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.163.480,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.080.880,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.397.166.951,00				-	2.597.166.951,00	
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.397.166.951,00				-	2.597.166.951,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.397.166.951,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.597.166.951,00	KECAMATAN BAJO
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			47.160.000,00				-	50.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	47.160.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	50.000.000,00	KECAMATAN BAJO
7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.163.480,00				-	1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.163.480,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	1.500.000,00	KECAMATAN BAJO
7.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.080.880,00				-	1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.080.880,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	1.500.000,00	KECAMATAN BAJO
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.048.567,00				-	5.500.000,00	
		-			5.048.567,00				-	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5.048.567,00				-	5.500.000,00	
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.048.567,00				-	5.500.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.048.567,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	5.500.000,00	KECAMATAN BAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			62.925.881,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan		81.000.000,00	
		-			62.925.881,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan		81.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1.800.000,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	20.000.000,00				-	15.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	20.125.000,00				-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2.909.839,00				-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	14.992.844,00				-	15.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.900.980,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1.197.218,00				-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.197.218,00					1.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.197.218,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	1.500.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.909.839,00					3.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.909.839,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	3.500.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.900.980,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	1.900.980,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	2.500.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800.000,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	2.500.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			14.992.844,00					15.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	14.992.844,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	15.500.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			20.000.000,00					15.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	15.500.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.125.000,00					40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.125.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	40.000.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38.451.750,00					15.000.000,00	
		-			38.451.750,00					15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	38.451.750,00				-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			38.451.750,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	38.451.750,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	15.000.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92.936.792,00					115.800.000,00	
		-			92.936.792,00					115.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	13.489.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	79.200.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	247.792,00				-	800.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			247.792,00					800.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	247.792,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	800.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.489.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.489.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	15.000.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			79.200.000,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	100.000.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.110.900,00					30.000.000,00	
		-			26.110.900,00					30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	-	20.569.700,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2.190.000,00				-	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3.351.200,00				-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20.569.700,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.569.700,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	25.000.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.190.000,00					2.500.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.190.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	2.500.000,00	KECAMATAN BAJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.351.200,00					2.500.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.351.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	2.500.000,00	KECAMATAN BAJO
208.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00					32.000.000,00	
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 Persen	0,00				-	32.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan		32.000.000,00	
		-			0,00			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan		32.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	0,00				-	32.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			0,00					32.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	32.000.000,00	KECAMATAN BAJO
		KEKURAHAN BAJO			272.799.812,00					379.200.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			272.799.812,00					379.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN			272.799.812,00					379.200.000,00	
208.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			272.799.812,00					379.200.000,00	
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	272.799.812,00				-	379.200.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			272.799.812,00				-	379.200.000,00	
		-			272.799.812,00				-	379.200.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	0,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			272.799.812,00					379.200.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	272.799.812,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bajo Kelurahan Bajo	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	379.200.000,00	KEKURAHAN BAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0,00					0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	Kab. Luwu	-		-	0,00	KEKURAHAN BAJO
		KECAMATAN BAJO BARAT			1.465.808.553,00					0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.465.808.553,00					0,00	
	7.01	KECAMATAN			1.465.808.553,00					0,00	
210.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.424.425.053,00					0,00	
		-			1.421.032.053,00					0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.791.900,00				-	0,00	
		-			6.791.900,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.131.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.267.900,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.131.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.131.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.131.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.267.900,00					0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.267.900,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.131.000,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.131.000,00	Kab. Luwu	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.131.000,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.131.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.131.000,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.131.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.131.000,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.131.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.285.122.270,00					0,00	
		-			1.285.122.270,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	47.655.600,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.649.000,00				-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.215.817.670,00				-	0,00	
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.215.817.670,00					0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.215.817.670,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			47.655.600,00					0,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	47.655.600,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.649.000,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.649.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.767.000,00				-	0,00	
		-			6.767.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	6.767.000,00				-	0,00	
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.767.000,00					0,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.767.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah			9.240.000,00				-	0,00	
		-			9.240.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	9.240.000,00				-	0,00	
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			9.240.000,00					0,00	
		Tersedianya Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	9.240.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			47.765.223,00				-	0,00	
		-			47.765.223,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1.200.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	3.750.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	16.905.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	19.485.123,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	6.425.100,00				-	0,00	
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.425.100,00					0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.425.100,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			19.485.123,00					0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	19.485.123,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu			3.750.000,00					0,00	
		Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	3.750.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			16.905.000,00					0,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	16.905.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16.726.500,00					0,00	
		-			16.726.500,00				-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	16.726.500,00				-	0,00	
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.726.500,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.726.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.075.000,00				-	0,00	
		-			48.075.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	14.475.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	33.600.000,00				-	0,00	
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			14.475.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.475.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			33.600.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.600.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.937.160,00				-	0,00	
		-			23.937.160,00				-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	15.431.960,00				-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	8.505.200,00				-	0,00	
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			15.431.960,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	15.431.960,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.505.200,00					0,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8.505.200,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
211.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.383.500,00					0,00	
			Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 persen	5.383.500,00				-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			5.383.500,00			Masyarakat		0,00	
		-			5.383.500,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	5.383.500,00				-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.383.500,00					0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.383.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
212.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			36.000.000,00					0,00	
					36.000.000,00				-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			36.000.000,00				-	0,00	
		-			36.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	36.000.000,00				-	0,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			36.000.000,00					0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BAJO BARAT
		KECAMATAN BASSE SANGTEMPE			1.793.699.026,00					2.199.976.382,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			1.793.699.026,00					2.199.976.382,00	
	7.01	KECAMATAN			1.793.699.026,00					2.199.976.382,00	
213.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.769.941.372,00					2.166.014.631,00	
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	201.058.302,00				-	183.800.594,00	
			Persentase Pemenuhan dan Penerapan SOP Tupoksi Perangkat daerah	100 Persen	1.562.415.070,00				-	1.969.464.037,00	
		-			4.800.000,00				-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.297.769,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe		10.500.000,00	
		-			5.297.769,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe		10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	839.369,00				-	1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	988.750,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	834.000,00				-	1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	834.000,00				-	1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	834.000,00				-	1.750.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	967.650,00				-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			988.750,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	988.750,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			834.000,00				-	1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	834.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.750.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			834.000,00					1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	834.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.750.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			839.369,00					1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	839.369,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.750.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			834.000,00					1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	834.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.750.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			967.650,00					1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	967.650,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.562.415.070,00					1.970.964.037,00	
		-			1.562.415.070,00					1.970.964.037,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	47.160.000,00				-	75.840.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	835.652,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	720.189,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.513.699.229,00				-	1.892.124.037,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.513.699.229,00					1.892.124.037,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.513.699.229,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.892.124.037,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			47.160.000,00					75.840.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77 Dokumen	47.160.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	75.840.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			835.652,00					1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	835.652,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			720.189,00					1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	720.189,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00					6.000.000,00	
		-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					6.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.800.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			53.308.809,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe		67.191.614,00	
		-			53.308.809,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe		67.191.614,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1.200.000,00				-	2.400.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	8.250.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	28.275.300,00				-	29.161.350,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5.178.628,00				-	9.885.672,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	9.159.246,00				-	14.094.592,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	920.400,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	325.235,00				-	650.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			325.235,00					650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	325.235,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	650.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.178.628,00					9.885.672,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.178.628,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	9.885.672,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			920.400,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	920.400,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000,00					2.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.400.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			9.159.246,00					14.094.592,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	9.159.246,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	14.094.592,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			8.250.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.250.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			28.275.300,00					29.161.350,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	28.275.300,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	29.161.350,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			63.150.000,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe		37.750.000,00	
		-			63.150.000,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe		37.750.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	63.150.000,00				-	37.750.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			63.150.000,00					37.750.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	63.150.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	37.750.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44.118.100,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe		41.674.350,00	
		-			44.118.100,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe		41.674.350,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	4.943.750,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	32.400.000,00				-	32.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	6.774.350,00				-	6.774.350,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.774.350,00					6.774.350,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan	6.774.350,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.774.350,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.943.750,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.943.750,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			32.400.000,00					32.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	32.400.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	32.400.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.851.624,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe		31.934.630,00	
		-			36.851.624,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe		31.934.630,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	35.391.624,00				-	30.734.630,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.460.000,00				-	1.200.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.391.624,00					30.734.630,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	35.391.624,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.734.630,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.460.000,00					1.200.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.460.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.200.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
214.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.007.654,00					9.961.751,00	
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 Persen	7.007.654,00				-	9.961.751,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.007.654,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe		9.961.751,00	
		-			7.007.654,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe		9.961.751,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	3.507.654,00				-	6.211.751,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	3.500.000,00				-	3.750.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.500.000,00					3.750.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.750.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3.507.654,00					6.211.751,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	3.507.654,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.211.751,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
215.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.750.000,00					1.500.000,00	
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	1.750.000,00				-	1.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.750.000,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe		1.500.000,00	
		-			1.750.000,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	1.750.000,00				-	1.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.750.000,00					1.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.750.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
216.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			15.000.000,00					22.500.000,00	
			Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100 Persen	15.000.000,00				-	22.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			15.000.000,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe		22.500.000,00	
		-			15.000.000,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe		22.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	15.000.000,00				-	22.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			15.000.000,00					22.500.000,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	22.500.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
		KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA			1.880.241.876,00					1.856.241.876,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.880.241.876,00					1.856.241.876,00	
	7.01	KECAMATAN			1.880.241.876,00					1.856.241.876,00	
217.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.858.241.876,00					1.833.241.876,00	
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	204.838.000,00				-	164.027.000,00	
			Persentase Pemenuhan dan Penerapan SOP Upoksi Perangkat daerah	100 Persen	1.648.617.876,00				-	1.664.996.376,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.678.500,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		5.044.500,00	
		-			5.678.500,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		5.044.500,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	892.500,00				-	826.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	892.500,00				-	914.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	892.500,00				-	826.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	892.500,00				-	826.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	892.500,00				-	826.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.216.000,00				-	826.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			892.500,00					914.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	892.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	914.500,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			892.500,00					826.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	892.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	826.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			892.500,00					826.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	892.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	826.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			892.500,00					826.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	892.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	826.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			892.500,00					826.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	892.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	826.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.216.000,00					826.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.216.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	826.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.649.833.876,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		1.665.910.876,00	
	-				1.649.833.876,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		1.665.910.876,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	47.160.000,00				-	63.840.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.216.000,00				-	914.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.216.000,00				-	914.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.600.241.876,00				-	1.600.241.876,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.600.241.876,00					1.600.241.876,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.600.241.876,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.600.241.876,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			47.160.000,00					63.840.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	47.160.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	63.840.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.216.000,00					914.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	1.216.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	914.500,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.216.000,00					914.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.216.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	914.500,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		4.800.000,00	
	-				4.800.000,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		4.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	4.800.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					4.800.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.800.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.360.000,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		0,00	
	-				15.360.000,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	15.360.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			15.360.000,00					0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.360.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			71.812.623,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		75.564.303,00	
		-			71.812.623,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		75.564.303,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1.200.000,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	0,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	3.000.000,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	25.863.000,00				-	33.342.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	10.296.145,00				-	7.400.060,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	21.697.034,00				-	15.751.540,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2.537.900,00				-	1.562.320,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.117.056,00				-	1.808.383,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5.101.488,00				-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.117.056,00					1.808.383,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.117.056,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.808.383,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.101.488,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.101.488,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.296.145,00					7.400.060,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.296.145,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.400.060,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.537.900,00					1.562.320,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	2.537.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.562.320,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000,00					1.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.200.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			21.697.034,00					15.751.540,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	21.697.034,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.751.540,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			3.000.000,00					2.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.863.000,00					33.342.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	25.863.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	33.342.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0,00					12.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.000.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40.530.450,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		26.505.450,00	
		-			40.530.450,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		26.505.450,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0,00				-	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	40.530.450,00				-	20.505.450,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.530.450,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.505.450,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38.562.172,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		39.747.335,00	
		-			38.562.172,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		39.747.335,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1.362.172,00				-	1.347.335,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	20.400.000,00				-	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	16.800.000,00				-	14.400.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil		-	14.400.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.362.172,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.347.335,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil		-	24.000.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.664.255,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		15.669.412,00	
		-			31.664.255,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Basse Sangtempe Utara		15.669.412,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	25.984.255,00				-	15.669.412,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5.680.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	25.984.255,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.669.412,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5.680.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
218.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000.000,00					5.000.000,00	
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 Persen	5.000.000,00				-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			5.000.000,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe Utara		5.000.000,00	
		-			5.000.000,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe Utara		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	5.000.000,00				-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
219.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.000.000,00					1.500.000,00	
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	1.000.000,00				-	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.000.000,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe Utara		1.500.000,00	
	-				1.000.000,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe Utara		1.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	1.000.000,00				-	1.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			1.000.000,00					1.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
220.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			16.000.000,00					16.500.000,00	
		Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan di Wilayah Kecamatan		100 Persen	16.000.000,00				-	16.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.000.000,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe Utara		16.500.000,00	
	-				16.000.000,00			Semua Desa Kecamatan Basse Sangtempe Utara		16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	16.000.000,00				-	16.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			16.000.000,00					16.500.000,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	16.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Basse Sangtempe Utara Desa Pantilang 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	16.500.000,00	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
		KECAMATAN BELOPA			4.606.920.798,00					0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			4.606.920.798,00					0,00	
	7.01	KECAMATAN			4.606.920.798,00					0,00	
221.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.571.920.798,00					0,00	
			Capaian kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	2.243.420,00				-	0,00	
			Rata-rata Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	138.127.745,00				-	0,00	
			Rata-rata Capaian kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	4.431.549.633,00				-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.243.420,00			Aparatur Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
	-				2.243.420,00			Aparatur Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.743.420,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	500.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.743.420,00					0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.743.420,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			500.000,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.333.962.433,00			ASN Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
	-				4.333.962.433,00			ASN Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	56.640.000,00				-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.277.322.433,00				-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.277.322.433,00					0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	4.277.322.433,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			56.640.000,00					0,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	56.640.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			Aparatur Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
	-				4.800.000,00			Aparatur Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			71.893.600,00			Aparatur Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
		-			71.893.600,00			Aparatur Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	3.600.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	6.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	19.789.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5.070.625,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	28.566.625,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.436.640,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.430.710,00				-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.430.710,00					0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.430.710,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.070.625,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.070.625,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.436.640,00					0,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.436.640,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			28.566.625,00					0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	28.566.625,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			6.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			19.789.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	19.789.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.893.600,00			Aparatur Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
		-			20.893.600,00			Aparatur Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	20.893.600,00				-	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.893.600,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.893.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.292.975,00			Aparatur Pemerintahan		0,00	
		-			73.292.975,00			Aparatur Pemerintahan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	15.692.975,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	57.600.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.692.975,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.692.975,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			57.600.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.834.770,00			Aparatur Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
		-			64.834.770,00			Aparatur Pemerintahan Kecamatan Belopa		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	31.813.500,00				-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	29.121.270,00				-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3.900.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			29.121.270,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	29.121.270,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.900.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			31.813.500,00					0,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.813.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
222.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.500.000,00					0,00	
			Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	10.500.000,00				-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10.500.000,00			Aparatur Pemerintahan,Tokoh Masyarakat,Instansi Vertikal		0,00	
		-			10.500.000,00			Aparatur Pemerintahan,Tokoh Masyarakat,Instansi Vertikal		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	3.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	7.500.000,00				-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			7.500.000,00					0,00	
		Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3.000.000,00					0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
223.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			3.000.000,00					0,00	
			Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang di perdayakan	100 %	3.000.000,00				-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			3.000.000,00			Kader Kesehatan,LPM dan Masyarakat Umum		0,00	
		-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	3.000.000,00			Kader Kesehatan,LPM dan Masyarakat Umum	-	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.000.000,00					0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
224.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.000.000,00					0,00	
			Persentase capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	5.000.000,00				-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			5.000.000,00			Aparatur Pemerintahan,Tokoh Masyarakat,Instansi Vertikal dan Swasta		0,00	
		-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	5.000.000,00			Aparatur Pemerintahan,Tokoh Masyarakat,Instansi Vertikal dan Swasta	-	0,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			5.000.000,00					0,00	
		Tertaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
225.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			16.500.000,00					0,00	
			Persentase urusan pemerintahan umum yang di selenggarakan	100 %	16.500.000,00				-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.500.000,00			Camat,Kapolsek dan Danramil		0,00	
		-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	16.500.000,00			Camat,Kapolsek dan Danramil	-	0,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			16.500.000,00					0,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	16.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Desa Belopa 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA
		KELURAHAN BALO BALO			260.199.209,00					0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			260.199.209,00					0,00	
	7.01	KECAMATAN			260.199.209,00					0,00	
226.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			260.199.209,00					0,00	
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100% undefined	260.199.209,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			260.199.209,00			-		0,00	
		-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	260.199.209,00			-		0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			260.199.209,00					0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 KELURAHAN Lembaga Kemasyarakatan	260.199.209,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Balo-Balo 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	0,00	KELURAHAN BALO BALO
		KELURAHAN SENG			263.199.982,00					0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			263.199.982,00					0,00	
	7.01	KECAMATAN			263.199.982,00					0,00	
227.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			263.199.982,00					0,00	
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100% undefined	263.199.982,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			263.199.982,00			-		0,00	
		-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	263.199.982,00			-		0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			263.199.982,00					0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	263.199.982,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	0,00	KELURAHAN SENG
		KELURAHAN TAMPUMIA RADDA			293.800.000,00					0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			293.800.000,00					0,00	
	7.01	KECAMATAN			293.800.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
228.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			293.800.000,00					0,00	
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100% underfined	293.800.000,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			293.800.000,00					0,00	
		-			293.800.000,00					0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	293.800.000,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			293.800.000,00					0,00	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 KELURAHAN Lembaga Kemasyarakatan	293.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tampumia Radda n	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	0,00	KELURAHAN TAMPUMIA RADDA
		KELURAHAN TANAMANAI			248.199.602,00					0,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			248.199.602,00					0,00	
7.01		KECAMATAN			248.199.602,00					0,00	
229.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			248.199.602,00					0,00	
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100% underfined	248.199.602,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			248.199.602,00					0,00	
		-			248.199.602,00					0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	248.199.602,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			248.199.602,00					0,00	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	248.199.602,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Tanamanai n	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	0,00	KELURAHAN TANAMANAI
		KECAMATAN BELOPA UTARA			3.040.173.436,00					0,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			3.040.173.436,00					0,00	
7.01		KECAMATAN			3.040.173.436,00					0,00	
230.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.019.173.436,00					0,00	
		-			3.019.173.436,00					0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.800.036.910,00			KECAMATAN BELOPA UTARA		0,00	
		-			2.800.036.910,00			KECAMATAN BELOPA UTARA		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	38.640.000,00				-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.761.396.910,00				-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.761.396.910,00					0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.761.396.910,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Pammanu n	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			38.640.000,00					0,00	
			Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.640.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Pammanu n	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00					0,00	
		-			4.800.000,00					0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Pammanu n	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			78.187.000,00			KECAMATAN BELOPA UTARA		0,00	
		-			78.187.000,00			KECAMATAN BELOPA UTARA		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	12.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	12.480.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	22.002.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	29.075.917,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.629.083,00				-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.629.083,00					0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.629.083,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Pammanu n	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00					0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Pammanu n	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			29.075.917,00					0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	29.075.917,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Bammamu I I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			12.480.000,00					0,00	
		Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.480.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Bammamu I I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.002.000,00					0,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	22.002.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Bammamu I I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12.000.000,00					0,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Bammamu I I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46.706.464,00			-		0,00	
		-			46.706.464,00			-		0,00	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		46.706.464,00			-		0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			46.706.464,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	46.706.464,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Bammamu I I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			68.341.031,00			-		0,00	
		-			68.341.031,00			-		0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		17.941.031,00			-		0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		50.400.000,00			-		0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.941.031,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	17.941.031,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Bammamu I I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			50.400.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Bammamu I I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.102.031,00			-		0,00	
		-			21.102.031,00			-		0,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		15.762.031,00			-		0,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		5.340.000,00			-		0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			15.762.031,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	15.762.031,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Bammamu I I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.340.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.340.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Bammamu I I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
231.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.000.000,00					0,00	
		-			6.000.000,00				-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6.000.000,00			KECAMATAN BELOPA UTARA		0,00	
		-			6.000.000,00			KECAMATAN BELOPA UTARA		0,00	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		6.000.000,00				-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.000.000,00					0,00	
		Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Bammamu I I I I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
232.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			15.000.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	15.000.000,00			KECAMATAN BELOPA UTARA	-	0,00	
		-			15.000.000,00			KECAMATAN BELOPA UTARA	-	0,00	
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	15.000.000,00				-	0,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			15.000.000,00					0,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Pammanu I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BELOPA UTARA
		KELURAHAN PAMMANU			344.799.923,00					324.800.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			344.799.923,00					324.800.000,00	
	7.01	KECAMATAN			344.799.923,00					324.800.000,00	
233	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			344.799.923,00					324.800.000,00	
		Cakupan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		344.799.923,00				-	324.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			344.799.923,00				-	324.800.000,00	
		-			344.799.923,00				-	324.800.000,00	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		344.799.923,00				-	324.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			344.799.923,00					324.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	344.799.923,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	324.800.000,00	KELURAHAN PAMMANU
		KELURAHAN SABE			308.200.174,00					28.820.047,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			308.200.174,00					28.820.047,00	
	7.01	KECAMATAN			308.200.174,00					28.820.047,00	
234	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			308.200.174,00					28.820.047,00	
		Cakupan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		308.200.174,00				-	28.820.047,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			308.200.174,00				-	28.820.047,00	
		-			308.200.174,00				-	28.820.047,00	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		308.200.174,00				-	28.820.047,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			308.200.174,00					28.820.047,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	308.200.174,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Utara Kelurahan Sabe I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	28.820.047,00	KELURAHAN SABE
		KECAMATAN BUPON			2.304.278.584,00					2.024.278.585,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.304.278.584,00					2.024.278.585,00	
	7.01	KECAMATAN			2.304.278.584,00					2.024.278.585,00	
235	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.274.758.584,00					2.024.278.585,00	
		Jumlah dokumen pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	100 persen		85.523.336,00				-	0,00	
		Presentase program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 persen		11.880.000,00				-	0,00	
		Presentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	100 persen		2.068.558.585,00				-	2.024.278.585,00	
		Presentase Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen		108.796.663,00				-	0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.068.558.585,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		2.024.278.585,00	
		-			2.068.558.585,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		2.024.278.585,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		44.280.000,00				-	0,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		2.024.278.585,00				-	2.024.278.585,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.024.278.585,00					2.024.278.585,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.024.278.585,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling I I 0	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.024.278.585,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			44.280.000,00					0,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.280.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.076.120,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
		-			5.076.120,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		5.076.120,00				-	0,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.076.120,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.076.120,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			11.880.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penuh Waktu Dan P3K Paruh WaktuKecamatan Bua Ponrang		0,00	
		-			11.880.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penuh Waktu Dan P3K Paruh WaktuKecamatan Bua Ponrang		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	11.880.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			11.880.000,00					0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18 Paket	11.880.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			58.311.043,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
		-			58.311.043,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	3.600.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	21.729.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	16.030.937,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	16.214.786,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	736.320,00				-	0,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.030.937,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	16.030.937,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			736.320,00					0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	736.320,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			16.214.786,00					0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	16.214.786,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			21.729.000,00					0,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.729.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			45.409.500,00					0,00	
		-			45.409.500,00					0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	16.788.600,00				-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	28.620.900,00				-	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			16.788.600,00					0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	16.788.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			28.620.900,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	28.620.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.946.026,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
		-			55.946.026,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	21.146.026,00				-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	34.800.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			21.146.026,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.146.026,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			34.800.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.577.310,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
		-			29.577.310,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	24.055.206,00				-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5.522.104,00				-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.055.206,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	24.055.206,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.522.104,00					0,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.522.104,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
236.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.500.000,00					0,00	
			Presentase Penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	7.500.000,00				-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.500.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
		-			7.500.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	7.500.000,00				-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			7.500.000,00					0,00	
		Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
237.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.520.000,00					0,00	
			Presentase Program koordinasi dan ketertiban umum	100 persen	5.520.000,00				-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.520.000,00				-	0,00	
		-			5.520.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	5.520.000,00				-	0,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			5.520.000,00					0,00	
		Tertaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	5.520.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
238.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			16.500.000,00					0,00	
			presentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	100 persen	16.500.000,00				-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.500.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
		-			16.500.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kecamatan Bua Ponrang		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	16.500.000,00				-	0,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			16.500.000,00					0,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	16.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN BUPON
		KELURAHAN NOLING			308.800.000,00					0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			308.800.000,00					0,00	
	7.01	KECAMATAN			308.800.000,00					0,00	
239.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			308.800.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Presentase program pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	106.000.000,00				-	0,00	
			Presentase program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 persen	202.800.000,00				-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			106.000.000,00				-	0,00	
		-			106.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	106.000.000,00				-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			106.000.000,00				-	0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	106.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	KELURAHAN NOLING
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			202.800.000,00				-	0,00	
		-			202.800.000,00				-	0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	202.800.000,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			202.800.000,00				-	0,00	
		Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42 Pokmas / Ormas	202.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Ponrang Kelurahan Noling 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	0,00	KELURAHAN NOLING
		KECAMATAN KAMANRE			2.228.137.311,00					2.222.288.465,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.228.137.311,00					2.222.288.465,00	
	7.01	KECAMATAN			2.228.137.311,00					2.222.288.465,00	
240.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.210.523.175,00					2.201.288.465,00	
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.208.668.438,00				-	2.185.788.465,00	
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.854.737,00				-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.854.737,00			Aparatur Kecamatan Kamanre		2.000.000,00	
		-			1.854.737,00			Aparatur Kecamatan Kamanre		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.854.737,00				-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.854.737,00					2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.854.737,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN KAMANRE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.005.468.551,00			ASN Kecamatan Kamanre Kab.Luwu		2.025.461.101,00	
		-			2.005.468.551,00			ASN Kecamatan Kamanre Kab.Luwu		2.025.461.101,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	55.823.500,00				-	55.823.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.507.450,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.948.137.601,00				-	1.968.137.601,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.948.137.601,00					1.968.137.601,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	1.948.137.601,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.968.137.601,00	KECAMATAN KAMANRE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			55.823.500,00					55.823.500,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55.823.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	55.823.500,00	KECAMATAN KAMANRE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.507.450,00					1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.507.450,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN KAMANRE
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			ASN Kecamatan Kamanre Kab.Luwu		6.230.100,00	
		-			4.800.000,00			ASN Kecamatan Kamanre Kab.Luwu		6.230.100,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	6.230.100,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					6.230.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.230.100,00	KECAMATAN KAMANRE
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			53.968.965,00			Masyarakat Kec. Kamanre		57.100.000,00	
		-			53.968.965,00			Masyarakat Kec. Kamanre		57.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	3.600.000,00				-	3.600.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	10.000.000,00				-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	21.959.000,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2.003.030,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	14.529.024,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.877.911,00				-	1.500.000,00	
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.003.030,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.003.030,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN KAMANRE
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.877.911,00					1.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.877.911,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN KAMANRE
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000,00					3.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.600.000,00	KECAMATAN KAMANRE
7.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			14.529.024,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	14.529.024,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	KECAMATAN KAMANRE
7.01.01.2.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu			10.000.000,00					10.000.000,00	
		Tertindakannya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	KECAMATAN KAMANRE
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			21.959.000,00					25.000.000,00	
		Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.959.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	25.000.000,00	KECAMATAN KAMANRE
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			41.632.950,00			ASN Kecamatan Kamanre Kab.Luwu		10.000.000,00	
		-			41.632.950,00			ASN Kecamatan Kamanre Kab.Luwu		10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	41.632.950,00				-	10.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.632.950,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	41.632.950,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	KECAMATAN KAMANRE
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.407.628,00			Aparatur Kecamatan Kamanre		86.400.000,00	
		-			86.407.628,00			Aparatur Kecamatan Kamanre		86.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	18.007.628,00				-	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	68.400.000,00				-	68.400.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.007.628,00					18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.007.628,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	18.000.000,00	KECAMATAN KAMANRE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			68.400.000,00					68.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	68.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	68.400.000,00	KECAMATAN KAMANRE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.390.344,00			Aparatur Kecamatan Kamanre		14.097.264,00	
	-				16.390.344,00			Aparatur Kecamatan Kamanre		14.097.264,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	15.780.344,00				-	12.097.264,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	610.000,00				-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			15.780.344,00					12.097.264,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15.780.344,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.097.264,00	KECAMATAN KAMANRE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			610.000,00					2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	610.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN KAMANRE
241.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.364.136,00					7.500.000,00	
			Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	6.364.136,00				-	7.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6.364.136,00			Masyarakat Kec.Kamanre dan unsur pemerintah Instansi Vertikal		7.500.000,00	
	-				6.364.136,00			Masyarakat Kec.Kamanre dan unsur pemerintah Instansi Vertikal		7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	6.364.136,00				-	7.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.364.136,00					7.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.364.136,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.500.000,00	KECAMATAN KAMANRE
242.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			11.250.000,00					13.500.000,00	
			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	100 Persen	11.250.000,00				-	13.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			11.250.000,00			Unsur Forkopimcam, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kec. Kamanre		13.500.000,00	
	-				11.250.000,00			Unsur Forkopimcam, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kec. Kamanre		13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	11.250.000,00				-	13.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			11.250.000,00					13.500.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	11.250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Desa Bunga Eja 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	13.500.000,00	KECAMATAN KAMANRE
		KELURAHAN CILALLANG			304.999.905,00					285.000.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			304.999.905,00					285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01	KECAMATAN			304.999.905,00					285.000.000,00	
243.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			304.999.905,00					285.000.000,00	
			-	-	304.999.905,00				-	285.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			304.999.905,00					285.000.000,00	
		-			304.999.905,00					285.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	304.999.905,00				-	285.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			304.999.905,00					285.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	304.999.905,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Kamanre Kelurahan Cilallang 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	285.000.000,00	KELURAHAN CILALLANG
		KECAMATAN LAMASI			2.886.602.875,00					3.221.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.886.602.875,00					3.221.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN			2.886.602.875,00					3.221.400.000,00	
244.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.830.602.875,00					3.158.900.000,00	
		-		-	2.826.314.375,00				-	3.080.900.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.517.100,00					10.000.000,00	
		-		-	7.517.100,00					10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.429.500,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.799.100,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.429.500,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.429.500,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.429.500,00				-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.799.100,00					2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.799.100,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.429.500,00					2.000.000,00	
		Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.429.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.429.500,00					2.000.000,00	
		Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.429.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.429.500,00					2.000.000,00	
		Tersediannya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.429.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.429.500,00					2.000.000,00	
		Tersediannya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.429.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.861.060.415,00					2.810.000.000,00	
		-		-	2.861.060.415,00					2.810.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	52.407.540,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.608.652.875,00				-	2.750.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.608.652.875,00					2.750.000.000,00	
		Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.608.652.875,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.750.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			52.407.540,00					60.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.407.540,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	60.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.525.750,00					7.000.000,00	
		-		-	6.525.750,00					7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	6.525.750,00				-	7.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.525.750,00					7.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.525.750,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)		-	7.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.524.850,00					4.000.000,00	
		-		-	3.524.850,00					4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	3.524.850,00				-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3.524.850,00					4.000.000,00	
		Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.524.850,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.479.370,00					31.500.000,00	
		-		-	25.479.370,00					31.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	13.489.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	11.017.155,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	973.215,00				-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			973.215,00					1.500.000,00	
		Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	973.215,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			11.017.155,00					15.000.000,00	
		Tersediannya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	11.017.155,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13.489.000,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	13.489.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	KECAMATAN LAMASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.848.700,00			-		140.000.000,00	
		-			27.848.700,00			-		140.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0,00			-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0,00			-		40.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	27.848.700,00			-		50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		50.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	27.848.700,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		50.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92.889.151,00			-		146.400.000,00	
		-			92.889.151,00			-		146.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	25.689.151,00			-		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	43.200.000,00			-		68.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	24.000.000,00			-		48.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		48.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.689.151,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		30.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.200.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		68.400.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.757.539,00			-		10.000.000,00	
		-			5.757.539,00			-		10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3.607.539,00			-		5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2.150.000,00			-		5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.607.539,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	2.150.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
245.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000.000,00					6.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			5.000.000,00			-		6.000.000,00	
		-			5.000.000,00			-		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	5.000.000,00			-		6.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		6.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
246.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5.000.000,00					6.000.000,00	
		-			5.000.000,00			-		6.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			5.000.000,00			-		6.000.000,00	
		-			5.000.000,00			-		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	5.000.000,00			-		6.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		6.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
247.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.000.000,00					6.000.000,00	
		-			5.000.000,00			-		6.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			5.000.000,00			-		6.000.000,00	
		-			5.000.000,00			-		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	5.000.000,00			-		6.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-		6.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
248.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			36.250.000,00					40.000.000,00	
		-			36.250.000,00			-		40.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			36.250.000,00			-		40.000.000,00	
		-			36.250.000,00			-		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	36.250.000,00			-		40.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			36.250.000,00					40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	36.250.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	40.000.000,00	KECAMATAN LAMASI
248.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			4.750.000,00					4.500.000,00	
					4.750.000,00				-	4.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.750.000,00			-		4.500.000,00	
		-			4.750.000,00			-		4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	4.750.000,00				-	4.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			4.750.000,00					4.500.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	4.750.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.500.000,00	KECAMATAN LAMASI
		KELURAHAN LAMASI			369.800.000,00					425.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			369.800.000,00					425.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN			369.800.000,00					425.000.000,00	
250.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			369.800.000,00					425.000.000,00	
					369.800.000,00				-	425.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			369.800.000,00			-		425.000.000,00	
		-			369.800.000,00			-		425.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	104.600.000,00				-	150.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	265.200.000,00				-	275.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			104.600.000,00					150.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	104.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Kelurahan Lamasi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	150.000.000,00	KELURAHAN LAMASI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			265.200.000,00					275.000.000,00	
		Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	265.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Kelurahan Lamasi	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	275.000.000,00	KELURAHAN LAMASI
		KECAMATAN LAMASI TIMUR			1.797.103.297,00					0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.797.103.297,00					0,00	
	7.01	KECAMATAN			1.797.103.297,00					0,00	
251.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.744.603.297,00					0,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	1.744.603.297,00				-	0,00	
			-		0,00				-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.532.140,00			Pegawai		0,00	
		-			2.532.140,00			Pegawai		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.156.880,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.375.260,00				-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.156.880,00					0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.156.880,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'le'mo	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'le'mo	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'le'mo	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'le'mo	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			0,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'le'mo	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.375.260,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.375.260,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'emo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.564.263.315,00			Pegawai		0,00	
		-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1.564.263.315,00			Pegawai		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	47.160.000,00				-	0,00	
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.517.103.315,00					0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	1.517.103.315,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'emo 11.1	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7.01.01.2.03.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			47.160.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	47.160.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'emo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			Pegawai		0,00	
		-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00			Pegawai		0,00	
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'emo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			0,00			-		0,00	
		-	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00			-		0,00	
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00					0,00	
		Tersedianya Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'emo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			81.989.798,00			Pegawai		0,00	
		-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	81.989.798,00			Pegawai		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	49.552.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	32.437.798,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00				-	0,00	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'emo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'emo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			32.437.798,00					0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	32.437.798,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'emo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49.552.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	49.552.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'emo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			47.516.001,00			Pegawai		0,00	
		-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	47.516.001,00			Pegawai		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0,00				-	0,00	
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel			47.516.001,00					0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'emo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.516.001,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	47.516.001,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'lemo 1.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.491.720,00			Pegawai		0,00	
		-			29.491.720,00			Pegawai		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	5.491.720,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	24.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0,00				-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00				-	0,00	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'lemo 1.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.491.720,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.491.720,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'lemo 1.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			24.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'lemo 1.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.010.323,00			Pegawai		0,00	
		-			14.010.323,00			Pegawai		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.250.000,00				-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	10.380.323,00				-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.380.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			10.380.323,00					0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.380.323,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'lemo 1.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.380.000,00					0,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.380.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'lemo 1.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.250.000,00					0,00	
		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'lemo 1.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
252.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000.000,00					0,00	
			Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan	100 %	5.000.000,00				-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			5.000.000,00			Masyarakat		0,00	
		-			5.000.000,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	5.000.000,00				-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'lemo 1.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
253.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			37.500.000,00					0,00	
			Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	37.500.000,00				-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			37.500.000,00			semua desa		0,00	
		-			37.500.000,00			semua desa		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	37.500.000,00				-	0,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			37.500.000,00					0,00	
		Tersedianya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	37.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'lemo 1.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
254.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10.000.000,00					0,00	
			Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5.000.000,00				-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			10.000.000,00			semua desa		0,00	
					10.000.000,00			semua desa		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	5.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	5.000.000,00				-	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			5.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'temo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			5.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Lamasi Timur Desa To'temo 11.1	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAMASI TIMUR
		KECAMATAN LAROMPONG			2.668.213.599,00					2.653.100.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.668.213.599,00					2.653.100.000,00	
7.01	KECAMATAN				2.668.213.599,00					2.653.100.000,00	
255.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.651.213.599,00					2.645.100.000,00	
			Cakupan Penunjang penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	0,00				-	0,00	
			Persentase pemenuhan dan Penerapan SOP Tupoksi perangkat Daerah	100 Persen	2.430.733.963,00				-	2.456.000.000,00	
			-	-	220.479.636,00				-	157.900.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00			Kecamatan Larompong		0,00	
					0,00			Kecamatan Larompong		0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0,00				-	0,00	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.430.733.963,00					2.456.000.000,00	
					2.430.733.963,00					2.456.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	42.530.000,00				-	66.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.388.203.963,00				-	2.390.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.388.203.963,00					2.390.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.388.203.963,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.390.000.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			42.530.000,00					66.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	42.530.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	66.000.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00					4.800.000,00	
					4.800.000,00					4.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	4.800.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					4.800.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.800.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.800.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14.520.000,00					0,00	
					14.520.000,00					0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	14.520.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			14.520.000,00					0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	14.520.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			108.898.150,00					83.700.000,00	
					108.898.150,00					83.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1.200.000,00				-	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	0,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	34.520.000,00				-	31.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1.854.400,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	25.369.240,00				-	23.700.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	45.954.510,00				-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.954.510,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.954.510,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.854.400,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.854.400,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000,00					1.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.800.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			25.369.240,00					23.700.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	25.369.240,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	23.700.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			34.520.000,00					31.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	34.520.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	31.200.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0,00					12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.000.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67.770.150,00				-	78.600.000,00	
		-			67.770.150,00				-	78.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	16.170.150,00				-	27.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	20.400.000,00				-	20.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	31.200.000,00				-	31.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			31.200.000,00				-	31.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	31.200.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	31.200.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			16.170.150,00				-	27.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.170.150,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	27.000.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.400.000,00				-	20.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.400.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.400.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.491.336,00				-	22.000.000,00	
		-			24.491.336,00				-	22.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	24.491.336,00				-	22.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0,00				-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			24.491.336,00				-	22.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	24.491.336,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	22.000.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00				-	0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAROMPONG
256.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.000.000,00				-	8.000.000,00	
			Cakupan Penunjang Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	8.000.000,00				-	8.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			8.000.000,00			Kecamatan Larompong		8.000.000,00	
		-			8.000.000,00			Kecamatan Larompong		8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	8.000.000,00				-	8.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.000.000,00					8.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	8.000.000,00	KECAMATAN LAROMPONG
257.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			9.000.000,00				-	0,00	
			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	100 Persen	9.000.000,00				-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			9.000.000,00				-	0,00	
		-			9.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	9.000.000,00				-	0,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			9.000.000,00				-	0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN LAROMPONG
		KELURAHAN LAROMPONG			324.796.687,00					324.800.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			324.796.687,00					324.800.000,00	
7.01		KECAMATAN			324.796.687,00					324.800.000,00	
258.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			324.796.687,00					324.800.000,00	
		-			324.796.687,00				-	324.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			324.796.687,00				-	324.800.000,00	
		-			324.796.687,00				-	324.800.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	324.796.687,00				-	324.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			324.796.687,00					324.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	324.796.687,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Larompong Kelurahan Larompong	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	324.800.000,00	KELURAHAN LAROMPONG
		KECAMATAN LAROMPONG SELATAN			1.804.755.076,00					2.146.914.100,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			1.804.755.076,00					2.146.914.100,00	
7.01		KECAMATAN			1.804.755.076,00					2.146.914.100,00	
259.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.740.875.076,00					2.085.614.100,00	
		-			1.740.875.076,00				-	2.085.053.600,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.476.580,00				-	15.231.700,00	
		-			22.476.580,00				-	15.231.700,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	900.056,00				-	1.000.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.012.549,00				-	1.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	295.417,00				-	300.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.199.256,00				-	1.250.200,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	520.387,00				-	560.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	18.548.915,00				-	11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.012.549,00					1.120.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.012.549,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	1.120.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			520.387,00					560.500,00	
		Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	520.387,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	560.500,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.199.256,00					1.250.200,00	
		Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.199.256,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	1.250.200,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			900.056,00					1.000.500,00	
		Tersediannya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	900.056,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	1.000.500,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			295.417,00					300.500,00	
		Tersediannya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	295.417,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	300.500,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.548.915,00					11.000.000,00	
		Tertelaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.548.915,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.607.520.766,00					1.956.520.300,00	
		-			1.607.520.766,00			-	-	1.956.520.300,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	53.040.000,00			-	-	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.357.241,00			-	-	1.400.200,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.553.123.525,00			-	-	1.900.120.100,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.553.123.525,00					1.900.120.100,00	
		Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	1.553.123.525,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	1.900.120.100,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			53.040.000,00					55.000.000,00	
		Tertelaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	53.040.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.357.241,00					1.400.200,00	
		Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.357.241,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	1.400.200,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.367.920,00					6.600.000,00	
		-			5.367.920,00			-	-	6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5.367.920,00			-	-	6.600.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.367.920,00					6.600.000,00	
		Tertelaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.367.920,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	6.600.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			40.483.396,00					41.501.000,00	
		-			40.483.396,00			-	-	41.501.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1.800.000,00			-	-	1.890.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	10.000.000,00			-	-	10.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	13.062.000,00			-	-	13.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12.273.538,00			-	-	12.500.800,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.499.731,00			-	-	1.520.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.848.127,00			-	-	1.890.200,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.848.127,00					1.890.200,00	
		Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.848.127,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	1.890.200,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.499.731,00					1.520.000,00	
		Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.499.731,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	1.520.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800.000,00					1.890.000,00	
		Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	1.890.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			12.273.538,00					12.500.800,00	
		Tersediannya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12.273.538,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	12.500.800,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.000.000,00					10.500.000,00	
		Tertelaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	10.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	10.500.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13.062.000,00					13.200.000,00	
		Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	13.062.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	13.200.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.676.396,00					50.361.100,00	
		-			49.676.396,00			-	-	50.361.100,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	7.161.000,00			-	-	7.300.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	42.000.000,00			-	-	42.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	515.396,00			-	-	560.500,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			515.396,00					560.500,00	
		Tertelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	515.396,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	560.500,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.161.000,00					7.300.600,00	
		Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	7.161.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	7.300.600,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			42.000.000,00					42.500.000,00	
		Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	42.500.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.350.018,00					15.400.000,00	
		-			15.350.018,00			-	-	15.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikmya	-	15.350.018,00				-	15.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			15.350.018,00					15.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikmya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikmya	6 Unit	15.350.018,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.400.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
260.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000.000,00					6.500.000,00	
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	5.000.000,00				-	6.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			5.000.000,00			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		6.500.000,00	
		-			5.000.000,00			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	5.000.000,00				-	6.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.000.000,00					6.500.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.500.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
261.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			57.180.000,00					53.000.000,00	
			-		57.180.000,00				-	53.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			57.180.000,00				-	53.000.000,00	
		-			57.180.000,00				-	53.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	57.180.000,00				-	53.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			57.180.000,00					53.000.000,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	57.180.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	53.000.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
262.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			1.700.000,00					1.800.000,00	
			-		1.700.000,00				-	1.800.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.700.000,00				-	1.800.000,00	
		-			1.700.000,00				-	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	1.700.000,00				-	1.800.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			1.700.000,00					1.800.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.800.000,00	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
		KEKURAHAN BONEPUTE			324.799.966,00					324.800.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			324.799.966,00					324.800.000,00	
7.01		KECAMATAN			324.799.966,00					324.800.000,00	
263.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			324.799.966,00					324.800.000,00	
			Cakupan Kegiatan Yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kelurahan	100 %	324.799.966,00				-	324.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			324.799.966,00					324.800.000,00	
					324.799.966,00					324.800.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	154.999.966,00				-	155.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	169.800.000,00				-	169.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			154.999.966,00					155.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	154.999.966,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Larompong Selatan Kelurahan Bone Pute 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	155.000.000,00	KELURAHAN BONEPUTE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			169.800.000,00					169.800.000,00	
		Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28 Pokmas / Ormas	169.800.000,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	169.800.000,00	KELURAHAN BONEPUTE
		KECAMATAN LATIMOJONG			1.728.319.475,00					1.703.657.475,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			1.728.319.475,00					1.703.657.475,00	
7.01		KECAMATAN			1.728.319.475,00					1.703.657.475,00	
264.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.704.949.875,00					1.679.873.975,00	
			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	3.427.900,00				-	3.476.000,00	
			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	1.648.031.857,00				-	1.609.412.210,00	
					51.938.418,00				-	60.404.765,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.979.600,00			Masyarakat		5.057.000,00	
		-			4.979.600,00			Masyarakat		5.057.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.551.700,00				-	1.581.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.876.200,00				-	1.895.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.551.700,00				-	1.581.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.876.200,00					1.895.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.876.200,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.895.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.551.700,00					1.581.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.551.700,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.581.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.551.700,00					1.581.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.551.700,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.581.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.407.171.195,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.411.241.015,00	
		-			1.407.171.195,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.411.241.015,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	52.967.040,00				-	55.411.140,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.327.500,00				-	2.790.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	2.557.180,00				-	2.719.900,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.350.319.475,00				-	1.350.319.475,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.350.319.475,00					1.350.319.475,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.350.319.475,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.350.319.475,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			52.967.040,00					55.411.140,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.967.040,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	55.411.140,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.327.500,00					2.790.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.327.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.790.500,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.557.180,00					2.719.900,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	2.557.180,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.719.900,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.882.600,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.419.500,00	
		-			4.882.600,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.419.500,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.882.600,00				-	5.419.500,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.882.600,00					5.419.500,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.882.600,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.419.500,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.600.000,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah		16.420.000,00	
		-			17.600.000,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah		16.420.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	17.600.000,00				-	16.420.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			17.600.000,00					16.420.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	17.600.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	16.420.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			51.938.418,00					65.404.765,00	
		-			51.938.418,00					65.404.765,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	0,00				-	12.082.600,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	2.500.000,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	13.359.000,00				-	12.571.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4.091.696,00				-	4.292.408,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	21.805.840,00				-	14.815.577,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	5.783.180,00				-	8.143.180,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.739.256,00				-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2.659.446,00				-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.739.256,00					3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.739.256,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Latimojong Desa Paiang 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.500.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.659.446,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.659.446,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Latimojong Desa Paiang 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.091.696,00					4.292.408,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.091.696,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.292.408,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.783.180,00					8.143.180,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.783.180,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	8.143.180,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			21.805.840,00					14.815.577,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	21.805.840,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	14.815.577,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.500.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	2.500.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13.359.000,00					12.571.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.359.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.571.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0,00					12.082.600,00	
		Tertindakannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.082.600,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			48.342.950,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat		22.168.210,00	
		-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	48.342.950,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	22.168.210,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			48.342.950,00					22.168.210,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	48.342.950,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	22.168.210,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.572.500,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat		28.448.300,00	
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	61.572.500,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	28.448.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	56.400.000,00				-	27.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.172.500,00					1.448.300,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.172.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.448.300,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			56.400.000,00					27.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	56.400.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	27.000.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.462.612,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat		125.715.185,00	
		-			108.462.612,00			Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat		125.715.185,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	98.914.612,00				-	104.620.685,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3.530.000,00				-	2.840.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	6.018.000,00				-	18.254.500,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			98.914.612,00					104.620.685,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	98.914.612,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	104.620.685,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.530.000,00					2.840.000,00	
		Tertindakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.530.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.840.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.018.000,00					18.254.500,00	
		Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.018.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	18.254.500,00	KECAMATAN LATIMOJONG
265	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.369.600,00					8.383.500,00	
		-			8.369.600,00					8.383.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			8.369.600,00			Masyarakat		8.383.500,00	
		-			8.369.600,00			Masyarakat		8.383.500,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	8.369.600,00				-	8.383.500,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.369.600,00					8.383.500,00	
		Tertindakannya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8.369.600,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	8.383.500,00	KECAMATAN LATIMOJONG
266	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			15.000.000,00					15.400.000,00	
		Terselenggaranya urusan pemerintahan umum		100 %	15.000.000,00				-	15.400.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			15.000.000,00			Masyarakat		15.400.000,00	
		-			15.000.000,00			Masyarakat		15.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	15.000.000,00				-	15.400.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			15.000.000,00					15.400.000,00	
		Tertindakannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Latimojong Desa Pajang 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.400.000,00	KECAMATAN LATIMOJONG
		KECAMATAN PONRANG			3.869.190.586,00					3.839.190.516,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.869.190.586,00					3.839.190.516,00	
	7.01	KECAMATAN			3.869.190.586,00					3.839.190.516,00	
267	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.842.690.586,00					3.812.690.516,00	
		Presentasi Pemenuhan dan Penerapan SOP Tupoksi Perangkat Daerah		100 Persen	198.002.336,00				-	168.018.044,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Presentasi Pemenuhan dan Penerapan SOP Tupoksi Perangkat Daerah	undefined	3.644.688.250,00				-	3.644.129.842,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.012.381,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		1.081.091,00	
		-			1.012.381,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		1.081.091,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	312.700,00				-	199.651,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	146.320,00				-	192.630,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	167.796,00				-	192.630,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	156.645,00				-	199.710,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	228.920,00				-	200.123,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0,00				-	96.347,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			146.320,00					192.630,00	
		Tersunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	146.320,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	192.630,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			228.920,00					200.123,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	228.920,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	200.123,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			156.645,00					199.710,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	156.645,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	199.710,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			312.700,00					199.651,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	312.700,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	199.651,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			167.796,00					192.630,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	167.796,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	192.630,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00					96.347,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	96.347,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.644.688.250,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		3.644.479.842,00	
		-			3.644.688.250,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		3.644.479.842,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	54.335.932,00				-	54.589.256,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	230.100,00				-	350.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	167.560,00				-	350.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.589.954.658,00				-	3.589.190.586,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.589.954.658,00					3.589.190.586,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528 Orang/bulan	3.589.954.658,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.589.190.586,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			54.335.932,00					54.589.256,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	54.335.932,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	54.589.256,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			230.100,00					350.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	230.100,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	350.000,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			167.560,00					350.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	167.560,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	350.000,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.086.150,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		6.129.800,00	
		-			5.086.150,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		6.129.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	286.150,00				-	129.800,00	
7.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			286.150,00					129.800,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	286.150,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	129.800,00	KECAMATAN PONRANG
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	KECAMATAN PONRANG
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		0,00	
		-			0,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00				-	0,00	
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00					0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN PONRANG
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.801.173,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		21.771.869,00	
		-			27.801.173,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		21.771.869,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	3.600.000,00				-	3.600.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	1.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12.962.950,00				-	12.984.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5.887.811,00				-	2.961.640,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	0,00				-	837.246,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.145.780,00				-	1.145.780,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	243.203,00				-	243.203,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00				-	0,00	
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			400.377,00					243.203,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	400.377,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	243.203,00	KECAMATAN PONRANG
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.374.735,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.374.735,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN PONRANG
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.887.811,00					2.961.640,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	5.887.811,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.961.640,00	KECAMATAN PONRANG
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.145.780,00					1.145.780,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.145.780,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.145.780,00	KECAMATAN PONRANG
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000,00					3.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.600.000,00	KECAMATAN PONRANG
7.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material			0,00					837.246,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	837.246,00	KECAMATAN PONRANG
7.01.01.2.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu			1.000.000,00					0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN PONRANG
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.962.950,00					12.984.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12.962.950,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.984.000,00	KECAMATAN PONRANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.181.475,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		17.818.450,00	
		-			24.181.475,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		17.818.450,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		15.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9.181.475,00				-	17.818.450,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			15.000.000,00					0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa D.	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.181.475,00					17.818.450,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.181.475,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa D.	Pendapatan Bagi Hasil		-	17.818.450,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.271.739,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		106.849.628,00	
		-			115.271.739,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		106.849.628,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	17.134.050,00				-	17.241.280,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	89.230.238,00				-	85.986.392,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	8.907.451,00				-	3.621.956,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.907.451,00					3.621.956,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.907.451,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa D.	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.621.956,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.134.050,00					17.241.280,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	17.134.050,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa D.	Pendapatan Bagi Hasil		-	17.241.280,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			89.230.238,00					85.986.392,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	89.230.238,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa D.	Pendapatan Bagi Hasil		-	85.986.392,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.649.418,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		14.559.836,00	
		-			24.649.418,00			Aparatur Sipil Negara Kecamatan Ponrang		14.559.836,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4.271.600,00				-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	19.077.818,00				-	14.559.836,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.300.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			19.077.818,00					14.559.836,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.077.818,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa D.	Pendapatan Bagi Hasil		-	14.559.836,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.300.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa D.	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN PONRANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.271.600,00					0,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.271.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa D.	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN PONRANG
268.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00					5.000.000,00	
			Cakupan Pelayanan Dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 Persen	5.500.000,00				-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			5.500.000,00			Semua Desa/Kelurahan Kecamatan Ponrang		5.000.000,00	
		-			5.500.000,00			Semua Desa/Kelurahan Kecamatan Ponrang		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	5.500.000,00				-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.500.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa D.	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN PONRANG
269.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5.000.000,00					5.000.000,00	
			Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Oleh Kecamatan Dalam Bangsa Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 Persen	5.000.000,00				-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.000.000,00			Semua Desa/Kelurahan Kecamatan Ponrang		5.000.000,00	
	-				5.000.000,00			Semua Desa/Kelurahan Kecamatan Ponrang	-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	5.000.000,00				-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			5.000.000,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I.I.O	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN PONRANG
270.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			16.000.000,00					16.500.000,00	
			Presentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100 Persen	16.000.000,00				-	16.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.000.000,00			Semua Desa/Kelurahan Kecamatan Ponrang		16.500.000,00	
	-				16.000.000,00			Semua Desa/Kelurahan Kecamatan Ponrang	-	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	16.000.000,00				-	16.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			16.000.000,00					16.500.000,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	16.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I.I.O	Pendapatan Bagi Hasil		-	16.500.000,00	KECAMATAN PONRANG
		KELURAHAN PADANG SUBUR			396.998.319,50					0,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				396.998.319,50					0,00	
7.01	KECAMATAN				396.998.319,50					0,00	
271.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			396.998.319,50					0,00	
			Cakupan Kegiatan yang Dilaksanakan Kecamatan Dalam Rangka Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 persen	396.998.319,50				-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			396.998.319,50				-	0,00	
	-				396.998.319,50				-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	137.198.319,50				-	0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	259.800.000,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			137.198.319,50					0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	137.198.319,50	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Subur I.I.O	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	0,00	KELURAHAN PADANG SUBUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			259.800.000,00					0,00	
		Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	259.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Subur I.I.O	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	0,00	KELURAHAN PADANG SUBUR
		KELURAHAN PADANG SAPPA			336.998.248,00					0,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				336.998.248,00					0,00	
7.01	KECAMATAN				336.998.248,00					0,00	
272.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			336.998.248,00					0,00	
			Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	336.998.248,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			336.998.248,00				-	0,00	
	-				336.998.248,00				-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	336.998.248,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			336.998.248,00					0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	336.998.248,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Kelurahan Padang Sappa I.I.O	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	0,00	KELURAHAN PADANG SAPPA
		KECAMATAN PONRANG SELATAN			2.491.086.674,00					2.500.800.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.491.086.674,00					2.500.800.000,00	
7.01	KECAMATAN				2.491.086.674,00					2.500.800.000,00	
273.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.463.448.544,00					2.462.700.000,00	
			Cakupan Ketersediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah	100 Persen	114.672.413,00				-	104.500.000,00	
			Cakupan Ketersediaan Laporan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.270.662.586,00				-	2.271.500.000,00	
			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen	22.670.298,00				-	18.000.000,00	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	42.097.175,00				-	44.100.000,00	
			Rata-rata capaian kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 Persen	2.397.102,00				-	3.600.000,00	
			Tersedianya Laporan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	5.632.060,00				-	8.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.714.012,00			OPD		14.100.000,00	
	-				7.714.012,00			OPD		14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.063.382,00				-	2.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.063.382,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.063.382,00				-	2.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.063.382,00				-	2.100.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.063.382,00				-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1.063.382,00				-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.333.720,00				-	2.100.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.063.382,00				-	1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.063.382,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	1.500.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.063.382,00				-	2.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.063.382,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.100.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.063.382,00				-	2.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.063.382,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.100.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.063.382,00				-	2.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.063.382,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.100.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.063.382,00				-	2.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.063.382,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.100.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.063.382,00				-	2.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.063.382,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.100.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.333.720,00				-	2.100.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.333.720,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.100.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.270.662.586,00			OPD	-	2.274.000.000,00	
		-			2.270.662.586,00			OPD	-	2.274.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	55.765.510,00				-	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.039.776,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.709.314,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.211.147.986,00				-	2.214.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.211.147.986,00				-	2.214.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	2.211.147.986,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.214.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			55.765.510,00				-	55.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55.765.510,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	55.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.039.776,00				-	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen Laporan	2.039.776,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.500.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.709.314,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	1.709.314,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.500.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.632.060,00			OPD		8.000.000,00	
		-			5.632.060,00			OPD		8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5.632.060,00				-	8.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.632.060,00					8.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.632.060,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	8.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			42.097.175,00			DESA/KELURAHAN		44.100.000,00	
		-			42.097.175,00			DESA/KELURAHAN		44.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	4.200.000,00				-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	12.000.000,00				-	13.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	6.190.000,00				-	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	17.707.500,00				-	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.999.675,00				-	2.100.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.999.675,00					2.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1.999.675,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.100.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200.000,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen Dokumen	4.200.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	4.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			6.190.000,00					7.500.000,00	
		Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	6.190.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	7.500.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17.707.500,00					17.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	17.707.500,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	17.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12.000.000,00					13.500.000,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	13.500.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28.620.900,00			Desa/Kelurahan		16.000.000,00	
		-			28.620.900,00			Desa/Kelurahan		16.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	28.620.900,00				-	16.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			28.620.900,00					16.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	28.620.900,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	16.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.051.513,00			DESA/KELURAHAN		88.500.000,00	
		-			86.051.513,00			DESA/KELURAHAN		88.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	14.672.400,00				-	14.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	66.785.404,00				-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	4.593.709,00				-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.593.709,00					4.000.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	4.593.709,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	4.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			14.672.400,00					14.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	14.672.400,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	14.500.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			66.785.404,00					70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	66.785.404,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	70.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.670.298,00			OPD		18.000.000,00	
		-			22.670.298,00			OPD		18.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	22.670.298,00				-	18.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.670.298,00					18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	22.670.298,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	18.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
274.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.041.306,00					11.000.000,00	
			Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 Persen	8.041.306,00				-	11.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			8.041.306,00			Kelurahan dan Desa		11.000.000,00	
		-			8.041.306,00			Kelurahan dan Desa		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	8.041.306,00				-	11.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			8.041.306,00					11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8.041.306,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	11.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
275.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			18.750.000,00					25.000.000,00	
			Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100 Persen	18.750.000,00				-	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			18.750.000,00			DESA/KELURAHAN		25.000.000,00	
		-			18.750.000,00			DESA/KELURAHAN		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	18.750.000,00				-	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			18.750.000,00					25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	18.750.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	25.000.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
276.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			846.824,00					2.100.000,00	
			persentase cakupan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	846.824,00				-	2.100.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			846.824,00			Kelurahan dan Desa		2.100.000,00	
		-			846.824,00			Kelurahan dan Desa		2.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	846.824,00				-	2.100.000,00	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			846.824,00					2.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	846.824,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	2.100.000,00	KECAMATAN PONRANG SELATAN
		KELURAHAN PATTEDONG			241.600.000,00					225.600.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			241.600.000,00					225.600.000,00	
	7.01	KECAMATAN			241.600.000,00					225.600.000,00	
277.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			241.600.000,00					225.600.000,00	
		-			241.600.000,00				-	225.600.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			241.600.000,00					225.600.000,00	
		-			241.600.000,00					225.600.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	241.600.000,00				-	225.600.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			241.600.000,00					225.600.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	241.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Kelurahan Pattedong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	225.600.000,00	KELURAHAN PATTEDONG
		KECAMATAN SULO			1.924.579.056,00					1.935.741.276,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			1.924.579.056,00					1.935.741.276,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
7.01		KECAMATAN			1.924.579.056,00					1.935.741.276,00	
278.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.903.579.056,00					1.914.741.276,00	
			Cakupan Ketersediaan Laporan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.800.000,00				-	4.800.000,00	
			Cakupan Ketersediaan Laporan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.693.778.259,00				-	1.693.779.179,00	
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	177.889.847,00				-	176.162.097,00	
			Cakupan Persentase ASN dengan Predikat Kinerja baik	100 Persen	0,00				-	0,00	
			Persentase Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	27.110.950,00				-	0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.693.778.259,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		1.693.779.179,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1.693.778.259,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		1.693.779.179,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	49.200.000,00				-	49.200.000,00	
					1.644.578.259,00				-	1.644.579.179,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.644.578.259,00					1.644.579.179,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan	1.644.578.259,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.644.579.179,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			49.200.000,00					49.200.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I	Pendapatan Bagi Hasil		-	49.200.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		4.800.000,00	
		-			4.800.000,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		4.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	4.800.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					4.800.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.800.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		0,00	
		-			0,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00				-	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00					0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			55.239.767,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		85.162.097,00	
		-			55.239.767,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		85.162.097,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	0,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	12.000.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	21.936.000,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	19.763.867,00				-	11.162.097,00	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.539.900,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00				-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.539.900,00					2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.539.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			19.763.867,00					11.162.097,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	19.763.867,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I	Pendapatan Bagi Hasil		-	11.162.097,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			12.000.000,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			21.936.000,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.936.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0,00					12.000.000,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.000.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.110.950,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		-			27.110.950,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	27.110.950,00				-	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.110.950,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27.110.950,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.494.580,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		108.000.000,00	
		-			100.494.580,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		108.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	17.694.580,00				-	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	82.800.000,00				-	90.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.694.580,00					18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.694.580,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	18.000.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			82.800.000,00					90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	90.000.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.155.500,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		23.000.000,00	
		-			22.155.500,00			Aparatur Kantor Kecamatan Suli		23.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	796.500,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	19.409.000,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1.950.000,00				-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			19.409.000,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	19.409.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.950.000,00					3.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.950.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	KECAMATAN SULI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			796.500,00					5.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	796.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN SULI
279.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.000.000,00					6.000.000,00	
			Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 Persen	6.000.000,00				-	6.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6.000.000,00			Masyarakat Kecamatan Suli		6.000.000,00	
		-			6.000.000,00			Masyarakat Kecamatan Suli		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	6.000.000,00				-	6.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			6.000.000,00					6.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	KECAMATAN SULI
280.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			15.000.000,00					15.000.000,00	
			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	100 Persen	15.000.000,00				-	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			15.000.000,00			Camat, Kapolsek dan Danramil		15.000.000,00	
		-			15.000.000,00			Camat, Kapolsek dan Danramil		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	15.000.000,00				-	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			15.000.000,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli I N	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	KECAMATAN SULI
					389.800.000,00					389.800.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			389.800.000,00					389.800.000,00	
	7.01	KECAMATAN			389.800.000,00					389.800.000,00	
281.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			389.800.000,00					389.800.000,00	
			Cakupan Kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 Persen	389.800.000,00				-	389.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			389.800.000,00					389.800.000,00	
		-			389.800.000,00					389.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	389.800.000,00				-	389.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			389.800.000,00					389.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	389.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Kelurahan Suli 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	389.800.000,00	KELURAHAN SULI
		KECAMATAN SULI BARAT			1.939.202.061,00					1.561.012.600,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.939.202.061,00					1.561.012.600,00	
	7.01	KECAMATAN			1.939.202.061,00					1.561.012.600,00	
282.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.892.372.061,00					1.512.512.600,00	
			Persentase pemenuhan dan penerapan SOP Tupoksi Perangkat Daerah	100 persen	1.891.623.261,00				-	1.503.512.600,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.259.792,00			Aparatur Perangkat Daerah / Internal Perangkat Daerah		8.000.000,00	
		-			2.259.792,00			Aparatur Perangkat Daerah / Internal Perangkat Daerah		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	249.600,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	593.040,00				-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	249.600,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	249.600,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	249.600,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	668.352,00				-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			593.040,00					2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	593.040,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			249.600,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	249.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			249.600,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	249.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			249.600,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	249.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			249.600,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	249.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			668.352,00					2.000.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	668.352,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.736.826.670,00			Aparatur Sipil Negara		1.352.000.000,00	
		-			1.736.826.670,00			Aparatur Sipil Negara		1.352.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	47.624.610,00				-	52.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.689.202.060,00				-	1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.689.202.060,00					1.300.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.689.202.060,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.300.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPenuaian/Verifikasi Keuangan SKPD			47.624.610,00					52.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	47.624.610,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	52.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.264.610,00			Pengelola Aset / Barang dan Unit Kerja		6.500.000,00	
	-				5.264.610,00			Pengelola Aset / Barang dan Unit Kerja		6.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		5.264.610,00				-	6.500.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.264.610,00					6.500.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.264.610,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.500.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.690.811,00			Aparatur Perangkat Daerah / Internal Perangkat Daerah		93.712.600,00	
	-				111.690.811,00			Aparatur Perangkat Daerah / Internal Perangkat Daerah		93.712.600,00	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		1.200.000,00				-	0,00	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		12.000.000,00				-	12.000.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		7.000.000,00				-	7.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		33.946.172,00				-	31.500.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		6.371.275,00				-	6.212.600,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		9.491.592,00				-	8.500.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		4.128.761,00				-	4.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		3.394.391,00				-	4.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		34.158.620,00				-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.394.391,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.394.391,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			34.158.620,00					20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	34.158.620,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			6.371.275,00					6.212.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.371.275,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.212.600,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.128.761,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.128.761,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			9.491.592,00					8.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9.491.592,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	8.500.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			7.000.000,00					7.500.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.500.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			33.946.172,00					31.500.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	33.946.172,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	31.500.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12.000.000,00					12.000.000,00	
		Tertaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.861.500,00			Aparatur Perangkat Daerah		36.500.000,00	
		-			25.861.500,00			Aparatur Perangkat Daerah		36.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12.461.500,00				-	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	13.200.000,00				-	24.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.461.500,00					12.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.461.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.500.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			13.200.000,00					24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	24.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.668.678,00			Perangkat Daerah		15.800.000,00	
		-			10.668.678,00			Perangkat Daerah		15.800.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	10.668.678,00				-	15.800.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.668.678,00					15.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	10.668.678,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.800.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
283.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.500.000,00					7.500.000,00	
			Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 persen	7.500.000,00				-	7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.500.000,00			Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa		7.500.000,00	
		-			7.500.000,00			Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa		7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	7.500.000,00				-	7.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			7.500.000,00					7.500.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.500.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
284.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			3.330.000,00					5.000.000,00	
			Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	100 persen	3.330.000,00				-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			3.330.000,00			Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan		5.000.000,00	
		-			3.330.000,00			Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	3.330.000,00				-	5.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.330.000,00					5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	3.330.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
285.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			36.000.000,00					36.000.000,00	
			Persentase cakupan pemerintahan umum	100 persen	36.000.000,00				-	36.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			36.000.000,00			Apartur Pemerintah / Organisasi Kemasyarakatan		36.000.000,00	
		-			36.000.000,00			Apartur Pemerintah / Organisasi Kemasyarakatan		36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	36.000.000,00				-	36.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			36.000.000,00					36.000.000,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	36.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	36.000.000,00	KECAMATAN SULI BARAT
		KELURAHAN LINDAJANG			263.800.000,00					260.800.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			263.800.000,00					260.800.000,00	
7.01		KECAMATAN			263.800.000,00					260.800.000,00	
286.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			263.800.000,00					260.800.000,00	
			Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	100 persen	263.800.000,00				-	260.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			263.800.000,00			-		260.800.000,00	
		-			263.800.000,00			-		260.800.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	131.200.000,00				-	130.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	132.600.000,00				-	130.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			131.200.000,00					130.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	131.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	130.000.000,00	KELURAHAN LINDAJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			132.600.000,00					130.800.000,00	
		Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	132.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Suli Barat Kelurahan Lindajang 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	130.800.000,00	KELURAHAN LINDAJANG
		KECAMATAN WALENRANG			2.926.030.036,00					3.356.486.126,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			2.926.030.036,00					3.356.486.126,00	
7.01		KECAMATAN			2.926.030.036,00					3.356.486.126,00	
287.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.892.030.036,00					3.256.986.126,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	undefined	4.800.000,00				-	6.000.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	2.886.923.236,00				-	3.088.786.126,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			613.600,00			Kantor Camat Walenrang		2.000.000,00	
		-			613.600,00			Kantor Camat Walenrang		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	306.800,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	306.800,00				-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			306.800,00					1.000.000,00	
		Terusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	306.800,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			306.800,00					1.000.000,00	
		Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	306.800,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.667.423.334,00			Kantor Camat Walenrang		2.826.986.126,00	
		-			2.667.423.334,00			Kantor Camat Walenrang		2.826.986.126,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	56.760.000,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	0,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.610.663.334,00				-	2.764.586.126,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.610.663.334,00					2.764.586.126,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	2.610.663.334,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.764.586.126,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			56.760.000,00					60.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	56.760.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	60.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00					1.200.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.200.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0,00					1.200.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.200.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			Kantor Camat Walenrang		6.000.000,00	
		-			4.800.000,00			Kantor Camat Walenrang		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					6.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.800.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			63.283.320,00			Kantor Camat Walenrang		100.000.000,00	
		-			63.283.320,00			Kantor Camat Walenrang		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	25.406.000,00				-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	35.836.468,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.040.852,00				-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.040.852,00					10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.040.852,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			35.836.468,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	35.836.468,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.406.000,00					60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	25.406.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	60.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			59.479.450,00			Kantor Camat Walenrang		200.000.000,00	
		-			59.479.450,00			Kantor Camat Walenrang		200.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4.700.000,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	54.779.450,00				-	100.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			4.700.000,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	4.700.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	100.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			54.779.450,00					100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	54.779.450,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	100.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.638.000,00			Kantor Camat Walenrang		67.000.000,00	
		-			61.638.000,00			Kantor Camat Walenrang		67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	19.638.000,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	42.000.000,00				-	42.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.638.000,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.638.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	25.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			42.000.000,00					42.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	42.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.792.332,00			Kantor Camat Walenrang		55.000.000,00	
		-			34.792.332,00			Kantor Camat Walenrang		55.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Palak dan Perizinannya	-	34.792.332,00				-	55.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.792.332,00					55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Palak dan Perizinannya	8 Unit	34.792.332,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	55.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
288.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.000.000,00					7.000.000,00	
			Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan	100 %	2.000.000,00				-	7.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			2.000.000,00			Masyarakat		5.000.000,00	
		-			2.000.000,00			Masyarakat		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	2.000.000,00				-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2.000.000,00					5.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			2.000.000,00			Masyarakat		2.000.000,00	
		-			2.000.000,00			Masyarakat		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	2.000.000,00				-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.000.000,00					2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
289.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000,00					20.000.000,00	
			Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	100 %	20.000.000,00				-	20.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.000.000,00			Masyarakat		20.000.000,00	
		-			20.000.000,00			Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	20.000.000,00				-	20.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20.000.000,00					20.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
290.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2.000.000,00					2.500.000,00	
			Persentase capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	2.000.000,00				-	2.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2.000.000,00			Masyarakat		2.500.000,00	
		-			2.000.000,00			Masyarakat		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	2.000.000,00				-	2.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2.000.000,00					2.500.000,00	
		Terkasukannya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	KECAMATAN WALENRANG
291.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			4.000.000,00					50.000.000,00	
			Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	100 %	4.000.000,00				-	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			4.000.000,00			Masyarakat		50.000.000,00	
		-			4.000.000,00			Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	4.000.000,00				-	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			4.000.000,00					50.000.000,00	
		Terkasukannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
292.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			4.000.000,00					20.000.000,00	
			Cakupan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	4.000.000,00				-	20.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.000.000,00			Desa		20.000.000,00	
		-			4.000.000,00			Desa		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	4.000.000,00				-	20.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4.000.000,00					20.000.000,00	
		Terkasukannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	20.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG
		KEKURAHAN BULO			244.399.762,00					244.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			244.399.762,00					244.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN			244.399.762,00					244.400.000,00	
293.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			244.399.762,00					244.400.000,00	
			Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	100 %	244.399.762,00				-	244.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			244.399.762,00					244.400.000,00	
		-			244.399.762,00					244.400.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	244.399.762,00				-	244.400.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			244.399.762,00					244.400.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	244.399.762,00	Kab. Luwu	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	244.400.000,00	KEKURAHAN BULO
		KEKAMATAN WALENRANG BARAT			2.299.407.039,00					2.620.383.611,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.299.407.039,00					2.620.383.611,00	
	7.01	KECAMATAN			2.299.407.039,00					2.620.383.611,00	
294.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.267.407.039,00					2.590.383.611,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	98 %	2.035.315.462,00				-	2.310.283.611,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsor Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	231.708.077,00				-	272.300.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			767.000,00			ASN Kantor Camat Walenrang Barat		2.000.000,00	
		-			767.000,00			ASN Kantor Camat Walenrang Barat		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	383.500,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	383.500,00				-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			383.500,00					1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	383.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			383.500,00					1.000.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	383.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.012.807.462,00			ASN Kantor Camat Walenrang Barat		2.306.283.611,00	
		-			2.012.807.462,00			ASN Kantor Camat Walenrang Barat		2.306.283.611,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	59.400.000,00				-	47.160.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	0,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	0,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.953.407.462,00				-	2.257.123.611,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.953.407.462,00					2.257.123.611,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	1.953.407.462,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilan Batu 1	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.257.123.611,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			59.400.000,00					47.160.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	59.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilan Batu 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	47.160.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilan Batu 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			Kantor Camat Walenrang Barat		4.800.000,00	
		-			4.800.000,00			Kantor Camat Walenrang Barat		4.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	4.800.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					4.800.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Walenrang Barat Desa Ilan Batu 1	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.800.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			53.670.914,00			ASN Kantor Camat Walenrang Barat		75.000.000,00	
		-			53.670.914,00			ASN Kantor Camat Walenrang Barat		75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	29.766.000,00				-	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	21.614.620,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.290.294,00				-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.290.294,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.290.294,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			21.614.620,00					25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	21.614.620,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	25.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			29.766.000,00					45.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.766.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	45.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.508.000,00				-	6.000.000,00	
		-			22.508.000,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	22.508.000,00				-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00					5.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.508.000,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.508.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.260.071,00			ASN Kantor Camat Walenrang Barat		58.800.000,00	
		-			52.260.071,00			ASN Kantor Camat Walenrang Barat		58.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	4.260.071,00				-	4.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	48.000.000,00				-	54.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.260.071,00					4.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.260.071,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.800.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			48.000.000,00					54.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	54.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120.593.592,00			ASN Kantor Camat Walenrang Barat		137.500.000,00	
	-				120.593.592,00			ASN Kantor Camat Walenrang Barat		137.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	120.593.592,00				-	122.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			120.593.592,00					122.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	120.593.592,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	122.500.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
295.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20.000.000,00					10.000.000,00	
			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100 %	20.000.000,00				-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20.000.000,00			Masyarakat		10.000.000,00	
	-				20.000.000,00			Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	20.000.000,00				-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			20.000.000,00					10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
296.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			8.000.000,00					10.000.000,00	
			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100 %	8.000.000,00				-	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			8.000.000,00			Masyarakat		10.000.000,00	
	-				8.000.000,00			Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	8.000.000,00				-	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			8.000.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
297.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			4.000.000,00					10.000.000,00	
			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100 %	4.000.000,00				-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.000.000,00			Masyarakat		10.000.000,00	
	-				4.000.000,00			Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	4.000.000,00				-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			4.000.000,00					10.000.000,00	
		Tertaksananya Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	10.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG BARAT
		KECAMATAN WALENRANG TIMUR			1.910.319.366,00					2.001.700.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.910.319.366,00					2.001.700.000,00	
	7.01	KECAMATAN			1.910.319.366,00					2.001.700.000,00	
298.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.853.319.366,00					1.958.700.000,00	
			Cakupan Ketersediaan Laporan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4.800.000,00				-	6.000.000,00	
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	0,00				-	8.500.000,00	
			Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	98 %	1.817.425.396,00				-	1.909.000.000,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsir Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	97 %	31.093.970,00				-	34.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		2.700.000,00	
	-				0,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		2.700.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	0,00				-	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	0,00				-	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0,00				-	300.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	0,00				-	300.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00				-	1.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.200.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00					300.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	300.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00					300.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	300.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00					300.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	300.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			0,00					300.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	300.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00					300.000,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	300.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.677.480.223,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		1.755.000.000,00	
		-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1.677.480.223,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		1.755.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	47.160.000,00				-	55.000.000,00	
					1.630.320.223,00				-	1.700.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.630.320.223,00					1.700.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan	1.630.320.223,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.700.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			47.160.000,00					55.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86 Dokumen	47.160.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	55.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		6.000.000,00	
		-			4.800.000,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					6.000.000,00	
		Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.800.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah			0,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		8.500.000,00	
		-			0,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		8.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0,00				-	8.500.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00					8.500.000,00	
		Tersedianya Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	8.500.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			82.442.755,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		77.000.000,00	
		-			82.442.755,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		77.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	2.400.000,00				-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	35.720.000,00				-	28.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	40.485.505,00				-	42.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.837.250,00				-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.837.250,00					4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.837.250,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.400.000,00					3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			40.485.505,00					42.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket	40.485.505,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	42.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35.720.000,00					28.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	35.720.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	28.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.746.500,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		45.000.000,00	
		-			27.746.500,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		45.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	27.746.500,00				-	30.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00					15.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.746.500,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	27.746.500,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.755.918,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		30.500.000,00	
		-			29.755.918,00			ASN Kantor Camat Walenrang Timur		30.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3.355.918,00				-	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	26.400.000,00				-	27.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.355.918,00					3.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.355.918,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.500.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			26.400.000,00					27.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	26.400.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	27.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.093.970,00			ASN Kecamatan Walenrang Timur		34.000.000,00	
		-			31.093.970,00			ASN Kecamatan Walenrang Timur		34.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikmnya	-	28.840.870,00				-	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2.253.100,00				-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			28.840.870,00					30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikmnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikmnya	6 Unit	28.840.870,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.253.100,00					4.000.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.253.100,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
299.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000.000,00					6.000.000,00	
			Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %	5.000.000,00				-	6.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan			5.000.000,00			Masyarakat Walenrang Timur		6.000.000,00	
		-			5.000.000,00			Masyarakat Walenrang Timur		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	5.000.000,00				-	6.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5.000.000,00					6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
300.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			43.500.000,00					30.000.000,00	
			Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	70 %	43.500.000,00				-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			43.500.000,00			Masyarakat Walenrang Timur Dan Forkopincam		30.000.000,00	
		-			43.500.000,00			Masyarakat Walenrang Timur Dan Forkopincam		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	43.500.000,00				-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			43.500.000,00					30.000.000,00	
			Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	43.500.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	30.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
301.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			8.500.000,00					7.000.000,00	
			Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	8.500.000,00				-	7.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			8.500.000,00			Masyarakat Walenrang Timur		7.000.000,00	
		-			8.500.000,00			Masyarakat Walenrang Timur		7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	8.500.000,00				-	7.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			8.500.000,00					7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	80 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.000.000,00	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
		KECAMATAN WALENRANG UTARA			3.190.250.120,00					0,00	
		KELURAHAN BOSSO			298.000.000,00					280.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			298.000.000,00					280.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN			298.000.000,00					280.000.000,00	
302.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			298.000.000,00					280.000.000,00	
		-			298.000.000,00				-	280.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			298.000.000,00				-	280.000.000,00	
		-			298.000.000,00				-	280.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	298.000.000,00				-	280.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			298.000.000,00					280.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	298.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Walenrang Utara Kelurahan Bossso D	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	280.000.000,00	KELURAHAN BOSSO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.190.250.120,00					0,00	
	7.01	KECAMATAN			3.190.250.120,00					0,00	
303.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.153.250.120,00					0,00	
			Meningkatnya Kualitas Dukungan Unsur Penunjang Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	3.932.160,00				-	0,00	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan Daerah	100 %	163.918.777,00				-	0,00	
			Tersedianya Laporan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 %	27.688.800,00				-	0,00	
			Tersedianya Laporan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 %	4.800.000,00				-	0,00	
			Tersedianya Laporan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		2.951.481.263,00				-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.361.280,00			Pegawai		0,00	
		-			5.361.280,00			Pegawai		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	714.560,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.355.200,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	714.560,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	714.560,00				-	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	862.400,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.000.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.355.200,00					0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.355.200,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			862.400,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	862.400,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			714.560,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	714.560,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			714.560,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	714.560,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			714.560,00					0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	714.560,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000,00					0,00	
		Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.951.481.263,00			Pegawai		0,00	
		-			2.951.481.263,00			Pegawai		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	57.840.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.078.000,00				-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	2.060.800,00				-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.890.502.463,00				-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.890.502.463,00					0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	2.890.502.463,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			57.840.000,00					0,00	
		Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.840.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.078.000,00					0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.078.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.060.800,00					0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.060.800,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.800.000,00			Pegawai		0,00	
		-			4.800.000,00			Pegawai		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.800.000,00				-	0,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.800.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			50.211.977,00			Masyarakat		0,00	
		-			50.211.977,00			Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	13.468.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	624.000,00				-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	36.119.977,00				-	0,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			624.000,00					0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	624.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			36.119.977,00					0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	36.119.977,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13.468.000,00					0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	13.468.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.688.800,00			Pegawai		0,00	
		-			27.688.800,00			Pegawai		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	27.688.800,00				-	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.688.800,00					0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	27.688.800,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	0,00	KECAMATAN WALENRANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		KECAMATAN BUA			3.760.110.406,00					3.754.904.143,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.760.110.406,00					3.754.904.143,00	
	7.01	KECAMATAN			3.760.110.406,00					3.754.904.143,00	
306.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.730.610.406,00					3.720.704.143,00	
			Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.550.510,00				-	13.818.060,00	
			Capaian Ketersediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah	100 %	88.536.815,00				-	79.879.125,00	
			Rata-Rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	3.587.437.727,00				-	3.613.956.958,00	
			Rata-Rata Capaian Kinerja Unsur/ Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	500.000,00				-	1.500.000,00	
					44.085.354,00				-	1.050.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		3.000.000,00	
		-			1.000.000,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	500.000,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	500.000,00				-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			500.000,00					1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			500.000,00					1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.533.990.556,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		3.537.950.556,00	
		-			3.533.990.556,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		3.537.950.556,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	53.880.000,00				-	57.840.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.480.110.556,00				-	3.480.110.556,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.480.110.556,00					3.480.110.556,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	3.480.110.556,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	3.480.110.556,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			53.880.000,00					57.840.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.880.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	57.840.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.953.400,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		5.000.000,00	
		-			4.953.400,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4.953.400,00				-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.953.400,00					5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.953.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	5.000.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			49.493.771,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		80.006.402,00	
		-			49.493.771,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		80.006.402,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	3.600.000,00				-	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	0,00				-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	1.000.000,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	27.263.000,00				-	29.906.400,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	5.168.720,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	10.308.933,00				-	6.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1.000.000,00				-	15.000.002,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1.153.118,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00				-	6.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.153.118,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.153.118,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00					6.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.500.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.168.720,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.168.720,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	2.500.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00					15.000.002,00	
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	15.000.002,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000,00					3.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	3.600.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			10.308.933,00					6.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	10.308.933,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	6.500.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.000.000,00					1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			27.263.000,00					29.906.400,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	27.263.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	29.906.400,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0,00					12.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.000.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			44.085.354,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		1.050.000,00	
		-			44.085.354,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		1.050.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	44.085.354,00				-	1.050.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			44.085.354,00					1.050.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	44.085.354,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.050.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.536.815,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		79.879.125,00	
		-			88.536.815,00			Kantor Camat Bua Kab.Luwu		79.879.125,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	26.136.815,00				-	29.479.125,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	62.400.000,00				-	50.400.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			26.136.815,00					29.479.125,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.136.815,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	29.479.125,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			62.400.000,00					50.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	50.400.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.550.510,00			Kantor Camat Bua Kab. Luwu		13.818.060,00	
	-				8.550.510,00			Kantor Camat Bua Kab. Luwu		13.818.060,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	-	8.550.510,00				-	12.258.060,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0,00				-	1.560.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			8.550.510,00					12.258.060,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	4 Unit	8.550.510,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	12.258.060,00	KECAMATAN BUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00					1.560.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.560.000,00	KECAMATAN BUA
307.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.600.000,00					9.000.000,00	
			Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan	100 %	7.600.000,00				-	9.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.600.000,00			Desa Dan Kelurahan Kec. Bua Kab. Luwu		9.000.000,00	
	-				7.600.000,00			Desa Dan Kelurahan Kec. Bua Kab. Luwu		9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	600.000,00				-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	7.000.000,00				-	7.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			7.000.000,00					7.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	7.500.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			600.000,00					1.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BUA
308.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			600.000,00					1.500.000,00	
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	600.000,00				-	1.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			600.000,00			Desa Dan Kelurahan Kec. Bua Kab. Luwu		1.500.000,00	
	-				600.000,00			Desa Dan Kelurahan Kec. Bua Kab. Luwu		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	600.000,00				-	1.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			600.000,00					1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	600.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BUA
309.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.200.000,00					4.500.000,00	
			Cakupan Capaian Kerja Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	4.200.000,00				-	4.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			4.200.000,00			Desa Dan Kelurahan Kec.Bua Kab.Luwu		4.500.000,00	
		-			4.200.000,00			Desa Dan Kelurahan Kec.Bua Kab.Luwu		4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	4.200.000,00				-	4.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			4.200.000,00					4.500.000,00	
		Tertaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	4.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	4.500.000,00	KECAMATAN BUA
310.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			16.500.000,00					16.600.000,00	
			Cakupan Unsur Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100 %	16.500.000,00				-	16.600.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			16.500.000,00			ASN Kantor Camat Bua Kab.Luwu		16.600.000,00	
		-			16.500.000,00			ASN Kantor Camat Bua Kab.Luwu		16.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	16.500.000,00				-	16.600.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			16.500.000,00					16.600.000,00	
		Tertaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	16.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	16.600.000,00	KECAMATAN BUA
311.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			600.000,00					2.600.000,00	
			Cakupan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	600.000,00				-	2.600.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			600.000,00			Aparatur Desa Kec.Bua Kab.Luwu		2.600.000,00	
		-			600.000,00			Aparatur Desa Kec.Bua Kab.Luwu		2.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	600.000,00				-	1.100.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	0,00				-	1.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			0,00					1.500.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	0,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.500.000,00	KECAMATAN BUA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			600.000,00					1.100.000,00	
		Tertaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Pendapatan Bagi Hasil		-	1.100.000,00	KECAMATAN BUA
		KELURAHAN SAKTI			301.000.000,00					0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			301.000.000,00					0,00	
	7.01	KECAMATAN			301.000.000,00					0,00	
312.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			301.000.000,00					0,00	
		-			301.000.000,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			301.000.000,00				-	0,00	
		-			301.000.000,00				-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	301.000.000,00				-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			301.000.000,00					0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	301.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Bua Kelurahan Sakti 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		-	0,00	KELURAHAN SAKTI
		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.546.293.918,00					8.091.438.387,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			5.546.293.918,00					8.091.438.387,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.546.293.918,00					8.091.438.387,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
313.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.910.234.343,00					3.411.400.021,00	
			Rata-rata Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	2.910.234.343,00				-	3.371.400.021,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.007.745,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		57.750.000,00	
		-			25.007.745,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		57.750.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	728.650,00				-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	17.011.750,00				-	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.126.015,00				-	950.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.185.900,00				-	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.129.080,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3.826.350,00				-	6.500.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.011.750,00					45.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.011.750,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.129.080,00					2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.129.080,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.185.900,00					1.800.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.185.900,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	1.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			728.650,00					1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	728.650,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.126.015,00					950.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.126.015,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	950.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.826.350,00					6.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.826.350,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	6.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.434.138.876,00					2.639.800.021,00	
		-			2.434.138.876,00					2.639.800.021,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	139.690.000,00				-	147.360.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	11.442.000,00				-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	21.483.880,00				-	22.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	2.261.522.996,00				-	2.435.040.021,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.261.522.996,00					2.435.040.021,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan	2.261.522.996,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	2.435.040.021,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			139.690.000,00					147.360.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	139.690.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	147.360.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.442.000,00					35.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.442.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Senga I I 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			21.483.880,00					22.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	21.483.880,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga LLO	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	22.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.141.700,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		2.500.000,00	
	-				2.141.700,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2.141.700,00				-	2.500.000,00	
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2.141.700,00					2.500.000,00	
		Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.141.700,00	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Kecamatan Belopa Kelurahan Sengga LLO	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah			13.972.770,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		67.200.000,00	
	-				13.972.770,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		67.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1.432.770,00				-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	12.540.000,00				-	29.700.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0,00				-	35.000.000,00	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			12.540.000,00					29.700.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	12.540.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	29.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1.432.770,00					2.500.000,00	
		Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	420 Dokumen	1.432.770,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.05.0008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0,00					35.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			119.502.881,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		180.070.000,00	
	-				119.502.881,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		180.070.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1.200.000,00				-	1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	63.300.600,00				-	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3.938.566,00				-	4.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	40.454.409,00				-	38.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	6.690.923,00				-	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	3.918.383,00				-	3.870.000,00	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.918.383,00					3.870.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.918.383,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	3.870.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.938.566,00					4.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.938.566,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.690.923,00					7.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.690.923,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000,00					1.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	1.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			40.454.409,00					38.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.454.409,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	38.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			63.300.600,00					125.000.000,00	
		Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	63.300.600,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31.868.710,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		25.000.000,00	
	-				31.868.710,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		25.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	31.868.710,00				-	25.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			31.868.710,00					25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	31.868.710,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			230.424.000,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		230.700.000,00	
		-			230.424.000,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		230.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	7.224.000,00				-	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	223.200.000,00				-	223.200.000,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.224.000,00					7.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.224.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			223.200.000,00					223.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	223.200.000,00	Kab. Luwu	Pajak Daerah		-	223.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			53.177.661,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		208.380.000,00	
		-			53.177.661,00			Pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah) Kab. Luwu		208.380.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	50.417.661,00				-	200.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2.760.000,00				-	8.280.000,00	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.417.661,00					200.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	50.417.661,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	200.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.760.000,00					8.280.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.760.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	8.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
314.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			757.349.352,00					798.170.965,00	
			Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	757.349.352,00				-	798.170.965,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			757.349.352,00			Generasi Muda Kab. Luwu		798.170.965,00	
		-			757.349.352,00			Generasi Muda Kab. Luwu		798.170.965,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	0,00				-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	0,00				-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	0,00				-	22.670.965,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	57.349.425,00				-	20.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	-	699.999.927,00				-	750.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			0,00					500.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			57.349.425,00					20.000.000,00	
		Tertaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	57.349.425,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			0,00					22.670.965,00	
		Tertaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75 Orang	0,00	Kab. Luwu	-		-	22.670.965,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			0,00					5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			699.999.927,00					750.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	156 Orang	699.999.927,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
315.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.201.349.971,00					2.698.129.024,00	
			Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	1.201.349.971,00				-	1.428.129.024,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1.201.349.971,00			Masyarakat, Partai Politik Kab. Luwu		2.698.129.024,00	
		-			1.201.349.971,00			Masyarakat, Partai Politik Kab. Luwu		2.698.129.024,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	0,00				-	500.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	1.189.350.197,00				-	1.270.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	4.999.774,00				-	57.629.024,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	0,00				-	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	7.000.000,00				-	1.270.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			0,00					500.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.189.350.197,00					1.270.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Dokumen	1.189.350.197,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	1.270.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			7.000.000,00					1.270.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 Orang	7.000.000,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	1.270.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			0,00					100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			4.999.774,00					57.629.024,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9 Laporan	4.999.774,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	57.629.024,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
316.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			17.586.918,00					91.500.000,00	
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	80 Persentase	17.586.918,00				-	66.500.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			17.586.918,00			Masyarakat dan Organisasi Masyarakat (Ormas)		91.500.000,00	
		-			17.586.918,00			Masyarakat dan Organisasi Masyarakat (Ormas)		91.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	0,00				-	500.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	3.159.908,00				-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	0,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	0,00				-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	14.427.010,00				-	35.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			0,00					500.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			3.159.908,00					6.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	3.159.908,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			14.427.010,00					35.000.000,00	
		Tertaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35 Orang	14.427.010,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			0,00					25.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			0,00					25.000.000,00	
		Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
317.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			36.074.110,00					140.500.000,00	
			Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	85 %	36.074.110,00				-	140.500.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			36.074.110,00			Masyarakat dan Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB)		140.500.000,00	
		-			36.074.110,00			Masyarakat dan Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB)		140.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	0,00				-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	0,00				-	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	13.533.430,00				-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	22.540.680,00				-	100.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0,00					500.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			22.540.680,00					100.000.000,00	
		Tertaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125 Orang	22.540.680,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			13.533.430,00					25.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	13.533.430,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0,00					15.000.000,00	
		Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
318.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			623.699.224,00					951.738.377,00	
			Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	623.699.224,00				-	951.738.377,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			623.699.224,00			Masyarakat dan Unsur Pemerintah Daerah		951.738.377,00	
		-			623.699.224,00			Masyarakat dan Unsur Pemerintah Daerah		951.738.377,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	599.999.484,00				-	744.688.377,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-	0,00				-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	0,00				-	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	23.699.740,00				-	121.550.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	0,00				-	50.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			0,00					500.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			0,00					50.000.000,00	
		Tertaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			23.699.740,00					121.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	23.699.740,00	Kab. Luwu	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	121.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			0,00					35.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		-	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			599.999.484,00					744.688.377,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	599.999.484,00	Kab. Luwu	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)		-	744.688.377,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		J U M L A H			1.711.233.878.609,80					1.641.463.615.133,00	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah suatu gambaran capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Tercapainya suatu kinerja akan terlihat dari capaian indikator sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi *Indikator Kinerja Makro*, *Indikator Kinerja Utama (IKU)*, *Indikator Kinerja Daerah (IKD)* maupun *Indikator Kinerja Kunci (IKK)*.

6.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator Kinerja Makro adalah ukuran atau parameter utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi umum perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja pembangunan daerah secara makro.

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Luwu
Tahun 2025 - 2027

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2025	Asumsi Capaian Tahun 2026	Target Tahun 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,43	7,75	8,77
2	PDRB per kapita	(Rp. Juta)	63,45	65,71	67,89
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,97	10,66-9,76	9,33 – 9,95

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2025	Asumsi Capaian Tahun 2026	Target Tahun 2027
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,71	3,05	2,87-3,13
5	Gini Ratio	Angka	0,331	0,306	0,300
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,86	75,05	75,62
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	Belum Rilis	23,22	25,84
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	81,98	82,00	82,02
9	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi	Persen	3,28	3,33	3,39

Sumber Data : BPS dan Hasil Olah Data Tim RKPD 2027

Berdasarkan penjabaran data diatas, Pada tahun 2025 perekonomian Luwu tumbuh sebesar 7,43 persen, hal ini merupakan capaian tertinggi selama delapan tahun. Pertumbuhan ini ditopang oleh lapangan usaha industry pengolahan, jasa lainnya, dan administrasi pemerintahan sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Berdasarkan capaian tersebut maka Pemerintah Optimis untuk menaikkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,77 persen pada tahun 2027. Kemudian PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. PDRB per kapita Kabupaten Luwu tahun 2025 adalah 63,45 Juta Rupiah, tahun 2026 diperkirakan meningkat menjadi 65,71 juta rupiah. Proyeksi Nilai PDRB perkapita ADHB tahun 2027 sebesar 67,89 juta rupiah hal ini didorong karena adanya Perusahaan industri

besar yang telah beroperasi di Kabupaten Luwu yang menciptakan lapangan kerja serta mendantang investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita. Kemudian untuk Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu menargetkan menurun sebesar 10,66 – 9,76 persen (2026) dan 9,33-9,95 persen (2027), penetapan target ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Luwu selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat, bantuan pertanian dan perikanan, pelayanan berbasis e-KTP, peningkatan kualitas SDM guna mewujudkan manusia yang unggul.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Luwu sangat optimis dalam menurunkan angka pengangguran pada tahun 2027 menjadi 2,87-3,13 persen, berbagai upaya akan dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai target tersebut diantaranya dengan mendorong investasi diberbagai sektor guna peningkatan lapangan kerja baru, meningkatkan akses pelatihan keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja, memfasilitasi pelaksanaan job fair serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sejalan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Luwu juga menargetkan terciptanya pemerataan hasil pembangunan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi tersebut adalah gini rasio.

Gini Ratio Kabupaten Luwu Tahun 2025 sebesar 0,331, diasumsikan mencapai 0,306 pada tahun 2026 dan ditargetkan menurun menjadi 0,300 pada tahun 2027, beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu untuk mencapai target tersebut diantaranya melalui sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes serta komitmen daerah lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan digital.

Selain indikator diatas, keberhasilan pembangunan daerah juga diukur melalui kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis dalam menilai capaian pembangunan Kabupaten Luwu, pada tahun

2025, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu berada pada kategori tinggi sebesar 74,86. Pemerintah terus optimis meningkatkan capaian pada tahun 2026 sebesar 75,05 dan menargetkan tahun 2027 sebesar 75,62. Beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Daerah dalam mendorong capaian target tersebut diantaranya dengan meningkatkan upaya promotive dan preventif, meningkatkan pelayanan Kesehatan ibu anak, perbaikan gizi, mempercepat taraf Pendidikan di seluruh Masyarakat untuk memenuhi hal seluruh penduduk usia sekolah Serta pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan skill Masyarakat sehingga dapat berusaha sendiri dan meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Keberhasilan Pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga dari keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebagai salah satu indikator Pembangunan berkelanjutan. Penurunan Intensitas Emisi GRK sendiri merupakan indikator yang dihitung berdasarkan intensitas tahun dasar dikurangi dengan intensitas tahun berjalan dibagi dengan intensitas tahun dasar. Emisi gas rumah kaca sendiri mengacu pada hasil perhitungan dalam Aplikasi AKSARA BAPPENAS yang mengopilasi berbagai aksi mitigasi perubahan iklim dari berbagai sektor terkait menjadi estimasi penurunan emisi gas rumah kaca. Penurunan Intensitas Emisi GRK Kabupaten Luwu pada tahun 2026 diasumsikan sebesar 23,22 % dan ditargetkan meningkat menjadi 25,84 % pada tahun 2027. Peningkatan target ini didorong oleh berbagai strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu diantaranya dengan memaksimalkan pengelolaan sampah pada TPA maupun TPS3R, melakukan pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta program pembagian bibit tanaman produktif untuk mendukung penghijauan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi.

Selanjutnya, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga merupakan indikator penting dalam menggambarkan kondisi lingkungan di Kabupaten Luwu, pada tahun 2025 Kabupaten Luwu

berhasil mencapai 81,98, kemudian di asumsikan mencapai target 82,00 pada tahun 2026 dan ditargetkan meningkat menjadi 82,02 pada tahun 2027. Penetapan target ini didorong oleh Upaya Pemerintah Kabupaten Luwu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan melalui pengendalian pencemaran air dan udara, peningkatan pengelolaan persampahan, serta penguatan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, selain itu peningkatan partisipasi Masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi diharapkan akan turut menjadi faktor pendukung dalam pencapaian target tersebut.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Luwu juga menargetkan peningkatan peran daerah dalam perekonomian regional yang tercermin melalui Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2025 Kabupaten Luwu mencapai 3,28 persen, dan diasumsikan meningkat menjadi 3,33 persen pada tahun 2026 dan ditargetkan menjadi 3,39 persen pada tahun 2027. Hal ini didorong oleh peningkatan pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah Kabupaten Luwu diantaranya sektor pertanian, industri pengolahan. Selain itu, meningkatnya investasi, pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas wilayah dan meningkatnya aktivitas ekonomi Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah perekonomian kabupaten Luwu sehingga kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan semakin besar.

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh kepala daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu periode 2025-2027 tertuang pada tabel berikut :

Tabel. 6.2
Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2025	Asumsi Capaian 2026	Target RPJMD Tahun 2027	Target Tahun 2027	Defenisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	PDRB Perkapita ADHB	Rp Juta	63,45	75,09	76,3	75,14 – 76,3	Rata-rata nilai PDRB ADHB yang dihasilkan untuk setiap penduduk dalam satu tahun.	$\text{PDRB ADHB} \div \text{Jumlah Penduduk}$	BPS
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7,43	7,75	6,53	8,77	Persentase perubahan PDRB ADHK	$((\text{PDRB ADHK tahun } t - \text{PDRB ADHK tahun } t-1) \div \text{PDRB ADHK tahun } t-1) \times 100\%$	BPS
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71	3,05	2,87	2,87-3,13	Persentase Angkatan kerja yang tidak bekerja	$(\text{Jumlah Pengangguran} \div \text{Angkatan Kerja}) \times 100$	BPS
4.	Pengeluaran perkapita	Rp Juta	11.634	13.789	14.621	14.621			
5.	Tingkat Kemiskinan	%	10,97	10,66 - 9,76	10,35	9,33 – 9,95	Persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan.	$(\text{Jumlah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan} \div \text{Jumlah Penduduk}) \times 100$	BPS
6.	SAKIP	Skor	62,55	62,61	62,66	62,66	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	$\text{Nilai SAKIP} = \sum \text{Nilai setiap komponen evaluasi}$	KemenPAN RB
7.	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	Skor	64,57	81,51	81,92	81,92	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil indeks dimensi.	Kemendagri
8.	Indeks Inovasi Daerah	Skor	49,34	50,44	45,18	52,63	Indeks Inovasi Daerah merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat		BRIN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2025	Asumsi Capaian 2026	Target RPJMD Tahun 2027	Target Tahun 2027	Defenisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							kematangan inovasi pemerintah daerah	$SID = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i^{100} \times Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i) \times Inovasi\ ke\ j}{MAX(10, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ Keterangan: n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi Penghitungan Indeks Inovasi Daerah $Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100$	
9.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,86	75,05	74,8	75,62	Ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	BPS
10.	Indeks Ekonomi Hijau	Skor	Belum Rilis	50,66	51,41	51,41	alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat	Indeks ini terdiri dari 15 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
11.	Indeks Ekonomi Biru	Skor	Belum Rilis	111,98	122,82	122,82	instrumen pengukur komposit untuk memantau keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis kelautan	Indikator komposit yang dihitung mencakup 44 indikator dari 3 pilar utama: ekonomi (33%), lingkungan (37%), dan sosial (31%)	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
12.	Produktivitas Pertanian	Ton/ha	6,2	7	7,8	7,8	Ukuran kinerja sektor pertanian yang menunjukkan kemampuan lahan, tenaga kerja, atau faktor produksi lainnya dalam menghasilkan output pertanian dalam periode tertentu.	$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Produksi}}{\text{Luas Panen}}$	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
13.	Produktivitas Perikanan Budidaya	(Ton/ha)	10,02	10,36	11,05	11,05	Produktivitas Perikanan Budidaya adalah tingkat kemampuan kegiatan budidaya perikanan dalam	$\text{Produktivitas Perikanan Budidaya} = \frac{\text{Total Produksi Perikanan Budidaya (ton)}}{\text{Luas Areal Budidaya (ha)}}$	Urusan Pemerintahan Bidang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2025	Asumsi Capaian 2026	Target RPJMD Tahun 2027	Target Tahun 2027	Defenisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							menghasilkan produksi ikan atau komoditas budidaya per satuan luas lahan		Kelautan dan Perikanan
14.	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	71,45	83,05	83,61	83,61	Nilai indeks yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu	indeks komposit yang mengukur tingkat ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah	Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan
15.	Tingkat Konektivitas Wilayah	%	Belum Rilis	14,98	15,14	15,14	ukuran yang menunjukkan seberapa baik tingkat keterhubungan antar wilayah dalam suatu jaringan transportasi atau infrastruktur	(Jumlah wilayah yang memiliki akses jalan ÷ Jumlah seluruh wilayah) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
16.	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	%	10,15	10,75	10,89	10,89	Luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi	(Luas Lahan Irigasi yang Terlayani / Total Luas Lahan Irigasi) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
17.	Persentase desa mandiri	%	17,87	21,74	24,15	24,15	Jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri dalam suatu wilayah, dibandingkan dengan total desa	(Jumlah desa Mandiri ÷ Jumlah Total Desa) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca	%	Belum Rilis	23,22	25,92	25,92	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) didapatkan melalui perhitungan selisih antara intensitas emisi GRK dan intensitas emisi GRK baseline kemudian dibagi	%IEt=(IEt-IEBt)IEBt	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2025	Asumsi Capaian 2026	Target RPJMD Tahun 2027	Target Tahun 2027	Defenisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							dengan intensitas emisi GRK baseline pada tahun tertentu		
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	81,98	82,00	76,96	82,02	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut	$IKLH=(0.340\times IKA)+(0.428\times IKU)+(0.133\times IKL)+(0.999\times IKAL)$	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Sumber Data : BPS dan Hasil Olah Data Tim RKPD 2027

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah (IKD) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tersebut sangat bergantung kepada data dan informasi yang diolah sehingga dapat dibandingkan antara target yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Indikator Kinerja ini juga diperlukan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja tahun 2025 serta penetapan target indikator kinerja Kabupaten Luwu tahun 2026-2027 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 6.3
Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2027

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2025	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	ASPEL GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan				
	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	71,45	83,05	83,61
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,86	6,86	6,61
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,60	81,34	82,68
	Indeks pertanaman padi	Poin	185,00	208	228
	Proporsi sawah irigasi	%	10,15	10,75	10,89
	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	24.625,78	904,87	906,79
	Kapasitas Air Baku	M3/det	2,11	6,09	6,86
	Lingkungan Hidup Berkualitas				
	Akses air minum jaringan perpipaan	%	31,20	25,97	26,34
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	45,50	63,00	65,00
	Akses Rumah Tangga Terhadap air minum aman	%	22,25	31,00	34,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	81,98	82,00	82,02
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	4,96	8	8,5
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	37,81	17,10	18,20
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	13,80	24,04	27,32
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	10,00**	23,22	27,32
	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	1,50**	2,18	2,53
	Indeks Risiko Bencana	Poin	147.48	130	129,23
	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.39	0.40	0.43
	Demografi				
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,97	1	1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2025	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rasio Penduduk	%	101,84	127,68	127,68
	Kepadatan Penduduk	Org/km2	130,36	131	133
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	Kesejahteraan Ekonomi				
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7,43	7,75	8,77
	Tingkat Kemiskinan	%	10,97	10,66-9,76	9,33-9,95
	PDRB Per Kapita	Rp Juta	63,45	65,71	67,89
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71	3,05	2,87-3,13
	Indeks Gini	Angka	0,331	0,306	0,300
	Kesehatan Untuk Semua				
	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,86	75,05	75,62
	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,85	74,15	74,49
	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,58	0,62	0,73
	Prevalensi Stunting	%	6,2	6	5,8
	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	56,43	59	60
	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	4	3	2
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 ribu kelahiran hidup)	Per 100.000 kelahiran hidup	86,00	86,00	84,00
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	43,46	90,00	90,00
	Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment success rate)	%	89,00	90,00	90,00
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,00	95,00	95,00
	Pendidikan Berkualitas Yang Merata				
	Rata-Rata Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,96	9,07	9,16
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,44	14,54	14,72
	Angka Literasi	%	66,78	68,36	69,45
	Angka Numerasi	%	65,89	67,94	68,50
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	64,28	66,78	67,28
	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	15.86	19.00	20.50
	Persentase penduduk usia 15 ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%	93,98	99.35	100
	Perlindungan Sosial Yang Adaptif				
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	0.029	0.029	0.029
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	92.9	95.3	95.6
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor	75,00	76,00	78,00
	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah	%	100	100	100
	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,62 (Bertumbuh)	0,64	0,66

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2025	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	20,00	25,00	30,00
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif				
	Indeks Perlindungan Anak	Angka	54,47	55,00	56,00
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	67,50	71,50	74,00
	Indeks Pembangunan Gender	Poin	92,83	93	93,5
	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,530	0,520	0,510
	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	61,35	62,25	60,83
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
	Daya Saing Sumber Daya Manusia				
	Angka Ketergantungan	%	48,47	47,46	46,57
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas				
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,0478	0,057	0,071
	Rasio PDRB Akomodasi makan dan minum	%	0,84	0,84	0,85
	Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	Jiwa	132.183	134.000	134.500
	Jumlah industri ekonomi kreatif	Pelaku ekonomi kreatif	63	72	85
	Jumlah Industri kecil dan menengah	Pelaku industri	2.495	2.569	2.672
	Persentase Koperasi sehat di kabupaten	%	1,49	2,44	3,49
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,009	1,101	1,200
	Proporsi Individu yang menggunakan internet	%	72,31	73,865	80,014
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,74	68,78	68,92
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	51,72	56,71	57,12
	Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	1,80	1,92	2,05
	Indeks Inovasi Daerah	Skor	49,34 (Inovatif)	50,44	52,63
	Return On Aset (ROA) BUMD	%	-3,796	-6,177	1,560
	Produktivitas padi	Ton/ha	6,2	6,3	6,4
	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	%	0,37	0,57	0,68
	Jumlah produksi perikanan	Ton	685.228,95	685.898,80	693.443,69
	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	666.126,25	685.882,67	703.473,54
	Produktivitas budidaya perikanan tangkap	%	10,02	10,36	11,05
	Angka konsumsi ikan	%	57,50	58,53	59,70
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan online dan terintegrasi	%	64,05	80-89,9	90-100
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	24,56	26,31	28,07
	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru				
	Indeks Ekonomi Hijau	Skor	Belum Rilis	50,66	51,41
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Skor	Belum Rilis	111,98	122,82

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2025	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	37,29	38,12	38,19
	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-1,6	1,29	1,36
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia)	%	18,75	20,00	20,00
	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi	%	3,28	3,33	3,39
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	80,61	81,71	84,93
	Persentase desa mandiri	%	17,87	21,74	24,15
	Indeks Layanan Infrastruktur	%	2,64	2,90	3,02
	Stabilitas Ekonomi Makro				
	Tingkat Inflasi	%	1,55	2,5	2,5
	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,33	0,22	0,24
	Pertumbuhan Investasi daerah	%	118,44	135	150
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Skor	64,57	64.5779 (B)	64.5779 (B)
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,83	3,89	3,91
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegrasi dan Adaptif				
	Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,76	99,28	99,47
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,76	2,90	3,24
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,40	3,45	3,56
	Indeks Survei Penilaian Integritas	Angka	76,44	77,18	78,19
	Indeks Maturitas SPIP	%	3	3 (3,12)	3 (3,17)
	Monitoring Centre for Prevenstion (MCP) KPK	Nilai	53,10	58,00	65,00
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial				
	Persentase penegakan perda	%	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
	Persentase tindak kriminal yang ditangani	%	85,29	90,00	95,00
	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	%	11,43	11,43	11,43
	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	perda	2	4	4
	Persentase perempuan pengurus partai politik	%	30,00	30,00	30,00
	Persentase Capaian Aksi HAM	%	93,00	94,50	95,15
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				
	Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti	kerjasama	10	11	11

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2025	ASUMSI CAPAIAN TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,36	3,97	4,18
	Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota kembar/Bersaudara (sister Province/Sister City)	Kerjasama	10	11	11

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASLINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
1	PENDIDIKAN						
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	66.71	100	100	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah Anak usia 5 – 6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98.50	100	100	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah Anak usia 7 – 12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	%	96.51	100	100	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah Anak usia 13 – 15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15.62	100	100	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah Anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	KESEHATAN						
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0.1009	0.1009	0.1009	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	94.2	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	98.28	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	96.51	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Persentase balita mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	87.62	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98.81	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	96.78	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15 – 19 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15 – 59 tahun di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98.1	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah orang usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 60 tahun di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98.41	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98.78	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	99.55	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	94.65	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	%	87.52	100.00	100.00	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Rata-rata indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	%	95.77	100.00	100.00	$(\text{Jumlah indikator SPM yang tercapai} \div \text{Jumlah indikator SPM yang diukur}) \times 100$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar	%	95.80	96.00	96.50	$(\text{Jumlah puskesmas dengan formasi tenaga sesuai standar} \div \text{Total Pukesmas}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0.50	0.53	0.55	Mengukur distribusi SDM kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	%	100.00	100.00	100.00	$(\text{Jumlah sarana sediaan farmasi yang telah memiliki izin/izin yang dipenuhi} \div \text{Jumlah seluruh sarana sediaan farmasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	%	58.96	60.00	62.00	$(\text{Jumlah desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS} \div \text{Jumlah seluruh desa/kelurahan}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Akses Rumah Tangga Terhadap air minum aman	%	22.25	22.25	25.00	$(\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman} \div \text{Jumlah seluruh rumah tangga}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Indeks SPM	Indeks	95.77	96.00	96.50	Hasil penilaian penyelenggaraan SPM sesuai metode penghitungan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	%	90.79	91.00	91.50	$(\text{Jumlah SDM bidang kesehatan yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi} \div \text{Jumlah SDM bidang kesehatan yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase toko obat, apotek, alat Kesehatan, TPP, depot air minum yang berizin	%	76.00	80.00	88.00	$(\text{Jumlah toko obat, apotek, sarana alat kesehatan, TPP, dan depot air minum yang memiliki izin} \div \text{Jumlah seluruh toko obat, apotek, sarana alat kesehatan, TPP, dan depot air minum di kabupaten}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase status akreditasi fasilitas pelayanan Kesehatan minimal madya atau sederajat	%	100.00	100.00	100.00	$(\text{Jumlah fasilitas Kesehatan yang terakreditasi madya/sederajat} \div \text{Jumlah seluruh fasilitas Kesehatan}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
						Jumlah fasilitas Kesehatan kabupaten/kota)*100	
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	6.20	6.0	6.0	(Jumlah balita stunting ÷ Jumlah seluruh balita di Kabupaten) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	11.18	12.00	11.00	(Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu ÷ jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama) x1.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	86.00	86.00	84.00	(jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain ÷ kelahiran hidup) x 100.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	22.88	36.00	36.00	(jum	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase Prevalensi Stunting	%	22,06	20,63	19,29	(Jumlah balita stunting ÷ Jumlah seluruh balita di Kabupaten) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Ibu Hamil kurang energi kronik (KEK) atau ibu hamil Risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	%	84,00	85,00	86,00	(Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi : Jumlah seluruh ibu hamil KEK pada wilayah dan periode yang sama) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)/multivitamin & mineral supplementation (MMS) untuk ibu hamil minimal 180 tablet selama masa kehamilan	%	48,00	52,00	60,00	(Ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)/multivitamin & mineral supplementation (MMS) untuk ibu hamil minimal 180 tablet selama masa kehamilan : Jumlah Ibu Hamil) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam	%	84,00	85,00	86,00	$(\text{Jumlah Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam} : \text{Total Ibu Hamil}) \times 100$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Ibu hamil pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	%	80,00	82,00	85,00	$(\text{Jumlah Ibu hamil pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan} : \text{Total Ibu Hamil}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan dalam 42 hari pascapersalinan	%	34,10	60,00	65,00	$(\text{Jumlah peserta KB pascapersalinan} : \text{Jumlah sasaran ibu bersalin}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini	%	50,00	55,00	60,00	$(\text{Jumlah bayi baru lahir hidup yang mendapat IMD} \div \text{Jumlah seluruh bayi baru lahir hidup}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	%	73,00	76,00	79,00	$(\text{Jumlah bayi usia 0-5 bulan mendapat ASI eksklusif} \div \text{Jumlah bayi usia 0-5 bulan di Kabupaten/Kota}) \times 100$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)	%	73,00	76,00	79,00	$(\text{Jumlah anak usia 6-23 bulan yang mendapat MPASI} \div \text{Jumlah anak usia 6-23 bulan di Kabupaten/Kota}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI)	%	73,00	76,00	79,00	$(\text{Jumlah Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat (ASI)} \div \text{Jumlah anak usia 6-23 bulan di Kabupaten/Kota}) \times 100$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	%	91,00	92,00	93,00	$(\text{Jumlah anak dibawah 2 tahun yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk} \div \text{Jumlah anak 2 tahun yang gizi buruk}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	50,00	55,00	60,00	$\text{Jumlah anak usia dibawah 2 tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan} \div \text{Jumlah anak 2 tahun di Kabupaten/Kota}) \times 100\%$	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%	65,00	70,00	75,00	(Jumlah anak usia di bawah 2 tahun gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi ÷ Jumlah anak usia di bawah 2 tahun gizi kurang di Kabupaten/Kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Bayi di bawah usia dua tahun (baduta) yang memperoleh imunisasi rutin lengkap	%	84,90	80,00	80,00	(Jumlah bayi usia di bawah 2 tahun yang memperoleh imunisasi rutin lengkap ÷ Jumlah bayi usia di bawah 2 tahun di Kabupaten/Kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare	%	91,90	95,00	97,00	(Jumlah pemberian oralit dan zink sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan yang diare ÷ Jumlah anak usia 6-23 bulan yang diare di Kabupaten/Kota) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacangan pada anak usia 6-23 bulan (baduta)	%	95,00	97,00	98,00	(Jumlah anak usia 6-23 bulan yang diberikan obat pencegahan massal (POPM) cacangan ÷ Jumlah anak usia 6-23 bulan di Kabupaten/Kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	%	90,00	92,00	93,00	(Jumlah anak berusia di bawah 5 tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk ÷ Jumlah anak berusia dibawah 5 tahun (balita) gizi buruk di Kabupaten/Kota x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	50,00	55,00	60,00	(Jumlah anak berusia di bawah 5 tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan ÷ Jumlah anak usia di bawah 5 tahun (Balita) di Kabupaten/Kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi (gizi	%	65,00	70,00	75,00	(Jumlah Anak berusia di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi (gizi	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	kurang) yang mendapat tambahan asupan gizi					kurang) yang mendapat tambahan asupan gizi ÷ Jumlah balita gizi kurang di Kabupaten/Kota) x 100%	
	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare	%	91,90	95,00	97,00	(Jumlah anak diare usia 24 -59 bulan yang diberikan oralit dan zinc sesuai standar ÷ Jumlah anak diare usia 24-59 di Kabupaten/Kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Penemuan kasus pneumonia balita	%	40,00	50,00	60,00	(Jumlah balita penderita pneumonia ÷ Jumlah balita di Kabupaten/Kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada balita	%	95,00	97,00	97,00	(Jumlah balita yang mendapatkan obat pencegahan massal (POPM) cacingan ÷ Jumlah anak balita di Kabupaten/Kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)	%	65,00	67,00	70,00	(Jumlah remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) ÷ Jumlah remaja putri di Kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Remaja putri yang diskriminasi anemia	%	75,00	77,00	80,00	(Jumlah remaja putri yang diskriminasi anemia ÷ Jumlah remaja putri di Kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	%	50,00	55,00	65,00	(Jumlah calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan Kesehatan ÷ Jumlah calon pengantin di kabupaten/kota kurun waktu tertentu) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	91,00	92,00	93,00	(Jumlah Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting ÷ Jumlah calon	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
						pengantin di kabupaten/kota kurun waktu tertentu) x 100%	
	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	%	28,00	31,00	43,00	(Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman ÷ Jumlah rumah tangga di kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	%	11,20	12,30	14,50	(Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman ÷ Jumlah rumah tangga di kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional	%	91,00	92,00	95,00	(Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta aktif JKN ÷ Jumlah seluruh penduduk) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	10.89	10,90	11,00	(Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) ÷ Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/kota (Ha)) x 10	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Rasio luas Kawasan permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	13.78	13,78	13,80	(Luas Kawasan permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai di WS kewenangan Kab/Kota (m) ÷ Luas Kawasan permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota (m) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	68.17	68.77	69.07	(Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting ÷ Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ Kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalu SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	81.08	81.82	81.93	(Jumlah kumulatif Masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota ÷ Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	75.99	76.00	76.02	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ÷ Jumlah rumah di Kabupaten A) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	1	1	1	(Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ÷ Jumlah IMB yang berlaku) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	%	31.80	33.64	34.17	(Jumlah Panjang jalan dalam kondisi mantap ÷ Jumlah total Panjang jalan kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	98.33	47.76	62.69	(Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ÷ Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	na	na	Na	(Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi ÷ Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,96	5,00	5,05	(Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman ÷ Jumlah rumah tangga di Kabupaten/Kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.	%	100	100	100	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ÷ Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Fasilitasi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.	%	0	0	0	(Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ÷ Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	2,10	4.78	5.02	(Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ÷ Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha) x 100 %	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10.75	10,16	9.92	(Jumlah unit rumah tidak layak huni ÷ Jumlah total unit rumah kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	7.60	13.55	19.53	(Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ÷ Jumlah unit rumah kab/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	(Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ÷ Jumlah	URUSAN PEMERINTAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
						keseluruhan perda dan perkara yang memuat sanksi) x 100	N BIDANG KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGA N MASYARAKAT
	Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	(Jumlah pengaduan yang ditangani ÷ Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk) x 100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGA N MASYARAKAT
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	91.751	93.001	93.851	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	92.882	93.001	93.001	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	orang	1,512	1,512	4,321	Jumlah warge negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	64,70	100	100	(Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam Tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan/perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam Tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan/perangkat daerah ÷ Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	(Jumlah warga negara yang menerima informasi rawan bencana ÷ Jumlah warga negara di Kabupaten/Kota) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
	Persentase warga negara memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	100	100	100	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ÷ Jumlah warga negara di kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
						peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Umum Dan Perlindungan Masyarakat
6.	SOSIAL						
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	89,30	100	100	(Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ÷ Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlandar dan gelandangan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.	%	100	100	100	(Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ÷ Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
1.	TENAGA KERJA						
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	%	46.15	60.00	70.00	(Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ÷ Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	20	54.64	55.35	(Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ÷ Jumlah tenaga kerja keseluruhan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.Juta/Pekerja	60.84	65.11	65.7	(PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ÷ Jumlah tenaga kerja) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	16.51	35.1	40.06	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak ÷ Jumlah Perusahaan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	%	22.94	22.38	23.44	(Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ÷ Jumlah pencaker yang terdaftar) x 10%	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	%	0	0	0	(Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian ÷ Jumlah tenaga kerja keseluruhan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Pekerja Informal	%	66.49	62.2	61.55	(Jumlah pekerja di sektor informal ÷ Jumlah total penduduk bekerja) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0.001	1	1	(Jumlah penyandang disabilitas bekerja di sektor formal ÷ Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	20	25	30	(Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ÷ Jumlah seluruh belanja langsung APBD) x100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,04	0,02	0,01	(Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi Tingkat kabupaten/kota yang didampingi ÷ Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	0.005	0.004	0.002	(Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan ÷ Jumlah penduduk Perempuan) x 100.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3.	PANGAN						
	Persentase Cadangan pangan terhadap kebutuhan Cadangan pangan	%	49,52	57	59	(Jumlah Cadangan pangan ÷ Jumlah kebutuhan pangan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan	%	0,00	70,00	75,00	(Jumlah KK yang aktif mengelola pekarangan ÷ Jumlah KK dalam Kabupaten/Kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
4.	PERTANAHAN						
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	N.A	N.A	N.A	(Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi÷ seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	%	N.A	N.A	N.A	(Jumlah penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum ÷ Jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	N.A	N.A	N.A	(Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya ÷ Luas izin lokasi yang diterbitkan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	23.949.41	23.949.41	(Jumlah penerima obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha ÷ Jumlah penerima tanah objek landreform) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	N.A	N.A	N.A	(Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ÷ Luas izin membuka tanah yang diterbitkan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	40	100	100	(Jumlah sengketa tanah Garapan yang ditangani ÷ Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
5	LINGKUNGAN HIDUP						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Skor Indeks	81,98	82,00	82,02	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.999 \times IKAL)$	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	%	100	83.33	100	(Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggtar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota ÷ usaha dan/atau	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
						kegiatan dilakukan pemeriksaan) x 100%	
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	37.81	37.81	37.81	(Total volume sampah yang dapat ditangani ÷ Total volume timbunan sampah Kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	98	98,90	98,95	(Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ÷ Jumlah penduduk 17 tahun ke atas) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	38,36	34,50	35	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ÷ Jumlah anak usia 0-17 tahun) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	98,4	97,45	97,50	(Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ÷ Jumlah anak usia 0-18 tahun) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	2,86	5,71	8,57	(Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ÷ Jumlah OPD) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
							dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	96,51	97,45	97,50		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	45,02	47	64	(Jumlah pasangan bercerai yang memiliki akta cerai ÷ Jumlah keseluruhan pasangan bercerai) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	%	49,14	50	55	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akta nikah ÷ Jumlah keseluruhan pasangan menikah) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	(Jumlah akta kematian yang diterbitkan ÷ Jumlah total kematian yang dilaporkan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diterbitkan	%	96,14	97,00	98,00	(Jumlah Akta kelahiran dan KIA yang diterbitkan ÷ Jumlah total anak usia 0-18 tahun) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	18,35	12,08	4,83	(Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa membangun per tahun ÷ Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	17,87	21,74	24,15	(Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangunan per tahun ÷ Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,33	2,33	2,2		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	%	61,77	69	70	(Jumlah peserta KB aktif modern ÷ Jumlah pasangan usia subur) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,77	6,00	5,00	(Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ÷ Jumlah pasangan usia subur) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Angka	19,4	15	10		Urusan Pemerintahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
							Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	%	77,7	78,10	79,18		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Indeks	67,5	73,00	79,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	70,49	70,89	71,18		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	%	60,66	60,78	60,97		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	%	96,00	97,00	98,00		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
9.	PERHUBUNGAN						
	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,63	0,63	0,65	(Rasio konektivitas kabupaten atau kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan Sungai, danau dan penyebarangan)	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Unit/Smp/Jam	0,52	0,57	0,61	(V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota)	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	24.56	26.31	28.07	(Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ÷ Jumlah OPD) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	64,05	80–89,9	90–100	(Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ÷ Jumlah layanan public) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	60	60	70	(Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ÷ Jumlah penduduk) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	6,23	7,22	7,98	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ÷ Jumlah seluruh koperasi) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	10	11,47	12,44	(Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ÷ Jumlah usaha mikro keseluruhan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12.	PENANAMAN MODAL						
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	118,44	135,00	150,00	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota ÷ Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	3,07	3,09	3,12	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi ÷ Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kepedmudaan dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3,80	3,90	4,01	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota ÷ jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kepedmudaan dan Olahraga
	Persentase Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event	%	63	30	15	(Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	Urusan Pemerintahan Bidang Kepedmudaan dan Olahraga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	olahraga nasional dan internasional)						
14.	STATISTIK						
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	%	100	100	100	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan daerah ÷ Jumlah OPD) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukakn evaluasi pembangunan daerah.	%	100	100	100	(Jumlah OPD yang menggunaka data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah ÷ Jumlah OPD) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
15.	PERSANDIAN						
	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	Belum Dilakukan Penilaian Indeks KAMI	Dalam Perencanaan Untuk dilakukan Penilaian Indeks KAMI	Assesmen Hasil Penilaian Indeks KAMI	(Jumlah nilai per area keamanan informasi ÷ Jumlah area penilaian) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
16.	KEBUDAYAAN						
	Terlestarikannya cagar budaya	%	20	25	30	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ÷ Jumlah cagar budaya yang terdata) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
17.	PERPUSTAKAAN						
	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	60,41	68,21	68,21		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	5,53	6,00	6,5		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
18.	KEARSIPAN						
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100	100	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
						g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	
C.	LAYANAN URUSAN PILIHAN						
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.1	Jumlah Total Produksi perikanan	ton	685.228,95	685.898,80	693.443,69	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan budidaya) Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
2.	PARIWISATA						
2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-0.43	0.05	0,05	(Jumlah wisatawan tahun n-Jumlah wisatawan tahun n-1) ÷ Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	0,55	10	15	(jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ÷ Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
2.3	Tingkat hunian akomodasi	%	0,39	0,40	0,45	(Jumlah kamar yang terjual ÷ Jumlah kamar yang tersedia) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
2.4	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,84	0,84	0,85	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
2.5	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	0	0	0	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3.	PERTANIAN						
3.1	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Ton/ha	6,2	7	7,8	(Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ÷ Luas Panen) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-223,36	11,20	11,40	(Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan(t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ÷ Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
6.	PERDAGANGAN						
6.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat	%	98,95	100	100	(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ÷	Urusan Pemerintahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)					Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota) x 100%	Bidang Perdagangan
6.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	67.05	99.00	99.00	(Realisasi ÷ RDKK) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
6.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	85,25	100	100	(Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ÷ Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
7.	PERINDUSTRIAN						
7.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	51,4	60,23	63,92	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industry kecil dan menengah tahun n-1 ÷ Jumlah industry kecil dan menengah tahun n-1) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
7.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	100	100		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
7.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	3	4,5	4,89	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ÷ Jumlah izin yang dikeluarkan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
7.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	N.A	N.A	N.A	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ÷ Jumlah izin yang dikeluarkan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
7.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten .	%	N.A	N.A	N.A	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ÷ Jumlah izin yang dikeluarkan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
7.6	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	%	85	90	100		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
8.	TRANSMIGRASI						
8.1	Persentase Cadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	46.15	60.00	70.00		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
8.2	Persentase luas Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	20	54.64	55.35		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
8.3	Transmigran swakarsa	KK	60.84	65.11	65.7		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
8.4	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	16.51	35.1	40.06		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
8.5	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	22.94	22.38	23.44		Urusan Pemerintahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
							Bidang Transmigrasi
8.6	Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	0	0	0		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
D.	PENUNJANG URUSAN						
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
1.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	11.41	11.41	11.41	(Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga Kesehatan ÷ Jumlah APBD) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
1.2	Rasio PAD	%	0.15	0.14	0.15	(Jumlah PAD ÷ JUmlah APBD Non Migas) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
1.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	Level 3	Level 3 (3,12)	Level 3 (3,12)	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/ level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Urusan Pemerintahan Bidang APIP
1.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	Level 3	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,10)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Urusan Pemerintahan Bidang APIP
1.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	84.97	84.97	84.97	(Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures ÷ Jumlah belanja APBD) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
1.6	Opini Laporan Keuangan	%	WTP	WTP	WTP	Opini Laporan Keuangan	Urusan Pemerintahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
							Bidang Keuangan
2	PENGADAAN						
2.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	(Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ÷ Jumlah kontrak keseluruhan tahun n) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan
2.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	3,07	10.38	10.38	(Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ÷ Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan
2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	44,67	44.67	44.67	(Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ÷ Total belanja langsung) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan
3	KEPEGAWAIAN						
3.1	Rasio Pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5.07	5	5.1	(Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ÷ Jumlah pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
3.2	Rasio pegawai fungsional (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0.24	0.3	0.4	(Jumlah pegawai PNS fungsioanl (diluar guru dan tenaga Kesehatan) ÷ seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
3.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1	1	1	(Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ÷	Urusan Pemerintahan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASLINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
						seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) x 100%	Bidang Kepegawaian
4	MANAJEMEN KEUANGAN						
4.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	93.49	93.49	93.49	(Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi ÷ Total belanja APBD dikurangi satu) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
4.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1.34	0.96	0.96	(Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi ÷ Total PAD dalam APBD dikurangi satu) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
4.3	Manajemen Asset	Data	Tersedia	Tersedia	Tersedia	1. Apakah ada daftar asset tetap (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran ? (Ya/Tidak)	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
4.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3.47	0	0	(Nilai realisasi SiLPA ÷ Total belanja anggaran tahun sebelumnya) x 100	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI						
5.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	(Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website	Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	BASELINE 2025	ASUMSI CAPAIAN 2026	TARGET 2027	METODE PENGUKURAN	SUMBER DATA
						Pemda ÷ Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda) x 100	
5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	(jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ÷ Total Jumlah dokumen yang telah dirinci) x 100%	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Sumber : BPS, RPJMD 2025-2029, Hasil Olah data Tahun 2026

Data yang tertuang dalam tabel diatas bersumber dari data BPS dan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, merupakan Gambaran kondisi tahun 2025 dan menjadi baseline perencanaan, perkiraan capaian tahun 2026 yang diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2026, serta target tahun 2027 yang diturunkan dari RPJMD tahun berkenaan

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai Tingkat pencapaian pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada Masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) berfokus pada pelayanan dasar di enam urusan wajib, yaitu :

- 1. Pendidikan;
- 2. Kesehatan;
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5. Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 6. Sosial.

Adapun penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.4
Capaian dan Target Kinerja SPM Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2027

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Perkiraan Target	Target
					2026	2027
1.	PENDIDIKAN					
1.1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	66.71	100	100
		Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/ MTs)	%	99.39	100	100
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15.62	100	100
1.2	Pendidikan Dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	73.93	75,56	100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Perkiraan Target	Target
					2026	2027
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	73.07	76,63	100
		Indeks iklim keamanan di satuan pendidikan	Angka	78.98	100	100
		Indeks iklim kebinekaan di satuan pendidikan	Angka	73.17	75,16	100
		Indeks iklim inklusivitas di satuan pendidikan	Angka	61.17	100	100
1.3	Pendidikan Menengah Pertama	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Angka	57.25	60,10	100
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Angka	56.68	57,80	100
		Indeks iklim keamanan di satuan pendidikan	Angka	70.20	73,20	100
		Indeks iklim kebinekaan di satuan pendidikan	Angka	71.90	74,00	100
		Indeks iklim inklusivitas di satuan pendidikan	Angka	56.88	60,20	100
1.4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	61.17	18,10	100
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	53.06	100	100
1.5	Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	61.78	62,61	100
1.6	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D4	%	62.66	68,48	100
1.7	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	39.12	85,20	100
2.	KESEHATAN					
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	94.20	100	100
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	98.28	100	100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Perkiraan Target	Target
					2026	2027
2.3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	96.51	100	100
2.4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	87.62	100	100
2.5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	98.81	100	100
2.6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	96.78	100	100
2.7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	98.10	100	100
2.8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	98.41	100	100
2.9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	98.78	100	100
2.10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99.55	100	100
2.11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	94.65	100	100
2.12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefeciency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefeciency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	87.52	100	100
3	PEKERJAAN UMUM					
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81.08	100	100
3.2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelohan air limbah domestic	%	75.99	100	100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Perkiraan Target	Target
					2026	2027
4.	PERUMAHAN RAKYAT					
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	%	0	100	100
5	TRANTIBUNLINMAS					
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/kota	%	96,57	100	100
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
5.5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	64,70	100	100
6	SOSIAL					
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Jumlah warga negara gelandangan dan	%	80,33	100	100

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Perkiraan Target	Target
					2026	2027
	khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti				
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tangga darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100

Sumber : OPD Pengelola SPM Kabupaten Luwu

6.5 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian terhadap 17 tujuan global pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini telah berupaya menunjang keberhasilan pelaksanaan pencapaian TPB yang menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan kedepan.Kondisi Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap indikator TPB tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.5
Capaian, Proyeksi dan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
Tujuan SDGs 01 :	MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					
Target 1.1 :	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari					
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	BPS	%	0,71	0,47	0,36
Target 1.2 :	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	10,97	10,46	10,35
Target 1.3 :	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan					
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	BPJS Kesehatan	%	92.65	94.68	96.71

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS/TN2K: Basis Data Terpadu, BPJS Kesehatan	%	88,28	95	100
1.3.1.(b)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan, BPS : Sakernas	%	92.90	95.30	95.60
Target 1.4 :	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro					
1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	BPS : Susenas	%	81,08 75,99	81,82 76	81,93 76,02
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	BPS : Sensus Penduduk, Susenas	%	N.A	N.A	N.A
Target 1.5 :	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000 Orang	14.451	4.715	3.400
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	BPBD	%	40	50	50
Tujuan SDGs 02 :	MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN					
Target 2.1 :	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun					
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	%	4,86	4,81	6,61
Target 2.2 :	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula					
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN	%	23,6	6.20	6.00
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN	%	8,40	1.90	1.80

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Skor	90,6	90,9	91,2
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	19,7	19	17
Target 2.4 :	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.					
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	%	55,25	64,41	64,41
Target 2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.					
Target 2.c	Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim					
Tujuan SDGs 03 :	MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA					
Target 3.1 :	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	DINAS KESEHATAN	Per 100.000 HK	86,00	86,00	84,00
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN /BPS	%	56.43	58.00	59.00
Target 3.2 :	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.					
	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	11.61	12	11
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	11.18	12	11
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 Kelahiran Hidup	DINAS KESEHATAN	Per 1000 KH	9.24	9	8
Target 3.3 :	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data		Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
3.3.2*	Insidens Tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk	DINAS KESEHATAN		Per 1000 penduduk	765	700	231
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	DINAS KESEHATAN		Per 1000 penduduk	0.31	0.3	0.27
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN		Per 100.000 Penduduk	0.69	0.65	0.6
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.						
	(a)	Filariasis	DINAS KESEHATAN	%	0	0	0
	(b)	Kusta	DINAS KESEHATAN	%	22	22	23
Target 3.4.1.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan						
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pemapasan kronis	BPJS Kesehatan		%	N.A	N.A	N.A
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	DINAS KESEHATAN		%	2.41	2.35	2.3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINAS KESEHATAN	%	30.52	30.12	29
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	30.54	30	29
Target 3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional					
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	%	2,33	2,25	2,2
Target 3.8 :	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang					
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial.	DINAS KESEHATAN	%	NA	NA	NA
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	DINAS KESEHATAN / BPS : Susenas	%	NA	NA	NA
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	%	88,28	95	95
Target 3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil					
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	DINAS KESEHATAN	rasio	72.239	74.866	77.493

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
Tujuan SDGs 04 :	MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA					
Target 4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif					
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	99,97 100	98,95 98,95	98,98 98,98
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; 13-15 tahun; usia 16-18 tahun	DINAS PENDIDIKAN	%	0,06 -	0 0	0 0
Target 4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan					
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DINAS PENDIDIKAN/ BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A
Target 4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan					
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	BPS	%			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator		Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
	1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat	DINAS PENDIDIKAN	%	92,18	100	100
	2	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat	DINAS PENDIDIKAN/ BPS : Susenas	%	80,92	100	100
Target 4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		DINAS PENDIDIKAN/ BPS : Susenas	%	96,87	100	100
Tujuan SDGs 05 :	MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN						
Target 5.5	.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.		DINAS P3A	%	11.43	11.43	30
Target 5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut						
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi		DINAS P3A	Adda/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
Target 5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan,khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan					
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	BPS : Susenas	%	N.A	N.A	N.A
Tujuan SDGs 06 :	MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA					
Target 6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua					
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	DINAS KESEHATAN	%	22.25	22.25	25
Target 6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan					
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.	PUTR	%	4.96	5	5
Target 6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		NA	NA	NA
Target 6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air					
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya .	PUTR	litr/dtk	1.5	1.5	1.5
Tujuan SDGs 07 :	MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA					
Target 7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern					
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	PLN	%	90.08	92,56	93,84
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	ESDM	%	N.A	N.A	N.A
Tujuan SDGs 08 :	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA					
Target 8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	%	6,24	6,96	5,23
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	Juta	63,45	65,71	67,89
Target 8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya					
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS/DINAS TENAGA KERJA	%	60.84	65.11	65.7
Target 8.5 :	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya					
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA	Rp	22,800	20,355	20,645
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS	%	3,71	3,05	2,87-3,13
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%	7.07	6,75	6,20
Target 8.6 :	Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah.					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator		Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).		DINAS TENAGA KERJA	%	10,38	9,45	8,79
Target 8.9 :	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal						
8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara		Dinas Pariwisata	Orang	17	20	25
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara		Dinas Pariwisata	Orang	132.166	134.000	134.300
Tujuan SDGs 09 :	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI						
Target 9.1 :	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua						
9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional		PUTR	%	98	98	98
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Orang/Ton			
	1	Angkutan Udara (Pesawat)					
		Jumlah Penumpang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Orang	28,793	30.000	33.000
		Jumlah Barang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Ton	168,7	181	195

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator		Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
	2	Angkutan Umum (Mobil)					
		Jumlah Penumpang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Orang	241,558	255000	275000
		Jumlah Barang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Ton	393,3	417	430
9.1.2(a)	Jumlah Bandara		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Unit	1	1	1
9.1.2(b)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Unit	0	0	0
Target 9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan		BPS	%	32,39	34,89	35,67
Target 9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan						
9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.		BAPPELITBANGDA	%	0,019	0,010	0,008
Tujuan SDGs 10 :	MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
Target 10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional					
10.1.1.(a)	Rasio Gini	BPS	Angka	0,331	0,306	0,300
10.1.1 (b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	11,71	10,55	10,46
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa	38	25	10
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa	37	45	70
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BAPPELITBANGDA	%			
Target 10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.					
10.2.1.*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	BPS/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	%	55,39	57	54

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
Target 10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.					
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kebijakan	0	0	0
Target 10.4 :	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar					
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	%	81.78	78.76	79.24
Tujuan SDGs 11 :	MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
Target 11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.					
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	DINAS PERKIM/VBPS	%	80.61	81.71	84.93
Target 11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara					
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	BIGPUTR	%	1.7	1.7	1.7
Target 11.5 :	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
11.5.1*.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Org	14.451	4.715	3.400
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	BPBD	%	11,19	16,17	17,18
Target 11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.					
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	%	70	80	90
11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	%	70	80	90
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS	80.41	80.71	81.01
Target 11.b :	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.					
Tujuan SDGs 12 :	MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN					
Target 12.3	Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen.					
12.3.1.(a)	Persentase penurunan susut dan sisa pangan (<i>food loss and waste</i>)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	%	NA	NA	NA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
Target 12.4	Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.					
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	%	NA	NA	NA
Target 12.5 :	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.					
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Ton	244,93	438	682,93
Target 12.6 :	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.					
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Usaha	NA	NA	NA
Target 12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.					
12.8.1. (a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan	NA	NA	NA
Target 12.b	Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism development</i>).	Dinas Pariwisata	Destinasi	2	2	2
Tujuan SDGs 13 :	MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA					
Target 13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara					
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BPBD	per 100.000 orang	14.451	4.715	3.400
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	%	40	50	50
Target 13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional					
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	BAPPELITBANGDA	Ton co2 eq			
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	BAPPELITBANGDA	Ton co2 eq	1.341.279,21	1.345.279,21	1.350.591,38
13.2.2.(b)	Persentase potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	BAPPELITBANGDA	%	10	14,82	15
Tujuan SDGs 14 :	MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
Tujuan SDGs 15 :	MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
Tujuan SDGs 16 :	MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN					
Target 16.1 :	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.					
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES LUWU	Kasus	3	2	2
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES LUWU	Org	0	0	0
Target 16.2 :	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.					
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK/POLRES LUWU	%	0	0	0
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK/POLRES LUWU	%	0.42	0.35	0.3
Target 16.3 :	Menggalkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.					
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia, BPHN	%	N.A	N.A	N.A

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	Kejaksaan Luwu	%	N.A	N.A	N.A
Target 16.6 :	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.					
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD	%	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B	Bag. Organisasi SETDA	%	62,03 (B)	64,00 (B)	66,00 (B)
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B	Bag. Organisasi SETDA	%	63,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (BB)
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Diskominfo	Instansi	14	15	17
Target 16.7 :	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.					
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK/SETWAN	%	14,28	14,28	14,28

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan Eselon II)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK/BKPSDM	%	12	15	17
Target 16.9 :	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Disdukcapil	%	96,14	97,45	97,50
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Disdukcapil	%	N.A	N.A	N.A
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	Disdukcapil	%	98,4	93,30	93,35
Target 16.10 :	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.					
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	DISKOMINFO	%	40	42,85	48,57
Target 16.b :	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.					
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kebijakan	0	0	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2027

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
Tujuan SDGs 17	MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
Target 17.1 :	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BAPENDA/BPS	%	6.15	6.71	6.73
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BAPENDA/BPS	%	0.33	0.22	0.24
Target 17.8 :	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi					
17.8.1*	Persentase pengguna internet	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	67.01	67.48	67,57
Target 17.17 :	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.					
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	DPMPSTSP	Dokumen	1	2	3
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	DPMPSTSP	Proyek	1	1	2
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	DPMPSTSP	Rp	0	1.000.000.000	2.000.000.000

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Target 2027
Target 17.19 :	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Disdukcapil	Tersedia / Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber : BPS, OPD Pengampu TPB/SDGs Kabupaten Luwu dan Tim Penyusun RKPD.

Tabel di atas menunjukkan target dan capaian masing-masing indikator TPB yang diperoleh dari BPS maupun perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab pencapaian indikator sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan data yang dimuat tersebut, diketahui bahwa masih terdapat indikator yang belum mencapai target sesuai yang ditetapkan. Hal ini menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan dimasa depan, khususnya program/kegiatan yang terkait langsung dengan indikator.

Prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2027 sendiri, disusun dengan mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Seluruh prioritas pembangunan diarahkan untuk mendukung pencapaian target nasional maupun daerah melalui penguatan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara terpadu.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan (TPB/SDGs Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan), Pemerintah Kabupaten Luwu memprioritaskan peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pemberian beasiswa Pendidikan tinggi bagi Masyarakat tidak mampu dan berprestasi, BPJS ketenagakerjaan kelompok rentan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada aspek peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan (TPB/SDGs Tujuan 3 : Kehidupan sehat dan Sejahtera serta Tujuan 4. Menjamin Pendidikan Berkualitas), arah pembangunan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan melalui program prioritas yakni pembangunan rumah sakit tipe D di wilayah walmas, layanan mobil ambulance/jenazah gratis, peningkatan layanan (rawat inap) pada puskesmas, layanan Kesehatan care dan call doctor, pencegahan dan penanggulangan Risiko stunting, meningkatkan Kesehatan anak dan Ibu serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan. Dibidang Pendidikan, program prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, pemerataan akses Pendidikan serta penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (TPB/SDGs Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua), Pemerintah Kabupaten Luwu mendorong transformasi ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui peningkatan produksi pangan khususnya padi dari IP200 menjadi IP300, pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi, pengembangan petani muda milenial, pengembangan daya guna penyuluh pertanian, pengadaan bibit perkebunan dan hortikultura, mendorong industri kreatif masyarakat, pengembangan objek wisata berbasis agroekologi, penguatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, fasilitasi pengiriman tenaga kerja keluar negeri.

Selanjutnya, pada aspek kelestarian hidup (TPB/SDGs Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 13 dan Tujuan 15), program prioritas Pemerintah Kabupaten Luwu yang mendukung hal tersebut diantaranya adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan melalui pemanfaatan TPA Tallang Bulawang, pembangunan TPA Tanjong dan persiapan Pengembangan TPST di Wilayah Walenrang Lamasi, pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir, pengelolaan sumber daya air, penanganan mitigasi bencana melalui pengadaan excavator amfibi dan desa tangguh bencana, peningkatan layanan persampahan perkotaan serta pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2027 diimplementasikan dengan:

1. Tetap memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027;
3. Melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Kabuapten Luwu dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.

Dokumen RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027 berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing PD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing PD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan PD pada posisi strategis, dimana PD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian PD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing PD agar menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027.
2. PD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2027 dengan sebaik baiknya. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
3. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-

- hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Pada akhir tahun anggaran 2027, setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya;
 5. **Konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan;** seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dengan prioritas, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD serta terintegrasi dengan Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, dan APBD guna menjamin kesinambungan proses perencanaan dan penganggaran;
 6. **Fleksibilitas dan adaptasi kebijakan;** dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian, baik yang berasal dari kondisi ekonomi global, kebijakan nasional, maupun perkembangan daerah, pelaksanaan RKPD harus tetap adaptif. Penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terukur tanpa mengurangi konsistensi terhadap arah dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan
 7. **Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan;** hasil evaluasi pelaksanaan RKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan dan penyempurnaan perencanaan pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya, sehingga tercipta siklus perencanaan yang berkelanjutan dan adaptif.

7.2 Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2027 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2027.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kab. Luwu Tahun 2025-2029 yaitu: **“Penguatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola, dengan infrastruktur wilayah yang merata”** sehingga program kegiatan di masing-masing PD mengarah pada

- pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Kabupaten Luwu 2027, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun sumber dana lainnya.
 5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING